BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2025

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan serta berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, dapat dilakukan melalui perubahan rencana kerja perangkat daerah;

b. bahwa perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimaksud digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 205);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 20025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 207);
11. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 11 September 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU MUHAMAD IQBAL

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 11 September 2025

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU M. FAOZAL

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135

PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT



PERUBAHAN RENCANA KERJA T.A. 2025

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

bpkad.ntbprov.go.id
bpkad_ntb
Jalan Pejanggik No. 14 Mataram

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Kuasa, karena atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Tahun 2025–2029 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2025–2029. Lebih lanjut, rencana kerja ini berfungsi sebagai penjabaran operasional serta tahapan pelaksanaan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 memuat informasi mengenai program kerja, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilengkapi dengan indikator hasil serta manfaat yang akan dilaksanakan. Sementara itu, capaian kinerja mencerminkan hasil pelaksanaan seluruh kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan sepanjang tahun 2025. Keseluruhan proses ini diarahkan untuk mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja tahun 2025.

Dengan demikian, diharapkan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 ini dapat menjadi acuan dalam melakukan evaluasi serta mendorong peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ke arah yang lebih optimal.

Mataram, 2025
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi NTB

Dr. H. Nursalim, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19731231 199402 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN **5**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 21

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **23**

3. 1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 23

3. 2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 24

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **26**

BAB IV PENUTUP **48**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Sampai Triwulan II. 7

Tabel 2.2 Pencapaian kinerja pelayanan BPKAD Tahun 2025 sesuai Renstra Tahun 2025-2029. 20

Tabel 3.1 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025. 25

Tabel 4.1 Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan pagu indikatif Perubahan Renja BPKAD Provinsi NTB Tahun 2025. 27

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) berfungsi sebagai pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang selaras dengan tugas pokok dan fungsinya, guna mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. Dengan perencanaan kerja yang terukur serta didukung alokasi pendanaan yang memadai, Renja PD menjadi instrumen strategis sekaligus indikator dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang lebih terarah dan terencana.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program serta kegiatan operasional yang direncanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat guna mendukung pencapaian tujuan. Penyusunan Renja PD bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dan telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) BPKAD Provinsi NTB Tahun 2025-2029. Rencana Kerja (Renja) menjabarkan secara lebih rinci arah kebijakan dan sasaran strategis, serta berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengendalian dan evaluasi kinerja tahunan perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Selanjutnya sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Provinsi NTB Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025, maka BPKAD Provinsi NTB menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB Tahun 2025-2029 dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat daerah sampai dengan Triwulan II.

Melalui penyusunan ini, diharapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah BPKAD Provinsi NTB Tahun 2025 yang telah disusun mampu mendukung pencapaian sasaran dan prioritas BPKAD Provinsi NTB, sekaligus menjamin terciptanya perencanaan pembangunan daerah Provinsi NTB Tahun 2025 yang efektif dan efisien. Dengan demikian, implementasi rencana kerja ini tidak hanya menjadi pedoman operasional, tetapi juga

memastikan optimalisasi sumber daya dan sinergi antar perangkat daerah, sehingga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan wilayah secara menyeluruh.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6809);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
g. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
h. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi , Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
l. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 -2025;
m. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
n. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029;
o. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
p. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
q. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
r. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023;
s. Peraturan Gubernur Provinsi NTB Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024;
t. Peraturan Gubernur Provinsi NTB Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024;
u. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025;
v. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah BPKAD Tahun 2025 adalah untuk memberikan acuan dan pedoman dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama satu tahun, melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB Tahun 2025 adalah:

a. Memberikan informasi tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD Tahun 2025;
b. Mengevaluasi pelaksanaan Renja BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 sampai dengan triwulan II;
c. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
d. Menyelaraskan program dengan penganggaran; dan
e. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat disusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan susunan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat:

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat:

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat:

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat rencana kerja secara eksplisit yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra PD.

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana realisasi pencapaian target indikator kinerja, tingkat penyerapan anggaran, serta permasalahan atau kendala yang dihadapi selama pelaksanaan. Selain itu, evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan dalam Renja BPKAD Tahun 2025 dapat dicapai secara optimal sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra BPKAD Tahun 2025–2029, serta mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi NTB Tahun 2025.

Dalam rangka menjaga keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai target kinerja serta melakukan penyempurnaan, perlu dilakukan evaluasi terhadap realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) hingga triwulan II tahun 2025. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan dibandingkan dengan Rencana Strategis (Renstra) serta proyeksi kinerja pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) tahun berjalan. Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, proses perencanaan perlu diawali dengan penetapan tujuan, sasaran, hasil, manfaat, dan indikator kinerja yang terukur dengan jelas.

Indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana belanja yang dikeluarkan berkontribusi terhadap capaian kinerja yang dihasilkan, yang dikenal sebagai pendekatan penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*). Pendekatan ini merupakan metode penyusunan anggaran yang dilakukan secara sistematis dan terukur oleh organisasi sektor publik, dengan menjadikan indikator kinerja sebagai dasar dalam perumusan program, kegiatan, sub kegiatan, serta penetapan pagu indikatif.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan II Tahun 2025 dilaksanakan setelah bulan Juni. Hasil dari evaluasi menjadi acuan untuk relisasi penyerapan pada triwulan berikutnya.

Pagu Belanja yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2025 sebesar Rp 1.042.462.814.633 dan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp 359.725.641.414,00 atau 34,51% terdiri dari:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pagu program sebesar Rp 40.032.935.680 dan realisasi program sebesar Rp 16.758.570.298 atau 41,86%.
2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah pagu program sebesar Rp 998.174.776.484 dan realisasi program sebesar Rp 342.323.344.116 atau 34,29%.

3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah pagu program sebesar Rp 4.255.102.469 dan realisasi program sebesar Rp 643.727.000 atau 15,13%.

Adapun capaian dan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 antara lain sebagaimana pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Sampai Triwulan II.

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	NAMA OPD/PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA PADA TAHUN 2026		RENJA TAHUN 2025		PENETAPAN APBD/DPA		REALISASI SAMPAI BULAN JUNI 2025		% REALISASI SAMPAI BULAN JUNI 2025	
					TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	REALISASI KINERJA	REALISASI KEU (Rp)	% REALISASI KEU (Rp)	% REALISASI KINERJA
BPKAD PROVINSI NTB						**1.546.035.121.842**		**1.027.666.964.243**		**1.042.462.814.633**		**359.725.641.414**	**34,51**	
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku			Opini BPK-RI Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB	Opini	WTP		WTP		WTP		WTP			100,0
	SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja keuangan daerah		Persentase tingkat kepatuhan alokasi anggaran *mandatory spending*	%	100		100		100		60			60,0
			Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi APBD	%	100		100		100		N/A			N/A
			Ketepatan waktu penyusunan LKPD	Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu			100,0
	SASARAN 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah (BMD) yang akuntabel dan produktif		Persentase Tindaklanjut Temuan BPK terkait BMD	%	100		100		100		N/A			N/A
			Persentase peningkatan PAD yang bersumber dari pengelolaan aset	%	2		2		2		64,20			3210,0
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Tingkat kepatuhan ketentuan alokasi pendidikan**	**%**	**20**	**1.501.830.316.707**	**20**	**947.663.207.735**	**20**	**998.174.776.484**	**30,64**	**342.323.344.116**	**34,29**	**153,2**
			Tingkat kepatuhan ketentuan alokasi kesehatan	**%**	**10**		**10**		**10**		**22,30**			**223,0**
			Tingkat kepatuhan ketentuan alokasi Infrastruktur	**%**	**40**		**40**		**40**		**32,66**			**81,7**

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	NAMA OPD/PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA PADA TAHUN 2026		RENJA TAHUN 2025		PENETAPAN APBD/DPA		REALISASI SAMPAI BULAN JUNI 2025		% REALISASI SAMPAI BULAN JUNI 2025	
					TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	REALISASI KINERJA	REALISASI KEU (Rp)	% REALISASI KEU (Rp)	% REALISASI KINERJA
			Tingkat kepatuhan ketentuan alokasi pengawasan	**%**	**0,6**		**0,6**		**0,6**		**0,10**			**17,4**
			Tingkat kepatuhan ketentuan alokasi kebencanaan	**%**	**1**		**1**		**1**		**3,16**			**316,0**
			Persentase ketepatan waktu penyampaian hasil evaluasi Raperda APBD/Perubahan APBD dan Raperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota	**%**	**100**		**100**		**100**		**NA**			**-**
			Persentase Penerbitan SP2D dari Jumlah SPM yang diverifikasi	**%**	**100**		**100**		**100**		**100,00**			**100,0**
			Persentase Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan BLUD	**%**	**100**		**100**		**100**		**100,00**			**100,0**
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang tersusun**	**Dokumen**	**8**	**3.675.819.922**	**8**	**11.503.181.275**	**8**	**2.658.692.250**	**0**	**976.104.686**	**36,71**	**-**
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	1	78.960.928	2	430.884.228	2	88.339.000	0	-	-	-
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	1	119.000.738	2	390.899.492	2	70.875.300	0	-	-	-
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	136	29.683.263	42	469.974.820	42	17.005.000	0	-	-	-
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	136	37.195.872	126	263.278.715	126	10.779.100	84	-	-	66,7
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	136	9.101.788	42	255.357.918	42	9.275.000	42	9.275.000	100,00	100,0
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	136	5.645.116	126	442.661.662	126	2.827.500	84	-	-	66,7
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	546.472.726	2	1.664.020.812	2	446.691.200	0	-	-	-
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	641.468.313	5	1.403.040.255	5	617.688.000	2	357.712.300	57,91	40,0

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	NAMA OPD/PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA PADA TAHUN 2026		RENJA TAHUN 2025		PENETAPAN APBD/DPA		REALISASI SAMPAI BULAN JUNI 2025		% REALISASI SAMPAI BULAN JUNI 2025	
					TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	REALISASI KINERJA	REALISASI KEU (Rp)	% REALISASI KEU (Rp)	% REALISASI KINERJA
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	1	2.093.986.423	5	4.980.820.784	5	1.361.727.350	0	609.117.386	44,73	-
		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	37	114.304.755	210	1.202.242.589	210	33.484.800	0	-	-	-
		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	**31**	**1.056.810.310**	**31**	**5.265.385.020**	**30**	**733.025.500**	**-**	**169.387.506**	**23,11**	**-**
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Laporan	10	192.009.565	10	909.174.550	10	151.096.400	0	-	-	-
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	10	190.835.632	10	818.173.982	10	138.074.500	0	-	-	-
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	10	194.765.635	10	748.013.492	10	151.408.100	1	13.145.500	8,68	10,0
		Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	Dokumen	10	106.798.449	10	1.217.028.134	10	164.730.800	14	119.986.250	72,84	140,0
		Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Laporan	1	150.032.437	1	706.670.170	1	67.313.650	0	11.631.106	17,28	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Dokumen	2	222.368.591	2	866.324.692	2	60.402.050	1	24.624.650	40,77	50,0

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	NAMA OPD/PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA PADA TAHUN 2026		RENJA TAHUN 2025		PENETAPAN APBD/DPA		REALISASI SAMPAI BULAN JUNI 2025		% REALISASI SAMPAI BULAN JUNI 2025	
					TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	REALISASI KINERJA	REALISASI KEU (Rp)	% REALISASI KEU (Rp)	% REALISASI KINERJA
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan yang tersusun**	**Dokumen**	**12**	**890.770.155**	**155**	**6.054.691.240**	**155**	**342.061.800**	**72**	**159.672.226**	**46,68**	**46,5**
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	24	468.303.112	12	1.378.392.948	12	151.380.900	6	72.041.124	47,59	50,0
		Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Laporan	1	2.940.581	1	241.704.158	1	2.379.400	1	1.499.700	63,03	100,0
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	336	125.582.134	336	623.552.991	288	45.438.000	108	33.540.000	73,81	37,5
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	20	16.832.771	20	447.803.553	20	6.989.700	10	-	-	50,0
		Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	260	6.797.175	260	445.114.871	260	2.945.000	181	-	-	69,6
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	17	40.721.999	14	478.070.978	14	22.352.600	7	7.591.702	33,96	50,0

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	NAMA OPD/PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA PADA TAHUN 2026		RENJA TAHUN 2025		PENETAPAN APBD/DPA		REALISASI SAMPAI BULAN JUNI 2025		% REALISASI SAMPAI BULAN JUNI 2025	
					TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	REALISASI KINERJA	REALISASI KEU (Rp)	% REALISASI KEU (Rp)	% REALISASI KINERJA
		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	1	17.970.618	1	533.481.236	1	15.477.300	1	4.980.000	32,18	100,0
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	136	73.798.783	136	725.700.469	12	47.128.000	6	35.970.000	76,32	50,0
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	1	126.557.714	1	539.969.378	1	42.370.500	0	3.450.000	8,14	-
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	20	11.265.267	20	640.900.658	10	5.600.400	50	599.700	10,71	500,0
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Provinsi NTB yang tersusun tepat Waktu**	**Dokumen**	**4**	**2.031.904.259**	**4**	**5.784.909.162**	**3**	**746.470.680**	**3**	**125.642.760**	**16,83**	**100,0**
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,Pendapatan LO dan Beban	Dokumen	136	198.443.277	136	678.806.675	252	98.793.380	75	15.000.000	15,18	29,8
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	17	96.339.574		633.952.013	18	35.856.000	9	-	-	50,0
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	7	944.775.687	7	1.167.550.401	7	232.052.000	7	98.400.000	42,40	100,0
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen	2	425.242.391	2	1.092.885.628	2	223.767.300	2	12.242.760	5,47	100,0

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	NAMA OPD/PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA PADA TAHUN 2026		RENJA TAHUN 2025		PENETAPAN APBD/DPA		REALISASI SAMPAI BULAN JUNI 2025		% REALISASI SAMPAI BULAN JUNI 2025	
					TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	REALISASI KINERJA	REALISASI KEU (Rp)	% REALISASI KEU (Rp)	% REALISASI KINERJA
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	59.206.484	1	572.989.671	1	68.059.000	0	-	-	-
		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	62.301.794	1	484.239.156	1	25.507.000	0	-	-	-
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Orang	30	72.345.052	30	492.757.251	84	10.831.000	0	-	-	-
		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	Lembaga	19	173.250.000	19	661.728.367	22	51.605.000	0	-	-	-
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Jumlah Laporan Dana Bagi Hasil dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi yang tersusun**	**Laporan**	**4**	**1.493.484.820.486**	**4**	**916.870.307.186**	**14**	**993.425.607.654**	**5**	**340.795.200.338**	**34,31**	**35,7**
		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	1	149.501.021.477	1	33.656.621.056	13	33.656.621.056	7	11.849.921.318	35,21	53,8
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	1	23.923.718.143	1	2.000.000.000	10	683.500.000	2	-	-	20,0
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1	75.149.199.421	1	206.575.205.439	10	161.606.865.872	1	40.000.000	0,02	10,0
		Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan	1	1.244.910.881.445	1	674.638.480.691	4	797.478.620.726	3	**328.905.279.020**	41,24	75,0
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	**Jumlah Dokumen Data Bidang Keuangan yang Tersusun**	**Dokumen**	**3**	**690.191.576**	**3**	**2.184.733.852**	**3**	**268.918.600**	**0**	**97.336.600**	**36,20**	**-**
		Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	2	137.671.095	2	645.227.913	2	61.760.500	0	37.806.000	61,21	-
		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	1	215.328.943	1	805.995.674	1	105.828.650	0	25.383.300	23,99	-
		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	50	337.191.539	50	733.510.265	50	101.329.450	15	34.147.300	33,70	30,0

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	NAMA OPD/PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA PADA TAHUN 2026		RENJA TAHUN 2025		PENETAPAN APBD/DPA		REALISASI SAMPAI BULAN JUNI 2025		% REALISASI SAMPAI BULAN JUNI 2025	
					TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	REALISASI KINERJA	REALISASI KEU (Rp)	% REALISASI KEU (Rp)	% REALISASI KINERJA
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan terkait BMD**	**%**	**100**	**4.236.341.947**	**100**	**10.676.120.874**	**100**	**4.255.102.469**	**20**	**643.727.000**	**15,13**	**20,0**
			Persentase peningkatan objek BMD pada BPKAD yang menghasilkan retribusi	**%**	**2**		**2**		**2**		**-0,12**			**-6,0**
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tersusun**	**Dokumen**	**11**	**4.236.341.947**	**11**	**10.676.120.874**	**2**	**4.255.102.469**	**-**	**643.727.000**	**15,13**	**-**
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	1	143.532.731	1	423.034.797	1	109.992.900	0	18.840.000	17,13	-
		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	38.297.508	1	440.944.418	1	48.578.800	0	40.146.000	82,64	-
		Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	88.317.054	1	376.740.914	1	64.612.600	1	37.970.000	58,77	100,0
		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	3	43.928.288	3	306.933.236	4	33.605.400	0	-	-	-
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	640.521.652	1	1.620.585.535	1	807.575.700	0	27.000.000	3,34	-
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	1	491.085.018	1	620.004.732	1	1.043.068.134	0	-	-	-
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1	930.724.476	1	1.780.528.173	1	382.435.000	0	34.749.000	9,09	-
		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	2	63.349.671	2	177.524.306	2	220.150.000	0	-	-	-
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	67.718.401	1	203.246.739	1	5.880.000	0	-	-	-
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	4	1.538.555.391	4	3.330.102.963	37	1.416.451.150	14	426.522.000	30,11	37,8
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	132	67.502.251	132	544.911.054	166	95.573.200	41	58.500.000	61,21	24,7
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	3	53.490.925	3	388.691.436	2	22.810.000	0	-	-	-

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	NAMA OPD/PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA PADA TAHUN 2026		RENJA TAHUN 2025		PENETAPAN APBD/DPA		REALISASI SAMPAI BULAN JUNI 2025		% REALISASI SAMPAI BULAN JUNI 2025	
					TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	REALISASI KINERJA	REALISASI KEU (Rp)	% REALISASI KEU (Rp)	% REALISASI KINERJA
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	20	69.318.579	20	462.872.571	272	4.369.585	0	-	-	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**A**	**39.968.463.188**	**A**	**69.327.635.634**	**A**	**40.032.935.680**	**A**	**16.758.570.298**	**41,86**	**100,0**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**8**	**948.314.297**	**8**	**2.962.995.528**	**8**	**541.200.150**	**3**	**95.483.425**	**17,64**	**37,5**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	263.039.921	2	697.483.045	3	185.489.575	2	40.890.025	22,04	66,7
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	110.380.561	1	456.855.895	1	93.171.500	1	722.500	0,78	100,0
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	109.195.010	1	398.868.792	1	66.139.000	0	-	-	-
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	83.962.290	1	312.726.358	1	22.889.500	1	-	-	100,0
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	95.863.278	1	190.209.101	1	14.825.000	0	-	-	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	95.441.235	1	383.216.751	1	56.967.500	1	27.000.000	47,40	100,0
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	190.432.003	1	523.635.586	1	101.718.075	1	26.870.900	26,42	100,0
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun**	**Dokumen**	**19**	**27.397.173.502**	**19**	**30.744.760.108**	**1**	**30.086.358.704**	**1**	**12.690.281.135**	**42,18**	**100,0**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	166	26.864.937.274	166	28.434.700.890	160	29.689.608.439	320	12.562.102.895	42,31	200,0
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	57.926.885	1	252.472.999	1500	26.806.300	750	11.034.600	41,16	50,0

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	NAMA OPD/PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA PADA TAHUN 2026		RENJA TAHUN 2025		PENETAPAN APBD/DPA		REALISASI SAMPAI BULAN JUNI 2025		% REALISASI SAMPAI BULAN JUNI 2025	
					TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	REALISASI KINERJA	REALISASI KEU (Rp)	% REALISASI KEU (Rp)	% REALISASI KINERJA
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	243.646.962	1	894.821.778	24	245.214.600	12	71.641.725	29,22	50,0
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	86.837.124	1	384.643.739	1	59.199.115	1	20.367.465	34,41	100,0
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	17	119.617.304	17	475.367.022	4	48.210.000	2	18.320.000	38,00	50,0
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun	Dokumen	1	24.207.953	1	302.753.680	8	17.320.250	2	6.814.450	39,34	25,0
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**4**	**188.081.787**	**4**	**1.899.409.487**	**12**	**155.936.000**	**6**	**54.438.400**	**34,91**	**50,0**
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	12.414.113	2	623.360.991	3	26.980.000	3	10.370.000	38,44	100,0
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	49.600.840	1	408.345.398	12	39.380.000	6	5.869.700	14,91	50,0
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	126.066.834	1	867.703.098	1	89.576.000	0	38.198.700	42,64	-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Aparatur**	**Orang**	**75**	**4.483.526.003**	**75**	**8.020.442.848**	**30**	**2.897.688.900**	**12**	**1.610.150.100**	**55,57**	**40,0**
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	2	324.535.446	2	598.387.934	2	158.868.000	4	33.200.000	20,90	200,0
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	10	62.061.297	10	131.710.214	12	40.917.000	9	17.189.700	42,01	75,0
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	51.843.908	5	281.554.250	5	99.000.000	0	-	-	-
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	4.016.907.972	100	6.657.994.270	100	2.591.303.900	50	1.559.760.400	60,19	50,0

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	NAMA OPD/PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA PADA TAHUN 2026		RENJA TAHUN 2025		PENETAPAN APBD/DPA		REALISASI SAMPAI BULAN JUNI 2025		% REALISASI SAMPAI BULAN JUNI 2025	
					TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	REALISASI KINERJA	REALISASI KEU (Rp)	% REALISASI KEU (Rp)	% REALISASI KINERJA
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	28.177.380	5	350.796.180	5	7.600.000	0	-	-	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Bahan dan Peralatan Kantor yang Tersedia**	**Jenis**	**8**	**1.733.235.367**	**8**	**7.017.796.874**	**8**	**1.955.911.066**	**14**	**751.063.575**	**38,40**	**175,0**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8	28.739.986	8	188.340.872	8	49.139.000	4	8.628.500	17,56	50,0
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	27	55.090.176	27	1.086.806.847	27	29.011.500	13	14.190.300	48,91	48,1
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Paket	25	57.467.025	25	1.133.542.729	25	612.529.650	11	93.072.195	15,19	44,0
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	50	39.374.181	50	325.036.572	50	99.000.000	24	16.305.000	16,47	48,0
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	549.335.325	1	1.006.496.588	1	594.240.000	2	372.040.825	62,61	200,0
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	85	474.802.447	85	1.603.190.002	85	306.721.416	50	223.267.755	72,79	58,8
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	140000	215.048.528	140000	766.319.724	140000	96.834.500	70000	23.559.000	24,33	50,0
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5	313.377.698	5	908.063.540	5	168.435.000	0	-	-	-
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah dokumen pengadaan Barang Milik Daerah**	**Dokumen**	**20**	**896.569.863**	**27**	**7.914.422.079**	**15**	**203.688.300**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	-	3	4.968.743.909	0	201.823.300	0	-	-	-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	50	896.569.863	25	1.919.929.388	50	1.865.000	0	-	-	-
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	1	1.025.748.782	1	-	0	-	-	-

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	NAMA OPD/PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA PADA TAHUN 2026		RENJA TAHUN 2025		PENETAPAN APBD/DPA		REALISASI SAMPAI BULAN JUNI 2025		% REALISASI SAMPAI BULAN JUNI 2025	
					TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	REALISASI KINERJA	REALISASI KEU (Rp)	% REALISASI KEU (Rp)	% REALISASI KINERJA
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang tersedia**	**Jasa**	**7**	**2.902.235.725**	**4**	**6.746.156.235**	**4**	**3.451.477.560**	**8**	**1.394.240.361**	**40,40**	**200,0**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	179.816.175	1	425.831.353	1	23.625.000	2	147.952.213	626,25	200,0
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1.035.300.970	1	2.596.892.854	1	1.261.210.000	2	234.217.648	18,57	200,0
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	267.729.601	1	472.412.602	1	120.016.000	2	16.980.000	14,15	200,0
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1.419.388.979	1	3.251.019.426	1	2.046.626.560	2	995.090.500	48,62	200,0
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**Jenis**	**8**	**1.419.326.645**	**6**	**4.021.652.475**	**6**	**740.675.000**	**7**	**162.913.302**	**22,00**	**116,7**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	64	578.895.680	64	1.439.048.908	19	25.000.000	17	10.997.528	43,99	89,5
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	91.700.070	13	390.649.148	50	415.170.000	17	130.175.774	31,35	34,0
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	223	73.562.500	223	163.183.473	200	-	0	-	-	-
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	70.620.000	12	355.349.692	20	44.000.000	4	7.160.000	16,27	20,0
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	369.148.395	1	631.586.167	4	207.035.000	0	-	-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	235.400.000	1	1.041.835.087	4	49.470.000	1	14.580.000	29,47	25,0
						1.546.035.121.842		**1.027.666.964.243**		**1.042.462.814.633**		**359.725.641.414**	**34,51**	
RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM														
RATA-RATA CAPAIAN KEGIATAN														
RATA-RATA CAPAIAN SUB KEGIATAN														

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	NAMA OPD/PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA PADA TAHUN 2026		RENJA TAHUN 2025		PENETAPAN APBD/DPA		REALISASI SAMPAI BULAN JUNI 2025		% REALISASI SAMPAI BULAN JUNI 2025	
					TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	REALISASI KINERJA	REALISASI KEU (Rp)	% REALISASI KEU (Rp)	% REALISASI KINERJA
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA	- Terjalinnya koordinasi yang efektif dengan seluruh bidang di lingkungan BPKAD. - Ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat untuk mendukung proses perencanaan dan evaluasi. - Sarana dan prasarana yang memadai untuk memperlancar kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan. - Dukungan alokasi anggaran yang sesuai ketentuan untuk pemenuhan indikator prioritas, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. - Koordinasi yang baik dengan pengurus barang pada masing-masing SKPD. - Tersusunnya laporan pengamanan aset secara berkala serta tersedianya dokumen legalitas tanah untuk mendukung proses sertifikasi. - Perencanaan kebutuhan dan penyediaan bahan secara tepat waktu dan terstruktur serta kelengkapan dokumen pendukung sebagai dasar penyusunan perjanjian pemanfaatan aset. - Komitmen pimpinan dalam menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan terkait pengelolaan aset. - Dukungan tenaga pendukung dalam pengolahan data dan percepatan penyusunan laporan aset.												
FAKTOR PENGHAMBAT CAPAIAN KINERJA	- Keterbatasan kapasitas fiskal daerah yang masih bergantung pada dana transfer pusat berdampak pada pemenuhan target indikator prioritas. - Sistem informasi pengelolaan keuangan belum berjalan optimal dan masih mengalami kendala teknis. - Kebijakan efisiensi belanja memengaruhi pencapaian beberapa target program. - Data dan informasi pendukung belum lengkap dan komprehensif. - Keterlambatan penyampaian laporan dari perangkat daerah serta minimnya fasilitas pendukung menghambat proses rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan. - Sistem informasi belum sepenuhnya mendukung penyusunan dokumen sesuai regulasi sehingga beberapa pekerjaan masih dilakukan secara manual. - Dokumen perolehan aset tidak lengkap, pencatatan kurang akurat, serta anggaran terbatas untuk fasilitasi sertifikasi dan pendampingan hukum. - Keterbatasan sumber daya dan anggaran menghambat proses penilaian pemanfaatan aset. - Bukti penerimaan dari Bank NTB Syariah masih belum lengkap.												
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM PERUBAHAN RENJA 2025	- Memperkuat koordinasi daring dengan Pemerintah Pusat terkait penerbitan regulasi terbaru. - Menjalin koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten/kota. - Mempercepat pengumpulan data untuk mendukung penyusunan laporan konsolidasi keuangan. - Mengoptimalkan komunikasi resmi dan informal (surat dan media komunikasi) dengan SKPD. - Menyediakan jam kerja tambahan untuk memastikan penyelesaian laporan tepat waktu. - Berkoordinasi dengan tim penilai dan menambah alokasi anggaran untuk mempercepat pelaksanaan penilaian pemanfaatan BMD. - Melakukan penelusuran, identifikasi, dan inventarisasi dokumen secara menyeluruh serta memastikan kecukupan anggaran untuk fasilitasi pensertifikatan.												

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 hingga Triwulan II mengidentifikasi sejumlah faktor yang menjadi pendorong maupun penghambat terhadap pencapaian kinerja. Selain itu, disusun pula rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan untuk optimalisasi pelaksanaan Renja triwulan berikutnya (Triwulan III) serta sebagai masukan strategis dalam perencanaan Renja pada periode selanjutnya, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1) Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Keberhasilan capaian kinerja didukung oleh koordinasi yang efektif, ketersediaan data yang akurat, serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pelaporan keuangan. Dukungan anggaran sesuai ketentuan, komitmen pimpinan dalam menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan, serta perencanaan kebutuhan yang tepat waktu turut memperkuat pengelolaan aset. Selain itu, kelengkapan dokumen pendukung, laporan pengamanan aset berkala, dan tenaga pendukung dalam pengolahan data menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja.
2) Faktor penghambat keberhasilan kinerja: Capaian kinerja terhambat oleh keterbatasan kapasitas fiskal serta sistem informasi keuangan yang belum optimal. Pengelolaan aset juga terkendala oleh dokumen yang tidak lengkap, keterbatasan anggaran dan sumber daya, serta bukti penerimaan keuangan yang belum sepenuhnya tersedia.
3) Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Tindak lanjut yang diperlukan meliputi penguatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, pemerintah kabupaten/kota, dan SKPD, percepatan pengumpulan data untuk penyusunan laporan konsolidasi, serta optimalisasi komunikasi resmi maupun informal guna mendukung kelancaran pelaporan. Selain itu, penambahan alokasi anggaran untuk percepatan penilaian pemanfaatan aset, serta penelusuran, identifikasi, dan inventarisasi dokumen secara menyeluruh untuk memastikan kelengkapan data dan fasilitasi pensertifikatan.
4) Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya: perlu dilakukan penelaahan terhadap indikator serta target kinerja sebagai dasar untuk penyempurnaan proses perencanaan pada periode selanjutnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan aset daerah, mulai dari proses penganggaran hingga pertanggungjawaban APBD, dengan tugas meliputi pelaksanaan pelayanan administrasi serta kegiatan keuangan daerah dan pengelolaan aset atau barang milik daerah.

Sebagai dasar dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi acuan utama, sehingga seluruh program dan

kegiatan yang dilaksanakan harus selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

Selanjutnya capaian kinerja pelayanan BPKAD Provinsi NTB sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut.

Tabel 2.2 Pencapaian kinerja pelayanan BPKAD Tahun 2025 sesuai Renstra Tahun 2025-2029.

No	Indikator Kinerja Pelayanan	TAHUN 2025		
		Target	Realisasi s.d TW II	Capaian Kinerja s.d TW II (%)
1	Persentase tingkat kepatuhan alokasi anggaran Mandatory spending	100%	60	60
2	Ketepatan waktu penyusunan LKPD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100
3	Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi APBD	100%	NA	NA
4	Persentase Tindaklanjut Temuan BPK terkait BMD	100%	NA	NA
5	Persentase peningkatan PAD yang bersumber dari pengelolaan aset	2	64,2	3210

Berdasarkan Tabel 2.2, indikator Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi APBD hingga saat ini masih berstatus NA. Hal tersebut disebabkan oleh proses tindak lanjut yang masih berlangsung, sehingga data mengenai realisasi maupun capaian kinerja belum dapat disajikan. Demikian pula, indikator Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK terkait Barang Milik Daerah (BMD) juga masih menunjukkan status NA. Kondisi ini terjadi karena Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) baru diterbitkan pada bulan Juni, sehingga proses tindak lanjut terhadap temuan tersebut masih berjalan dan belum menghasilkan data yang dapat dilaporkan secara resmi.

Indikator Persentase peningkatan PAD yang bersumber dari pengelolaan aset hingga Triwulan II (TW II) tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja yang sangat tinggi, yaitu 3210%. Nilai ini tampak melonjak karena perbandingan dilakukan dengan capaian kinerja pada TW II tahun 2024 yang relatif rendah. Dengan kata lain, peningkatan yang besar ini bukan hanya mencerminkan adanya optimalisasi pengelolaan aset daerah pada tahun berjalan, tetapi juga disebabkan oleh basis pembanding yang kecil pada tahun sebelumnya, sehingga persentase kenaikannya menjadi sangat signifikan.

Capaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah didukung oleh dua program strategis yang berperan dalam pengelolaan urusan keuangan dan aset, yakni Program Pengelolaan Keuangan serta Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. Adapun sejumlah faktor yang mendorong tercapainya target indikator kinerja pelayanan BPKAD antara lain sebagai berikut:

a. Komitmen yang tinggi dari pimpinan beserta seluruh jajaran pegawai;
b. Organisasi diisi oleh sumber daya manusia yang kompeten dan ahli dibidangnya;
c. Tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset yang memfasilitasi proses perencanaan anggaran, penatausahaan, serta penyusunan laporan keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;

d. Dukungan regulasi serta kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka upaya peningkatan pendapatan daerah serta optimalisasi pengelolaan aset daerah;
e. Koordinasi yang intensif dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan sinkronisasi program dan kegiatan;
f. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan bimbingan teknis guna memperkuat kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset;
g. Pemanfaatan teknologi informasi secara berkelanjutan untuk mempercepat proses administrasi dan memperkuat pengawasan internal;
h. Adanya monitoring dan evaluasi berkala yang sistematis guna memastikan pencapaian indikator kinerja dan melakukan perbaikan segera jika ditemukan kendala; dan
i. Pengelolaan komunikasi publik dan pelaporan yang transparan sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BPKAD.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel, BPKAD Provinsi NTB sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan fungsi pengelolaan keuangan daerah, akuntansi, perbendaharaan, dan pengelolaan barang milik daerah, terus dihadapkan pada berbagai isu strategis yang memengaruhi kinerja dan pencapaian targetnya. Perubahan kebijakan nasional, dinamika perekonomian daerah, perkembangan teknologi informasi, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi faktor yang harus direspons secara adaptif dan terencana. Pada Tahun 2025, isu-isu penting tersebut tidak hanya berkaitan dengan optimalisasi pendapatan dan belanja daerah, tetapi juga mencakup penguatan tata kelola aset daerah, peningkatan kualitas laporan keuangan, pengendalian kas, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menunjang tugas dan fungsi BPKAD.

BPKAD Provinsi NTB mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset.

Adapun Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah:

a. Perumusan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
b. Perumusan bahan kebijakan dan Pelaksanaan tugas dukungan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan daerah, sering menghadapi berbagai kendala yang bersifat berulang setiap tahunnya, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

a. Meningkatnya alokasi belanja *mandatory spending/earmark* dalam APBD;
b. Ketergantungan pada dana transfer;
c. Meningkatnya alokasi belanja pegawai dalam APBD;
d. Ketepatan waktu dalam proses penyusunan APBD belum berjalan sesuai ketentuan;
e. Mempertahankan Opini atas laporan keuangan yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
f. Pengelolaan dan penatausahaan aset belum sepenuhnya memadai;
g. Proses sertifikasi aset tanah belum berjalan secara optimal;
h. Belum optimalnya pemanfaatan aset dalam meningkatkan PAD.

Permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi tersebut mencerminkan tantangan nyata dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang harus segera ditangani. Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah strategis agar BPKAD dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tugasnya. Oleh karena itu, sejumlah isu strategis perlu menjadi fokus perhatian dalam rangka mengatasi kendala-kendala tersebut dan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Isu strategis sendiri merupakan kondisi yang memiliki dampak besar terhadap pembangunan daerah di masa depan. Jika tidak diantisipasi, isu ini dapat menimbulkan kerugian atau hilangnya peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Identifikasi isu strategis yang tepat sangat penting agar prioritas pembangunan dapat diterima, diimplementasikan, dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Isu-isu ini dapat muncul dari faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi kinerja daerah dalam jangka lima tahun ke depan.

Berikut beberapa isu strategis pengelolaan keuangan dan aset di Provinsi NTB saat ini:

a. Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah

   Isu ini berkaitan dengan perlunya peningkatan sistem, prosedur, dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan efisien dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan.

b. Kapasitas Fiskal Rendah

   Mengacu pada keterbatasan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara optimal, baik dari sisi pendapatan asli daerah maupun pengelolaan dana transfer, sehingga berdampak pada kemampuan pembiayaan pembangunan.

c. Pengelolaan Aset Daerah Belum Optimal.

   Masalah ini terkait dengan kurang maksimalnya pemanfaatan, penatausahaan, dan pengamanan aset daerah, yang berpotensi mengurangi nilai manfaat dan kontribusi aset terhadap pendapatan daerah serta pelayanan publik.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3. 1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, tema utama RKP 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Penetapan tema ini mencerminkan arah strategis pemerintah dalam memasuki periode awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menuju visi Indonesia Emas. Posisi tahun 2025 sebagai awal dari tahapan pembangunan jangka panjang menuntut upaya percepatan yang terarah, dengan fokus pada penguatan struktur ekonomi nasional, peningkatan produktivitas, serta ketahanan terhadap dinamika global yang tidak menentu.

Kebijakan pembangunan tahun 2025 dirancang untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif melalui pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan wilayah tertinggal. Pemberdayaan UMKM, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan perluasan akses terhadap layanan dasar menjadi prioritas utama dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Di sisi lain, prinsip keberlanjutan diintegrasikan secara menyeluruh dalam berbagai program melalui pendekatan ekonomi hijau, efisiensi energi, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Dalam kerangka fiskal, APBN 2025 difokuskan untuk mendukung prioritas pembangunan sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi, dengan pengendalian defisit dan alokasi anggaran yang responsif terhadap tantangan global. Dengan pendekatan yang terpadu, RKP 2025 menjadi fondasi kuat bagi transformasi bangsa yang berkelanjutan, mandiri, dan berkeadilan.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), sebagai institusi yang bertanggung jawab atas perencanaan, penganggaran, pengelolaan pendapatan, belanja, serta optimalisasi aset daerah, memiliki peran krusial dalam menerjemahkan arah kebijakan nasional tersebut ke dalam tata kelola keuangan dan aset yang sistematis, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Peran BPKAD tidak terbatas pada fungsi teknis administratif semata, melainkan mencakup dimensi kebijakan publik yang menuntut kepekaan terhadap dinamika sosial-ekonomi daerah. Dalam konteks inklusivitas, BPKAD wajib memastikan bahwa alokasi sumber daya fiskal didasarkan pada prinsip keadilan distributif, dengan memprioritaskan program dan kegiatan yang secara langsung meningkatkan akses masyarakat marginal terhadap peluang ekonomi, layanan dasar, dan infrastruktur produktif. Pendekatan *targeted budgeting* yang didukung oleh data spasial dan sosio-ekonomi menjadi instrumen kunci

untuk memastikan bahwa anggaran tidak hanya tepat waktu, tetapi juga tepat sasaran, sehingga mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok sosial.

Pada aspek keberlanjutan, BPKAD dituntut untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi hijau dan tata kelola aset yang berkelanjutan ke dalam seluruh proses pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mencakup penerapan kebijakan pengelolaan aset yang meminimalkan pemborosan, mendorong pemanfaatan ulang aset tidak produktif untuk kegiatan ekonomi berkelanjutan—seperti pemanfaatan lahan kosong untuk usaha ekonomi lokal berbasis ramah lingkungan, atau penerapan teknologi energi terbarukan pada fasilitas pemerintah—serta penguatan sistem inventarisasi dan pemantauan aset berbasis digital untuk mencegah kehilangan, penyalahgunaan, dan degradasi nilai aset. Selain itu, BPKAD perlu mendorong inovasi pendapatan daerah melalui pemanfaatan aset daerah melalui skema sewa, kerja sama pemanfaatan, atau bangun guna serah. Pendekatan ini memastikan bahwa aset daerah tidak hanya menjadi sumber pendapatan jangka pendek, tetapi menjadi modal strategis yang terus berkembang dan memberikan manfaat lintas generasi.

Dengan demikian, telaahan terhadap RKP 2025 dari perspektif BPKAD bukan sekadar kegiatan formalitas administratif, melainkan proses transformasi strategis yang menuntut perubahan paradigma dalam tata kelola keuangan daerah. BPKAD harus mampu berpindah dari peran sebagai pengelola anggaran yang bersifat teknis dan reaktif, menjadi agen strategis yang proaktif dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Setiap keputusan anggaran, setiap kebijakan pengelolaan aset, dan setiap upaya peningkatan akuntabilitas keuangan harus diukur berdasarkan kontribusinya terhadap pemerataan manfaat ekonomi, perlindungan lingkungan, dan ketahanan fiskal jangka panjang. Dalam kerangka ini, keberhasilan BPKAD tidak lagi ditentukan oleh tingkat realisasi anggaran semata, tetapi oleh sejauh mana pengelolaan keuangan dan aset daerah telah menjadi instrumen yang efektif dalam membangun ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan mampu menjamin kesejahteraan generasi mendatang.

3. 2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2025-2029 yaitu “Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”. Visi Gubernur NTB didukung oleh 7 Misi, 14 Tujuan dan 25 Sasaran.

Tujuan merupakan sesuatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah serta selaras dengan tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan BPKAD mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah, khususnya pada Misi ke-7 yaitu “Mempercepat Transformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan

Inovatif serta Kepemimpinan yang Kolaboratif dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Sebagai Fondasi Percepatan Pembangunan Daerah".

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, BPKAD berperan aktif untuk mendukung pencapaian Tujuan ke-14 RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025–2029, yaitu "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan Daerah yang Kolaboratif" yang diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui Sasaran RPJMD, yaitu "Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah" dengan indikator Reformasi Birokrasi General.

Berdasarkan keterkaitan tersebut, rumusan tujuan yang ditetapkan BPKAD adalah "Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah".

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai dari suatu tujuan, yang mana diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka sasaran yang dirumuskan adalah sebagai berikut: "Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Keuangan Daerah" dan "Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)".

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh BPKAD Provinsi NTB dijabarkan pada Tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025
Terwujudnya peningkatan kualitas dan kapasitas tata kelola keuangan dan barang milik daerah		Opini BPK-RI Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB	WTP
	Meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja keuangan daerah	Persentase ketepatan waktu penetapan Perda APBD dan Perda Perubahan APBD	100%
		Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi APBD	100%
		Persentase ketepatan waktu penyusunan LKPD	100%
		Persentase tingkat kepatuhan terhadap belanja wajib	100%
	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Indeks Pengelolaan Aset	2.07

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan sejumlah program dan kegiatan yang disusun berdasarkan indikator kinerja, kelompok sasaran, serta alokasi pendanaan indikatif sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) BPKAD disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 05.05.889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rencana Program dan Kegiatan yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indiktor Kinerja dan Pendanaan Pagu Indikatif pada perubahan Renja BPKAD Provinsi NTB Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut.

Tabel 4.1 Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan pagu indikatif Perubahan Renja BPKAD Provinsi NTB Tahun 2025.

Kode Rekening	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
				Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPKAD**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Mataram**	**Predikat**	**A**	**45,531,239,856**	**APBD**
5.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Meningkatanya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran SKPD**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Mataram**	**Dokumen**	**8**	**704,066,775**	**APBD**
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mataram	Dokumen	3	200,628,150	APBD
5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Mataram	Dokumen	1	99,310,000	APBD
5.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mataram	Dokumen	1	88,223,350	APBD
5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Mataram	Dokumen	1	32,863,600	APBD
5.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Mataram	Dokumen	1	29,824,000	APBD

Kode Rekening	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
				Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mataram	Laporan	1	131,483,200	APBD
5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mataram	Laporan	1	121,734,475	APBD
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan SKPD**	**Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun**	**Mataram**	**Dokumen**	**1**	**30,734,260,685**	**APBD**
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Mataram	Orang/Bulan	160	30,278,856,305	APBD
5.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Mataram	Dokumen	1500	40,905,440	APBD
5.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Mataram	Dokumen	24	264,015,675	APBD
5.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mataram	Laporan	1	68,197,515	APBD

Kode Rekening	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
				Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
5.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Mataram	Laporan	4	58,290,500	APBD
5.02.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun	Mataram	Dokumen	8	23,995,250	APBD
5.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Mataram**	**Dokumen**	**12**	**176,546,000**	**APBD**
5.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Mataram	Dokumen	3	41,980,000	APBD
5.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mataram	Laporan	12	42,380,000	APBD
5.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mataram	Laporan	1	92,186,000	APBD
5.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian**	**Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Aparatur**	**Mataram**	**Orang**	**30**	**5,181,920,150**	**APBD**

Kode Rekening	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
				Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
5.02.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Mataram	Unit	2	156,618,000	APBD
5.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Mataram	Dokumen	12	72,268,250	APBD
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Mataram	Orang	5	14,000,000	APBD
5.02.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Mataram	Orang	100	4,931,433,900	APBD
5.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Mataram	Orang	5	7,600,000	APBD
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik**	**Jumlah Bahan dan Peralatan Kantor yang Tersedia**	**Mataram**	**Jenis**	**8**	**3,070,445,686**	**APBD**
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Mataram	Paket	8	63,239,000	APBD
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Mataram	Paket	27	127,545,730	APBD

Kode Rekening	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
				Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Mataram	Paket	25	609,029,650	APBD
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Mataram	Dokumen	50	38,520,000	APBD
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Mataram	Laporan	1	1,143,530,000	APBD
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mataram	Laporan	85	820,591,806	APBD
5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Mataram	Dokumen	140,000	170,754,500	APBD
5.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Mataram	Dokumen	5	97,235,000	APBD
5.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**Jumlah dokumen pengadaan Barang Milik Daerah**	**Mataram**	**Dokumen**	**15**	**1,513,698,000**	**APBD**
5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Mataram	Unit	15	1,513,698,000	APBD
5.02.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Mataram	Unit	1	-	APBD
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang tersedia**	**Mataram**	**Jasa**	**4**	**3,035,327,560**	**APBD**

Kode Rekening	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
				Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mataram	Laporan	1	23,525,000	APBD
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Mataram	Laporan	1	927,960,000	APBD
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Mataram	Laporan	1	120,016,000	APBD
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Mataram	Laporan	1	1,963,826,560	APBD
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada SKPD**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**Mataram**	**Jenis**	**6**	**1,114,975,000**	**APBD**
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Mataram	Unit	19	25,000,000	APBD

Kode Rekening	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
				Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Mataram	Unit	50	414,120,000	APBD
5.02.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Mataram	Unit	100	-	APBD
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Mataram	Unit	20	44,000,000	APBD
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Mataram	Unit	4	507,385,000	APBD
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Mataram	Unit	4	124,470,000	APBD
5.02.02.01	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Terwujudnya Ketepatan Waktu Penyusunan Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan**	**Persentase ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan**	**Mataram**	**%**	**100**	**895,899,195,225**	**APBD**
		Terpenuhinya kesesuaian alokasi belanja wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	**Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD**	**Mataram**	**%**	**33.29**		**APBD**

Kode Rekening	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
				Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	**Mataram**	**%**	**35.11**		**APBD**
			Persentase belanja pendidikan di luar gaji dan tunjangan guru	**Mataram**	**%**	**11.00**		**APBD**
			Persentase belanja kesehatan	**Mataram**	**%**	**23.00**		**APBD**
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase ketepatan waktu penyampaian hasil evaluasi Raperda APBD/Perubahan APBD dan Raperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota**	**Mataram**	**%**	**100**		**APBD**
		Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Manajemen Pengelolaan Kas Daerah	**Persentase realisasi belanja terhadap APBD**	**Mataram**	**%**	**95**		**APBD**
		Terwujudnya Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan BLUD**	**Mataram**	**%**	**100**		**APBD**
5.02.02.1.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan verifikasi dokumen penganggaran perangkat daerah sektor ekonomi**	**Persentase dokumen penganggaran perangkat daerah sektor ekonomi yang disusun dan diverifikasi tepat waktu**	**Mataram**	**%**	**100**	**3,868,002,250**	**APBD**
		Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan verifikasi dokumen penganggaran perangkat daerah sektor infrastruktur	**Persentase dokumen penganggaran perangkat daerah sektor infrastruktur yang disusun dan diverifikasi tepat waktu**	**Mataram**	**%**	**100**		**APBD**

Kode Rekening	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
				Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		Terpenuhinya penganggaran belanja pegawai pada perangkat daerah sektor infrastruktur	**Persentase pemenuhan penganggaran belanja pegawai pada perangkat daerah sektor infrastruktur**	**Mataram**	**%**	**100**		**APBD**
		Terpenuhinya penganggaran belanja pegawai pada perangkat daerah sektor ekonomi	**Persentase pemenuhan penganggaran belanja pegawai pada perangkat daerah sektor ekonomi**	**Mataram**	**%**	**100**		**APBD**
		Terpenuhinya penganggaran sub kegiatan utama dan pendukung belanja infrastruktur pada perangkat daerah sektor infrastruktur	**Persentase pemenuhan penganggaran belanja infrastruktur pelayanan publik pada perangkat daerah sektor infrastruktur**	**Mataram**	**%**	**14.73**		**APBD**
		Terpenuhinya penganggaran sub kegiatan utama dan pendukung belanja infrastruktur pada perangkat daerah sektor ekonomi	**Persentase pemenuhan penganggaran belanja infrastruktur pelayanan publik pada perangkat daerah sektor ekonomi**	**Mataram**	**%**	**20.38**		**APBD**
		Terpenuhinya penandaan dan penganggaran belanja pendidikan pada perangkat daerah sektor infrastruktur	**Persentase pemenuhan penganggaran belanja pendidikan pada perangkat daerah sektor infrastruktur**	**Mataram**	**%**	**10.84**		**APBD**
		Terpenuhinya penandaan dan penganggaran belanja pendidikan pada perangkat daerah sektor ekonomi	**Persentase pemenuhan penganggaran belanja pendidikan pada perangkat daerah sektor ekonomi**	**Mataram**	**%**	**0.16**		**APBD**
		Terpenuhinya penandaan dan penganggaran belanja kesehatan pada perangkat daerah	**Persentase pemenuhan penganggaran belanja kesehatan pada perangkat daerah**	**Mataram**	**%**	**100**		**APBD**
5.02.02.1.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Mataram	Dokumen	2	106,339,000	APBD

Kode Rekening	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
				Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
5.02.02.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Mataram	Dokumen	2	70,875,300	APBD
5.02.02.1.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Mataram	Dokumen	43	17,005,000	APBD
5.02.02.1.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Mataram	Dokumen	129	10,779,100	APBD
5.02.02.1.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Mataram	Dokumen	43	9,275,000	APBD
5.02.02.1.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Mataram	Dokumen	129	2,827,500	APBD
5.02.02.1.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Mataram	Dokumen	2	723,956,000	APBD
5.02.02.1.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Mataram	Dokumen	5	858,079,000	APBD
5.02.02.1.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Mataram	Dokumen	1	2,061,827,350	APBD

Kode Rekening	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
				Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
5.02.02.1.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Mataram	Orang	215	7,039,000	APBD
5.02.02.1.02	**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya kepatuhan Kabupaten/Kota Wilayah I dalam pelaksanaan evaluasi APBD**	**Persentase ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD/ Perubahan APBD dan Raperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota Wilayah I**	**Mataram**	**%**	**100**	**983,025,500**	**APBD**
		Meningkatnya kepatuhan Kabupaten/Kota Wilayah II dalam pelaksanaan evaluasi APBD	**Persentase ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD/ Perubahan APBD dan Raperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota Wilayah II**	**Mataram**	**%**	**100**		**APBD**
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	**Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan keuangan**	**Mataram**	**%**	**100**		**APBD**
5.02.02.1.02.02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Mataram	Laporan	10	323,031,280	APBD
5.02.02.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Mataram	Laporan	10	113,074,500	APBD

Kode Rekening	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
				Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
5.02.02.1.02.04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Mataram	Laporan	10	126,138,100	APBD
5.02.02.1.02.05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	Mataram	Dokumen	10	155,160,800	APBD
5.02.02.1.02.06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Mataram	Laporan	1	227,496,770	APBD
5.02.02.1.02.12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Mataram	Dokumen	2	38,124,050	APBD
5.02.02.1.03	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah**	**Persentase Penurunan SILPA**	**Mataram**	**%**	**31**	**684,761,800**	**APBD**
			Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	**Mataram**	**%**	**90**		**APBD**
			Persentase Penerbitan SP2D dari Jumlah SPM yang diverifikasi	**Mataram**	**%**	**100**		**APBD**
5.02.02.1.03.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Mataram	Dokumen	12	408,880,900	APBD

Kode Rekening	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
				Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
5.02.02.1.03.02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Mataram	Laporan	1	16,379,400	APBD
5.02.02.1.03.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Mataram	Dokumen	288	106,638,000	APBD
5.02.02.1.03.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Mataram	Dokumen	20	16,989,700	APBD
5.02.02.1.03.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Mataram	Dokumen	260	2,945,000	APBD
5.02.02.1.03.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Mataram	Laporan	14	22,352,600	APBD

Kode Rekening	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
				Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
5.02.02.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Mataram	Dokumen	1	15,477,300	APBD
5.02.02.1.03.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Mataram	Dokumen	12	47,128,000	APBD
5.02.02.1.03.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Mataram	Dokumen	1	42,370,500	APBD
5.02.02.1.03.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Mataram	Orang	10	5,600,400	APBD
5.02.02.1.04	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Meningkatnya kepatuhan pelaksanaan rekonsiliasi pelaporan keuangan perangkat daerah Sektor Ekonomi**	**Persentase ketepatan waktu rekonsiliasi keuangan Perangkat Daerah dan BLUD sektor ekonomi**	**Mataram**	**%**	**100**	**811,470,680**	**APBD**

Kode Rekening	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
				Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		Meningkatnya kepatuhan pelaksanaan rekonsiliasi pelaporan keuangan perangkat daerah Sektor Infrastruktur	**Persentase ketepatan waktu rekonsiliasi keuangan Perangkat Daerah dan BLUD sektor infrastruktur**	**Mataram**	**%**	**100**		**APBD**
5.02.02.1.04.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,Pendapatan LO dan Beban	Mataram	Dokumen	252	109,293,380	APBD
5.02.02.1.04.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Mataram	Laporan	18	41,916,000	APBD
5.02.02.1.04.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Mataram	Laporan	7	256,752,000	APBD
5.02.02.1.04.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Mataram	Dokumen	2	175,567,300	APBD
5.02.02.1.04.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Mataram	Dokumen	1	43,918,800	APBD

Kode Rekening	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
				Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
5.02.02.1.04.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Mataram	Dokumen	1	54,179,500	APBD
5.02.02.1.04.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Mataram	Orang	84	26,931,500	APBD
5.02.02.1.04.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	Mataram	Lembaga	22	102,912,200	APBD
5.02.02.1.05	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Meningkatnya efektivitas pengelolaan kewajiban dan transfer keuangan daerah**	**Persentase ketepatan waktu pemenuhan kewajiban dan penyaluran transfer keuangan daerah**	**Mataram**	**%**	**100**	**888,818,311,395**	**APBD**
5.02.02.1.05.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Mataram	Laporan	13	33,656,621,056	APBD
5.02.02.1.05.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Mataram	Laporan	10	1,849,500,000	APBD
5.02.02.1.05.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Mataram	Laporan	10	16,410,052,013	APBD
5.02.02.1.05.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Terkelolanya Dana bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Mataram	Laporan	4	836,902,138,326	APBD

Kode Rekening	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
				Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
5.02.02.1.06	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah dalam mendukung ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD**	**Persentase perangkat daerah yang menyampaikan data dan dokumen keuangan melalui sistem informasi daerah secara tepat waktu dan sesuai standar**	**Mataram**	**%**	**100**	**733,623,600**	**APBD**
5.02.02.1.06.01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Mataram	Dokumen	2	366,501,100	APBD
5.02.02.1.06.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Mataram	Dokumen	1	172,689,650	APBD
5.02.02.1.06.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Mataram	Orang	50	194,432,850	APBD
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**	**Nilai Indeks Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD**	**Mataram**	**Indeks**	**0.38**	**4,575,903,469**	**APBD**
			Nilai Indeks Ketepatan waktu penetapan RKBMD	**Mataram**	**Indeks**	**0.06**		**APBD**
			Nilai Indeks Ketepatan waktu penyampaian Laporan BMD	**Mataram**	**Indeks**	**0.13**		**APBD**

Kode Rekening	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
				Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			Nilai Indeks Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Pengawasan Pengendalian	**Mataram**	**Indeks**	**0.41**		**APBD**
			Nilai Indeks Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD	**Mataram**	**Indeks**	**0.31**		**APBD**
			Nilai Indeks Tindak lanjut Pengelolaan BMD	**Mataram**	**Indeks**	**0.33**		**APBD**
		Meningkatnya realisasi PAD atas pemanfaatan barang milik daerah (BMD) yang produktif	**Nilai Indeks Realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD**	**Mataram**	**Indeks**	**0.21**		**APBD**
		Tertibnya administrasi pengamanan BMD	**Nilai Indeks Sertifikasi dokumen kepemilikan BMD**	**Mataram**	**Indeks**	**0.24**		**APBD**
5.02.03.1.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Meningkatnya kualitas perencanaan BMD**	**Persentase Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMD Perangkat Daerah**	**Mataram**	**%**	**100**	**4,575,903,469**	**APBD**
		Meningkatnya kualitas penatausahaan dan pembinaan BMD	**Nilai indeks Materialitas Temuan BPK atas LKPD terkait BMD**	**Mataram**	**Indeks**	**2.81**		**APBD**
			Nilai indeks Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD	**Mataram**	**Indeks**	**0.91**		**APBD**
			Nilai indeks Laporan Semester I Penatausahaan BMD	**Mataram**	**Indeks**	**0.81**		**APBD**

Kode Rekening	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
				Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			Nilai indeks Laporan sampai dengan Semester II Penatausahaan BMD	**Mataram**	**Indeks**	**0.81**		**APBD**
			Nilai indeks Tindaklanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan BMD	**Mataram**	**Indeks**	**0.90**		**APBD**
			Nilai indeks Tindak lanjut BMD Rusak Berat/Usang	**Mataram**	**Indeks**	**0.40**		**APBD**
			Nilai indeks Tindak lanjut BMD Konstruksi Dalam Pengerjaan	**Mataram**	**Indeks**	**0.30**		**APBD**
			Persentase penambahan nilai aset tetap	**Mataram**	**%**	**3.00**		**APBD**
		Meningkatnya retribusi daerah yang bersumber dari pemanfaatan BMD	**Persentase realisasi retribusi daerah yang bersumber dari pemanfaatan BMD**	**Mataram**	**%**	**65.00**		**APBD**
		Tersertifikasinya aset tanah dan bangunan milik atau dikuasai Pemerintah Provinsi	**Nilai indeks Jumlah bidang yang mempunyai dokumen kepemilikan**	**Mataram**	**Indeks**	**1.01**		**APBD**
			Nilai indeks Nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan	**Mataram**	**Indeks**	**0.51**		**APBD**

Kode Rekening	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
				Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
5.02.03.1.01.01	Penyusunan Standar Harga	Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Mataram	Dokumen	1	100,972,900	APBD
5.02.03.1.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Mataram	Dokumen	1	48,578,800	APBD
5.02.03.1.01.03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Mataram	Dokumen	1	64,612,600	APBD
5.02.03.1.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Mataram	Dokumen	4	42,605,400	APBD
5.02.03.1.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Mataram	Laporan	1	950,079,700	APBD
5.02.03.1.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Mataram	Laporan	1	787,888,134	APBD
5.02.03.1.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Mataram	Laporan	1	382,235,000	APBD
5.02.03.1.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Mataram	Laporan	2	320,150,000	APBD
5.02.03.1.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Mataram	Laporan	1	5,880,000	APBD

Kode Rekening	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
				Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
5.02.03.1.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Mataram	Dokumen	37	1,660,148,150	APBD
5.02.03.1.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Mataram	Laporan	166	185,573,200	APBD
5.02.03.1.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Mataram	Laporan	2	22,810,000	APBD
5.02.03.1.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Mataram	Orang	272	4,369,585	APBD
Jumlah							**946,006,338,550**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 merupakan dokumen rencana kerja tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis BPKAD Tahun 2025–2029 yang telah disusun sebelumnya. Selain itu, rencana ini juga bertujuan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan.

Dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, diusulkan 3 (tiga) program yang merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023. Ketiga program tersebut telah tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025–2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB Tahun 2025-2029. Diharapkan, pelaksanaan program ini dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah secara lebih optimal.

Dengan demikian, diharapkan program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaan yang telah dirinci beserta target capaian dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dapat direalisasikan secara optimal dalam rangka mendukung peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mataram, 2025
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi NTB

Dr. H. Nursalim, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19731231 199402 1 009

RENCANA KERJA

2025

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadlirat Allah SWT, atas curahan rahmat dan karunia-Nya yang tak ternilai harganya berupa lingkungan hidup sumber daya hutan sebagai ekosistem penyangga kehidupan dan merupakan bagian aset yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Nusa Tenggara Barat memiliki sumberdaya alam yang membentang mulai dari pantai sampai dengan pegunungan yang kaya akan potensi. Potensi sumberdaya alam tersebut harus dikelola dengan sebaik-baiknya secara rasional, arif, berkeadilan dan berkelanjutan serta bermanfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat di Nusa Tenggara Barat.

Mengingat permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan dimasa mendatang akan semakin kompleks karena kebutuhan daerah akan pembangunan, maka perlu dirumuskan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan jangka menengah yang prioritasnya sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat periode Tahun 2024 - 2026 dalam sebuah rencana strategis.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2025 dapat disusun berkat bantuan pemikiran semua pihak yang telah memberikan sumbangsihnya. Untuk itu disampaikan apresiasi penghargaan ucapan terima kasih, semoga bermanfaat dan Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkahi upaya kita. Amin.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Julmansyah, S.Hut., M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740701 200212 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 1
1.3 Maksud dan Tujuan 2
1.4 Sistematika Penulisan 2
BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023 4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB 4
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 98
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 101
BAB 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH 102
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 102
3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 102
3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi 102
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 103
3.3 Program Dan Kegiatan SKPD 106
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 113
BAB 5 PENUTUP 346

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 5
Tabel 2.2 Indikator Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 98
Tabel 3.1 Tujuan, sasaran, indikator dan target Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2025 104
Tabel 3.2 Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2025 106
Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 117
Tabel 4.2 Pemetaan Pendanaan Program Unggulan Dinas LHK Provinsi NTB tahun 2025 343

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026.

Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi. Renja SKPD disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor Tahun 2004;
c) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
d) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
e) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
f) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
g) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
h) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Men-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
k) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;
l) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah;
m) Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
n) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan;
o) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
p) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 44 tahun 2020 tentang perubahan kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan fungsi serta Tata Kerja unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat;
q) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 ini dimaksudkan agar menjadi Pedoman bagi perencanaan kegiatan dan penganggaran di tahun 2025. Adapun tujuannya adalah mensinergikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi NTB Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan, memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan. Latar belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, proses penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, keterkaitan antara SKPD dengan dokumen RKPD, Rencana Strategis (Renstra). Landasan hukum memuat penjelasan tentang Undang-

Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

Bab 2 Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu, memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu, analisa kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi. Pada evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan. Analisis kinerja pelayanan SKPD berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja utama yang sudah ditentukan. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja mengenai koordinasi dan sinergi program dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan, serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi.

Bab 3 Tujuan dan Sasaran, memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran renja. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis (Renstra).

Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan, memuat penjelasan mengenai uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan, baik jenis program/kegiatan dan pagu indikatifnya.

Bab 5 Penutup.

BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2023 mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Dalam penyusunan dokumen rencana kerja tahun 2023 banyak terdapat dinamika permasalahan disebabkan oleh isu pandemi global, sasaran strategis, indikator kinerja, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategis Dinas LHK tahun 2019-2023 mengalami perubahan.

Secara umum Rencana Kerja Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2023 memuat 13 (tiga belas) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan meliputi : 12 (dua belas) program prioritas dengan 22 (dua puluh dua) kegiatan dan 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan 10 (sepuluh) kegiatan. Untuk lebih jelasnya hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas LHK Provinsi NTB Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB				**83.479.461.110**		**78.785.271.681**
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Nilai SAKIP OPD**	**Poin**	**BB**	**75.414.971.430**	**BB**	**71.327.501.127**
2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja***	***%***	***100***	***1.090.819.881***	***100***	***1.072.487.700***
2.11.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersedia	dokumen	1	146.222.686	1	144.866.700
2.11.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	50.000.000	1	49.400.000
2.11.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	40.000.000	1	39.938.000
2.11.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	13.040.000	1	12.790.000
2.11.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	13.040.000	1	12.947.000
2.11.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	dokumen	1	90.000.000	1	89.890.000
2.11.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	dokumen	1	738.517.195	1	722.656.000
2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi keuangan***	***%***	***100***	***49.468.209.978***	***100***	***45.722.469.986***

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
2.11.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	orang	543	49.247.797.508	543	45.509.409.486
2.11.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia	orang	1	106.831.170	1	106.764.500
2.11.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	dokumen	1	30.000.100	1	29.773.000
2.11.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang tersusun	dokumen	18	83.581.200	14	76.523.000
2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah***	***%***	***100***	***151.253.900***	***100***	***148.200.800***
2.11.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang tersusun	dokumen	1	10.999.800	1	10.976.700
2.11.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kegiatan pengamanan barang milik daerah	kegiatan	1	35.433.000	1	35.383.200
2.11.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kegiatan Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah SKPD yang dilaksanakan	kegiatan	1	40.010.000	1	38.506.800
2.11.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	dokumen	1	15.005.100	1	14.694.100
2.11.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan barang milik daerah yang tersedia	orang	1	49.806.000	1	48.640.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%	100	***159.999.000***	100	***159.730.500***
2.11.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang tersusun	dokumen	1	25.001.000	1	24.866.600
2.11.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan	sistem	1	30.000.500	1	29.990.000
2.11.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah kegiatan monev kinerja pegawai yang dilaksanakan	laporan	1	50.000.000	1	49.998.000
2.11.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	orang	30	39.999.000	6	39.877.900
2.11.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan bimtek implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	kegiatan	1	14.998.500	1	14.998.000
2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pelayanan administrasi umum**	**%**	**100**	***283.840.090***	**100**	***283.566.839***
2.11.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	jenis	10	4.989.000	10	4.989.000
2.11.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	10	9.803.000	10	9.803.000
2.11.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	18	20.006.790	18	19.995.000
2.11.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	20	9.199.800	20	9.199.800

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
2.11.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	jenis	4	15.001.500	4	15.001.500
2.11.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				840.000		840.000
2.11.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	orang	450	44.000.000	320	43.993.000
2.11.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah	OT	30	180.000.000	48	179.745.539
2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**%**	**100**	***318.587.800***	**100**	***307.421.214***
2.11.01.1.07.05 Pengadaan Mebel				**142.051.000**		**133.300.000**
2.11.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	1	32.198.600	1	30.998.000
2.11.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	144.338.200	1	143.123.214
2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	***%***	***100***	***23.325.833.500***	***100***	***23.042.162.883***
2.11.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat	lembar	2.500	5.013.000	3.038	4.993.000
2.11.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	rekening	3	141.210.000	3	134.453.885

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
2.11.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan, keamanan, dan pengamanan hutan yang tersedia	orang	57	23.179.610.500	57	22.902.715.998
2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah**	**%**	**100**	***616.427.281***	**100**	***591.461.205***
2.11.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang terpelihara	unit	45	343.250.000	45	343.248.711
2.11.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	unit	22	31.350.000	22	31.350.000
2.11.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aplikasi sistem informasi yang terpelihara	unit	1	23.620.000	0	-
2.11.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	unit	1	163.207.281	1	162.422.730
2.11.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	55.000.000	1	54.439.764
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	***Persentase dokumen kajian lingkungan hidup yang telah diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan***	***%***	***100***	***498.357.400***	***100***	***396.854.474***
2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	***Dokumen RPPLH, IKPLHD, dan IKLH yang disusun***	***Dokumen***	***3***	***69.117.400***	***3***	***67.950.877***
2.11.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH yang tersusun	Dokumen	1	39.248.200	1	39.121.200

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
2.11.02.1.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan RPPLH yang tersusun	Dokumen	2	29.869.200	2	28.829.677
2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	***Jumlah KLHS yang disusun dan divalidasi***	***Dokumen***	***15***	***429.240.000***	***11***	***328.903.597***
2.11.02.1.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Kawasan Strategis dan dokumen KLHS kab/kota yang divalidasi	Dokumen	6	77.540.000	2	1.700.000
2.11.02.1.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun/divalidasi	Dokumen	8	300.000.000	8	277.387.991
2.11.02.1.02.04 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang disusun/dilaksanakan	Dokumen	1	51.700.000	1	49.815.606
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Termasuk : Taman Asri/Indah)	***Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya***	***lokasi***	***10***	***126.500.200***	***10***	***124.414.400***
2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	***Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup***	***unit usaha***	***30***	***97.730.700***	***13***	***95.888.400***
2.11.03.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup	unit usaha	30	49.228.700	13	47.406.900

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
2.11.03.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kelompok masyarakat yang memenuhi syarat program kampung iklim	kelompok	1	48.502.000	12	48.481.500
2.11.03.1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	**Jumlah lokasi pencemaran lingkungan yang diatasi**	**lokasi**	**10**	**28.769.500**	**10**	**28.526.000**
2.11.03.1.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	jumlah dokumen publikasi hasil pemantauan kualitas lingkungan (air sungai, air laut, udara)	dokumen	1	28.769.500	1	28.526.000
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	***Persentase taman kehati yang terkelola***	***%***	***100***	***48.690.300***	***100***	***47.856.200***
2.11.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah lokasi pengelolaan taman kehati	lokasi	1	48.690.300	1	47.856.200
2.11.04.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	jumlah dokumen siteplan kehati yang ditetapkan	dokumen	1	48.690.300	1	47.856.200
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	***Persentase unit usaha penghasil limbah B3 yang tertib aturan***	***%***	***100***	***34.430.400***	***100***	***33.550.010***
2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah unit usaha pengumpul limbah B3 lintas daerah kab kota yang tertib aturan	unit usaha	30	34.430.400	30	33.550.010

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
2.11.05.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	persetujuan/izin	5	34.430.400	5	33.550.010
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	***Persentase pelaku usaha yang menindaklanjuti hasil pengawasan ketaatan ijin lingkungan***	**%**	**100**	**75.000.000**	**100**	**69.952.533**
2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah pemegang izin lingkungan dan izin PPLH yang dibina dan diawasi	unit usaha	60	75.000.000	60	69.952.533
2.11.06.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah usaha/ kegiatan yang difasilitasi perijinan lingkungannya	usaha/kegiatan	30	37.500.000	30	37.453.133

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
2.11.06.1.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diawasi	usaha/kegiatan	30	37.500.000	30	32.499.400
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Persentase sekolah yang mampu memenuhi syarat adiwiyata tingkat nasional**	**%**	**10**	**149.924.600**	**10**	**131.878.242**
2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah sekolah yg mampu memenuhi syarat adiwiyata tingkat provinsi*	*sekolah*	*10*	*149.924.600*	*10*	*131.878.242*
2.11.08.1.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yg mampu memenuhi syarat adiwiyata tingkat provinsi	sekolah	10	149.924.600	10	131.878.242
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase pengaduan yang terselesaikan**	**%**	**100**	**74.999.900**	**100**	**69.029.031**
2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani	Pengaduan	20	74.999.900	5	69.029.031
2.11.10.1.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang tertangani	Pengaduan	15	37.499.900	5	37.432.600

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
2.11.10.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah penyelesaian sengketa kasus lingkungan hidup yang difasilitasi	pengaduan/kasus	5	37.500.000	5	31.596.431
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (Termasuk : NTB Zero Waste/Pengolahan Sampah/Bank Sampah)	**Persentase pengelolaan sampah**	**%**	**100**	**4.943.500.000**	**65,31**	**4.854.139.856**
2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase penanganan sampah	%	70	4.943.500.000	49,64	4.854.139.856
2.11.11.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Persentase Pengurangan Sampah	%	30	4.943.500.000	15,67	4.854.139.856
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN (Termasuk: NTB Hijau, Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani & Tambora)	***Presentase Luas Kawasan Hutan yang dikelola***	***%***	***10***	***1.663.103.680***	***10***	***1.288.162.258***
3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	**Panjang keliling Blok/Petak Pengelolaan Hutan**	**Km**	**10**	**121.643.500**	2.658,30	**121.066.600**
3.28.03.1.01.02 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Panjang keliling Blok/Petak Pengelolaan Hutan	Km	10	121.643.500	2.658,30	121.066.600
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	***Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun***	***%***	***100***	***74.999.800***	***100***	***16.440.000***

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	10	74.999.800	10	16.440.000
3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	***Jumlah data dan Informasi pemanfaaatan kawasan hutan yang tersedia***	***dokumen***	***1***	***214.386.300***	**1**	***183.840.528***
3.28.03.1.03.01 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan produksi yang tersusun	Dokumen	1	99.590.400	*1*	99.157.400
3.28.03.1.03.03 Pelayanan Perizinan Usaha/Kerjasama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutan	Jumlah Sosialisasi Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Kab/Kota	9	54.836.900	9	25.581.000
3.28.03.1.03.06 Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah kegiatan evaluasi kinerja KPHP yang dilaksanakan	kegiatan	1	59.959.000	1	59.102.128
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	***luas lahan kritis yang di rehabilitasi***	***ha***	***1754,5***	***649.999.900***	***1754,5***	***367.826.740***
3.28.03.1.04.01 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah dokumen RTnRL yang disusun	dokumen	1	50.000.000	1	49.731.840
3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dikembangkan	ha	1.064,50	429.000.000	1.064,50	240.170.000
3.28.03.1.04.08 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Lokasi RHL yang dibina dan dimonitoring	KPH/Tahura	16	170.999.900	16	77.924.900

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Persentase luas kawasan hutan yang terlindungi*	*%*	*39,45*	***437.132.780***	*39,45*	***436.283.841***
3.28.03.1.05.03 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah kasus Tipihut yang ditangani	kasus	10	173.250.080	*5*	172.488.232
3.28.03.1.05.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan perlindungan hutan	kegiatan	1	219.839.500	1	219.792.409
3.28.03.1.05.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah titik kebakaran hutan dan lahan yang ditangani	titik	30	44.043.200	6	44.003.200
3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	***Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak***	***Unit***	***12***	***46.023.000***	***12***	***44.222.909***
3.28.03.1.06.02 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah IUIPHHBK yang difasilitasi	ijin usaha	5	46.023.000	5	44.222.909
3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	***Jumlah industri HHK yang dibina dan diawasi***	***Industri***	***11***	***118.918.400***	**11**	***118.481.640***
3.28.03.1.07.02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah industri HHK yang dibina dan diawasi	industri	11	118.918.400	*11*	118.481.640
3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (Termasuk: Pertanian Lestari/Modern)	**cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi**	**ha**	**31.847**	**149.982.400**	**31.847**	**149.700.050**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	***Jumlah penangkar TSL non appendix yang tertib aturan***	***penangkar***	***24***	***44.694.200***	***24***	***44.666.200***
3.28.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah penangkar TSL non appendix yang tertib aturan	penangkar	24	44.694.200	24	44.666.200
3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	***Jumlah KEE, Cagar Biosfer dan Geopark yang terkelola***	***kelompok***	***8***	***105.288.200***	***8***	***105.033.850***
3.28.04.1.03.05 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kelompok masyarakat pada KEE yang ditingkatkan kapasitasnya	kelompok	16	38.633.200	16	38.612.850
3.28.04.1.03.06 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah KEE dan cagar biosfer yang difasilitasi pengembangannya	kelompok/lembaga	8	66.655.000	8	66.421.000
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	**Persentase KTH yang meningkat kelasnya**	**%**	**13,27**	**150.000.900**	**13,27**	**149.820.900**
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	***Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya***	***kelompok***	***10***	***150.000.900***	***10***	***149.820.900***

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.05.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	jumlah penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	67	50.001.000	67	50.001.000
3.28.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kelasnya dari Blue ke Gold/Madya	kelompok	14	50.000.000	14	50.000.000
3.28.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi pembentukannya	kelompok	40	49.999.900	40	49.819.900
3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	***Peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS***	***DAS***	***4***	***149.999.900***	***4***	***142.412.600***
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	***Jumlah DAS yang dipelihara dan dipulihkan fungsinya***	***DAS***	**4**	**149.999.900**	**4**	**142.412.600**
3.28.06.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang disusun	dokumen	1	50.000.000	1	47.737.700
3.28.06.1.01.02 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah lembaga pengelolaan DAS yang dikembangkan	lembaga	6	50.000.000	6	48.075.000
3.28.06.1.01.03 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	Unit	247	49.999.900	247	46.599.900
2.11.3.28.0.00.02.0001 Balai Laboratorium Lingkungan				**1.019.770.770**		**1.014.981.871**
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	***Nilai SAKIP OPD***	***Poin***	***BB***	***470.938.220***	***BB***	***468.376.451***
2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja***	***%***	***100***	***6.600.800***	***100***	***6.600.800***

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
2.11.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	-	-	-
2.11.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	743.500	1	743.500
2.11.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.600.500	1	4.600.500
2.11.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	1.256.800	1	1.256.800
2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi keuangan***	***%***	***100***	***6.932.500***	***100***	***6.402.500***
2.11.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia	orang	1	3.634.000	1	3.634.000
2.11.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	dokumen	1	3.298.500	1	2.768.500
2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah***	***%***	***100***	***4.623.600***	***100***	***4.463.600***
2.11.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang tersusun	dokumen	1	2.311.800	1	2.151.800
2.11.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kegiatan Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah SKPD yang dilaksanakan	kegiatan	1	2.311.800	1	2.311.800
2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah***	***%***	***100***	***3.467.800***	***100***	***3.467.800***

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
2.11.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi sektor LHK yang tersusun	dokumen	1	3.467.800	1	3.467.800
2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi kepegawaian***	***%***	***100***	***3.650.100***	***100***	***3.649.100***
2.11.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan	sistem	1	3.416.400	1	3.415.400
2.11.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	orang	1	233.700	1	233.700
2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi umum***	***%***	***100***	***35.344.900***	***100***	***35.344.900***
2.11.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	jenis	50	5.786.000	50	5.786.000
2.11.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	14	7.653.300	14	7.653.300
2.11.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	12	4.853.200	12	4.853.200
2.11.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	jenis	4	5.052.400	4	5.052.400
2.11.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	orang	150	12.000.000	150	12.000.000
2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah***	***%***	***100***	***99.000.000***	***100***	***98.951.600***
2.11.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	1	59.000.000	1	58.951.600

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
2.11.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	unit	5	40.000.000	5	40.000.000
2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	***%***	***100***	***136.598.920***	***100***	***134.926.731***
2.11.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat	lembar	400	3.820.000	400	2.582.000
2.11.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	rekening	3	132.778.920	3	132.344.731
2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase pemeliharaan barang milik daerah***	***%***	***100***	***174.719.600***	***100***	***174.569.420***
2.11.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	unit	6	43.620.000	6	43.619.820
2.11.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel terpelihara	unit	10	4.000.000	10	4.000.000
2.11.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	unit	31	32.099.600	31	32.099.600
2.11.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	unit	1	-	-	-
2.11.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	95.000.000	1	94.850.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	***Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya***	***lokasi***	***10***	***548.832.550***	***10***	***546.605.420***
2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	***Jumlah titik sampel dilakukan pengawasan pencemaran lingkungan hidup***	***titik sampel***	***282***	***548.832.550***	***60***	***546.605.420***
2.11.03.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah titik sampel dilakukan pengawasan pencemaran lingkungan hidup	titik sampel	282	100.000.000	60	99.385.000
2.11.03.1.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Parameter yang mampu diuji di Balai Laboratorium Lingkungan	parameter	10	448.832.550	91	447.220.420
2.11.3.28.0.00.02.0002 Balai Taman Hutan Raya NURAKSA				**384.381.600**		**378.742.477**
3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	***Nilai SAKIP OPD***	***Poin***	***BB***	***95.468.900***	***BB***	***91.579.777***
3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja***	***%***	***100***	***10.571.000***	***100***	***9.675.600***
3.28.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	3.430.800	1	3.048.500
3.28.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	1.803.100	1	1.570.000
3.28.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	2.812.900	1	2.672.900
3.28.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	2.524.200	1	2.384.200

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi keuangan***	***%***	***100***	***13.282.000***	***100***	***12.251.000***
3.28.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia	orang	1	8.923.400	1	8.172.400
3.28.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	dokumen	1	2.655.900	1	2.515.900
3.28.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang tersusun	dokumen	18	1.702.700	13	1.562.700
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah***	***%***	***100***	***5.116.000***	***100***	***4.906.000***
3.28.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun	dokumen	1	2.548.000	1	2.408.000
2.11.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan barang milik daerah yang tersedia	orang	1	2.568.000	1	2.498.000
3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah***	***%***	***100***	***1.683.500***	***100***	***1.683.500***
3.28.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi sektor LHK yang tersusun	dokumen	1	1.683.500	1	1.683.500
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi kepegawaian***	***%***	***100***	***2.000.000***	***100***	***2.000.000***

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan	sistem	1	1.010.000	1	1.010.000
3.28.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan bimtek implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	kegiatan	1	990.000	1	990.000
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi umum***	***%***	***100***	***27.446.400***	***100***	***27.151.800***
3.28.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	jenis	9	6.137.500	9	6.135.500
3.28.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	21	3.702.500	21	3.569.600
3.28.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	22	3.700.600	22	3.695.900
3.28.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	12	4.600.000	12	4.585.000
3.28.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	jenis	9	2.221.600	9	2.221.600
3.28.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah	OT	24	7.084.200	24	6.944.200
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	***%***	***100***	***11.525.000***	***100***	***10.176.320***
3.28.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat	lembar	400	1.700.000	143	1.158.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	rekening	2	9.825.000	2	9.018.320
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase pemeliharaan barang milik daerah***	***%***	***100***	***23.845.000***	***100***	***23.735.557***
3.28.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	unit	3	21.810.000	3	21.700.557
3.28.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara	unit	5	2.035.000	5	2.035.000
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	*Presentase Luas Kawasan Hutan yang dikelola*	*%*	*0,67*	*17.000.000*	*0,67*	*16.990.000*
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	***luas lahan kritis yang di rehabilitasi***	***ha***	***100***	***17.000.000***	***100***	***16.990.000***
3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	ha	100	17.000.000	100	16.990.000
3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	*cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi*	*ha*	*3155*	*246.912.700*	*3155*	*245.272.700*
3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	***Jumlah Taman Hutan Raya yang dikelola***	***unit***	***1***	***246.912.700***	***1***	***245.272.700***
3.28.04.1.01.02 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	luas kawasan TAHURA yang diamankan	ha	3155	32.803.000	3.155	32.783.000
3.28.04.1.01.06 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Jumlah Sarpras objek wisata yang dibangun	unit	1	204.109.700	1	202.659.700

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.04.1.01.11 Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah dokumen rencana pengelolaan TAHURA yang tersusun	Dokumen	4	10.000.000	1	9.830.000
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	***Persentase KTH yang meningkat kelasnya***	***%***	***25***	***25.000.000***	***-***	***24.900.000***
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya*	*kelompok*	*1*	***25.000.000***	*1*	***24.900.000***
3.28.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	2	25.000.000	6	24.900.000
2.11.3.28.0.00.02.0003 Balai KPH Rinjani Barat				**846.775.480**		**839.586.216**
3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	*Nilai SAKIP OPD*	*Poin*	*BB*	***356.864.780***	*BB*	***351.640.616***
3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja***	***%***	***100***	***10.571.380***	***100***	***10.286.360***
3.28.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	1.170.600	1	1.167.500
3.28.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	2.325.200	1	2.288.580
3.28.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.572.080	1	4.409.780

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	2.503.500	1	2.420.500
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi keuangan***	***%***	***100***	***11.492.400***	***100***	***11.406.200***
3.28.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia	orang	1	8.110.200	1	8.082.800
3.28.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	dokumen	1	1.397.800	1	1.359.000
3.28.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang tersusun	dokumen	18	1.984.400	18	1.964.400
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah***	***%***	***100***	***9.703.100***	***100***	***9.494.400***
3.28.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	dokumen	1	5.354.000	1	5.253.800
3.28.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	dokumen	1	1.674.200	1	1.674.200
3.28.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan barang milik daerah yang tersedia	orang	1	2.674.900	1	2.566.400
3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah***	***%***	***100***	***2.875.400***	***100***	***2.811.100***

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi sektor LHK yang tersusun	dokumen	1	2.875.400	1	2.811.100
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi kepegawaian***	***%***	***100***	***2.000.000***	***100***	***1.990.000***
3.28.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan	sistem	1	1.001.000	1	991.000
3.28.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan bimtek implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	kegiatan	1	999.000	1	999.000
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi umum***	***%***	***100***	***25.037.300***	***100***	***24.781.800***
3.28.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	jenis	9	3.185.800	9	3.184.000
3.28.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	8	1.908.000	8	1.907.000
3.28.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	13	6.196.500	13	6.163.900
3.28.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	jenis	6	1.447.000	6	1.427.000
3.28.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia	jenis	2	1.830.000	2	1.820.000
3.28.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	orang	115	3.000.000	115	2.900.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah	OT	3	7.470.000	3	7.379.900
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**%**	**100**	**144.625.200**	**100**	**140.727.081**
3.28.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat	lembar	400	1.700.700	400	1.693.400
3.28.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	rekening	6	142.924.500	6	139.033.681
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah**	**%**	**100**	**150.560.000**	**100**	**150.143.675**
3.28.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang terpelihara	unit	8	64.670.000	8	64.643.675
3.28.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara	unit	6	6.390.000	6	6.350.000
3.28.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	unit	1	79.500.000	1	79.150.000
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	*Presentase Luas Kawasan Hutan yang dikelola*	*%*	*0,67*	*441.910.700*	*0,67*	*440.165.600*
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN (Termasuk: NTB Hijau, Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani & Tambora)	*Persentase Luas Kawasan Hutan yang terlindungi*	*%*	*90,28*	*104.440.300*	*90,28*	*104.327.600*

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	***Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun***	***%***	***100***	***10.000.000***	***100***	***9.878.000***
3.28.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	dokumen	1	10.000.000	1	9.878.000
3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	**Jumlah data dan Informasi pemanfaaatan kawasan hutan yang tersedia**	**dokumen**	**1**	**22.370.400**	**1**	**22.170.000**
3.28.03.1.03.09 Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah unit Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan yang dikembangkan	unit	1	22.370.400	1	22.170.000
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	***luas lahan kritis yang di rehabilitasi***	***ha***	***130***	***255.100.000***	***130***	***253.890.000***
3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	ha	30	5.100.000	30	5.040.000
3.28.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	ha	100	250.000.000	100	248.850.000
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	***Persentase luas kawasan hutan yang terlindungi***	***%***	**90,28**	**104.440.300**	**90,28**	**104.327.600**
3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilindungi	ha	37000	104.440.300	37000	104.327.600
3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	**Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak**	**Unit**	**3**	**50.000.000**	**3**	**49.900.000**
3.28.03.1.06.01 Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah unit pengolahan HHBK yang difasilitasi	Unit	3	50.000.000	3	49.900.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	***Persentase KTH yang meningkat kelasnya***	***%***	***6***	***48.000.000***	***6***	***47.780.000***
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	***Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya***	***Kelompok***	***6***	***48.000.000***	***6***	***47.780.000***
3.28.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	6	48.000.000	*6*	47.780.000
2.11.3.28.0.00.02.0004 Balai KPH Ampang Riwo				**365.057.100**		**357.475.274**
3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	***Nilai SAKIP OPD***	***Poin***	***BB***	***156.574.100***	***BB***	***149.362.274***
3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**100**	**18.581.500**	**100**	**16.581.500**
3.28.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	6.322.100	1	5.122.100
3.28.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.071.000	1	3.821.000
3.28.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.500.000	1	3.950.000
3.28.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	3.688.400	1	3.688.400
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi keuangan***	***%***	***100***	**16.749.400**	***100***	**16.749.400**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah tenaga pengelolaan keuangan yang tersedia	orang	1	1.164.000	1	1.164.000
3.28.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	dokumen	1	6.085.400	1	6.085.400
3.28.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang tersusun	dokumen	18	9.500.000	18	9.500.000
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah***	***%***	***100***	**13.833.000**	***100***	**13.713.000**
3.28.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	dokumen	1	832.000	1	832.000
3.28.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	dokumen	1	7.500.000	1	7.380.000
3.28.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan barang milik daerah yang tersedia	orang	1	5.501.000	1	5.501.000
3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi kepegawaian***	***%***	***100***	***1.607.000***	***100***	***1.607.000***
3.28.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi sektor LHK yang tersusun	dokumen	1	1.607.000	1	1.607.000
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pelayanan administrasi umum**	**%**	**100**	**25.893.600**	**100**	**25.369.000**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	jenis	2	217.000	2	217.000
3.28.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	8	1.731.200	8	1.731.200
3.28.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	29	2.980.600	29	2.980.600
3.28.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	jenis	3	1.280.000	3	755.400
3.28.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	orang	115	1.400.000	115	1.400.000
3.28.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah	OT	3	18.284.800	3	18.284.800
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah***	***Unit***	***1***	***8.250.000***	***1***	***8.250.000***
3.28.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	8.250.000	1	8.250.000
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	***%***	***100***	***11.409.600***	***100***	***10.145.600***
3.28.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat	lembar	400	1.809.600	400	556.600
3.28.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	rekening	3	9.600.000	3	9.589.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase pemeliharaan barang milik daerah***	***%***	***100***	***60.250.000***	***100***	***56.946.774***
3.28.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara	unit	4	55.050.000	4	51.746.774
3.28.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	1	5.200.000	1	5.200.000
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	*Presentase Luas Kawasan Hutan yang dikelola*	%	0,67	208.483.000	0,67	208.113.000
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN (Termasuk: NTB Hijau, Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani & Tambora)	***Persentase Luas Kawasan Hutan yang terlindungi***	**%**	**4,78**	**122.037.000**	**4,78**	**122.037.000**
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	***Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun***	***%***	***100***	***9.972.000***	***100***	***9.972.000***
3.28.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	dokumen	1	9.972.000	1	9.972.000
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	***luas lahan kritis yang di rehabilitasi***	***ha***	600	***76.474.000***	***150***	***76.104.000***
3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	ha	600	76.474.000	150	76.104.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	***Persentase luas kawasan hutan yang terlindungi***	***%***	**44,7**	**122.037.000**	**44,7**	**122.037.000**
3.28.03.1.05.01 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilindungi	ha	19000	122.037.000	19000	122.037.000
2.11.3.28.0.00.02.0005 Balai KPH Tambora				**385.522.700**		**376.868.150**
3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	***Nilai SAKIP OPD***	***Poin***	***BB***	***170.563.800***	***BB***	***164.366.000***
3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**%**	**100**	**14.529.000**	**100**	**13.436.000**
3.28.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	3.261.000	1	3.259.000
3.28.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	2.294.000	1	2.274.000
3.28.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.376.000	1	4.325.000
3.28.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.598.000	1	3.578.000
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi keuangan***	***%***	***100***	***28.032.500***	***100***	***25.594.500***
3.28.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia	orang	2	16.284.000	2	14.124.000
3.28.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	dokumen	1	4.512.500	1	4.242.500

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang tersusun	dokumen	18	7.236.000	18	7.228.000
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah***	***%***	***100***	***13.955.000***	***100***	***12.983.500***
3.28.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	dokumen	1	1.224.000	1	1.124.000
3.28.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	dokumen	1	6.335.000	1	5.741.000
3.28.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan barang milik daerah yang tersedia	orang	1	6.396.000	1	6.118.500
3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah***	***%***	***100***	***660.000***	***100***	***660.000***
3.28.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi sektor LHK yang tersusun	dokumen	1	660.000	1	660.000
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi kepegawaian***	***%***	***100***	***1.750.000***	***100***	***1.678.000***
3.28.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan	sistem	1	1.750.000	1	*1.678.000*

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan bimtek implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	kegiatan	1	1.750.000	1	1.678.000
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi umum***	***%***	***100***	***45.809.900***	***100***	***45.438.800***
3.28.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	jenis	11	1.100.000	11	1.100.000
3.28.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	4	7.494.600	4	7.461.000
3.28.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	12	2.015.000	12	2.015.000
3.28.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	22	3.114.300	22	3.106.800
3.28.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	jenis	1	300.000	1	300.000
3.28.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia	jenis	-	-	-	-
3.28.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	orang	80	4.650.000	80	4.410.000
3.28.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah	OT	12	27.136.000	12	27.046.000
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah***	***unit***	***1***	***37.125.000***	***1***	***37.125.000***
3.28.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	unit	1	37.125.000	1	37.125.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	***%***	***100***	***8.696.400***	***100***	***7.460.200***
3.28.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat	lembar	400	1.695.900	400	1.695.900
3.28.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	rekening	2	7.000.500	2	5.764.300
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase pemeliharaan barang milik daerah***	***%***	***100***	***20.000.000***	***100***	***19.990.000***
3.28.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara	unit	2	20.000.000	2	19.990.000
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	***Presentase Luas Kawasan Hutan yang dikelola***	**%**	**0,67**	**214.958.900**	**0,67**	**212.502.150**
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN (Termasuk: NTB Hijau, Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani & Tambora)	*Persentase Luas Kawasan Hutan yang terlindungi*	%	6,43	136.653.000	6,43	135.995.250
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	***Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun***	**%**	**100**	**20.000.000**	**100**	**18.443.000**
3.28.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	dokumen	2	20.000.000	2	18.443.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	***Jumlah data dan Informasi pemanfaaatan kawasan hutan yang tersedia***	***dokumen***	**1**	***4.589.900***	**1**	***4.429.900***
3.28.03.1.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	dokumen	1	4.589.900	1	4.429.900
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	***luas lahan kritis yang di rehabilitasi***	***ha***	***100***	***53.716.000***	***100***	***53.634.000***
3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dikembangkan	ha	100	53.716.000	100	53.634.000
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	***Persentase luas kawasan hutan yang terlindungi***	***%***	***41,97***	***136.653.000***	***41,97***	***135.995.250***
3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilindungi	ha	24000	136.653.000	24000	135.995.250
2.11.3.28.0.00.02.0006 Balai KPH Maria Donggomasa				**401.672.500**		**346.703.603**
3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	***Nilai SAKIP OPD***	***Poin***	***BB***	***154.428.500***	***BB***	***100.797.628***
3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja***	***%***	***100***	***15.827.000***	***100***	***3.201.600***
3.28.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.024.000	1	2.120.000
3.28.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	2.695.000	1	287.600

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.610.000	1	544.000
3.28.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.498.000	1	250.000
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi keuangan***	***%***	***100***	***16.825.000***	***100***	***14.680.000***
3.28.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	dokumen	1	16.825.000	1	14.680.000
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah***	***%***	***100***	***14.084.500***	***100***	***12.491.000***
3.28.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	dokumen	1	2.373.000	1	1.640.000
3.28.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	dokumen	1	5.810.000	1	5.360.000
3.28.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan barang milik daerah yang tersedia	orang	1	5.901.500	1	5.491.000
3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah***	***%***	***100***	***2.500.000***	***100***	***2.230.000***
3.28.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi sektor LHK yang tersusun	dokumen	1	2.500.000	1	2.230.000
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi kepegawaian***	***%***	***100***	***3.016.000***	***100***	***2.552.000***

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan	sistem	1	3.016.000	1	2.552.000
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi umum***	***%***	***100***	***32.786.000***	***100***	***21.082.100***
3.28.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	7	3.649.000	7	2.150.000
3.28.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	3	4.995.000	3	4.773.000
3.28.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	jenis	1	3.588.000	1	1.490.000
3.28.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia	jenis	1	1.660.000	-	-
3.28.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	orang	110	6.500.000	110	1.035.600
3.28.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah	OT	2	12.394.000	2	11.633.500
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	***%***	***100***	***41.770.000***	***100***	***16.948.928***
3.28.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat	lembar	400	1.720.000	400	1.170.000
3.28.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	rekening	3	40.050.000	3	15.778.928
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase pemeliharaan barang milik daerah***	***%***	***100***	***27.620.000***	***100***	***27.612.000***

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	unit	5	27.620.000	5	27.612.000
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	***Presentase Luas Kawasan Hutan yang dikelola***	***%***	***0,67***	***247.244.000***	***0,67***	***245.905.975***
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN (Termasuk: NTB Hijau, Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani & Tambora)	***Persentase Luas Kawasan Hutan yang terlindungi***	***%***	***43,17***	***139.494.000***	***43,17***	***138.991.100***
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	***Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun***	***%***	***100***	***20.000.000***	***100***	***19.940.706***
3.28.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	dokumen	1	20.000.000	1	19.940.706
3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	***Jumlah data dan Informasi pemanfaaatan kawasan hutan yang tersedia***	***dokumen***	***1***	***4.875.000***	***1***	***4.835.000***
3.28.03.1.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Pemegang Izin Usaha dan Kerjasama di HP yang dinilai	Unit	2	4.875.000	2	4.835.000
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	***luas lahan kritis yang di rehabilitasi***	***ha***	***95***	***82.875.000***	***95***	***82.139.169***
3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dikembangkan	ha	50	82.875.000	50	82.139.169
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	***Persentase luas kawasan hutan yang terlindungi***	***%***	***43,17***	***139.494.000***	***43,17***	***138.991.100***

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilindungi	ha	30500	139.494.000	30500	138.991.100
2.11.3.28.0.00.02.0007 Balai KPH Rinjani Timur				**587.361.100**		**564.885.430**
3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Nilai SAKIP OPD**	**Poin**	**BB**	**307.074.700**	**BB**	**284.939.030**
3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja***	*%*	***100***	***10.570.000***	***100***	***10.490.000***
3.28.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	6.014.000	1	5.954.000
3.28.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.556.000	1	4.536.000
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi keuangan***	*%*	***100***	***11.492.100***	***100***	***11.492.100***
3.28.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia	orang	1	3.753.900	1	3.753.900
3.28.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang tersusun	dokumen	18	7.738.200	18	7.738.200
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah***	*%*	***100***	***9.708.000***	***100***	***9.588.000***
3.28.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	dokumen	1	9.708.000	1	9.588.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah***	***%***	***100***	***2.500.000***	***100***	***2.340.000***
3.28.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	1	2.500.000	1	2.340.000
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi kepegawaian***	***%***	***100***	***2.650.000***	***100***	***2.650.000***
3.28.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan	sistem	1	2.650.000	1	2.650.000
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi umum***	***%***	***100***	***25.509.600***	***100***	***21.575.600***
3.28.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	jenis	2	1.960.000	2	1.960.000
3.28.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	7	8.569.900	7	8.565.900
3.28.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	17	1.740.000	17	1.740.000
3.28.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	jenis	4	1.467.500	4	1.297.500
3.28.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	orang	120	4.510.000	120	4.510.000
3.28.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah	OT	3	7.262.200	3	3.502.200
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah***	***unit***	***1***	***91.500.000***	***1***	***91.195.000***

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang diadakan	unit	1	91.500.000	1	91.195.000
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	***%***	***100***	***33.645.000***	***100***	***22.277.800***
3.28.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat	lembar	400	1.725.000	293	1.200.000
3.28.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	rekening	3	31.920.000	3	21.077.800
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase pemeliharaan barang milik daerah***	***%***	***100***	***119.500.000***	***100***	***113.330.530***
3.28.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara	unit	5	31.430.000	5	25.562.500
3.28.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	unit	8	2.760.000	8	2.751.000
3.28.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara	unit	9	3.810.000	9	3.747.030
3.28.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	unit	1	81.500.000	1	81.270.000
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	***Presentase Luas Kawasan Hutan yang dikelola***	***%***	***0,67***	***250.286.400***	***0,67***	***250.006.400***

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN (Termasuk: NTB Hijau, Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani & Tambora)	***Persentase Luas Kawasan Hutan yang terlindungi***	***%***	***85,13***	***135.672.200***	***85,13***	***135.672.200***
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	***Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun***	***%***	***100***	***10.000.200***	***100***	***9.920.200***
3.28.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	dokumen	1	10.000.200	1	9.920.200
3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	***Jumlah data dan Informasi pemanfaaatan kawasan hutan yang tersedia***	***dokumen***	***1***	***74.213.500***	***1***	***74.013.500***
3.28.03.1.03.09 Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah unit Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan yang dikembangkan	unit	1	74.213.500	1	74.013.500
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	***luas lahan kritis yang di rehabilitasi***	***ha***	***10***	***30.400.500***	***10***	***30.400.500***
3.28.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah bibit produktif yang disediakan	batang	10	10.000.000	10	10.000.000
3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	ha	120	20.400.500	120	20.400.500
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	***Persentase luas kawasan hutan yang terlindungi***	***%***	***85,13***	***135.672.200***	***85,13***	***135.672.200***

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilindungi	ha	32000	135.672.200	12.844	135.672.200
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	***Persentase KTH yang meningkat kelasnya***	***%***	***1,33***	***30.000.000***	***1,33***	***29.940.000***
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	**Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya**	**kelompok**	***1***	***30.000.000***	***1***	***29.940.000***
3.28.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	kelompok	6	30.000.000	6	29.940.000
2.11.3.28.0.00.02.0008 Balai KPH Sejorong Mataiyang				**596.712.590**		**560.364.987**
3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	***Nilai SAKIP OPD***	***Poin***	***BB***	***266.554.390***	***BB***	***238.072.854***
3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja***	***%***	***100***	***15.137.000***	***100***	***14.547.000***
3.28.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.301.000	1	4.011.000
3.28.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	2.184.000	1	1.984.000
3.28.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.315.000	1	4.265.000
3.28.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.337.000	1	4.287.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi keuangan***	***%***	***100***	***16.620.100***	***100***	***15.120.100***
3.28.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia	orang	1	10.042.100	1	9.642.100
3.28.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	dokumen	1	4.361.000	1	3.961.000
3.28.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang tersusun	dokumen	18	2.217.000	18	1.517.000
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah***	***%***	***100***	***13.453.000***	***100***	***13.318.000***
3.28.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	dokumen	1	1.212.000	1	1.212.000
3.28.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	dokumen	1	5.994.000	1	5.974.000
3.28.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan barang milik daerah yang tersedia	orang	1	6.247.000	1	6.132.000
3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah***	***%***	***100***	***2.500.000***	***100***	***2.340.000***
3.28.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	1	2.500.000	1	2.340.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi kepegawaian***	***%***	***100***	***2.506.000***	***100***	***2.386.000***
3.28.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan	sistem	1	1.466.000	1	1.346.000
3.28.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	25	1.040.000	25	1.040.000
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi umum***	***%***	***100***	***32.541.290***	***100***	***31.943.250***
3.28.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	jenis	2	1.459.000	2	1.459.000
3.28.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	1	4.565.500	1	4.565.500
3.28.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	10	1.268.790	10	1.268.750
3.28.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	20	2.859.500	20	2.859.500
3.28.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	jenis	4	1.251.500	4	1.251.500
3.28.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	orang	82	1.400.000	82	1.400.000
3.28.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah	OT	8	19.737.000	10	19.139.000
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah***	***%***	***100***	***94.957.000***	***100***	***94.846.000***

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	unit	1	94.957.000	1	94.846.000
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	***%***	***100***	***34.550.000***	***100***	***28.929.828***
3.28.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat	lembar	400	1.700.000	400	1.514.000
3.28.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	rekening	3	32.850.000	3	27.415.828
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase pemeliharaan barang milik daerah***	***%***	***100***	***54.290.000***	***100***	***34.642.676***
3.28.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang terpelihara	unit	2	54.290.000	2	34.642.676
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	*Presentase Luas Kawasan Hutan yang dikelola*	*%*	*0,67*	*300.158.200*	*0,67*	*292.343.200*
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN (Termasuk: NTB Hijau, Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani & Tambora)	*Persentase Luas Kawasan Hutan yang terlindungi*	*%*	*23,68*	*82.783.100*	*23,68*	*75.443.100*
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	***Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun***	***%***	***100***	***35.000.100***	***100***	***35.000.100***

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	dokumen	1	35.000.100	1	35.000.100
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	***luas lahan kritis yang di rehabilitasi***	***ha***	***20***	***50.500.000***	***20***	***50.400.000***
3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	ha	20	25.500.000	20	25.400.000
3.28.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah bibit produktif yang disediakan	batang	8000	25.000.000	8000	25.000.000
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	***Persentase luas kawasan hutan yang terlindungi***	***%***	***23,68***	***82.783.100***	***23,68***	***75.443.100***
3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilindungi	ha	18000	82.783.100	14.000	75.443.100
3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	*Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak*	*Unit*	*2*	***131.875.000***	*2*	***131.500.000***
3.28.03.1.06.01 Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah unit pengolahan HHBK yang difasilitasi	Unit	2	131.875.000	2	131.500.000
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	*Persentase KTH yang meningkat kelasnya*	*%*	*0,44*	*30.000.000*	*0,44*	*29.948.933*
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya*	*kelompok*	*1*	***30.000.000***	*1*	***29.948.933***

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	kelompok	6	30.000.000	6	29.948.933
2.11.3.28.0.00.02.0009 Balai KPH Batu Lanteh				**546.420.900**		**513.084.851**
3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	***Nilai SAKIP OPD***	***Poin***	***BB***	***156.883.000***	***BB***	***136.846.951***
3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja***	***%***	***100***	***15.096.800***	***100***	***13.706.800***
3.28.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.591.000	1	4.581.000
3.28.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	2.282.000	1	1.252.000
3.28.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	3.674.000	1	3.544.000
3.28.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.549.800	1	4.329.800
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pelayanan administrasi keuangan**	**%**	**100**	***15.967.000***	**100**	***14.967.000***
3.28.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia	orang	1	6.982.000	1	6.732.000
3.28.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	dokumen	1	2.214.000	1	1.934.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang tersusun	dokumen	18	6.771.000	18	6.301.000
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah***	***%***	***100***	***13.475.000***	***100***	***12.605.000***
3.28.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	dokumen	1	2.557.000	1	2.357.000
3.28.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	dokumen	1	6.456.000	1	6.416.000
3.28.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan barang milik daerah yang tersedia	orang	1	4.462.000	1	3.832.000
3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah***	***%***	***100***	***1.214.000***	***100***	***934.000***
3.28.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi sektor LHK yang tersusun	dokumen	1	1.214.000	1	934.000
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi kepegawaian***	***%***	***100***	***2.607.000***	***100***	***2.557.000***
3.28.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan	sistem	1	2.607.000	1	2.557.000
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi umum***	***%***	***100***	***28.353.200***	***100***	***24.908.200***

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	jenis	5	2.703.500	5	2.703.500
3.28.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	12	2.709.000	12	2.709.000
3.28.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	12	1.802.000	12	1.802.000
3.28.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	24	2.500.000	-	-
3.28.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	jenis	4	1.718.400	4	1.718.400
3.28.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia	jenis	2	1.635.000	2	1.090.000
3.28.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	orang	82	2.620.000	82	2.620.000
3.28.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah	OT	3	12.665.300	3	12.265.300
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	***%***	***100***	***20.780.000***	***100***	***11.287.989***
3.28.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat	lembar	400	1.700.000	400	546.340
3.28.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	rekening	3	19.080.000	3	10.741.649
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase pemeliharaan barang milik daerah***	***%***	***100***	***59.390.000***	***100***	***55.880.962***

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	unit	2	56.430.000	2	52.920.962
3.28.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarpras gedung kantor terpelihara	unit	1	2.960.000	1	2.960.000
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	*Presentase Luas Kawasan Hutan yang dikelola*	*%*	*0,67*	*359.537.900*	*0,67*	*346.622.900*
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN (Termasuk: NTB Hijau, Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani & Tambora)	***Persentase Luas Kawasan Hutan yang terlindungi***	***%***	***45,77***	***119.438.000***	***45,77***	***119.348.000***
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	***Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun***	***%***	***100***	***9.999.900***	***100***	***7.544.900***
3.28.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	dokumen	1	9.999.900	1	7.544.900
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	***luas lahan kritis yang di rehabilitasi***	***ha***	***25***	***230.100.000***	***25***	***219.730.000***
3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	ha	30	5.100.000	30	4.560.000
3.28.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah bibit produktif yang disediakan	batang	10000	225.000.000	10000	215.170.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	***Persentase luas kawasan hutan yang terlindungi***	***%***	***45,77***	***119.438.000***	***45,77***	***119.348.000***
3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilindungi	ha	15000	119.438.000	15000	119.348.000
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	*Persentase KTH yang meningkat kelasnya*	*%*		*30.000.000*		*29.615.000*
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	**Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya**	**kelompok**	**1**	**30.000.000**	**1**	**29.615.000**
3.28.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	kelompok	6	30.000.000	6	29.615.000
2.11.3.28.0.00.02.0010 Balai KPH Ampang Plampang				**356.168.500**		**346.737.472**
3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	*Nilai SAKIP OPD*	*Poin*	*BB*	*141.023.000*	*BB*	*131.681.972*
3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja***	***%***	***100***	***15.112.000***	***100***	***15.112.000***
3.28.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.446.000	1	4.446.000
3.28.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	2.254.000	1	2.254.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	3.957.000	1	3.957.000
3.28.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.455.000	1	4.455.000
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi keuangan***	***%***	***100***	***16.719.000***	***100***	***16.719.000***
3.28.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia	orang	1	9.807.000	1	9.807.000
3.28.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	dokumen	1	4.560.000	1	4.560.000
3.28.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang tersusun	dokumen	18	2.352.000	14	2.352.000
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah*	*%*	*100*	***13.445.000***	*100*	***9.945.000***
3.28.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	dokumen	1	1.918.000	1	1.918.000
3.28.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	dokumen	1	7.589.000	1	7.589.000
3.28.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan barang milik daerah yang tersedia	orang	1	3.938.000	1	438.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah***	***%***	***100***	***1.210.000***	***100***	***1.210.000***
3.28.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi sektor LHK yang tersusun	dokumen	1	1.210.000	1	1.210.000
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi kepegawaian***	***%***	***100***	***2.523.700***	***100***	***2.523.700***
3.28.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan	sistem	1	1.318.000	1	1.318.000
3.28.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	1	1.205.700	1	1.205.700
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi umum***	***%***	***100***	***28.273.300***	***100***	***27.013.220***
3.28.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	jenis	5	2.932.000	5	2.932.000
3.28.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	17	2.867.500	17	2.867.500
3.28.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	0	1.768.000	0	1.768.000
3.28.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	18	2.639.800	18	2.639.800
3.28.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	jenis	5	1.325.000	5	1.325.000
3.28.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia	jenis	1	1.260.000	1	-

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	orang	80	2.650.000	80	2.650.000
3.28.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah	OT	3	12.831.000	3	12.830.920
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	***%***	***100***	***24.200.000***	***100***	***19.655.052***
3.28.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat	lembar	500	1.700.000	500	800.000
3.28.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	rekening	5	22.500.000	5	18.855.052
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah*	*%*	*100*	***39.540.000***	*100*	***39.504.000***
3.28.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	unit	4	35.240.000	4	35.204.000
3.28.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara	unit	5	4.300.000	5	4.300.000
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	*Presentase Luas Kawasan Hutan yang dikelola*	*%*	*0,67*	*185.145.500*	*0,67*	*185.105.500*
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN (Termasuk: NTB Hijau, Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani & Tambora)	***Persentase Luas Kawasan Hutan yang terlindungi***	***%***	***7,58***	***123.145.500***	***7,58***	***123.145.500***

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	***Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun***	***%***	***100***	***20.000.000***	***100***	***19.960.000***
3.28.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	dokumen	2	20.000.000	2	19.960.000
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	***luas lahan kritis yang di rehabilitasi***	***ha***	***105***	***42.000.000***	***105***	***42.000.000***
3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dikembangkan	ha	50	17.000.000	50	17.000.000
3.28.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah bibit produktif yang disediakan	batang	22000	25.000.000	22000	25.000.000
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	***Persentase luas kawasan hutan yang terlindungi***	***%***	***36,35***	***123.145.500***	***36,35***	***123.145.500***
3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilindungi	ha	24500	123.145.500	24500	123.145.500
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	*Persentase KTH yang meningkat kelasnya*	*%*	*1,33*	*30.000.000*	*1,33*	*29.950.000*
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	**Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya**	**kelompok**	***1***	***30.000.000***	***1***	***29.950.000***
3.28.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	kelompok	6	30.000.000	6	29.950.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
2.11.3.28.0.00.02.0011 Balai KPH Orong Telu				**579.375.300**		**569.844.200**
3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	*Nilai SAKIP OPD*	*Poin*	*BB*	*199.943.700*	*BB*	*192.451.100*
3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja***	***%***	***100***	***15.871.400***	***100***	***15.651.300***
3.28.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	3.643.100	1	3.643.000
3.28.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	2.408.800	1	2.408.800
3.28.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	6.895.000	1	6.675.000
3.28.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	2.924.500	1	2.924.500
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi keuangan***	***%***	***100***	***16.948.100***	***100***	***16.758.100***
3.28.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia	orang	1	10.380.600	1	10.260.600
3.28.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang tersusun	dokumen	18	6.567.500	18	6.497.500
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah***	***%***	***100***	***14.078.400***	***100***	***13.388.000***

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	dokumen	1	4.283.000	1	4.083.000
3.28.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	dokumen	1	5.198.400	2	4.828.000
3.28.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan barang milik daerah yang tersedia	orang	1	4.597.000	1	4.477.000
3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah***	***%***	***100***	***1.214.000***	***100***	***1.114.000***
3.28.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi sektor LHK yang tersusun	dokumen	1	1.214.000	1	1.114.000
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi kepegawaian***	***%***	***100***	***3.000.000***	***100***	***2.950.000***
3.28.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan	sistem	1	3.000.000	1	2.950.000
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi umum***	***%***	***100***	***27.013.100***	***100***	***26.746.900***
3.28.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	jenis	8	790.400	8	790.400
3.28.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	13	1.950.600	13	1.950.600
3.28.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	13	3.332.800	13	3.332.800

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	jenis	2	488.200	2	488.000
3.28.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah	OT	29	20.451.100	29	20.185.100
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah***	Unit	1	***75.000.000***	1	***74.814.000***
3.28.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	75.000.000	1	74.814.000
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	***%***	***100***	***14.900.000***	***100***	***9.127.600***
3.28.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat	lembar	400	1.700.000	444	1.690.500
3.28.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	rekening	3	13.200.000	3	7.437.100
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase pemeliharaan barang milik daerah***	***%***	***100***	***31.918.700***	***100***	***31.901.200***
3.28.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang terpelihara	unit	8	27.620.000	8	27.602.500
3.28.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	4.298.700	1	4.298.700
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	*Presentase Luas Kawasan Hutan yang dikelola*	*%*	*0,67*	*349.431.600*	*0,67*	*347.436.100*

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN (Termasuk: NTB Hijau, Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani & Tambora)	***Persentase Luas Kawasan Hutan yang terlindungi***	***%***	***6,43***	***97.431.600***	***6,43***	***96.886.600***
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	***Persentase dokumen RPHJP/RPHJPD yang tersusun***	***%***	***100***	***10.000.000***	***100***	***9.619.500***
3.28.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	dokumen	1	10.000.000	1	9.619.500
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	***luas lahan kritis yang di rehabilitasi***	***ha***	***137***	***242.000.000***	***137***	***240.930.000***
3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dikembangkan	ha	137	17.000.000	137	16.930.000
3.28.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	ha	225	225.000.000	225	224.000.000
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	***Persentase luas kawasan hutan yang terlindungi***	***%***	***34,13***	***97.431.600***	***34,13***	***96.886.600***
3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilindungi	ha	19500	97.431.600	13.500	96.886.600
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	*Persentase KTH yang meningkat kelasnya*	*%*	*1,33*	*30.000.000*	*1,33*	*29.957.000*

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	kelompok	*1*	*30.000.000*	*1*	*29.957.000*
3.28.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	*6*	*30.000.000*	*5*	*29.957.000*
2.11.3.28.0.00.02.0012 Balai KPH Ropang				**577.532.440**		**567.863.579**
3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	***Nilai SAKIP OPD***	***Poin***	***BB***	***181.582.140***	***BB***	***174.832.779***
3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja***	***%***	***100***	***16.106.000***	***100***	***15.916.000***
3.28.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	2.776.500	1	2.776.500
3.28.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	2.776.500	1	2.776.500
3.28.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	2.776.500	1	2.776.500
3.28.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	7.776.500	1	7.586.500
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi keuangan***	***%***	***100***	***16.539.500***	***100***	***16.269.500***
3.28.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia	orang	1	7.182.000	1	7.182.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	dokumen	1	3.147.000	1	3.007.000
3.28.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang tersusun	dokumen	18	6.210.500	18	6.080.500
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah***	***%***	***100***	***13.379.000***	***100***	***13.194.000***
3.28.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	dokumen	1	3.024.000	1	2.874.000
3.28.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	dokumen	1	3.021.000	1	2.986.000
3.28.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan barang milik daerah yang tersedia	orang	1	7.334.000	1	7.334.000
3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah***	***%***	***100***	***682.000***	***100***	***682.000***
3.28.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	1	682.000	1	682.000
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi kepegawaian***	***%***	***100***	***2.822.500***	***100***	***2.822.500***
3.28.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	1	898.500	1	898.500

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	1	974.000	1	974.000
3.28.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	1	950.000	1	950.000
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi umum***	***%***	***100***	***27.225.640***	***100***	***26.990.740***
3.28.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	jenis	8	2.384.000	8	2.384.000
3.28.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	17	2.353.440	17	2.353.440
3.28.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	17	2.274.000	17	2.274.000
3.28.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	jenis	4	2.349.700	4	2.349.700
3.28.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia	jenis	1	1.620.000	1	1.563.600
3.28.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	orang	110	3.121.500	110	3.121.500
3.28.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah	OT	5	13.123.000	5	12.944.500
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah***	***Unit***	***1***	***7.147.500***	***1***	***7.125.000***
3.28.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Unit	1	7.147.500	1	7.125.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	***%***	***100***	***50.620.000***	***100***	***44.815.989***
3.28.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat	lembar	400	1.720.000	400	1.720.000
3.28.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	rekening	2	48.900.000	2	43.095.989
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase pemeliharaan barang milik daerah***	***%***	***100***	***47.060.000***	***100***	***47.017.050***
3.28.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang terpelihara	unit	8	42.860.000	8	42.850.050
3.28.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	5	4.200.000	5	4.167.000
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	*Presentase Luas Kawasan Hutan yang dikelola*	*%*	*0,67*	*365.950.300*	*0,67*	*363.290.800*
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN (Termasuk: NTB Hijau, Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani & Tambora)	***Persentase Luas Kawasan Hutan yang terlindungi***	***%***	***8,25***	***88.864.000***	***8,25***	***88.589.000***
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	***Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun***	***%***	***100***	***10.011.400***	***100***	***9.803.400***
3.28.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	dokumen	1	10.011.400	1	9.803.400

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	***luas lahan kritis yang di rehabilitasi***	***ha***	***55***	***267.074.900***	***55***	***264.898.400***
3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dikembangkan	ha	5	42.074.900	5	41.879.900
3.28.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah bibit produktif yang disediakan	batang	20000	225.000.000	20000	223.018.500
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	***Persentase luas kawasan hutan yang terlindungi***	***%***	***25,9***	***88.864.000***	***25,9***	***88.589.000***
3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilindungi	ha	19000	88.864.000	19000	88.589.000
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	***Persentase KTH yang meningkat kelasnya***	***%***	***0,44***	***30.000.000***	***0,44***	***29.740.000***
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	**Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya**	**kelompok**	***1***	***30.000.000***	***1***	***29.740.000***
3.28.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	*3*	*30.000.000*	*3*	*29.740.000*
2.11.3.28.0.00.02.0013 Balai KPH Toffo Pajo Soromandi				**558.237.500**		**365.643.143**
3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	***Nilai SAKIP OPD***	***Poin***	***BB***	***154.575.900***	***BB***	***147.979.443***

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja***	***%***	***100***	***15.869.200***	***100***	***15.089.200***
3.28.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	5.843.500	1	5.483.500
3.28.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	3.099.600	1	2.919.600
3.28.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	3.434.600	1	3.254.600
3.28.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	3.491.500	1	3.431.500
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi keuangan***	***%***	***100***	***16.959.600***	***100***	***16.739.600***
3.28.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia	orang	1	3.420.000	1	3.420.000
3.28.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	dokumen	1	7.004.600	1	6.794.600
3.28.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang tersusun	dokumen	18	6.535.000	18	6.525.000
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah***	***%***	***100***	***14.083.400***	***100***	***13.537.400***
3.28.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	dokumen	1	1.639.400	1	1.613.400

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	dokumen	1	3.717.000	1	3.437.000
3.28.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan barang milik daerah yang tersedia	orang	1	8.727.000	1	8.487.000
3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah***	***%***	***100***	***2.501.800***	***100***	***2.301.800***
3.28.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi sektor LHK yang tersusun	dokumen	1	2.501.800	1	2.301.800
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi kepegawaian***	***%***	***100***	***2.999.600***	***100***	***2.799.600***
3.28.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan	sistem	1	1.342.200	1	1.242.200
3.28.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan bimtek implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	kegiatan	1	1.657.400	1	1.557.400
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi umum***	***%***	***100***	***35.563.200***	***100***	***34.283.200***
3.28.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	jenis	3	2.245.000	3	2.245.000
3.28.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	0	2.368.400	0	2.368.400
3.28.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	13	4.961.000	13	4.961.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	jenis	2	2.372.000	2	2.372.000
3.28.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia	jenis	1	2.372.800	1	1.112.800
3.28.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	orang	116	3.220.000	116	3.220.000
3.28.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah	OT	15	18.024.000	15	18.004.000
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	***%***	***100***	***23.909.100***	***100***	***20.659.430***
3.28.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat	lembar	400	1.700.000	400	840.000
3.28.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	rekening	3	22.209.100	3	19.819.430
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase pemeliharaan barang milik daerah***	***%***	***100***	***42.690.000***	***100***	***42.569.213***
3.28.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang terpelihara	unit	20	40.860.000	20	40.739.213
3.28.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara	unit	4	1.830.000	4	1.830.000
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	***Presentase Luas Kawasan Hutan yang dikelola***	***%***	***0,67***	***403.661.600***	***0,67***	***217.663.700***

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN (Termasuk: NTB Hijau, Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani & Tambora)	***Persentase Luas Kawasan Hutan yang terlindungi***	***%***	***8,08***	***84.930.600***	***8,08***	***84.690.600***
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	***Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun***	***%***	***100***	***20.000.000***	***100***	***19.667.400***
3.28.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	dokumen	2	20.000.000	2	*19.667.400*
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	***luas lahan kritis yang di rehabilitasi***	***ha***	***500***	***113.731.000***	***500***	***113.305.700***
3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dikembangkan	ha	500	113.731.000	500	113.305.700
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	***Persentase luas kawasan hutan yang terlindungi***	***%***	***27,15***	***84.930.600***	***27,15***	***84.690.600***
3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	ha	19500	84.930.600	19500	84.690.600
3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	***Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak***	***Unit***	***1***	***185.000.000***	***1***	***-***

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.03.1.06.03 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1	185.000.000	1	-
2.11.3.28.0.00.02.0014 Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas				**527.717.640**		**522.140.085**
3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	***Nilai SAKIP OPD***	***Poin***	***BB***	***221.309.540***	***BB***	***216.159.045***
3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja***	***%***	***100***	***15.273.000***	***100***	***15.012.000***
3.28.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	5.092.000	1	5.091.000
3.28.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.062.000	1	4.062.000
3.28.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	3.519.000	1	3.259.000
3.28.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	2.600.000	1	2.600.000
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi keuangan***	***%***	***100***	***16.326.800***	***100***	***16.326.800***
3.28.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia	orang	1	8.166.000	1	8.166.000
3.28.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	dokumen	1	5.666.000	1	5.666.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang tersusun	dokumen	18	2.494.800	18	2.494.800
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah***	***%***	***100***	***11.537.400***	***100***	***8.267.400***
3.28.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	dokumen	1	2.410.400	1	410.400
3.28.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	dokumen	1	5.222.800	1	4.332.800
3.28.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan barang milik daerah yang tersedia	orang	1	3.904.200	1	3.524.200
3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah***	***%***	***100***	***1.683.600***	***100***	***1.683.600***
3.28.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi sektor LHK yang tersusun	dokumen	1	1.683.600	1	1.683.600
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi kepegawaian***	***%***	***100***	***2.499.600***	***100***	***2.499.600***
3.28.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan	sistem	1	1.456.400	1	1.456.400

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan bimtek implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	kegiatan	1	1.043.200	1	1.043.200
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi umum***	***%***	***100***	***15.505.140***	***100***	***15.505.140***
3.28.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	jenis	10	294.000	10	294.000
3.28.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	8	7.641.900	8	7.641.900
3.28.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	12	756.000	12	756.000
3.28.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	18	758.400	18	758.400
3.28.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	jenis	5	287.400	5	287.400
3.28.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia	jenis	1	1.503.000	1	1.503.000
3.28.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	orang	106	631.800	106	631.800
3.28.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah	OT	19	3.632.640	19	3.632.640
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	***%***	***100***	***24.254.000***	***100***	***22.995.360***
3.28.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat	lembar	200	1.700.000	200	1.696.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	rekening	12	22.554.000	12	21.299.360
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase pemeliharaan barang milik daerah***	***%***	***100***	***134.230.000***	***100***	***133.869.145***
3.28.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang terpelihara	unit	2	23.810.000	2	23.809.145
3.28.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	unit	7	1.420.000	7	1.420.000
3.28.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		unit	1	109.000.000	1	108.640.000
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	***Presentase Luas Kawasan Hutan yang dikelola***	***%***	***0,67***	***276.408.100***	***0,67***	***276.227.900***
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN (Termasuk: NTB Hijau, Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani & Tambora)	***Persentase Luas Kawasan Hutan yang terlindungi***	***%***	***10,21***	***191.408.100***	***10,21***	***191.407.900***
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	***Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun***	***%***	***100***	***20.000.000***	***100***	***19.880.000***
3.28.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	dokumen	2	20.000.000	2	19.880.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	***luas lahan kritis yang di rehabilitasi***	***ha***	***410***	***65.000.000***	***410***	***64.940.000***
3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dikembangkan	ha	160	40.000.000	160	39.990.000
3.28.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah bibit produktif yang disediakan	Batang	100000	25.000.000	100.000	24.950.000
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	***Persentase luas kawasan hutan yang terlindungi***	***%***	***17,07***	***191.408.100***	***17,07***	***191.407.900***
3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan yang dilaksanakan	kegiatan	1	191.408.100	1	191.407.900
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	***Persentase KTH yang meningkat kelasnya***	***%***	***100***	***30.000.000***	***100***	***29.753.140***
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	***Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya***		***1***	***30.000.000***	***1***	***29.753.140***
3.28.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	6	30.000.000	6	29.753.140
2.11.3.28.0.00.02.0015 Balai KPH Brang Beh				**291.229.760**		**290.602.258**
3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	***Nilai SAKIP OPD***	***Poin***	***BB***	***142.304.640***	***BB***	***141.737.138***

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja***	***%***	***100***	***15.279.480***	***100***	***15.279.480***
3.28.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.308.200	1	4.308.200
3.28.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	3.756.640	1	3.756.640
3.28.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	3.834.000	1	3.834.000
3.28.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	3.380.640	1	3.380.640
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi keuangan***	***%***	***100***	***16.667.460***		***16.667.460***
3.28.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia	orang	1	8.852.760	1	8.852.760
3.28.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	dokumen	1	5.625.000	1	5.625.000
3.28.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang tersusun	dokumen	18	2.189.700	18	2.189.700
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah***	***%***	***100***	***13.712.560***	***100***	***13.712.560***
3.28.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	dokumen	1	1.146.400	1	1.146.400

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	dokumen	1	6.261.400	1	6.261.400
3.28.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan barang milik daerah yang tersedia	orang	1	6.304.760	1	6.304.760
3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah***	***%***	***100***	***1.214.000***	***100***	***1.214.000***
3.28.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	1	1.214.000	1	1.214.000
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi kepegawaian***	***%***	***100***	***2.500.000***	***100***	***2.500.000***
3.28.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan	sistem	1	2.500.000	1	2.500.000
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi umum***	***%***	***100***	***40.553.640***	***100***	***40.544.080***
3.28.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	jenis	10	1.945.200	10	1.945.200
3.28.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	12	5.097.240	12	5.097.240
3.28.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	12	3.250.000	12	3.250.000
3.28.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	jenis	3	1.611.200	3	1.603.200
3.28.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia	jenis	1	400.000	1	400.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	orang	80	3.250.000	80	3.250.000
3.28.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah	OT	19	25.000.000	19	24.998.440
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				***7.147.500***		***7.147.500***
3.28.01.1.07.05 Pengadaan Mebel				7.147.500		7.147.500
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	***%***	***100***	***13.460.000***	***100***	***12.918.000***
3.28.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat	lembar	400	2.000.000	400	1.458.000
3.28.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	rekening	3	11.460.000	3	11.460.000
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase pemeliharaan barang milik daerah***	***%***	***100***	***31.770.000***	***100***	***31.754.058***
3.28.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara	unit	8	27.620.000	8	27.604.058
3.28.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	unit	8	4.150.000	8	4.150.000
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	***Presentase Luas Kawasan Hutan yang dikelola***	***%***	***0,67***	***118.925.120***	***0,67***	***118.925.120***

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN (Termasuk: NTB Hijau, Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani & Tambora)	***Persentase Luas Kawasan Hutan yang terlindungi***	***%***	***7,13***	***66.794.020***	***7,13***	***66.794.020***
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	***Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun***	***%***	***100***	***10.071.100***	***100***	***10.071.100***
3.28.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	dokumen	2	10.071.100	2	10.071.100
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	***luas lahan kritis yang di rehabilitasi***	***ha***	***77,5***	***42.060.000***	***109***	***42.060.000***
3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dikembangkan	ha	62,5	17.060.000	100	17.060.000
3.28.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah bibit produktif yang disediakan	Batang	6000	25.000.000	3.450	25.000.000
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	***Persentase luas kawasan hutan yang terlindungi***	***%***	***18,14***	***66.794.020***	***18,14***	***66.794.020***
3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilindungi	ha	11500	66.794.020	11.500	66.794.020
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	***Persentase KTH yang meningkat kelasnya***	***%***	***1,33***	***30.000.000***	***1,33***	***29.940.000***
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	**Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya**	**kelompok**	***1***	***30.000.000***	***1***	***29.940.000***

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	6	30.000.000	6	29.940.000
2.11.3.28.0.00.02.0016 Balai KPH Madapangga Rompu Waworada				**352.556.600**		**330.070.200**
3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	***Nilai SAKIP OPD***	***Poin***	***BB***	***169.104.100***	***BB***	***148.090.200***
3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja***	***%***	***100***	***15.925.500***	***100***	***11.917.500***
3.28.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	6.360.000	1	5.090.000
3.28.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	1.997.000	1	1.236.000
3.28.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	3.743.500	1	2.721.500
3.28.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	3.825.000	1	2.870.000
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi keuangan***	***%***	***100***	***16.928.800***	***100***	***12.783.600***
3.28.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia	orang	1	10.913.800	1	9.274.600
3.28.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	dokumen	1	4.418.000	1	3.078.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang tersusun	dokumen	18	1.597.000	18	431.000
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah***	***%***	***100***	***14.120.000***	***100***	***11.800.000***
3.28.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	dokumen	1	1.942.000	1	1.700.000
3.28.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.255.000	1	3.492.000
3.28.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan barang milik daerah yang tersedia	orang	1	7.923.000	1	6.608.000
3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah***	***%***	***100***	***1.224.000***	***100***	***900.000***
3.28.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi sektor LHK yang tersusun	dokumen	1	1.224.000	1	900.000
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi kepegawaian***	***%***	***100***	***3.000.200***	***100***	***2.392.000***
3.28.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan	sistem	1	3.000.200	1	2.392.000
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi umum***	***%***	***100***	***23.755.600***	***100***	***19.148.100***

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	jenis	7	3.043.000	1	1.440.000
3.28.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	7	7.060.900	1	6.802.800
3.28.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	8	3.272.500	1	1.488.000
3.28.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	24	2.212.000	1	2.100.000
3.28.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	jenis	2	649.300	1	649.300
3.28.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia	jenis	1	1.500.000	1	1.500.000
3.28.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	orang	90	1.581.900	1	1.500.000
3.28.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah	OT	19	4.436.000	1	3.668.000
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	***%***	***100***	***24.220.000***	***66***	***19.574.000***
3.28.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat	lembar	300	1.720.000	-	-
3.28.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	rekening	2	22.500.000	2	19.574.000
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase pemeliharaan barang milik daerah***	***%***	***100***	***69.930.000***	***100***	***69.575.000***

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	unit	2	69.930.000	2	69.575.000
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	***Presentase Luas Kawasan Hutan yang dikelola***	***%***	***0,67***	***183.452.500***	***0,67***	***181.980.000***
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN (Termasuk: NTB Hijau, Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani & Tambora)	***Persentase Luas Kawasan Hutan yang terlindungi***	***%***	***7,92***	***118.814.500***	***7,92***	***118.324.500***
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	***Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun***	***%***	***100***	***20.000.000***	***100***	***19.529.000***
3.28.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	*dokumen*	*2*	*20.000.000*	*2*	*19.529.000*
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	***luas lahan kritis yang di rehabilitasi***	***ha***	***55***	***44.638.000***	***55***	***44.126.500***
3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	*ha*	110	19.638.000	110	*19.174.000*
3.28.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah bibit produktif yang disediakan	batang	22.000	25.000.000	22.000	24.952.500
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	***Persentase luas kawasan hutan yang terlindungi***	***%***	***25,56***	***118.814.500***	***25,56***	***118.324.500***

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	ha	30000	118.814.500	10.000	118.324.500
2.11.3.28.0.00.02.0017 Balai KPH Pelangan Tastura				**580.083.200**		**570.050.831**
3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	***Nilai SAKIP OPD***	***Poin***	***BB***	***167.057.200***	***BB***	***157.867.431***
3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja***	***%***	***100***	***10.571.300***	***100***	***10.171.300***
3.28.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	3.496.100	1	3.396.100
3.28.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	2.234.600	1	2.134.600
3.28.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	2.462.900	1	2.362.900
3.28.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	2.377.700	1	2.277.700
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi keuangan***	***%***	***100***	***11.492.300***	***100***	***11.192.300***
3.28.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia	orang	1	7.222.300	1	7.122.300
3.28.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	dokumen	1	2.554.000	1	2.454.000
3.28.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang tersusun	dokumen	18	1.716.000	18	1.616.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah***	***%***	***100***	***9.707.400***	***100***	***9.507.400***
3.28.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	dokumen	1	2.074.400	1	1.974.400
3.28.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	dokumen	1	2.254.700	1	2.154.700
3.28.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan barang milik daerah yang tersedia	orang	1	5.378.300	1	5.378.300
3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah***	***%***	***100***	***1.200.000***	***100***	***1.200.000***
3.28.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi sektor LHK yang tersusun	dokumen	1	1.200.000	1	1.200.000
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi kepegawaian***	***%***	***100***	***2.000.000***	***100***	***1.900.000***
3.28.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan	sistem	1	1.153.900	1	1.053.900
3.28.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan bimtek implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	kegiatan	1	846.100	1	846.100
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi umum***	***%***	***100***	***25.036.200***	***100***	***23.426.200***

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	jenis	5	2.622.500	5	2.622.500
3.28.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	5	2.890.100	10	2.890.100
3.28.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	6	1.585.900	6	1.585.900
3.28.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	jenis	5	2.300.400	5	2.300.400
3.28.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia	jenis	1	2.062.500	1	802.500
3.28.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	orang	115	2.545.700	115	2.195.700
3.28.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah	OT	2	11.029.100	2	11.029.100
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	***%***	***100***	***24.680.000***	***100***	***21.464.541***
3.28.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat	lembar	400	1.700.000	300	400.000
3.28.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	rekening	2	22.980.000	3	21.064.541
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase pemeliharaan barang milik daerah***	***%***	***100***	***82.370.000***	***100***	***79.005.690***

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara	unit	4	23.810.000	4	23.809.295
3.28.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara	unit	5	4.060.000	5	700.000
3.28.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		unit	1	54.500.000	1	54.496.395
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	*Presentase Luas Kawasan Hutan yang dikelola*	*%*	*0,67*	*383.026.000*	*0,67*	*382.183.400*
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN (Termasuk: NTB Hijau, Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani & Tambora)	***Persentase Luas Kawasan Hutan yang terlindungi***	***%***	***4,18***	***116.091.100***	***4,18***	***115.816.100***
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	***Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun***	***%***	***100***	***20.000.000***	***100***	***19.999.800***
3.28.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	dokumen	2	20.000.000	2	19.999.800
3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	***Jumlah data dan Informasi pemanfaaatan kawasan hutan yang tersedia***	***dokumen***	***1***	***201.035.400***	***1***	***200.478.000***
3.28.03.1.03.09 Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah unit Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan yang dikembangkan	unit	1	201.035.400	1	200.478.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	***luas lahan kritis yang di rehabilitasi***	***ha***	***165***	***45.899.500***	***300***	***45.889.500***
3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	ha	300	45.899.500	*300*	*45.889.500*
3.28.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah bibit produktif yang disediakan	batang	-	-	-	-
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	***Persentase luas kawasan hutan yang terlindungi***	***%***	***56,5***	***116.091.100***	***56,5***	***115.816.100***
3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	ha	21000	116.091.100	21.000	115.816.100
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	***Persentase KTH yang meningkat kelasnya***	***%***	***1,77***	***30.000.000***	***1,77***	***30.000.000***
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	**Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya**	**kelompok**	***1***	***30.000.000***	***1***	***30.000.000***
3.28.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi pembentukannya	Kelompok	6	30.000.000	6	30.000.000
2.11.3.28.0.00.02.0018 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB				**8.156.132.900**		**4.246.547.051**
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	***Nilai SAKIP OPD***	***Poin***	***BB***	***3.218.618.200***	***BB***	***823.331.565***

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja***	***%***	***100***	***60.230.100***	***100***	***55.725.100***
2.11.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	19.323.500	1	17.008.500
2.11.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	13.532.800	1	13.397.800
2.11.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	15.952.200	1	13.972.200
2.11.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	11.421.600	1	11.346.600
2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi keuangan***	***%***	***100***	***47.107.600***	***100***	***35.967.600***
2.11.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia	orang	1	24.625.400	3	17.435.400
2.11.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	dokumen	1	13.287.200	1	9.727.200
2.11.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang tersusun	dokumen	18	9.195.000	18	8.805.000
2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah***	***%***	***100***	***7.942.300***	***100***	***7.942.300***
2.11.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang tersusun	dokumen	1	1.969.500	1	1.969.500

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
2.11.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.153.800	1	4.153.800
2.11.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan barang milik daerah yang tersedia	orang	1	1.819.000	1	1.819.000
2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah***	***%***	***100***	***6.802.700***	***100***	***6.712.700***
2.11.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi sektor LHK yang tersusun	dokumen	1	6.802.700	1	6.712.700
2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan administrasi kepegawaian***	***%***	***100***	***13.003.400***	***100***	***12.733.400***
2.11.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan	sistem	1	6.035.800	1	6.035.800
2.11.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan bimtek implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	kegiatan	1	6.967.600	1	6.697.600
2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase pelayanan Administrasi umum***	***%***	***100***	***66.408.800***	***100***	***65.747.800***
2.11.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	jenis	6	5.626.700	6	4.965.700
3.28.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	19	4.306.600	19	4.306.600
2.11.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	13	4.255.000	13	4.255.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
2.11.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	27	17.400.000	27	17.400.000
2.11.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	jenis	3	3.470.500	3	3.470.500
2.11.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	orang	200	1.050.000	200	1.050.000
2.11.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah	OT	24	30.300.000	39	30.300.000
2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	***%***	***100***	***472.961.500***	***100***	***213.015.210***
2.11.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat	lembar	375	3.460.000	375	3.460.000
2.11.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	rekening	6	469.501.500	6	209.555.210
2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase pemeliharaan barang milik daerah***	***%***	***100***	***425.512.000***	***100***	***425.487.455***
2.11.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara	unit	11	85.000.000	11	84.976.392
2.11.01.1.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat berat yang terpelihara	unit	3	340.512.000	3	340.511.063
2.11.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	***Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan***			***2.118.649.800***		***-***

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
2.11.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	2.118.649.800	1	-
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	***Persentase pengelolaan sampah***	***%***	***70***	***4.937.514.700***	***65,31***	***3.423.215.486***
2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	***Persentase penanganan sampah***	***%***	***50***	***4.937.514.700***	***49,64***	***3.423.215.486***
2.11.11.1.01.02 Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah TPA Regional yang beroperasi dengan baik	unit	2	4.937.514.700	2	3.423.215.486
JUMLAH TOTAL				**100.592.169.690**		**91.547.463.359**

Berdasarkan Tabel *2.1* di atas, dapat dijelaskan bahwa alokasi anggaran APBD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Tahun 2023 sebesar Rp. 100.592.169.690 dimana realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 91.547.463.359 atau sebesar 91,01 %.

Adapun rincian capaian realisasi keuangan pada masing-masing program dan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
  Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu tercapainya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi meliputi bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan melalui 10 (sepuluh) kegiatan dengan total pagu sebesar Rp 82.145.840.240. Adapun capaian realisasi keuangan pada program ini sebesar Rp. 75.447.613.381 atau 91,85 %.

- Program Perencanaan Lingkungan Hidup
  Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Perencanaan Lingkungan Hidup yaitu terintegrasinya dokumen kajian perencanaan lingkungan hidup ke dalam rencana pembangunan dilakukan melalui 2 (dua) kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. 498.357.400. Adapun capaian realisasi keuangan pada program ini sebesar Rp. 396.854.474 atau 79,63 %.

- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
  Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yaitu terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan dilakukan melalui 2 (dua) kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. 675.332.750. Adapun capaian realisasi keuangan pada program ini sebesar Rp. 671.019.820 atau 99,36 %.

- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
  Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yaitu tercapainya pengelolaan keanekarakagaman hayati dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. 48.690.300. Adapun capaian realisasi keuangan pada program ini sebesar Rp. 47.856.200 atau 98,29 %.

- Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
  Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yaitu terwujudnya unit usaha penghasil limbah B3 yang tertib aturan dilakukan melalui 1 (satu) dengan total pagu sebesar Rp. 34.430.400. Adapun capaian realisasi keuangan pada program ini sebesar Rp. 33.550.010 atau 97,44 %.

- Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang memiliki izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan total pagu sebesar Rp. 75.000.000,-. Adapun capaian realisasi keuangan pada program ini sebesar Rp. 69.952.533 atau 93,27 %.

- Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.

  Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat yaitu persentase sekolah yang mampu memenuhi syarat adiwiyata tingkat nasional dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. 149.924.600,-. Adapun capaian realisasi keuangan pada program ini sebesar Rp. 131.878.242 atau 87,96 %.

- Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

  Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup yaitu persentase pengaduan yang terselesaikan dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. 74.999.900,-. Adapun capaian realisasi keuangan pada program ini sebesar Rp. 69.029.031 atau 92,04 %.

- Program Pengelolaan Persampahan

  Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Pengelolaan Persampahan yaitu persentase pengelolaan sampah dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan dengan total pagu Rp. 9.881.014.700. Adapun capaian realisasi keuangan pada program ini sebesar Rp 8.277.355.342 atau 83,77 %.

- Program Pengelolaan Hutan

  Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Pengelolaan Hutan yaitu persentase hutan yang dikelola dan persentase hutan yang terlindungi dilakukan melalui 7 (tujuh) kegiatan dengan total pagu Rp. 5.968.683.500. Adapun capaian realisasi keuangan pada program ini sebesar Rp 5.373.624.003 atau 90,03 %.

- Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

  Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yaitu cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total pagu Rp. 396.895.100. Adapun capaian realisasi keuangan pada program ini sebesar Rp 394.972.750 atau 99,52 %.

- Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan

  Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan yaitu persentase KTH

yang meningkat kelasnya dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan dengan total pagu Rp. 493.000.900. Adapun capaian realisasi keuangan pada program ini sebesar Rp 491.344.973 atau 99,66 %.

- Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

  Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan dengan total pagu Rp. 149.999.900. Adapun capaian realisasi keuangan pada program ini sebesar Rp 142.412.600 atau 94,94 %.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai instansi pemerintah yang mengurusi masalah lingkungan hidup dan kehutanan melakukan tugas utamanya dalam pelayanan terhadap masyarakat dengan memastikan kondisi lingkungan hidup yang layak serta kondisi kawasan hutan yang terjaga dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Indikator kinerja pelayanan tersebut terlihat pada indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB seperti dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2 Indikator Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	TARGET KINERJA PERANGKAT DAERAH					REALISASI				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)	**64,56**	**67,74**	**67,98**	**68,22**	**68,46**	**64,56**	**70,83**	**69,89**	**70,56**	**71,92**
- Indeks Kualitas Air (poin)	40,23	42,73	42,83	42,93	43,03	40,23	50,98	45,10	43,39	47,78
- Indeks Kualitas Udara (poin)	87,40	87,50	87,53	87,56	87,59	87,40	88,63	88,52	89,3	90,21
- Indeks Kualitas Tutupan Lahan (poin)	65,67	66,70	67,70	68,70	69,70	65,67	66,74	65,59	65,61	66,60
- Indeks Kualitas Air Laut (poin)	-	69,69	70,29	70,89	71,48	68,14	67,49	80,22	89,48	82,88
NERACA PENGELOLAAN SAMPAH (%)	**41,71**	**55**	**70**	**85**	**100**	**41,71**	**44,82**	**49,02**	**54,98**	**65,31**
- Persentase Penanganan Sampah (%)	30	40	50	60	70	34.91	37.63	39.68	42.20	49,64
- Persentase Pengurangan Sampah (%)	10	15	20	25	30	6.18	7.19	9.34	12.78	15,67

Neraca Pengelolaan Sampah, upaya nyata pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dalam memecahkan permasalahan pengelolaan sampah adalah melalui salah satu program unggulan NTB yaitu NTB Zero Waste untuk mewujudkan NTB bebas sampah pada tahun 2023, program ini merupakan model pengelolaan sampah yang memperlakukan sampah sebagai sumber daya. Target dari program NTB Zero Waste berupa *Penanganan Sampah* sebesar 70% dan *Pengurangan Sampah* sebesar 30% pada tahun 2023. Dalam upaya mencapai target tersebut Dinas LHK provinsi NTB menerapkan strategi pengelolaan sampah 8 pilar antara lain: 1) Pembangunan regulasi. 2) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah madiri. 3) Revitalisasi gotong royong. 4) Sosialisasi pilah dan olah sampah dari sumbernya. 5) Diversifikasi usaha Bank Sampah. 6) Edukasi dan kampanye massif. 7) Pelibatan sebanyak mungkin para pihak. 8) Industrialisasi pengelolaan sampah. Capaian kinerja rata-rata neraca pengelolaan sampah pada tahun 2023 sebesar 65,31%, dimana capaian untuk *Penanganan Sampah* sebesar 49,64 % dari target RPJMD 70%, dan untuk *Pengurangan Sampah* sebesar 15,67 % dari target RPJMD 30%. Kegiatan dilakukan melalui 1) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan 2) Pengelolaan TPA Regional.

Solusi yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dalam mengatasi kendala antara lain: 1) Membangun Sistem Informasi Pengelolaan Sampah melalui aplikasi LESTARI (Pelaporan Persampahan Terpadu dan Riil Time). 2) Membangun industrialisasi persampahan melalui pembangunan TPST RDF, Incenerator Fasyankes, Pyrolisis, TPST, Rencana PPST Lemer, dan DPU. 3) Intensifikasi edukasi dan kampanye melalui penggunaan media sosial, zero wasto goes to campus/school, local champion. 4) Penguatan peran pemerintah desa dalam pengelolaan sampah melalui dana desa. 5) Peningkatan kerjasama para pihak dengan kampus, komunitas, KLHK, Kementerian PUPR, Balai Jalan, BPPW dan BPI, 6) Penanganan sampah di jalan, sungai, pantai, hutan dan kawasan khusus melalui identifikasi, revitalisasi gotong royong, dan penguatan komunitas.

Pada Tahun 2022, jumlah parameter disesuaikan kembali sesuai dengan surat Dirjen PPKL perihal Metode Perhitungan IKLH 2022-2024 sebanyak 8 parameter. Data time series di atas nilainya fluktuatif dan cenderung tidak dapat dibandingkan perkembangannya dikarenakan menggunakan metode perhitungan yang berbeda-beda. Terdapat penurunan nilai IKA sebesar 7.59 poin dari Tahun 2020 ke 2022. Penurunan nilai IKA diindikasikan adanya sumber pencemaran dari kegiatan domestik masih dominan sebagai penyebab penurunan kualitas air dibandingkan tahun sebelumnya.

Melihat perkembangan/tren nilai IKU selama 3 tahun terakhir, nilainya cenderung melampaui target dari tahun ke tahun.. Peningkatan nilai IKU ini diindikasikan dengan adanya upaya Dinas LHK NTB dalam hal pengendalian pencemaran udara secara administratif (penilaian dokumen ijin lingkungan, KLHS, tindak lanjut aduan lingkungan hidup oleh masyarakat, dan

monev unit usaha/kegiatan melalui PROPER), serta secara teknis melalui penanaman yang dapat berimplikasi pada peningkatan lahan hijau dan pengurangan polusi udara.

Data kualitas tutupan lahan di Provinsi NTB cenderung bertahan pada nilai di atas 60 selama 3 tahun terakhir. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan tutupan vegetasi di Provinsi NTB telah dilaksanakan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, pengembangan HHBK dalam rangka industrialisasi sektor kehutanan, serta pengamanan hutan.

Indeks Kualitas Air Laut yang selanjutnya disingkat IKAL adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Pelaksanaan pengambilan sampel dapat dilakukan oleh instansi pelaksana atau berkerja sama dengan pihak ketiga yaitu laboratorium yang teregistrasi. Petugas pengambilan sampel merupakan personil yang kompeten dalam pengambilan sampel lingkungan khususnya sampel air laut. Pengambilan sampel dilaksanakan sesuai prosedur pelaksanaan pengambilan sampel air laut mengikuti tata cara pengambilan sampel air laut sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang mengatur tentang Metode Pengambilan Contoh Uji Air Laut. Dengan ditetapkannya Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebagai pembentuk nilai IKLH, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mula melaksanakan pemantauan kualitas air laut sejak tahun 2019 dan hasilnya dijadikan sebagai baseline data dalam perhitungan IKAL. Pendampingan pemantauan kualitas air laut tahun 2022 dilakukan pada 23 titik lokasi

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dituntut untuk mampu mewujudkan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan melalui upaya meningkatan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, dan peningkatan kualitas sumber daya hutan, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran masyarakat Nusa Tenggara Barat. Dalam upaya mencapai visi dan misinya, Dinas LHK Provinsi NTB dihadapkan dengan isu strategis terkait dengan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di NTB yang perlu mendapat perhatian utama yaitu terjadinya degradasi sumber daya alam, belum optimalnya pemanfaatan SDA sebagai sumber pendapatan daerah, masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat sekitar kawasan hutan, Penanganan sampah dan limbah (partisipasi publik, cakupan, dan penegakan hukum) belum optimal, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup.

Dari isu yang dihadapi, Dinas LHK Provinsi NTB memiliki program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang ditetapkan dan diwujudkan dalam beberapa program. Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas LHK Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain: 1) Peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengendalian B3 dan Limbah B3 melalui kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 2) Peningkatan ketaatan pelaku usaha terhadap dokumen lingkungan melalui kegiatan perencanaan lingkungan hidup, Pembinaan dan pengawasan izin lingkungan, serta penanganan pengaduan lingkungan hidup. 3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan peningkatan pelatihan penyuluhan lingkungan hidup, dan penghargaan kepada masyarakat yang berprestasi dalam kegiatan lingkungan hidup. 4) Peningkatan kinerja pengelolaan sampah melalui kegiatan optimalisasi penanganan sampah di TPA/TPST Regional. 5) Peningkatan Upaya konservasi dan partisipasi masyarakat di bidang kehutanan melalui kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting serta pemberdayaan dan penyuluhan kepada masyarakat. 6) Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan melalui kegiatan rehabilitasi diluar kawasan hutan, pelaksanaan perlindungan hutan, pemanfaatan hutan, dan pengolahan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu.

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Salah satu visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang terkait dengan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dengan agendanya Pembangunan lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim yang diarahkan melalui: 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan 3) Pembangunan Rendah Karbon. Dalam menjabarkan Visi Pembangunan Nasional tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah merumuskan langkah-langkah sistematis ke dalam rumusan visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, hingga program dan kegiatan dengan target kinerja terukur yang selaras dan mendukung terwujudnya Visi Presiden yaitu **"TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG".** Sejalan dengan Visi dan Misi Presiden di atas, serta mengacu pada tugas, fungsi dan kewenangan yang dimandatkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka rumusan Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah : **"TERWUJUDNYA KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA HUTAN DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT".** Berdasarkan harapan yang ingin dicapai dari visi tersebut tercermin dalam sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu : 1) terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim; 2) tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; 3) terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan; dan 4) terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing.

3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Berdasarkan Dokumen RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025, visi pembangunan Provinsi NTB adalah "TERWUJUDNYA MASYARAKAT NTB YANG BERIMAN, MAJU DAN SEJAHTERA". Visi tersebut diimplementasikan melalui 5 (lima) misi, yaitu : 1) MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERIMAN, BERMORAL, BERBUDAYA, DAN BERKESADARAN HUKUM, yaitu terwujudnya masyarakat yang tangguh menjunjung tinggi nilai-nilai agama, budaya dan hukum dalam keseharian hidup dan kehidupannya serta bertanggung jawab secara arif bijaksana dan taat azas; 2) MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA, yaitu pemenuhan hajat hidup Masyarakat mencakup kebutuhan sandang, pangan dan papan, pendidikan, kesehatan dan lapangan

kerja, keamanan dan keselamatan diri dan lingkungannya, serta pemenuhan aktualisasi ekstensi diri dan kepribadian; 3) MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN BERKEADILAN, yaitu terwujudnya peningkatan hasil dan manfaat pembangunan yang ditujukan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat dalam tatanan hubungan kemitraan pemerintah dan masyarakat yang berkeadilan, dalam kerangka supremasi hukum, penghormatan dan penegakan hak-hak asasi manusia; 4) MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING DAERAH, yaitu terwujudnya kemampuan dinamis mengembangkan diri dan profesionalisme masyarakat membangun kesejahteraan fisik dan mental dalam tatanan hubungan harmonis yang didukung kelestarian dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta berkembangnya kearifan lokal, sebagai daya mampu keunggulan relatif terhadap wilayah lain; 5) Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan, yaitu pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan hidup dan sumber daya buatan bagi keberhasilan pembangunan kesejahteraan generasi masa kini dengan memperhitungkan secara cermat dan bertanggung jawab bagi kelangsungan hidup dan kehidupan generasi mendatang; Hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, bahwa penentuan tujuan dan sasaran penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 – 2026 didasarkan pada visi misi, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025, dan isu strategis aktual. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026 mengacu kepada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026, serta isu strategis aktual yang akan dielaborasi melalui rencana kerja dan target yang akan ditetapkan.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2024 – 2026 tujuan dari Pembangunan Daerah adalah: 1) Terwujudnya transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas daerah menuju NTB sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi regional Bali dan Nusa Tenggara yang inklusif dan berkelanjutan; 2) Terwujudnya peningkatan kualitas manusia yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT); 3) Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan yang lestari dan asri; 4) Terwujudnya kualitas kesejahteraan masyarakat yang mandiri; 5) Terwujudnya peningkatan tata kelola pemerintahan daerah; 6) Terwujudnya peningkatan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs); 7) Terwujudnya peningkatan daya saing daerah;

Sedangkan sasaran strategis pembangunan daerah provinsi NTB tahun 2024-2026 adalah; 1) Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah; 2) Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan serta derajat kesehatan Masyarakat; 3) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT); 4) Meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan menghadapi risiko bencana; 5) Meningkatnya kualitas ekosistem

darat, laut dan udara; 6) Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniah (non fisik); 7) Meningkatnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan; 8) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik; 9) Meningkatnya kemandirian fiskal daerah; 10) Meningkatnya integrasi program pembangunan daerah dan peran pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs); 11) Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan strategis, kawasan transmigrasi dan perdesaan, mendorong investasi dan percepatan industrialisasi; 12) Meningkatnya konektivitas yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan regional; 13) Meningkatnya kapabilitas inovasi mendukung peningkatan kinerja industri dan pengembangan ekspor.

Melihat dari tujuan pembangunan daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTB 2024 – 2026 dan isu strategis aktual tujuan yang berkenaan dengan Pembangunan di Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah "TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN YANG LESTARI DAN ASRI" maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dalan Rencana Strategis (Renstra) periode 2024 – 2026 telah menyusun dan menetapkan tujuan yang hendak dicapai yaitu : 1) Terwujudnya peningkatan kualitas ekosistem darat, laut dan udara; 2) Terwujudnya peningkatan pembangunan rendah karbon, ketahanan iklim dan ketangguhan menghadapi resiko bencana; 3) Terwujudnya peningkatan lapangan kerja dan produktivitas daerah; 4) Terwujudnya peningkatan pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniah (non fisik); dan 5) Terwujudnya peningkatan kemandirian fiskal daerah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB menetapkan sasaran sebagai berikut: 1) Meningkatnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan; 2) Meningkatnya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca; 3) Meningkatnya upaya pengelolaan sampah; 4) Meningkatnya upaya rehabilitasi dan perlindungan hutan dan lahan; 5) Meningkatnya kinerja usaha di sektor pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; 6) Meningkatnya kinerja usaha di sektor kehutanan dan penebangan kayu; 7) Meningkatnya desa mandiri di sekitar lingkar hutan; 8) Meningkatnya kontribusi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap pendapatan daerah.

Tujuan, sasaran, indikator dan targetnya sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis tersaji pada Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1 Tujuan, sasaran, indikator dan target Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Terwujudnya peningkatan kualitas ekosistem darat, laut dan udara	1. Meningkatnya nilai indeks kualitas air, udara, dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	46,80 poin
			Indeks Kualitas Udara	87,65 poin
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	65,53 poin

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5
2	Terwujudnya peningkatan pembangunan rendah karbon,ketahanan iklim dan ketangguhan menghadapi resiko bencana	2. Meningkatnya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca	Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi mitigasi sektor/subsektorEnergi/ pembangkit,Transportasi, Bangunan,Limbah padat, Limbah cair, Sampah,Industri,Persawahan, Peternakan,Perkebunan, Kehutanan,Blue Carbon	30 %
			Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi adaptasi dalam bidang Air, Energi,Kesehatan, dan Ekosistem	30 %
		3. Meningkatnya upaya pengelolaan sampah	Persentase pengurangan dan penanganan sampah	92%
			Pemilahan sampah rumah tangga	51-70 %
			Pemilahan sampah perkantoran	80 %
			Pemilahan sampah area publik	61-80 %
		4. Meningkatnya upaya rehabilitasi dan perlindungan hutan dan lahan	Persentase penanganan lahan kritis	4-5 %
			Persentase pemulihan sumber-sumber mata air yang telah hilang	21-25 %
			Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging	100%
3	Terwujudnya peningkatan lapangan kerja dan produktivitas daerah	5. Meningkatnya kinerja usaha di sektor pengelolaan sampah,limbah, dan daur ulang	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,3 – 6,4 %
		6. Meningkatnya kinerja usaha di sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu	3,5 – 4,2 %
4	Terwujudnya peningkatan pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik)dan rohaniah (non fisik) Terwujudnya	7. Meningkatnya desa mandiri di sekitar lingkar hutan	Persentase desa mandiri (keluar dari kantong kemiskinan) di sekitar lingkar hutan	30%

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5
5	Terwujudnya peningkatan kemandirian fiskal daerah	8. Meningkatnya kontribusi DLHK terhadap pendapatan daerah	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD)	10 – 15 %

Selanjutnya Rencana Strategis dijabarkan dalam bentuk Rencana kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimana penyusunannya dimaksudkan untuk memberi kerangka serta arah perencanaan pembangunan untuk waktu 1 (satu) tahun kedepan. Penetapan Tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Adapun Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, rasional, kontekstual, terinci, terukur secara kuantitatif, dan dapat dicapai.

3.3 Program Dan Kegiatan SKPD

Dalam rangka mendukung capaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 – 2026, sebagaimana rumusan strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan akan dimplementasikan dalam program urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024, program, kegiatan dan sub kegiatan dirancang berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 sebagaimana telah disesuaikan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah untuk periode Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 s/d 2026.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun anggaran 2025. Adapun Program kegiatan yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024

KODE, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.11.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
2.11.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2.11.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2.11.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
2.11.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.11.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.11.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.11.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

KODE, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
2.11.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2.11.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2.11.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
2.11.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
2.11.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
2.11.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
2.11.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.11.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2.11.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
2.11.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
2.11.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.11.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.11.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.11.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel
2.11.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.11.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.11.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.11.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
2.11.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel
2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.11.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
2.11.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.11.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

KODE, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
2.11.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
2.11.02.1.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi
2.11.02.1.01.0004 Penyusunan RPPLH Provinsi
2.11.02.1.01.0005 Penetapan RPPLH Provinsi
2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
2.11.02.1.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
2.11.02.1.02.0007 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang
2.11.02.1.02.0008 Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup
2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
2.11.03.1.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
2.11.03.1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2.11.03.1.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
2.11.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
2.11.04.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN IMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.11.05.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2.11.05.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN AN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
2.11.06.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
2.11.06.1.01.0006 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
2.11.08.1.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

KODE, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
2.11.08.1.01.0003 Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
2.11.08.1.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
2.11.09.1.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
2.11.10.1.01.0003 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi
2.11.10.1.01.0007 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
2.11.11.1.01.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional
2.11.11.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
2.11.11.1.01.0006 Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
2.11.11.1.01.0012 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
2.11.11.1.01.0014 Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota
3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.28.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
3.28.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
3.28.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
3.28.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3.28.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
3.28.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
3.28.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
3.28.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
3.28.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3.28.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
3.28.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
3.28.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

KODE, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
3.28.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3.28.01.1.07.00011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.28.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.28.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
3.28.03.1.01.0002 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan
3.28.03.1.01.0006 Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
3.28.03.1.02.0002 Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P
3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung
3.28.03.1.03.0010 Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi
3.28.03.1.03.0011 Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani
3.28.03.1.03.0012 Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung
3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi
3.28.03.1.03.0015 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara

KODE, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
3.28.03.1.04.0012 Pembangunan gully plug
3.28.03.1.04.0013 Pembangunan Dam Penahan
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal
3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
3.28.03.1.07.0004 Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi
3.28.03.1.07.0004 Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi
3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
3.28.04.1.01.0006 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi
3.28.04.1.01.0008 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi
3.28.04.1.01.0011 Perencanaan Pengelolaan TAHURA
3.28.04.1.01.0013 Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi
3.28.04.1.01.0014 Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi
3.28.04.1.01.0015 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi
3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES
3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
3.28.04.1.03.0005 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
3.28.04.1.03.0006 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS
3.28.06.1.01.0005 Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS
3.28.06.1.01.0007 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah

KODE, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
3.28.06.1.01.0008 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan di tahun 2025. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian program kegiatan tersebut. Sedangkan pendanaan indikatif diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan indicator sasaran Renja Dinas LHK Provinsi NTB Tahun 2025, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Provinsi NTB Tahun 2025 serta Renstra Dinas LHK Provinsi NTB Tahun 2024-2026.
2. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
3. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan.
4. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.
5. Program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas LHK Provinsi NTB.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Rencana Kerja Dinas LHK Provinsi NTB Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas LHK Provinsi NTB pada tahun 2025 adalah sebanyak 14 (empat belas) program, yang terdiri dari 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (rutin), 9 (sembilan program Urusan Lingkungan Hidup, dan 4 (empat) Program Urusan Kehutanan.
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas LHK Provinsi NTB pada tahun 2025 adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) kegiatan dan 122 (seratus dua puluh dua) sub kegiatan.
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 162.532.262.419,- *(Seratus Enam Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tiga puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Rupiah)*. Adapun rincian pagu anggaran masing – masing program kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut:
   - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

     Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu tercapainya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi meliputi bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPARdan Nilai PAD dari pengelolaan hutan dilakukan melalui 10 (sepuluh) kegiatan terdiri dari 50 (lima puluh) sub kegiatan dengan total pagu sebesar Rp 90.917.407.834**,-** *(Sembilan Puluh Miliar Sembilan ratus Tujuh Belas juta Empat Ratus Tujuh Juta Delapan ratus Tiga Puluh Empat Rupiah)*

- Program Perencanaan Lingkungan Hidup

  Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Perencanaan Lingkungan Hidup yaitu Persentase dokumen kajian lingkungan hidup yang telah diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan dilakukan melalui 2 (dua) kegiatan terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. 700.502.776,- *(Tujuh Ratus Juta Lima Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah)*.

- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

  Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yaitu Nilai rata-rata parameter pengukuran kualitas udara di seluruh titik pantau, Persentase entitas yang mengimplementasikan pengurangan emisi gas rumah kaca dan Jumlah entitas yang mengimplementasikan pengurangan emisi gas rumah kaca dilakukan melalui 2 (dua) kegiatan terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. 6.414.346.387,- *(Enam Miliar Empat Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)*.

- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

  Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yaitu Nilai rata-rata parameter pengukuran kualitas udara di seluruh titik pantau (ug/m3) dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. 164.962.736,- *(Seratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)*

- Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

  Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yaitu Persentase unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya (%) dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. 105.440.000,- *(Seratus Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh empat Ribu Rupiah)*

- Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

  Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yaitu Persentase pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. 1.416.842.250,- *(Satu Miliar Empat Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)*

- Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat yaitu Persentase lembaga pendidikan yang meningkat kapasitasnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. 264.917.060,- *(Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Puluh rupiah)*

- Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

  Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat yaitu Persentase peningkatan entitas yang berpartisipasi/dinominasikan dalam pemberian penghargaan lingkungan hidup dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. 50.000.000,- *(Lima Puluh Juta Rupiah)*

- Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

  Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup yaitu Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang dapat ditangani dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. 90.749.879,- *(Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)*

- Program Pengelolaan Persampahan

  Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Pengelolaan Persampahan yaitu Persentase sampah yang ditangani di TPA, Prosentase Bank Sampah, TPS3R dan BSF yang telah beroperasi, Pemilahan sampah area publik, Pemilahan sampah rumah tangga, Persentase desa/kelurahan yang menerapkan pemihan sampah dari rumah tangga, Pemilahan sampah perkantoran dan Persentase usaha/industri persampahan yang beroperasi dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan dengan total pagu Rp. 5.228.600.000,- *(Lima Miliar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam ratus Ribu Rupiah)*

- Program Pengelolaan Hutan

  Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Pengelolaan Hutan yaitu Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi, Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan, Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi dan Persentase pemegang PBPHH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan dilakukan melalui 6 (enam) kegiatan terdiri dari 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan dengan total pagu Rp. 55.741.446.500,- *(Lima Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).*

- Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yaitu Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi dilakukan melalui 2 (dua) kegiatan terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan dengan total pagu Rp. 200.000.000,- *(Dua Ratus Juta Rupiah)*

- Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan

  Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan yaitu Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan dan Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan total pagu Rp. 375.000.000,- *(Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)*

- Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

  Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu Persentase penanganan lahan kritis dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan dengan total pagu Rp. 250.000.000,- *(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)*.

Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB di tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			**87.425.491.295**			
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**85.256.829.795**			
2 11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**			**85.256.829.795**			
2 11 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP OPD**	**A NILAI**	**79.992.181.707**			
		Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp)	**Rp. 4.173.726.718**				
		Nilai PAD dari pengelolaan hutan (Rp)	**Rp685.000.000**				
2 11 01 1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**7 Dokumen**	**448.000.000**			
2 11 01 1.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	55.000.000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	45.000.000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	34.000.000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	11	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	14.000.000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	14.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	36.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	250.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**55.684.294.587**			
2	11	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	462 Orang/ Bulan	55.590.294.587	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	60.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	25.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah**	**100%**	**59.000.000**			
2	11	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	11.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 11 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	29.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah**	**100%**	**5.000.000**			
		Jumlah pelanggan yang melakukan pengujian di Laboratorium Lingkungan Hidup (Unit)	**Unit**				
		Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan (Dokumen)	**Dokumen**				
2 11 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah**	**3 Dokumen**	**140.000.000**			
		Jumlah petugas Laboratorium Lingkungan Hidup yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	**Orang**				
2 11 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	11	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	9.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	35.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	79.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	7.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**199.500.000**			
2	11	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	4.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 11 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16 Dokumen	14.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	450 Laporan	15.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	130.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**125.000.000**			

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	11	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit	15.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**22.767.807.120**			
2	11	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2500 Laporan	6.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	165.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	57 Laporan	22.596.807.120	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**563.580.000**			
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	50 Unit	273.580.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang Dipelihara	16 Unit	10.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	107 Unit	10.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	150.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	11	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**02**			**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase dokumen kajian lingkungan hidup yang telah diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan (%)**	**%**	**700.502.776**			
2	**11**	**02**	**1.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**	**Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun (%)**	**%**	**131.122.376**			
2	11	02	1.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	36.141.732	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	02	1.01	0004	Penyusunan RPPLH Provinsi	jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi	1 Dokumen	47.490.322	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	02	1.01	0005	Penetapan RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang ditetapkan	1 Dokumen	47.490.322	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**02**	**1.02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**	**Jumlah KLHS yang disusun dan divalidasi (Dokumen)**	**Dokumen**	**569.380.400**			
2	11	02	1.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 11 02 1.02 0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 Dokumen	93.823.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 02 1.02 0008	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	1 Dokumen	425.557.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Nilai rata-rata parameter pengukuran kualitas udara di seluruh titik pantau (ug/m3)**	**ug/m3**	**842.633.387**			
		Persentase entitas yang mengimplementasikan pengurangan emisi gas rumah kaca (%)	**%**				
		Jumlah entitas yang mengimplementasikan pengurangan emisi gas rumah kaca (Unit)	**Unit**				
2 11 03 1.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	**Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup (Udara) (Unit Usaha)**	**Unit Usaha**	**709.718.297**			
		Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup (Unit)	**Unit**				

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	11	03	1.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	644.718.297	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	03	1.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	65.000.000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	03	1.01	0005	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	03	1.01	0007	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**03**	**1.02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Jumlah lokasi pencemaran lingkungan yang diatasi (Lokasi)**	**Lokasi**	**132.915.090**			
2	11	03	1.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	132.915.090	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Nilai rata-rata parameter pengukuran kualitas udara di seluruh titik pantau (ug/m3)**	**ug/m3**	**164.962.736**			
2	**11**	**04**	**1.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi**	**Jumlah lokasi pengelolaan taman kehati (Lokasi)**	**Lokasi**	**164.962.736**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 11 04 1.01 0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	164.962.736	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya (%)**	**%**	**105.440.000**			
2 11 05 1.01	**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Unit Usaha yang dilakukan pengumpulan Limbah B3Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Proviinsi (Unit)**	**Unit**	**105.440.000**			
2 11 05 1.01 0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5 Dokumen	55.440.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 11 05 1.01 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1 Dokumen	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan (%)**	**44,97%**	**1.416.842.250**			
2 11 06 1.01	**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**Jumlah usaha/kegiatan pemegang izin lingkungan yang dibina dan diawasi (Usaha/Kegiatan)**	**Usaha/Kegiatan**	**1.416.842.250**			
2 11 06 1.01 0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	1 Dokumen	1.296.842.250	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	11	06	1.01	0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	60 Badan Usaha	120.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase lembaga pendidikan yang meningkat kapasitasnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (%)**	**5%**	**264.917.060**			
2	**11**	**08**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah sekolah yang mampu memenuhi syarat adiwiyata tingkat provinsi (Sekolah)**	**15 Sekolah**	**264.917.060**			
2	11	08	1.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	164.917.060	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	08	1.01	0003	Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	35 Orang	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	11	08	1.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	30 Lembaga	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase peningkatan entitas yang berpartisipasi/dinominasikan dalam pemberian penghargaan lingkungan hidup (%)**	**100%**	**50.000.000**			
2	**11**	**09**	**1.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah entitas yang memperoleh penghargaan lingkungan hidup (entitas)**	**10 Entitas**	**50.000.000**			
2	11	09	1.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	10 Entitas	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang dapat ditangani (%)**	**100%**	**90.749.879**			
2	**11**	**10**	**1.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**	**Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani/diselesaikan (Pengaduan)**	**20 Pengaduan**	**90.749.879**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 11 10 1.01 0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	10 Perkara	45.375.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 10 1.01 0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	10 Pengaduan	45.374.879	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase sampah yang ditangani di TPA (%)**	**70%**	**1.628.600.000**			
		Prosentase Bank Sampah, TPS3R dan BSF yang telah beroperasi (%)	**75%**				
		Pemilahan sampah area publik (%)	**31-60%**				
		Pemilahan sampah rumah tangga (%) (7)/ Persentase desa/kelurahan yang menerapkan pemihan sampah dari rumah tangga (%)	**31-50%**				
		Pemilahan sampah perkantoran (%)	**70%**				
		Persentase usaha/industri persampahan yang beroperasi (%)	**75%**				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 11 11 1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase sampah yang ditangani di TPA (%)	70%	1.628.600.000			
		Presentase pengelola fasiltas pengolahan sampah metode 3R dan BSF yang telah mengikuti pelatihan (%)	%				
		Presentase pengelola fasiltas pengolahan sampah metode 3R dan BSF yang telah mengikuti peningkatan kapasitas kelembagaan (%)	%				
		Jumlah sampah yang didaur ulang (ton)	Ton				
		Jumlah desa/kelurahan yang menerapkan pemihan sampah dari sumbernya (desa/kelurahan)	Desa/Kelurahan				
		Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan pemilahan sampah dari areal publik (Kabupaten/kota)	Kabupaten/Kota				
		Jumlah perkantoran lingkup pemerintah provinsi yang menerapkan eco-office (kantor)	Kantor				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah sampah yang dikelola (Ton)	**Ton**				
		Jumlah limbah B3 yang diolah (Ton)	**Ton**				
2 11 11 1.01 0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	0 Dokumen	0,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 11 1.01 0012	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	900 Unit	1.139.600.000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 11 1.01 0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	6 Dokumen	489.000.000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**2.168.661.500**			
3 28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**2.168.661.500**			
3 28 03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase penanganan lahan kritis (%)**	**3-4%**	**1.588.846.500**			
		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi (%)	**100%**				
		Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging (%)	**100%**				
		Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan (%)	**100%**				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi (%)	**75%**				
		Persentase pemegang PBPHH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan (%)	**75%**				
3 28 03 1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan (Km)**	**Km**	**50.000.000**			
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	16 Unit	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 03 1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun (%)**	**%**	**77.000.000**			
3 28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	18 Dokumen	27.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 03 1.02 0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	16 Dokumen	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Jumlah data dan Informasi pemanfaaatan kawasan hutan yang tersedia (Dokumen)**	**Dokumen**	**305.000.000**			
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	03	1.03	0010	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	2 Dokumen	15.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	03	1.03	0011	Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	5 Dokumen	25.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	03	1.03	0012	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	2 Dokumen	15.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.03 0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	75.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 03 1.03 0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	7 Dokumen	75.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 03 1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Luasan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)**	**Ha**	**350.000.000**			
3 28 03 1.04 0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	3250 Ha	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	800 Ha	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 03 1.04 0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	16 Laporan	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 03 1.04 0012	Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	176 Unit	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.04 0013	Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	176 Unit	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 03 1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi (kasus)**	**Kasus**	**706.846.500**			
		Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan (lokasi)	**Lokasi**				
		Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi (%)	**%**				
3 28 03 1.05 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	125.000.000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 03 1.05 0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 Laporan	51.500.000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 03 1.05 0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	275000 Ha	230.000.000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 03 1.05 0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	10 Operasi	300.346.500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	**28**	**03**	**1.07**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**Jumlah industri HHK yang dibina dan diawasi (Unit Manajemen)**	**Unit Managemen**	**100.000.000**			
3	28	03	1.07	0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	5 Laporan	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	03	1.07	0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif	5 Unit Managemen	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi (%)**	**%**	**105.000.000**			
3	**28**	**04**	**1.02**		**Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi**	**Jumlah penangkar TSL non appendix yang tertib aturan (Unit)**	**Unit**	**25.000.000**			
3	28	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	25.000.000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	**28**	**04**	**1.03**		**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**	**Jumlah KEE, Cagar Biosfer dan Geopark yang terkelola (Kawasan)**	**Kawasan**	**80.000.000**			
3	28	04	1.03	0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	16 Orang	40.000.000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	04	1.03	0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	100 Ha	40.000.000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (Rp)** **IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Rp)**	**IK-1 : 28 Milyar** **IK-2 : 155 Milyar**	**224.815.000**			
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya (Kelompok)**	**Kelompok**	**224.815.000**			
						Luas Kawasan Hutan yang sudah diterbitkan Persetujuan Perhutanan Sosial (Ha)	**Ha**				
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	80 Kelompok	35.055.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 05 1.01 0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	67 Orang	25.060.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 05 1.01 0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 05 1.01 0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Hektar	164.700.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**Persentase penanganan lahan kritis (%)**	**3-4%**	**250.000.000**			
3 28 06 1.01	**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah DAS yang dipelihara dan dipulihkan fungsinya (DAS)**	**DAS**	**250.000.000**			
3 28 06 1.01 0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	100 Orang	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 06 1.01 0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 Lembaga	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 06 1.01 0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	1 Dokumen	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 06 1.01 0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	1 Dokumen	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Balai Laboratorium Lingkungan			**5.907.023.000**			
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**5.907.023.000**			
2 11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**			**5.907.023.000**			
2 11 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP** **Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR**	**A Poin** **Rp 4.173.726.718.-**	**335.310.000**			
		Nilai PAD dari pengelolaan hutan (Rp)	**Rp685.000.000**				
2 11 01 1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**2 Dokumen**	**2.500.000**			
2 11 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2 11 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2 11 01 1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**7.000.000**			
2 11 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	5.000.000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.000.000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2	11	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	1.000.000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah**	**100%**	**5.000.000**			
2	11	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2	11	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2	11	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.000.000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.000.000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2	**11**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah**	**100%**	**34.000.000**			

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
						Jumlah pelanggan yang melakukan pengujian di Laboratorium Lingkungan Hidup (Unit)	**Unit**				
						Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan (Dokumen)	**Dokumen**				
2	11	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	29.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2	11	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	5.000.000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2	**11**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah**	**3 Dokumen**	**57.500.000**			
						Jumlah petugas Laboratorium Lingkungan Hidup yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	**Orang**				
2	11	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.000.000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2	11	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	55.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2	11	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	1.500.000	Kota Mataram, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
									Kecamatan, Semua Kel/Desa		
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**32.500.000**			
2	11	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2	11	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2	11	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.000.000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.500.000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2	11	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16 Dokumen	5.000.000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.000.000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	11	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	10.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2	**11**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**10.000.000**			
2	11	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2	11	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**102.000.000**			
2	11	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	100.000.000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**84.810.000**			
2	11	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	39.810.000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 11 01 1.09 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	16 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2 11 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	5.000.000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2 11 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.000.000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2 11 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2 11 03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Nilai rata-rata parameter pengukuran kualitas udara di seluruh titik pantau (ug/m3)**	**ug/m3**	**5.571.713.000**			
		Persentase entitas yang mengimplementasikan pengurangan emisi gas rumah kaca (%)	**%**				
		Jumlah entitas yang mengimplementasikan pengurangan emisi gas rumah kaca (Unit)	**Unit**				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 11 03 1.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	**Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup (Udara) (Unit Usaha)**	**Unit Usaha**	**5.571.713.000**			
		Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup (Unit)	**Unit**				
2 11 03 1.01 0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2 11 03 1.01 0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	5.571.713.000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA			**3.900.945.938**			
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**3.900.945.938**			
3 28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**3.900.945.938**			
3 28 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP OPD**	**A NILAI**	**284.338.941**			
		Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp)	**4.173.726.718**				
		Nilai PAD dari pengelolaan hutan (Rp)	**Rp685.000.000**				

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**4 Dokumen**	**17.500.042**			
3	28	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.399.679	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3	28	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.119.562	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3	28	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.588.801	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3	28	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.392.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**18.527.000**			
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	8.321.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.371.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.835.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 01 1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah**	**100%**	**14.812.500**			
3 28 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.375.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.187.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 01 1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah**	**100%**	**4.625.000**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah pelanggan yang melakukan pengujian di Laboratorium Lingkungan Hidup (Unit)	**Unit**				
		Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan (Dokumen)	**Dokumen**				
3 28 01 1.04 0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah**	**3 Dokumen**	**5.812.500**			
		Jumlah petugas Laboratorium Lingkungan Hidup yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	**Orang**				
3 28 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.125.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1.375.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**35.159.375**			
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.087.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.771.875	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.893.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3	28	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.218.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	14.575.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3	**28**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**92.480.024**			
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	937.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	91.230.024	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**36.906.250**			
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.093.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	34.812.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**58.516.250**			
3	28	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	13.047.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	32.887.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.900.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.743.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.687.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase penanganan lahan kritis (%)**	3-4%	**3.111.875.000**			
		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi (%)	100%				
		Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging (%)	100%				
		Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan (%)	**100%**				
		Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi (%)	**75%**				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase pemegang PBPHH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan (%)	**75%**				
3 28 03 1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan (Km)**	**Km**	**71.250.000**			
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	25.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 03 1.01 0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	46.250.000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 03 1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun (%)**	**%**	**56.250.000**			
3 28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	28.125.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 03 1.02 0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Jumlah data dan Informasi pemanfaaatan kawasan hutan yang tersedia (Dokumen)**	**Dokumen**	**5.000.000**			
3 28 03 1.03 0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 03 1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Luasan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)**	**Ha**	**2.979.375.000**			
3 28 03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	2.234.375.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	30.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 03 1.04 0012	Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	121.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 03 1.04 0013	Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	594.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi (%)**	**100%**	**479.731.997**			
3 28 04 1.01	**Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi**	**Jumlah Taman Hutan Raya Kewenangan Provinsi yang dikelola (Unit)**	**Unit**	**479.731.997**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 04 1.01 0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti	2 Permohonan	25.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 04 1.01 0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	2 Desa	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 04 1.01 0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan	2 Dokumen	10.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 04 1.01 0013	Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi	Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi	3150 Ha	100.000.000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 04 1.01 0014	Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	200 Ha	274.731.997	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 04 1.01 0015	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan	3150 Ha	50.000.000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (Rp) IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Rp)**	**IK-1 : 28 Milyar IK-2 : 155 Milyar**	**25.000.000**			
3 28 05 1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya (Kelompok)**	**Kelompok**	**25.000.000**			
		Luas Kawasan Hutan yang sudah diterbitkan Persetujuan Perhutanan Sosial (Ha)	**Ha**				
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	25.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 05 1.01 0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
	Balai KPH Rinjani Barat			**3.711.995.899**			
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**3.711.995.899**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**3.711.995.899**			
3 28 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP OPD**	**A NILAI**	**284.320.899**			
		Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp)	**4.173.726.718**				
		Nilai PAD dari pengelolaan hutan (Rp)	**Rp685.000.000**				
3 28 01 1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**4 Dokumen**	**17.482.000**			
3 28 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.398.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.119.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.573.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.392.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**18.527.000**			
3 28 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	8.321.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.371.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.835.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah**	**100%**	**14.812.500**			
3 28 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.375.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.187.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah**	**100%**	**4.625.000**			
		Jumlah pelanggan yang melakukan pengujian di Laboratorium Lingkungan Hidup (Unit)	**Unit**				
		Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan (Dokumen)	**Dokumen**				
3 28 01 1.04 0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah**	**3 Dokumen**	**5.812.500**			
		Jumlah petugas Laboratorium Lingkungan Hidup yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	**Orang**				

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.125.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3	28	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1.375.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**35.159.375**			
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.087.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.771.875	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.893.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3	28	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.218.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	14.575.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3	**28**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**92.480.024**			
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	937.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	91.230.024	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**36.906.250**			
3 28 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.093.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	34.812.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**58.516.250**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	13.047.500	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	32.887.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.900.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.743.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.687.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase penanganan lahan kritis (%)**	3-4%	**3.402.675.000**			
		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi (%)	100%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging (%)	100%				
		Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan (%)	**100%**				
		Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi (%)	**75%**				
		Persentase pemegang PBPHH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan (%)	**75%**				
3 28 03 1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan (Km)**	**Km**	**71.250.000**			
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	25.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 03 1.01 0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	46.250.000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 03 1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun (%)**	**%**	**56.250.000**			

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	28.125.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3	28	03	1.02	0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Jumlah data dan Informasi pemanfaaatan kawasan hutan yang tersedia (Dokumen)**	**Dokumen**	**10.000.000**			
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Luasan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)**	**Ha**	**2.979.375.000**			
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	2.234.375.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	30.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3	28	03	1.04	0012	Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	121.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3	28	03	1.04	0013	Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	594.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi (kasus)**	**Kasus**	**285.800.000**			
						Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan (lokasi)	**Lokasi**				
						Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi (%)	**%**				
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	5.800.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	275000 Ha	251.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.05 0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (llegal logging dan TSL)	10 Operasi	29.000.000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (Rp) IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Rp)**	**IK-1 : 28 Milyar IK-2 : 155 Milyar**	**25.000.000**			
3 28 05 1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya (Kelompok)**	**Kelompok**	**25.000.000**			
		Luas Kawasan Hutan yang sudah diterbitkan Persetujuan Perhutanan Sosial (Ha)	**Ha**				
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	25.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 05 1.01 0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
	Balai KPH Ampang Riwo			3.703.807.644			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			3.703.807.644			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			3.703.807.644			
3 28 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP OPD**	**A NILAI**	**284.332.644**			
		Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp)	**4.173.726.718**				
		Nilai PAD dari pengelolaan hutan (Rp)	**Rp685.000.000**				
3 28 01 1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**4 Dokumen**	**17.493.745**			
3 28 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.971.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.522.745	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 01 1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**18.527.000**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	8.321.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.371.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.835.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 01 1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah**	**100%**	**14.812.500**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.375.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.250.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.187.500	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 01 1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah**	**100%**	**4.625.000**			
		Jumlah pelanggan yang melakukan pengujian di Laboratorium Lingkungan Hidup (Unit)	**Unit**				

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
						Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan (Dokumen)	**Dokumen**				
3	28	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.312.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3	28	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	2.312.500	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah**	**3 Dokumen**	**5.812.500**			
						Jumlah petugas Laboratorium Lingkungan Hidup yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	**Orang**				
3	28	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.125.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1.375.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**35.159.375**			
3 28 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.312.500	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.087.500	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.800.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.771.875	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.893.750	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.218.750	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	14.575.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3	**28**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**92.480.024**			
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	312.500	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	937.500	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3	28	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	91.230.024	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**36.906.250**			
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.093.750	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	34.812.500	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**58.516.250**			
3	28	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	13.047.500	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	32.887.500	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.900.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3	28	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.743.750	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.687.500	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.250.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase penanganan lahan kritis (%)**	3-4%	**3.394.475.000**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi (%)	100%				
		Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging (%)	100%				
		Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan (%)	**100%**				
		Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi (%)	**75%**				
		Persentase pemegang PBPHH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan (%)	**75%**				
3 28 03 1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan (Km)**	**Km**	**71.250.000**			
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	25.000.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	46.250.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun (%)**	**%**	**56.250.000**			
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3	28	03	1.02	0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Jumlah data dan Informasi pemanfaaatan kawasan hutan yang tersedia (Dokumen)**	**Dokumen**	**10.000.000**			
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	5.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.03 0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 03 1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Luasan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)**	**Ha**	**2.979.475.000**			
3 28 03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	2.234.375.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	30.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 03 1.04 0012	Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	121.100.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.04 0013	Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	594.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 03 1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi (kasus)**	**Kasus**	**277.500.000**			
		Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan (lokasi)	**Lokasi**				
		Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi (%)	**%**				
3 28 03 1.05 0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	275000 Ha	251.000.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 03 1.05 0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (llegal logging dan TSL)	10 Operasi	26.500.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (Rp) IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Rp)**	**IK-1 : 28 Milyar IK-2 : 155 Milyar**	**25.000.000**			
3 28 05 1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya (Kelompok)**	**Kelompok**	**25.000.000**			
		Luas Kawasan Hutan yang sudah diterbitkan Persetujuan Perhutanan Sosial (Ha)	**Ha**				
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	25.000.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 05 1.01 0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
	Balai KPH Tambora			**3.708.996.272**			
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**3.708.996.272**			
3 28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**3.708.996.272**			
3 28 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP OPD**	**A NILAI**	**284.321.272**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp)	**4.173.726.718**				
		Nilai PAD dari pengelolaan hutan (Rp)	**Rp685.000.000**				
3 28 01 1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**4 Dokumen**	**17.482.000**			
3 28 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.398.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.119.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.573.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.392.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**18.527.373**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	8.321.373	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.371.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.835.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah**	**100%**	**14.812.500**			
3 28 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.375.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.187.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah**	**100%**	**4.625.000**			
		Jumlah pelanggan yang melakukan pengujian di Laboratorium Lingkungan Hidup (Unit)	**Unit**				
		Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan (Dokumen)	**Dokumen**				
3 28 01 1.04 0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah**	**3 Dokumen**	**5.812.500**			
		Jumlah petugas Laboratorium Lingkungan Hidup yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	**Orang**				
3 28 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.125.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1.375.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**35.159.375**			
3 28 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.087.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.771.875	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.893.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.218.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	14.575.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**92.480.024**			
3 28 01 1.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	937.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	91.230.024	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**36.906.250**			
3 28 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.093.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	34.812.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**58.516.250**			
3 28 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	13.047.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	32.887.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.900.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.743.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.687.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase penanganan lahan kritis (%)**	3-4%	**3.399.675.000**			
		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi (%)	100%				
		Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging (%)	100%				
		Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan (%)	**100%**				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi (%)	**75%**				
		Persentase pemegang PBPHH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan (%)	**75%**				
3 28 03 1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan (Km)**	**Km**	**71.250.000**			
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	25.000.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 03 1.01 0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	46.250.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 03 1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun (%)**	**%**	**56.250.000**			
3 28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	28.125.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 03 1.02 0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Jumlah data dan Informasi pemanfaaatan kawasan hutan yang tersedia (Dokumen)**	**Dokumen**	**10.000.000**			
3 28 03 1.03 0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	5.000.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 03 1.03 0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 03 1.03 0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 03 1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Luasan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)**	**Ha**	**2.979.375.000**			
3 28 03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	497 Ha	2.234.375.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	30.000.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH TAMBORA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.04 0012	Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	121.000.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 03 1.04 0013	Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	594.000.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 03 1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi (kasus)**	**Kasus**	**282.800.000**			
		Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan (lokasi)	**Lokasi**				
		Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi (%)	**%**				
3 28 03 1.05 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	5.300.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 03 1.05 0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	20871 Ha	251.000.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 03 1.05 0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	10 Operasi	26.500.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (Rp) IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Rp)**	**IK-1 : 28 Milyar IK-2 : 155 Milyar**	**25.000.000**			
3 28 05 1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya (Kelompok)**	**Kelompok**	**25.000.000**			
		Luas Kawasan Hutan yang sudah diterbitkan Persetujuan Perhutanan Sosial (Ha)	**Ha**				
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	25.000.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 05 1.01 0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
	Balai KPH Maria Donggomasa			**3.703.995.899**			
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**3.703.995.899**			
3 28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**3.703.995.899**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP OPD**	**A NILAI**	**279.320.899**			
		Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp)	**4.173.726.718**				
		Nilai PAD dari pengelolaan hutan (Rp)	**Rp685.000.000**				
3 28 01 1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**4 Dokumen**	**17.482.000**			
3 28 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.398.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.119.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.573.000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.392.000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**18.527.000**			
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	8.321.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3	28	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.371.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.835.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah**	**100%**	**14.812.500**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.375.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.250.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.187.500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 01 1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah**	**100%**	**2.312.500**			
		Jumlah pelanggan yang melakukan pengujian di Laboratorium Lingkungan Hidup (Unit)	**Unit**				
		Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan (Dokumen)	**Dokumen**				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	2.312.500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah**	**3 Dokumen**	**5.812.500**			
		Jumlah petugas Laboratorium Lingkungan Hidup yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	**Orang**				
3 28 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.125.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.312.500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1.375.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**35.159.375**			
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.312.500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.087.500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.800.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.771.875	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.893.750	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.218.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	14.575.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**92.480.024**			
3 28 01 1.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	312.500	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	937.500	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 01 1.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 01 1.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	91.230.024	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**36.906.250**			
3 28 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.093.750	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	34.812.500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**55.828.750**			
3 28 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	13.047.500	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	32.887.500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.900.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.743.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.250.000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase penanganan lahan kritis (%)**	3-4%	**3.399.675.000**			
		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi (%)	100%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging (%)	100%				
		Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan (%)	**100%**				
		Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi (%)	**75%**				
		Persentase pemegang PBPHH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan (%)	**75%**				
3 28 03 1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan (Km)**	**Km**	**71.250.000**			
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	25.000.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 03 1.01 0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	46.250.000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun (%)**	**%**	**56.250.000**			
3 28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 03 1.02 0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	28.125.000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 03 1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Jumlah data dan Informasi pemanfaaatan kawasan hutan yang tersedia (Dokumen)**	**Dokumen**	**10.000.000**			
3 28 03 1.03 0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	5.000.000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.03 0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	5.000.000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 03 1.03 0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	0 Dokumen	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 03 1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Luasan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)**	**Ha**	**2.979.375.000**			
3 28 03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	2.234.375.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	30.000.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.04 0012	Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	121.000.000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 03 1.04 0013	Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	594.000.000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 03 1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi (kasus)**	**Kasus**	**282.800.000**			
		Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan (lokasi)	**Lokasi**				
		Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi (%)	**%**				
3 28 03 1.05 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	5.300.000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.05 0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	18262 Ha	251.000.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 03 1.05 0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (llegal logging dan TSL)	10 Operasi	26.500.000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (Rp) IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Rp)**	**IK-1 : 28 Milyar IK-2 : 155 Milyar**	**25.000.000**			
3 28 05 1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya (Kelompok)**	**Kelompok**	**25.000.000**			
		Luas Kawasan Hutan yang sudah diterbitkan Persetujuan Perhutanan Sosial (Ha)	**Ha**				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	25.000.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 05 1.01 0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	0 Unit	0,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
	Balai KPH Rinjani Timur			**3.738.501.601**			
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**3.738.501.601**			
3 28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**3.738.501.601**			
3 28 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP OPD**	**A NILAI**	**284.326.601**			
		Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp)	**4.173.726.718**				
		Nilai PAD dari pengelolaan hutan (Rp)	**Rp685.000.000**				
3 28 01 1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**4 Dokumen**	**17.482.000**			
3 28 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.398.000	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
									Kecamatan, Semua Kel/Desa		
3	28	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.119.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3	28	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.573.000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3	28	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.392.000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**18.532.702**			
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	8.321.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3	28	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.376.702	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.835.000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah**	**100%**	**14.812.500**			
3 28 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.375.000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.250.000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.187.500	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah**	**100%**	**4.625.000**			
		Jumlah pelanggan yang melakukan pengujian di Laboratorium Lingkungan Hidup (Unit)	**Unit**				
		Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan (Dokumen)	**Dokumen**				

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.312.500	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3	28	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	2.312.500	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah**	**3 Dokumen**	**5.812.500**			
						Jumlah petugas Laboratorium Lingkungan Hidup yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	**Orang**				
3	28	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.125.000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.312.500	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3	28	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1.375.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**35.159.375**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.312.500	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.087.500	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.800.000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.771.875	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.893.750	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.218.750	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	14.575.000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**92.480.024**			
3 28 01 1.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	312.500	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	937.500	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	91.230.024	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**36.906.250**			
3 28 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.093.750	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	34.812.500	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**58.516.250**			
3 28 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	13.047.500	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	32.887.500	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.900.000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.743.750	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.687.500	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.250.000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase penanganan lahan kritis (%)**	3-4%	**3.429.175.000**			
		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi (%)	100%				
		Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging (%)	100%				
		Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan (%)	**100%**				
		Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi (%)	**75%**				
		Persentase pemegang PBPHH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan (%)	**75%**				
3 28 03 1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan (Km)**	**Km**	**71.250.000**			
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	25.000.000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.01 0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	46.250.000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 03 1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun (%)**	**%**	**56.250.000**			
3 28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 03 1.02 0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 03 1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Jumlah data dan Informasi pemanfaaatan kawasan hutan yang tersedia (Dokumen)**	**Dokumen**	**10.000.000**			
3 28 03 1.03 0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 03 1.03 0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 03 1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Luasan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)**	**Ha**	**2.979.375.000**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	117 Ha	2.234.375.000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	30.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 03 1.04 0012	Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	12 Unit	121.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 03 1.04 0013	Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	15 Unit	594.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 03 1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi (kasus)**	**Kasus**	**312.300.000**			
		Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan (lokasi)	**Lokasi**				
		Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi (%)	**%**				
3 28 03 1.05 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	5.300.000	-	-	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 03 1.05 0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 Laporan	29.500.000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.05 0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	21393 Ha	251.000.000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 03 1.05 0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (llegal logging dan TSL)	10 Operasi	26.500.000	-	-	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (Rp)** **IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Rp)**	**IK-1 : 28 Milyar** **IK-2 : 155 Milyar**	**25.000.000**			
3 28 05 1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya (Kelompok)**	**Kelompok**	25.000.000			
		Luas Kawasan Hutan yang sudah diterbitkan Persetujuan Perhutanan Sosial (Ha)	**Ha**				
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	25.000.000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 05 1.01 0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
	Balai KPH Sejorong Mataiyang			**3.665.310.317**			
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**3.665.310.317**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**3.665.310.317**			
3 28 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP OPD**	**A NILAI**	**284.335.317**			
		Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp)	**4.173.726.718**				
		Nilai PAD dari pengelolaan hutan (Rp)	**Rp685.000.000**				
3 28 01 1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**4 Dokumen**	**17.482.000**			
3 28 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.398.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.119.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.573.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.392.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**18.541.418**			
3 28 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	8.321.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.371.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.849.418	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah**	**100%**	**14.812.500**			
3 28 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.375.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.187.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah**	**100%**	**4.625.000**			
		Jumlah pelanggan yang melakukan pengujian di Laboratorium Lingkungan Hidup (Unit)	**Unit**				
		Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan (Dokumen)	**Dokumen**				
3 28 01 1.04 0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah**	**3 Dokumen**	**5.812.500**			
		Jumlah petugas Laboratorium Lingkungan Hidup yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	**Orang**				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.125.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1.375.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**35.159.375**			
3 28 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.087.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.771.875	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.893.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3	28	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.218.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	14.575.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3	**28**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**92.480.024**			
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	937.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	91.230.024	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**36.906.250**			
3 28 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.093.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	34.812.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**58.516.250**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	13.047.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	32.887.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.900.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.743.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.687.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase penanganan lahan kritis (%)**	3-4%	**3.378.475.000**			
		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi (%)	100%				
		Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging (%)	100%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan (%)	**100%**				
		Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi (%)	**75%**				
		Persentase pemegang PBPHH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan (%)	**75%**				
3 28 03 1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan (Km)**	**Km**	**71.250.000**			
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	25.000.000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 03 1.01 0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	46.250.000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 03 1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun (%)**	**%**	**56.250.000**			
3 28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.02 0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 03 1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Jumlah data dan Informasi pemanfaaatan kawasan hutan yang tersedia (Dokumen)**	**Dokumen**	**10.000.000**			
3 28 03 1.03 0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	5.000.000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 03 1.03 0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 03 1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Luasan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)**	**Ha**	**2.979.375.000**			
3 28 03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	147 Ha	2.234.375.000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	30.000.000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.04 0012	Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	121.000.000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 03 1.04 0013	Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	594.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 03 1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi (kasus)**	**Kasus**	**261.600.000**			
		Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan (lokasi)	**Lokasi**				
		Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi (%)	**%**				
3 28 03 1.05 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	5.300.000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 03 1.05 0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	15653 Ha	251.000.000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 03 1.05 0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (llegal logging dan TSL)	10 Operasi	5.300.000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (Rp)** **IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Rp)**	**IK-1 : 28 Milyar** **IK-2 : 155 Milyar**	**2.500.000**			
3 28 05 1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya (Kelompok)**	**Kelompok**	**2.500.000**			
		Luas Kawasan Hutan yang sudah diterbitkan Persetujuan Perhutanan Sosial (Ha)	**Ha**				
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	2.500.000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 05 1.01 0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
	Balai KPH Batu Lanteh			**3.708.995.899**			
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**3.708.995.899**			
3 28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**3.708.995.899**			
3 28 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP OPD**	**A NILAI**	**284.320.899**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp)	**4.173.726.718**				
		Nilai PAD dari pengelolaan hutan (Rp)	**Rp685.000.000**				
3 28 01 1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**4 Dokumen**	**17.482.000**			
3 28 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.398.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.119.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
2 11 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.573.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.392.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 01 1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**18.527.000**			

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	8.321.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3	28	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.371.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.835.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah**	**100%**	**14.812.500**			
3	28	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.375.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.250.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3	28	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.187.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah**	**100%**	**4.625.000**			
		Jumlah pelanggan yang melakukan pengujian di Laboratorium Lingkungan Hidup (Unit)	**Unit**				
		Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan (Dokumen)	**Dokumen**				
3 28 01 1.04 0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.312.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	2.312.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah**	**3 Dokumen**	**5.812.500**			
		Jumlah petugas Laboratorium Lingkungan Hidup yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	**Orang**				

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.125.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.312.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3	28	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1.375.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**35.159.375**			
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.312.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.087.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.800.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.771.875	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.893.750	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3	28	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.218.750	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	14.575.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3	**28**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**92.480.024**			
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	312.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	937.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 01 1.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 01 1.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	91.230.024	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**36.906.250**			
3 28 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.093.750	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	34.812.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**58.516.250**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	13.047.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	32.887.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.900.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.743.750	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.687.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.250.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase penanganan lahan kritis (%)**	3-4%	**3.399.675.000**			
		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi (%)	100%				
		Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging (%)	100%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan (%)	**100%**				
		Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi (%)	**75%**				
		Persentase pemegang PBPHH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan (%)	**75%**				
3 28 03 1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan (Km)**	**Km**	**71.250.000**			
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	25.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 03 1.01 0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	46.250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 03 1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun (%)**	**%**	**56.250.000**			
3 28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH BATU LANTEH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	03	1.02	0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH BATU LANTEH
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Jumlah data dan Informasi pemanfaaatan kawasan hutan yang tersedia (Dokumen)**	**Dokumen**	**10.000.000**			
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	5.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH BATU LANTEH
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH BATU LANTEH
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Luasan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)**	**Ha**	**2.979.375.000**			
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	2.234.375.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH BATU LANTEH
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	30.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH BATU LANTEH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.04 0012	Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	121.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 03 1.04 0013	Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	594.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 03 1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi (kasus)**	**Kasus**	**282.800.000**			
		Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan (lokasi)	**Lokasi**				
		Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi (%)	**%**				
3 28 03 1.05 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	5.300.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 03 1.05 0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	14088 Ha	251.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 03 1.05 0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (llegal logging dan TSL)	10 Operasi	26.500.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH BATU LANTEH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (Rp)** **IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Rp)**	**IK-1 : 28 Milyar** **IK-2 : 155 Milyar**	**25.000.000**			
3 28 05 1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya (Kelompok)**	**Kelompok**	**25.000.000**			
		Luas Kawasan Hutan yang sudah diterbitkan Persetujuan Perhutanan Sosial (Ha)	**Ha**				
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	25.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 05 1.01 0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	0 Unit	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
	Balai KPH Ampang Plampang			**3.737.402.149**			
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**3.737.402.149**			
3 28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**3.737.402.149**			
3 28 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP OPD**	**A NILAI**	**283.227.149**			
		Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp)	**4.173.726.718**				

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
						Nilai PAD dari pengelolaan hutan (Rp)	**Rp685.000.000**				
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**4 Dokumen**	**17.482.000**			
3	28	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.398.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3	28	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.119.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3	28	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.573.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3	28	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	4.392.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**18.527.000**			
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	8.321.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.371.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.835.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah**	**100%**	**14.812.500**			
3	28	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.375.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.250.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3	28	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.187.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3	**28**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah**	**100%**	**4.625.000**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah pelanggan yang melakukan pengujian di Laboratorium Lingkungan Hidup (Unit)	**Unit**				
		Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan (Dokumen)	**Dokumen**				
3 28 01 1.04 0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.312.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	2.312.500	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah**	**3 Dokumen**	**5.812.500**			
		Jumlah petugas Laboratorium Lingkungan Hidup yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	**Orang**				
3 28 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.125.000	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.312.500	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1.375.000	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**35.159.375**			
3 28 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.312.500	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.087.500	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.800.000	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.771.875	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.893.750	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3	28	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.218.750	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	14.575.000	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3	**28**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**91.542.524**			
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	312.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	91.230.024	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**36.906.250**			
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.093.750	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	34.812.500	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**58.360.000**			
3	28	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	13.047.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	32.887.500	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.743.750	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.743.750	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.687.500	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.250.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase penanganan lahan kritis (%)**	3-4%	**3.429.175.000**			
		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi (%)	100%				
		Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging (%)	100%				
		Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan (%)	**100%**				
		Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi (%)	**75%**				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase pemegang PBPHH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan (%)	**75%**				
3 28 03 1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan (Km)**	**Km**	**71.250.000**			
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	25.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 03 1.01 0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	46.250.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 03 1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun (%)**	**%**	**56.250.000**			
3 28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 03 1.02 0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 03 1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Jumlah data dan Informasi pemanfaaatan kawasan hutan yang tersedia (Dokumen)**	**Dokumen**	**10.000.000**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.03 0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	5.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 03 1.03 0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 03 1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Luasan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)**	**Ha**	**2.979.375.000**			
3 28 03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	2.234.375.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	30.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 03 1.04 0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	50 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 03 1.04 0012	Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	121.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 03 1.04 0013	Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	594.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi (kasus)**	**Kasus**	**312.300.000**			
		Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan (lokasi)	**Lokasi**				
		Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi (%)	**%**				
3 28 03 1.05 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	5.300.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 03 1.05 0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 Laporan	29.500.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 03 1.05 0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	275000 Ha	251.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 03 1.05 0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	10 Operasi	26.500.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (Rp)** **IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Rp)**	**IK-1 : 28 Milyar** **IK-2 : 155 Milyar**	**25.000.000**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 05 1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya (Kelompok)**	**Kelompok**	**25.000.000**			
		Luas Kawasan Hutan yang sudah diterbitkan Persetujuan Perhutanan Sosial (Ha)	**Ha**				
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	25.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 05 1.01 0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
	Balai KPH Orong Telu			**3.708.995.899**			
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**3.708.995.899**			
3 28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**3.708.995.899**			
3 28 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP OPD**	**A NILAI**	**284.320.899**			
		Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp)	**4.173.726.718**				
		Nilai PAD dari pengelolaan hutan (Rp)	**Rp685.000.000**				
3 28 01 1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**4 Dokumen**	**17.482.000**			

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.398.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3	28	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.119.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3	28	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.573.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3	28	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.392.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**18.527.000**			
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	8.321.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3	28	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.371.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.835.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah**	**100%**	**14.812.500**			
3	28	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.375.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3	28	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.187.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3	**28**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah**	**100%**	**4.625.000**			
						Jumlah pelanggan yang melakukan pengujian di Laboratorium Lingkungan Hidup (Unit)	**Unit**				

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
						Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan (Dokumen)	**Dokumen**				
3	28	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3	28	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah**	**3 Dokumen**	**5.812.500**			
						Jumlah petugas Laboratorium Lingkungan Hidup yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	**Orang**				
3	28	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.125.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3	28	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1.375.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**35.159.375**			
3 28 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.087.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.771.875	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.893.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.218.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	14.575.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3	**28**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**92.480.024**			
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	937.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3	28	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	91.230.024	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**36.906.250**			
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.093.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	34.812.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**58.516.250**			
3	28	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	13.047.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	32.887.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.900.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.743.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.687.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase penanganan lahan kritis (%)**	3-4%	**3.399.675.000**			
		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi (%)	100%				
		Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging (%)	100%				
		Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan (%)	**100%**				
		Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi (%)	**75%**				
		Persentase pemegang PBPHH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan (%)	**75%**				

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan (Km)**	**Km**	**71.250.000**			
3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	25.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	46.250.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun (%)**	**%**	**56.250.000**			
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	28.125.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH ORONG TELU
3	28	03	1.02	0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Jumlah data dan Informasi pemanfaaatan kawasan hutan yang tersedia (Dokumen)**	**Dokumen**	**10.000.000**			
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.03 0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 03 1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Luasan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)**	**Ha**	**2.979.375.000**			
3 28 03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	2.234.375.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	30.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 03 1.04 0012	Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	121.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 03 1.04 0013	Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	594.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 03 1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi (kasus)**	**Kasus**	**282.800.000**			
		Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan (lokasi)	**Lokasi**				
		Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi (%)	**%**				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.05 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	5.300.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 03 1.05 0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	275000 Ha	251.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 03 1.05 0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (llegal logging dan TSL)	10 Operasi	26.500.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (Rp)** **IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Rp)**	**IK-1 : 28 Milyar** **IK-2 : 155 Milyar**	**25.000.000**			
3 28 05 1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya (Kelompok)**	**Kelompok**	**25.000.000**			
		Luas Kawasan Hutan yang sudah diterbitkan Persetujuan Perhutanan Sosial (Ha)	**Ha**				
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	25.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 05 1.01 0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	Balai KPH Ropang			**3.708.995.899**			
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**3.708.058.399**			
3 28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**3.708.058.399**			
3 28 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP OPD**	**A NILAI**	**283.383.399**			
		Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp)	**4.173.726.718**				
		Nilai PAD dari pengelolaan hutan (Rp)	**Rp685.000.000**				
3 28 01 1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**4 Dokumen**	**17.482.000**			
3 28 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.398.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.119.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.573.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.392.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**18.527.000**			
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	8.321.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3	28	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.371.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.835.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah**	**100%**	**14.812.500**			
3	28	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.375.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.250.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.187.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah**	**100%**	**4.625.000**			
		Jumlah pelanggan yang melakukan pengujian di Laboratorium Lingkungan Hidup (Unit)	**Unit**				
		Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan (Dokumen)	**Dokumen**				
3 28 01 1.04 0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.312.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	2.312.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah**	**3 Dokumen**	**5.812.500**			

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
						Jumlah petugas Laboratorium Lingkungan Hidup yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	**Orang**				
3	28	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.125.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.312.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3	28	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1.375.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**35.159.375**			
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.312.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.087.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.800.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.771.875	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.893.750	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.218.750	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	14.575.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**91.542.524**			

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	312.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	937.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3	28	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	91.230.024	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**36.906.250**			
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.093.750	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	34.812.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**58.516.250**			
3 28 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	13.047.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	32.887.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.900.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.743.750	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.687.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.250.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase penanganan lahan kritis (%)**	3-4%	**3.399.675.000**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi (%)	100%				
		Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging (%)	100%				
		Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan (%)	**100%**				
		Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi (%)	**75%**				
		Persentase pemegang PBPHH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan (%)	**75%**				
3 28 03 1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan (Km)**	**Km**	**71.250.000**			
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	25.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH ROPANG
3 28 03 1.01 0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	46.250.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH ROPANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun (%)**	**%**	**56.250.000**			
3 28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH ROPANG
3 28 03 1.02 0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH ROPANG
3 28 03 1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Jumlah data dan Informasi pemanfaaatan kawasan hutan yang tersedia (Dokumen)**	**Dokumen**	**10.000.000**			
3 28 03 1.03 0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	5.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH ROPANG
3 28 03 1.03 0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH ROPANG
3 28 03 1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Luasan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)**	**Ha**	**2.979.375.000**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	2.234.375.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH ROPANG
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	30.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH ROPANG
3 28 03 1.04 0012	Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	121.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH ROPANG
3 28 03 1.04 0013	Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	594.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH ROPANG
3 28 03 1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi (kasus)**	**Kasus**	**282.800.000**			
		Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan (lokasi)	**Lokasi**				
		Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi (%)	**%**				
3 28 03 1.05 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	5.300.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH ROPANG

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	18262 Ha	251.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH ROPANG
3	28	03	1.05	0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (llegal logging dan TSL)	10 Operasi	26.500.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH ROPANG
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (Rp)** **IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Rp)**	**IK-1 : 28 Milyar** **IK-2 : 155 Milyar**	**25.000.000**			
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya (Kelompok)**	**Kelompok**	**25.000.000**			
						Luas Kawasan Hutan yang sudah diterbitkan Persetujuan Perhutanan Sosial (Ha)	**Ha**				
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	25.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH ROPANG
3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	0 Unit	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-	BALAI KPH ROPANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
						DANA REBOISASI (DR)	
	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi			**3.706.745.899**			
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**3.700.558.399**			
3 28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**3.700.558.399**			
3 28 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP OPD**	**A NILAI**	**276.883.399**			
		Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp)	**4.173.726.718**				
		Nilai PAD dari pengelolaan hutan (Rp)	**Rp685.000.000**				
3 28 01 1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**4 Dokumen**	**17.482.000**			
3 28 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.398.000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.119.000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.573.000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3	28	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.392.000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**18.527.000**			
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	8.321.000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3	28	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.371.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.835.000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah**	**100%**	**8.625.000**			
3	28	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.375.000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.250.000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3	28	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.187.500	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3	**28**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah**	**100%**	**4.625.000**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah pelanggan yang melakukan pengujian di Laboratorium Lingkungan Hidup (Unit)	**Unit**				
		Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan (Dokumen)	**Dokumen**				
3 28 01 1.04 0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.312.500	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	2.312.500	Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah**	**3 Dokumen**	**5.812.500**			
		Jumlah petugas Laboratorium Lingkungan Hidup yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	**Orang**				
3 28 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.125.000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.312.500	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3	28	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1.375.000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**35.159.375**			
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.312.500	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.087.500	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.800.000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.771.875	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.893.750	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.218.750	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	14.575.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3	**28**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**91.230.024**			
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3	28	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	91.230.024	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**36.906.250**			
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.093.750	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	34.812.500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**58.516.250**			
3	28	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	13.047.500	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	32.887.500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.900.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.743.750	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.687.500	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.250.000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase penanganan lahan kritis (%)**	3-4%	**3.398.675.000**			
		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi (%)	100%				
		Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging (%)	100%				
		Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan (%)	**100%**				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi (%)	**75%**				
		Persentase pemegang PBPHH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan (%)	**75%**				
3 28 03 1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan (Km)**	**Km**	**71.250.000**			
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	25.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 03 1.01 0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	46.250.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 03 1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun (%)**	**%**	**56.250.000**			
3 28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	03	1.02	0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Jumlah data dan Informasi pemanfaaatan kawasan hutan yang tersedia (Dokumen)**	**Dokumen**	**10.000.000**			
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	5.000.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Luasan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)**	**Ha**	**2.979.375.000**			
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	2.234.375.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	30.000.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3	28	03	1.04	0012	Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	121.000.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3	28	03	1.04	0013	Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	594.000.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi (kasus)**	**Kasus**	**281.800.000**			
						Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan (lokasi)	**Lokasi**				
						Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi (%)	**%**				
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	5.300.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.05 0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	275000 Ha	250.000.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 03 1.05 0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	10 Operasi	26.500.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (Rp) IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Rp)**	**IK-1 : 28 Milyar IK-2 : 155 Milyar**	**25.000.000**			
3 28 05 1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya (Kelompok)**	**Kelompok**	**25.000.000**			
		Luas Kawasan Hutan yang sudah diterbitkan Persetujuan Perhutanan Sosial (Ha)	**Ha**				
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	25.000.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 05 1.01 0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas			**3.737.495.899**			
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**3.737.495.899**			
3 28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**3.737.495.899**			
3 28 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP OPD**	**A NILAI**	**284.320.899**			
		Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp)	**4.173.726.718**				
		Nilai PAD dari pengelolaan hutan (Rp)	**Rp685.000.000**				
3 28 01 1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**4 Dokumen**	**17.482.000**			
3 28 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.398.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.119.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.573.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.392.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**18.527.000**			
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	8.321.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3	28	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.371.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.835.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah**	**100%**	**14.812.500**			
3	28	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.375.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.187.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 01 1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah**	**100%**	**4.625.000**			
		Jumlah pelanggan yang melakukan pengujian di Laboratorium Lingkungan Hidup (Unit)	**Unit**				
		Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan (Dokumen)	**Dokumen**				
3 28 01 1.04 0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.312.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah**	**3 Dokumen**	**5.812.500**			

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
						Jumlah petugas Laboratorium Lingkungan Hidup yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	**Orang**				
3	28	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.125.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3	28	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1.375.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**35.159.375**			
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.087.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.771.875	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.893.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3	28	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.218.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	14.575.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3	**28**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**92.480.024**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	937.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 01 1.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	91.230.024	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**36.906.250**			
3 28 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.093.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	34.812.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**58.516.250**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	13.047.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	32.887.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.900.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.743.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.687.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase penanganan lahan kritis (%)**	3-4%	**3.428.175.000**			
		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi (%)	100%				
		Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging (%)	100%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan (%)	**100%**				
		Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi (%)	**75%**				
		Persentase pemegang PBPHH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan (%)	**75%**				
3 28 03 1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan (Km)**	**Km**	**71.250.000**			
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	25.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 03 1.01 0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	46.250.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 03 1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun (%)**	**%**	**56.250.000**			
3 28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	03	1.02	0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Jumlah data dan Informasi pemanfaaatan kawasan hutan yang tersedia (Dokumen)**	**Dokumen**	**10.000.000**			
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	5.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Luasan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)**	**Ha**	**2.979.375.000**			
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	259 Ha	2.234.375.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	30.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3	28	03	1.04	0012	Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	121.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	03	1.04	0013	Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	594.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi (kasus)**	**Kasus**	**311.300.000**			
						Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan (lokasi)	**Lokasi**				
						Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi (%)	**%**				
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	5.300.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 Laporan	29.500.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	13044 Ha	250.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3	28	03	1.05	0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	10 Operasi	26.500.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (Rp)** **IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Rp)**	**IK-1 : 28 Milyar** **IK-2 : 155 Milyar**	**25.000.000**			
3 28 05 1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya (Kelompok)**	**Kelompok**	**25.000.000**			
		Luas Kawasan Hutan yang sudah diterbitkan Persetujuan Perhutanan Sosial (Ha)	**Ha**				
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	25.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 05 1.01 0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
	Balai KPH Brang Beh			**3.692.507.644**			
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**3.692.507.644**			
3 28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**3.692.507.644**			
3 28 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP OPD**	**A NILAI**	**284.332.644**			
		Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp)	**4.173.726.718**				

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
						Nilai PAD dari pengelolaan hutan (Rp)	**Rp685.000.000**				
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**4 Dokumen**	**17.493.745**			
3	28	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.971.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3	28	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.522.745	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**18.527.000**			
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	8.321.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3	28	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.371.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.835.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah**	**100%**	**14.812.500**			
3 28 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.375.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.250.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.187.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 01 1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah**	**100%**	**4.625.000**			
		Jumlah pelanggan yang melakukan pengujian di Laboratorium Lingkungan Hidup (Unit)	**Unit**				
		Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan (Dokumen)	**Dokumen**				
3 28 01 1.04 0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.312.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	2.312.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah**	**3 Dokumen**	**5.812.500**			
		Jumlah petugas Laboratorium Lingkungan Hidup yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	**Orang**				
3 28 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.125.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.312.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1.375.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**35.159.375**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.312.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.087.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.800.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.771.875	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.893.750	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.218.750	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	14.575.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3	**28**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**92.480.024**			
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	312.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	937.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3	28	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	91.230.024	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**36.906.250**			

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.093.750	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	34.812.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**58.516.250**			
3	28	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	13.047.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	32.887.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.900.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3	28	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.743.750	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.687.500	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.250.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase penanganan lahan kritis (%)**	**3-4%**	**3.383.175.000**			
		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi (%)	**100%**				
		Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging (%)	**100%**				
		Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan (%)	**100%**				
		Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi (%)	**75%**				
		Persentase pemegang PBPHH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan (%)	**75%**				
3 28 03 1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan (Km)**	**Km**	**71.250.000**			

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	25.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	46.250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun (%)**	**%**	**56.250.000**			
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	28.125.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3	28	03	1.02	0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Jumlah data dan Informasi pemanfaaatan kawasan hutan yang tersedia (Dokumen)**	**Dokumen**	**10.000.000**			
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	5.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.03 0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 03 1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Luasan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)**	**Ha**	**2.934.375.000**			
3 28 03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	2.234.375.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	30.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 03 1.04 0012	Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	121.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 03 1.04 0013	Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	549.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 03 1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi (kasus)**	**Kasus**	**311.300.000**			
		Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan (lokasi)	**Lokasi**				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi (%)	**%**				
3 28 03 1.05 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	5.300.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 03 1.05 0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 Laporan	29.500.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 03 1.05 0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	275000 Ha	250.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 03 1.05 0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (llegal logging dan TSL)	10 Operasi	26.500.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (Rp) IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Rp)**	**IK-1 : 28 Milyar IK-2 : 155 Milyar**	**25.000.000**			
3 28 05 1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya (Kelompok)**	**Kelompok**	**25.000.000**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Luas Kawasan Hutan yang sudah diterbitkan Persetujuan Perhutanan Sosial (Ha)	**Ha**				
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	25.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 05 1.01 0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
	Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada			**3.708.995.899**			
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**3.708.995.899**			
3 28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**3.708.995.899**			
3 28 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP OPD**	**A NILAI**	**284.320.899**			
		Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp)	**4.173.726.718**				
		Nilai PAD dari pengelolaan hutan (Rp)	**Rp685.000.000**				
3 28 01 1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**4 Dokumen**	**17.482.000**			
3 28 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.398.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.119.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA
3	28	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.573.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA
3	28	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.392.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**18.527.000**			
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	8.321.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA
3	28	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.371.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.835.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah**	**100%**	**14.812.500**			
3	28	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.375.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA
3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.250.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA
3	28	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.187.500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA
3	**28**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah**	**100%**	**4.625.000**			
						Jumlah pelanggan yang melakukan pengujian di Laboratorium Lingkungan Hidup (Unit)	**Unit**				
						Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan (Dokumen)	**Dokumen**				
3	28	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.312.500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	2.312.500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah**	**3 Dokumen**	**5.812.500**			
						Jumlah petugas Laboratorium Lingkungan Hidup yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	**Orang**				
3	28	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.125.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA
3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.312.500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA
3	28	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1.375.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**35.159.375**			
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.312.500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.087.500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA
3 28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA
3 28 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.771.875	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA
3 28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.893.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA
3 28 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA
3 28 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.218.750	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA
3 28 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	14.575.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA
3 28 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**92.480.024**			

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	312.500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 0 Unit	937.500	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA
3	28	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	91.230.024	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**36.906.250**			
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.093.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	34.812.500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**58.516.250**			
3 28 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	13.047.500	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA
3 28 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	32.887.500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA
3 28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.900.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA
3 28 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.743.750	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA
3 28 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.687.500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA
3 28 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA
3 28 03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase penanganan lahan kritis (%)**	3-4%	**3.399.675.000**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi (%)	100%				
		Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging (%)	100%				
		Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan (%)	**100%**				
		Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi (%)	**75%**				
		Persentase pemegang PBPHH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan (%)	**75%**				
3 28 03 1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan (Km)**	**Km**	**71.250.000**			
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	25.000.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA
3 28 03 1.01 0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	46.250.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun (%)**	**%**	**56.250.000**			
3 28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA
3 28 03 1.02 0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA
3 28 03 1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Jumlah data dan Informasi pemanfaaatan kawasan hutan yang tersedia (Dokumen)**	**Dokumen**	**10.000.000**			
3 28 03 1.03 0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	5.000.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA
3 28 03 1.03 0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA
3 28 03 1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Luasan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)**	**Ha**	**2.979.375.000**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	2.234.375.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	30.000.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA
3 28 03 1.04 0012	Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	121.000.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA
3 28 03 1.04 0013	Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	594.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA
3 28 03 1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi (kasus)**	**Kasus**	**282.800.000**			
		Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan (lokasi)	**Lokasi**				
		Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi (%)	**%**				
3 28 03 1.05 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	5.300.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.05 0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	15131 Ha	251.000.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA
3 28 03 1.05 0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (llegal logging dan TSL)	10 Operasi	26.500.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA
3 28 05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (Rp)** **IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Rp)**	**IK-1 : 28 Milyar** **IK-2 : 155 Milyar**	**25.000.000**			
3 28 05 1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya (Kelompok)**	**Kelompok**	**25.000.000**			
		Luas Kawasan Hutan yang sudah diterbitkan Persetujuan Perhutanan Sosial (Ha)	**Ha**				
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	25.000.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA
3 28 05 1.01 0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	0 Unit	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA
	Balai KPH Pelangan Tastura			**3.707.995.899**			
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**3.707.995.899**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**3.707.995.899**			
3 28 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP OPD**	**A NILAI**	**284.320.899**			
		Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp)	**4.173.726.718**				
		Nilai PAD dari pengelolaan hutan (Rp)	**Rp685.000.000**				
3 28 01 1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**4 Dokumen**	**17.482.000**			
3 28 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.398.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.119.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.573.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.392.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**18.527.000**			
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	8.321.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3	28	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.371.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.835.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah**	**100%**	**14.812.500**			
3	28	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.375.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.187.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 01 1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah**	**100%**	**4.625.000**			
		Jumlah pelanggan yang melakukan pengujian di Laboratorium Lingkungan Hidup (Unit)	**Unit**				
		Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan (Dokumen)	**Dokumen**				
3 28 01 1.04 0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah**	**3 Dokumen**	**5.812.500**			
		Jumlah petugas Laboratorium Lingkungan Hidup yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	**Orang**				

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.125.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3	28	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1.375.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**35.159.375**			
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.087.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.771.875	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.893.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3	28	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.218.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	14.575.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3	**28**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**92.480.024**			
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	937.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3	28	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	91.230.024	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**36.906.250**			
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.093.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	34.812.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**58.516.250**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	13.047.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	32.887.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.900.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.743.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.687.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase penanganan lahan kritis (%)**	3-4%	**3.398.675.000**			
		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi (%)	100%				
		Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging (%)	100%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan (%)	**100%**				
		Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi (%)	**75%**				
		Persentase pemegang PBPHH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan (%)	**75%**				
3 28 03 1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan (Km)**	**Km**	**71.250.000**			
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	25.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 03 1.01 0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	46.250.000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 03 1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun (%)**	**%**	**56.250.000**			
3 28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	28.125.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.02 0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 03 1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Jumlah data dan Informasi pemanfaaatan kawasan hutan yang tersedia (Dokumen)**	**Dokumen**	**10.000.000**			
3 28 03 1.03 0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 03 1.03 0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 03 1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Luasan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)**	**Ha**	**2.979.375.000**			
3 28 03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	2.234.375.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	30.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.04 0012	Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	121.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 03 1.04 0013	Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	594.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 03 1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi (kasus)**	**Kasus**	**281.800.000**			
		Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan (lokasi)	**Lokasi**				
		Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi (%)	**%**				
3 28 03 1.05 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	5.300.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 03 1.05 0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	275000 Ha	250.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 03 1.05 0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	10 Operasi	26.500.000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**IK-1 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (Rp)** **IK-2 : NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Rp)**	**IK-1 : 28 Milyar** **IK-2 : 155 Milyar**	**25.000.000**			
3 28 05 1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya (Kelompok)**	**Kelompok**	**25.000.000**			
		Luas Kawasan Hutan yang sudah diterbitkan Persetujuan Perhutanan Sosial (Ha)	**Ha**				
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	25.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 05 1.01 0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB			**9.648.063.468**			
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**9.648.063.468**			
2 11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**			**9.648.063.468**			
2 11 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP OPD**	**A NILAI**	**6.048.063.468**			
		Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp)	**4.173.726.718**				

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
						Nilai PAD dari pengelolaan hutan (Rp)	**Rp685.000.000**				
2	**11**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**4 Dokumen**	**2.500.000**			
2	11	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2	11	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2	**11**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**7.000.000**			
2	11	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	11	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	1.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah**	**100%**	**5.000.000**			
2	11	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2	11	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2	**11**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah**	**100%**	**10.000.000**			
						Jumlah pelanggan yang melakukan pengujian di Laboratorium Lingkungan Hidup (Unit)	**Unit**				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan (Dokumen)	**Dokumen**				
2 11 01 1.04 0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2 11 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2 11 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah**	**3 Dokumen**	**2.500.000**			
		Jumlah petugas Laboratorium Lingkungan Hidup yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	**15 Orang**				
2 11 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2 11 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	11	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	1.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**35.000.000**			
2	11	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	4.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2	11	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2	11	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2	11	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16 Dokumen	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	450 Laporan	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2	11	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	10.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2	**11**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**10.000.000**			
2	11	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	11	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**647.000.000**			
2	11	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2500 Laporan	2.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	645.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**81.610.000**			
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	50 Unit	36.610.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	11	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2	11	01	1.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	4 Unit	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2	11	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	107 Unit	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2	**11**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan**	1 Unit Kerja	**5.247.453.468**			
2	11	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	5.247.453.468	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase sampah yang ditangani di TPA (%)**	**70%**	**3.600.000.000**			
						Prosentase Bank Sampah, TPS3R dan BSF yang telah beroperasi (%)	**75%**				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pemilahan sampah area publik (%)	31-60%				
		Pemilahan sampah rumah tangga (%) (7)/ Persentase desa/kelurahan yang menerapkan pemihan sampah dari rumah tangga (%)	31-50%				
		Pemilahan sampah perkantoran (%)	70%				
		Persentase usaha/industri persampahan yang beroperasi (%)	75%				
2 11 11 1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase sampah yang ditangani di TPA (%)	70%	3.600.000.000			
		Presentase pengelola fasiltas pengolahan sampah metode 3R dan BSF yang telah mengikuti pelatihan (%)	%				
		Presentase pengelola fasiltas pengolahan sampah metode 3R dan BSF yang telah mengikuti peningkatan kapasitas kelembagaan (%)	%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah sampah yang didaur ulang (ton)	**Ton**				
		Jumlah desa/kelurahan yang menerapkan pemihan sampah dari sumbernya (desa/kelurahan)	**Desa/Kelurahan**				
		Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan pemilahan sampah dari areal publik (Kabupaten/kota)	**Kabupaten/Kota**				
		Jumlah perkantoran lingkup pemerintah provinsi yang menerapkan eco-office (kantor)	**Kantor**				
		Jumlah sampah yang dikelola (Ton)	**Ton**				
		Jumlah limbah B3 yang diolah (Ton)	**Ton**				
2 11 11 1.01 0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	1 Unit	3.500.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2 11 11 1.01 0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	1 Dokumen	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 11 11 1.01 0006	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	50 Ton	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2 11 11 1.01 0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
J U M L A H				**162.532.262.419**			

Selain mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dan kehutanan, program/kegiatan/sub kegiatan yang terakomodir dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2025 juga mendukung pencapaian salah satu diantara tujuh Program Strategis Daerah (Major Project) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yaitu terkait Pembangunan Lingkungan dimana program strategis ini diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan yang lestari dan asri serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Program prioritas ini dilaksanakan melalui :

1. Implementasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI)
2. Penurunan Stunting dan Kemiskinan

Dalam rangka mendukung capaian program prioritas daerah tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB melaksanakan program dan kegiatan dalam bentuk dukungan penganggaran yang rencananya dilaksanakan pada tahun 2025 seperti tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Pemetaan Pendanaan Program Unggulan Dinas LHK Provinsi NTB tahun 2024

No	Program Prioritas Daerah	Kegiatan		Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025	
						target	Rp
1	**Implementasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI)**	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	50.000.000
			2	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	16 Laporan	50.000.000
			3	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	800 Ha	530.000.000
			4	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	3250 Ha	35.850.000.000
		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	10 Operasi	679.146.500
			2	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	275000 Ha	3.991.000.000
			3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	199.700.000
			4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 Laporan	169.500.000
		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	100 Orang	50.000.000

No	Program Prioritas Daerah	Kegiatan		Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025	
						target	Rp
		dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 Lembaga	50.000.000
			3	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	1 Dokumen	100.000.000
			4	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	1 Dokumen	50.000.000
		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	1 Dokumen	50.000.000
			2	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	50 Ton	50.000.000
			3	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	6 Dokumen	489.000.000
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	65.000.000

No	Program Prioritas Daerah	Kegiatan		Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025	
						target	Rp
Sub Total (1)							**42.423.346.500**
2	**Penurunan Stunting dan Kemiskinan**	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	80 Kelompok	412.555.000
			2	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1.000 Ha	164.700.000
		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	1	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	2 Desa	20.000.000
		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	1	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	16 Orang	40.000.000
Sub Total (2)							**637.255.000**
GRAND TOTAL (1 s.d 2)							**43.060.601.500**

BAB 5 PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Rencana Kerja (Renja) juga berfungsi untuk meninjau kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2024-2026. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB sebagai upaya mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB.

Pelaksaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Provinsi NTB maupun di Kabupaten/Kota se-NTB. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini serta dapat mejadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Pembangunan di sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi NTB.

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RENCANA KERJA
2025



DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
2024

diskominfotik.ntbprov.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terbentuk tahun 2017 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Derah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 50) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Renja tahun 2025 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah beserta sumberdaya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif dan sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 merupakan acuan perencanaan Perangkat Daerah selama satu tahun dan implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Renja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan, sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk mengevaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Pada akhirnya kami sangat menyadari bahwa Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh sebab itu koreksi dan saran sangat kami harapkan dari seluruh komponen Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik maupun pihak-pihak yang terkait untuk memberi masukan dan perbaikan terhadap Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat di tahun yang akan datang.

Mataram, Juni 2024

KEPALA DINAS

Dr. Najamuddin Amy, S.Sos.,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19750112 199603 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 6
1.3. Maksud dan Tujuan 9
1.4. Sistematika Penulisan 9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ... 11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu 11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 20
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 26

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 28
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 28
3.2. Program dan Kegiatan Proritas 32

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 57
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB 57

BAB V PENUTUP 69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022 ..... **12**

Tabel 2.2. Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja OPD Tahun 2019-2021 ..... **19**

Tabel 2.3. Capaian Program Unggulan Dinas Kominfotik 2022 ..... **19**

Tabel 2.4. Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2024..... **22**

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB..... **30**

Tabel 3. 2. Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB Tahun 2024-2026..... **33**

Tabel 4. 1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB Tahun 2024 ..... **43**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA perangkat daerah) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun yang memuat program, kegiatan, kelompok sasaran, yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Proses penyusunan RENJA perangkat daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Mengacu pada rancangan awal RKPD, menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam RENJA perangkat daerah sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.
2. Mengacu pada rancangan awal RENSTRA perangkat daerah, menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun kedalam rancangan RENJA perangkat daerah, selaras dengan RENSTRA perangkat daerah.
3. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, menjadi acuan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju dalam rancangan RENJA perangkat daerah dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu perangkat daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membantu kepala daerah dalam Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik serta Urusan Persandian dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Provinsi Nusa Tenggara Barat Maju Melaju.

Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB, dalam capaiannya merujuk kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Hal tersebut sebagai upaya dalam bentuk aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik dengan berbasiskan kepada Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Nusa Tenggara Barat.

Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Salah satu solusi yang diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan sistem informasi *on-line* antar instansi pemerintah baik pusat dan daerah untuk mengakses seluruh data dan informasi terutama yang

berhubungan dengan pelayanan publik. Dalam sektor pemerintah, perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi mendorong aparatur pemerintah untuk mengantisipasi paradigma baru dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintah yang baik (*good governance*).

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan *e-goverment* membuat masyarakat semakin mudah untuk mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dirancangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. *E-goverment* juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.

Konsep *good governance*, yang menitikberatkan pada bagaimana membangun hubungan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta sebagai stakeholder yang berperan penting dalam proses pembangunan daerah dan pengelolaan sektor publik. Melalui konsep *good governance* ini pembangunan daerah dan pengelolaan sektor publik dilakukan dengan berbasis pada partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan kerangka pikir diatas, penyusunan RENJA dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan-kegiatan dalam satu program, maupun antar program yang ditetapkan, serta memperhatikan keselarasan program Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait, menghimpun usulan dari Kabupaten/Kota di dalam proses perencanaan pembangunan Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4603);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
28. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman penyusunan perencanaan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah tahun 2025.
2. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.
3. Review pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023.

Sedangkan Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

1. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 dan Rencana Kerja Tahun 2025 dapat terakomodir seluruhnya didalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025.
2. Untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusan Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
3. Agar tercapai konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahunnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan RENJA perangkat daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 129 Halaman 64 dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan. Latar belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang RENJA perangkat daerah, proses penyusunan RENJA perangkat daerah, keterkaitan antara RENJA perangkat daerah dengan dokumen RENSTRA perangkat daerah. Landasan hukum memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah;
2. Bab II Evaluasi Pelaksanaan RENJA dan Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun lalu, memuat evaluasi pelaksanaan RENJA perangkat daerah tahun lalu, analisa kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Pada evaluasi pelaksanaan RENJA perangkat daerah tahun berjalan memuat kajian terhadap evaluasi pelaksanaan RENJA perangkat daerah tahun berjalan dan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan. Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja utama yang sudah ditentukan. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja mengenai koordinasi dan sinergi program dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan, serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah;

3. Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran RENJA perangkat daerah, dan program dan kegiatan. Telahaan terhadap kebijakan nasional dan provinsi yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja RENSTRA perangkat daerah. Sedangkan program dan kegiatan berisikan penjelasan mengenai uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan prioritas, baik jenis program/kegiatan dan pagu indikatifnya;
4. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
5. Bab V Penutup.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2023).

Berdasarkan Perda No. 11 tahun 2016 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Penggabungan dari tiga urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan bidang Kominfo, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian. Dimana masing masing urusan pemerintahan mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari 4 program prioritas dengan 5 kegiatan dan 1 program pendukung/rutin dengan 8 kegiatan. Program dan kegiatan pada Dinas Kominfotik dibagi menjadi 3 (tiga) urusan yaitu:

1. Urusan pemerintah bidang komunikasi informatika dengan anggaran sebesar Rp. 8.595.453.940,- realisasi anggaran Rp. 8.528.422.838,- dan realisasi fisik sebesar 100%,
2. Urusan pemerintah bidang persandian dengan anggaran sebesar Rp. 177.001.000, realisasi anggaran Rp. 175.659.897,- dan realisasi fisik sebesar 100%,
3. Urusan pemerintah bidang statistik dengan anggaran sebesar Rp. 225.000.000 ,- realisasi anggaran Rp. 224.016.654,- dan realisasi fisik sebesar 100%.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan selengkapnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023

Pengukuran Kinerja	Uraian Variabel yang di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023					
				Target Kinerja	Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Pagu	Realisasi	% Realisasi pagu
Capaian Renja OPD	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai LKjIP (SAKIP) OPD**	**Nilai**	**A**	**A**	**82.66**			
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (%)**	**%**	**80**	**100**	**103,33**	**30.020.000**	**29.265.000**	**97.49**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100,00	7.650.000	7.045.000	92.09
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Dokumen	1	1	100,00	1.000.000	1.000.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	1	1	100,00	460.000	460.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Dokumen	1	1	100,00	5.900.000	5.900.000	100
	Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen	1	1	100,00	9.110.000	8.960.000	98.35
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Perankgat Daerah	Dokumen	7	7	100,00	5.900.000	5.900.000	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Dinas (%)	%	100%	100%	100,00	6.145.600.415	5.709.608.095	92.87
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan Aparatur yang terbayarkan	Aparatur	75	67	89.33	6.110.874.115	5.675.221.395	92.87

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Pengelola Administrasi Keuangan	Orang	6	4	66.67	29.999.400	29.999.200	100
Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100.00	4.726.900	4.387.500	92.82
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Barang Milik Daerah (Jenis)	Jenis	1	1	100.00	8.350.000	8.344.000	99,72
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Aset Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100.00	8.350.000	8.344.000	99,72
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pemahaman Pegwai (%)	%	100%	0	0	-	-	#DIV/0!
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	5	0	0	-	-	#DIV/0!
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Jenis Administrasi Pelayanan Umum (%)	%	100%	100	100.00	285.251.300	273.418.096	95.85
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/penerangan yang tersedia	Jenis	15	15	100.00	8.514.500	8.462.100	99.38
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis	79	79	100.00	47.674.800	46.934.550	98.45
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik yang tersedia	Jenis	3	3	100.00	13.000.000	12.965.000	99.73
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Jenis	9	9	100.00	8.342.000	7.373.750	88.39
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia	Eksemplar	5700	5700	100.00	13.800.000	4.165.00	30.18
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi	Orang	60	95	158.33	22.295.000	22.292.440	99.99

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Orang	175	175	100	171.625.000	171.225.256	99.77
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah (%)	%	100%	100%	100,00	147.016.000	146.420.000	99.59
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang diadakan	Unit	1	0	0	0	0	0.00
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Unit	7	7	100.00	22.500.000	22.250.000	98.89
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau BangunanLainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbeli	Unit	9	0	0,00	100.556.000	100.295.000	99.74
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung yang terbeli	Unit	4	0	0,00	23.960.000	23.875.000	99.65
Kegiatan Penyediaan Jasa dan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jenis Jasa Pelayanan (%)	%	100%	100.00	100,00	3.021.876.700	2.953.618.312	97.74
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	Surat	900	1004	111.56	1.050.000	1.050.000	100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening	15	15	100.00	389.781.000	353.092.063	90.59
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga PTT dan Kontrak	Orang	36	83	230.55	2.631.045.700	2.599.476.249	98.80
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jenis Pemeliharaan Milik Daerah	%	100%	0.0	0	680.632.000	673.328.085	98.93
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Unit	36	100.00	46	226.150.000	221.047.987	97.74

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	1	100.000	18.000.000	17.890.000	99.39
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatandan Mesin Lainnya yang terpelihara	Unit	106	106	100.00	7.450.000	7.260.000	97.45
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Unit	27	20	74.07	14.030.000	13.899.000	99.07
Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranan dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Unit	3			415.002.000	413.231.098	99.57
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)**	**%**	**80**	**100**	**125.00**	**7.695.133.940**	**7.658.707.212**	**99.53**
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	**Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik (%)**	**%**	**85**	**82.95**	**97.59**	**7.695.133.940**	**7.658.707.212**	**99.53**
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Opini dan Aspirasi	Dokumen	2	2	100.00	246.937.900	245.814.924	99.55
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Informasi yang diproduksi dan disebar melalui media Publik	Informasi	806	2573	319.23	3.082.039.000	3.075.560.485	99.79
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Perangkat Daerah	Informasi	690	1749	253.48	83.057.000	74.057.000	89.16
Layanan Hubungan Manusia	Jumlah Lembaga dan Pers yang Terlibat dalam Penyebarluasan Informasi	Lembaga	5	21	420.00	22.000.000	21.500.000	97.73

Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Aparatur yang Terlatih dan terfasilitasi	Orang	0	0	0,00	0	0	0
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Sengketa Informasi yang Terselesaikan	Kasus	2	9	450.00	1.343.486.640	1.324.260.803	98.57
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kelompok / Komunitas yang diberdayakan dalam Penyebarluasan Informasi	Komunitas	15	0	0	2.830.114.000	2.830.114.000	100.00
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	Unit	10	3	30.00	87.500.000	87.400.000	99.89
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	**Persentase Layanan Berbasis TIK (%)**	**%**	**65**	**69.81**	**107.40**	**900.320.000**	**869.715.626**	**96.60**
Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	**Kualifikasi/Level Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi (Kualifikasi/Level)**		**Terintegrasi**	**Terintegrasi dan Terukur**	**100.00**	**900.320.000**	**869.715.626**	**96.60**
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan e-government	Dokumen	2	2	100,00	155.720.000	125.672.126	80.70
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Pusat Data	OPD	46	46	100,00	550.000.000	549.480.000	99.91
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Simpul Jaringan Perangkat Daerah yang Terkoneksi	OPD	30	18	60.00	129.600.000	129.600.000	100
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi TIK yang dikembangkan dan dimanfaatkan	Aplikasi	3	2	66.67	65.000.000	64.963.500	99.94

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi (%)**	**%**	**30**	**100.00**	**333.33**	**225.000.000**	**193.916.654**	**86.19**
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	**Persentase Data yang Tervalidasi**	**%**	**65**	**100.00**	**153.85**	**225.000.000**	**193.916.654**	**86.19**
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Dieminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Jenis Data yang Tersedia	Jenis	550	1066	193.82	60.514.800	60.474.086	99.56
Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM Statistik yang Meningkatkan Pemahaman	Orang	55	55	100.00	21.785.800	21.153.470	97.10
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata yang terbangun	Jenis	20	20	100.00	30.343.600	30.151.819	99.37
Peningkatan Kapastitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	OPD	46	49	106.52	20.858.600	20.818.557	99.81
Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Rekomendasi Statistik	OPD	7	49	700,00	91.497.200	91.418.722	99.91
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah (%)**	**%**	**50**	**75**	**150.00**	**177.001.000**	**175.659.897**	**99.24**
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Daerah Provinsi	**Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi (%)**	**%**	**50**	**100**	**200.00**	**87.421.000**	**86.630.509**	**99.10**

	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi dan Hasil Koordinasi Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi	Dokumen	1	0	0.00	56.000.000	55.996.409	99,99
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah SDM Pengelola Keamanan Siber	Orang	6	10	166.67	8.616.600	8.019.100	93.04
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah PengamananInformasi Perangkat Daerah	Insiden	14	13	92.86	2.302.400	2.250.000	97.72
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	OPD	46	46	100,00	20.500.000	20.365.000	99.34
	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase Pemanfaatan Komunikais Sandi Pemerintah Daerah (%)	%	100	149	149.00	89.580.000	89.029.388	99,39
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Komunikasi Sandi	OPD	46	38	82.61	89.580.000	89.029.388	99,39

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, 2023

2.1.2. Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Tabel 2. 2. Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja OPD Tahun 2022-2023

No	Indikator	Satuan	Kondisi 2019	2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir 2023
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	*(2)*	*(3)*		*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
	IKD							
1	Indeks Pelayanan Publik	Point	3.63	4.53	3.71	4.55	3.97 (B)	4.55
	IKK							
1	Kualifikasi Layanan Perangkat Daerah	Kualifikasi	Informatif	Transaksi	Transaksi	Kolaborasi	Kolaborasi	Kolaborasi
2	Persentase Perangkat Daerah yang Informatif	%	5	65	68.20	75	55.56	75
3	Persentase Data Prioritas Berkualitas Pada Perangkat Daerah	%	10	50	87.30	65	92.07	65
4	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	Level	I+	II+	II	II+ (2.50)	III (2.98)	II+ (2.50)

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, 2023

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai instansi pemerintah yang mengurusi 3 (tiga) urusan pemerintahan, yang melakukan tugas utamanya dalam pelayanan informasi kepada masyarakat, dengan memastikan ketersediaan informasi mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh OPD Pemerintah Provinsi NTB sehingga dapat memberikan pemahaman dan manfaat bagi masyarakat. Indikator kinerja pelayanan tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Program Strategis dan Unggulan Daerah Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah. Program unggulan pada Dinas Kominfotik dilekatkan pada masing-masing program prioritas dengan indicator seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2. 3. Capaian Program Unggulan Dinas Kominfotik 2023

No	PROGRAM UNGGULAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2019)	TARGET DAN CAPAIAN KINERJA				KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2023
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	NTB Satu Data	Cakupan data yang terintegrasi	%	95.49	25	94.06	30	100	30
2	Kampung Digital	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik	%	40	70	100	80	100	80
3	SPBE	Indeks SPBE	%	3.30	3.0	3.2	3.2	3.40	3.2
4	NTB Care	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	%	I+	II+	II+	II+	II+	II+

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan gambaran umum pada bab sebelumnya dan sesuai Pasal 258 Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan; pendapatan masyarakat; kesempatan kerja; lapangan berusaha; akses dan kualitas pelayanan publik; dan daya saing daerah. Secara keseluruhan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan UU tersebut telah memperlihatkan hasil yang cukup menggembirakan hingga tahun 2020. Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap kerberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Provinsi NTB. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan hasil review terhadap gambaran pelayanan Perangkat Daerah; sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan dirumuskan isu strategis dalam pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB. Analisis isu-isu strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB untuk perencanaan jangka menengah daerah kurun 2019-2023 diidentifikasi melalui serangkaian proses. Dimulai dari identifikasi permasalahan menurut bidang, analisis lingkungan strategis, kemudian diperoleh daftar calon isu strategis. Selanjutnya dilakukan penilaian, dihasilkan daftar isu strategis sebagai berikut :

Permasalahan Utama :

a. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam penyelenggaraan pemerintahan belum optimal dan terintegrasi
b. Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah belum optimal.
c. Penyebaran hoax yang masif dan perilaku pengguna internet yang tidak sehat.

Adapun Isu Strategis Bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian sebagai berikut :

1. Satu Data untuk pembangunan Nusa Tenggara Barat.
2. Belum optimalnya pemutakhiran data dan informasi dalam pembangunan.
3. Tuntutan publik akan keterbukaan informasi dan transparansi.
4. Sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi belum merata.
5. Inisiatif Nusa Tenggara Barat menuju Provinsi Cerdas.
6. Penerapan *Good Governance* yang didukung teknologi informasi belum optimal.
7. Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.
8. Layanan pemerintah berbasis TIK atau layanan Online.
9. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi.
10. Peran TIK untuk menunjang era industri 4.0.
11. Kesadaran aparatur Pemerintah Daerah terhadap keamanan informasi masih kurang.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 untuk arah kebijakan yang kaitannya terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun Anggaran 2025:

Tabel 2. 4. Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2024

No	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1							4.55	Rp 20.224.199.141	Provinsi NTB
			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik			**Persentase Badan Publik yang Informatif**	**42.96%**	**6.751.406.299**	Provinsi NTB
				Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		**Persentase Perangkat Daerah yang Informatif**	**76.08%**	**6.751.406.299**	Provinsi NTB
					Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	2 Dokumen	246.937.000	
					Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	2.339.298.299	
					Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	83.057.000	
					Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	4 Layanan	12.000.000	
					Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikai Publik yang Meningkat Kapasitasnya	15 Orang	35.000.000	
					Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	1.350.000.000	

					Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendesiminasikan Informasi Program dan Kebijakan	2 Dokumen	2.600.114.000	
					Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendesiminasikan Informasi Program dan Kebijakan	1 Unit	85.000.000	
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika			**Kualifikasi Layanan Perangkat Daerah**	**Kolaborasi**	**1.044.768.209**	Provinsi NTB
				Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		**Kualifikasi Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	**Terdefinisi**	**1.044.768.209**	Provinsi NTB
					Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	1 dokumen	191.158.209	
					Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintah Daerah yang Dikelola	1 Unit	775.000.000	
					Penyelenggaraan Sisten Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	73.600.000	
					Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Unit	5.010.000	
				Urusan Statistik					

			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral			**Persentase Data Prioritas yang Berkualitas**	**40%**	**222.795.357**	Provinsi NTB
				Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi		**Cakupan Data Statistik Sektoral yang Tervalidasi**	**70%**	**222.795.357**	Provinsi NTB
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	62.910.357	
					Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	45 Orang	54.636.000	
					Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	51.093.000	
					Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	54.156..000	
				Urusan Persandian					
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi			**Indeks Keamanan Informasi**	**286 Skor**	**190.466.857**	Provinsi NTB

				Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		**Tingkat Maturitas Keamanan Siber**	**3.1 Skor**	**190.466.857**	Provinsi NTB
					Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	1 Dokumen	59.466.857	
					Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	64.198.000	
					Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	30.302.000	
					Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	25 Perangkat Daerah	36.500.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dari Hasil Penelaahan terhadap program kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, diperoleh beberapa usulan dari Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Barat untuk usulan Prioritas Pembangunan pada tahun Anggaran 2023 :

Usulan

1. Diskominfo Kota Bima
   - ✓ Agar Portal NTB Satu Data terintegrasi dengan portal Satu Data Kota Bima
2. Diskominfo Kabupaten Lombok Barat
   - ✓ Agar Satu Data Lombok Barat terintegrasi dengan Satu Data NTB
3. Diskominfo Kabupaten Sumbawa
   - ✓ Berharap agar provinsi melakukan pembinaan SPBE untuk Kabupaten Kota
   - ✓ Agar Kabupaten Sumbawa difasilitasi penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE)
4. Diskominfo Kabupaten Dompu
   - ✓ Agar difasilitasi dalam penyusunan regulasi SPBE dan Satu Data
   - ✓ Agar diberikan masukan terkait pusat data, dikarenakan kabupaten Dompu sedang membangun pusat data
5. Diskominfo Kabupaten Sumbawa Barat
   - ✓ Berharap adanya dukungan anggaran dari Kementrian Kominfo untuk daerah
   - ✓ Berharap adanya pembinaan SDM TIK khususnya tenaga *programmer* dan tenaga jaringan
6. Diskominfo Kabupaten Bima
   - ✓ Diharapkan adanya pemanfaatan aplikasi bersama anatara Provinsi dengan kabupaten/kota
7. Diskominfo Kota Mataram
   - ✓ Diharapkan adanya koordinasi jaringan intra pemerintah
   - ✓ Diharapkan adanya pembinaan untuk peningkatan nilai SPBE
8. Diskominfo Kabupaten Lombok Utara
   - ✓ Berharap adanya kolaborasi program antara Kominfo Kabupaten/Kota dengan Provinsi,khusunya pemanfaatan aplikasi bersama
   - ✓ Mohon bantuan untuk pembinaan pengembangan jaringan intra pemerintah
   - ✓ Agar Kominfo Provinsi memberikan pendampingan/bimbingan dalam pemanfaatan aplikasi lapor SP4N
9. Diskominfo Kabupaten Lombok Timur
   - ✓ Agar Kominfo Provinsi memberikan pendampingan/bimbingan terkait penyelenggaraan SPBE
   - ✓ Berharap adanya kolaborasi program antara Kominfo Kabupaten/Kota dengan Provinsi,khusunya pemanfaatan aplikasi bersama
   - ✓ Agar Kominfo Provinsi memberikan pembinaan terhadap Tenaga SDM TIK
10. Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah

- ✓ Diharapkan adanya integrasi antara Satu Data NTB dengan Satu Data Lombok Tengah
- ✓ Agar Kominfo Provinsi memberikan fasilitasi terkait penyusunan regulasi TTE dan SPBE
- ✓ Agar dapat berkoordinasi tentang daerah lemah sinyal (*Blankspot*)

Tanggapan

- ✓ Diskominfotik Provinsi NTB terbuka untuk pemanfaatan aplikasi bersama, tentunya dilakukan dengan prosedur atau SOP yang ada.
- ✓ Pengembangan aplikasi hendaknya dilakukan oleh lingkup internal pemerintah daerah

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Renja OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*. Dimana OPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dikaitkan dengan kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang di dalam RPJM Nasional Periode 4 (2020-2024) yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong serta memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi & pelayanan dasar melalui Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah; Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam Pembangunan; Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK; Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Berkenaan dengan hal tersebut, efektivitas dalam pelaksanaan segala jenis tugas dan fungsi dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat harus dilaksanakan dengan baik dan maksimal sesuai dengan Tujuan dan Sasaran dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB.

Penetapan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berlandaskan pada satu keyakinan bahwa NTB dapat berperan besar di kancah Nasional dan Internasional. Satu Komitmen bahwa percepatan dan lompatan pembangunan harus terus diikhtiarkan untuk mewujudkan NTB

yang tertata rapi sebagai tempat hunian menyenangkan, dengan masyarakat yang berdaya saing, tangguh, dan berbudi luhur serta pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Tugas pokok Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB yaitu “melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah : Bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan Asas Otonomi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan” dalam kurun waktu 2024–2026. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB hendaknya mampu mendukung pelaksanaan akselerasi Pembangunan Daerah yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB telah menetapkan Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai yang terdapat dalam Rencana Pembangun Daerah (RPD) NTB Tahun 2024–2026.

Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-							
				2024		2025		2026		Kondisi Akhir	
				Kin	Keu (Rp.000)	Kin	Keu (Rp.000)	Kin	Keu (Rp.000)	Kin	Keu (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)	
1	Terwujudnya peningkatan kualitas manusia yang kompetitif, unggul, andal dan taqwa (kuat)		Indeks Pembangunan Manusia	73.11-73.96	20.224.199.141	73.86-74.77	18.815.933.896	74.62-75.46	19.507.503.347	74.62-75.46	19.507.503.347
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)	Tingkat Literasi Digital	61%		100%		100%		100%	
2	Terwujudnya peningkatan tata kelola pemerintahan daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	BB		BB		A		A	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik	Kualifikasi Layanan Perangkat Daerah	Kolaborasi		Kolaborasi		Optimum		Optimum	
			Persentase Perangkat Daerah yang Informatif	75%		80%		100%		100%	
			Persentase perangkat Daerah yang Memiliki Data Berkualitas	65%		70%		100%		100%	
			Persentase aplikasi SPBE yang aman	20%		20%		30%		100%	
			Indeks Kematangan Keamanan	III+		III+		IV		IV	

3	Terwujudnya transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas daerah menuju ntb sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi regional bali dan nusa tenggara yang inklusif dan berkelanjutan		Persentase Peningkatan Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan terhadap PDRB	6.5%		8%		>10%		>10%	
		Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah	Produktivitas Lapangan Usaha Ekonomi Sektor Informasi dan Komunikasi	7.6%-9.1%		7.6%-9.3%		7.6%-9.4%		7.6%-9.1%	

3.2. Program dan Kegiatan Proritas

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menyusun program - kegiatan tahun 2024 dan rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
3. Program Informasi dan Komunikasi Publik;
4. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator, target, dan pendanaan indikatif dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3. 2. Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB Tahun 2024-2026
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah pada
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Tujuan dan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra (2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
2.16.20.21 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat							20.637.471,633				19.937.461,355		75.452.669	Kepala Dinas	Prov NTB
A	Meningkatnya Nilai LKjIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	A (82.35)	Nilai	A (83.00)	10.828.034,633	A (84.00)	9.944.595,326	A (85.00)	10.293.487,233	A (85.00)	32.122.854	Sekretaris	Prov NTB
	1 Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	80	Dokumen	80	26.810	85	76.810	90	32.145	90	88.178	Sekretaris	Prov NTB
	1.01 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	1	7.650	1	15.362	1	9.172	3	25.161	Kasubbag Keuangan	Prov NTB
	1.02 Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	5.900	1	15.362	1	7.074	3	19.405	Kasubbag Keuangan	Prov NTB
	1.03 Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	5.900	1	15.362	1	7.074	3	19.405	Kasubbag Keuangan	Prov NTB
	1.0 Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	Koordinasi dan Penyusunan DPA	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan	1	Dokumen	1	1.000	1	14.362	1	1.199	3	3.289	Kasubbag Keuangan	Prov NTB

No	Tujuan dan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
								2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra (2026)			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*			*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
		4	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKP												
		1.05	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1	460	1	1.000	1	552	3	1.513	Kasubbag Keuangan	Prov NTB
		1.06	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Dokumen	6	5.900	6	15.362	6	7.074	18	19.405	Kasubbag Keuangan	Prov NTB
	2	Meningkatnya Serapan Anggaran Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah	93.67	%	95	7.198.771,633	96	6.814.019	97	5.942.001,233	*97*	*20.186.208*	Sekretaris	Prov NTB
		2.01	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45	Orang/ Bulan	45	7.174.155,633	47	6.783.064	50	5.912.486,233	*50*	*20.105.246*	Kasubbag Keuangan	Prov NTB
		2.02	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	1	18.716	1	24.524	1	22.441	*3*	*61.557*	Kasubbag Keuangan	Prov NTB
		2.0	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1	Laporan	1	5.900	1	6.431	1	7.074	*3*	*19.405*	Kasubbag Keuangan	Prov NTB

No	Tujuan dan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra (2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
	5 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
	3 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	80	%	80	8.810	83	26.679	85	10.563	85	28.976	Sekretaris	Prov NTB
	3.01 Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	1	460	1	10.679	1	552	3	1.513	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Prov NTB
	3.05 Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	Laporan	5	8.350	5	16.000	5	10.011	15	27.463	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Prov NTB
	5 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	100	800	100	67.500	100	959	100	2.631	Sekretaris	Prov NTB
	2.01 Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	1	350	1	33.750	1	420	3	1.151	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Prov NTB
	2.02 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	1	450	1	33.750	1	540	3	1.480	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Prov NTB
	6 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	98	%	98	330.843	98	369.087	98	396.681	98	1.088.143	Sekretaris	Prov NTB

No	Tujuan dan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
								2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra (2026)			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*			*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
		6.01	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15	Paket	1	9.000	1	17.478	1	10.791	3	29.601	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Prov NTB
		6.02	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	79	Paket	1	38.376	1	41.830	1	46.013	3	126.219	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Prov NTB
		6.05	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	1	8.100	1	8.829	1	9.712	3	26.641	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Prov NTB
		6.06	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7	Dokumen	1	15.000	1	16.350	1	17.985	3	49.335	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Prov NTB
		6.08	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	1	10.000	1	10.900	1	11.990	3	32.890	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Prov NTB
		6.09	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	1	250.000	1	272.500	1	299.750	3	822.250	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Prov NTB
		6.010	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	1	367	1	1.200	1	440	3	1.207	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Prov NTB
	7	Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100	%	100	55.000	100	90.500	100	65.945	100	180.895	Sekretaris	Prov NTB
		7.	Tersedianya Kendaraan	Pengadaan	Jumlah Unit	-	Unit	-	-	-	-	1	10.945	1	10.945	Kasubbag	Prov NTB

No	Tujuan dan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra (2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
	01 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan											Umum dan Kepegawaian	
	7.05 Tersedianya Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7	Paket	1	20.000	1	40.500	1	20.000	3	61.800	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Prov NTB
	7.06 Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11	Unit	1	35.000	1	50.000	1	35.000	3	108.150	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Prov NTB
	8 Meningkatnya Pelayanan Pununjang Urusan Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100	%	100	2.944.000	100	2.000.000	100	3.529.856	100	9.682.816	Sekretaris	Prov NTB
	8.01 Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1	3.000	1	3.270	1	3.597	3	9.867	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Prov NTB
	8.02 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	1	305.000	1	332.450	1	365.695	3	1.003.145	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Prov NTB
	8.04 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1	2.636.000	1	1.664.280	1	3.160.564	3	8.669.804	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Prov NTB
	9 Menurunnya Jumlah Barang Milik Daerah yang tidak layak pakai	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Cakupan Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100	%	100	263.000	100	500.000	100	315.337	100	865.007	Sekretaris	Prov NTB

No	Tujuan dan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra (2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
	Pemerintahan Daerah														
	9.01 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20	Unit	1	215.000	1	400.350	1	257.785	3	707.135	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Prov NTB
	9.02 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	1	18.000	1	42.950	1	21.582	3	59.202	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Prov NTB
	9.06 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13	Unit	1	20.000	1	35.800	1	23.980	3	65.780	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Prov NTB
	9.09 Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	10.000	1	20.900	1	11.990	3	32.800	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Prov NTB
B	Meningkatnya Kualifikasi Badan Publik yang Informatif	*Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik*	*Persentase Badan Publik yang Informatif*	39.26	%	42.96	6.751.406,299	46.67	6.386.434,425	50.37	6.614.163,113	50.37	24.010.522	Kabid IKP	Prov NTB
	Meningkatnya Kualifikasi Perangkat Daerah yang Informatif	*Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah*	*Persentase Perangkat Daerah yang Informatif*	68.20	%	76.08	6.751.406,299	86.95	6.386.434,425	100	6.614.163,113	100	24.010.522	Kabid IKP	Prov NTB

No	Tujuan dan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra (2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
		Daerah Provinsi													
	Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	2	Dokumen	2	246.937	2	350.000	2	296.077	6	812.176	Kabid IKP	Prov NTB
	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1	Dokumen	1	2.339.298,299	1	1.010.000	1	2.362.882	3	9.499.099	Kabid IKP	Prov NTB
	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1	Dokumen	1	83.057	1	105.000	1	99.585	3	273.174	Kabid IKP	Prov NTB
	Tersedianya Layanan Hubungan Media	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	4	Layanan	4	12.000	4	35.000	4	14.388	4	39.468	Kabid IKP	Prov NTB
	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikai Publik	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikai Publik yang Meningkat Kapasitasnya	-	Orang/Bulan	15	35.000	15	100.000	15	41.965	45	115.115	Kabid IKP	Prov NTB
	Terlaksanannya Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1	Dokumen	1	1.350.000	1	1.200.000	1	1.618.651	3	4.440.150	Kabid IKP	Prov NTB
	Terlaksananya Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendesiminasikan Informasi Program dan Kebijakan	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendesiminasikan Informasi Program dan Kebijakan	2	Dokumen	2	2.600.114	2	3.151.200	2	2.078.700,113	6	8.551.775	Kabid IKP	Prov NTB
	Terlaksanannya Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	3	Unit	1	85.000	1	435.234	1	101.915	3	279.565	Kabid IKP	Prov NTB
C	Meningkatnya Kualifikasi Layanan	*Program*	*Kualifikasi Layanan*	Kolaborasi	Kualifikasi	Kolabora	1.044.768,209	Kolabor	1.484.904,146	Optimal	681.153,001	Optimalisa	10.879.71	Kabid PTIK	Prov NTB

No	Tujuan dan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra (2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
	Perangkat Daerah	*Pengelolaan Aplikasi Informatika*	*Perangkat Daerah*		/ Level	si		asi		isasi		si	9		
	Meningkatnya Kualifikasi Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Kualifikasi Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terstandarisasi	Kualifikasi / Level	Terstandarisasi	1.044.768,209	Terintegrasi dan terukur	1.484.904,146	Terintegrasi dan terukur	681.453,003	Terintegrasi dan terukur	10.879.719	Kabid PTIK	Prov NTB
	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	1	Dokumen	1	191.158, 209	1	264.904	1	24.319	3	2.809.829	Kabid PTIK	Prov NTB
	Terkelolanya Pusat Data Pemerintah Daerah	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintah Daerah yang Dikelola	1	Unit	1	775.000	1	600.000	1	222.355,001	1	6.084.650	Kabid PTIK	Prov NTB
	Terlaksananya Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1	Dokumen	1	73.600	1	275.000	1	278.909	3	1.557.670	Kabid PTIK	Prov NTB
	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1	Unit	1	5.010	1	345.000	1	155.870	3	427.570	Kabid PTIK	Prov NTB
D	Meningkatnya Data Statistik Sektoral Prioritas yang Berkualitas	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Prioritas yang Berkualitas	40	%	40	222.795, 357	50	227.251,264	60	231.796,290	60	1.588.587	Kabid Statistik	Prov NTB
	Meningkatnya Cakupan Data Statistik Sektoral yang Tervalidasi	Kegiatan Penyelenggaraan	Cakupan Data Statistik Sektoral	50	%	70	222.795, 357	80	227.251,264	90	231.796,290	90	1.588.587	Kabid Statistik	Prov NTB

No	Tujuan dan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra (2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
	Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi		yang Tervalidasi												
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	49	Dokumen	1	62.910, 357	1	40.214	1	47.615	3	404.925	Kabid Statistik	Prov NTB
	Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	60	Orang	45	54.636	45	71.094	45	43.444	135	393.483	Kabid Statistik	Prov NTB
	Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	16	Dokumen	1	51.093	1	37.351	1	45.191	3	398.275	Kabid Statistik	Prov NTB
	Terselenggaranya Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	886	Dokumen	1	54.156	1	78.592	1	95.546,290	3	391.904	Kabid Statistik	Prov NTB
E	Meningkatnya Indeks Keamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi	286	Skor	286	190.466,857	371	194.276,194	455	198.161,718	455	1.588.587	Kabid SandiKami	Prov NTB
	Meningkatnya Tingkat Maturitas Keamanan Siber (Cyber Security Maturitas)	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat Maturitas Keamanan Siber	2.92	Skor	3.1	190.466,857	3.32	194.276,194	3.52	198.161,718	3.52	1.588.587	Kabid SandiKami	Prov NTB
	Ditetapkannya Kebijakan Tata	Penetapan	Jumlah Kebijakan	1	Dokumen	1	59.466, 857	1	56.000	1	70.258	3	467.038	Kabid	Prov NTB

No	Tujuan dan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra (2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
	Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan											SandiKami	
	Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1	Laporan	1	64.198	1	80.920	1	60.903	3	441.377	Kabid SandiKami	Prov NTB
	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	Laporan	1	30.302	1	29.276	1	20.262	3	329.893	Kabid SandiKami	Prov NTB
	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah di Tingkat Provinsi	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	18	Perangkat Daerah	25	36.500	30	27.380	38	46.738,718	38	350.279	Kabid SandiKami	Prov NTB
	Meningkatnya Nilai LKjIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	A (82.35)	Nilai	A (83.00)	524.990	A (84.00)	359.466	A (85.00)	629.463	A (85.00)	1.726.692	Ka. UPTD Layanan Digital	Prov NTB
	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan dan	Administrasi Umum Perangkat	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100	%	100	51.950	100	56.626	100	62.288	100	170.864	Ka. UPTD Layanan	Prov NTB

No	Tujuan dan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra (2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
	Penganggaran Perangkat Daerah	Daerah	Perangkat Daerah											Digital	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	35.000	1	38.150	1	41.965	3	115.115	Kasubbag Tata Usaha	Prov NTB
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	9.807	1	10.690	1	11.759	3	32.255	Kasubbag Tata Usaha	Prov NTB
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	1	7.143	1	7.786	1	8.564	3	23.493	Kasubbag Tata Usaha	Prov NTB
	Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100	%	100	76.000	100	52.840	100	91.124	100	1.305.865	Ka. UPTD Layanan Digital	Prov NTB
	Tersedianya Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	1	20.000	1	21.800	1	23.980	3	65.780	Kasubbag Tata Usaha	Prov NTB
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	2	56.000	2	31.040	2	67.144	6	184.184	Kasubbag Tata Usaha	Prov NTB
	Meningkatnya Pelayanan Pununjang Urusan Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100	%	100	397.040	100	250.000	100	476.051	100	1.305.865	Ka. UPTD Layanan Digital	Prov NTB
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	1	18.000	1	19.620	1	21.582	3	59.202	Kasubbag Tata Usaha	Prov NTB
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1	379.040	1	230.380	1	454.469	3	1.246.663	Kasubbag Tata Usaha	Prov NTB

No	Tujuan dan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra (2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
	Meningkatnya Aplikasi Layanan yang Terintegrasi	*Program Pengelolaan Aplikasi Informatika*	Persentase Layanan yang Terintegrasi	6.17	%	8.22	1.075.000	10.17	640.534	12.03	1.288.937	12.03	3.289.000	Ka. UPTD Pusat Layanan Digital	Prov NTB
	Meningkatnya aplikasi layanan administrasi pemerintah yang terintegrasi	Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	*Persentase Layanan Adminitrasi Pemerintah yang Terintegrasi*	9.68	%	12.5	1.075.000	15.15	640.534	17.65	1.288.937	17.65	3.289.000	Ka. UPTD Pusat Layanan Digital	Prov NTB
	Meningkatnya aplikasi layanan publik yang terintegrasi		*Persentase Layanan Publik yang Terintegrasi*	2.67	%	3.95		5.19		6.41		6.41			
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	2	Perangkat Daerah	3	75.010	4	81.761	5	89.937	5	246.708	Kasi Layanan Digital Publik	Prov NTB
	Terlaksananya Program Inovasi yang Diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	1	Dokumen	1	1.000.000	1	558.773	1	1.199.000	3	3.289.000	Kasi Layanan Digital Adm. Pemerintah	Prov NTB

Tabel 3. 2. B. Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB Tahun 2024-2026
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah pada
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat
(Penyesuaian Sub Kegiatan)

No	Tujuan dan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra (2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
2.16.20.21 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat									***18.238.461.355***		***18.238.461.355***		*36.476.922.710*	Kepala Dinas	Prov NTB
A	Meningkatnya Nilai LKjIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	A (82.35)	Nilai			A (84.00)	11.251.121.260	A (85.00)	11.251.121.260	A (85.00)	22.502.242.520	Sekretaris	Prov NTB
	1 Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	80	Dokumen			85	39.088.441	90	39.088.441	90	78.176.882	Sekretaris	Prov NTB
	1.01 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen			1	8.077.400	1	8.077.400	3	16.154.800	Kasubbag Keuangan	Prov NTB
	1.02 Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen			1	8.381.000	1	8.381.000	3	16.762.000	Kasubbag Keuangan	Prov NTB
	1.03 Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen			1	8.012.000	1	8.012.000	3	16.024.000	Kasubbag Keuangan	Prov NTB

		1.04	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKP	1	Dokumen			1	1.150.000	1	1.150.000	3	2.300.000	Kasubbag Keuangan	Prov NTB
		1.05	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen			1	1.150.000	1	1.150.000	3	2.300.000	Kasubbag Keuangan	Prov NTB
		1.06	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Dokumen			6	12.318.041	6	12.318.041	18	24.636.082	Kasubbag Keuangan	Prov NTB
	2	Meningkatnya Serapan Anggaran Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah	93.67	%			96	7.354.487.887	97	7.354.487.887	*97*	14.708.975.774	Sekretaris	Prov NTB
		2.01	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45	Orang/ Bulan			47	7.315.399.446	50	7.315.399.446	*50*	14.630.798.892	Kasubbag Keuangan	Prov NTB
		2.02	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen			1	30.000.000	1	30.000.000	*3*	60.000.000	Kasubbag Keuangan	Prov NTB
		2.05	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	1	Laporan			1	9.088.441	1	9.088.441	*3*	18.176.882	Kasubbag Keuangan	Prov NTB

			Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
	3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	80	%			83	13.571.200	85	13.571.200	85	27.142.400	Sekretaris	Prov NTB
		3.01	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen			1	8.160.000	1	8.160.000	3	16.320.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Prov NTB
		3.05	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	Laporan			5	5.411.200	5	5.411.200	15	10.822.400	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Prov NTB
	5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%			100	30.147.912	100	30.147.912	100	60.295.824	Sekretaris	Prov NTB
		2.01	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen			1	15.147.912	1	15.147.912	3	30.295.824	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Prov NTB
		2.02	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen			1	15.000.000	1	15.000.000	3	30.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Prov NTB
	6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	98	%			98	404.109.449	98	404.109.449	98	808.218.898	Sekretaris	Prov NTB
		6.01	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15	Paket			1	40.568.336	1	40.568.336	3	81.136.672	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Prov NTB
		6.02	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	79	Paket			1	47.315.105	1	47.315.105	3	94.630.210	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Prov NTB
		6.	Tersedianya Barang	Penyediaan Barang	Jumlah Paket Barang	2	Paket			1	48.594.336	1	48.594.336	3	97.188.672	Kasubbag	Prov

		05	Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan											Umum dan Kepegawaian	NTB
		6.06	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7	Dokumen			1	3.123.000	1	3.123.000	3	6.246.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Prov NTB
		6.08	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan			1	41.094.336	1	41.094.336	3	82.188.672	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Prov NTB
		6.09	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan			1	220.954.336	1	220.954.336	3	441.908.672	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Prov NTB
		6.010	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen			1	2.460.000	1	2.460.000	3	4.920.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Prov NTB
	7	Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100	%			100	108.188.672	100	108.188.672	100	216.377.344	Sekretaris	Prov NTB
		7.01	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	Unit			-	0	1	0	1	0	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Prov NTB
		7.05	Tersedianya Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7	Paket			1	36.594.336	1	36.594.336	3	73.188.672	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Prov NTB
		7.06	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11	Unit			1	71.594.336	1	71.594.336	3	143.188.672	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Prov NTB
	8	Meningkatnya Pelayanan Pununjang Urusan Perangkat Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100	%			100	2.944.159.027	100	2.944.159.027	100	5.888.318.054	Sekretaris	Prov NTB
		8.00	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1	Laporan			1	3.080.000	1	3.080.000	3	6.160.000	Kasubbag Umum dan	Prov NTB

		1			Surat Menyurat											Kepegawaian	
		8.02	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan			1	664.175.000	1	664.175.000	3	1.328.350.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Prov NTB
		8.04	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan			1	2.276.904.027	1	2.276.904.027	3	4.553.808.054	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Prov NTB
	9	Menurunnya Jumlah Barang Milik Daerah yang tidak layak pakai		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100	%			100	357.368.672	100	357.368.672	100	714.737.344	Sekretaris	Prov NTB
		9.01	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20	Unit			1	163.480.000	1	163.480.000	3	326.960.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Prov NTB
		9.02	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit			1	18.000.000	1	18.000.000	3	36.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Prov NTB
		9.06	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13	Unit			1	73.294.336	1	73.294.336	3	146.588.672	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Prov NTB
		9.09	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit			1	102.594.336	1	102.594.336	3	205.188.672	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Prov NTB
B	Meningkatnya Kualifikasi Badan Publik yang Informatif			*Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik*	*Persentase Badan Publik yang Informatif*		%			46.67	5.759.055.089	50.37	5.759.055.089	50.37	11.518.110.178	Kabid IKP	Prov NTB

		Meningkatnya Kualifikasi Perangkat Daerah yang Informatif	*Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi*	*Persentase Perangkat Daerah yang Informatif*		%			86.95	5.759.055.089	100	5.759.055.089	100	11.518.110.178	Kabid IKP	Prov NTB
			Menjalin hubungan/kerjasama dengan mitra kerja strategis	Relasi Media	Jumlah Laporan hasil kerjasama yang tersusun		Dokumen			1	2.503.600.000	1	2.503.600.000	2	5.007.200.000	Kabid IKP	Prov NTB
			Memproduksi konten informasi berupa video, foto atau gambar, dan tulisan	Penyusunan Konten	Jumlah Konten yang tersusun		Dokumen			1	82.920.000	1	82.920.000	2	165.840.000	Kabid IKP	Prov NTB
			Menyelenggarakan Pelatihan/Bimtek pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID) OPD lingkup Pemprov	Penguatan Kapasitas SDM Komunikasi Publik	Persentase ASN pengelola informasi dan komunikasi public di pemda yang mendapatkan pelatihan/bimtek informasi dan komunikasi publik		%			100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	180.000.000	Kabid IKP	Prov NTB
			Menyebarluaskan informasi baik melalui media cetat, online dan elektronik	Diseminasi Informasi	Persentase Khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemda		%			90%	885.000.000	90%	885.000.000	90%	1.770.000.000	Kabid IKP	Prov NTB
			Melaksanakan penyelesaian sengketa informasi baik melalui jalur ajudikasi, mediasi, judikasi dan melakukan monev keterbukaan informasi public pada badan public pemprov. Ntb.	Dukungan Administratif, Keuangan dan tata kelola komisi informasi di daerah dalam rangka penyelesaian sengketa informasi public	Persentase Permohonan Informasi Publik yang Diselesaikan sesuai Peraturan Perundangan		%			100%	1.682.625.000	100%	1.682.625.000	100%	3.365.250.000	Kabid IKP	Prov NTB
			Melakukan pembinaan dan kerja sama dengan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dalam hal penyebarluasan informasi.	*Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat*	Persentase Komunitas Informasi Masyarakat yang Difasilitasi untuk Peningkatan Kapasitas SDM oleh Dinas Kominfo		%			50%	225.000.000	50%	225.000.000	100%	450.000.000	Kabid IKP	Prov NTB

					Provinsi (%)												
			Melakukan Pembinaan PPID OPD dan Pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi Pemerintah Daerah.	*Pelayanan Informasi Publik*	Persentase tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi yang diberikan (%)		%			100%	53.410.089	100%	53.410.089	100%	106.820.178	Kabid IKP	Prov NTB
			Melakukan monitoring dan pengelolaan informasi, kebijakan, opini dan aspirasi publik	*Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik*	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik (Dokumen)		Dokumen			1	236.500.000	1	236.500.000	2	473.000.000	Kabid IKP	Prov NTB
C	Meningkatnya Kualifikasi Layanan Perangkat Daerah			*Program Pengelolaan Aplikasi Informatika*	*Kualifikasi Layanan Perangkat Daerah*		Kualifikasi / Level			Kolaborasi	328.781.496	Optimalisasi	328.781.496	Optimalisasi	750.522.990	Kabid PTIK	Prov NTB
		Meningkatnya Kualifikasi Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Kualifikasi Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		Kualifikasi / Level			Terintegrasi dan terukur	328.781.496	Terintegrasi dan terukur	328.781.496	Terintegrasi dan terukur	750.522.990	Kabid PTIK	Prov NTB
			Terselenggaranya integrasian Sistem Informasi ke Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) Daerah	*Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah*	Persentase Aplikasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (%)		%			20	14.000.000		14.000.000		28.000.000	Kabid PTIK	Prov NTB
			Terbitnya dokumen Arsitektir SPBE	*Koordinasi Penyusunan dan/atau Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah*	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan dan/atau Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)		Dokumen			1	31.250.000		31.250.000		62.500.000	Kabid PTIK	Prov NTB
			Terselenggaranya fasilitas SPBE	*Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah*	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi		Dokumen			1	51.429.996	1	51.429.996	3	102.859.992	Kabid PTIK	Prov NTB

			Meningkatnya Persentase Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Asitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE	*Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah*	Persentase Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah (%)		%			20	75.000.000	1	75.000.000	1	150.000.000	Kabid PTIK	Prov NTB
			Meningkatnya Persentase pemanfaatan pusat data nasional	*Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional*	Persentase Pemanfaatan Pusat Data Nasional (%)		%			20	16.800.000		16.800.000		33.600.000	Kabid PTIK	Prov NTB
			Tersedianya dokumen Perencanaan dan Penganggaran SPBE	*Koordinasi Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah*	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)		Dokumen			1	17.729.999		17.729.999		35.459.998	Kabid PTIK	Prov NTB
			Terlaksananya Manajemen SPBE	*Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE*	Persentase ASN pengelola SPBE di tingkat Pemerintah Provinsi yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas (%)		%			100%	27.051.000	100%	27.051.000	100%	54.103.000	Kabid PTIK	Prov NTB
			Meningkatnya Persentase OPD yang memanfaatkan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfotik	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka Penyelenggaraan SPBE	Persentase Perangkat Daerah (Area Publik) yang memanfaatkan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo (%)		%			10%	100.000.000		100.000.000		200.000.000	*Kabid PTIK*	Prov NTB
			Meningkatnya Persentase Masyarakat yang mendapatkan Literasi/Sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh DInas	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Persentase Masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan Literasi dan /atau		%			10%	22.000.000		22.000.000		44.000.000	*Kabid PTIK*	Prov NTB

					sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas (%)											
			Meningkatnya Persentase OPD yang terhubung dfengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	*Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah*	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (%)		%			2%	20.000.000		20.000.000		40.000.000	*Kabid PTIK*	Prov NTB
D	Meningkatnya Data Statistik Sektoral Prioritas yang Berkualitas			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Prioritas yang Berkualitas		%			50	149.970.933	60	145.970.933	60	299.941.866	Kabid Statistik	Prov NTB
		Meningkatnya Cakupan Data Statistik Sektoral yang Tervalidasi		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Cakupan Data Statistik Sektoral yang Tervalidasi		%			80	149.970.933	90	145.970.933	90	299.941.866	Kabid Statistik	Prov NTB
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	*Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral*	Persentase Pengelola Data yang mengikuti Pelatihan/Bimtek Pengelolaan Data Statistik Sektoral (%)		%			100	35.400.000	100	35.400.000	100	70.800.000	Kabid Statistik	Prov NTB
			Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	*Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral*	Persentase Data Statistik Sektoral yang Berkualitas (%)		%			45	24.170.933	45	24.170.933	90%	48.341.866	Kabid Statistik	Prov NTB
			Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral	*Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional*	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Rekomendasi Statistik (%)		%			100	70.750.000	100	70.750.000	100	141.500.000	Kabid Statistik	Prov NTB
			Terselenggaranya Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	*Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral sesuai Standar*	Persentase Perangkat Daerah yang Memenuhi Standar Proses Bisnis Statistik (%)		%			50	11.650.000	50	11.650.000	100	23.300.000	Kabid Statistik	Prov NTB
			Terselenggaranya Statistik Sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data indonesia	*Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia*	Persentase Data Sektoral yang Memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia (%)		%			50	8.000.000	50	8.000.000	50	16.000.000	Kabid Statistik	Prov NTB
E	Meningkatnya Indeks Keamanan			Program	Indeks Keamanan	286	Skor			371	149.970.933	455	145.970.933	455	299.941.866	Kabid	Prov

	Informasi	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Informasi											SandiKami	NTB
	Meningkatnya Tingkat Maturitas Keamanan Siber (Cyber Security Maturitas)	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat Maturitas Keamanan Siber	2.92	Skor			3.32	149.970.933	3.52	145.970.933	3.52	299.941.866	Kabid SandiKami	Prov NTB
		Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	1	Dokumen			1	10.650.000	1	10.650.000	3	21.300.000	Kabid SandiKami	Prov NTB
		Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1	Laporan			1	15.000.000	1	15.000.000	3	30.000.000	Kabid SandiKami	Prov NTB
		Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	Laporan			1	29.150.000	1	29.150.000	3	58.300.000	Kabid SandiKami	Prov NTB
		Tersedianya Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah di Tingkat Provinsi	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	18	Perangkat Daerah			30	95.170.933	38	95.170.933	38	190.341.866	Kabid SandiKami	Prov NTB
	Meningkatnya Nilai LKjIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai LKJiP Perangkat Daerah	A (82.35)	Nilai			A (84.00)	375.830.000	A (85.00)	375.830.000	A (85.00)	751.660.000	Ka. UPTD Layanan Digital	Prov NTB
	Meningkatnya Keselarasan	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan	100	%			100	22.000.000	100	22.000.000	100	44.000.000	Ka. UPTD	Prov

		Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah											Layanan Digital	NTB
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket			1	4.000.000	1	4.000.000	3	8.000.000	Ka. UPTD Layanan Digital	Prov NTB
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket			1	10.000.000	1	10.000.000	3	20.000.000	Ka. UPTD Layanan Digital	Prov NTB
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan			1	8.000.000	1	8.000.000	3	16.000.000	Ka. UPTD Layanan Digital	Prov NTB
		Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100	%			100	40.000.000	100	40.000.000	100	80.000.000	Ka. UPTD Layanan Digital	Prov NTB
		Tersedianya Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket			1	10.000.000	1	10.000.000	3	20.000.000	Ka. UPTD Layanan Digital	Prov NTB
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit			2	30.000.000	2	30.000.000	6	60.000.000	Ka. UPTD Layanan Digital	Prov NTB
		Meningkatnya Pelayanan Pununjang Urusan Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100	%			100	288.000.000	100	288.000.000	100	576.000.000	Ka. UPTD Layanan Digital	Prov NTB
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan			1	18.000.000	1	18.000.000	3	36.000.000	Ka. UPTD Layanan Digital	Prov NTB
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan			1	270.000.000	1	270.000.000	3	540.000.000	Ka. UPTD Layanan Digital	Prov NTB

	Meningkatnya Persentase barang milik daerah yang terpelihara			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah yang Terpelihara		%			100%	25.830.000	100%	25.830.000	100%	51.660.000	Ka. UPTD Layanan Digital	Prov NTB
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit			1	21.810.000	1	21.810.000	1	43.620.000	Ka. UPTD Layanan Digital	Prov NTB
			Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit			1	4.020.000	1	4.020.000	1	8.040.000	Ka. UPTD Layanan Digital	Prov NTB
	Meningkatnya Aplikasi Layanan yang Terintegrasi			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan yang Terintegrasi		%			10.17	177.251.645	12.03	177.251.645	12.03	354.503.290	Ka. UPTD Pusat Layanan Digital	Prov NTB
		Meningkatnya aplikasi layanan administrasi pemerintah yang terintegrasi		Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	*Persentase Layanan Adminitrasi Pemerintah yang Terintegrasi*		%			15.15	177.251.645	17.65	177.251.645	17.65	354.503.290	Ka. UPTD Pusat Layanan Digital	Prov NTB
		Meningkatnya aplikasi layanan publik yang terintegrasi			*Persentase Layanan Publik yang Terintegrasi*		%			5.19		6.41		6.41			
			Terlaksananya Koordinasi dalam pemanfaatan aplikasi umum	Koordinasi Pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	*Persentase Aplikasi Umum yang digunakan oleh Provinsi*		%			100	68.000.000	5	68.000.000	5	136.000.000	Ka. UPTD Pusat Layanan Digital	Prov NTB
			Terselenggaranya pemanfaatan portal pelayanan pemerintah daerah yang terintegrasi	Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang Terintegrasi	*Persentase Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang Terintegrasi*		%			28.57	31.000.000	1	31.000.000	3	62.000.000	Ka. UPTD Pusat Layanan Digital	Prov NTB
			Terfasilitasinya penyelenggaraan Provinsi Cerdas	*Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas*	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan sosialisasi Program Provinsi Cerdas (Smart Province) (%)		%			71.42%	78.251.645	100%	78.251.645	100%	156.503.290	Ka. UPTD Pusat Layanan Digital	Prov NTB

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB

Rencana program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB Tahun 2025 sebagaimana hasil isian pada Aplikasi SIPD ***https://sipd-ri.kemendagri.go.id/*** (terlampir). Adapun rekapan hasil isian dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB Tahun 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			**Provinsi**	**100%**		APBD	
2.16.01	**Urusan Komunikasi dan Informatika**							
2.16.01.1.01	**Program Penunjung Urusan Pemerintahan Daerah**		**Nilai LKJiP Perangkat Daerah**	**Provinsi**	**A**	**10.828. 034.633**	APBD	
2.16.01.1.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah**	**Provinsi**	**80%**	**39.088.441**	APBD	
2.16.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Provinsi**	2 Dokumen	8.077.400	APBD	
2.16.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran Dinas	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**Provinsi**	1 Dokumen	8.381.000	APBD	
2.16.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran Dinas	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	**Provinsi**	1 Dokumen	8.012.000	APBD	
2.16.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKP	**Provinsi**	1 Dokumen	1.150.000	APBD	
2.16.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksana Anggaran Dinas	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	**Provinsi**	1 Dokumen	1.150.000	APBD	
2.16.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dinas	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Provinsi**	6 Dokumen	12.318.041	APBD	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.01.1.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah**	**Provinsi**	**95%**	**7.354.487.887**	APBD	
2.16.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	**Provinsi**	45 Orang/Bulan	7.315.399.446	APBD	
2.16.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Provinsi**	1 Dokumen	30.000.000	APBD	
2.16.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Akhir Tahun Keuangan Dinas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**Provinsi**	1 Laporan	9.088.441	APBD	
2.16.01.1.03	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Provinsi**	**80%**	**13.571.200**	APBD	
2.16.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	**Provinsi**	1 Dokumen	8.160.000	APBD	
2.16.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pelaksanaan Rekon Aset Dinas	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	**Provinsi**	5 Laporan	5.411.200	APBD	
2.16.01.1.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Cakupan Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Provinsi**	**100%**	**30.147.912**	APBD	
2.16.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pembaharuan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	**Provinsi**	1 Dokumen	15.147.912	APBD	
2.16.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Penysunan Laporan Kinerja ASN	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	**Provinsi**	1 Dokumen	15.000.000	APBD	
2.16.01.1.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Provinsi**	**98%**	**404.109.449**	APBD	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Menyediakan Komponen Instalasi Listrik Kebutuhan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	**Provinsi**	1 Paket	40.568.336	APBD	
2.16.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Menyediakan Peralatan dan Perlengkapan Kebutuhan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**Provinsi**	1 Paket	47.315.105	APBD	
2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Menyediakan Barang Cetak dan Penggandaan Kebutuhan Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**Provinsi**	1 Paket	48.594.336	APBD	
2.16.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Menyediakan Bahan Bacaan (Koran/Majalah) Kebutuhan Kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	**Provinsi**	1 Dokumen	3.123.000	APBD	
2.16.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Menyediakan Makan dan Minum Kebutuhan Tamu Pimpinan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	**Provinsi**	1 Laporan	41.094.336	APBD	
2.16.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Memfasilitasi Agenda Pimpinan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Provinsi**	1 Laporan	220.954.336	APBD	
2.16.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Mengelola Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	**Provinsi**	1 Dokumen	2.460.000	APBD	
2.16.01.1.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah**	**Provinsi**	**100%**	**108.188.672**	APBD	
2.16.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembelian Kendaraan Kebutuhan Diinas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	**Provinsi**	- Unit	-	APBD	
2.16.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Pembelian Mebeulair Kebutuhan Dinas	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	**Provinsi**	1 Paket	36.594.336	APBD	
2.16.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembelian Peralatan dan Mesin Lainnya Kebutuhan Dinas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	**Provinsi**	1 Unit	71.594.336	APBD	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.01.1.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah**	**Provinsi**	**100%**	**2.944.159.027**	APBD	
2.16.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengelolaan Surat-surat Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Provinsi**	1 Laporan	3.080.000	APBD	
2.16.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi,/Internet Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**Provinsi**	1 Laporan	664.175.000	APBD	
2.16.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Menyediakan Tenaga Pendukung Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**Provinsi**	1 Laporan	2.276.904.027	APBD	
2.16.01.1.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Cakupan Barang Milik Daerah yang Terpelihara**	**Provinsi**	**100%**	**357.368.672**	APBD	
2.16.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Menyediakan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	**Provinsi**	1 Unit	163.480.000	APBD	
2.16.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Menyediakan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	**Provinsi**	1 Unit	18.000.000	APBD	
2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Menyediakan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	**Provinsi**	1 Unit	73.294.336	APBD	
2.16.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Menyediakan Jasa Pemeliharaan/Rehab Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**Provinsi**	1 Unit	102.594.336	APBD	
2.16.02	**Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik**	**Survey Kepuasan Masyarakat**	**Persentase tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi yang diberikan (%)**	**Provinsi**	**42.96%**	**5.759.055.089**	APBD	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.02.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**	**Survey Kepuasan Masyarakat**	**Persentase tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi yang diberikan (%)**	**Provinsi**	**76.08%**	**5.759.055.089**	APBD	
2.16.02.1.01.0014	Relasi Media	Menjalin hubungan/kerjasama dengan mitra kerja strategis	Jumlah laporan hasil kerjasama yang tersusun (Dokumen)	Provinsi	1 Dokumen	2.503.600.000	APBD	
2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten	Memproduksi Konten Informasi berupa Video, Foto/Gambar, dan Tulisan.	Jumlah Konten yang tersusun (Dokumen)	Provinsi	2 Dokumen	82.920.000	APBD	
2.16.02.1.01.0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Menyelenggarakan pelatihan /bimbingan teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD dan bimtek penulisan berita bagi OPD lingkup Pemprov.	Jumlah ASN Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan Pelatihan atau Bimtek Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Provinsi	100 Orang	90.000.000	APBD	
2.16.02.1.01.0018	Diseminasi Informasi	Menyebarluaskan Infromasi baik melalui media cetak (Koran, Baliho, Pamflet, Leaflet, dsb) maupun media elektronik (Tv, Radio, Media Online/ Sosial).	Persentase Khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam rencana kerja pemerintah sesuai strategi komunikasi (%)	Provinsi	95 %	885.000.000	APBD	
2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Melaksanakan penyelesaian sengketa informasi baik melalui jalur ajudikasi / judikasi, dan melakukan monev Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Lingkup Pemprov NTB.	Persentase Permohonan Informasi Publik yang Diselesaikan sesuai Peraturan Perundangan (%)	Provinsi	100 %	1.682.625.000	APBD	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.02.1.01.0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Melakukan pembinaan dan kerja sama dengan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dalam hal penyebarluasan informasi.	Persentase Komunitas Informasi Masyarakat yang Difasilitasi untuk Peningkatan Kapasitas SDM oleh Dinas Kominfo Provinsi (%)	Provinsi	30 %	225.000.000	APBD	
2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi Pemerintah Daerah.	Persentase tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi yang diberikan (%)	Provinsi	65 %	53.410.089	APBD	
2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	Melakukan monitoring dan pengelolaan informasi, kebijakan, opini dan aspirasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik (Dokumen)	Provinsi	2 Dokumen	236.500.000	APBD	
2.16.03	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**		**Kualifikasi Layanan Perangkat Daerah**	**Provinsi**	**Kolaborasi Kualifikasi/ Level**	**353.431.496**	APBD	
2.16.03.1.02	**Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**		**Kualifikasi Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	**Provinsi**	**Terstandarisasi Kualifikasi/ Level**	**353.431.496**	APBD	
2.16.03.1.02.0014	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Pengintegrasian Sistem Informasi ke Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) Daerah	Persentase Aplikasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (%)	**Provinsi**	1 Dokumen	14.000.000	APBD	
2.16.03.1.02.0015	Koordinasi Penyusunan dan/atau Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Rapat Koordinasi SPBE	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan dan/atau Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	**Provinsi**	1 Dokumen	31.250.000	APBD	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.03.1.02.0016	Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan SPBE di Lingkup Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah	**Provinsi**	1 Dokumen	51.429.996	APBD	
2.16.03.1.02.0017	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Pemabangunan / Pengembangan Aplikasi Khusus	Persentase Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah (%)	**Provinsi**	20 %	175.000.000	APBD	
2.16.03.1.02.0020	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Studi banding Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Persentase Pemanfaatan Pusat Data Nasional (%)	**Provinsi**	20 %	16.800.000	APBD	
2.16.03.1.02.0022	Koordinasi Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Koordinasi Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	**Provinsi**	1 Dokumen	1.250.000	APBD	
2.16.03.1.02.0023	Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Bimtek/Sosialisasi Pengelolaan SPBE	Persentase ASN pengelola SPBE di tingkat Pemerintah Provinsi yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas (%)	**Provinsi**	10 %	7.051.500	APBD	
2.16.03.1.02.0026	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka Penyelenggaraan SPBE	Penyediaan Akses Internet Perangkat Daerah dan Area Publik	Persentase Perangkat Daerah (Area Publik) yang memanfaatkan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	**Provinsi**	-	-	APBD	
2.16.03.1.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Sosialisasi terkait dengan 4 pilar Literasi Digital	Persentase Masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan Literasi dan /atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas (%)	**Provinsi**	10 %	22.000.000	APBD	
2.16.03.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah	Penyediaan Jaringan Intra Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (%)	**Provinsi**	2 %	10.000.000	APBD	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.20	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**							
2.20.02	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**		**Persentase Data Prioritas yang Berkualitas**	**Provinsi**	**40%**	**145.970.933**	APBD	
2.20.02.1.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**	**NTB 1 Data**	**Cakupan Data Statistik Sektoral yang Tervalidasi**	**Provinsi**	**70%**	**145.970.933**	APBD	
2.20.02.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Melaksanakan pelatihan /bimtek pengelolaan data statistic sektoral	Persentase Pengelola Data yang mengikuti Pelatihan/Bimtek Pengelolaan Data Statistik Sektoral (%)	**Provinsi**	50 %	35.400.000	APBD	
2.20.02.1.01.0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Melakukan penyusunan standar data dan metadata	Persentase Data Statistik Sektoral yang Berkualitas (%)	**Provinsi**	2 %	24.170.933	APBD	
2.20.02.1.01.0009	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Memfasilitasi Perangkat Daerah Mendapatkan Persetujuan Pengumpulan Data oleh BPS	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Rekomendasi Statistik (%)	**Provinsi**	5 %	70.750.000	APBD	
2.20.02.1.01.0010	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral sesuai Standar	Memfasilitasi Perangkat Daerah guna Pemenuhan Standar Pengelolaan Data Statistik	Persentase Perangkat Daerah yang Memenuhi Standar Proses Bisnis Statistik (%)	**Provinsi**	5 %	7.650.000	APBD	
2.20.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah	Persentase Data Sektoral yang Memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia (%)	**Provinsi**	10 %	8.000.000	APBD	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.21.02	**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**		**Indeks Keamanan Informasi**	**Provinsi**	286 Skor	**145.970.933**	APBD	
2.21.02.1.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**		**Tingkat Maturitas Keamanan Siber**	**Provinsi**	**3.1 Skor**	**145.970.933**	APBD	
2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Membuat kebijakan (PERDA, PERGUB, SE, dan SOP) terkait Tata Kelola Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi (Dokumen)	**Provinsi**	1 Dokumen	10.650.000	APBD	
2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Melakukan kajian kebutuhan SDM dan pelaksanaan pelatihan/bimtek keamanan informasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi (Laporan)	**Provinsi**	1 Laporan	64.198.000	APBD	
2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Melakukan pengamanan pada sistem informasi milik pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	**Provinsi**	1 Laporan	29.150.000	APBD	
2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Menyediakan dan memfasiliti Layanan Keamanan Informasi bagi Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi (%)	**Provinsi**	65,22 %	36.500.000	APBD	
2.16.01.1.01	**Program Penunjung Urusan Pemerintahan Daerah**		**Nilai LKJiP Perangkat Daerah**	**Provinsi**	**A**	**553.081.645**	APBD	
2.16.01.1.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Provinsi**	**100%**	**22.000.000**	APBD	
2.16.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi	1 Paket	4.000.000	APBD	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**Provinsi**	1 Paket	10.000.000	APBD	
2.16.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	**Provinsi**	1 Laporan	8.000.000	APBD	
2.16.01.1.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah**	**Provinsi**	**100%**	**40.000.000**	APBD	
2.16.01.1.07.05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	**Provinsi**	1 Paket	10.000.000	APBD	
2.16.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	**Provinsi**	2 Unit	30.000.000	APBD	
2.16.01.1.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah**	**Provinsi**	**100%**	**288.000.000**	APBD	
2.16.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi	1 Laporan	18.000.000	APBD	
2.16.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi	1 Laporan	270.000.000	APBD	
2.16.01.1.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Cakupan Barang Milik Daerah yang Terpelihara**	**Provinsi**	**100%**	**25.830.000**	APBD	
2.16.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Menyediakan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	**Provinsi**	1 Unit	21.810.000	APBD	
2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Menyediakan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	**Provinsi**	1 Unit	4.020.000	APBD	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.03	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**		**Persentase Layanan yang Terintegrasi**	**Provinsi**	**8.22%**	**177.251.645**	APBD	
2.16.03.1.02	**Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**		**Persentase Layanan Adminitrasi Pemerintah yang Terintegrasi**	**Provinsi**	**12.5%**	**177.251.645**	APBD	
			Persentase Layanan Publik yang Terintegrasi	**Provinsi**	**3.95%**		APBD	
2.16.03.1.02.0018	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Sosialisasi Program Provinsi Cerdas	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan sosialisasi Program Provinsi Cerdas (Smart Province) (%)	**Provinsi**	71,42 %	68.000.000	APBD	
2.16.03.1.02.0021	Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang Terintegrasi	Rapat/ Sosialisasi dalam rangka Optimalisasi Pemanfaatan Pelayanan Pemerintah Daerah	Persentase Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang Terintegrasi	**Provinsi**	28,57 %	31.000.000	APBD	
2.16.03.1.02.0027	Koordinasi Pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Bimtek dan Sosialisasi dalam rangka Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi Umum di Lingkup Pemerintah Provinsi	Persentase Aplikasi Umum yang digunakan oleh Provinsi	**Provinsi**	100 %	78.251.645	APBD	

BAB V
PENUTUP

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2025 telah disusun dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan di tingkat Vertikal sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kominfotik Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahun kedua (2) berdasarkan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Kominfotik Pemerintah Provinsi NTB 2024–2026 dalam menunjang pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Rencana Kerja Dinas Kominfotik Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2025 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfotik Pemerintah Provinsi NTB. Kesiapan Sumber Daya Manusia, Pendanaan dan Ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Dinas Kominfotik Pemerintah Provinsi NTB merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan rencana kerja ini. Keberhasilan pelaksanaan renja juga akan sangat menentukan pencapaian target-target kinerja dalam Renstra RPD Dinas Kominfotik Provinsi NTB Tahun 2024-2026.

Renja Dinas Kominfotik Pemerintah Provinsi NTB harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang dan UPTD yang ada, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Dinas.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Kominfotik Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Dinas/OPD diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB maupun dengan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota di NTB.

RENCANA KERJA
2025

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
2024

diskominfotik.ntbprov.go.id

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Sakip OPD**				**-**	**BB Nilai**	**80.397.100.558,99**	**63.863.722.467,00**	**66.362.554.397,00**	**14.510.514.945,01**							**94.907.615.504,00**	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*				14 Dokumen	14 Dokumen	1.343.432.200,00	587.515.260,00	411.347.520,00	-932.084.680,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Aparatur Sipil Negara		1.553.574.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	379.089.000,00	96.776.900,00	71.776.700,00	-307.312.300,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			405.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	95.935.600,00	30.274.800,00	4.678.800,00	-91.256.800,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	94.767.800,00	30.337.500,00	24.596.700,00	-70.171.100,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			115.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	24.239.900,00	11.395.600,00	4.896.600,00	-19.343.300,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	23.096.500,00	11.702.500,00	3.421.700,00	-19.674.800,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			45.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	60.507.200,00	27.281.800,00	23.507.800,00	-36.999.400,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	3 Laporan	319.064.000,00	69.730.900,00	34.734.860,00	-284.329.140,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			340.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	46.476.689.066,99	44.160.129.411,00	46.445.651.171,00	-31.037.895,99			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		47.603.592.113,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				433 Orang/ Bulan	433 Orang/ Bulan	45.659.369.066,99	43.659.330.411,00	45.959.837.771,00	300.468.704,01	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			46.569.936.913,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	6 Dokumen	58.000.000,00	15.000.000,00	14.601.000,00	-43.399.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			194.439.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	57.000.000,00	82.000.000,00	89.560.000,00	32.560.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG INFRASTRUKTUR ENERGI TERBARUKAN-TEMATIK PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN ELEKTRIFIKASI DI DAERAH AFIRMASI	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			48.511.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	54.000.000,00	21.000.000,00	15.081.000,00	-38.919.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			56.282.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	56.000.000,00	20.000.000,00	19.207.000,00	-36.793.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			96.815.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	52.000.000,00	12.000.000,00	14.615.000,00	-37.385.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			61.442.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	54.000.000,00	28.000.000,00	36.571.200,00	-17.428.800,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			71.210.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	52.000.000,00	10.000.000,00	5.039.200,00	-46.960.800,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			79.611.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	647.098.000,00	192.591.200,00	154.669.000,00	-492.429.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		748.220.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	26.801.900,00	26.335.400,00	-98.664.600,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	127.000.000,00	8.345.000,00	8.682.000,00	-118.318.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	123.000.000,00	27.354.300,00	25.100.100,00	-97.899.900,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	10.000.000,00	8.426.500,00	-116.573.500,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah*				31 Dokumen	31 Dokumen	721.878.200,00	88.000.000,00	88.290.000,00	-633.588.200,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		829.209.930,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				8 Unit	0 Unit	71.000.000,00	0,00	0,00	-71.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	25.000.000,00	13.290.000,00	-56.710.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	0 Dokumen	68.000.000,00	0,00	0,00	-68.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	90.000.000,00	30.000.000,00	42.000.000,00	-48.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	0 Orang	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	0 Orang	66.000.000,00	0,00	0,00	-66.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	3.314.728.450,00	1.775.142.200,00	856.734.120,00	-2.457.994.330,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		2.890.077.660,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.155.000,00	4.000.000,00	3.511.600,00	-12.643.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			26.155.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	800.000.000,00	183.904.240,00	196.854.760,00	-603.145.240,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	4.000.000,00	5.488.500,00	5.488.500,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			49.147.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	**NON URUSAN**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			26.254.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	**NON URUSAN**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	15.001.000,00	8.625.500,00	8.625.500,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.073.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	**NON URUSAN**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	75.960.000,00	63.860.000,00	213.860.000,00	137.900.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			85.960.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	39.511.000,00	10.000.000,00	62.410.000,00	22.899.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			49.511.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	125.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			415.423.760,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	**NON URUSAN**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah*				18 Unit	Unit	6.162.930.510,00	38.711.840,00	1.000.000.000,00	-5.162.930.510,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		20.177.060.701,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			195.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	0 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	0 Unit	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 Persen	100 Persen	15.083.506.418,00	15.170.881.200,00	15.289.367.430,00	205.861.012,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		14.093.540.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-8.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			11.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	537.993.000,00	511.500.000,00	583.200.000,00	45.207.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			587.993.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	62.000.000,00	20.000.000,00	122.378.900,00	60.378.900,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			72.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.600.779.240,00	4.107.040.400,00	4.102.528.730,00	-498.250.510,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara*				221 Unit	18 Unit	6.646.837.714,00	1.850.751.356,00	2.116.495.156,00	-4.530.342.558,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		7.012.340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				39 Unit	18 Unit	422.000.000,00	165.036.156,00	305.561.156,00	-116.438.844,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			472.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				56 Unit	0 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	0 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	0 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	0 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	0 Unit	400.000.000,00	0,00	565.000.000,00	165.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			480.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	0 Unit	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	**NON URUSAN**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				60 Unit	0 Unit	309.914.044,00	0,00	0,00	-309.914.044,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			355.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi**				**8.110.000 m3**	**40.29 65.53 % %**	**166.304.162.334,01**	**108.810.643.540,00**	**151.204.366.140,00**	**64.497.702.518,99**							**230.801.864.853,00**	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				1.269 Unit		64.757.824.166,63	64.078.944.660,00	79.156.778.460,00	14.398.954.293,37			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	Petani dan Masyarakat		96.517.486.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir																		
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi				400 Lembaga	0 Lembaga	0,00	0,00	64.500.000,00	64.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-2 Pembangunan Manusia PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.02.1.01.0078	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku																		
			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun				4 Titik	43 Titik	946.086.778,00	1.915.125.000,00	10.522.800.000,00	9.576.713.222,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun				20 Dokumen	0 Dokumen	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																		
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				5,3 KM	0,21 KM	9.500.000.000,00	403.480.000,00	4.788.855.000,00	-4.711.145.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			11.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				197 Unit	43 Unit	37.300.000.000,00	8.229.380.000,00	8.219.050.000,00	-29.080.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			50.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				20 Dokumen	0 Dokumen	2.000.000.000,00	0,00	200.000.000,00	-1.800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			3.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				15.935 Hektare		101.546.338.167,38	44.731.698.880,00	72.047.587.680,00	-29.498.750.487,38			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	Petani dan Masyarakat		134.284.378.453,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				5 KM	0 KM	3.000.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0003	Pembangunan Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun				2 Bendung	0 Bendung	8.500.000.000,00	0,00	0,00	-8.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				17 KM	0 KM	24.900.000.000,00	0,00	0,00	-24.900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			30.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				35 KM	16,24 KM	49.000.000.000,00	17.982.674.000,00	32.612.985.000,00	-16.387.015.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-TEMATIK PENGEMBANGAN FOOD ESTATE	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			60.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya				35 Lembaga	2 Lembaga	500.000.000,00	100.000.000,00	262.000.000,00	-238.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				21 Dokumen	6 Dokumen	5.000.000.000,00	1.158.525.000,00	1.261.931.000,00	-3.738.069.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Akses Layanan Air Minum**				**100 Persentase**	**85.41 %**	**64.115.267.035,00**	**13.891.073.000,00**	**100.000.000,00**	**2.865.939.965,00**							**66.981.207.000,00**	
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	*Persentase Pemenuhan SPM SPAM Lintas Kab/Kota*				100 Persentase	100 Persentase	64.115.267.035,00	13.891.073.000,00	100.000.000,00	-64.015.267.035,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-3 Pembangunan Lingkungan PD-3 Pembangunan Lingkungan	Masyarakat		66.981.207.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				10 Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota	300.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-3 Pembangunan Lingkungan PD-3 Pembangunan Lingkungan			25.381.207.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				4 Dokumen	0 Dokumen	2.000.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00	-2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-3 Pembangunan Lingkungan PD-3 Pembangunan Lingkungan			1.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun				30 Liter/Detik	0 Liter/Detik	30.907.633.518,00	7.000.000.000,00	0,00	-30.907.633.518,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.1.01.0020	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi				2 Unit	0 Unit	30.907.633.517,00	4.891.073.000,00	0,00	-30.907.633.517,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK PAJAK ROKOK INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis provinsi**				**75 Persentase**	**75 Persentase**	**50.000.000.000,00**	**4.000.000.000,00**	**4.542.000.000,00**	**-39.000.000.000,00**							**11.000.000.000,00**	
	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	*Jumlah Infrastruktur Persampahan Regional yang dikembangkan dan dikelola*				1 Unit	1 Unit	50.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.542.000.000,00	-45.458.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-3 Pembangunan Lingkungan PD-3 Pembangunan Lingkungan	Masyarakat		11.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.1.01.0011	Optimalisasi TPA/TPST/SPA																		
			Jumlah TPA/TPST/SPA yang dioptimalisasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.542.000.000,00	-45.458.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Barat, Gerung, Kebon Ayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-3 Pembangunan Lingkungan PD-3 Pembangunan Lingkungan			10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-3 Pembangunan Lingkungan PD-3 Pembangunan Lingkungan			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Peningkatan Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)**				**100 Persentase**	**84% Persentase**	**200.000.000,00**	**6.010.000.000,00**	**0,00**	**6.800.000.000,00**							**7.000.000.000,00**	
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	*Persentase Pemenuhan SPM SPALD Lintas Kab/Kota*				100 Persen	100 Persen	200.000.000,00	6.010.000.000,00	0,00	-200.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-3 Pembangunan Lingkungan PD-3 Pembangunan Lingkungan	Masyarakat		7.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.1.01.0010	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				1 Kabupaten/Kota	0 Kabupaten/Kota	200.000.000,00	6.010.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-3 Pembangunan Lingkungan PD-3 Pembangunan Lingkungan			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				4 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-3 Pembangunan Lingkungan PD-3 Pembangunan Lingkungan			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis provinsi**				**75 Persentase**	**75 Persentase**	**3.642.592.593,00**	**0,00**	**17.412.416.450,00**	**23.857.407.407,00**							**27.500.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	*Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis provinsi*				75 Persentase	75 Persentase	3.642.592.593,00	0,00	17.412.416.450,00	13.769.823.857,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-3 Pembangunan Lingkungan PD-3 Pembangunan Lingkungan	Masyarakat		27.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.1.01.0007	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				15 Sistem Drainase Perkotaan	0 Sistem Drainase Perkotaan	3.000.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-3 Pembangunan Lingkungan PD-3 Pembangunan Lingkungan			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.1.01.0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				3 Sistem Drainase Perkotaan	60 Sistem Drainase Perkotaan	642.592.593,00	0,00	17.412.416.450,00	16.769.823.857,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DAK FISIK-BIDANG INFRASTRUKTUR ENERGI TERBARUKAN-TEMATIK PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN ELEKTRIFIKASI DI DAERAH AFIRMASI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-3 Pembangunan Lingkungan PD-3 Pembangunan Lingkungan			20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.1.01.0011	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan				7 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-3 Pembangunan Lingkungan PD-3 Pembangunan Lingkungan			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.1.01.0012	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-3 Pembangunan Lingkungan PD-3 Pembangunan Lingkungan			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.1.01.0013	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan				10 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-3 Pembangunan Lingkungan PD-3 Pembangunan Lingkungan			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	**1.03.07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**Persentase peningkatan infrastruktur permukiman**				**-**	**25 %**	**19.609.382.000,00**	**1.850.000.000,00**	**14.409.950.000,00**	**-11.609.382.000,00**							**8.000.000.000,00**	
	1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	*Terpadunya Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman*				450 Ton/hari	100 %	19.609.382.000,00	1.850.000.000,00	14.409.950.000,00	-5.199.432.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Desa/Masyarakat Miskin		8.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.07.1.01.0007	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi																		
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun				450 Ton/hari	0 Ton/hari	6.000.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			2.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.07.1.01.0009	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Provinsi																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar				300 Rumah Tangga	0 Rumah Tangga	6.000.000.000,00	0,00	400.000.000,00	-5.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			2.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.07.1.01.0024	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang ditingkatkan				350 Liter/Detik	100 Liter/Detik	7.609.382.000,00	1.850.000.000,00	14.009.950.000,00	6.400.568.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-3 Pembangunan Lingkungan PD-3 Pembangunan Lingkungan			2.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik**				**75 Persentase**	**40 %**	**642.592.593,00**	**18.400.000.000,00**	**29.611.164.140,00**	**10.777.407.407,00**							**11.420.000.000,00**	
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	*Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun atau direhabilitasi*				10 Unit	10 Unit	642.592.593,00	18.400.000.000,00	29.611.164.140,00	28.968.571.547,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	Masyarakat atau Pihak Lainnya		11.420.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.1.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat																		
			Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat				100 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.1.01.0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara																		
			Jumlah Rumah Negara yang Dikelola				90 Rumah Negara	0 Rumah Negara	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.1.01.0015	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara																		
			Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)				15 Bangunan Gedung Negara	0 Bangunan Gedung Negara	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara				10 Kabupaten/Kota	0 Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				3 Dokumen	5 Dokumen	642.592.593,00	18.400.000.000,00	29.611.164.140,00	28.968.571.547,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.1.01.0020	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				57 Bangunan Gedung	0 Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)			10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase penataan bangunan dan lingkungan**				**75 Persentase**	**25.25 %**	**2.570.370.371,00**	**755.000.000,00**	**2.393.396.400,00**	**7.000.000.000,00**							**9.570.370.371,00**	
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah bangunan dan lingkungannya di kawsan strategis daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota yang di tata*				1 Kawasan	1 Kawasan	2.570.370.371,00	755.000.000,00	2.393.396.400,00	-176.973.971,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	Masyarakat atau Pihak Lainnya		9.570.370.371,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				35 Kawasan	5 Kawasan	2.570.370.371,00	755.000.000,00	2.393.396.400,00	-176.973.971,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)			3.570.370.371,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.1.01.0011	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan				2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat Kemantapan Jalan**				**80.4 %**	**76.04 %**	**856.115.041.872,00**	**28.752.264.600,00**	**122.905.890.400,00**	**-528.029.333.082,00**							**328.085.708.790,00**	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	*Kondisi Mantap Jalan Provinsi*				-	76.04 %	856.115.041.872,00	28.752.264.600,00	122.905.890.400,00	-733.209.151.472,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-3 Pembangunan Lingkungan PD-3 Pembangunan Lingkungan	Meningkatnya kualitas jalan		328.085.708.790,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				50 KM	13.7 KM	305.000.000,00	55.000.000,00	30.000.000,00	-275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-3 Pembangunan Lingkungan PD-3 Pembangunan Lingkungan			76.620.510,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				50 KM	13.7 KM	394.137.920.000,00	18.922.301.000,00	82.230.851.000,00	-311.907.069.000,00	Kab. Lombok Timur, Labuhan Haji, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Seteluk, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Poto Tano, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG JALAN-PENUGASAN-JALAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-3 Pembangunan Lingkungan PD-3 Pembangunan Lingkungan			38.637.586.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0036	Penggantian Jembatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Jembatan yang Diganti				3 Jembatan	2 Jembatan	68.027.920.000,00	0,00	11.434.000.000,00	-56.593.920.000,00	Kab. Bima, Monta, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Tambora, Oi Katupa Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Mekar Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG JALAN-PENUGASAN-JALAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-3 Pembangunan Lingkungan PD-3 Pembangunan Lingkungan			9.528.251.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				1493.12 KM	2 KM	50.205.000.000,00	0,00	4.272.000.000,00	-45.933.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-3 Pembangunan Lingkungan PD-3 Pembangunan Lingkungan			2.031.175.060,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				2 Dokumen	6 Dokumen	4.496.862.300,00	530.000.000,00	8.061.700.000,00	3.564.837.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-3 Pembangunan Lingkungan PD-3 Pembangunan Lingkungan			795.757.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				50 KM	0 KM	316.791.569.910,00	0,00	0,00	-316.791.569.910,00	Kab. Bima, Parado, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Hu'u, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Ropang, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG JALAN-PENUGASAN-JALAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-3 Pembangunan Lingkungan PD-3 Pembangunan Lingkungan			122.657.466.970,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				1493.12 KM	1493.12 KM	510.000.000,00	270.000.000,00	457.845.000,00	-52.155.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-3 Pembangunan Lingkungan PD-3 Pembangunan Lingkungan			1.103.398.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli**				**6 %**	**36 %**	**2.000.000.000,00**	**275.000.000,00**	**482.098.100,00**	**500.000.000,00**							**2.500.000.000,00**	
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	*Persentase Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi*				-	36 %	1.216.385.400,00	215.000.000,00	415.048.100,00	-801.337.300,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih				180 Orang	0 Orang	420.454.200,00	0,00	0,00	-420.454.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.01.0013	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan				-	1 Dokumen	0,00	75.000.000,00	202.898.100,00	202.898.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-2 Pembangunan Manusia PD-2 Pembangunan Manusia			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi				180 Orang	30 orang Orang	581.568.100,00	60.000.000,00	166.500.000,00	-415.068.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-2 Pembangunan Manusia PD-2 Pembangunan Manusia			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.01.0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya				100 Orang	30 Orang	214.363.100,00	80.000.000,00	45.650.000,00	-168.713.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-2 Pembangunan Manusia PD-2 Pembangunan Manusia			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	*Persentase Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan*				-	%	467.836.400,00	60.000.000,00	17.050.000,00	-450.786.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi NTB		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				1 Layanan Informasi	0 Layanan Informasi	218.918.200,00	0,00	0,00	-218.918.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	248.918.200,00	60.000.000,00	17.050.000,00	-231.868.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	*Persentase Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi*				-	20 %	315.778.200,00	0,00	50.000.000,00	-265.778.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi NTB		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.03.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				10 Lembaga	0 Lembaga	315.778.200,00	0,00	50.000.000,00	-265.778.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
11.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang**				**84.1 %**	**83.38 %**	**2.000.000.000,00**	**275.000.000,00**	**196.936.000,00**	**700.000.000,00**							**2.700.000.000,00**	
	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	*Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang*				400 orang	80 orang	217.000.000,00	0,00	38.106.000,00	-178.894.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	Masyarakat dan Pemangku Kepentingan		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang																		
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				400 Orang	80 Orang	217.000.000,00	0,00	38.106.000,00	-178.894.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	*Jumlah Dokumen Materi Teknis dan Ranperda RTR Provinsi NTB yang tersusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	194.000.000,00	60.595.000,00	35.469.000,00	-158.531.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	Pemangku Kepentingan		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.02.0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	194.000.000,00	60.595.000,00	35.469.000,00	-158.531.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi*				1 Dokumen	0 Dokumen	319.000.000,00	0,00	0,00	-319.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	Masyarakat dan Pemangku Kepentingan		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.03.0003	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha																		
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				1 Layanan	0 Layanan	319.000.000,00	0,00	0,00	-319.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi*				1 Dokumen	3 Dokumen	1.270.000.000,00	214.405.000,00	123.361.000,00	-1.146.639.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	Masyarakat dan Pemangku Kepentingan		1.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				2 Laporan	2 Laporan	690.000.000,00	140.730.000,00	89.730.000,00	-600.270.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.12.1.04.0011	Penilaian Perwujudan RTR																		
			Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR				1 Dokumen	0 Dokumen	335.000.000,00	0,00	0,00	-335.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.04.0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK																		
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	245.000.000,00	73.675.000,00	33.631.000,00	-211.369.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI WILAYAH PULAU LOMBOK							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Sakip OPD**				**-**	**BB Nilai**	**80.397.100.558,99**	**63.863.722.467,00**	**66.362.554.397,00**	**14.510.514.945,01**							**94.907.615.504,00**	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	1.343.432.200,00	587.515.260,00	411.347.520,00	-932.084.680,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		1.553.574.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	18.402.400,00	18.762.400,00	18.398.400,00	-4.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			18.802.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	19.713.000,00	16.413.600,00	15.805.600,00	-3.907.400,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			17.735.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	19.593.000,00	14.824.000,00	13.710.000,00	-5.883.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			16.544.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	18.493.000,00	15.000.400,00	176.400,00	-18.316.600,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			19.493.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	46.476.689.066,99	44.160.129.411,00	46.445.651.171,00	-31.037.895,99			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		47.603.592.113,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	133.801.000,00	64.601.000,00	55.601.000,00	-78.200.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			51.965.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	15.978.000,00	15.358.000,00	1.693.000,00	-14.285.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			15.508.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	647.098.000,00	192.591.200,00	154.669.000,00	-492.429.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		748.220.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	48.432.000,00	28.164.000,00	14.764.000,00	-33.668.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			48.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.314.728.450,00	1.775.142.200,00	856.734.120,00	-2.457.994.330,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		2.890.077.660,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.070.000,00	6.400.000,00	1.830.000,00	-16.240.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			7.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	791.193.000,00	634.508.000,00	1.598.000,00	-789.595.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.743.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	14.200.800,00	0,00	0,00	-14.200.800,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			15.200.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	6.162.930.510,00	38.711.840,00	1.000.000.000,00	-5.162.930.510,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		20.177.060.701,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	115.515.000,00	0,00	0,00	-115.515.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			116.515.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	15.083.506.418,00	15.170.881.200,00	15.289.367.430,00	205.861.012,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		14.093.540.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	94.650.000,00	101.500.000,00	101.500.000,00	6.850.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			95.650.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	28.840.000,00	18.120.000,00	3.980.000,00	-24.860.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			7.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	161.380.000,00	392.210.000,00	392.174.000,00	230.794.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			405.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.646.837.714,00	1.850.751.356,00	2.116.495.156,00	-4.530.342.558,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		7.012.340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				32 Unit	5 Unit	318.850.000,00	305.850.000,00	181.970.000,00	-136.880.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	700.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-600.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			701.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat kemantapan jalan**				**-**	**76.04 %**	**856.115.041.872,00**	**28.752.264.600,00**	**122.905.890.400,00**	**-528.029.333.082,00**							**328.085.708.790,00**	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	*Kondisi Mantap Jalan Provinsi*				-	76.04 %	856.115.041.872,00	28.752.264.600,00	122.905.890.400,00	-733.209.151.472,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		328.085.708.790,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				79.46 KM	79.46 KM	7.000.666.578,00	6.228.288.600,00	5.583.288.600,00	-1.417.377.978,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.216.781.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI WILAYAH PULAU SUMBAWA							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Sakip OPD**				**-**	**BB Nilai**	**80.397.100.558,99**	**63.863.722.467,00**	**66.362.554.397,00**	**14.510.514.945,01**							**94.907.615.504,00**	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	1.343.432.200,00	587.515.260,00	411.347.520,00	-932.084.680,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PNS		1.553.574.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	33.464.800,00	15.810.000,00	15.810.000,00	-17.654.800,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	26.955.200,00	15.375.200,00	15.375.200,00	-11.580.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	23.895.200,00	13.995.200,00	12.921.200,00	-10.974.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	18.695.200,00	15.755.200,00	7.355.200,00	-11.340.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				12 Laporan	12 Laporan	46.476.689.066,99	44.160.129.411,00	46.445.651.171,00	-31.037.895,99			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PNS		47.603.592.113,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	71.858.000,00	35.640.000,00	35.640.000,00	-36.218.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*				4 Laporan	4 Laporan	647.098.000,00	192.591.200,00	154.669.000,00	-492.429.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PNS		748.220.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	23.799.000,00	21.399.000,00	16.114.000,00	-7.685.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*				7 Paket	7 Paket	3.314.728.450,00	1.775.142.200,00	856.734.120,00	-2.457.994.330,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PNS		2.890.077.660,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	4.500.000,00	3.600.000,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	4.861.200,00	0,00	0,00	-4.861.200,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.780.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			4.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	72.609.000,00	22.324.000,00	12.084.000,00	-60.525.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			90.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah*				2 Unit	Unit	6.162.930.510,00	38.711.840,00	1.000.000.000,00	-5.162.930.510,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PNS		20.177.060.701,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	74.250.000,00	0,00	0,00	-74.250.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				6 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah*				12 Laporan	12 Laporan	15.083.506.418,00	15.170.881.200,00	15.289.367.430,00	205.861.012,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PNS		14.093.540.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	61.570.500,00	61.570.500,00	61.570.500,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			166.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	18.525.800,00	14.625.800,00	9.485.800,00	-9.040.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.779.457.600,00	1.770.000.000,00	1.770.000.000,00	-9.457.600,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			950.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				76 Unit	76 Unit	6.646.837.714,00	1.850.751.356,00	2.116.495.156,00	-4.530.342.558,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PNS		7.012.340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				11 Unit	7 Unit	114.860.000,00	103.860.000,00	99.430.000,00	-15.430.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	501.292.200,00	101.428.000,00	76.428.000,00	-424.864.200,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			505.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	0 Unit	959.469.050,00	131.583.800,00	0,00	-959.469.050,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat Kemantapan Jalan**				**-**	**76.04 %**	**856.115.041.872,00**	**28.752.264.600,00**	**122.905.890.400,00**	**-528.029.333.082,00**							**328.085.708.790,00**	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	*Kondisi Mantap Jalan Provinsi*				483,57 Km	76.04 %	856.115.041.872,00	28.752.264.600,00	122.905.890.400,00	-733.209.151.472,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Masyarakat		328.085.708.790,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				483,57 KM	483,57 KM	7.103.935.026,00	1.489.253.300,00	2.587.268.300,00	-4.516.666.726,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			70.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN HIDROLOGI WILAYAH SUNGAI PULAU LOMBOK							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP OPD**				**-**	**BB Nilai**	**80.397.100.558,99**	**63.863.722.467,00**	**66.362.554.397,00**	**14.510.514.945,01**							**94.907.615.504,00**	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*				14 Dokumen	14 Dokumen	1.343.432.200,00	587.515.260,00	411.347.520,00	-932.084.680,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		1.553.574.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	6.957.160,00	6.672.160,00	1.672.160,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	1.000.000,00	690.000,00	-4.310.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-9.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-4.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				18 %	18 %	46.476.689.066,99	44.160.129.411,00	46.445.651.171,00	-31.037.895,99			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		47.603.592.113,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00	46.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	13.760.000,00	12.760.000,00	2.760.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah*				6 %	6 %	647.098.000,00	192.591.200,00	154.669.000,00	-492.429.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		748.220.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	5.000.000,00	12.440.000,00	11.270.000,00	6.270.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	3.314.728.450,00	1.775.142.200,00	856.734.120,00	-2.457.994.330,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		2.890.077.660,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	-9.900.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	40.000.000,00	198.911.000,00	4.000.000,00	-36.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	5.120.000,00	2.920.000,00	-7.080.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			11.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	8.900.000,00	1.600.000,00	-8.400.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	43.315.000,00	7.745.000,00	-12.255.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*jumlah pengadaan barang milik daerah*				14 Unit	Unit	6.162.930.510,00	38.711.840,00	1.000.000.000,00	-5.162.930.510,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		20.177.060.701,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	0 Paket	25.000.000,00	38.711.840,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 Unit	100 Unit	15.083.506.418,00	15.170.881.200,00	15.289.367.430,00	205.861.012,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		14.093.540.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	46.277.778,00	34.500.000,00	34.500.000,00	-11.777.778,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.970.000.000,00	2.977.416.000,00	2.977.216.000,00	7.216.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			3.110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				4 Unit	2 Unit	6.646.837.714,00	1.850.751.356,00	2.116.495.156,00	-4.530.342.558,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		7.012.340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				39 Unit	39 Unit	40.000.000,00	75.430.000,00	43.620.000,00	3.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	25.000.000,00	229.160.000,00	185.000.000,00	160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	50.000.000,00	23.840.000,00	6.500.000,00	-43.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi**				**58,62 %**	**40.29 65.53 % %**	**166.304.162.334,01**	**108.810.643.540,00**	**151.204.366.140,00**	**64.497.702.518,99**							**230.801.864.853,00**	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Kapasitas Daya tampung air*				1.269 Unit	8.11 Juta m3	64.757.824.166,63	64.078.944.660,00	79.156.778.460,00	14.398.954.293,37			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Masyarakat dan Petani		96.517.486.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai																		
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				100 KM	2 KM	900.000.000,00	2.112.280.000,00	1.612.280.000,00	712.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				400 Unit	400 Unit	4.300.000.000,00	46.614.139.000,00	48.662.964.000,00	44.362.964.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH PAJAK ROKOK DANA BAGI HASIL (DBH) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			12.884.456.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai																		
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				307 KM	0 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan areal layanan irigasi*				15.935 Ha	80.48 %	101.546.338.167,38	44.731.698.880,00	72.047.587.680,00	-29.498.750.487,38			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		134.284.378.453,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				12 KM	2 KM	1.000.000.000,00	1.988.005.000,00	1.673.005.000,00	673.005.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH PAJAK ROKOK DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi				8900 Bendung	8 Bendung	1.000.000.000,00	1.636.010.000,00	1.611.010.000,00	611.010.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				120 KM	12 KM	900.000.000,00	18.906.010.000,00	28.095.510.000,00	27.195.510.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			1.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara				7900 Bendung	4 Bendung	700.000.000,00	585.095.000,00	615.095.000,00	-84.905.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			1.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN HIDROLOGI WILAYAH SUNGAI PULAU SUMBAWA							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP OPD**				**-**	**BB Nilai**	**80.397.100.558,99**	**63.863.722.467,00**	**66.362.554.397,00**	**14.510.514.945,01**							**94.907.615.504,00**	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				-	0 Dokumen	46.476.689.066,99	44.160.129.411,00	46.445.651.171,00	-31.037.895,99			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		47.603.592.113,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	57.510.000,00	37.320.000,00	37.320.000,00	-20.190.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			75.560.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*				-	1 Laporan	647.098.000,00	192.591.200,00	154.669.000,00	-492.429.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		748.220.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			11.220.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	721.878.200,00	88.000.000,00	88.290.000,00	-633.588.200,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		829.209.930,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	168.878.200,00	0,00	0,00	-168.878.200,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			194.209.930,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				- - -	1 Laporan 1 Paket 6 Paket	3.314.728.450,00	1.775.142.200,00	856.734.120,00	-2.457.994.330,00			- - -	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		2.890.077.660,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.800.000,00	5.800.000,00	2.630.000,00	-3.170.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.670.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	427.596.290,00	101.150.000,00	24.674.500,00	-402.921.790,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			437.642.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	9.600.000,00	4.800.000,00	-5.200.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			11.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	0 Dokumen	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	-2.520.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.898.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0 Laporan	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			160.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan*				-	0 Unit	6.162.930.510,00	38.711.840,00	1.000.000.000,00	-5.162.930.510,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		20.177.060.701,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				8 Unit	0 Unit	761.169.000,00	0,00	0,00	-761.169.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.191.594.350,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	0 Paket	52.770.000,00	0,00	0,00	-52.770.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			60.685.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	0 Unit	49.706.510,00	0,00	0,00	-49.706.510,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			252.265.851,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				-	1 Laporan	15.083.506.418,00	15.170.881.200,00	15.289.367.430,00	205.861.012,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		14.093.540.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	128.000.000,00	116.000.000,00	116.000.000,00	-12.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			155.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	30.010.000,00	18.300.000,00	7.110.000,00	-22.900.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			34.511.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.590.000.000,00	1.590.000.000,00	1.590.000.000,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.020.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*				-	4 Unit	6.646.837.714,00	1.850.751.356,00	2.116.495.156,00	-4.530.342.558,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		7.012.340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				16 Unit	16 Unit	117.720.000,00	66.480.000,00	51.240.000,00	-66.480.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			127.720.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-250.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi**				**-**	**40.29 %**	**166.304.162.334,01**	**108.810.643.540,00**	**151.204.366.140,00**	**64.497.702.518,99**							**230.801.864.853,00**	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Embung dan Penampungan Air Lainnya yang dipelihara* *Jumlah Tanggul dan Tebing sungai yang dibangun dan dipelihara*				-	6.00 Embung 6.00 Sungai	64.757.824.166,63	64.078.944.660,00	79.156.778.460,00	14.398.954.293,37			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Menigkatkan kualitas insfrastruktur sumber daya air untuk mendunkung pendayagunaan sumber daya air		96.517.486.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				22 Unit	22 Unit	581.109.032,63	220.650.120,00	1.478.978.320,00	897.869.287,37	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai																		
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				2 KM	2 KM	1.937.850.578,00	481.000.000,00	290.000.000,00	-1.647.850.578,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.383.030.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Bendung yang direhab* *Jumlah Daerah Irigasi yang direhab*				-	177,519 KM 2.00 Kegiatan	101.546.338.167,38	44.731.698.880,00	72.047.587.680,00	-29.498.750.487,38			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Menigkatkan kualitas insfrastruktur sumber daya air untuk mendunkung pendayagunaan sumber daya air		134.284.378.453,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				303.43 KM	177,519 KM	1.463.921.367,38	2.226.379.880,00	4.949.750.180,00	3.485.828.812,62	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah				3.613.634.453,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi				5 Bendung	5 Bendung	2.690.072.800,00	149.000.000,00	357.301.500,00	-2.332.771.300,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah				2.070.744.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				100000 KM	0 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah				2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara				4 Bendung	0 Bendung	272.344.000,00	0,00	0,00	-272.344.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah				500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		BALAI PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP OPD**				**-**	**BB Nilai**	**80.397.100.558,99**	**63.863.722.467,00**	**66.362.554.397,00**	**14.510.514.945,01**							**94.907.615.504,00**	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	1.343.432.200,00	587.515.260,00	411.347.520,00	-932.084.680,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		1.553.574.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			4.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	0 Dokumen	3.000.000,00	0,00	6.000.000,00	3.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			4.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	46.476.689.066,99	44.160.129.411,00	46.445.651.171,00	-31.037.895,99			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		47.603.592.113,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	6 Dokumen	47.840.000,00	25.440.000,00	27.445.000,00	-20.395.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			51.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0 Laporan	5.760.000,00	0,00	0,00	-5.760.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.312.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	647.098.000,00	192.591.200,00	154.669.000,00	-492.429.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		748.220.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	0 Laporan	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			9.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	721.878.200,00	88.000.000,00	88.290.000,00	-633.588.200,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		829.209.930,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				35 Orang	35 Orang	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.314.728.450,00	1.775.142.200,00	856.734.120,00	-2.457.994.330,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		2.890.077.660,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			3.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	**NON URUSAN**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	48.000.000,00	18.000.000,00	0,00	-48.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	**NON URUSAN**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	80.000.000,00	25.240.000,00	78.240.000,00	-1.760.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			85.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	6.162.930.510,00	38.711.840,00	1.000.000.000,00	-5.162.930.510,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		20.177.060.701,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				17 Paket	0 Paket	25.064.100,00	0,00	0,00	-25.064.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			26.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	4.295.205.900,00	0,00	0,00	-4.295.205.900,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			4.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	15.083.506.418,00	15.170.881.200,00	15.289.367.430,00	205.861.012,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		14.093.540.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	78.700.000,00	82.700.000,00	69.895.000,00	-8.805.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			88.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				14 Laporan	14 Laporan	426.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	-66.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.646.837.714,00	1.850.751.356,00	2.116.495.156,00	-4.530.342.558,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		7.012.340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	65.430.000,00	25.620.000,00	25.620.000,00	-39.810.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			53.620.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	30.000.000,00	15.000.000,00	7.225.000,00	-22.775.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi**				**-**	**40.29 %**	**166.304.162.334,01**	**108.810.643.540,00**	**151.204.366.140,00**	**64.497.702.518,99**							**230.801.864.853,00**	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Hasil Pengujian Kualitas Air yang Sesuai Standar*				-	100 %	64.757.824.166,63	64.078.944.660,00	79.156.778.460,00	14.398.954.293,37			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		96.517.486.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				70 Dokumen	70 Dokumen	500.000.000,00	60.000.000,00	69.700.000,00	-430.300.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat Kemantapan Jalan**				**-**	**76.04 %**	**856.115.041.872,00**	**28.752.264.600,00**	**122.905.890.400,00**	**-528.029.333.082,00**							**328.085.708.790,00**	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	*Persentase Hasil Pengujian Kualitas Konstruksi yang Sesuai Standar*				-	100 %	856.115.041.872,00	28.752.264.600,00	122.905.890.400,00	-733.209.151.472,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		328.085.708.790,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				90 Dokumen	90 Dokumen	500.000.000,00	86.000.000,00	100.300.000,00	-399.700.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI WILAYAH PULAU SUMBAWA BAGIAN TIMUR							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP OPD**				**-**	**BB Nilai**	**80.397.100.558,99**	**63.863.722.467,00**	**66.362.554.397,00**	**14.510.514.945,01**							**94.907.615.504,00**	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	1.343.432.200,00	587.515.260,00	411.347.520,00	-932.084.680,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PNS		1.553.574.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	32.664.800,00	16.510.000,00	16.312.400,00	-16.352.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	25.901.200,00	15.321.200,00	14.258.800,00	-11.642.400,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			27.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	20.175.200,00	13.795.200,00	12.441.200,00	-7.734.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	14.779.200,00	13.439.200,00	6.251.200,00	-8.528.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	46.476.689.066,99	44.160.129.411,00	46.445.651.171,00	-31.037.895,99			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PNS		47.603.592.113,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	71.573.000,00	35.640.000,00	35.640.000,00	-35.933.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			90.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*				4 Laporan	4 Laporan	647.098.000,00	192.591.200,00	154.669.000,00	-492.429.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PNS		748.220.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	32.067.000,00	24.667.000,00	17.917.000,00	-14.150.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah*				7 Paket	7 Paket	3.314.728.450,00	1.775.142.200,00	856.734.120,00	-2.457.994.330,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PNS		2.890.077.660,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.594.000,00	4.492.000,00	3.657.000,00	-3.937.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			8.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	4 Paket	0,00	0,00	41.350.000,00	41.350.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)			31.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	5.076.400,00	0,00	0,00	-5.076.400,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.780.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	62.624.000,00	22.624.000,00	36.325.000,00	-26.299.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah*				8 Unit	Unit	6.162.930.510,00	38.711.840,00	1.000.000.000,00	-5.162.930.510,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PNS		20.177.060.701,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	74.250.000,00	0,00	0,00	-74.250.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				8 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah*				12 Laporan	12 Laporan	15.083.506.418,00	15.170.881.200,00	15.289.367.430,00	205.861.012,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PNS		14.093.540.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	55.570.500,00	55.571.200,00	55.571.200,00	700,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			65.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.065.800,00	15.057.300,00	8.317.300,00	-6.748.500,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			16.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.508.686.200,00	1.470.000.000,00	1.470.000.000,00	-38.686.200,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.508.686.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				60 Unit	60 Unit	6.646.837.714,00	1.850.751.356,00	2.116.495.156,00	-4.530.342.558,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PNS		7.012.340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	67.430.000,00	92.430.000,00	117.430.000,00	50.000.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	501.272.200,00	101.471.000,00	101.471.000,00	-399.801.200,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			503.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				60 Unit	0 Unit	1.088.600.220,00	259.752.400,00	0,00	-1.088.600.220,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat Kemantapan Jalan**				**-**	**76.04 %**	**856.115.041.872,00**	**28.752.264.600,00**	**122.905.890.400,00**	**-528.029.333.082,00**							**328.085.708.790,00**	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	*Kondisi Mantap Jalan Provinsi* *Persentase Jalan dalam kondisi baik dan sedang*				473,46 Km	76.04 % 80.74 %	856.115.041.872,00	28.752.264.600,00	122.905.890.400,00	-733.209.151.472,00			-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	Masyarakat		328.085.708.790,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				-	1 Jembatan	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			1.647.405.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				473,46 KM	141,110154 923599 KM	7.036.168.058,00	1.171.421.700,00	7.648.637.500,00	612.469.442,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			78.841.267.450,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN HIDROLOGI WILAYAH SUNGAI PULAU SUMBAWA BAGIAN TIMUR							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP OPD**				**-**	**BB Nilai**	**80.397.100.558,99**	**63.863.722.467,00**	**66.362.554.397,00**	**14.510.514.945,01**							**94.907.615.504,00**	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*				-	12 DOKUMEN	1.343.432.200,00	587.515.260,00	411.347.520,00	-932.084.680,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		1.553.574.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	10.000.000,00	24.645.900,00	21.165.900,00	11.165.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000,00	22.844.750,00	11.666.750,00	6.666.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	37.395.450,00	26.526.950,00	16.526.950,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	24.170.400,00	14.197.000,00	4.197.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	46.476.689.066,99	44.160.129.411,00	46.445.651.171,00	-31.037.895,99			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		47.603.592.113,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				10 Dokumen	10 Dokumen	10.000.000,00	29.040.000,00	29.040.000,00	19.040.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah*				-	6 %	647.098.000,00	192.591.200,00	154.669.000,00	-492.429.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		748.220.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				30 Laporan	30 Laporan	20.000.000,00	22.620.000,00	15.260.000,00	-4.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	721.878.200,00	88.000.000,00	88.290.000,00	-633.588.200,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		829.209.930,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				10 Unit	0 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				-	90 %	3.314.728.450,00	1.775.142.200,00	856.734.120,00	-2.457.994.330,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		2.890.077.660,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5.000.000,00	3.552.500,00	2.772.500,00	-2.227.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				23 Paket	23 Paket	130.000.000,00	127.380.460,00	18.262.760,00	-111.737.240,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3.000.000,00	5.000.000,00	2.910.000,00	-90.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	0 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	5.000.000,00	48.880.000,00	25.925.000,00	20.925.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				-	90 %	15.083.506.418,00	15.170.881.200,00	15.289.367.430,00	205.861.012,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		14.093.540.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	30.000.000,00	21.150.000,00	21.150.000,00	-8.850.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	10.000.000,00	13.220.000,00	12.390.000,00	2.390.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	840.000.000,00	1.418.400.000,00	1.418.400.000,00	578.400.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK HOTEL	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				-	unit	6.646.837.714,00	1.850.751.356,00	2.116.495.156,00	-4.530.342.558,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		7.012.340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				10 Unit	0 Unit	5.000.000,00	3.810.000,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	1 Unit	2.000.000,00	0,00	200.000.000,00	198.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	0 Unit	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi**				**-**	**40.29 %**	**166.304.162.334,01**	**108.810.643.540,00**	**151.204.366.140,00**	**64.497.702.518,99**							**230.801.864.853,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Kapasitas Daya tampung air*				-	8.11 juta m3	64.757.824.166,63	64.078.944.660,00	79.156.778.460,00	14.398.954.293,37			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Menigkatkan kualitas insfrastruktur sumber daya air untuk mendunkung pendayagunaan sumber daya air		96.517.486.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				23 Unit	1 Unit	292.777.778,00	3.098.058.800,00	2.309.679.400,00	2.016.901.622,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai																		
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				200000 KM	8 KM	1.500.000.000,00	944.831.740,00	937.971.740,00	-562.028.260,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan areal layanan irigasi*				-	80.48 %	101.546.338.167,38	44.731.698.880,00	72.047.587.680,00	-29.498.750.487,38			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	Menigkatkan kualitas insfrastruktur sumber daya air untuk mendunkung pendayagunaan sumber daya air		134.284.378.453,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				500000 KM	0 KM	2.570.000.000,00	0,00	0,00	-2.570.000.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi				7 Bendung	0 Bendung	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				147000 KM	15 KM	10.000.000,00	0,00	609.000.000,00	599.000.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara				7 Bendung	0 Bendung	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	J U M L A H								**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT						**74.361.580.133,00**							**85.510.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**74.361.580.133,00**							**85.510.000.000,00**	
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**74.361.580.133,00**							**85.510.000.000,00**	
1.	**5.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**12.593.515.535,00**						**-**	**14.460.000.000,00**	
	5.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	75.214.000,00			-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-	-	130.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1-12 Dokumen	27.005.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		30.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1-12 Dokumen	14.670.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		30.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1-12 Dokumen	5.520.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1-12 Dokumen	5.065.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1-12 Dokumen	5.065.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1-12 Laporan	7.889.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1-12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		30.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.309.696.435,00			-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-	-	2.600.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33/12 Orang/ Bulan	2.258.525.935,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		2.500.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1-12 Dokumen	7.170.500,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1-12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1-12 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		30.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1-12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1-12 Laporan	16.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		30.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	24.500.000,00			-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-	-	60.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1-12 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	4.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	12.500.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		30.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	179.530.800,00			-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-	-	270.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	25.100.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		50.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	5.430.800,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				14 Orang	144.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		200.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.433.540.400,00			-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-	-	2.100.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1-12 Paket	12.175.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		30.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.125.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	75.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		100.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.083.800,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		30.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	23.656.600,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		30.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	100.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		200.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	350.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		500.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	650.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		1.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	200.500.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		200.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	4.450.113.900,00			-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-	-	4.500.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	2.883.649.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		2.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	653.267.400,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		1.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	163.197.500,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		500.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	750.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		1.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.912.000.000,00			-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-	-	3.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	528.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		1.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.384.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		2.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.208.920.000,00			-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-	-	1.800.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	200.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		300.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1-12 Unit	438.850.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Kediri Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		500.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	220.070.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		500.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	350.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		500.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
2.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**61.768.064.598,00**						**-**	**71.050.000.000,00**	
	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-			-	2.831.897.920,00			-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-	-	3.900.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan														
			Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola				1 Dokumen	612.447.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		900.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.02.1.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan														
			Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan				1-12 Rekomendasi	716.074.400,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		1.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.02.1.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan				1 Laporan	1.503.376.520,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		2.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	-			-	53.645.573.700,00			-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-	-	55.150.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	2.014.875.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		2.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.02.1.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1-12 Dokumen	49.939.069.500,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		50.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.02.1.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	1.064.857.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		2.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.02.1.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				1 Dokumen	126.772.200,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		150.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.02.1.02.0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja				1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		1.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-			-	2.826.840.578,00			-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-	-	7.500.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.02.1.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 Dokumen	1.072.742.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		2.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen	1.046.292.078,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		2.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan														

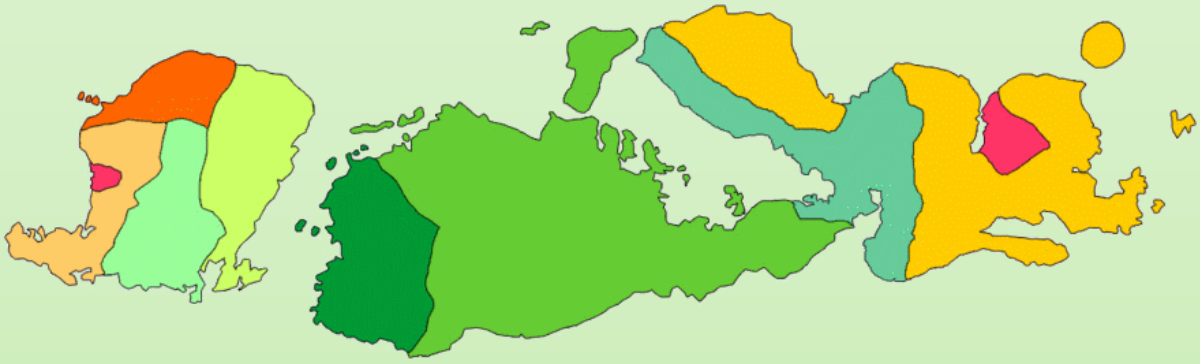
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	183.240.100,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		2.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.02.1.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		500.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.02.1.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral				1 Dokumen	134.356.400,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		500.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	140.210.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		500.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-			-	2.463.752.400,00			-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-	-	4.500.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				1 Laporan	600.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		1.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	213.752.400,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		500.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	1.050.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		2.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	600.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		1.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	J U M L A H							**74.361.580.133,00**							**85.510.000.000,00**	

RENJA PERUBAHAN

DINAS ESDM PROVINSI NTB

TAHUN 2025





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jl. Majapahit No. 40 Mataram Telepon (0370) 621356 Faximile (0370) 625766

Dinas ESDM Provinsi NTB @DESDMNTB @desdmntb desdm@ntbprov.go.id www.desdm.ntbprov.go.id



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahwa untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi menuju pemilihan umum Kepala Daerah secara nasional pada Tahun 2024 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. dengan tema "Terwujudnya Transformasi Ekonomi melalui peningkatan Produktifitas Daerah menuju NTB sebagai Lokomotif pertumbuhan ekonomi regional Bali dan Nusa Tenggara yang inklusif dan berkelanjutan dan Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan yang Lestari dan Asri".

Perencanaan Pembangunan daerah pada periode Tahun 2024 - 2025 terdiri atas 3 (Tiga) Pilar Utama dan 3 (Tiga) Pilar Pendukung. Tiga Pilar Utama yaitu : Dimensi Pembangunan Manusia (People), Dimensi Pembangunan Lingkungan (Planet), dan Dimensi Pembangunan Kesejahteraan (Prosperity). Tiga Pilar Pendukung mengikuti Dimensi Tata Kelola (Governance), Dimensi Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan Dimensi Daya Saing Daerah (Competitiveness). Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 juga disusun berdasarkan Surat Edaran Nomor 820 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025 secara analisis data eksisting, capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, usulan program/kegiatan dari masyarakat, dan sinkronisasi terhadap dokumen-dokumen perencanaan lainnya yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing program/kegiatan.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2025. Harapannya dokumen ini dapat menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi NTB.

Mataram, Juni 2025

Plt. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Paraf Hierarki	
Sekretaris Dinas	
Kasubag. Keuangan	
Pengetik Naskah	

H. WIRAWAN, S. Si., MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19741008 199902 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iii
DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 1
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 22
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 25
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 38

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 54

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 54
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 64
3.3. Program dan Kegiatan 65

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 89

BAB V PENUTUP 98



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Hubungan antara Dokumen Rencana Kerja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya. 1
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi NTB 6
Gambar 2.2. Anggaran Renstra, Renja dan Realisasi Keuangan Tahun 2020-2024 8
Gambar 2.3 Komposisi Operasional dan Pegawai Tahun 2020-2024 9
Gambar 2.4. Komposisi Renja dengan Realisasi Keuangan Tahun 2020 – 2024..... 9
Gambar 2.5. Capaian Indikator Utama Rasio Elektrifikasi Tahun 2020-2024 10
Gambar 3.1. Tujuan dan Sasaran dalam mendukung Misi Pembangunan NTB dalam RPD Tahun 2024-2026..... 55
Gambar 3.2 Peta Cekungan Air Tanah Provinsi NTB Tahun 2024 61
Gambar 3.3 Peta Zona Pengendalian Pengambilan dan Perlindungan Air Tanah..... 62
Gambar 3.4 Perkembangan Kondisi Kelistrikan NTB Tahun 2017-2023 62
Gambar 3.5 Capaian Indikator Kinerja Utama Rasio Elektrifikasi Thn 2018-2023..... 63
Gambar 3.6 Jumlah RTS yang belum mempunyai listrik dan menggunakan listrik Secara bersama pada tahun 2024..... 63
Gambar 3.7 Cascading Renstra Dinas ESDM Tahun 2024 - 2026..... 64



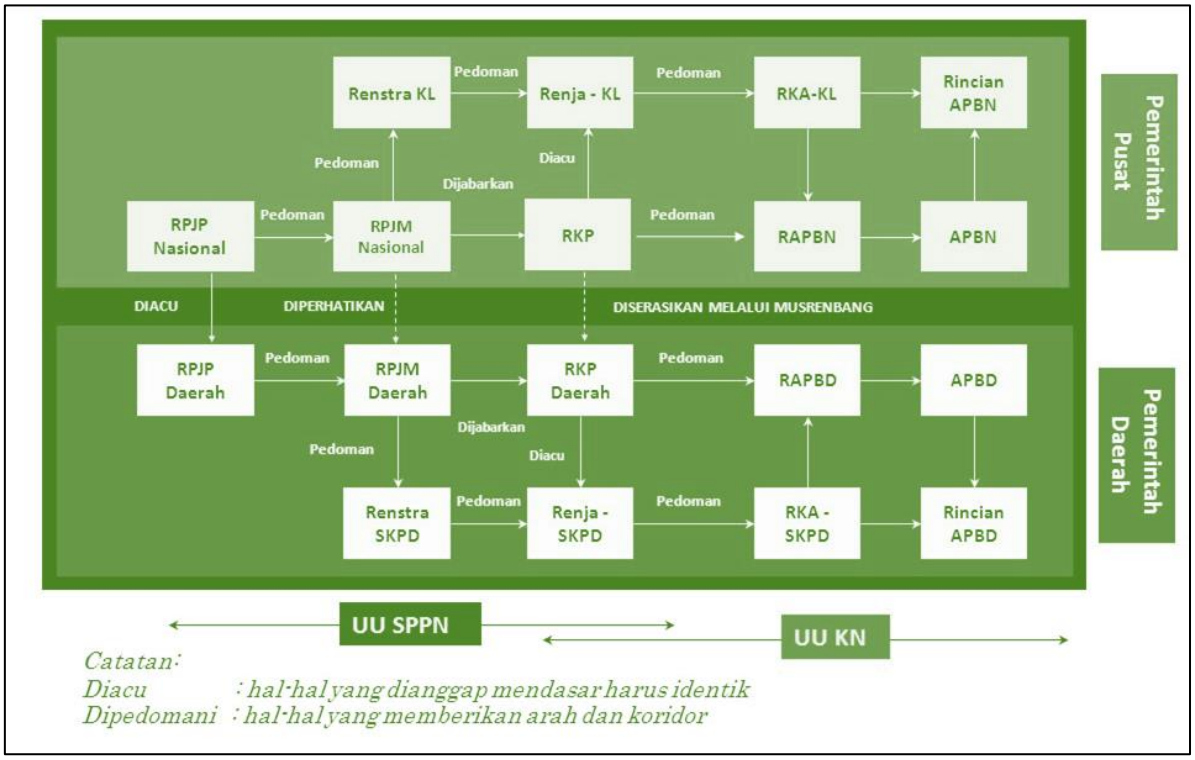
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Daftar Personil Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2024 5
Tabel 2.2. Aset yang dikelola Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2024 7
Tabel 2.3. Daftar Sarana dan Prasarana Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2024..... 7
Tabel 2.4. Capaian Indikator Kinerja Utama Rasio Elektrifikasi 2015-2024 10
Tabel 2.5. Rekapitulasi Bekanja Operasional melalui APBD Anggaran Tahun 2023..... 11
Tabel 2.6 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas ESDM Provinsin NTB dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2024..... 17
Tabel 2.7. Indikator Kinerja PD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Urusan Pemerintahan Bidang ESDM Tahun 2024-2026..... 22
Tabel 2.8. Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas ESDM Tahun 2024-2026 23
Tabel 2.9. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTB 24
Tabel 2.10. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang ESDM..... 29
Tabel 2.11. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Provinsi NTB 38
Tabel 3.1. Sasaran Jangka Menengah Tahun 2024-2026 56
Tabel 3.2. Potensi Cekungan Air Tanah di Provinsi NTB 61
Tabel 3.3. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas ESDM Prov. NTB Tahun 2024-2026..... 64
Tabel 3.4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada Tahun 2025 dan Prakiraaan Maju Tahun 2026..... .. 68
Tabel 4.1 Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas ESDM Tahun 2025..... 92

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang disusun dengan berpedoman pada Rancangan Rencana Strategis Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah tahap pertama dalam dokumen RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dengan Tema **"Terwujudnya Kualitas Lingkungan yang Lestari, Bersih, Ramah dan Berkelanjutan dan Terwujudnya Kemantapan Infrastruktur dan Konektifitas antar wilayah yang merata dan berkelanjutan".** Rencana Kerja ini disusun berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 secara analisis data eksisting, capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, usulan program/kegiatan dari masyarakat, dan sinkronisasi terhadap dokumen-dokumen perencanaan lainnya yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Program/Kegiatan Perubahan Dinas Tahun Anggaran 2025. Adapun hubungan antara dokumen Rencana Kerja dengan dokumen perencanaan lainnya pada level Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dapat dijelaskan pada diagram di bawah ini :



Gambar 1.1 Hubungan antara Dokumen Rencana Kerja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2. Landasan Hukum



Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2025 diantaranya adalah:

1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
9. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tengara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
13. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;



14. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasia Pemberian Perizinan Berusaha dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), yang dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukthiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26);
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran



Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 114);

29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044;
30. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 dan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
31. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2025 ini adalah:

1. Untuk memperoleh gambaran keterkaitan dan keselaraan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan tahun 2023, terhadap pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024, dan rencana perubahan program/kegiatan tahun 2025;
2. Untuk menentukan program/kegiatan untuk tahun 2026 yang tepat berdasarkan skala prioritas sesuai dengan tema utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahap Pertama Tahun 2025-2029 **"Terwujudnya Kualitas Lingkungan yang Lestari, Bersih, Ramah dan Berkelanjutan dan Terwujudnya Kemantapan Infrastruktur dan Konektifitas antar wilayah yang merata dan berkelanjutan",** terdapat dua Misi yang terkait langsung dengan tugas dan dan kewenangan Dinas ESDM sebagai perangkat daerah yaitu Misi Kelima **"Memperkuat Sistem Mitigasi Bencana, Pengelolaan Sumber Daya Alam yang ramah lingkungan dan Investasi berkelanjutan "** dan Misi Keenam yaitu **"Memantapkan pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas antar Wilayah yang berwawasan lingkungan serta memastikan penegakan tata ruang yang berkelanjutan".**
3. Sebagai pedoman bagi Dinas dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2025.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2025 ini adalah agar target pembangunan dalam urusan pemerintahan bidang ESDM Tahun 2025 dapat tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 maupun Rencana Strategis Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU



2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB merupakan perangkat daerah yang terdiri atas Dinas Induk yang terletak di Kota Mataram dan Cabang Dinas yang berada di Kabupaten Sumbawa. Tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi dilaksanakan oleh jajaran aparatur dengan pendidikan terendah SLTP dan tertinggi pasca sarjana (S2). Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, personil Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB sebanyak 63 Aparatur Sipil Negara, yang terdiri dari 11 orang golongan IV, 39 orang golongan III, dan 10 orang golongan II dan 3 orang PPPK. Berdasarkan pendidikan, terdapat 12 orang pasca sarjana (S2), 29 orang sarjana/setingkat sarjana (S1)/D4, 3 Orang Diploma D-3, 16 orang berpendidikan SLTA dan 3 orang berpendidikan SLTP, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1. Daftar Personil Dinas ESDM Provinsi NTB per 31 Desember 2024

URAIAN	TINGKAT PENDIDIKAN					JUMLAH	PANGKAT/ GOLONGAN				JUMLAH
	S2	S1	DIII	SLTA	SLTP		IV	III	II	PPPK	
Eselon II	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
Eselon III	3	1	-	-	-	4	4	-	-	-	4
Eselon IV	-	4	-	-	-	4	-	4	-	-	4
JFT	7	11	3	-	-	21	5	11	1	3	19
JFU	1	13	-	16	3	33	1	23	9	-	23
JUMLAH	12	29	3	16	3	63	11	39	10	3	63

Pemetaan terhadap sumber daya manusia perangkat daerah penting dilakukan untuk menghitung kebutuhan personil yang dibutuhkan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas berdasarkan analisis jabatan. Perhitungan kebutuhan pegawai dilakukan dengan berpedoman pada :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tetang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional

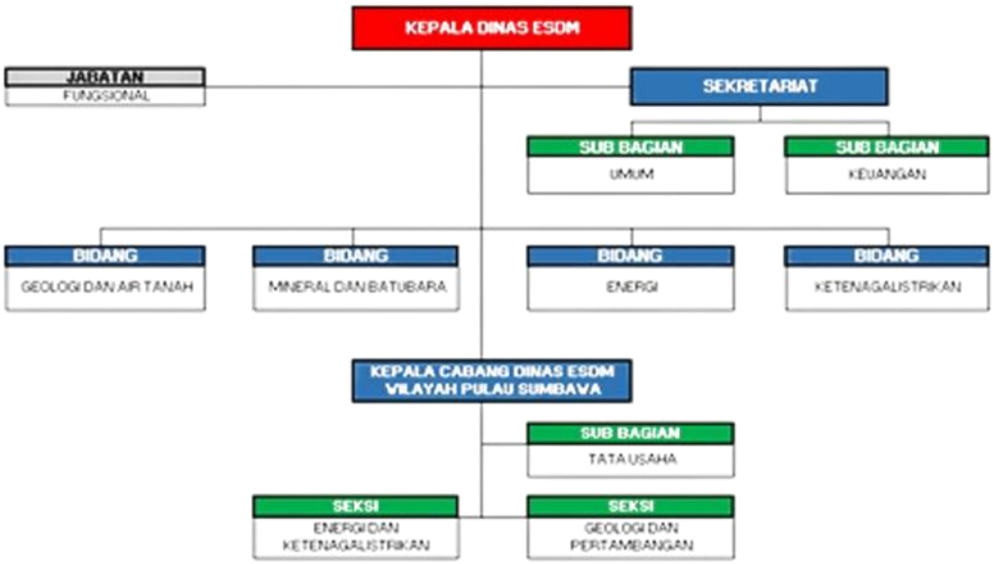
Susunan organisasi Dinas ESDM Provinsi NTB sesuai Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB serta Pergub Nomor 8 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisaasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi NTB terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:
   - Sub Bagian Keuangan;
   - Sub Bagian Umum.
c. Bidang Geologi dan Air Tanah, terdiri dari:
d. Bidang Mineral dan Batubara, terdiri dari:
e. Bidang Energi, terdiri dari:

f. Bidang Ketenagalistrikan terdiri dari:
g. Cabang Dinas;
   Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Pulau Sumbawa
   - Sub Bagian Tata Usaha;
   - Seksi Geologi dan Pertambangan;
   - Seksi Energi dan Ketenagalsitrikan;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.
   - Jabatan fungsional Surveyor Pemetaan;
   - Jabatan fungsional Perencana;
   - Jabatan fungsional Analis Kebijakan;
   - Jabatan fungsional Penyelidik Bumi;
   - Jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
   - Jabatan fungsional Arsiparis.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, sesuai Pergub Nomor 8 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisaasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi NTB sebagai berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi NTB Berdasarkan Pergub Nomor 8 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisaasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi NTB.

Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB sampai dengan 31 Desember 2024 memiliki asset yang terdiri dari tanah seluas 6.258 m^2 yang didalamnya terdapat Gedung Kantor, perpustakaan, tempat ibadah, tempat olahraga, gudang, garasi, bengkel, laboratorium dan pos jaga. Sebagai penunjang kerja terdapat peralatan dan mesin yang terdiri dari kendaraan, alat-alat kantor, alat rumah tangga, alat komputer, meja dan kursi kerja, alat komunikasi, alat studio dan alat peraga dalam jumlah yang mencukupi. Selama lima belas tahun terakhir Dinas ESDM Provinsi NTB juga melaksanakan pembangunan dalam bentuk hibah dan bantun sosial kepada masyarakat atau badan hukum yang masuk dalam kategori jalan, irigasi dan jaringan berupa pembangunan digester biogas, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) tersebar atau *Solar Home System* (SHS) dam PLTS Komunal, pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH), penerangan jalan umum PJU-



LED , sumur bor dalam dan pemasangan jaringan listrik bagi rumah tangga miskin. Nilai aset yang dikelola Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.2 Aset yang dikelola Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2024

Uraian	2023 (Rp)
a. Tanah	4.067.700.000,00
b. Peralatan dan Mesin	7.646.738.499,44
c. Gedung dan Bangunan	8.050.968.762,84
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	669.979.600,00
e. Aset Tetap Lainnya	105.573.900,00
f. Konstruksi dalam pengerjaan	34.787.000,00
g. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(11.643.739.285,44)
Jumlah	8.940.648.476,84

Sumber : Laporan Keuangan Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2024

Sebagian besar Prasarana dan sarana kerja tersebut sudah difungsikan secara maksimal namun karena tugas dan fungsi Dinas ESDM yang begitu luas sehingga prasarana dan sarana kerja tersebut masih memerlukan penambahan terutama peralatan komputer, peralatan studio serta alat transportasi baik kendaraan roda empat maupun roda dua dan peralatan teknis penunjang lainnya.

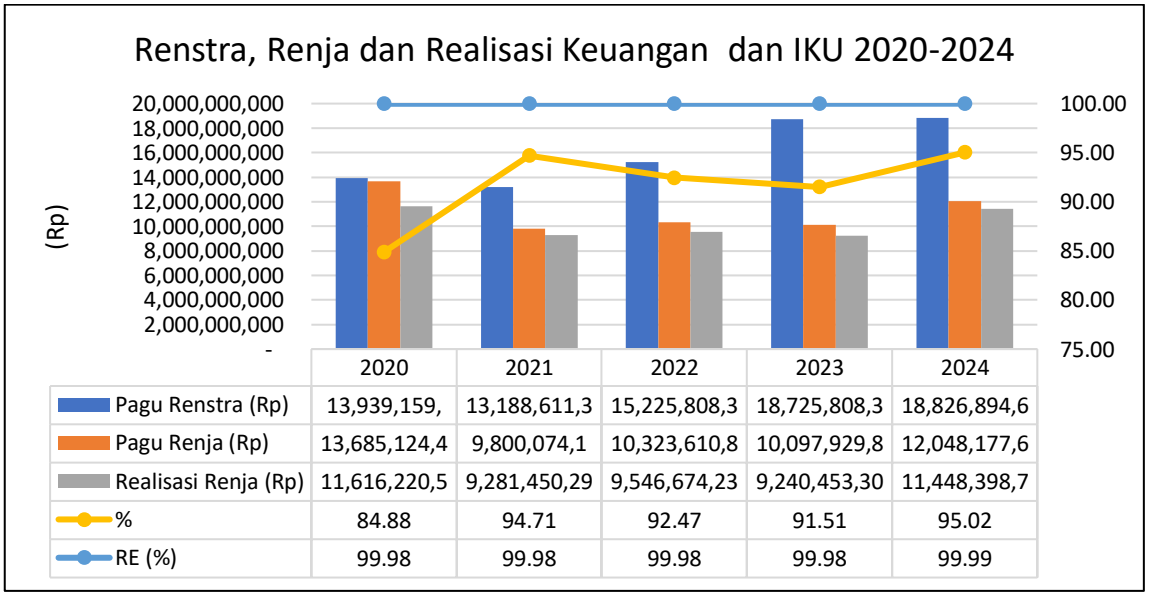
Dukungan sarana dan prasarana kerja agar program kegiatan Dinas ESDM dapat berjalan sesuai dengan target capaian kinerja yang diinginkan. Secara umum dapat digambarkan bahwa prasarana dan sarana Dinas ESDM tahun 2024 sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3. Daftar Sarana dan Prasarana Dinas ESDM Tahun 2024

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH	KONDISI		
				BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT
I	ASET TETAP TAK BERGERAK					
A	Tanah Persel		6,258			
I	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M^2	6,258	Baik	-	-
B	Bangunan Gedung		15			
1	Bagunan Gedung Kantor Permanen	Unit	4	4	-	-
2	Bagunan Gedung Tempat Ibadah	Unit	1	1	-	-
3	Bagunan Gedung Tertutup Permanen	Unit	2	2	-	-
4	Bagunan Perpustakaan	Unit	1	1	-	-
5	Bagunan Pos jaga	Unit	1	1	-	-
6	Bagunan Tempat Kerja Lainya	Unit	3	3	-	-
7	Bagunan Garasi	Unit	2	2	-	-
8	Bagunan Gedung Olah Raga Terbuka Permanen	Unit	1	1	-	-
II	ASET TETAP BERGERAK					
A	Kendaraan Bermotor		22			
1	Kendaraan Roda 4	Unit	9	3	5	1

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH	KONDISI		
				BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT
2	Kendaraan Roda 2	Unit	13	5	6	2
B	Mesin dan Peralatan		326			
1	Alat Bengkel Bermesin	Unit	4	4	-	-
2	Alat Ukur	Unit	19	14	5	-
3	Mesin Ketik	Unit	7	6	1	-
4	Mesin Stensil	Unit	1	1	-	-
5	Overhead ProyektorMesin Ketik	Unit	7	6	-	-
7	Sound System	Unit	8	6	1	-
8	Personal Komputer	Unit	43	14	25	-
9	Peralatan Personal Komputer	Unit	57	24	33	-
10	Alat Studio	Unit	4	1	1	2
11	Alat Komunikasi	Unit	19	18	1	-
14	Peralatan Laboratorium	Unit	162	136	19	4
15	Alat Peraga	Unit	15	14	1	-
C	Moubelair dan Perlengkapan		632			-
1	Peralatan Penyimpan Perlengkapan Kantor	Unit	125	-	-	-
3	Meubelair	Unit	476	289	190	-
4	Alat Pengukuran Waktu	Unit	5	2	-	3
6	Peralatan Pendingin	Unit	28	22	4	-

Pembiayaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seluruhnya berasal dari APBD Provinsi NTB dimana alokasi anggaran untuk sektor Dinas ESDM menurun antara kurun waktu 2020-2024, dari Rp. 13.685.124.455, - pada Tahun 2020 menjadi Rp. 12.048.177.653,- pada Tahun 2024.



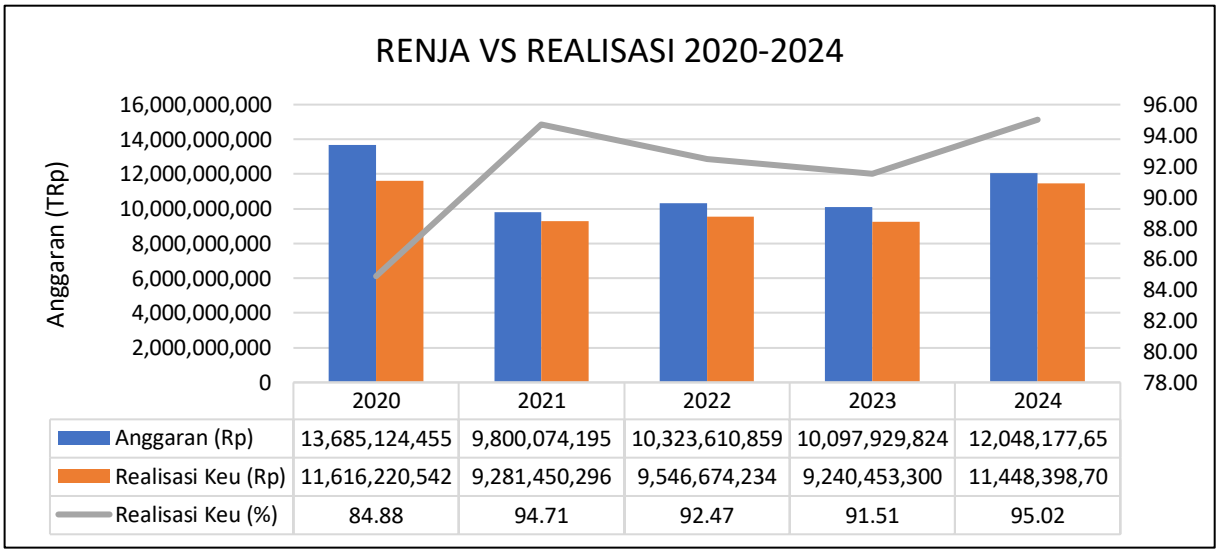
	2020	2021	2022	2023	2024
Pagu Renstra (Rp)	13,939,159,	13,188,611,3	15,225,808,3	18,725,808,3	18,826,894,6
Pagu Renja (Rp)	13,685,124,4	9,800,074,1	10,323,610,8	10,097,929,8	12,048,177,6
Realisasi Renja (Rp)	11,616,220,5	9,281,450,29	9,546,674,23	9,240,453,30	11,448,398,7
%	84.88	94.71	92.47	91.51	95.02
RE (%)	99.98	99.98	99.98	99.98	99.99

Gambar 2.2 Anggaran Renstra , Renja dan Realisasi Keuangan 2020-2024





Gambar 2.3 Komposisi Belanja Operasional dengan Belanja Pegawai 2020-2024

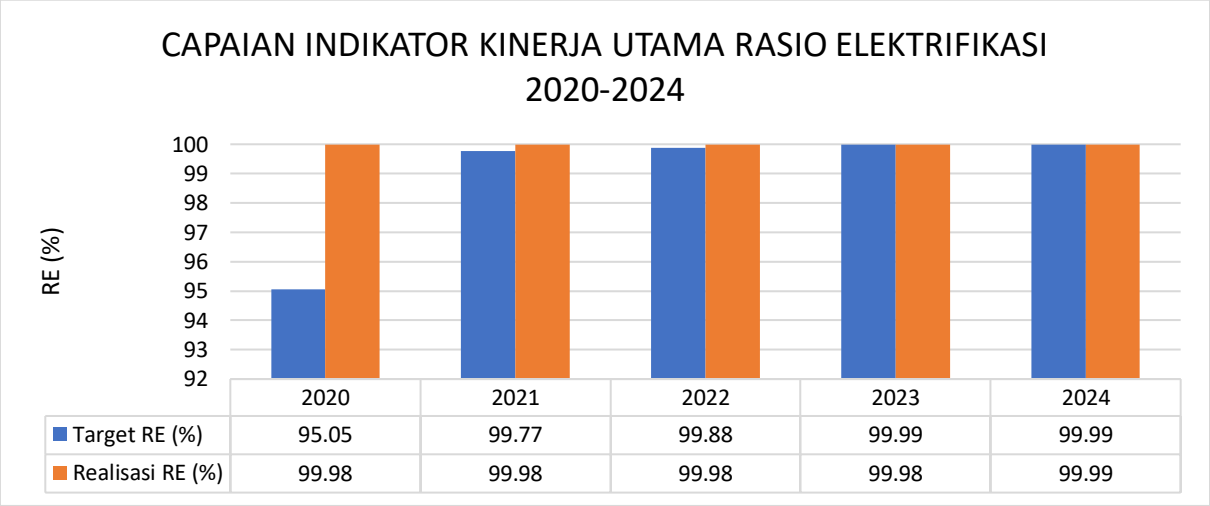


Gambar 2.4 Komposisi Renja dengan Realisasi Keuangan 2020-2024

Berdasarkan target kinerja pelayanan Dinas ESDM dapat digambarkan dalam tingkat capaian Indikator Kinerja Utama Dinas ESDM periode tahun 2020-2024. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2024-2026, Indikator Kinerja Utama Dinas ESDM adalah :

1. Bauran Energi Baru Terbarukan. Menggambarkan Penggunaan Energi Baru Terbarukan dibandingkan Penggunaan Energi Listrik secara Keseluruhan.
2. Produktifitas Lapangan Usaha Ekonomi Sektor Pertambangan dan Penggalian. Menggambarkan Produktifitas Sektor Pertambangan dan Penggalian pada PDRB NTB.
3. Produktifitas Lapangan Usaha Ekonomi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian. Menggambarkan Produktifitas Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian pada PDRB NTB.
4. Produktifitas Lapangan Usaha Ekonomi Sektor Pengadaan Listrik dan Gas. Menggambarkan Produktifitas Sektor Pengadaan Listrik dan Gas pada PDRB NTB.

Selama lima tahun terakhir (2020-2024) Provinsi Nusa Tenggara Barat berhasil meningkatkan Rasio Elektrifikasi sebesar 0,01% dari 99,98% pada tahun 2020 meningkat menjadi 99,99% pada Tahun 2024 atau tahun kelima masa RPJMD Tahun 2020-2024.



Gambar 2.5 Capaian Indikator Utama Rasio Elektrifikasi 2020-2024

Sejak tahun 2014 Pemerintah telah menetapkan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW di seluruh Indonesia. Untuk Provini NTB direncanakan akan dibangun beberapa pembangkit listrik yang diharapkan akan menambah daya sebesar 500 MW sampai dengan akhir tahun 2024 baik melalui PLN maupun melalu *Independent Power Producer* (IPP). Pembanguanan pembangkit juga akan disertai dengan penambahan kapasitas jaringan listrik untuk meningkatkan keandalan listrik hingga sampai ke rumah-rumah masyarakat pengguna listrik.

Tabel 2.4 Capaian Indikator Kinerja Utama Rasio Elektrifikasi 2015 – 2024

No	Rasio Elektrifikasi	Satuan	Tahun										
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024
1	Target	%	68,01	70,43	72,67	75,00	94,46	95,09	99,77	99,88	99,99	99,99	99,99
2	Realisasi	%	72,67	77,89	85,10	93,83	99,55	99,98	99,98	99,98	99,99	99,99	99,99
3	Capaian	%	106,85	110,59	117,10	125,11	105,39	105,14	100,21	100,10	100,00	100,00	100,00

Sumber : Diolah dari Data PLN NTB dan Dinas ESDM Provinsi NTB

Capaian target rasio elektrifikasi ditopang adanya faktor ketersediaan daya listrik yang semakin meningkat sejak tahun 2015. Peran Dinas ESDM terhadap capaian indikator rasio elektrifikasi tersebut terkait dengan koordinasi yang baik antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, PLN Wilayah NTB dan seluruh *stakehorder* terkait sesuai dengan fungsinya masing- masing. Peningkatan rasio elektrifikasi juga dilaksanakan melalui program . Program pemasangan listrik murah dan hemat merupakan program Kementerian ESDM sejak tahun 2012 hingga tahun 2015, kemudian Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas ESDM melaksanakannya sejak tahun 2014 hingga saat ini, jumlah pemasangan listrik murah dan hemat hingga tahun 2024 telah dinikmati oleh 36.023 Rumah Tangga. Program tersebut berfokus terhadap masyarakat miskin yang rumahnya sudah dilalui jaringan listrik namun tidak mampu untuk memasang listrik secara mandiri.



Dinas ESDM Provinsi NTB selaku perangkat daerah mempunyai tanggungjawab terhadap peningkatan Indikator Kinerja Kunci Rasio Elektrifikasi sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2020-2024. Rasio Elektrifikasi merupakan jumlah rumah tangga yang sudah mendapatkan akses listrik terhadap jumlah seluruh rumah tangga yang ada.

Sejak tahun 2018 Rasio Desa Berlistrik Provinsi NTB sudah mencapai 100%, namun demikian belum seluruh desa terjangkau oleh jaringan listrik PLN terutama di Kabupaten Sumbawa masih terdapat 5 desa yang mendapatkan listrik dari sumber non PLN menggunakan pembangkit energi baru terbarukan. Berdasarkan data tahun 2024 masih terdapat 34 Dusun yang belum dilalui oleh jaringan listrik PLN yang berada pada wilayah pegunungan dan pulau-pulau kecil berpenduduk. Kendala utama belum masuknya jaringan listrik PLN pada 34 Dusun tersebut dikarenakan infrastruktur jalan Kabupaten yang tidak dapat mendukung bagi kegiatan pembangunan jaringan listrik PLN, untuk itu diperlukan *cross cutting* program dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan PLN sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Tabel 2.5 Rekapitulasi Program/Kegiatan Anggaran 2023
yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi NTB

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu DPPA	Realisasi	Keu (%)	Fisik (%)
3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**			**10,097,929,824**	**9,240,453,300**	**91.51**	**99.65**
3.29.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP**	**81,19**	**9,834,183,524**	**8,098,741,549**	**91.30**	**99.64**
3.29. 01. 1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**9**	**282,954,600**	**247,012,135**	**87.30**	**88.44**
3.29. 01. 1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	86,824,200	80,158,004	93.32	94.29
3.29. 01. 1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Laporan	1	8,968,600	7,150,800	79.73	79.73
3.29. 01. 1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Laporan	1	15,544,800	9,314,300	59.92	59.92
3.29. 01. 1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Laporan	1	13,384,600	11,520,000	86.07	86.07
3.29. 01. 1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Laporan	1	15,893,100	0	0.00	0.00
3.29. 01. 1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan	1	14,859,300	13,578,300	91.38	91.73
3.29. 01. 1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	127,480,000	125,290,731	98.28	99.44
3.29. 01. 1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Laporan**	**1**	**8,151,322,864**	**7,373,594,872**	**90.46**	**100.00**
3.29. 01. 1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ASN	73	8,097,142,284	7,322,400,292	90.43	100.00
3.29. 01. 1.02.02	Peyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	32,660,000	29,700,000	90.94	100.00
3.29.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	1	2,127,900	2,127,900	100.00	100.00
3.29.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan	1	12,761,600	12,735,600	99.80	100.00
3.29.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	6,631,080	6,631,080	100.00	100.00
3.29. 01. 1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Laporan**	**1**	**5,302,700**	**5,302,700**	**100.00**	**100.00**
3.29.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1,396,000	1,396,000	100.00	100.00
3.29.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	1,241,000	1,241,000	100.00	100.00
3.29.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	1,246,500	1,246,500	100.00	100.00



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu DPPA	Realisasi	Keu (%)	Fisik (%)
3.29.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	1	1,419,200	1,419,200	100.00	100.00
3.29.01.1.03.07							
3.29. 01. 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Laporan**	**1**	**2,866,500**	**2,866,500**	**100.00**	**100.00**
3.29.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Laporan	1	1,556,500	1,556,500	100.00	100.00
3.29.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan	1	1,310,000	1,310,000	100.00	100.00
3.29. 01. 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Laporan**	**1**	**196,862,480**	**195,376,030**	**99.24**	**100.00**
3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	11	3,040,800	3,040,800	100.00	100.00
3.29.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	37	3,300,000	3,300,000	100.00	100.00
3.29.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis	10	4,320,800	3,960,000	91.67	100.00
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis	7	3,820,000	3,820,000	100.00	100.00
3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jenis	16	3,604,680	3,604,680	100.00	100.00
3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Orang	581	7,250,000	6,665,000	91.93	100.00
3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tahun	1	171,527,000	170,985,550	99.68	100.00
3.29. 01. 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Unit**	**7**	**24,750,000**	**20,697,000**	**83.62**	**100.00**
3.29.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	7	24,750,000	20,697,000	83.62	100.00
3.29. 01. 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tahun**	**1**	**485,398,480**	**471,486,367**	**97.13**	**99.90**
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat	2596	8,590,480	7,637,980	88.91	94.50
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening	3	98,952,000	90,131,388	91.09	100.00
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rekening	3	377,856,000	373,716,999	98.90	100.00
3.29. 01. 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tahun**	**1**	**148,960,000**	**139,417,206**	**93.59**	**100.00**
3.29.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	7	47,860,000	45,333,710	94.72	100.00
3.29.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	6	92,000,000	85,023,496	92.42	100.00
3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	9	9,100,000	9,060,000	99.56	100.00
Sasaran Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah							
3.29.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**%**	**100**	**102,683,000**	**101,658,733**	**99.00**	**99.33**
3.29.02.1.01	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi**	**Laporan**	**3**	**43,000,000**	**42,995,000**	**99.99**	**100.00**
3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Dokumen	3	43,000,000	42,995,000	99.99	100.00
3.29.02.1.02	**Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, Dan Izin Pengusahaan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi**	**Laporan**	**10**	**35,908,733**	**34,287,600**	**98.60**	**99.80**
3.29.02.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Rekomendasi	164	9,550,000	9,550,000	95.50	99.70
3.29.02.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Izin	15	25,000,000	24,960,733	99.84	99.84
3.29.02.1.03	**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Provinsi**	**Laporan**	**3**	**24,683,000**	**24,153,000**	**97.85**	**100.00**
	Pengendalian dan Pengawasan	Laporan	3	24,683,000	24,153,000	97.85	100.00



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu DPPA	Realisasi	Keu (%)	Fisik (%)
3.29.02.1.03.03	Pemanfaatan Air Tanah						
Sasaran Meningkatnya Pengendalian Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara							
3.29.03	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**Wilayah Izin Pertambangan**	**46**	**81,997,000**	**81,074,615**	**98.88**	**100,00**
3.29.03.1.03	**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Atau Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut**	**Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan**	**20**	**59,998,000**	**59,648,000**	**99.42**	**100,00**
3.29.03.1.03.03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Rekomendasi	-	19,999,000	19,879,000	99.40	100.00
3.29.03.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Izin	20	39,999,000	39,769,000	99.42	100,00
3.29.03.1.04	**Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, Dan Batuan Dalam Wilayah Pertambangan Rakyat**	**Izin**	**5**	**12,000,000**	**11,936,665**	**99.47**	**100,00**
3.29.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Dokumen	5	6,000,000	5,940,000	99.00	100,00
3.29.03.1.04.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Izin	5	6,000,000	5,996,665	99.94	100,00
3.29.03.1.07	**Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Dan Batuan**	**Data**	**21**	**9,999,000**	**9,489,950**	**94.91**	**100,00**
3.29.03.1.07.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Izin	21	9,999,000	9,489,950	94.91	100,00
Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan							
3.29.05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	**Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik (%)**	**6.7**	**144,972,900**	**138,814,620**	**95.75**	**98.90**
3.29.05.1.03	**Penatausahaan Izin, Pembinaan, Dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun**	**Izin**	**2**	**29,999,700**	**28,503,120**	**95.01**	**96.67**
3.29.05.1.03.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain	Rekomendasi	1	14,999,800	14,508,120	96.69	100.00



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu DPPA	Realisasi	Keu (%)	Fisik (%)
	dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun						
3.29.05.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Izin	2	14,999,900	14,000,000	93.33	100.00
3.29.05.1.04	**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	**Unit**	**-**	**114,973,200**	**110,311,500**	**95.95**	**99.48**
3.29.05.1.04.01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Dokumen	1	10,497,400	10,050,000	95.74	95.83
3.29.05.1.04.03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Orang	20	14,970,800	14,925,800	99.70	100.00
3.29.05.1.04.04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Unit	-	89,505,000	85,335,700	95.34	99.82
Sasaran Meningkatnya Cakupan Layanan Listrik Bagi Masyarakat							
3.29.06	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (Rumah Tangga)**	**700**	**206,113,000**	**201,799,664**	**97.91**	**99.80**
3.29.06.1.02	**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi**	Instalasi Tenaga Listrik	5	**40,649,000**	**201,799,664**	**97.91**	**99.80**
3.29.06.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas dalam Daerah Provinsi	Izin	5	19,399,000	19,185,000	98.90	100.00
3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Izin	5	21,250,000	20,135,974	94.76	100.00
3.29.06.1.06	**Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan**	Sarana	700	**165,464,000**	**162,478,690**	**98.20**	**99.75**
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Sarana	700	30,214,000	29,823,860	98.71	99.29
3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Sarana	700	135,250,000	132,654,830	98.08	99.85
	Cabang Dinas ESDM Wilayah Pulau Sumbawa			**263,746,300**	**261,352,858**	**99.09**	**99.89**
3.29.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**227,246,300**	**225,152,858**	**99.08**	**99.87**
3.29.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Laporan**	**1**	**23,000,000**	**22,530,000**	**97.96**	**98.70**
3.29.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	8	1,000,000	1,000,000	100.00	100.00
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis	2	1,000,000	980,000	98.00	100.00
3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Orang	48	1,000,000	700,000	70.00	70.00
3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tahun	1	20,000,000	19,850,000	100.00	100.00
3.29.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tahun**	1	**182,436,300**	**180,814,100**	**99.11**	**100.00**
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat	78	2,244,300	2,118,100	94.38	100.00
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis	4	22,752,000	21,818,500	95.90	100.00
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Orang	5	157,440,000	156,887,500	99.64	100.00



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu DPPA	Realisasi	Keu (%)	Fisik (%)
3.29.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tahun**	1	**21.810.000**	**21,808,758**	**99.99**	**100.00**
3.29.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	2	21.810.000	21,808,758	99.99	100.00
3.29.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**%**	**100**	**6,500,000**	**6,450,000**	**99.23**	**100.00**
3.29.02.1.02	**Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi**	**Laporan**	**1**	**6,500,000**	**6,500,000**	**99.23**	**100.00**
3.29.02.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Izin	5	6,500,000	6,500,000	99.23	100.00
3.29.03	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**Wilayah Izin Pertambangan**	3	**13,000.000**	**12,880,000**	**99.08**	**100.00**
3.29.03.1.03	**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Atau Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut**	**Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan**	3	**13,000,000**	**12,880,000**	**99.08**	**100.00**
3.29.03.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Izin	3	13,000,000	12,880,000	99.08	100.00
3.29.05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	**Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik (%)**	**6.7**	**7,000,000**	**6,900,000**	**98.57**	**100.00**
3.29.05.1.03	**Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun**	**Izin**	-	**7,000,000**	**6,900,000**	**98.57**	**100.00**
3.29.05.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Izin	-	7,000,000	6,900,000	98.57	100.00
3.29.06	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (Rumah Tangga)**	**-**	**10,000,000**	**9,970,000**	**99.70**	**100.00**
3.29.06.1.01	**Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah Provinsi**	**Pertimbangan Teknis**	-	**10,000,000**	**9,970,000**	**99.70**	**100.00**
	Pengendalian dan Pengawasan	Izin	1	10,000,000	9,970,000	99.70	100.00



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu DPPA	Realisasi	Keu (%)	Fisik (%)
3.29.06.1.01.03	Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi						
					Rata-Rata Realisasi Keuangan	91,51	
					Rata-Rata Realisasi Fisik		99,65
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEUANGAN						**91,53**	



Tabel 2.6 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas ESDM Provinsin NTB dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Capaian Target Renstra s/d 2024	
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
3					**Urusan Pemerintahan Pilihan**									
3	**29**				**Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**		**81.19**	99.80	**80.38**	**81.19**	99.80		99.80	125
					A. DINAS									
3	**29**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai Sakip**	**80.33**	**79.88**	**80.00**	**80.00**	79.80		158.78	194
3	**29**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**9**	**7**	**8**	**8**	7	2	18	225
3	29	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	1	1	1	100	1	4	400
3	29	01	1.01	02	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Dokumen	1	1	1	1	100	1	3	300
3	29	01	1.01	03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Dokumen	1	1	1	1	100	1	3	300
3	29	01	1.01	04	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA -SKPD	Dokumen	1	1	1	1	100	1	3	300
3	29	01	1.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA -SKPD	Dokumen	1	1	1	1	100	1	3	300
3	29	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	1	1	1	100	1	3	300
3	29	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	1	2	2	100	1	4	200
3	**29**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**1**	**1**	**1**	**1**	100	1	3	300
3	29	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ASN	64	76	76	76	76	72	221	283.33
3	29	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	1	1	100	1	3	300
3	29	01	1.02	03	Pelaksanaan Penataushaan dan Pengujiab /Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	1	1	100	1	3	300
3	29	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	1	1	1	100		3	300
3	29	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	1	100	1	3	300
3	29	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Bahan Tanggapan Pemeriksanaan	Laporan		1	1	1	100		2	200
3	29	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan Semester Genap SKPD	Laporan		1	1	1	100		2	200
3	29	01	1.02	08	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan		1	12	12	100		13	108.33
3	**29**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Laporan**	**1**	**1**	**1**	**1**	100	1	3	300
3	29	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	1	1	100	1	3	300
3	29	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	1	1	1	100		3	300
3	29	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	1	1	1	100	1	3	300
3	29	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milk Daerah SKPD	Dokumen	1	1	1	1	100	1	3	300
3	29	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	1	1	100		2	200
3	**29**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tahun**	**1**	**1**	**1**	**1**	100	1	3	300
3	29	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Laporan	1	1	1	1	100		2	200
3	29	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Laporan/Buah	80	1	80	80	100			0
3	29	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan	1	1	1	1	100	1	3	300
3	29	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan	1	1	1	1	100		2	200
3	**29**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tahun**	**1**	**1**	**1**	**1**	100	1	3	300
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	12	7	12	12	100	5	23	191.67
3	29	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jenis	5	6	5	5	100	6	49	408.33
3	29	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis	2	1	2	2	100		11	550
3	29	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis	6	-	6	6	100		7	116.67
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis	12	3	12	12	3		19	158.33
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan Material	Jenis	20	1	20	20	100	29	40	200
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Orang	1200	50	1200	1200	100	1	632	52.66
3	29	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tahun	1	24	1	1	24	1	26	2600
3	**29**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Unit	21	1	21	21	100	3	11	52.38
3	29	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		2		2	2			0	0



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Capaian Target Renstra s/d 2024	
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
3	29	01	1.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		1		1	1				0
3	29	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		6	1	6	6	100		1	16.67
3	29	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	12	8	12	12	8	3	18	150
3	**29**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tahun	1	1	1	1	100		2	200
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat	2500	2000	2500	2500	100	1000	5596	223.84
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening	3	5	3	3	5	3	11	366.67
3	29	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Buah	24		24	24			24	100
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Orang	8	8	8	8	8	11	25	312.5
3	**29**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tahun**	**1**	**1**	**1**	**1**	100	1	3	300
3	29	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	11	7	11	11	7	7	21	190.91
3	29	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Unit	12	1	12	12	100		7	58.33
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	30	-	30	30			6	20
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	-	1	1				
3	**29**	**02**			**Program Pengelolaan Aspek Kegeologian**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	100	1	201	201
3	**29**	**02**	**1.01**		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	Zona	10	1	10	10	100	1	5	50
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Dokumen	10	1	10	10	100	1	5	50
3	29	02	1.01	02	Penentuan dan penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Peta	1	1	1	1	100		2	200
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Dokumen	1	1	1	1	100		4	400
3	**29**	**02**	**1.02**		**Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	Dokumen	10	1	10	10	100	20	31	310
3	29	02	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Pengusahaan Air Tanah	Rekomendasi	60	30	60	60	30	20	214	356.67
3	29	02	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Pengusahaan Air Tanah	Izin	50	30	50	50	30	20	65	130
3	**29**	**02**	**1.03**		**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**Laporan**	**10**	**10**	**10**	**10**	10	10	29	290
3	29	02	1.03	01	Pengumpulan dan Perolehan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Dokumen	3	10	3	3	10	10	24	800
3	29	02	1.03	02	Penghitungan Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Laporan	3		3	3			2	66.67
3	29	02	1.03	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Laporan	1		1	1		1	2	
3	**29**	**03**			**Program Pengelolaan Mineral dan Batubara**	**Laporan/% IUP/Jumlah Wilayah Izin pertambangan yang dikendalikan**	**32**	**31.67**	**32**	**32**	31.67	39.87	74.54	232.94
3	**29**	**03**	**1.03**		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Wilayah Izin Pertambangan	90	10	90	90	10	10	66	73.33
3	29	03	1.03	03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	50	10	50	50	10	50	80	160
3	29	03	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Izin	40	10	40	40	10	40	70	175
3	**29**	**03**	**1.04**		Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Izin	10	5	10	10	5	5	15	150



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Capaian Target Renstra s/d 2024	
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
3	29	03	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Dokumen	5	5	5	5	5	5	15	300
3	29	03	1.04	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Izin	10	5	10	10	5	10	20	200
3	**29**	**03**	**1.07**		**Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan**	Data	77	2	77	77	2	1	24	31.17
3	29	03	1.07	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Izin	77	2	77	77	2	1	24	31.17
3	**29**	**05**			**Program Pengelolaan Energi Terbarukan**	**Persentase kontribusi energy baru terbarukan dalam pembangkit listrik (%)**	**5.57**	**17.43**	**5.57**	**5.57**	17.43	19.18	43.31	777.56
3	**29**	**05**	**1.03**		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	Izin	2		2	2		2	4	200
3	29	03	1.03	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Rekomendasi	2		2	2			1	50
3	29	03	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Izin	2		2	2		2	3	150
3	**29**	**05**	**1.04**		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	Unit/Jumlah Fasilitasi EBT yang di bangun	25		25	25		1	1	4
3	29	03	1.04	01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Dokumen	1	1	1	1	100	1		0
3	29	03	1.04	03	Sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan Teknologi yang menerapkan konservasi energi	Orang	100	75	100	100	75	25	120	120
3	29	03	1.04	04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Unit	20	-	20	20		3	3	15
3	**29**	**06**			**Program Pengelolaan Ketenagalistrikan**	**Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (Rumah Tangga) %**	**1200**	**350**	**1200**	**1200**	35.71	99.99	424.99	35.83
3	**29**	**06**	**1.01**		**Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**	Perlindungan Teknis	32	40	32	32	40	32	95	296.88
3	29	06	1.01	01	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Rekomendasi	32	40	32	32	40	32	95	296.88
3	29	06	1.01	02	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Izin	32		32	32		32	38	118.75
3	**29**	**06**	**1.02**		**Penatausahaan Izin Operasi yang fasilitasis Instalasinya dalam Daerah Provinsi**	Instalasi Tenaga Listrik	32		32	32			5	15.63
3	29	06	1.02	01	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Rekomendasi	32		32	32			2	6.25
3	29	06	1.02	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Izin	32		32	32			5	1563
3	**29**	**06**	**1.06**		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	Sarana/ RTS	1200		1200	1200		60	760	63.33
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dokumen	1		1	1			1	100
3	29	06	1.06	06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Sarana	1200		1200	1200			700	58.33
					B. CABANG DINAS									



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Capaian Target Renstra s/d 2024	
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
3	**29**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		80.00		80.00	80.00				0
3	**29**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Daerah**		1		1	1				0
3	29	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Orang	1		1	1			2	200
3	**29**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Laporan	1	3	1	1	3		4	400
3	29	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	2		2	2		2	10	500
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis	5	3	5	5	3	1	6	120
3	29	01	1.01	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Orang	95	20	95	95	20	90	158	166.32
3	29	01	1.01	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tahun	1		1	1		1	2	200
3	**29**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tahun	1		1	1			1	100
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat	300	500	300	300	100	1	579	193
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrk	Jenis	3	5	3	3	5	7	16	533.33
3	29	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	2	2	2	2	2		7	350
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Orang	6	8	6	6	8		13	216.67
3	**29**	**01**	**1.09**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tahun	1		1	1			1	100
3	29	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	2	2	2	2	2	2	6	300
3	**29**	**02**			**Program Pengelolaan Aspek Kegeologian**	%	100	50	100	100	50		150	150
3	**29**	**02**	**1.02**		**Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	Laporan	10		10	10			1	10
3	29	02	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Rekomendasi	9		9	9			-	0
3	29	02	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Izin	9	50	9	9	50	9	64	711.11
3	**29**	**03**			**Program Pengelolaan Mineral dab Batubara**	Wilayah Izin Pertambangan	43		43	43				0
3	**29**	**03**	**1.03**		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	Wilayah Izin Mineral Bukan Logam dan Batubara	43	1	43	43	5		9	20.93
3	29	03	1.03	03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Rekomendasi	24		24	24				0
3	29	03	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Izin/zona	19	1	19	19	1	1	5	26.32
3	**29**	**05**			**Program Pengelolaan Energi Baruterbarukan**	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik (%)	5.57	6.52	5.57	5.57	6.52		13.22	237.34
3	**29**	**05**	**1.03**		**Penatausahaan Izin, Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan samapai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Pertahun**	Izin	2		2	2				0
3	29	05	1.03	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan samapai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Pertahun	Rekomendasi	1		1	1				0
3	29	05	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan samapai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Pertahun	Izin	2	3	2	2	3	1	4	200
3	**29**	**06**			**Program Pengelolaan Ketenagalistrikan**	Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (Rumah Tangga)	1200	5.64	1200	1200	5.64	5.57	11.21	0.93
3	**29**	**06**	**1.01**		**Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia**	Pertimbangan Teknis/izin	23	2	23	23	3	1	3	13.04



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Capaian Target Renstra s/d 2024	
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
					Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi									
3	29	05	1.03	01	Penatausahaan Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan jaringan kepada penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Rekomendasi	11	10	11	11	10	1	11	100
3	29	05	1.03	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan jaringan kepada penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Rekomendasi	11		11	11				0
3	29	05	1.03	03	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan jaringan kepada penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Izin	12	1	1	1	100		2	16.67



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut dalam Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi NTB sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

   Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

2. Fungsi

   Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

   a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral;
   b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral;
   c. Pengendalian pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral;
   d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian target sesuai dengan yang direncanakan. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah di Provinsi NTB diambil dari Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029.

Rumusan Indikator kinerja Perangkat Daerah tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung percepatan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Nusa tenggara Barat Tahun 2025-2026. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Nusa tenggara Barat Tahun 2025-2029 ditampilkan dalam tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2.7 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Urusan Pemerintahan Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2025 - 2026

No	SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi primer.	Terwujudnya penggunaan energi baru terbarukan. Terwujudnya Ketahanan Energi yang ramah lingkungan (Inmendgari)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer.	%		19.2	20.75	22.30	23.85	25.41
2.	Meningkatnya Ketahanan Iklim Daerah	Terwujudnya penurunan emsi GRK dari sektor energi	Persentase Penurunan Emsi GRK sektor energi			-1,14	-0,06	0,14	0,37	0,61



3.	Meningkatnya kualitas ekosistem darat, laut dan udara	Terwujudnya pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan.	Persentase IUP yang melaksanakan kaidah usaha pertambangan yang baik dan benar (Good Mining Practices)	%		12,6	13,23	13,89	14,58	15,31
		Terwujudnya pemanfaatan air tanah yang berwawasan lingkungan	Persentase pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan	%		7.89	10.53	13.16	15.79	18.42
4.	Meningkatnya kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.	Terwujudnya Peningkatan Konsumsi Listrik	Konsumsi Listrik per kapita	kWh/ Kapita		580	609	639	668	698

Dari tabel 2.7 diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat dua tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tengara Barat, yang pertama adalah bagaimana mewujudkan kualitas lingkungan yang lestari, bersih, ramah dan berkelanjutan melalui peningkataan pemanfaatan sumber energi terbarukan dan pengelolaan kegiatan pertambangan dan pemanfaatan air tanah yang berwawasan lingkungan. Tujuan yang kedua adalah mewujudkan kemantapan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah yang merata yang berfokus pada peningkatan konsumsi listrik per kapita.

Tabel. 2.8 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024-2026

No	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (20240	Target					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Terwujudnya penggunaan energi baru terbarukan.	Meningkatnya kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik	%		15.00	15.50	16.00	16.50	17.00	
2.	Terwujudnya Penurunan Emisi GRK dari Sektor Energi	Meningkatnya kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik	%		15.00	15.50	16.00	16.50	17.00	
3.	Terwujudnya pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan.	Terlaksananya peningkatan status kegiatan usaha pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase penyelesaian permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku	%		80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	
4.	Terwujudnya pemanfaatan air tanah yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya pelaksanaan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah oleh pemegang izin air tanah.	Persentase pemegang izin air tanah yang melaksanakan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.	%		10.53	13.16	15.79	18.42	21.05	



4.	Terwujudnya Peningkatan Konsumsi Listrik	Terpenuhinya kebutuhan energi listrik yang andal, aman dan ramah lingkungan bagi masyarakat.	Rasio Elektrifikasi Gabungan antara Rumah Tangga PLN dan Non PLN	%		100	100	100	100	100	

Berdasarkan tabel 2.8 di atas terdapat empat sasaran Dinas ESDM Tahun 2025-2029 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik dengan indikator persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik (%). Indikator tersebut dihitung melalui rasio jumlah kapasitas pembangkit listrik energi baru terbarukan terhadap jumlah total kapasitas pembangkit listrik dikali 100 %.
2. Terlaksananya peningkatan status kegiatan usaha pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan indikator persentase penyelesaian permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator tersbut diperoleh dengan membandingkan jumlah permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang berhasil diselesaikan dibandingkan dengan total seluruh permohonan yang diterima.
3. Meningkatnya pelaksanaan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah oleh pemegang izin air tanah dengan indikator Persentase pemegang izin air tanah yang melaksanakan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.Indikator tersebut dihitung dari jumlah pemegang izin air tanah yang melaksanakan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dibandingkan jumlah keseluruhan pemegang izin air tanah.
4. Terpenuhinya kebutuhan energi listrik yang andal, aman dan ramah lingkungan bagi masyarakat dengan indikator Rasio Elektrifikasi (%). Indikator tersebut dihitung melalui rasio jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik dibandingkan jumlah keseluruhan rumah tangga dikali 100 %.



Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerjasesuai Tugas danFungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK Renstra 2019-2023 tahun ke 1	Target Indikator Lainnya	Target Renstra 2020-2024 Tahun ke 1-5					Realisasi Capain Renstra 2020-2024 Tahun ke 1-4					Rasio Capain Renstra 2020-2024 Tahun ke 1-4				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (%)	-	94,46	-	95,09	99,77	99,88	99,99	99,99	99,98	99,98	99,98	99,99	99,99	1,05	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%)	-	13,07	-	14,17	15,76	17,43	19.18	22.43	11,29	13,89	20,44	20,43	20,99	0,80	0,88	1,17	1,01	1,01
3	Persentase pemanfaatan airtanah di kab/kota Provinsi NTB yang berkelanjutan (%)	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	-
4	Persentase izin usaha pertambanganyang melaksanakan kaidah Pertambanganyang baik dan Benar (%)	-	-	-	4,00	9,00	31,67	9,00	7,18	0,87	11,9	5,03	7,18		0,25	1,32	0,16	-	-



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas ESDM Provinsi NTB, baik sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun setelahnya tetap melakukan koordinasi dengan perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota maupun dengan Kementerian ESDM termasuk dengan Cabang Dinas ESDM Wilayah Pulau Sumbawa. Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya mengatur tentang pembagian kewenangan antar pemerintah, koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas ESDM Provinsi NTB melalui Bappeda Kabupaten/Kota maupun Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan dengan Kementerian maupun instansi/lembaga vertikal terkait tetap dilakukan dan terus ditingkatkan.

Tentunya terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan Dinas ESDM Provinsi NTB. Permasalahan-permasalahan tersebut dikelompokkan dalam bidang-bidang sebagai berikut:

1. Bidang Mineral dan Batubara

a. Administrasi :

- ✓ Terkait dengan pelaksanaan evaluasi dokumen perizinan dan pengawasan usaha pertambangan MBLB
  - ❖ Pengawasan teknis dan Evaluasi dokumen perizinan yang dilaksanakan oleh Inspektur Tambang masih belum optimal karena pelaksanaanya harus menunggu Surat Tugas dari KAIT yang memerlukan waktu sehingga apabila terjadinya peristiwa yang mendesak untuk segera diselesaikan akan menemui kendala
  - ❖ Untuk pengawasan dan Evaluasi dokumen perizinan diluar aspek teknis sampai saat ini belum ada pejabat pengawas yang ditunjuk oleh Menteri. Ketentuan mengenai Gubernur dapat menugaskan personil untuk melaksanakan tugas Pejabat Pengawas dengan beban pembiayaan dari Kementerian ESDM masih belum dapat dilaksanakan.
- ✓ Beberapa izin usaha pertambangan MBLB yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat seperti SIPB banyak menimbulkan permasalahan di Daerah, diantaranya :
  - ❖ Terkait dengan luasan WIUP yang tidak mempertimbangkan kondisi kepemilikan lahan
  - ❖ Pemberian Izin yang tidak memperhatikan kondisi dan aspirasi masyarakat setempat
  - ❖ Pemenuhan dokumen perizinan seperti rencana penambangan dan dokumen UKL/UPL
- ✓ Terkait dengan peningkatan status IUP dari IUP Ekspolarasi ke IUP Operasi Produksi maupun perpanjangannya, banyak yang mengalami keterlambatan dari sisi waktu dikarenakan proses evaluasi dokumen perizinan sebagai syarat tidak terpenuhi tepat waktu.
- ✓ Provinsi NTB Belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur terkait perizinan mineral bukan logam dan batuan sebagai peraturan turuan pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, hal ini menyebabkan kegiatan perizinan masih mengacu pada aturan pusat tanpa memperhatikan kondisi yang terdapat wilayah Nusa Tenggara Barat.
- ✓ Belum semua pemegang IUP Operasi Produksi menyampaikan RKAB sesuai Kepmen ESDM Nomor 84K/MB.01/MEM.B/2024.
- ✓ MOMI, Akses untuk registrasi MODI yang masih terkendala



- ✓ MOMI, beberapa WIUP yang telah dilakukan penciutan belum diupdate luasannya pada MOMI
- ✓ Permasalahan Terkait Izin Pertambangan Rakyat
  - ❖ Dari 13 WPR yang sudah ditetapkan pada Tahun 2022 belum ada satupun yang memiliki Dokumen Pengelolaan WPR yang telah ditetapkan oleh Menteri
  - ❖ Kewajiban Provinsi untuk menyusub Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang dinilai akan memberatkan Pemerintah Provinsi dimana untuk melaksanakanya membutuhkan anggaran dan waktu.

b. Permasalahan Teknis
- ✓ Sebgaiab besar IUP belum memiliki Kepala Teknik Tambang
- ✓ Sebagian besar pemegang IUP tidak memiliki pemegang IUP tidak memiliki tenaga teknis yang mempunyai kemampuan sesuai standar peraturan perundang-undangan terutama tenaga teknis yang dapat menyusun dokumen berikut : Laporan Akhir Eksplorasi, Studi Kelayakan, Laporan Produksi, RKAB dan kewajiban penyusunan dokumen lainnya sesuaiperaturan perundangan-undangan

c. Permasalahan diluar ESDM
- ✓ Adanya ketentuan mengenai Lahan Sawah Dilindungi (LSD), Beberapa WIUP yang telah terbit mengalami tumpang tindih dengan wilayah LSD yang disebabkan informasi penetapan LSD oleh ATR/BPN terbit setelah WIUP diterbitkan
- ✓ Rekomendasi Tata Ruang, di Provinsi NTB tidak semua Kabupaten/Kota menerbitkan rekomendasi Tata Ruang untuk kegiatan pertambangan MBLB, terdapat 2 Kabupaten/Kota yang tidak menerbitkan Rekomendasi Tata Ruang yaitu Kabupaten Lombok Timur dan Kota Bima
- ✓ Adanya kewajiban UKL/UPL untuk IUP Tahap Eksplorasi yang memberatkan bagi pemohon IUP Eskplorasi terutama yang mempunyai luasan kecil karena tidak banyak kegiatan yang merubah bentang alam

2. Bidang Geologi dan Air Tanah
   a. Terdapat 9 CAT yang sampai dengan saat ini baru 7 CAT yang sudah dilakukan inventarisasi dan dibuat zona pemanfaatannya (data 2004) , idealnya reviu CAT dilakukan setiap 5 tahun, selain itu belum semua wilayah NTB memiliki zona CAT terutama untuk bagian selatan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa..
   b. Disebabkan adanya perubahan peraturan Perundang-undangan dimana berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Izin pemanfaatan air tanah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pelaksanaanya mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor : 259.K/GL.01/MEM.G/2022 tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah (SIP, SIPA, dan SPAM).
   c. Perlunya dilakukan perbaikan atau revisi terkait Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah untuk Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah perlu di revisi sesuai Perundangan yang baru.
   d. Proses Perizinan Air Tanah membutuhkan waktu yang lama dan berdampak pada perkembangan usaha kecil/mikro.

3. Bidang Ketenagalistrikan
   a. Rasio Elektrifikasi (RE) Provinsi NTB 2024 sebesar 99,99 %. (data PLN).
   b. Rasio Desa Berlistrik (RDB) 100% dari jumlah 1.143 Desa/Kel (data PLN).



c. Sejak tahun 2012 s/d 2024 telah dilaksanakan penyambungan Listrik Murah dan Hemat bagi 36.023 RTS kategori miskin baik melalui sumber APBN, APBD dan sumber lainnya.
d. Untuk TA 2024 melalui APBD telah dilaksanakan pekerjaan sambungan listrik gratis untuk 175 RTS di Kab. Bima 41 RTS ,Dompu 34 RTS dan Kab. Lombok Tengah 120 RTS.
e. Selain itu, terdapat program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang didanai oleh APBN untuk Tahun 2.415 RTS di seluruh Wilayah NTB.
f. Melalui dana shadaqoh karyawan PLN, program *Light up the Dream* juga akan menyalakan 45 RTS kategori miskin di seluruh NTB untuk Tahun 2023.
g. Program Lisdes PLN yang dibiayai oleh PMN untuk melistriki 34 desa (perluasan jaringan) dan 1.125 RTS di tahun 2023 serta 47 desa (perluasan jaringan) dan 1.840 RTS di tahun 2024.
h. Data penerima subsidi listrik di PLN-Mobile sering kali diupdate berdasarkan data terbaru dari basis data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan P3KE sehingga calon penerima bantuan listrik murah dan hemat tidak terdaftar lagi sebagai penerima subsidi listrik 450 VA.
i. Kurangnya data dan informasi terkait pelaku usaha atau badan usaha mana saja yang memiliki Pembangkit Listrik.

4. Bidang Energi
   a. Kendala Legislasi dan Peraturan
      - ✓ Proses Perizinan Penggunaan Kawasan, Hutan agak lama karena harus mendapat pengesahan dari Kementerian Kehutanan di Jakarta;
      - ✓ Tidak sinkronnya dokumen perencanaan energi dan kelistrikan pemerintah (RUEN/ RUED – P) dengan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik Milik PLN (RUPTL)
   b. Kendala Ekonomi
      - ✓ Keterbatasan Plafon Kredit Bank Lokal untuk Investasi Bidang Energi Terbatas
      - ✓ Biaya tambahan untuk menyewa konsultan teknis ternama
      - ✓ Khusus untuk pengembangan Waste To Energy, Tipping Fee (subsidi pengelolaan sampah dari pemerintah) terlampau rendah tidak menarik untuk insvestor
      - ✓ Anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan energi terabarukan terbatas
   c. Kendala Teknis
      - ✓ Isu intermittency (output listrik yang dihasilkan berubah-ubah tergantung input yang diterima) terutama untuk pengembangan PLTS dan PLT Bayu
      - ✓ Terbatasnya kontraktor yang berkualifikasi baik dari komunitas sekitar area proyek
      - ✓ Pada proses pembebasan lahan dimana harga lahan yang diajukan masyarakat meningkat 3-4 kali harga sebelumnya setelah dilakukan sosialisasi pembangunan pembangkit EBT kepada masyarakat yang ada dilingkungan tersebut.

Khusus untuk urusan pemerintahan bidang ESDM, terdapat beberapa tantangan, hambatan dan peluang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tantangan
   A. Bidang Mineral dan Batubara
      1. Diperlukan kesiapan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan teknis dan administrasi dalam mengelola pertambangan baik dari sisi Pemerintah Daerah maupun Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia pelaku usaha pertambangan MBLB.
      2. Adanya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan hidup yang menjadikan usaha pertambangan harus menerapkan standar lingkungan yang tinggi dalam



melaksanakan usaha pertambangan MBLB, dalam hal inipenerapan Good Mining Practice.

3. Sebagai daerah yang memiliki potensi mineral yang relatif tinggi, diperlukan kebijkan pemerintah yang dapat mendorong peningkatan manfaat dari adanya kegiatan usaha pertambangan baik terkait dengan pendapatan daerah maupun pengembangan dan pemberdayaa masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

B. Bidang Geologi dan Air Tahan

- Krisis air disebabkan karena terjadinya krisis perilaku masyarakat dan krisis pengelolaan lingkungan. Krisis air bukan hanya semata-matakurangnya air untuk memenuhi kebutuhan hidup. Telah terjadi kecenderungan yang menurun, baik dari sisi penyediaan jumlah maupun mutunya. Sementara di sisi kebutuhan justru terjadi peningkatan
- Cekungan Air Tanah (CAT) yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat belum semua dilakukan pemetaan, dari 9 CAT yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah Indonesia, baru 8 CAT yang sudah dipetakan. Dimana 7 CAT diantaranya merupakan hasil pemetaan tahun 2004 dan 1 (satu) CAT lainnya yaitu CAT Pekat di Kabupaten Dompu dipetakan pada tahun 2017. Belum lengkapnya pemetaan CAT akan berdampak pada terganggunya upaya pengelolaan konservasi air tanah;
- Potensi air tanah belum dipetakan secara detil, pemetaan potensi air tanah masih menggunakan peta skala 1:250.000 yang dibuat pada tahun 2001. Kondisi demikian menjadikan beberapa daerah yang mengalami kekeringan belum terpetakan dengan baik;
- Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih, belum semua masyarakat dapat menikmati air bersih terutama pada daerah sulit air, namun tidak semua daerah sulitair dapat diintervensi melalui pembangunan sumur bor karena kondisi geologi yang tidak memungkinkan adanya potensi air tanah;
- Masih banyak usaha yang menggunakan air tanah belum terdaftar dan memiliki izin pengambilan air tanah. Pengendalian pengambilan air terhadap usaha yang memanfaatkan air tanah belum optimal;
- Adanya perubahan pengelolaan perizinan pemanfaatan air tanah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian ESDM berpotensi menjadi hambatan dalam pengurusan perizinan pemanfaatan air tanah dikarenakan belum adanya lembaga/instransi pusat yang mengurusai air tanah di Provinsi NTB;
- Keterbatasan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam sub urusan geologi menjadikan alokasi anggaran untuk melaksanaan pengelolaan urusan kegeologian menjadi kurang diperhatikan terkait penyelidikan potensi kebumian mitigasi bencana geologi, pengelolaan keanekaragaman geologi, konservasi cagar geologi dan pengembangan geowisata.

C. Bidang Ketenagalistrikan

- Meningkatkan akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan listrik secara meratadan terjangkau;
- Mendorong peningkatan sistem ketenagalistrikan yang andal melalui pembangunan pembangkit listrik, perluasan jaringan transmisi/distribusi dan



gardu induk;
- Mendorong perluasan jaringan distribusi yang menjangkau hingga ke pelosok perdesaan/dusun;
- Meningkatkan keandalan pembangkit listrik khususnya energi baru terbarukan melaluipemenuhan persyaratan teknis dan non teknis lainnya.

D. Bidang Energi
- Masih kurangnya pemahaman masyarakat untuk melakukan konservasi energi melalui penggunaan energi baru terbarukan.
- Potensi pengembangan bahan bakar nabati terkendala dengan ketergantungan pengembangan sektor pertanian dan perkebunan, kecocokan lahan, harga komoditi dan biaya produksi yang tidak kompetitif;
- Bauran energi daerah masih didominasi oleh minyak bumi sedangkan kontribusi energi baru terbarukan masih rendah, target bauran energi terbarukan pada tahun 2025 sebesar22,86%;
- Belum dimanfaatkannya potensi panas bumi, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi energi baru terbarukan lainnya;
- Memperkuat kelembagaan pengelola pembangkit *listrik off grid* seperti Pembangkit Listrik Tenaga MikroHydro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal dalam pengelolaan dan pemeliharaan peralatan serta jaringan distribusi listrik dari pembangkit maupun pembiayaannya;
- Mendorong penerapan prinsip konservasi energi dalam rangka mengurangi emisi gas dan efek rumah kaca dalam kerangka mitigasi dan adaptasi terhadap isu pemanasan global malalui Grakan Rumah Kaca (GRK);
- Mendorong upaya peningkatan ketahanan energi terutama dalam memenuhi kebutuhan energi dengan memanfaatkan potensi energi baru terbarukan.

2. Hambatan
- Kesadaran masyarakat akan pentingnya perizinan dalam melakukan usaha pertambangan yang masih rendah berdampak pada masih adanya kegiatan pertambangan tanpa izin di beberapa wilayah di Provinsi NTB.
- Masih banyak pelaku usaha pertambangan MBLB yang memiliki izin beranggapan bahwa seluruh dokumen sebagai syarat perizinan tidak akan diawasi, sehingga dokumen perizinan hanya sebagai dokumen tidak dimaknai sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan.
- Masih rendahnya kemampuan teknis dan administrasi serta kesadaran pelaku usaha pertambangan di Provinsi NTB yang berdampak pada tingkat kepatuhan dalam melaksanakan Good Mining Practice.
- Keterbatasan anggaran untuk pembinaan dan pengawasan pertambangan MBLB
- Pembinaan dan Pengawasan dibidang kelistrikan belum maksimal dikarenakan belum melakukan sosialisasi terkait regulasi di sub sektor Ketenagalistrikan
- Kurangnya Informasi dan masih rendahnya keingintahuan Masyarakat atau Pelaku Usaha terhadap Perizinan yang berlaku dibidang ketenagalistrikan menyebabkan akan berdampak pada tingkat kepatuhan dalam melaksanakan perizinan

3. Peluang

a. Bidang Mineral dan Batubara
- ✓ Adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang memberikan



opsen pajak MBLB sebesar 25% untuk Provinsi dapat dijadikan sebagai kesempatan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk peningkatan pengelolaan pertambangan MBLB dan kesejahteraan masyarakat

- ✓ Adanya kesempatan bagi Pemeritah Provinsi dalam memanfaatkan usaha pertambangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk mendukung Visi dan Misi daerah

b. Bidang Geologi dan Air Tanah
- ✓ 7 CAT dari 9 CAT yang ada telah di survei dan mempunyai zona pemanfaatan
- ✓ Pertimbangan teknis penggunaan air tanah untuk dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi karena resikonya kecil tetapi jumlahnya banyak (akan lebih efisien bila didelegasikan ke Provinsi)
- ✓ Peraturan Menteri ESDM tentang NPA telah terbit

c. Bidang Ketenagalistrikan
- ✓ Adanya paket subsidi listrik yang disediakan pemerintah untuk memberikan akses listrik bagi masyarakat tidak mampu;
- ✓ Adanya program Pemerintah dalam meningkatkan kapasitas tenaga listrik secara nasional melalui pembangunan pembangkit 35.000 MW dan perluasan jaringan listrik transmisi/distribusi listrik, gardu induk yang dapat dimanfaatkan daerah dalam meningkatkan rasio elektrifikasi;
- ✓ Adanya insentif dan tarif yang menarik memungkinkan adanya pertumbuhan investasi melalui usaha Independent power Producer (IPP).
- ✓ Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam penyediaan dan pendanaan pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri;
- ✓ Mendorong meningkatnya keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pelaksanaan usaha jasa penunjang ketenagalistrikan

d. Bidang Energi
- ✓ Potensi pemanfaatan sektor ESDM yang cukup besar diantaranya potensi energi terbaru barukan;
- ✓ Komitmen dalam negeri untuk menyelenggarakan pengelolaan sektor ESDM berkelanjutan yang cukup tinggi;
- ✓ Dukungan Internasional yang besar untuk pengembangan bidang energi baru terbarukan yang berkelanjutan;
- ✓ Keberadaan potensi ESDM, stakeholder dan peran serta masyarakat yang tinggi dalam mendukung pembangunan nasional;
- ✓ Permintaan dan tingkat kebutuhan terhadap hasil sumberdaya ESDM;
- ✓ Meningkatnya kemajuan IPTEK;
- ✓ Adanya kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah yang berpihak kepada msyarakat sekitar;
- ✓ Sistem perizinan pemanfatan ESDM semakin mudah dan cukup selektif;
- ✓ Keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan pemanfaatan sektor ESDM.
- ✓ Potensi energi baru terbarukan di yang belum dimanfaatakan secara optimal diantaranya energi matahari, energi angin, energi air skala kecil, energi arus laut, energi biomasa dan energi panas laut;
- ✓ Arah pengembangan energi secara nasional semakin bergeser pada peningkatan bauran energi menjadikan peluang bagi provinsi Nusa Tenggara Barat untuk masuk dalam proyek pengembangan energi baru terbarukan;



- ✓ Semakin meingktanya teknologi di bidang pemanfaatan energi baru terbarukan menjadikan semakin efisien dan semakin murah dalam memanfaatkannya;
- ✓ Peluang bagi masuknya investasi pengembangan energi baru terbarukan.
- ✓ Perhatian dunia terhadap pentingnya pembangunan berkelanjutan menjadikan pengembangan pemanfaatan energi terbarukan sebagai prioritas bagi organisasi non pemerintah berpartisipasi dalam pengembangannya menjadi peluang kerjasama

Dinas ESDM Provinsi NTB telah melakukan pencapaian yang sangat baik melalui pencapaian Indikator Kinerja Daerah, yaitu Rasio Elektrifikasi. Namun demikian masih menyisakan berbagai permasalahan dalam bidang energi dan sumber daya mineral diantaranya terkait Sub Urusan Pemerintahan Bidang Geologi, Mineral dan Batubara, Energi Baru Terbarukan dan Ketenagalistrikan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Dari beberapa permasalahan tersebut dapat dirumuskan isu strategis atau isu penting, yaitu:

1. Masih adanya kegiatan pertambangan tanpa ijin yang lokasinya tersebar di seluruh Kabupaten.
2. Masih ada rumah tangga yang belum berlistrik PLN.
3. Belum optimalnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi.
4. Belum optimalnya usaha konservasi air tanah.

Namun demikian penanganan Isu Strategis Tahun 2024 tidak semua dapat dilakukan pasca diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dalam Rencana Kerja Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2025 serta terbitnya dua Undang-Undang diantaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Beberapa Isu Strategis yang dimungkinkan tidak dapat dilaksanakan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 adalah terkait :

1. Mitigasi bencana alam dan geologi
2. Pengembangan *Geopark*.
3. Pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan air bersih.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tersedia dalam rangka penanangan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang telah disesuaikan dengan Tugas dan Fungsi berdasarkan Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi NTB adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang ESDM

KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PELAKSANA KEGIATAN
3	29				URUSAN EERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		DINAS ESDM NTB
3	29	02			PROGRAM PENGEOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Prosentase Zona Pemanfaatan Air Tanah yang dikendalikan	Bidang Geologi Dan Air Tanah
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Zona konservasi air tanah yang dievaluasi (Zona)	Bidang Geologi Dan Air Tanah
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Data CAT (Dokumen)	Bidang Geologi Dan Air Tanah



KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PELAKSANA KEGIATAN
3	29	02	1.01	02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Penetapan CAT (Dokumen)	Bidang Geologi Dan Air Tanah
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Izin Pengambilan air tanah yang diawasi dan dikendalikan (Izin)	Bidang Geologi Dan Air Tanah
3	29	02	1.02		Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Perizinan air tanah yang dikendalikan (Izin)	Bidang Geologi Dan Air Tanah
3	29	02	1.02	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah prosedur dan persyaratan Izin (Dokumen)	Bidang Geologi Dan Air Tanah
3	29	02	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Rekomendasi Teknis yang diterbitkan (Rekomendasi)	Bidang Geologi Dan Air Tanah
3	29	02	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Izin Pengambilan Air Tanah yang diawasai dan Dikendalikan (Izin)	Bidang Geologi Dan Air Tanah
3	29	02	1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah NPA Kab/Kota yang dievaluasi (Buah)	Bidang Geologi Dan Air Tanah
3	29	02	1.03	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah data NPA (Dokumen)	Bidang Geologi Dan Air Tanah
3	29	02	1.03	02	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah penetapan NPA (Dokumen)	Bidang Geologi Dan Air Tanah
3	29	02	1.03	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah pemanfaatan NPA (Dokumen)	Bidang Geologi Dan Air Tanah
3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase IUP yang melaksanakan GMP (%)	Bidang Mineral dan Batubara
3	29	03	1.02		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Atau Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah izin Pertambangan Mineral Logam yang dikendalikan (Izin)	Bidang Mineral dan Batubara
3	29	03	1.02	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Jumlah prosedur dan persyaratatan izin (Dokumen)	Bidang Mineral dan Batubara
3	29	03	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan (Rekomendasi)	Bidang Mineral dan Batubara



KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PELAKSANA KEGIATAN
3	29	03	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi (Izin)	Bidang Mineral dan Batubara
3	29	03	1.02	04	Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Jumlah izin yang diawasi (Izin)	Bidang Mineral dan Batubara
3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah izin pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dikendalikan	Bidang Mineral dan Batubara
3	29	03	1.03	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah prosedur dan persyaratatan izin (Dokumen)	Bidang Mineral dan Batubara
3	29	03	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah usulan WUP (Dokumen)	Bidang Mineral dan Batubara
3	29	03	1.03	03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Rekomendasi Teknis yang diterbitkan (Rekomndasi)	Bidang Mineral dan Batubara
3	29	03	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi (Izin)	Bidang Mineral dan Batubara



KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PELAKSANA KEGIATAN
3	29	03	1.03	05	Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah izin yang diawasi (Izin)	Bidang Mineral dan Batubara
3	29	03	1.07		Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah izin pertambangan yang melaporkan produksinya (izin)	Bidang Mineral dan Batubara
3	29	03	1.07	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah data harga patokan mineral bukan logam dan batuan (Dokumen)	Bidang Mineral dan Batubara
3	29	03	1.07	02	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Dokumen)	Bidang Mineral dan Batubara
3	29	03	1.07	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah laporan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Dokumen)	Bidang Mineral dan Batubara
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Prosentase energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik (%)	Bidang Energi
3	29	05	1.03		Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah pengelola usaha niaga BBN yang dibina dan diawasi (Izin)	Bidang Energi
3	29	05	1.03	01	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah prosedur dan persyaratatan izin (Dokumen)	Bidang Energi
3	29	05	1.03	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan (Rekomendasi)	Bidang Energi
3	29	05	1.03	03	Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah izin yang dibina (Izin)	Bidang Energi
3	29	05	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi (Izin)	Bidang Energi
3	29	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah sarana dan prasaranan EBT yang dibangun (Unit)	Bidang Energi
3	29	05	1.04	01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Jumlah kebijakan (Dokumen)	Bidang Energi
3	29	05	1.04	02	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang ditingkatkan (Orang)	Bidang Energi



KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PELAKSANA KEGIATAN
3	29	05	1.04	03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi (Orang)	Bidang Energi
3	29	05	1.04	04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah fasilitas EBT yang dibangun (Unit)	Bidang Energi
3	29	05	1.04	06	Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta bintek (Orang)	Bidang Energi
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola EBT yang dibina dan diawasi (Unit)	Bidang Energi
3	29	05	1.0X		Pengembangan Sarana Prasarana EBT	1. Jumlah sarana dan prasaranan EBT yang dibangun (Unit)	Bidang Energi
3	29	05	1.0X	01	Pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT	Jumlah pembangkit listrik EBT yang dibangun (Unit)	Bidang Energi
3	29	05	1.0X	02	Pembangunan instalasi bio energi	Jumlah instalasi bio energi yang dibangun (Unit)	Bidang Energi
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Layanan listrik yang sesuai standar keselamatan ketenagalistrikan (jiwa)	Bidang Ketenagalistrikan
3	29	06	1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Izin ketenagalistrikan yang dikendalikan (Izin)	Bidang Ketenagalistrikan
3	29	06	1.01	01	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah prosedur dan persyaratan izin (Dokumen)	Bidang Ketenagalistrikan
3	29	06	1.01	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan (Rekomendasi)	Bidang Ketenagalistrikan
3	29	06	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi (Izin)	Bidang Ketenagalistrikan
3	29	06	1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Izin Operasi ketenagalistrikan yang diawasi	Bidang Ketenagalistrikan
3	29	06	1.02	01	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah prosedur dan persyaratan izin Operasi (Dokumen)	Bidang Ketenagalistrikan
3	29	06	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan (Rekomendasi)	Bidang Ketenagalistrikan
3	29	06	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi (Izin)	Bidang Ketenagalistrikan



KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PELAKSANA KEGIATAN
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga yang dipasang listrik murah dan hemat (RTS)	Bidang Ketenagalistrikan
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah data penerima penerima listrik murah dan hemat (Dokumen)	Bidang Ketenagalistrikan
3	29	06	1.06	02	Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah SK Penerima Listrik Murah dan Hemat (Buah)	Bidang Ketenagalistrikan
3	29	06	1.06	03	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan (Dokumen)	Bidang Ketenagalistrikan
3	29	06	1.06	04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah data dan informasi (Dokumen)	Bidang Ketenagalistrikan
3	29	06	1.06	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah laporan kordinasi dan sinkronisasi (Dokumen)	Bidang Ketenagalistrikan
3	29	06	1.06	06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah sarana penyediaan tenaga listrik yang dibangun (Unit)	Bidang Ketenagalistrikan
3	29	06	1.06	07	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah laporan pengawasan dan pengandalian (Dokumen)	Bidang Ketenagalistrikan

Penyelengaraan urusan Pemerintahan Bidang ESDM Tahun 2025 berdasarkan arahan Kemeterian Dalam Negeri yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, beberapa arahan tersebut diantaranya :

Pencapaian prioritas pembangunan nasional bidang ketahanan energi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain untuk:

1. Percepatan peningkatan Konsumsi Listrik Perkapita, melalui:
    a. Pemanfaatan potensi energi setempat, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, percepatan peningkatan Listrik Perkapita serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan;
    b. Pengawasan pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dan pengawasan penerapan tarif tenaga listrik oleh pemegang IUPTL;
    c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan subsidi listrik, penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik dan BBM satu harga bagi masyarakat terpencil;
2. Penyediaan database perijinan dan aset di bidang ESDM;
3. Pemeliharaan dan operasional aset-aset di bidang ESDM;
4. Penyusunan Raperda Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara pasca berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Perizinan berusaha dibidang Pertambangan.



2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rancangan awal RKPD Provinsi NTB Tahun 2025, terdapat 5 program, 21 kegiatan dan 78 Sub Kegiatan yang telah disiapkan untuk melaksanakan urusan pemerintahah bidang ESDM sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Namun sesuai dengan analisis kebutuhan yang sudah disusun akan digunakan 5 program 23 kegiatan dan 71 sub kegiatan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 13.828.145.990,- yang terdiri dari belanja Operasional dan Belanja Modal yang sudah memasukkan kebutuhan bagi penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Kelima program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 terdiri dari :

A. Induk Rp. 13.467.158.020,-

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar Rp. 11.082.554.005,-;
2. Program aspek kegeologian sebesar Rp. 159.991,450,-;
3. Program pengelolaan mineral dan batubara sebesar Rp. 479.497.025,-;
4. Program pengelolaan energi baru terbarukan sebesar Rp. 581.888.640,-;
5. Program pengelolaan ketenagalistrikan sebesar Rp. 1.163.226.900,-.

B. Cabang Dinas : Rp. 360.987.970,-

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar Rp. 318.491.970,-;
2. Program aspek kegeologian sebesar Rp. 8.028,000,-;
3. Program pengelolaan mineral dan batubara sebesar Rp. 12.234.000,-;
4. Program pengelolaan energi baru terbarukan sebesar Rp. 10.000.000,-;
5. Program pengelolaan ketenagalistrikan sebesar Rp. 12.234.000,-.

Penyusunan rancangan diinput melalui aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri melalui laman https://ntbprov.sipd.kemendagri.go.id. Anaisis kebutuhan program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2025 didasarkan atas usulan masing-masing bidang pada Dinas ESDM Provinsi NTB. Review Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan Rancangan Awal RKPD dan Analisis Kebutuhan dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut:



Tabel 2.11 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Provinsi NTB

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
	URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				13,,828,145,990.00		URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	13,828,145,990.00	
	Dinas Induk				13,452,349,990.00		Dinas Induk	13,467,158,020.00	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Mataram	Nilai SAKIP		10,170,760,630.00	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	11,082,554,005.00	
A	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi**	**9 Dokumen**	**276,477,176.00**	A	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	281,439,230.00	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Mataram, Selaparang, Dasan Agung Baru	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	101,412,076.00	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	103,124,130.00	
02	Koodinasi dan Penyusunan RKA - SKPD	Kota Mataram, Selaparang, Dasan Agung Baru	Jumlah dokumenbRKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000.00	02	Koodinasi dan Penyusunan RKA - SKPD	17,400,000.00	
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	12,000,000.00	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	13,800,000.00	
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	11,000,000.00	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	6,860,000.00	
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	12,000,000.00	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7,860,000.00	



NO	RANCANGAN AWAL RKPD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
			Dokumen Perubahan DPA-SKPD						
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Laporan Capian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	12,000,000.00	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23,830,000.00	
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	113,065,100.00	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	108,565,100.00	
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**8,588,578,554.00**	**B**	**Administrasi Keuangan**	**8,588,577,925.00**	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	JumlahOrang yang menerima Gaji dan Junjangan ASN	68 Orang/ Bulan	8,506,178,554.00	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,506,178,561.00	
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	52,900,000.00	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52,900,000.00	
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	4,000,000.00	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4,000,000.00	
04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan nAkuntansi SKPD	1 Dokumen	15,500,000.00	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15,499,914.00	
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	10,000,000.00	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9,999,450.00	



NO	RANCANGAN AWAL RKPD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
			Penyusunan Laporan Keuangan Tahun SKPD						
C	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**35,000,000.00**	**C**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**34,999,910.00**	
01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10,000,000.00	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	9,999,910.00	
02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5,000,000.00	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5,000,000.00	
03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah laporan Hasil Peniliaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15,000,000.00	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	15,000,000.00	
06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	5,000,000.00	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5,000,000.00	
D	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**6,500,000.00**	**D**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**5,997,840.00**	
01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	3,000,000.00	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2,999,840.00	
05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Unit	3,500,000.00	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	2,998,000.00	
E	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**237,000,000.00**	**E**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**229,616,180.00**	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	1 Paket	7,000,000.00	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5,818,000.00	



NO	RANCANGAN AWAL RKPD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
		Semua Kel/ Desa	Bangunan Kantor yang tersedia						
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	4,000,000.00	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,850,000.00	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	1 Jenis	5,000,000.00	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4,960,000.00	
05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan Penggandaan yang disediakan	1 Dokumen	5,000,000.00	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4,988,500.00	
07	Penyediaan Bahan/ Material	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Paket Bahan/ Material yang disediakan	1 Dokumen	6,000,000.00	07	Penyediaan Bahan/ Material	5,999,680.00	
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10,000,000.00	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10,000,000.00	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 Laporan	200,000,000.00	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194,000,000.00	
F	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**251,934,900.00**	**F**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1,,046,597,520.00**	
02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa				02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	799,930,000.00	
05	Pengadaan Mebel	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Paket	10,000,000.00	05	Pengadaan Mebel	21,383,520.00	
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	8 Unit	241,934,900.00	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	225,284,000.00	



NO	RANCANGAN AWAL RKPD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
G	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**524,500,000.00**	**G**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**458,900,400.00**	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1800 Laporan	6,000,000.00	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,000,000.00	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kumunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Laporan	150,000,000.00	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115,940,400.00	
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Laporan Penyediaann Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Jenis	368,500,000.00	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	336,960,000.00	
H	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**250,770,000.00**	**H**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**436,425,000.00**	
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Alat atau Lapangan yang dipelihara dan Dibyarakan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	51,670,000.00	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51,670,000.00	
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Alat atau Lapangan yang dipelihara dan Dibyarakan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	110,000,000.00	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau lapangan	146,000,000.00	
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	22 Unit	14,100,000.00	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39,170,000.00	
10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Mataram	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	75,000,000.00	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199,585,000.00	



NO	RANCANGAN AWAL RKPD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
			yang Dipelihara/ Direhabilitasi						
II	PROGRAM PENGEOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN				160,000,000.00	II	PROGRAM PENGEOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	159,991,450.00	
A	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa**	**Jumlah zona konservasi air tanah yang dievaluasi (zona)**		**60,000,000.00**	**A**	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**59,997,600.00**	
01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	60,000,000.00	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	59,997,600.00	
B	**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**				**100,000,000.00**	**B**	**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**99,993,850.00**	
01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	5 Dokumen	50,000,000.00	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	49,993,850.00	
03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	5 Laporan	50,000,000.00	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	50,000,000.00	
III	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA				487,500,000.00	III	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	479,497,025.00	



NO	RANCANGAN AWAL RKPD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
A	**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut**				**252,500,000.00**	A	**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Atau Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut**	279,499,750.00	
03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	10 Dokumen	160,000,000.00	03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	119,499,925.00	
04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 Dokumen	92,500,000.00	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	159,999,825.00	



NO	RANCANGAN AWAL RKPD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
			Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut						
B	**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Loham dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat**				**220,000,000.00**	**B**	**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Rakyat untuk KomODITAS Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Loham dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat**	**149,997,425.00**	
02	Koordinas dan Sikronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Semua Kab/ Kota , Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	1 Laporan	60,000,000.00	02	Koordinas dan Sikronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	49,997,675.00	
03	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komunitas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Semua Kab/ Kota , Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komunitas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	5 Dokumen	110,000,000.00	03	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komunitas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	50,000,000.00	
04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Semua Kab/ Kota , Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral	1 Laporan	50,000,000.00	04	Pengendalian dan Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	49,999,750.00	



NO	RANCANGAN AWAL RKPD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
			Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat						
C	**Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan**				**15,000,000.00**	**C**	**Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan**	**49,999,850.00**	
03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Semua Kab/ Kota , Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	10 Laporan	15,000,000.00	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	49,999,850.00	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN				853,269,000.00	IV	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	581,888,640.00	
A	**Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun**				**20,000,000.00**	**A**	**Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun**	**19,999,850.00**	
02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun		Jumlah Dokumen rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	1 Dokumen	10,000,000.00	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	10,000,000.00	



NO	RANCANGAN AWAL RKPD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Provinsi NTB	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	1 Dokumen	10,000,000.00	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	9,999,850.00	
B	**Pengelolaan Penyediaan Biomaasa dan/ atau Biogas dalam wilyah provinsi**				**366,410,000.00**	**B**	**Pengelolaan Penyediaan Biomaasadan/ atau Biogas dalam wilyah provinsi**	**351,890,140.00**	
01	Penyusunan dan Pemuktahiran data potensi biomassa	Semua Kab/ Kota , Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen data potensi biomassa	1 Dokumen	50,000,000.00	01	Penyusunan dan Pemuktahiran data potensi biomassa	35,499,500.00	
06	Penyusuanan dan Pemuktahiran data potensi biogas	Semua Kab/ Kota , Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen data potensi biogas	1 Dokumen	50,000,000.00	06	Penyusuanan dan Pemuktahiran data potensi biogas	49,999,640.00	
08	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Semua Kab/ Kota , Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	5 Laporan	266,410,000.00	08	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	266,391,000.00	
C	**Pengelolaan Pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi**				**196,859,000.00**	**C**	**Pengelolaan Pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi**		
03	Revitalisasi Infrastruktur biomassa dan/atau biogas		Jumlah Unit Infrastruktur biomassa dan/atau biogas	10 Unit	196,859,000.00	03	Pemeliharaan Infrastruktur biomassa dan/atau biogas		
D	**Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, Gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi**		**Jumlah Laporan pelaksanaan pembinaan dan pwngawasan aneka EBT (Kapasitas terpasang, investasi)**		**235,000,000,00**	**D**	**Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, Gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi**	**134,998,700.00**	



NO	RANCANGAN AWAL RKPD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
			di Daerah						
02	Pembinaan dan Pengawasan aneka EBT (Kapasitas terpasang, investasi) di dearah	Semua Kab/ Kota , Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan pelaksanaan pembinaan dan pwngawasan aneka EBT (Kapasitas terpasang, investasi) di Daerah	1 Laporan	200,000,000.00	02	Pembinaan dan Pengawasan aneka EBT (Kapasitas terpasang, investasi) di dearah	99,999,500.00	
10	Penyusunan dan Pemuktahiran data potensi aneka EBT di Daerah		Jumlah Dokumen data potensi aneka EBT di Daerah	1 Laporan	35,000,000.00	10	Penyusunan dan Pemuktahiran data potensi aneka EBT di Daerah	34,999,200.00	
E	**Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi**				**35,000,000.00**	**E**	**Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi**	**74,999,950.00**	
03	Sosialisasi Konservasi energi kepada masyarakat	Semua Kab/ Kota , Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	1 Laporan	35,000,000.00	03	Sosialisasi Konservasi energi kepada masyarakat	74,999,950.00	
V	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				1,780,820,360.00	V	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	1,163,226,900.00	
A	**Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**				**60,000,000.00**	**A**	**Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**	**59,926,900.00**	
02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Semua Kab/ Kota , Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga	1 Dokumen	30,000,000.00	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	29,976,000.00	



NO	RANCANGAN AWAL RKPD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
			Listrik dalam Daerah Provinsi						
03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Semua Kab/ Kota , Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	30,000,000.00	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	29,950,000.00	
B	**Pengganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan**				**1,720,820,360.00**	**B**	**Pengganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan**	1,103,300,000.00	
01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu		Jumlah Dokumen terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen	58,320,360.00	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	58,300,000.00	
06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		Jumlah Sarana yang terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan	75 Unit	1,662,500,000.00	06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1,045,000,000.00	
	Cabang Dinas ESDM Wilayah Pulau Sumbawa				375,796,000.00		Cabang Dinas ESDM Wilayah Pulau Sumbawa	360,987,970.00	



NO	RANCANGAN AWAL RKPD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				375,796,000.00	I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	360,987,970.00	
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				279,796,000.00	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	318,491,970.00	
A	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**33,000,000.00**	**A**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**32,024,820.00**	
02	Penyediaan Perlatan dan Perelengkapan Kantor	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	2,500,000.00	02	Penyediaan Perlatan dan Perelengkapan Kantor	5,727,720.00	
05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	2,500,000.00	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2,783,100.00	
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3,000,000.00	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2,400,000.00	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	25,000,000.00	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21,114,000.00	
B	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**216,376,000.00**	**B**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**249,949,150.00**	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,000,000.00	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,037,150.00	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	26,160,000.00	02	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	26,160,000.00	
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	8 Laporan	189,216,000.00	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	220,752,000.00	



NO	RANCANGAN AWAL RKPD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
C	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**30,420,000.00**	**C**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**26,370,000.00**	
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraam Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit	25,200,000.00	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraam Dinas Operasional atau Lapangan	21,810,000.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5,220,000.00	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,560,000.00	
II	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN				16,000,000.00	II	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	10,148,000.00	
A	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Provinsi**				**8,000,000.00**				
03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	8,000,000.00				
B	**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**				**8,000,000.00**	**A**	**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**8,028,000.00**	
03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	8,000,000.00	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	8,028,000.00	
III	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA				30,000,000.00	III	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	12,234,000.00	
A	**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin**				**30,000.000.00**	**A**	**Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat**	**12,234.000.00**	



NO	RANCANGAN AWAL RKPD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
	Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut								
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	1 Laporan	15,000,000.00				
04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	1 Laporan	15,000,000.00	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	12,234,000.00	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN				20,000,000.00	IV	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	10,000,000.00	
A	**Penatausahaan Izin, Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun**				**20,000,000.00**	**A**	**Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, Gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi**	**10,000,000.00**	



NO	RANCANGAN AWAL RKPD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaandan pengawasan aneka EBT (Kapasitas terpasang investasi) di Daerah	1 Laporan	10,000,000.00	02	Pembinaandan pengawasan aneka EBT (Kapasitas terpasang investasi) di Daerah	10,00,000.00	
02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaandan pengawasan aneka EBT (Kapasitas terpasang investasi) di Daerah	1 Laporan	10,000,000.00				
V	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				30,000,000.00	V	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	12,234,000.00	
A	**Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**				**30,000,000.00**	**A**	**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**	**12,234,000.00**	
02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilita Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	15,000,000.00				
03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilita Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	15,000,000.00	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas dalam Daerah	12,234,000.00	



BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas, Dinas ESDM Provinsi NTB berperan dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam rangka mewujudkan Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Kesejahteraan Masyarakat Nusa Tenggara Barat akan dijabarkaan kedalam 4 (sasaran) yang terdiri dari :

1. Meningkatnya kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik
2. Terlaksananya peningkatan status kegiatan usaha pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Meningkatnya pelaksanaan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah oleh Pemegang Izin Air Tanah
4. Terpenuhinya kebutuhan energi listrik yang andal, aman dan ramah lingkungan bagi masyarakat

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029 yang merupakan pelaksanaan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat DaerahTahun 2025-2029.

Selain itu penyusunan Rencana Strategis ini juga telah memperhatikan :

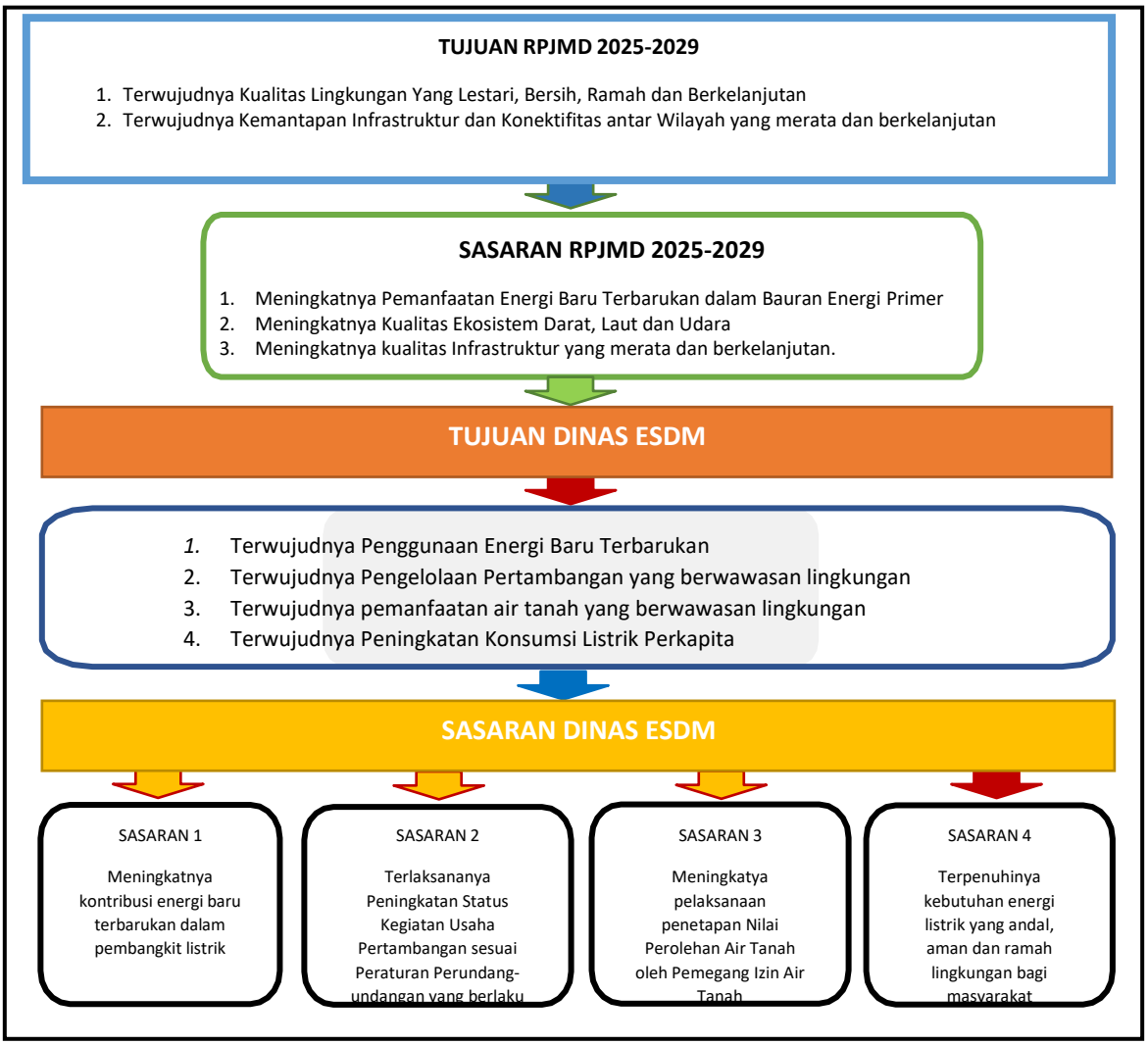
1. Penyelarasan target Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam Rancangan RPJPN Tahun 2025-2045.
2. Kesesuaian sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045.
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah dalam RPJMD Tahun 2019-2023.
4. Isu-isu strategis yang berkembang baik skala Provinsi maupun skala Nasional.
5. Kebijkan Daerah maupun Kebijakan Nasional, dan
6. Perkembangan regulasi.

Terdapat perubahan yang signifikan terkait dengan penyesuaian kewenangan akibat terbitnya beberapa peraturan dan perundang-undangan diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang.
2. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 291.K/GL.01/MEM/.G/2023 tentang Standar Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.

Penyesuaian kewenangan tersebut terdiri dari sub urusan pemerintahan bidang geologi yang menarik kewenangan pemerintah provinsi terhadap Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam Daerah provinsi. Adapun penyesuaian berikutnya adalah terkait dengan kewenangan terhadap sub urusan bidang mineral dan batubara yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang mendelegasikan sebagian pemberian perizinan berusaha bidang pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Provinsi terkait dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) serta Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).

Guna melaksanakan pendelegasian tersebut, Pemerintah Provinsi telah menyiapkan organisasi perangkat daerah serta program kegiatan untuk melaksanakannya. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.



Gambar 3.1 Tujuan dan Sasaran dalam mendukung Misi Pembangunan NTB dalam RPJMD 2025-2029



Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Dinas ESDM sebagai organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral bertanggung jawab terhadap peningkatan pelayanan diantaranya :

1. Peningkatan cakupan layanan dasar listrik dan peningkatan konsumsi listrik untuk produktifitas masyarakat.
2. Peningkatan kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi melalui pemanfaatan potensi energi setempat.
3. Pengendalian pemanfaatan air tanah sebagai bagian dari usaha Konservasi Air Tanah (GRK)
4. Peningkatan kontribusi sektor pertambangan mineral dan batubara melalui pengendalian dan pengawasan kegiatan pertambangan dan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara.

Keempat pelayanan terkait dengan urusan ESDM tersebut akan menjadi isu strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ESDM. Selanjutnya akan diselaraskan antara keempat isu strategis diatas dengan faktor eksternal berupa sasaran jangka menengah Kementerian ESDM, implikasinya terhadap RTRW dan KLHS yang akan digambarkan dalam tabel 3.1 berikut :

No	GAMBARAN PELAYANAN	SASARAN JANGKA MENENGAH K/L					SASARAN JANGKA MENENGAH PROVINSI					IMPLIKASI RTRW	IMPLIKASI KLHS
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
1	Peningkatan konsumsi listrik per kapita						580	609	639	668	698	Rencana pengembangan pembangkit dan jaringan listrik termasuk dalam jaringan energi dan kelistrikan termasuk didalamnya pengambangan bagi daerahterpencil dan kepulauan	Adanya potensi kerusakan lingkungan akibat dari pengembangan pembangkit dan jaringan listrik termasuk pemanfaatan energi terbarukan dalam pengembangan pembangkit listrik
2	Peningkatan kontribusi EBT dalam bauran energi	-	13,40	14,50	15,70	17,90	19,2	20,75	22,30	23,85	25,41	Penyediaan ruang bagi pengembangan EBT terutama bagi pengambangan pembangkit listrik	
3	Pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan	-	-	-	-	-	7.89	10.53	13.16	15.79	18.42	Konservasi daerah Cekungan Air Tanah	Degradasi daya dukung air tanah terkait dengan semakin meningkatnya pemanfaatan air tanah dan rusaknya daerah resapan air tanah



No	GAMBARAN PELAYANAN	SASARAN JANGKA MENENGAH K/L					SASARAN JANGKA MENENGAH PROVINSI					IMPLIKASI RTRW	IMPLIKASI KLHS
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
4	Pengendalian pertambangan mineral dan batubara melalui pelaksanaan kaidah usaha pertambangan yang baik dan benar	-	-	-	-	-	12,6	13,23	13,89	14,58	15,31	wilayah pertambangan yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang	Terganggunya fungsi tata ruang akibat kegiatan pertambangan akan menurunkan daya dukung lingkungan akibat pembukaan lahan dan pencemaran air

Tabel 3.1 Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

Dari gambaran tabel 3.1 diatas didapat informasi mengenai isu strategis yang akan ditangani dalam Rencana Kerja Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan konsumsi listrik per kapita;
2. Meningkatkan kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi;
3. Meningkatkan Konservasi dan pengendalian pemanfaatan air tanah;
4. Meningkatkan pengelolaan dan pengendalian kegiatan pertambangan mineral dan batubara.

Perubahan RTRW Provinsi NTB yang saat ini sedang dilakukan, dalam penyusunannya telah didasari atas KLHS sesuai dengan lingkup bidang yang akan mempengaruhi RTRW salah satunya bidang ESDM, berikut ini dijelaskan secara singkat mengenai hambatan dalam pelaksanaan pelayanan bidang ESDM kaitannya dengan KLHS dalam penyusunan RTWR

Untuk urusan pertambangan mineral dan batubara, pasca diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara pada tanggal 11 April 2022, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat baru secara efektif melaksanakan pengelolaan perizinan melalui *Online Single Submision* (OSS) bulan Oktober 2022. Pendelegasian tersebut meliputi perizian usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB) dan pertambangan rakyat. Sejak tahun 2022 sampai dengan triwulan III Tahun 20224 setidaknya telah terbit 295 izin di bidang pertambangan MBLB. Jumlah tersebut terdiri dari 145 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, 125 IUP Operasi Produksi, 3 Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB), 2 Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan 9 Izin Pengangkutan dan Penjualan MBLB dan 11 Izin Usaha Jasa Penunjang (IUJP) di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Potensi penerimaan negara dan daerah dari hasil kegiatan pertambangan di Provinsi Nusa tenggara Barat diantaranya adalah dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari *Landrent*, Iuran Produksi atau *Royalti* dari izin usaha pertambangan mineral logam, Retribusi, Pajak Daerah dan keuntungan bersih yang menjadi bagian provinsi dari IUP Khusus (sebagai kelanjutan Kontrak Karya). Kontribusi terbesar berasal dari PNBP pada tahun 2022 sebesar Rp. 2.041.856.003.629,- dengan bagian Provinsi sebesar Rp. 325.040.486.648,- selanjutnya kontribusi bagian pemerintah daerah dari keuntungan bersih IUPK pada tahun 2023 sebesar USD 1.111.650.000,- dengan bagian untuk pemerinta provinsi NTB sebesar 1,15 atau sebesar USD 16.674.750,-. Sedangkan pada tahun 2023 kontribusi terbesar berasal dari PNBP sebesar Rp. 2.041.856.003.629,- dengan bagian Provinsi sebesar Rp. 304.700.603.341,- selanjutnya kontribusi bagian pemerintah daerah dari keuntungan bersih IUPK sebesar USD 489.249.000,- dengan bagian untuk pemerinta provinsi NTB sebesar 1,15 atau sebesar



USD 7.338.735,-. Angka tersebut belum memasukkan potensi pendapatan daerah dari sektor pertambangan MBLB yang pada tahun 2025 akan diberlakukan opsen pajak MBLB sebesar 25% menjadi bagian dari provinsi. Potensi pemasukan pajak MBLB belum dapat dihitung dikarenakan belum adanya data pasti mengenai perkiraan produksi MBLB di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari gambaran diatas menunjukkan betapa pentingnya sektor ESDM terutama pertambangan didalamnya berkontribusi terhadap APBD Provinsi NTB.

Permasalahan yang dihadapi sektor pertambangan di provinsi NTB diantaranya adalah :

1. Masih adanya kegiatan pertambangan MBLB dan Mineral logam yang tidak berizin yang berpotensi terhadap kerusakan lingkungan dan hilangnya potensi pendapatan negara dan daerah dari sisi pajak dan PNBP
2. Saat ini Pemerintah pusat dan Pemeritah daerah sedang mempersiapkan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam rangka melegalisai kegiatan pertambangan rakyat tanpa izin sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Belum semua pemegang izin pertambangan baik MBLB maupun Mineral logam melaksanakan kewajiban teknis, administrasi dan keuangan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sebagian besar pemegang IUP MBLB tidak memiliki tenaga teknis yang tersertifikasi dan mempunyai kemampuan untuk menyusun dokumen laporan sebagai syarat dan kewajiban usaha pertambangan.
5. Perkembangan perubahan regulasi yang sangat cepat berpengaruh terhadap implementasi pelaksanaan perizinan pertambangan di daerah dan menjadi kendala bagi pemegang IUP untuk mengikutinya.

Pegelolaan pertambangan saat ini telah menjadi perhatian Pemerintah Pusat dimana akir-akhir ini banyak ditemukan kasus perizinan pertambangan yang telah menjadi isu nasional. Untuk itu Pemerintah Provinsi NTB telah melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan yang terkait dengan perizinan pertambangan dengan memperbaiki Standar Opersional Prosedur, meningkatkan pembinaan dan pengawasan dengan melibatkan unsur pemerintah pusat yang ada di daerah seperti inspektur Tambang.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Provinsi mempunyai peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak MBLB yang dapat digunakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama disekitar wilayah pertambangan.

Adanya kewajiban bagi usaha pertambangan untuk melaksanakan program pengembangan dan permberdayaan masyarakat (PPM) menjadikan peluang bagi daerah untuk memanfaatkan progran tersebut dalam rangka mendukung pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi daerah.

Energi kelistrikan menjadi salah satu sektor paling penting yang mendapatkan perhatian mengingat kontribusinya dalam pembentukan Gas Rumah Kaca. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sektor energi termasuk penghasil emisi GRK utama Bersama dengan sektor kehutanan dan sektor limbah.

Selain mendorong penggunaan EBT dalam penyediaan listrik, juga dilakukan upaya pengalihan bahan bakar *(fuel switching)* dan pemanfaatan gas buang semaksimal mungkin. Pengalihan sumber-sumber energi primer pembangkit dari Bahan Bakar Minyak (BBM) ke gas pada Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU), dan



Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) diikuti dengan pencampuran energi *biofuel* atau *biodiesel* pada pembangkit-pembangkit Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

Penyediaan tenaga listrik sampai dengan tahun 2029 memang masih akan didominasi oleh pembangkit berbahan bakar fosil terutama batu bara. Akan tetapi upaya untuk mengurangi pengoperasian pembangkit batu bara secara signifikan telah ditetapkan, termasuk pemanfaatan *coal based methane* (CBM) apabila keekonomiannya sudah memenuhi dan mampu bersaing dengan bahan bakar fosil konvensional. Selain itu, penggunaan teknologi hasil inovasi seperti *Integrated Gasification Combined Cycle* (IGCC) dan *Carbon Capture Utilization and Storage* (CCUS) untuk mengurangi emisi GRK secara signifikan, juga dimasukkan sebagai bagian dari komitmen dan target Pemerintah mengurangi emisi GRK selama proses transisi dari energi berbasis fosil menuju energi bersih.

Selain itu, dalam proses transisi Pemerintah juga berkomitmen memanfaatkan lebih banyak bahan bakar berbasis biomasa untuk digunakan secara bersama *(Co-Firing)* dengan batu bara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) *existing* dan yang sudah direncanakan atau terkontrak untuk dibangun untuk memenuhi kebutuhan energi listrik.

Energi Baru merupakan sumber energi yang berasal dari sumber-sumber energi hasil penemuan atau inovasi manusia yang belum pernah digunakan sebelumnya, baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batu bara *(coal bed methane),* batu bara tercairkan *(liquified coal)* dan batu bara tergaskan *(gasified coal).* Selain itu, sumber-sumber EBT yang dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik antara lain adalah biomassa, *biofuel*, biogas dan energi laut, *Ocean Thermal Energy Conversion* (OTEC), bio CNG, dan *fuel cell*/Hidrogen.

Pengembangan EBT dalam periode transisi hingga 10 tahun ke depan dilakukan secara intensif dengan tetap menjaga keseimbangan *supply and demand*. Inisiatif strategis juga diperlukan dalam rangka menjamin kecukupan pasokan dan meningkatkan bauran energi dari pembangkit Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di masa depan dengan harga energi listrik dari pembangkit EBT yang semakin optimal.

Inisiatif strategis peningkatan bauran dan pemanfaatan EBT sebagai pasokan pembangkit tenaga listrik dilakukan antara lain dengan: pengembangan pembangkit EBT dengan tetap memperhatikan :

1. Keseimbangan *supply-demand*;
2. Kesiapan sistem tenaga listrik dan keekonomian;
3. Pemanfaatan sumber energi terbarukan baik dari jenis energi aliran dan terjunan air, energi panas bumi (termasuk skala kecil/modular), biofuel, energi angin, energi sinar matahari, biomasa, sampah dan lain-lain;
4. Pengembangan *microgrid* dengan menerapkan tersebar/terpusat PV, tenaga bayu, atau pico-hydro untuk daerahdaerah terisolir/komunitas terpencil yang jauh dari jaringan PLN pada daerah tertinggal, dan pulau-pulau terluar lainnya sesuai dengan potensi energi yang tersedia;
5. Pengembangan PLTS di lahan bekas tambang yang sudah tidak beroperasi;
6. Pemanfaatan waduk-waduk untuk PLTS Terapung sehingga dapat menurunkan biaya pembebasan lahan dengan tetap mempertimbangkan kajian operasi dan pemeliharaannya;
7. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) *hybrid* dengan PLTD untuk daerah dengan jam nyala rendah (di bawah 12 jam/hari).



Inovasi Pengembangan EBT

Dibandingkan dengan pembangkit berbasis fosil pada umumnya, secara ekonomi pembangkit-pembangkit bersumber EBT belum dapat berkompetisi secara *head to head.* Meskipun demikian, pengembangan teknologi dan inovasi di bidang penyediaan sumber energi bersih sudah sangat maju, apalagi bilamana dilihat dari harga keekonomian pada 10 atau 20 tahun yang lalu.

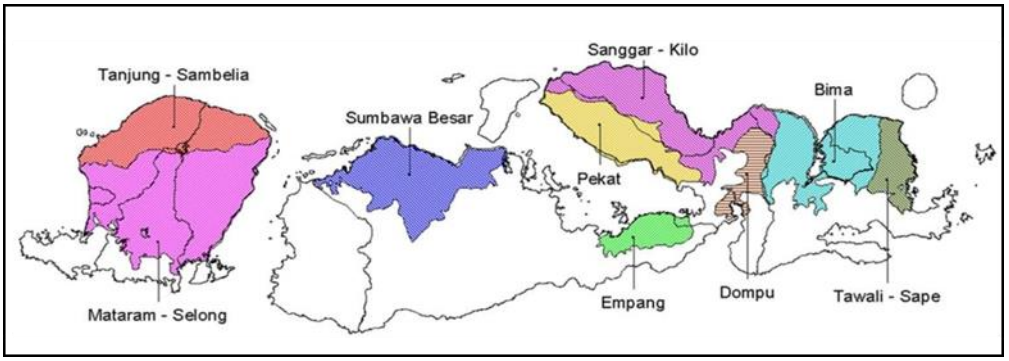
Pembangkit hidrogen juga menjadi opsi yang dapat diandalkan sekaligus aman, seiring perkembangan dan inovasi teknologi yang tersedia. Akan dibuat ekosistem bisnis yang memungkinkan *hydrogen economy* dapat bekerja, dengan *streamlining* produksi hidrogen maupun pemanfaatan hidrogen untuk *large scale power plant*.

Inovasi pengembangan EBT juga dilakukan tidak hanya berbasis sumber energinya, tetapi juga dalam pengelolaannya sampai di tingkat konsumen listrik. Elektrifikasi sektor transportasi berbasis BBM baik bus, truk, mobil penumpang pribadi maupun motor listrik untuk mewujudkan *green to green concept*. Dengan demikian, akan terbangun ekosistem di mana *"Green power plant powering green car and houses.". Milestones* (Tonggak) Penting.

Dalam rangka pengelolaan air tanah yang menjadi kewenangan Provinsi, Pemerintah Provinsi NTB telah melakukan penataan terhadap perizinan Surat Izin Pengeboran (SIP) dan Surat Izin Pemnafaatan Air tanah (SIPA). Hingga akhir Desember 2022, sebanyak 173 SIP dan 646 SIPA telah diterbitkan melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Namun demikian pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, kewenangan Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam Daerah provinsi dicabut menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sehingga kewenangan Pemerintah Provinsi sub urusan pemerintahan bidang geologi hanya pada Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah provinsi dan Penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah provinsi. Namun demikian perizinan pemanfaatan air tanah masih dilaksanakan oleh Provinsi sambil menunggu peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. Pasca terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 259.K/GL.01/MEM.G/2022 tentang Standar Penyelenggaraan izin Pengusahaan Air Tanah, seluruh pengelolaan perizinan pemanfaatan air tanah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Badan Geologi Kementerian ESDM.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalisifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, kegiatan dalam Program Aspek Kegeologian tidak lagi mendukung kegiatan geologi lingkungan melainkan terbatas pada pengelolaan air tanah yang mencakup kegiatan penetapan zona konservasi air tanah, penatausahaan izin pengeboran air tanah dan penetapan nilai perolehan air tanah. Kegiatan yang termasuk dalam Program Pengelolaan Aspek Kegeologian lebih menitikberatkan kepada pengelolaan konservasi air tanah. Sedangkan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah yang selama ini dilaksanakan melalui pembangunan sumur bor tidak terdapat lagi pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Dalam Renstra Tahun 2024-2026 Program pengelolaan aspek kegeologian lebih menekankan pada konservasi air tanah dan penetapan Nilai perolehan Air. Dalam pengelolaan konservasi air tanah dibutuhkan data potensi dan kondisi air tanah terkini. Provinsi NTB memiliki 9 cekungan air tanah (CAT), dua diantaranya belum dilakukan pemetaan potensinya. Data potensi air tanah tersebut merupakan data tahun 2004 yang perlu dilakukan reviu untuk mengatahui kondisi air tanah sebagai dasar

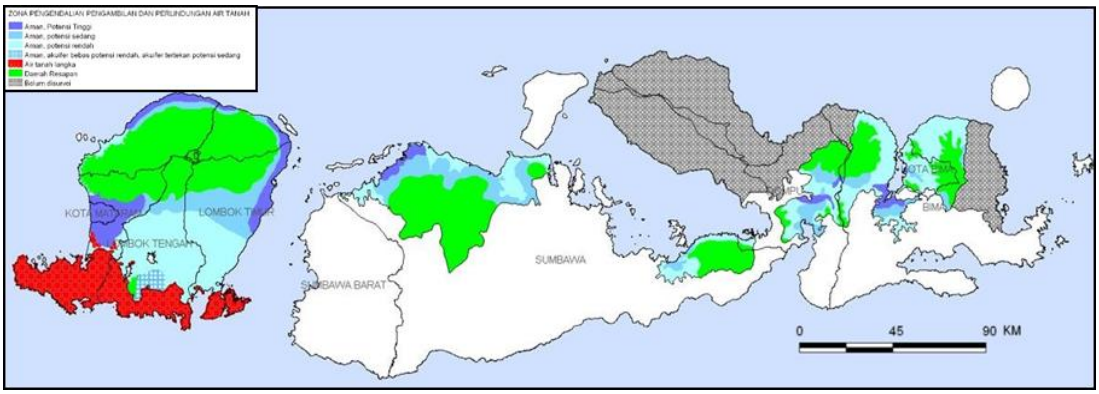
dalam pengendalian pemanfaatan air tanah dan penentuan nilai perolehan air tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.



Gambar 3.2. Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024

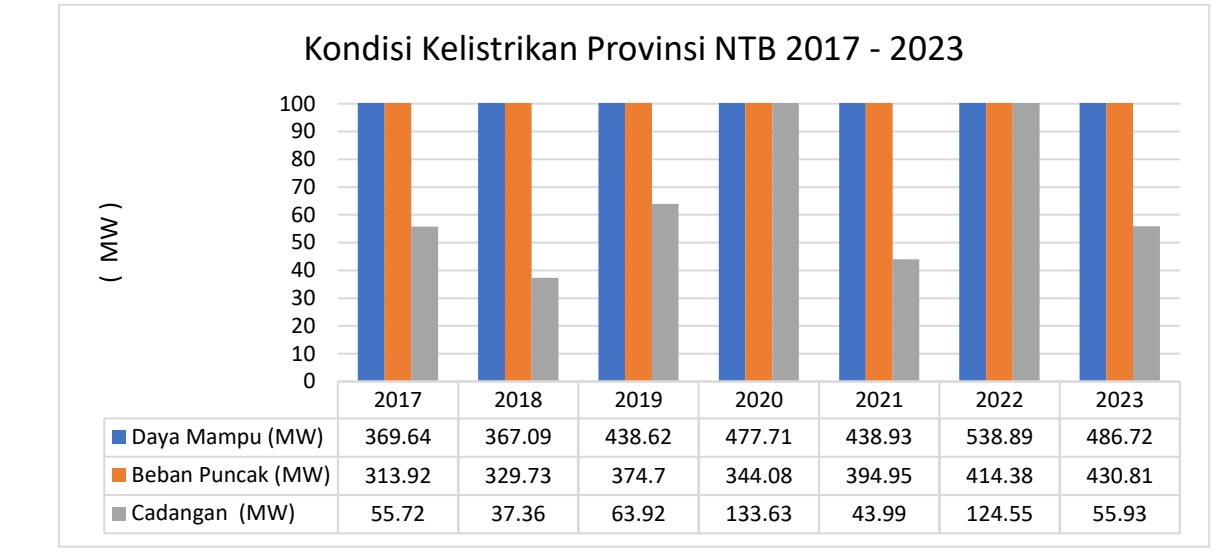
Tabel 3.2 Potensi Cekungan Air Tanah di Provinsi NTB

Cekungan Air Tanah (CAT)			Jumlah Air Tanah (Juta M^3/Tahun)		Kategori CAT			
					Pusat		Provinsi	Kab/Kota
No	Nama	Luas (KM^2)	Bebas (Q_1)	Tekanan (Q_2)	A1	A2	B	C
1	Mataram - Selong	2.366	662	8			√	
2	Tanjung - Sambelia	1.124	224	22			√	
3	Sumbawa Besar	1.404	183	25				√
4	Empang	345	35	3			√	
5	Pekat	977	220	10			√	
6	Sanggar – Kilo	1.419	320	14			√	
7	Dompu	375	63	6				√
8	Bima	1.102	165	16			√	
9	Tawali - Sape	363	36	3				√



Gambar 3.3. Peta Zona Pegendalian Pemgambilan dan Perlindungan Air Tanah

Sejak Tahun 2014 kondisi kelistrikan Provinsi NTB semakin membaik, sampai dengan akhir Tahun 2023 daya mampu sebesar 486,72 MW dengan beban puncak 430.81 MW sehinga terdapat cadangan sebesar 55.93 MW yang masuk dalam kategori Normal. Untuk melihat perkembangan kondisi kelistrikan Provinsi NTB dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini :



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Daya Mampu (MW)	369.64	367.09	438.62	477.71	438.93	538.89	486.72
Beban Puncak (MW)	313.92	329.73	374.7	344.08	394.95	414.38	430.81
Cadangan (MW)	55.72	37.36	63.92	133.63	43.99	124.55	55.93

Gambar 3.4 Perkembangan Kondisi Kelistrikan NTB Tahun 2017- 2023

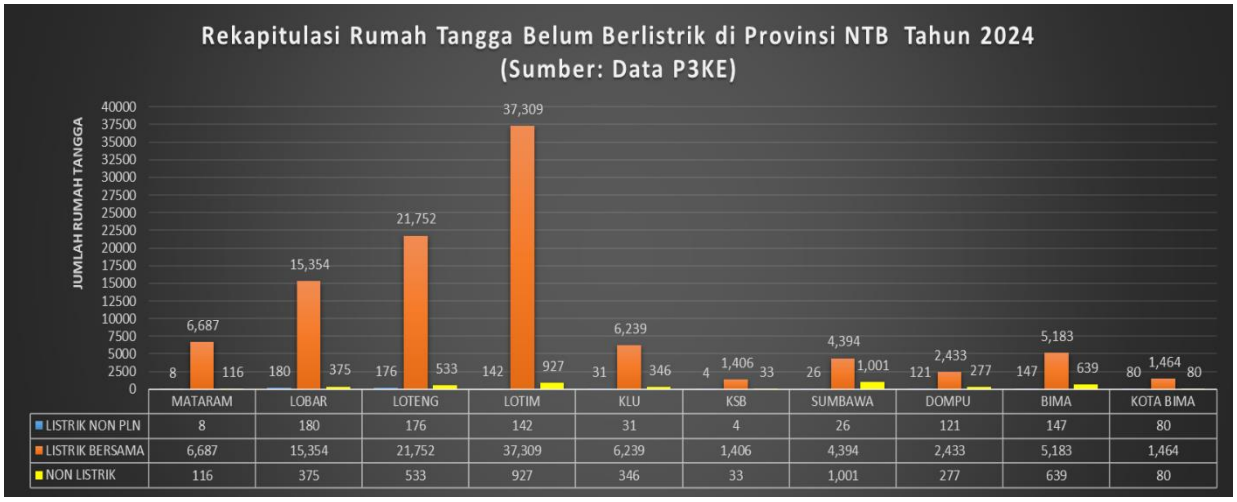
Capaian target rasio elektrifikasi ditopang adanya faktor ketersediaan daya listrik yang semakin meningkat sejak tahun 2014. Peran Dinas ESDM terhadap capaian indikator rasio elektrifikasi tersebut terkait dengan koordinasi yang baik antara Pemerintah, PemerintahProvinsi, PLN Wilayah NTB dan seluruh *stakehorder* terkait sesuai dengan fungsinya masing- masing. Peningkatan rasio elektrifikasi juga dilaksanakan melalui program . Program pemasangan listrik murah dan hemat merupakan program Kementerian ESDM sejak tahun 2012 hingga tahun 2015, kemuadian Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas ESDM melaksanakannya sejak tahun 2014 hingga saat ini, jumlah pemasangan listrik murah dan hemat hingga tahun 2024 telah dinikmati oleh 36.023 Rumah Tangga. Program tersebut berfokus terhadap masyarakat miskin yang rumahnya sudah dilalui jaringan listrik namun tidak mampu untuk memasang listrik secara mandiri.



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target RE (%)	75.00	94.46	95.05	99.77	99.88	99.99
Realisasi RE (%)	93.83	99.55	99.98	99.98	99.98	99.99

Gambar 3.5 Capaian Indikator Kinerja Utama Rasio Elektrifikasi Tahun 2018- 2023

Pada Tahun 2022 Menteri ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bantuan Pasang Baru Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak mampu yang pelaksanaannya mensarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Regsosek bertujuan untuk menyediakan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan. Termasuk basis data untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Regsosek menghasilkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dimaksudkan sebagai referensi penetapan sasaran bagi program penghapusan kemiskinan ekstrem yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana salah satu variabel data yang disajikan adalah sumber penerangan yang digunakan oleh rumah tangga miskin. Berdasarkan data sumber penerangan yang digunakan oleh rumah tangga miskin Desil 1-3 dapat digambarkan dalam Gambar 3.5. di bawah ini :



	MATARAM	LOBAR	LOTENG	LOTIM	KLU	KSB	SUMBAWA	DOMPU	BIMA	KOTA BIMA
LISTRIK NON PLN	8	180	176	142	31	4	26	121	147	80
LISTRIK BERSAMA	6,687	15,354	21,752	37,309	6,239	1,406	4,394	2,433	5,183	1,464
NON LISTRIK	116	375	533	927	346	33	1,001	277	639	80

Gambar 3.6 Jumlah Rumah Tangga Miskin yang belum mempunyai Listrik dan Menggunakan Listrik secara bersama pada Tahun 2024

Kemudian untuk lebih operasionalnya tujuan dan sasaran dinas dibuatlah *Cascading* Renstra Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan pada gambar dibawah ini :

OPD	Tujuan 1. Terwujudnya penggunaan energi baru terbarukan. 2. Terwujudnya pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan. 3. Terwujudnya pemanfaatan air tanah yang berwawasan lingkungan 4. Terwujudnya Peningkatan Konsumsi Listrik			
	Indikator Kinerja : 1. Porsi EBT dalam bauran energi primer (%) 2. Persentase IUP yang melaksanakan kaidah usaha pertambangan yang baik dan benar (Good Mining Practices). 3. Persentase pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan 4. Konsumsi Listrik per kapita			
Kepala OPD	Sasaran 1. Meningkatnya kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik	Sasaran 2. Terlaksananya peningkatan status kegiatan usaha pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sasaran 3. Meningkatnya pelaksanaan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah oleh pemegang izin air tanah.	Sasaran 4. Terpenuhinya kebutuhan energi listrik yang andal, aman dan ramah lingkungan bagi masyarakat.
	Indikator Kinerja : Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik (%)	Indikator Kinerja : Persentase penyelesaian permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku	Indikator Kinerja : Persentase pemegang izin air tanah yang melaksanakan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.	Indikator Kinerja : Rasio Elektrifikasi
Eselon III	Program : Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Program : Pengelolaan Mineral dan Batubara	Program : Pengelolaan Aspek Kegeologian	Program : Pengelolaan Ketenagalistrikan
	Sasaran Program : Meningkatnya jumlah sarana/fasilitas	Sasaran Program : Terlaksananya peningkatan status kegiatan usaha	Sasaran Program : Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah.	1. Meningkatnya jumlah pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk



	pemanfaatan energi baru terbarukan	pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku		mendukung pengembangan sub sektor ketenagalistrikan 2. Sasaran Program : Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat tidak mampu.
	Indikator Kinerja : Persentase Sarana/Fasilitas Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan yang dikendalikan	Indikator Kinerja : Persentase izin usaha pertambangan yang dikendalikan	Indikator Kinerja : Persentase izin pemanfaatan air tanah yang dikendalikan.	1. Persentase usaha bidang ketengalistrikan yang dikendalikan 2. Indikator Kinerja : Persentase masyarakat tidak mampu yang terlayani listrik PLN

Gambar 3.7 Cascading Renstra Dinas ESDM NTB Tahun 2025-2029

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas ESDM Provinsi NTB, maka kebijakan yang terkait dalam Program Prioritas Daerah yang terkait dengan :

1. Meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi primer
2. Meningkatkan kualitas ekosistem darat, laut dan udara
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Adapun Tujuan dan sasaran rencana kerja dirumuskan berdasarkan isu-isu penting yang sudah rencana kerja untuk tahun 2025 didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Tabel 3.3. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
					2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	((10)
1	Terwujudnya Penggunaan energi baru terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	Meningkatnya kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik (%)	15.00	15.50	16.00	16.50	17.00
2	Terwujudnya pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan	Persentase IUP yang melaksanakan kaidah usaha pertambangan yang baik dan benar (Good Mining Practice)	Terlaksananya peningkatan status kegiatan usaha pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase penyelesaian permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku (%)	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00
3	Terwujudnya pemanfaatan air tanah yang berwawasan lingkungan	Persentase Pengelolaan Air Tanah yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya pelaksanaan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah oleh Pemegang Izin Air Tanah	Persentase Pemegang Izin Air Tanah yang melaksanakan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah sesuai aturan Perundang-undangan yang berlaku (%)	10.53	13.16	15.79	18.42	21.05
4	Terwujudnya Peningkatan Listrik	Konsumsi Listrik Perkapita	Terpenuhinya Kebutuhan Energi Listrik yang andal, aman dan ramah lingkungan bagi masyarakat	Rasio Elektrifikasi (%)	100	100	100	100	100



Berdasarkan tabel 3.3 di atas terdapat empat sasaran Dinas ESDM Tahun 2025-2029 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik dengan indikator persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik (%). Indikator tersebut dihitung melalui rasio jumlah kapasitas pembangkit listrik energi baru terbarukan terhadap jumlah total kapasitas pembangkit listrik dikali 100 %.
2. Terlaksananya peningkatan status kegiatan usaha pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan indikator persentase penyelesaian permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator tersbut diperoleh dengan membandingkan jumlah permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang berhasil diselesaikan dibandingkan dengan total seluruh permohonan yang diterima.
3. Meningkatnya pelaksanaan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah oleh pemegang izin air tanah dengan indikator Persentase pemegang izin air tanah yang melaksanakan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.Indikator tersebut dihitung dari jumlah pemegang izin air tanah yang melaksanakan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dibandingkan jumlah keseluruhan pemegang izin air tanah.
4. Terpenuhinya kebutuhan energi listrik yang andal, aman dan ramah lingkungan bagi masyarakat dengan indikator Rasio Elektrifikasi (%). Indikator tersebut dihitung melalui rasio jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik dibandingkan jumlah keseluruhan rumah tangga dikali 100 %.

3.3 Program dan Kegiatan

Guna mendukung tujuan dan sasaran Renstra sebagai jabaran dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025-2029, maka melalui Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 yang akan datang akan melaksanakan 5 Program dengan 20 Kegiatan dan 66 Sub Kegiatan dengan berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2025 mengalami perubahan yang sangat signifikan, jika sebelumnya menggunakan dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dengan Program dan kegiatan berjumlah 11 program dan 41 kegiatan.

Untuk itu pada tahun 2025 akan dilaksanakan lima program yang terdiri dari satu program penunjang dan empat program prioritas yang teriri dari :

A. Dinas :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Program ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran, melalui peningkatan kualitas administrasi dan ketatalaksanaan serta penyedian gaji dan tunjangan ASN dengan rencana anggaran sebesar Rp. 11.071.572.528,- Kegiatan-kegiatan dari program ini adalah :

   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 7 (tujuh) sub kegiatan;
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 5 (lima) sub kegiatan;
   c. Administrasi Barang Milik Deerah pada Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah dengan 4 (empat) sub kegiatan;
   d. Administrasi Kepegawaian dengan Perangkat Daerah dengan 2 (dua) sub kegiatan;



e. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 7 (tujuh) sub kegiatan;
f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 3 (tiga) sub kegiatan;
g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 3 (tiga) sub Kegiatan;
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 4 (empat) sub kegiatan.

2. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian.
Program pengelolaan aspek kegeologian bertujuan untuk mewujudkan konservasi air tanah melalui pengendalian pemanfaatan air tanah secara berkelanjutan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 159.991.450,-. Anggaran tersebut digunakan untuk pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah, penetapan nilai perolehan air tanah melalui 2 (dua) kegiatan yaitu :
a. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi dengan 1 (satu) sub kegiatan;
b. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi dengan 2 (dua) sub kegiatan.

3. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara.
Program pengelolaam mineral dan batubara bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan pengusahaan pertambangan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar (good mining practices) dengan rencana angaran sebesar Rp. 479.497.025,- yang digunakan untuk membiayai 3 (tiga) kegiatan yaitu :
a. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Atau Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut dengan 2 (dua) sub kegiatan;
b. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat dengan 3 (tiga) sub kegiatan dan
c. Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan 1(satu) sub kegiatan.

4. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
Program pengelolaan energi terbarukan bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan energi yang berkelanjutan dengan sasaran untuk meningkatkan kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi dengan target bauran energi pada tahun 2025 sebesar 23,00%. Rencana anggaran untuk program ini sebesar Rp. 581.246.640,-. Untuk meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan sebagai sumber alternatif yang murah dan ramah lingkungan maka untuk tahun 2025 direncanakan pembangunan instalasi digester biogas sejumlah 18 unit dengan rencana lokasi pembangunan di pulau lombok. Program pengelolaan energi terbarukan dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan dengan yaitu:
a. Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun dengan 2(dua) sub kegiatan;
b. Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi dengan 3 (tiga) sub kegiatan;



c. Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi dengan 2 (dua) sub kegiatan;
d. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi dengan 1(satu) sub Kegiatan.

5. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
Program ini bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat dengan rencana anggaran sebesar Rp. 1.163.240.900,- yang akan digunakn untuk membiayai penyambungan listrik murah dan hemat bagi 600 Rumah Tangga Sasaran, pembinaan dan pengawasan usaha ketenagalistrikan serta pelayanan periziona di bidang ketenagalistrikan melalui dua kegiatan yaitu :
a. Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi dengan 2 (dua) sub kegiatan;
b. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan dengan 2 (dua) sub kegiatan.

B. Cabang Dinas :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Program ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran, melalui peningkatan kualitas administrasi dan ketatalaksanaan serta penyedian gaji dan tunjangan ASN dengan rencana anggaran sebesar Rp. 318.491.970,- Kegiatan-kegiatan dari program ini adalah :
a. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 4 (empat) sub kegiatan;
b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 3 (tiga) sub Kegiatan;
c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 2 (dua) sub kegiatan dan
d. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan 1 (satu) sub kegiatan.

2. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian.
Program pengelolaan aspek kegeologian bertujuan untuk mewujudkan konservasi air tanah melalui pengendalian pemanfaatan air tanah secara berkelanjutan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 8.028.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah, penetapan nilai perolehan air tanah melalui 2 (dua) kegiatan yaitu :
a. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi dengan 1 (satu) sub kegiatan;
b. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi dengan 1 (satu) sub kegiatan.

3. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara.
Program pengelolaam mineral dan batubara bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan pengusahaan pertambangan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar (good



mining practices) dengan rencana angaran sebesar Rp. 12.234.000,- yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) kegiatan yaitu :

a. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat dengan 1 (satu) sub kegiatan.

4. Program Pengelolaan Energi Terbarukan

   Program pengelolaan energi terbarukan bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan energi yang berkelanjutan dengan sasaran untuk meningkatkan kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi dengan target bauran energi pada tahun 2025 sebesar 23,00%. Rencana anggaran untuk program ini sebesar Rp. 581.888.640,-. Untuk meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan sebagai sumber alternatif yang murah dan ramah lingkungan maka untuk tahun 2025 direncanakan pembangunan instalasi digester biogas sejumlah 18 unit dengan rencana lokasi pembangunan di pulau lombok. Program pengelolaan energi terbarukan dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dengan yaitu:

   a. Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi dengan 1 (satu) sub kegiatan.

5. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

   Program ini bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat dengan rencana anggaran sebesar Rp. 12.234.000,- yang akan digunakn untuk membiayai penyambungan listrik murah dan hemat bagi 600 Rumah Tangga Sasaran, pengendalian dan pengawasan usaha ketenagalistrikan di bidang ketenagalistrikan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu :

   c. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi dengan 1 (satu) sub kegiatan.

Uraian lebih lengkap mengenai rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun Tahun 2026



Tabel 3.6 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						**21.372.405.144,00**							**23.476.575.607,40**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**21.372.405.144,00**							**23.476.575.607,40**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						**21.372.405.144,00**							**23.476.575.607,40**	
1.	**3.29.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai SAKIP***	-			**83 SAKIP**	**11.291.109.237,96**						-	**12.387.150.110,76**	
	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	-			2 Dokumen	506.847.353,74			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	524.462.038,12	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	101.412.076,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		111.553.284,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	51.488.592,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		56.637.451,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	45.487.892,40	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		50.036.681,64	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	42.355.588,30	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		64.591.147,13	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	46.427.319,27	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	46.112.376,21	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		50.723.613,83	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	173.563.509,56	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		190.919.860,52	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	8.613.607.561,83			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-	-	9.474.968.318,01	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/ Bulan	8.506.178.554,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		9.356.796.409,40	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	47.793.183,63	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		52.572.501,99	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	5.765.182,09	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		6.341.700,30	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	22.071.761,17	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		24.278.937,29	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	19.102.905,61	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		21.013.196,17	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	1.149.427,22	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		1.264.369,94	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	5.748.837,23	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		6.323.720,95	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	5.797.710,88	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		6.377.481,97	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	45.798.582,58			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-	-	50.378.440,83	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3.263.338,81	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		3.589.672,69	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	16.576.464,59	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		18.234.111,05	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	17.241.408,23	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		18.965.549,05	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	6.664.493,94	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		7.330.943,33	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	2.052.877,01	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		2.258.164,71	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	66.661.261,26			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-	-	73.327.387,39	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	5.351.733,12	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		5.886.906,43	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	3.838.167,36	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		4.221.984,10	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	57.471.360,78	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		63.218.496,86	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	291.762.306,78			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-	-	320.938.537,46	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	11.483.122,71	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		12.631.434,98	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	28.724.416,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		31.596.857,60	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	6.675.873,27	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		7.343.460,60	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	41.590.874,37	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		45.749.961,81	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	19.116.813,68	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Penin gkatan Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-		21.028.495,05	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				20 Paket	11.198.754,42	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Penin gkatan Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-		12.318.629,86	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	22.972.452,33	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Penin gkatan Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-		25.269.697,56	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Penin gkatan Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-		165.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	871.419.962,00			-	PD-5 Penin gkatan Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-	-	958.561.958,20	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	740.046.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Penin gkatan Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-		814.051.656,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	10.139.235,40	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Penin gkatan Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-		11.153.158,94	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	121.233.766,60	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Penin gkatan Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-		133.357.143,26	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	572.184.249,74			-	PD-5 Penin gkatan Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-	-	629.402.674,72	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2000 Laporan	4.994.261,25	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Penin gkatan Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-		5.493.687,38	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	183.793.411,78	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Penin gkatan Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-		202.172.752,96	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	14.896.576,71	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Penin gkatan Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-		16.386.234,38	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	368.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Penin gkatan Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-		405.350.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	322.827.960,03			-	PD-5 Penin gkatan Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-	-	355.110.756,03	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				9 Unit	55.011.586,54	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Penin gkatan Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-		60.512.745,19	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	167.816.373,49	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Penin gkatan Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-		184.598.010,84	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Penin gkatan Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-		27.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Penin gkatan Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-		82.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.	**3.29.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	***Persentase zona konservasi air tanah pada Cekungan Air Tanah dalam daerah provinsi yang dikendalikan***	-			**22,22 %**	**2.023.328.307,41**						-	**2.225.661.138,15**	
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	*Jumlah kajian teknis penetapan zona konservasi air tanah*	-			9 Dokumened	1.913.328.307,41			-	PD-3 Pemb angunan Lingkungan	Tersedianya kajian teknis sebagai bahan kebijakan penetapan zona konservasi air tanah	-	2.104.661.138,15	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah														
			Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				9 Dokumen	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-3 Pemb angunan Lingkungan	Tersedianya kajian teknis sebagai bahan kebijakan penetapan zona konservasi air tanah		99.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah														
			Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi				0 Dokumen	1.823.328.307,41	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pemb angunan Lingkungan	Tersedianya kajian teknis sebagai bahan kebijakan penetapan zona konservasi air tanah		2.005.661.138,15	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pemb angunan Lingkungan	Tersedianya kajian teknis sebagai bahan kebijakan penetapan zona konservasi air tanah		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-			-	110.000.000,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-	-	121.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul				10 Dokumen	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		60.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah														
			Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				10 Laporan	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		60.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.	**3.29.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	***Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya***	-			**2,5-3,2 %**	**558.500.000,00**						-	**614.350.000,00**	
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	*Terlaksananya pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yangJumlah IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dan IPR yang melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku*	-			3 Dokumen	252.500.000,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku	-	277.750.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut															
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				64 Dokumen	160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku		176.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut															



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				37 Laporan	92.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku		101.750.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	-	-			-	220.000.000,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-	-	242.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat				1 Laporan	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		66.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0003	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat				20 Dokumen	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		121.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		55.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-			-	86.000.000,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-	-	94.600.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam				69 Laporan	86.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		94.600.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
4.	**3.29.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	***Jumlah sarana/fasilitas instalasi pemanfaatan EBT dalam kondisi baik***	-			**35,69 %**	**5.589.467.598,63**						-	**6.148.414.358,49**	
	3.29.05.1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	*Jumlah izin usaha bahan bakar nabati yang melaksanakan kegiatan usaha niaga sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku*	-			1 Izin	68.000.000,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Meningkatnya jumlah sarana/fasilitas pemanfaatan energi baru terbarukan	-	74.800.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.03.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun				1 Dokumen	42.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Meningkatnya jumlah sarana/fasilitas pemanfaatan energi baru terbarukan		46.200.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun														
			Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun				1 Laporan	26.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Meningkatnya jumlah sarana/fasilitas pemanfaatan energi baru terbarukan		28.600.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	-	-			-	581.467.598,63			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-	-	639.614.358,49	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0001	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa														
			jumlah dokumen data potensi biomassa				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		110.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0002	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas														
			Jumlah laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas				0 Laporan	161.467.598,63	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		177.614.358,49	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.05.1.05.0003	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biomassa														
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biomassa				0 Laporan	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan LIngkungan	-		121.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0004	Perencanaan kegiatan penyediaan biomassa														
			Jumlah rencana kegiatan penyediaan biomassa				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0005	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa														
			Jumlah laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0006	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas														
			Jumlah dokumen data potensi biogas				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-3 Pembangunan LIngkungan	-		110.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0007	Perencanaan kegiatan penyediaan biogas														
			Jumlah rencana kegiatan penyediaan biogas				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0008	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas														
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas				1 Laporan	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-3 Pembangunan LIngkungan	-		121.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.05.1.06	Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	-	-			-	125.000.000,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-	-	137.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.06.0001	Revitalisasi infrastruktur biomassa dan/atau biogas														
			Jumlah infrastruktur biomassa dan/atau biogas yang direvitalisasi				0 Unit	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		137.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.06.0003	Pemeliharaan infrastruktur biomassa dan/atau biogas														
			Jumlah unit infrastruktur biomassa dan/atau biogas yang dipelihara				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	-	-			-	4.700.000.000,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-	-	5.170.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah														
			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah				4 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		220.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0005	Revitalisasi infrastruktur aneka EBT														
			Jumlah infrastruktur aneka EBT yang direvitalisasi				0 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		440.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT														
			Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT				5 unit	2.000.000.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Mataram, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		2.200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.05.1.07.0009	Pemeliharaan Infrastruktur aneka EBT														
			Jumlah unit infrastruktur aneka EBT yang dipelihara				0 unit	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		2.200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0010	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah														
			Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		110.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	-	-			-	115.000.000,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-	-	126.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.10.0003	Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat														
			Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat				1 laporan	115.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		126.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
5.	**3.29.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	***Jumlah penambahan izin usaha ketenagalistrikan yang dilayani***	-			**20 izin**	**1.910.000.000,00**						-	**2.101.000.000,00**	
	3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	*Jumlah izin usaha yang melaksanakan kegiatan bidang ketenagalistrikan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku*	-			1 izin	90.000.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Meningkatnya jumlah pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk mendukung pengembangan ekonomi sub sektor ketenagalistrikan	-	99.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.01.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi															
			Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				1 Dokumen	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Meningkatnya jumlah pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk mendukung pengembangan ekonomi sub sektor ketenagalistrikan		49.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi															



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Meningkatnya jumlah pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk mendukung pengembangan ekonomi sub sektor ketenagalistrikan		49.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	-			-	1.820.000.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-	-	2.002.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu														
			Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1 Dokumen	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		66.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan														
			Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				600 Unit	1.760.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		1.936.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA						**444.136.000,00**							**488.149.600,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**444.136.000,00**							**488.149.600,00**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						**444.136.000,00**							**488.149.600,00**	
1.	**3.29.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-			-	**324.136.000,00**						-	**356.149.600,00**	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-	-	0,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	51.500.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-	-	56.250.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		4.400.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	4.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		4.550.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		3.300.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		44.000.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	242.216.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-	-	266.437.600,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		1.100.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		55.000.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		2.200.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	189.216.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		208.137.600,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	30.420.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-	-	33.462.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	25.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		27.720.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	5.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		5.742.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
2.	**3.29.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	-	-			-	**30.000.000,00**						-	**33.000.000,00**	
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-			-	15.000.000,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-	-	16.500.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				0 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		16.500.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-			-	15.000.000,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-	-	16.500.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				5 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		16.500.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
3.	**3.29.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	-	-			-	**30.000.000,00**						-	**33.000.000,00**	
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-	-			-	30.000.000,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-	-	33.000.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut															



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		16.500.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut															
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				0 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		16.500.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
4.	**3.29.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	-	-			-	**30.000.000,00**						-	**33.000.000,00**	
	3.29.05.1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	-	-			-	30.000.000,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-	-	33.000.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.05.1.03.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun														
			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		16.500.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.05.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun														
			Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun				0 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		16.500.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
5.	**3.29.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	-	-			-	**30.000.000,00**						-	**33.000.000,00**	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	-	-			-	30.000.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-	-	33.000.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.06.1.01.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi															
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		16.500.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.06.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi															
			Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				0 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		16.500.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	JUMLAH							**21.816.541.144,00**							**23.964.725.207,40**	



BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Recana Kerja Perubahan Dinas ESDM Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah tahap pertama dalam dokumen RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045. Dalam dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029 telah ditetapkan Visi Kepala Daerah terpilih yaitu "***Bangkit Bersama Menjuju NTB Provinsi Kepulauan Yang Makmur dan Mendunia***" yang dijabarkan kedalam tujuh Misi. Dari ketujuh Misi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029, terdapat dua Misi yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi dan kewenangan Dinas ESDM sebagai Perangkat Daerah yaitu ***Misi kelima yaitu "Memperkuat sistem mitigasi bencana, pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan investasi berkelanjutan" dan Misi keenam yaitu "Memantapkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah yang berwawasan lingkungan serta memastikan penegakan tata ruang yang berkelanjutan"***.

Strategi dan arah kebijakan Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Barat mengacu pada startegi dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029 dalam mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah. Dinas ESDM Provinsi NTB mengemban tugas untuk melaksanakan tujuan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029 yang terdiri dari :

1. Terwujudnya penggunaan energi baru terbarukan
2. Terwujudnya pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan
3. Terwujudnya pemanfaatan air tanah yang berwawasan lingkungan
4. Terwujudnya Konsumsi Listrik Perkapita

Adapun sasaran dalam Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029 yang sejalan dengan tujuan diatas terdiri dari :

1. Meningkatnya Kontribusi Energi Baru Terbarukan dalam pembangkit Listrik
2. Terlaksananya peningkatan status kegiatan usaha pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Meningkatkan pelaksanaan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah oleh Pemegang Izin Air Tanah
4. Terpenuhinya kebutuhan energi Listrik yang andal, aman dan ramah lingkungan bagi masyarakat

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2025-2029 diperlukan beberapa sasaran dan strategi untuk menjawab isu-isu strategis bidang Energi dan Sumber Daya Mineral melalui rumusan pernyataan sasaran dan strategi Dinas ESDM Provinsi NTB sebagai berikut :

a. Sasaran :
    1. Bidang Energi Baru Terbarukan yaitu Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi primer
    2. Bidang Mineral dan Batubara yaitu Meningkatnya Kualitas Ekosistem Darat, Laut dan Udara
    3. Bidang Geologi dan Air Tanah yaitu Meningkatnya Kualitas Ekosistem Darat, Laut dan Udara
    4. Bidang Kelistrikan yaitu Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang merata dan berkelanjutan



b. Strategi

1. Bidang Energi Baru Terabrukan
   - ✓ Meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan dengan menggunakan potensi energi setempat
2. Bidang Mineral dan Batubara
   - ✓ Meningkatkan pelaksanaan praktek pertambangan yang baik dan benar (Good Mining Practice)
3. Bidang Geologi dan Air Tanah
   - ✓ Meningkatkan konservasi pemanfaatan air tanah
4. Bidang Kelistrikan
   - ✓ Peningkatan kapasitas pembangkit dan jaringan Listrik hingga ke daerah terpencil
   - ✓ Peningkatan akses Listrik bagi Masyarakat miskin

Untuk itu pada Tahun 2025 Dinas ESDM Provinsi NTB dan Cabang Dinas ESDM Wilayah Pulau Sumbawa akan melaksanakan 10 program dan 24 kegiatan, 53 sub kegiatan , yang seluruhnya dibiayai melalui Anggaran Belanja Operasional dan Belanja Pegawai, dengan total anggaran sebesar Rp. 11.173.597.068.

A. Induk Rp. 10.855.740.078,-

1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp.	9.676.234.333,-
2.	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Rp.	77.374.110,-
3.	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Rp.	187.147.200,-
4.	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Rp.	388.616.435,-
5.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rp.	556.368.000,-

B. Cabang Dinas Rp. 287.856.990,-

1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp.	263.948.990,-
2.	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Rp.	5.294.000,-
3.	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Rp.	6.617.000,-
4.	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Rp.	5.380.000,-
5.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rp.	6.617.000,-

Lokasi pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berada di semua Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP), yang kemudian akan ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA), sebagai dasar pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan di lingkungan Dinas ESDM Provinsi NTB. Selain itu, untuk memastikan pelaksanaannya berjalan efektif, efisien, dan akuntabel, maka tiap-tiap aparatur bertanggungjawab dalam mencapai target-target yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja serta mempedomani Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan, untuk selanjutnya setiap unit Eselon II, dan Eselon III agar menyusun Rencana Aksi sesuai dengan DPA dengan mempertimbangkan waktu sesuai dengan skala prioritas dan rencana anggaran kas yang ditetapkan.



Beberapa program dan kegiatan yang menjadi prioritas Dinas ESDM Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penyambungan listrik murah dan hemat bagi 600 Rumah Tangga Sasaran yang diutamakan pada daerah-daerah arahan penanggulangan kemiskinan.
2. Pemberian rekomendasi, Pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Ketenagalistrikan serta usaha di bidang Energi.
3. Program Nusa Terang Benderang
   - ✓ Pembangunan PLTS *on grid* 2x5 MWp di Sumbawa dan Bima.
   - ✓ Beroperasinya PLTMH *on grid* Pandan Duri 580 kW hibah dari Pemerintah Inggris.
   - ✓ Konstruksi pabrik Bio CNG dengan kapasitas 10 ton per hari.
   - ✓ Pelaksanaan *Feasibility Study* PLT Biomassa hibah dari Pemerintah Denmark.
   - ✓ Pelaksanaan program listrik murah (APBD, Pokir dan BPBL).
   - ✓ Penyusunan Pergub Roadmap NTB Net Zero Emission
   - ✓ PLT Panas Bumi di di Hu'u Kab. Dompu 60 MW oleh PT. Sumbawa Timur Mining
4. Industri Pertambangan dan Smelter yang diresmikan oleh Presdien
5. Pemuktahiran Pergub Nilai Perolehan Pajak Air Tanah
6. Jasa Konsultansi Pra Study Kelayakan Aneka Energi Baru dan Terbarukan
7. Jasa Konsultansi Kajian Teknis Nilai Batuan



Tabel 4.1 Rencana Kerja Perubahan Dinas ESDM Perangkat Daerah Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas ESDM Provinsi NTB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Perubahan Tahun 2025						Catatan Penting
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**										
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**								**11.773.597.068**		
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**9.676.234.333**		
3	**29**	**01**	**1,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**218.749.385**		
3	29	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	81.33 Nlai	82.749.385	Pajak Rokok	
3	29	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	81.33 Nlai	17.400.000	Pajak Rokok	
3	29	01	1,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	81.33 Nlai	15.631.300	Pajak Roko	
3	29	01	1,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	81.33 Nlai	7.190.000	Pajak Rokok	
3	29	01	1,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	81.33 Nlai	6.145.540	Pajak Rokok	
3	29	01	1,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	81.33 Nlai	19.409.390	Pajak Rokok	
3	29	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Laporan	81.33 Nlai	70.091.100	Pajak Rokok	
3	29	01	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								8.581.979.728		
3	29	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		78 Orang		8.499.811.164	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum dan PAD	
3	29	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		59.874.700	Pajak Rokok	
3	29	01	1,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		2.703.450	Pajak Rokok	
3	29	01	1,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		12.585.364	Pajak Rokok	
3	29	01	1,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Koordinasi Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		7.004.250	Pajak Rokok	
3	29	01	1,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								16.488.025		



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Perubahan Tahun 2025						Catatan Penting
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
3	29	01	1,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi BMD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		2.596.225	Pajak Rokok	
3	29	01	1,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi BMD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		2.270.000	Pajak Rokok	
3	29	01	1,03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi BMD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		7.930.100	Pajak Rokok	
3	29	01	1,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Administrasi BMD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		3.691.700	Pajak Rokok	
3	29	01	1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								3.521.415		
3	29	01	1,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		1.737.040	Pajak Rokok	
3	29	01	1,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		1.784.375	Pajak Rokok	
3	29	01	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								112.449.680		
3	29	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Tersedianya Laporan Administrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Paket	81.38 Nlai	3.981.400	Pajak Rokok	
3	29	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Tersedianya Laporan Administrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Paket	81.38 Nlai	3.850.000	Pajak Rokok	
3	29	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Tersedianya Laporan Administrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Paket	81.38 Nlai	4.480.000	Pajak Rokok	
3	29	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Tersedianya Laporan Administrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Paket	81.38 Nlai	3.170.600	Pajak Rokok	
3	29	01	1,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Tersedianya Laporan Administrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Paket	81.38 Nlai	4.467.680	Pajak Rokok	
3	29	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Laporan Administrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Laporan	81.38 Nlai	7.000.000	Pajak Rokok	
3	29	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Laporan Administrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	25 Laporan	81.38 Nlai	85.500.000	Pajak Rokok	
3	29	01	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								34.466.700		
3	29	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya BMD penunjang yang disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Unit	81.38 Nlai	0	Pajak Rokok	
3	29	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Mebel	Tersedianya BMD penunjang yang disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Paket	81.38 Nlai	0	Pajak Rokok	
3	29	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya BMD penunjang yang disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	4 Unit	81.38 Nlai	34.466.700	Pajak Rokok	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Perubahan Tahun 2025						Catatan Penting
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
3	29	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								481.370.400		
3	29	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya BMD penunjang yang disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	2500 Surat	81.38 Nlai	4.770.000	Pajak Rokok	
3	29	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya BMD penunjang yang disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	3 Rekening	81.38 Nlai	127.940.400	Pajak Rokok	
3	29	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya BMD penunjang yang disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	9 Orang	81.38 Nlai	348.660.000	Pajak Rokok	
3	29	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								227.210.000		
3	29	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya BMD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	7 Unit	81.38 Nlai	44.050.000	Pajak Rokok	
3	29	01	1,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya BMD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	8 Unit	81.38 Nlai	128.000.000	Pajak Rokok	
3	29	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Terpeliharanya BMD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	30 Unit	81.38 Nlai	5.160.000	Pajak Rokok	
3	29	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya BMD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Unit	81.38 Nlai	50.000.000	Pajak Rokok	
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN								77.374.110		
3	29	02	1,01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi								30.671.160		
3	29	02	1,01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Persentase Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam daerah provinsi yang dikendalikan	Jumlah Dokumen terkait data zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah provinsi	Tersedianya Kajian teknis penetapan Zona Konservasi Air Tanah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		30.671.160	Pajak Rokok	
3	29	02	1,03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi								48.702.950		
3	29	02	1,03	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Persentase Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam daerah provinsi yang dikendalikan	Jumlah dokumen terkait nilai perolehan Air Tanah dalam daerah provinsi	Tersedianya Kajian Teknis Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		26.202.950	Pajak Rokok	
3	29	02	1,03	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Persentase Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam daerah provinsi yang dikendalikan	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan implementasi nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi	Tersedianya Kajian Teknis Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		20.500.000	Pajak Rokok	
3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA								287.147.200		
3	29	03	1,03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut								110.801.125		
3	29	03	1,03	03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Produktifitas Lapangan Usaha Ekonomi sub sektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya	Jumlah dokumen rekomendasi perizinan usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Terlaksananya IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan yang melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		59.854.525	Pajak Rokok	
3	29	03	1,03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut	Produktifitas Lapangan Usaha Ekonomi sub sektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Terlaksananya IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan yang melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		50.946.600	Pajak Rokok	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Perubahan Tahun 2025						Catatan Penting
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
					sampai dengan 12 Mil Laut										
3	29	03	1,04		Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat								56.685.525		
3	29	03	1,04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Produktifitas Lapangan Usaha Ekonomi sub sektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyusunan usulan WPR	Terlaksananya IPR yang melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai aturan perundang-undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		10.898.825	Pajak Rokok	
3	29	03	1,04	03	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Produktifitas Lapangan Usaha Ekonomi sub sektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya	Jumlah Dokumen Rekomendasi perizinan usaha pertambangan rakyat	Terlaksananya IPR yang melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai aturan perundang-undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		24.338.000	Pajak Rokok	
3	29	03	1,04	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Produktifitas Lapangan Usaha Ekonomi sub sektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya	Jumlah Laporan Hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambagan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Terlaksananya IPR yang melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai aturan perundang-undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		21.448.700	Pajak Rokok	
3	29	03	1,07		Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan								119.660.550		
3	29	03	1,07	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Produktifitas Lapangan Usaha Ekonomi sub sektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam dan batuan	Tersedianya Laporan Pelaksanaan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai aturan perundang-undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		119.660.550	Pajak Rokok	
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN								888.616.435		
3	29	05	1,03		Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun								15.780.950		
3	29	05	1,03	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Sarana/Fasilitasi Instalasi pemanfaatan EBT dalam Kondisi Baik	Jumlah dokumen rekomendasi perizinan bahan bakar nabati	Tersedianya Izin Usaha bahan bakar nabati yang melaksanakan kegiatan usaha niaga sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		7.966.000	Pajak Rokok	
3	29	05	1,03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Sarana/Fasilitasi Instalasi pemanfaatan EBT dalam Kondisi Baik	Jumlah Laporan hasil pengendalian dan pengawasan perizinan bahan bakar nabati	Terlaksanaya pengendalian dan pengawasan izin usaha niaga bahan bakar nabati	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		7.814.950	Pajak Rokok	
3	29	05	1,05		Pengelolaan Penyediaan Biomassa dan atau Biogas dalam Wilayah Provinsi								287.819.765		
3	29	05	1,05	01	Penyusunan dan Pemuktahiran data potensi biomassa	Jumlah Sarana/Fasilitasi Instalasi pemanfaatan EBT dalam Kondisi Baik	Jumlah Dokumen data potensi biomassa	Tersedianya Laporan Pengelolaan dan Penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam Wilayah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		15.998.750	Pajak Rokok	
3	29	05	1,05	06	Penyusunan dan Pemuktahiran data potensi biogas	Jumlah Sarana/Fasilitasi Instalasi pemanfaatan EBT dalam Kondisi Baik	Jumlah Dokumen data potensi biogas	Tersedianya Laporan Pengelolaan dan Penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam Wilayah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		22.335.015	Pajak Rokok	
3	29	05	1,05	08	Pelaksanaan kegiatan penyediaan Biogas	Jumlah Sarana/Fasilitasi Instalasi pemanfaatan EBT dalam Kondisi Baik	Jumlah Laporan pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Biogas	Tersedianya Laporan Pengelolaan dan Penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam Wilayah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		249.986.000	Pajak Rokok	
3	29	05	1,07		Pengelolaan Aneka Energi Baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, Gerakan								551.993.195		
3	29	05	1,07	02	Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Sarana/Fasilitasi	Jumlah Laporan hasil	Tersedianya Laporan	Semua Kab/Kota,		1 Laporan		36.680.695	Pajak Rokok	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Perubahan Tahun 2025						Catatan Penting
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
					aneka EBT (Kapasitas terpasang investasi) di daerah	Instalasi pemanfaatan EBT dalam Kondisi Baik	pembinaan dan pengawasan aneka energi terbarukan di daerah	Pengelolaan aneka energi terbarukan	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
3	29	05	1,07	10	Penyusunan dan Pemuktahiran Data Potensi aneka EBT di Daerah	Jumlah Sarana/Fasilitasi Instalasi pemanfaatan EBT dalam Kondisi Baik	Jumlah Dokumen data potensi anakea energi baru terbarukan	Tersedianya Laporan Pengelolaan aneka energi terbarukan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		1 Laporan		515.312.500	Pajak Rokok	
3	29	05	1,10		Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan ditingkat daerah Provinsi								33.022.525		
3	29	05	1,10	03	Sosialisasi Konversi Energi kepada Masyarakat	Jumlah Sarana/Fasilitasi Instalasi pemanfaatan EBT dalam Kondisi Baik	Jumlah Laporan Pelaksanaan sosialisasi konservasi energi	Tersedianya Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan konservasi energi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		1 Dokumen		33.022.525	Pajak Rokok	
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN								556.368.000		
3	29	06	1,01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi								21.322.000		
3	29	06	1,01	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	1. Persentase Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang dikendalikan 2. Persentase Rumah Tangga tidak mampu yang terlayani listrik PLN	Jumlah rekomendasi perizinan usaha ketenagalistrikan	Tersedianya Izin usaha yang melaksanakan kegiatan bidang ketenagalistrikan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Izin		12.948.000	Pajak Rokok	
3	29	06	1,01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	1. Persentase Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang dikendalikan 2. Persentase Rumah Tangga tidak mampu yang terlayani listrik PLN	Jumlah Laporan hasil pengendalian dan pengawasan usaha bidang ketenagalistrikan	Tersedianya Izin usaha yang melaksanakan kegiatan bidang ketenagalistrikan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		8.374.000	Pajak Rokok	
3	29	06	1,06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan								535.046.000		
3	29	06	1,06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1. Persentase Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang dikendalikan 2. Persentase Rumah Tangga tidak mampu yang terlayani listrik PLN	Jumlah Dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu	Tersedianya masyarakat yang mendapatkan laporan listrik sesuai standar keselamatan ketenagalistrikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		19.869.000	Pajak Rokok	
3	29	06	1,06	06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1. Persentase Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang dikendalikan 2. Persentase Rumah Tangga tidak mampu yang terlayani listrik PLN	Jumlah sarana pemanfaatan ketenagalistrikan yang terbangun	Tersedianya masyarakat yang mendapatkan laporan listrik sesuai standar keselamatan ketenagalistrikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		600 RTS		515.177.000	Pajak Rokok	
												TOTAL	**10.855.740.078**		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3	29				CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								287.856.990		
3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								263.948.990		
3	29	01	1,03		Administrasi Milik Daerah pada Perangkat Daerah								5.077.400		
3	29	01	1,03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Administrasi BMD	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Laporan	81.33 Nlai	5.727.720	Pajak Rokok	
3	29	01	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								14.064.840		
3	29	01	1,06	02	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Laporan Administrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Paket	81.33 Nlai	3.137.440	Pajak Rokok	
3	29	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	Jumlahpaket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Tersedianya Laporan Administrasi Perangkat Daerah	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Paket	81.33 Nlai	1.495.400	Pajak Rokok	
3	29	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Fasilitasi	Tersedianya Laporan	Kab. Sumbawa,		1 Laporan	81.33 Nlai	1.875.000		



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Perubahan Tahun 2025						Catatan Penting
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
							Kunjungan Tamu	Administrasi Perangkat Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai				Pajak Rokok	
3	29	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Laporan Administrasi Perangkat Daerah	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Laporan	81.33 Nlai	7.557.000	Pajak Rokok	
3	29	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								226.196.700		
3	29	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat yang disediakan	Terlaksananya Jasa Penunjang	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Laporan	81.33 Nlai	1.784.750	Pajak Rokok	
3	29	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Terlaksananya Jasa Penunjang	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Laporan	81.33 Nlai	26.160.000	Pajak Rokok	
3	29	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Terlaksananya Jasa Penunjang	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	6 Orang	81.33 Nlai	198.252.000	Pajak Rokok	
3	29	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								18.610.000		
3	29	01	1,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan BMD	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Unit	81.33 Nlai	610.000	Pajak Rokok	
3	29	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Peralatan dan Mesinnya yang dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan BMD	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	3 Unit	81.33 Nlai	5.294.000	Pajak Rokok	
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN								5.294.000		
3	29	02	1,03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi								5.294.000		
3	29	02	1,03	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Persentase Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam daerah provinsi yang dikendalikan	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan implementasi nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi	Tersedianya Kajian Teknis Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		5.294.000	Pajak Rokok	
3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA								6.617.000		
3	29	03	1,04		Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat								6.617.000		
3	29	03	1,04	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Produktifitas Lapangan Usaha Ekonomi sub sektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya	Jumlah Laporan Hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambagan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Terlaksananya IPR yang melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai aturan perundang-undangan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		6.617.000	Pajak Rokok	
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN								5.380.000		
3	29	05	1,07		Peengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan berupa Sinar Matahari Angin, Aliran dan Terjunan Air, Gerakan dan Pergerakan Suhu Lapisan Laut dalam Wilayah Provinsi								5.380.000		
3	29	05	1,07	02	Pembinaan dan Pengawasan Aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di Daerah	Jumlah Sarana/Fasilitasi Instalasi pemanfaatan EBT dalam Kondisi Baik	Jumlah Laporan hasil pembinaan dan pengawasan aneka energi terbarukan di daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan aneka energi terbarukan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		5.380.000	Pajak Rokok	
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN								6.617.000		
3	29	06	1,02		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi								6.617.000		
3	29	06	1,02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	1. Persentase Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang dikendalikan 2. Persentase Rumah Tangga tidak mampu yang terlayani listrik PLN	Jumlah Laporan hasil pengendalian dan pengawasan usaha bidang ketenagalistrikan	Tersedianya Izin usaha yang melaksanakan kegiatan bidang ketenagalistrikan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		6.617.000	Pajak Rokok	
												TOTAL	287.856.990		



BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2025 yang merupakan penjabaran Rencana Strategis Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral tahun 2025 untuk mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yaitu ***"Terwujudnya Transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas daerah menuju NTB sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi regional Bali dan Nusa Tenggara yang inklusif dan berkelanjutan dan Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan yang lestari dan asri)".*** Dalam implementasinya nanti, Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 akan dilaksanakan melalui optimalisasi terhadap seluruh sumber daya yang ada melalui peningkatan koordinasi dan kerjasama baik secara internal maupun eksternal lintas stakeholder, serta monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Beberapa program dan kegiatan yang menjadi prioritas Dinas ESDM Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penyambungan listrik murah dan hemat bagi 600 Rumah Tangga Sasaran yang diutamakan pada daerah-daerah arahan penaggulangan kemiskinan.
2. Pemberian rekomendasi, Pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Ketenagalistrikan serta usaha di bidang Energi.
3. Program Nusa Terang Benderang
   - ✓ Pembangunan PLTS *on grid* 2x5 MWp di Sumbawa dan Bima.
   - ✓ Beroperasinya PLTMH *on grid* Pandan Duri 580 kW hibah dari Pemerintah Inggris.
   - ✓ Konstruksi pabrik Bio CNG dengan kapasitas 10 ton per hari.
   - ✓ Pelaksanaan *Feasibility Study* PLT Biomassa hibah dari Pemerintah Denmark.
   - ✓ Pelaksanaan program listrik murah (APBD, Pokir dan BPBL).
   - ✓ Penyusunan Pergub Roadmap NTB Net Zero Emission .
   - ✓ Pembangunan PLT Panas Bumi di Hu'u Kabupaten Dompu 60 MW oleh PT Sumbawa Timur Mining.
4. Industri Pertambangan dan Smelter yang diresmikan oleh Presiden
5. Pemuktahiran Pergub Nilai Perolehan Pajak Air Tanah
6. Jasa Konsultansi Pra Study Kelayakan Aneka Energi Baru dan Terbarukan
7. Jasa Konsultansi Kajian Teknis Nilai Batuan

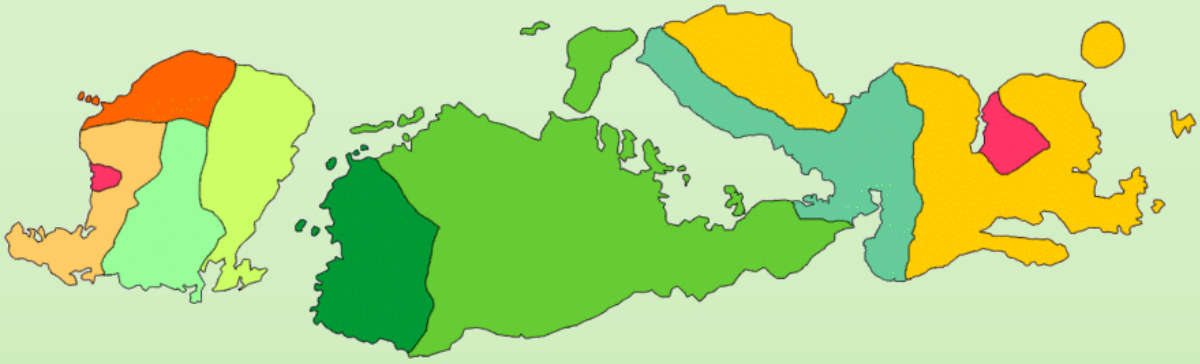
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 juga diharapkan dapat menjadi bagian dalam upaya peningkatan kinerja Dinas dalam mencapai target-terget yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas. Pembangunan secara umum termasuk pembangunan di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, tentunya memerlukan berbagai masukan, saran, dan kritik yang membangun dari seluruh *stakeholder* terkait. Hal ini dimaksudkan agar dapat dilakukan penyempurnaan terhadap perencanaan pembangunan di masa yang akan datang, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan dapat diwujudkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dinas ESDM Provinsi NTB
@DESDMNTB
@desdmntb
desdm@ntbprov.go.id
www.desdm.ntbprov.go.id

RENJA PERUBAHAN

DINAS ESDM PROVINSI NTB

TAHUN 2025





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jl. Majapahit No. 40 Mataram Telepon (0370) 621356 Faximile (0370) 625766

Dinas ESDM Provinsi NTB @DESDMNTB @desdmntb desdm@ntbprov.go.id www.desdm.ntbprov.go.id



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahwa untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi menuju pemilihan umum Kepala Daerah secara nasional pada Tahun 2024 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. dengan tema "Terwujudnya Transformasi Ekonomi melalui peningkatan Produktifitas Daerah menuju NTB sebagai Lokomotif pertumbuhan ekonomi regional Bali dan Nusa Tenggara yang inklusif dan berkelanjutan dan Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan yang Lestari dan Asri".

Perencanaan Pembangunan daerah pada periode Tahun 2024 - 2025 terdiri atas 3 (Tiga) Pilar Utama dan 3 (Tiga) Pilar Pendukung. Tiga Pilar Utama yaitu : Dimensi Pembangunan Manusia (People), Dimensi Pembangunan Lingkungan (Planet), dan Dimensi Pembangunan Kesejahteraan (Prosperity). Tiga Pilar Pendukung mengikuti Dimensi Tata Kelola (Governance), Dimensi Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan Dimensi Daya Saing Daerah (Competitiveness). Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 juga disusun berdasarkan Surat Edaran Nomor 820 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025 secara analisis data eksisting, capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, usulan program/kegiatan dari masyarakat, dan sinkronisasi terhadap dokumen-dokumen perencanaan lainnya yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing program/kegiatan.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2025. Harapannya dokumen ini dapat menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi NTB.

Mataram, Juni 2025

Plt. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Paraf Hierarki	
Sekretaris Dinas	
Kasubag. Keuangan	
Pengetik Naskah	

H. WIRAWAN, S. Si., MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19741008 199902 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iii
DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 1
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 22
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 25
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 38

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 54

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 54
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 64
3.3. Program dan Kegiatan 65

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 89

BAB V PENUTUP 98



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Hubungan antara Dokumen Rencana Kerja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya. 1
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi NTB 6
Gambar 2.2. Anggaran Renstra, Renja dan Realisasi Keuangan Tahun 2020-2024 8
Gambar 2.3 Komposisi Operasional dan Pegawai Tahun 2020-2024 9
Gambar 2.4. Komposisi Renja dengan Realisasi Keuangan Tahun 2020 – 2024..... 9
Gambar 2.5. Capaian Indikator Utama Rasio Elektrifikasi Tahun 2020-2024 10
Gambar 3.1. Tujuan dan Sasaran dalam mendukung Misi Pembangunan NTB dalam RPD Tahun 2024-2026..... 55
Gambar 3.2 Peta Cekungan Air Tanah Provinsi NTB Tahun 2024 61
Gambar 3.3 Peta Zona Pengendalian Pengambilan dan Perlindungan Air Tanah..... 62
Gambar 3.4 Perkembangan Kondisi Kelistrikan NTB Tahun 2017-2023 62
Gambar 3.5 Capaian Indikator Kinerja Utama Rasio Elektrifikasi Thn 2018-2023..... 63
Gambar 3.6 Jumlah RTS yang belum mempunyai listrik dan menggunakan listrik Secara bersama pada tahun 2024..... 63
Gambar 3.7 Cascading Renstra Dinas ESDM Tahun 2024 - 2026..... 64



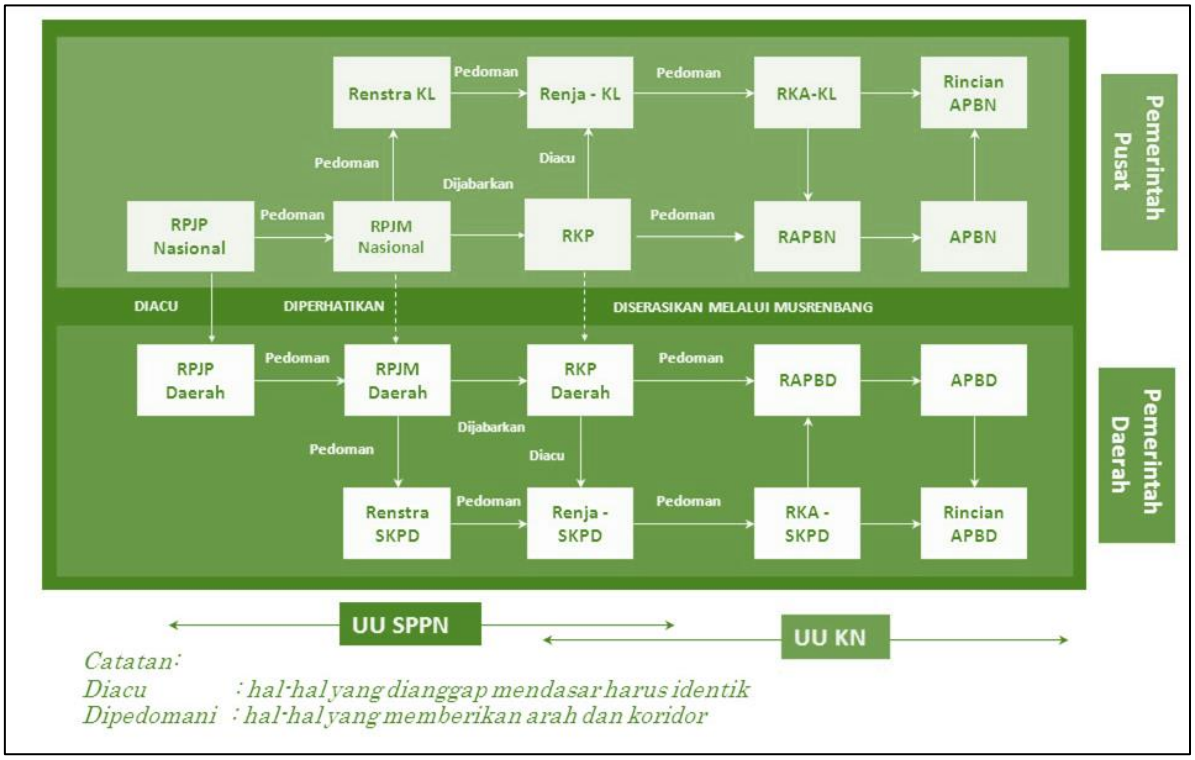
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Daftar Personil Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2024 5
Tabel 2.2. Aset yang dikelola Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2024 7
Tabel 2.3. Daftar Sarana dan Prasarana Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2024..... 7
Tabel 2.4. Capaian Indikator Kinerja Utama Rasio Elektrifikasi 2015-2024 10
Tabel 2.5. Rekapitulasi Bekanja Operasional melalui APBD Anggaran Tahun 2023..... 11
Tabel 2.6 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas ESDM Provinsin NTB dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2024..... 17
Tabel 2.7. Indikator Kinerja PD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Urusan Pemerintahan Bidang ESDM Tahun 2024-2026..... 22
Tabel 2.8. Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas ESDM Tahun 2024-2026 23
Tabel 2.9. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTB 24
Tabel 2.10. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang ESDM..... 29
Tabel 2.11. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Provinsi NTB 38
Tabel 3.1. Sasaran Jangka Menengah Tahun 2024-2026 56
Tabel 3.2. Potensi Cekungan Air Tanah di Provinsi NTB 61
Tabel 3.3. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas ESDM Prov. NTB Tahun 2024-2026..... 64
Tabel 3.4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada Tahun 2025 dan Prakiraaan Maju Tahun 2026..... .. 68
Tabel 4.1 Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas ESDM Tahun 2025..... 92

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang disusun dengan berpedoman pada Rancangan Rencana Strategis Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah tahap pertama dalam dokumen RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dengan Tema **"Terwujudnya Kualitas Lingkungan yang Lestari, Bersih, Ramah dan Berkelanjutan dan Terwujudnya Kemantapan Infrastruktur dan Konektifitas antar wilayah yang merata dan berkelanjutan".** Rencana Kerja ini disusun berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 secara analisis data eksisting, capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, usulan program/kegiatan dari masyarakat, dan sinkronisasi terhadap dokumen-dokumen perencanaan lainnya yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Program/Kegiatan Perubahan Dinas Tahun Anggaran 2025. Adapun hubungan antara dokumen Rencana Kerja dengan dokumen perencanaan lainnya pada level Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dapat dijelaskan pada diagram di bawah ini :



Gambar 1.1 Hubungan antara Dokumen Rencana Kerja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2. Landasan Hukum



Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2025 diantaranya adalah:

1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
9. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tengara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
13. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;



14. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasia Pemberian Perizinan Berusaha dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), yang dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukthiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26);
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran



Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 114);

29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044;
30. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 dan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
31. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2025 ini adalah:

1. Untuk memperoleh gambaran keterkaitan dan keselaraan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan tahun 2023, terhadap pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024, dan rencana perubahan program/kegiatan tahun 2025;
2. Untuk menentukan program/kegiatan untuk tahun 2026 yang tepat berdasarkan skala prioritas sesuai dengan tema utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahap Pertama Tahun 2025-2029 **"Terwujudnya Kualitas Lingkungan yang Lestari, Bersih, Ramah dan Berkelanjutan dan Terwujudnya Kemantapan Infrastruktur dan Konektifitas antar wilayah yang merata dan berkelanjutan",** terdapat dua Misi yang terkait langsung dengan tugas dan dan kewenangan Dinas ESDM sebagai perangkat daerah yaitu Misi Kelima **"Memperkuat Sistem Mitigasi Bencana, Pengelolaan Sumber Daya Alam yang ramah lingkungan dan Investasi berkelanjutan "** dan Misi Keenam yaitu **"Memantapkan pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas antar Wilayah yang berwawasan lingkungan serta memastikan penegakan tata ruang yang berkelanjutan".**
3. Sebagai pedoman bagi Dinas dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2025.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2025 ini adalah agar target pembangunan dalam urusan pemerintahan bidang ESDM Tahun 2025 dapat tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 maupun Rencana Strategis Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU



2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB merupakan perangkat daerah yang terdiri atas Dinas Induk yang terletak di Kota Mataram dan Cabang Dinas yang berada di Kabupaten Sumbawa. Tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi dilaksanakan oleh jajaran aparatur dengan pendidikan terendah SLTP dan tertinggi pasca sarjana (S2). Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, personil Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB sebanyak 63 Aparatur Sipil Negara, yang terdiri dari 11 orang golongan IV, 39 orang golongan III, dan 10 orang golongan II dan 3 orang PPPK. Berdasarkan pendidikan, terdapat 12 orang pasca sarjana (S2), 29 orang sarjana/setingkat sarjana (S1)/D4, 3 Orang Diploma D-3, 16 orang berpendidikan SLTA dan 3 orang berpendidikan SLTP, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1. Daftar Personil Dinas ESDM Provinsi NTB per 31 Desember 2024

URAIAN	TINGKAT PENDIDIKAN					JUMLAH	PANGKAT/ GOLONGAN				JUMLAH
	S2	S1	DIII	SLTA	SLTP		IV	III	II	PPPK	
Eselon II	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
Eselon III	3	1	-	-	-	4	4	-	-	-	4
Eselon IV	-	4	-	-	-	4	-	4	-	-	4
JFT	7	11	3	-	-	21	5	11	1	3	19
JFU	1	13	-	16	3	33	1	23	9	-	23
JUMLAH	12	29	3	16	3	63	11	39	10	3	63

Pemetaan terhadap sumber daya manusia perangkat daerah penting dilakukan untuk menghitung kebutuhan personil yang dibutuhkan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas berdasarkan analisis jabatan. Perhitungan kebutuhan pegawai dilakukan dengan berpedoman pada :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tetang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional

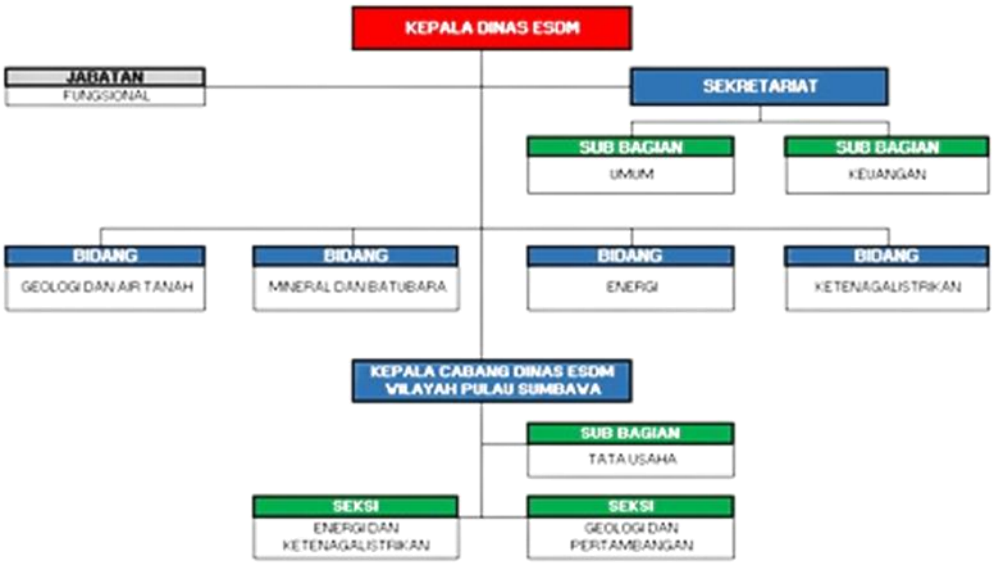
Susunan organisasi Dinas ESDM Provinsi NTB sesuai Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB serta Pergub Nomor 8 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisaasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi NTB terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:
   - Sub Bagian Keuangan;
   - Sub Bagian Umum.
c. Bidang Geologi dan Air Tanah, terdiri dari:
d. Bidang Mineral dan Batubara, terdiri dari:
e. Bidang Energi, terdiri dari:

f. Bidang Ketenagalistrikan terdiri dari:
g. Cabang Dinas;
   Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Pulau Sumbawa
   - Sub Bagian Tata Usaha;
   - Seksi Geologi dan Pertambangan;
   - Seksi Energi dan Ketenagalsitrikan;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.
   - Jabatan fungsional Surveyor Pemetaan;
   - Jabatan fungsional Perencana;
   - Jabatan fungsional Analis Kebijakan;
   - Jabatan fungsional Penyelidik Bumi;
   - Jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
   - Jabatan fungsional Arsiparis.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, sesuai Pergub Nomor 8 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisaasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi NTB sebagai berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi NTB Berdasarkan Pergub Nomor 8 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisaasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi NTB.

Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB sampai dengan 31 Desember 2024 memiliki asset yang terdiri dari tanah seluas 6.258 m^2 yang didalamnya terdapat Gedung Kantor, perpustakaan, tempat ibadah, tempat olahraga, gudang, garasi, bengkel, laboratorium dan pos jaga. Sebagai penunjang kerja terdapat peralatan dan mesin yang terdiri dari kendaraan, alat-alat kantor, alat rumah tangga, alat komputer, meja dan kursi kerja, alat komunikasi, alat studio dan alat peraga dalam jumlah yang mencukupi. Selama lima belas tahun terakhir Dinas ESDM Provinsi NTB juga melaksanakan pembangunan dalam bentuk hibah dan bantun sosial kepada masyarakat atau badan hukum yang masuk dalam kategori jalan, irigasi dan jaringan berupa pembangunan digester biogas, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) tersebar atau *Solar Home System* (SHS) dam PLTS Komunal, pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH), penerangan jalan umum PJU-



LED , sumur bor dalam dan pemasangan jaringan listrik bagi rumah tangga miskin. Nilai aset yang dikelola Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.2 Aset yang dikelola Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2024

Uraian	2023 (Rp)
a. Tanah	4.067.700.000,00
b. Peralatan dan Mesin	7.646.738.499,44
c. Gedung dan Bangunan	8.050.968.762,84
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	669.979.600,00
e. Aset Tetap Lainnya	105.573.900,00
f. Konstruksi dalam pengerjaan	34.787.000,00
g. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(11.643.739.285,44)
Jumlah	8.940.648.476,84

Sumber : Laporan Keuangan Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2024

Sebagian besar Prasarana dan sarana kerja tersebut sudah difungsikan secara maksimal namun karena tugas dan fungsi Dinas ESDM yang begitu luas sehingga prasarana dan sarana kerja tersebut masih memerlukan penambahan terutama peralatan komputer, peralatan studio serta alat transportasi baik kendaraan roda empat maupun roda dua dan peralatan teknis penunjang lainnya.

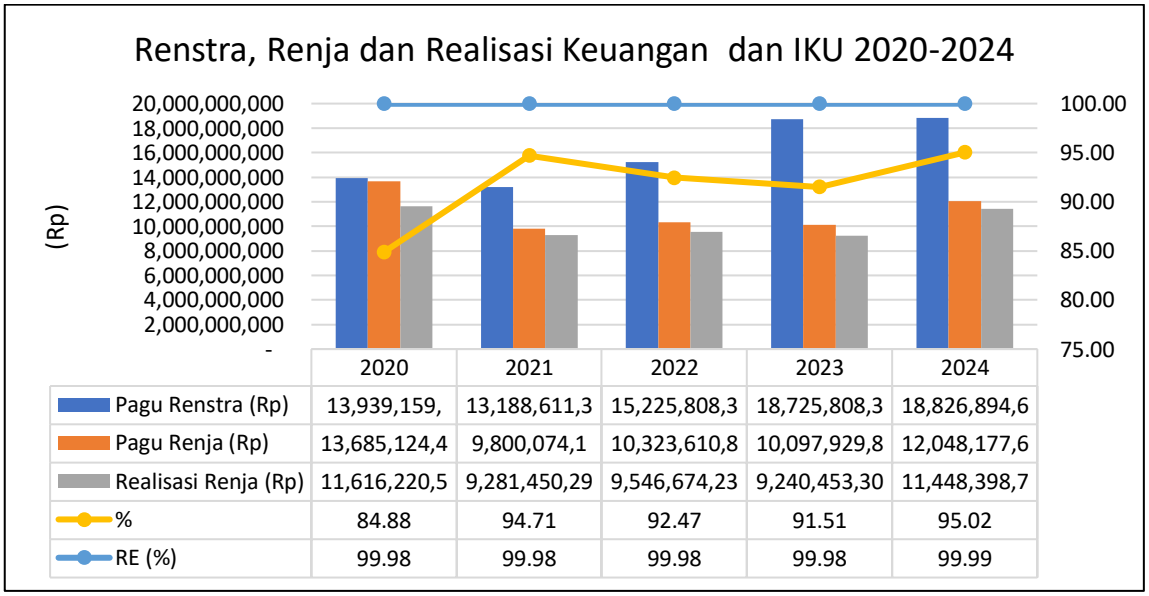
Dukungan sarana dan prasarana kerja agar program kegiatan Dinas ESDM dapat berjalan sesuai dengan target capaian kinerja yang diinginkan. Secara umum dapat digambarkan bahwa prasarana dan sarana Dinas ESDM tahun 2024 sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3. Daftar Sarana dan Prasarana Dinas ESDM Tahun 2024

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH	KONDISI		
				BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT
I	ASET TETAP TAK BERGERAK					
A	Tanah Persel		6,258			
I	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M^2	6,258	Baik	-	-
B	Bangunan Gedung		15			
1	Bagunan Gedung Kantor Permanen	Unit	4	4	-	-
2	Bagunan Gedung Tempat Ibadah	Unit	1	1	-	-
3	Bagunan Gedung Tertutup Permanen	Unit	2	2	-	-
4	Bagunan Perpustakaan	Unit	1	1	-	-
5	Bagunan Pos jaga	Unit	1	1	-	-
6	Bagunan Tempat Kerja Lainya	Unit	3	3	-	-
7	Bagunan Garasi	Unit	2	2	-	-
8	Bagunan Gedung Olah Raga Terbuka Permanen	Unit	1	1	-	-
II	ASET TETAP BERGERAK					
A	Kendaraan Bermotor		22			
1	Kendaraan Roda 4	Unit	9	3	5	1

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH	KONDISI		
				BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT
2	Kendaraan Roda 2	Unit	13	5	6	2
B	Mesin dan Peralatan		326			
1	Alat Bengkel Bermesin	Unit	4	4	-	-
2	Alat Ukur	Unit	19	14	5	-
3	Mesin Ketik	Unit	7	6	1	-
4	Mesin Stensil	Unit	1	1	-	-
5	Overhead ProyektorMesin Ketik	Unit	7	6	-	-
7	Sound System	Unit	8	6	1	-
8	Personal Komputer	Unit	43	14	25	-
9	Peralatan Personal Komputer	Unit	57	24	33	-
10	Alat Studio	Unit	4	1	1	2
11	Alat Komunikasi	Unit	19	18	1	-
14	Peralatan Laboratorium	Unit	162	136	19	4
15	Alat Peraga	Unit	15	14	1	-
C	Moubelair dan Perlengkapan		632			-
1	Peralatan Penyimpan Perlengkapan Kantor	Unit	125	-	-	-
3	Meubelair	Unit	476	289	190	-
4	Alat Pengukuran Waktu	Unit	5	2	-	3
6	Peralatan Pendingin	Unit	28	22	4	-

Pembiayaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seluruhnya berasal dari APBD Provinsi NTB dimana alokasi anggaran untuk sektor Dinas ESDM menurun antara kurun waktu 2020-2024, dari Rp. 13.685.124.455, - pada Tahun 2020 menjadi Rp. 12.048.177.653,- pada Tahun 2024.



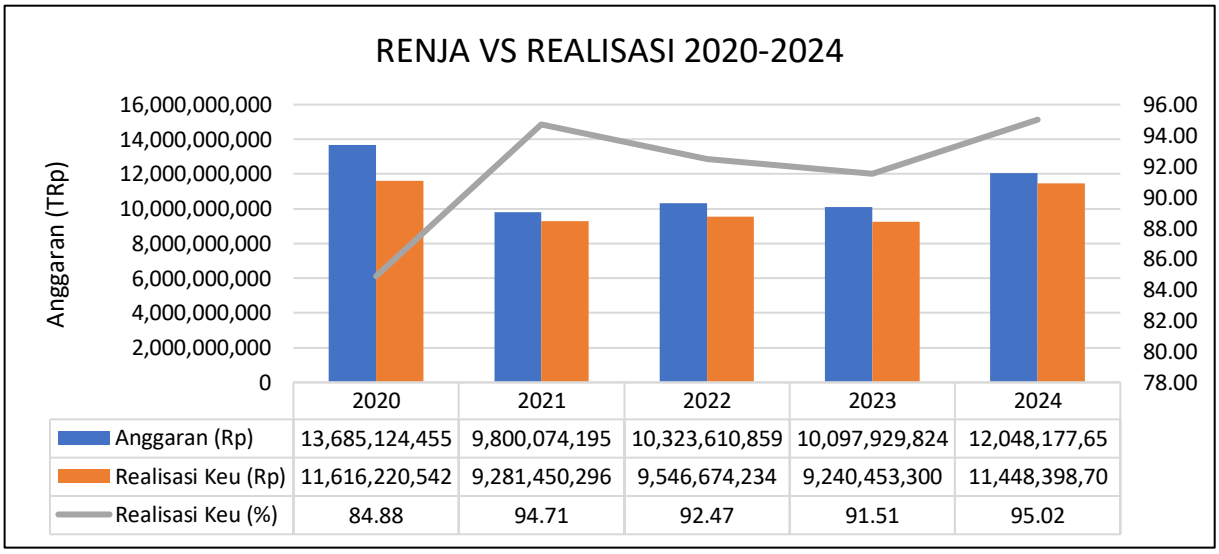
	2020	2021	2022	2023	2024
Pagu Renstra (Rp)	13,939,159,	13,188,611,3	15,225,808,3	18,725,808,3	18,826,894,6
Pagu Renja (Rp)	13,685,124,4	9,800,074,1	10,323,610,8	10,097,929,8	12,048,177,6
Realisasi Renja (Rp)	11,616,220,5	9,281,450,29	9,546,674,23	9,240,453,30	11,448,398,7
%	84.88	94.71	92.47	91.51	95.02
RE (%)	99.98	99.98	99.98	99.98	99.99

Gambar 2.2 Anggaran Renstra , Renja dan Realisasi Keuangan 2020-2024





Gambar 2.3 Komposisi Belanja Operasional dengan Belanja Pegawai 2020-2024

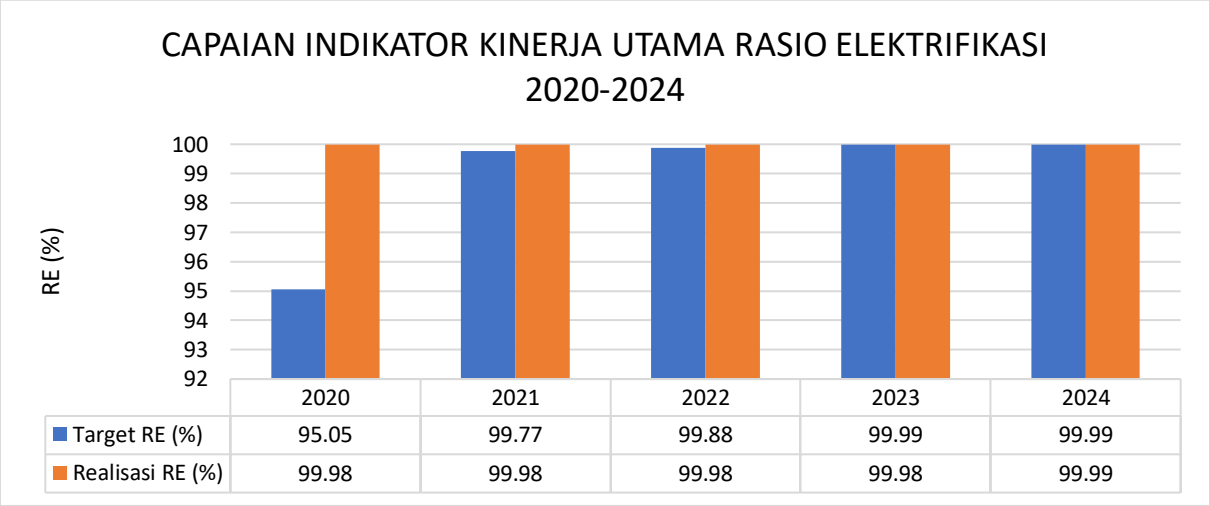


Gambar 2.4 Komposisi Renja dengan Realisasi Keuangan 2020-2024

Berdasarkan target kinerja pelayanan Dinas ESDM dapat digambarkan dalam tingkat capaian Indikator Kinerja Utama Dinas ESDM periode tahun 2020-2024. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2024-2026, Indikator Kinerja Utama Dinas ESDM adalah :

1. Bauran Energi Baru Terbarukan. Menggambarkan Penggunaan Energi Baru Terbarukan dibandingkan Penggunaan Energi Listrik secara Keseluruhan.
2. Produktifitas Lapangan Usaha Ekonomi Sektor Pertambangan dan Penggalian. Menggambarkan Produktifitas Sektor Pertambangan dan Penggalian pada PDRB NTB.
3. Produktifitas Lapangan Usaha Ekonomi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian. Menggambarkan Produktifitas Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian pada PDRB NTB.
4. Produktifitas Lapangan Usaha Ekonomi Sektor Pengadaan Listrik dan Gas. Menggambarkan Produktifitas Sektor Pengadaan Listrik dan Gas pada PDRB NTB.

Selama lima tahun terakhir (2020-2024) Provinsi Nusa Tenggara Barat berhasil meningkatkan Rasio Elektrifikasi sebesar 0,01% dari 99,98% pada tahun 2020 meningkat menjadi 99,99% pada Tahun 2024 atau tahun kelima masa RPJMD Tahun 2020-2024.



Gambar 2.5 Capaian Indikator Utama Rasio Elektrifikasi 2020-2024

Sejak tahun 2014 Pemerintah telah menetapkan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW di seluruh Indonesia. Untuk Provini NTB direncanakan akan dibangun beberapa pembangkit listrik yang diharapkan akan menambah daya sebesar 500 MW sampai dengan akhir tahun 2024 baik melalui PLN maupun melalu *Independent Power Producer* (IPP). Pembanguanan pembangkit juga akan disertai dengan penambahan kapasitas jaringan listrik untuk meningkatkan keandalan listrik hingga sampai ke rumah-rumah masyarakat pengguna listrik.

Tabel 2.4 Capaian Indikator Kinerja Utama Rasio Elektrifikasi 2015 – 2024

No	Rasio Elektrifikasi	Satuan	Tahun										
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024
1	Target	%	68,01	70,43	72,67	75,00	94,46	95,09	99,77	99,88	99,99	99,99	99,99
2	Realisasi	%	72,67	77,89	85,10	93,83	99,55	99,98	99,98	99,98	99,99	99,99	99,99
3	Capaian	%	106,85	110,59	117,10	125,11	105,39	105,14	100,21	100,10	100,00	100,00	100,00

Sumber : Diolah dari Data PLN NTB dan Dinas ESDM Provinsi NTB

Capaian target rasio elektrifikasi ditopang adanya faktor ketersediaan daya listrik yang semakin meningkat sejak tahun 2015. Peran Dinas ESDM terhadap capaian indikator rasio elektrifikasi tersebut terkait dengan koordinasi yang baik antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, PLN Wilayah NTB dan seluruh *stakehorder* terkait sesuai dengan fungsinya masing- masing. Peningkatan rasio elektrifikasi juga dilaksanakan melalui program . Program pemasangan listrik murah dan hemat merupakan program Kementerian ESDM sejak tahun 2012 hingga tahun 2015, kemudian Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas ESDM melaksanakannya sejak tahun 2014 hingga saat ini, jumlah pemasangan listrik murah dan hemat hingga tahun 2024 telah dinikmati oleh 36.023 Rumah Tangga. Program tersebut berfokus terhadap masyarakat miskin yang rumahnya sudah dilalui jaringan listrik namun tidak mampu untuk memasang listrik secara mandiri.



Dinas ESDM Provinsi NTB selaku perangkat daerah mempunyai tanggungjawab terhadap peningkatan Indikator Kinerja Kunci Rasio Elektrifikasi sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2020-2024. Rasio Elektrifikasi merupakan jumlah rumah tangga yang sudah mendapatkan akses listrik terhadap jumlah seluruh rumah tangga yang ada.

Sejak tahun 2018 Rasio Desa Berlistrik Provinsi NTB sudah mencapai 100%, namun demikian belum seluruh desa terjangkau oleh jaringan listrik PLN terutama di Kabupaten Sumbawa masih terdapat 5 desa yang mendapatkan listrik dari sumber non PLN menggunakan pembangkit energi baru terbarukan. Berdasarkan data tahun 2024 masih terdapat 34 Dusun yang belum dilalui oleh jaringan listrik PLN yang berada pada wilayah pegunungan dan pulau-pulau kecil berpenduduk. Kendala utama belum masuknya jaringan listrik PLN pada 34 Dusun tersebut dikarenakan infrastruktur jalan Kabupaten yang tidak dapat mendukung bagi kegiatan pembangunan jaringan listrik PLN, untuk itu diperlukan *cross cutting* program dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan PLN sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Tabel 2.5 Rekapitulasi Program/Kegiatan Anggaran 2023
yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi NTB

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu DPPA	Realisasi	Keu (%)	Fisik (%)
3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**			**10,097,929,824**	**9,240,453,300**	**91.51**	**99.65**
3.29.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP**	**81,19**	**9,834,183,524**	**8,098,741,549**	**91.30**	**99.64**
3.29. 01. 1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**9**	**282,954,600**	**247,012,135**	**87.30**	**88.44**
3.29. 01. 1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	86,824,200	80,158,004	93.32	94.29
3.29. 01. 1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Laporan	1	8,968,600	7,150,800	79.73	79.73
3.29. 01. 1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Laporan	1	15,544,800	9,314,300	59.92	59.92
3.29. 01. 1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Laporan	1	13,384,600	11,520,000	86.07	86.07
3.29. 01. 1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Laporan	1	15,893,100	0	0.00	0.00
3.29. 01. 1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan	1	14,859,300	13,578,300	91.38	91.73
3.29. 01. 1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	127,480,000	125,290,731	98.28	99.44
3.29. 01. 1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Laporan**	**1**	**8,151,322,864**	**7,373,594,872**	**90.46**	**100.00**
3.29. 01. 1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ASN	73	8,097,142,284	7,322,400,292	90.43	100.00
3.29. 01. 1.02.02	Peyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	32,660,000	29,700,000	90.94	100.00
3.29.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	1	2,127,900	2,127,900	100.00	100.00
3.29.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan	1	12,761,600	12,735,600	99.80	100.00
3.29.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	6,631,080	6,631,080	100.00	100.00
3.29. 01. 1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Laporan**	**1**	**5,302,700**	**5,302,700**	**100.00**	**100.00**
3.29.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1,396,000	1,396,000	100.00	100.00
3.29.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	1,241,000	1,241,000	100.00	100.00
3.29.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	1,246,500	1,246,500	100.00	100.00



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu DPPA	Realisasi	Keu (%)	Fisik (%)
3.29.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	1	1,419,200	1,419,200	100.00	100.00
3.29.01.1.03.07							
3.29. 01. 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Laporan**	**1**	**2,866,500**	**2,866,500**	**100.00**	**100.00**
3.29.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Laporan	1	1,556,500	1,556,500	100.00	100.00
3.29.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan	1	1,310,000	1,310,000	100.00	100.00
3.29. 01. 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Laporan**	**1**	**196,862,480**	**195,376,030**	**99.24**	**100.00**
3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	11	3,040,800	3,040,800	100.00	100.00
3.29.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	37	3,300,000	3,300,000	100.00	100.00
3.29.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis	10	4,320,800	3,960,000	91.67	100.00
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis	7	3,820,000	3,820,000	100.00	100.00
3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jenis	16	3,604,680	3,604,680	100.00	100.00
3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Orang	581	7,250,000	6,665,000	91.93	100.00
3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tahun	1	171,527,000	170,985,550	99.68	100.00
3.29. 01. 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Unit**	**7**	**24,750,000**	**20,697,000**	**83.62**	**100.00**
3.29.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	7	24,750,000	20,697,000	83.62	100.00
3.29. 01. 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tahun**	**1**	**485,398,480**	**471,486,367**	**97.13**	**99.90**
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat	2596	8,590,480	7,637,980	88.91	94.50
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening	3	98,952,000	90,131,388	91.09	100.00
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rekening	3	377,856,000	373,716,999	98.90	100.00
3.29. 01. 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tahun**	**1**	**148,960,000**	**139,417,206**	**93.59**	**100.00**
3.29.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	7	47,860,000	45,333,710	94.72	100.00
3.29.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	6	92,000,000	85,023,496	92.42	100.00
3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	9	9,100,000	9,060,000	99.56	100.00
Sasaran Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah							
3.29.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**%**	**100**	**102,683,000**	**101,658,733**	**99.00**	**99.33**
3.29.02.1.01	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi**	**Laporan**	**3**	**43,000,000**	**42,995,000**	**99.99**	**100.00**
3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Dokumen	3	43,000,000	42,995,000	99.99	100.00
3.29.02.1.02	**Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, Dan Izin Pengusahaan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi**	**Laporan**	**10**	**35,908,733**	**34,287,600**	**98.60**	**99.80**
3.29.02.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Rekomendasi	164	9,550,000	9,550,000	95.50	99.70
3.29.02.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Izin	15	25,000,000	24,960,733	99.84	99.84
3.29.02.1.03	**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Provinsi**	**Laporan**	**3**	**24,683,000**	**24,153,000**	**97.85**	**100.00**
	Pengendalian dan Pengawasan	Laporan	3	24,683,000	24,153,000	97.85	100.00



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu DPPA	Realisasi	Keu (%)	Fisik (%)
3.29.02.1.03.03	Pemanfaatan Air Tanah						
Sasaran Meningkatnya Pengendalian Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara							
3.29.03	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**Wilayah Izin Pertambangan**	**46**	**81,997,000**	**81,074,615**	**98.88**	**100,00**
3.29.03.1.03	**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Atau Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut**	**Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan**	**20**	**59,998,000**	**59,648,000**	**99.42**	**100,00**
3.29.03.1.03.03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Rekomendasi	-	19,999,000	19,879,000	99.40	100.00
3.29.03.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Izin	20	39,999,000	39,769,000	99.42	100,00
3.29.03.1.04	**Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, Dan Batuan Dalam Wilayah Pertambangan Rakyat**	**Izin**	**5**	**12,000,000**	**11,936,665**	**99.47**	**100,00**
3.29.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Dokumen	5	6,000,000	5,940,000	99.00	100,00
3.29.03.1.04.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Izin	5	6,000,000	5,996,665	99.94	100,00
3.29.03.1.07	**Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Dan Batuan**	**Data**	**21**	**9,999,000**	**9,489,950**	**94.91**	**100,00**
3.29.03.1.07.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Izin	21	9,999,000	9,489,950	94.91	100,00
Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan							
3.29.05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	**Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik (%)**	**6.7**	**144,972,900**	**138,814,620**	**95.75**	**98.90**
3.29.05.1.03	**Penatausahaan Izin, Pembinaan, Dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun**	**Izin**	**2**	**29,999,700**	**28,503,120**	**95.01**	**96.67**
3.29.05.1.03.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain	Rekomendasi	1	14,999,800	14,508,120	96.69	100.00



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu DPPA	Realisasi	Keu (%)	Fisik (%)
	dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun						
3.29.05.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Izin	2	14,999,900	14,000,000	93.33	100.00
3.29.05.1.04	**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	**Unit**	**-**	**114,973,200**	**110,311,500**	**95.95**	**99.48**
3.29.05.1.04.01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Dokumen	1	10,497,400	10,050,000	95.74	95.83
3.29.05.1.04.03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Orang	20	14,970,800	14,925,800	99.70	100.00
3.29.05.1.04.04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Unit	-	89,505,000	85,335,700	95.34	99.82
Sasaran Meningkatnya Cakupan Layanan Listrik Bagi Masyarakat							
3.29.06	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (Rumah Tangga)**	**700**	**206,113,000**	**201,799,664**	**97.91**	**99.80**
3.29.06.1.02	**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi**	Instalasi Tenaga Listrik	5	**40,649,000**	**201,799,664**	**97.91**	**99.80**
3.29.06.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas dalam Daerah Provinsi	Izin	5	19,399,000	19,185,000	98.90	100.00
3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Izin	5	21,250,000	20,135,974	94.76	100.00
3.29.06.1.06	**Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan**	Sarana	700	**165,464,000**	**162,478,690**	**98.20**	**99.75**
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Sarana	700	30,214,000	29,823,860	98.71	99.29
3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Sarana	700	135,250,000	132,654,830	98.08	99.85
	Cabang Dinas ESDM Wilayah Pulau Sumbawa			**263,746,300**	**261,352,858**	**99.09**	**99.89**
3.29.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**227,246,300**	**225,152,858**	**99.08**	**99.87**
3.29.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Laporan**	**1**	**23,000,000**	**22,530,000**	**97.96**	**98.70**
3.29.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	8	1,000,000	1,000,000	100.00	100.00
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis	2	1,000,000	980,000	98.00	100.00
3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Orang	48	1,000,000	700,000	70.00	70.00
3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tahun	1	20,000,000	19,850,000	100.00	100.00
3.29.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tahun**	1	**182,436,300**	**180,814,100**	**99.11**	**100.00**
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat	78	2,244,300	2,118,100	94.38	100.00
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis	4	22,752,000	21,818,500	95.90	100.00
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Orang	5	157,440,000	156,887,500	99.64	100.00



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu DPPA	Realisasi	Keu (%)	Fisik (%)
3.29.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tahun**	1	**21.810.000**	**21,808,758**	**99.99**	**100.00**
3.29.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	2	21.810.000	21,808,758	99.99	100.00
3.29.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**%**	**100**	**6,500,000**	**6,450,000**	**99.23**	**100.00**
3.29.02.1.02	**Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi**	**Laporan**	**1**	**6,500,000**	**6,500,000**	**99.23**	**100.00**
3.29.02.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Izin	5	6,500,000	6,500,000	99.23	100.00
3.29.03	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**Wilayah Izin Pertambangan**	3	**13,000.000**	**12,880,000**	**99.08**	**100.00**
3.29.03.1.03	**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Atau Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut**	**Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan**	3	**13,000,000**	**12,880,000**	**99.08**	**100.00**
3.29.03.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Izin	3	13,000,000	12,880,000	99.08	100.00
3.29.05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	**Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik (%)**	**6.7**	**7,000,000**	**6,900,000**	**98.57**	**100.00**
3.29.05.1.03	**Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun**	**Izin**	-	**7,000,000**	**6,900,000**	**98.57**	**100.00**
3.29.05.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Izin	-	7,000,000	6,900,000	98.57	100.00
3.29.06	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (Rumah Tangga)**	**-**	**10,000,000**	**9,970,000**	**99.70**	**100.00**
3.29.06.1.01	**Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah Provinsi**	**Pertimbangan Teknis**	-	**10,000,000**	**9,970,000**	**99.70**	**100.00**
	Pengendalian dan Pengawasan	Izin	1	10,000,000	9,970,000	99.70	100.00



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu DPPA	Realisasi	Keu (%)	Fisik (%)
3.29.06.1.01.03	Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi						
					Rata-Rata Realisasi Keuangan	91,51	
					Rata-Rata Realisasi Fisik		99,65
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEUANGAN						**91,53**	



Tabel 2.6 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas ESDM Provinsin NTB dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Capaian Target Renstra s/d 2024	
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
3					**Urusan Pemerintahan Pilihan**									
3	**29**				**Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**		**81.19**	99.80	**80.38**	**81.19**	99.80		99.80	125
					A. DINAS									
3	**29**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai Sakip**	**80.33**	**79.88**	**80.00**	**80.00**	79.80		158.78	194
3	**29**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**9**	**7**	**8**	**8**	7	2	18	225
3	29	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	1	1	1	100	1	4	400
3	29	01	1.01	02	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Dokumen	1	1	1	1	100	1	3	300
3	29	01	1.01	03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Dokumen	1	1	1	1	100	1	3	300
3	29	01	1.01	04	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA -SKPD	Dokumen	1	1	1	1	100	1	3	300
3	29	01	1.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA -SKPD	Dokumen	1	1	1	1	100	1	3	300
3	29	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	1	1	1	100	1	3	300
3	29	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	1	2	2	100	1	4	200
3	**29**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**1**	**1**	**1**	**1**	100	1	3	300
3	29	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ASN	64	76	76	76	76	72	221	283.33
3	29	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	1	1	100	1	3	300
3	29	01	1.02	03	Pelaksanaan Penataushaan dan Pengujiab /Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	1	1	100	1	3	300
3	29	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	1	1	1	100		3	300
3	29	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	1	100	1	3	300
3	29	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Bahan Tanggapan Pemeriksanaan	Laporan		1	1	1	100		2	200
3	29	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan Semester Genap SKPD	Laporan		1	1	1	100		2	200
3	29	01	1.02	08	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan		1	12	12	100		13	108.33
3	**29**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Laporan**	**1**	**1**	**1**	**1**	100	1	3	300
3	29	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	1	1	100	1	3	300
3	29	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	1	1	1	100		3	300
3	29	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	1	1	1	100	1	3	300
3	29	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milk Daerah SKPD	Dokumen	1	1	1	1	100	1	3	300
3	29	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	1	1	100		2	200
3	**29**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tahun**	**1**	**1**	**1**	**1**	100	1	3	300
3	29	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Laporan	1	1	1	1	100		2	200
3	29	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Laporan/Buah	80	1	80	80	100			0
3	29	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan	1	1	1	1	100	1	3	300
3	29	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan	1	1	1	1	100		2	200
3	**29**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tahun**	**1**	**1**	**1**	**1**	100	1	3	300
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	12	7	12	12	100	5	23	191.67
3	29	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jenis	5	6	5	5	100	6	49	408.33
3	29	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis	2	1	2	2	100		11	550
3	29	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis	6	-	6	6	100		7	116.67
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis	12	3	12	12	3		19	158.33
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan Material	Jenis	20	1	20	20	100	29	40	200
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Orang	1200	50	1200	1200	100	1	632	52.66
3	29	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tahun	1	24	1	1	24	1	26	2600
3	**29**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Unit	21	1	21	21	100	3	11	52.38
3	29	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		2		2	2			0	0



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Capaian Target Renstra s/d 2024	
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
3	29	01	1.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		1		1	1				0
3	29	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		6	1	6	6	100		1	16.67
3	29	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	12	8	12	12	8	3	18	150
3	**29**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tahun	1	1	1	1	100		2	200
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat	2500	2000	2500	2500	100	1000	5596	223.84
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening	3	5	3	3	5	3	11	366.67
3	29	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Buah	24		24	24			24	100
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Orang	8	8	8	8	8	11	25	312.5
3	**29**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tahun**	**1**	**1**	**1**	**1**	100	1	3	300
3	29	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	11	7	11	11	7	7	21	190.91
3	29	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Unit	12	1	12	12	100		7	58.33
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	30	-	30	30			6	20
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	-	1	1				
3	**29**	**02**			**Program Pengelolaan Aspek Kegeologian**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	100	1	201	201
3	**29**	**02**	**1.01**		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	Zona	10	1	10	10	100	1	5	50
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Dokumen	10	1	10	10	100	1	5	50
3	29	02	1.01	02	Penentuan dan penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Peta	1	1	1	1	100		2	200
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Dokumen	1	1	1	1	100		4	400
3	**29**	**02**	**1.02**		**Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	Dokumen	10	1	10	10	100	20	31	310
3	29	02	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Pengusahaan Air Tanah	Rekomendasi	60	30	60	60	30	20	214	356.67
3	29	02	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Pengusahaan Air Tanah	Izin	50	30	50	50	30	20	65	130
3	**29**	**02**	**1.03**		**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**Laporan**	**10**	**10**	**10**	**10**	10	10	29	290
3	29	02	1.03	01	Pengumpulan dan Perolehan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Dokumen	3	10	3	3	10	10	24	800
3	29	02	1.03	02	Penghitungan Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Laporan	3		3	3			2	66.67
3	29	02	1.03	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Laporan	1		1	1		1	2	
3	**29**	**03**			**Program Pengelolaan Mineral dan Batubara**	**Laporan/% IUP/Jumlah Wilayah Izin pertambangan yang dikendalikan**	**32**	**31.67**	**32**	**32**	31.67	39.87	74.54	232.94
3	**29**	**03**	**1.03**		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Wilayah Izin Pertambangan	90	10	90	90	10	10	66	73.33
3	29	03	1.03	03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	50	10	50	50	10	50	80	160
3	29	03	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Izin	40	10	40	40	10	40	70	175
3	**29**	**03**	**1.04**		Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Izin	10	5	10	10	5	5	15	150



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Capaian Target Renstra s/d 2024	
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
3	29	03	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Dokumen	5	5	5	5	5	5	15	300
3	29	03	1.04	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Izin	10	5	10	10	5	10	20	200
3	**29**	**03**	**1.07**		**Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan**	Data	77	2	77	77	2	1	24	31.17
3	29	03	1.07	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Izin	77	2	77	77	2	1	24	31.17
3	**29**	**05**			**Program Pengelolaan Energi Terbarukan**	**Persentase kontribusi energy baru terbarukan dalam pembangkit listrik (%)**	**5.57**	**17.43**	**5.57**	**5.57**	17.43	19.18	43.31	777.56
3	**29**	**05**	**1.03**		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	Izin	2		2	2		2	4	200
3	29	03	1.03	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Rekomendasi	2		2	2			1	50
3	29	03	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Izin	2		2	2		2	3	150
3	**29**	**05**	**1.04**		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	Unit/Jumlah Fasilitasi EBT yang di bangun	25		25	25		1	1	4
3	29	03	1.04	01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Dokumen	1	1	1	1	100	1		0
3	29	03	1.04	03	Sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan Teknologi yang menerapkan konservasi energi	Orang	100	75	100	100	75	25	120	120
3	29	03	1.04	04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Unit	20	-	20	20		3	3	15
3	**29**	**06**			**Program Pengelolaan Ketenagalistrikan**	**Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (Rumah Tangga) %**	**1200**	**350**	**1200**	**1200**	35.71	99.99	424.99	35.83
3	**29**	**06**	**1.01**		**Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**	Perlindungan Teknis	32	40	32	32	40	32	95	296.88
3	29	06	1.01	01	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Rekomendasi	32	40	32	32	40	32	95	296.88
3	29	06	1.01	02	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Izin	32		32	32		32	38	118.75
3	**29**	**06**	**1.02**		**Penatausahaan Izin Operasi yang fasilitasis Instalasinya dalam Daerah Provinsi**	Instalasi Tenaga Listrik	32		32	32			5	15.63
3	29	06	1.02	01	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Rekomendasi	32		32	32			2	6.25
3	29	06	1.02	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Izin	32		32	32			5	1563
3	**29**	**06**	**1.06**		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	Sarana/ RTS	1200		1200	1200		60	760	63.33
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dokumen	1		1	1			1	100
3	29	06	1.06	06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Sarana	1200		1200	1200			700	58.33
					B. CABANG DINAS									



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Capaian Target Renstra s/d 2024	
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
3	**29**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		80.00		80.00	80.00				0
3	**29**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Daerah**		1		1	1				0
3	29	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Orang	1		1	1			2	200
3	**29**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Laporan	1	3	1	1	3		4	400
3	29	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	2		2	2		2	10	500
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis	5	3	5	5	3	1	6	120
3	29	01	1.01	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Orang	95	20	95	95	20	90	158	166.32
3	29	01	1.01	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tahun	1		1	1		1	2	200
3	**29**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tahun	1		1	1			1	100
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat	300	500	300	300	100	1	579	193
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrk	Jenis	3	5	3	3	5	7	16	533.33
3	29	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	2	2	2	2	2		7	350
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Orang	6	8	6	6	8		13	216.67
3	**29**	**01**	**1.09**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tahun	1		1	1			1	100
3	29	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	2	2	2	2	2	2	6	300
3	**29**	**02**			**Program Pengelolaan Aspek Kegeologian**	%	100	50	100	100	50		150	150
3	**29**	**02**	**1.02**		**Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	Laporan	10		10	10			1	10
3	29	02	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Rekomendasi	9		9	9			-	0
3	29	02	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Izin	9	50	9	9	50	9	64	711.11
3	**29**	**03**			**Program Pengelolaan Mineral dab Batubara**	Wilayah Izin Pertambangan	43		43	43				0
3	**29**	**03**	**1.03**		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	Wilayah Izin Mineral Bukan Logam dan Batubara	43	1	43	43	5		9	20.93
3	29	03	1.03	03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Rekomendasi	24		24	24				0
3	29	03	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Izin/zona	19	1	19	19	1	1	5	26.32
3	**29**	**05**			**Program Pengelolaan Energi Baruterbarukan**	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik (%)	5.57	6.52	5.57	5.57	6.52		13.22	237.34
3	**29**	**05**	**1.03**		**Penatausahaan Izin, Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan samapai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Pertahun**	Izin	2		2	2				0
3	29	05	1.03	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan samapai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Pertahun	Rekomendasi	1		1	1				0
3	29	05	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan samapai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Pertahun	Izin	2	3	2	2	3	1	4	200
3	**29**	**06**			**Program Pengelolaan Ketenagalistrikan**	Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (Rumah Tangga)	1200	5.64	1200	1200	5.64	5.57	11.21	0.93
3	**29**	**06**	**1.01**		**Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia**	Pertimbangan Teknis/izin	23	2	23	23	3	1	3	13.04



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Capaian Target Renstra s/d 2024	
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
					Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi									
3	29	05	1.03	01	Penatausahaan Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan jaringan kepada penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Rekomendasi	11	10	11	11	10	1	11	100
3	29	05	1.03	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan jaringan kepada penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Rekomendasi	11		11	11				0
3	29	05	1.03	03	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan jaringan kepada penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Izin	12	1	1	1	100		2	16.67



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut dalam Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi NTB sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

   Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

2. Fungsi

   Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

   a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral;
   b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral;
   c. Pengendalian pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral;
   d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian target sesuai dengan yang direncanakan. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah di Provinsi NTB diambil dari Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029.

Rumusan Indikator kinerja Perangkat Daerah tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung percepatan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Nusa tenggara Barat Tahun 2025-2026. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Nusa tenggara Barat Tahun 2025-2029 ditampilkan dalam tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2.7 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Urusan Pemerintahan Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2025 - 2026

No	SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi primer.	Terwujudnya penggunaan energi baru terbarukan. Terwujudnya Ketahanan Energi yang ramah lingkungan (Inmendgari)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer.	%		19.2	20.75	22.30	23.85	25.41
2.	Meningkatnya Ketahanan Iklim Daerah	Terwujudnya penurunan emsi GRK dari sektor energi	Persentase Penurunan Emsi GRK sektor energi			-1,14	-0,06	0,14	0,37	0,61



3.	Meningkatnya kualitas ekosistem darat, laut dan udara	Terwujudnya pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan.	Persentase IUP yang melaksanakan kaidah usaha pertambangan yang baik dan benar (Good Mining Practices)	%		12,6	13,23	13,89	14,58	15,31
		Terwujudnya pemanfaatan air tanah yang berwawasan lingkungan	Persentase pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan	%		7.89	10.53	13.16	15.79	18.42
4.	Meningkatnya kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.	Terwujudnya Peningkatan Konsumsi Listrik	Konsumsi Listrik per kapita	kWh/ Kapita		580	609	639	668	698

Dari tabel 2.7 diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat dua tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tengara Barat, yang pertama adalah bagaimana mewujudkan kualitas lingkungan yang lestari, bersih, ramah dan berkelanjutan melalui peningkataan pemanfaatan sumber energi terbarukan dan pengelolaan kegiatan pertambangan dan pemanfaatan air tanah yang berwawasan lingkungan. Tujuan yang kedua adalah mewujudkan kemantapan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah yang merata yang berfokus pada peningkatan konsumsi listrik per kapita.

Tabel. 2.8 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024-2026

No	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (20240	Target					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Terwujudnya penggunaan energi baru terbarukan.	Meningkatnya kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik	%		15.00	15.50	16.00	16.50	17.00	
2.	Terwujudnya Penurunan Emisi GRK dari Sektor Energi	Meningkatnya kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik	%		15.00	15.50	16.00	16.50	17.00	
3.	Terwujudnya pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan.	Terlaksananya peningkatan status kegiatan usaha pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase penyelesaian permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku	%		80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	
4.	Terwujudnya pemanfaatan air tanah yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya pelaksanaan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah oleh pemegang izin air tanah.	Persentase pemegang izin air tanah yang melaksanakan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.	%		10.53	13.16	15.79	18.42	21.05	



4.	Terwujudnya Peningkatan Konsumsi Listrik	Terpenuhinya kebutuhan energi listrik yang andal, aman dan ramah lingkungan bagi masyarakat.	Rasio Elektrifikasi Gabungan antara Rumah Tangga PLN dan Non PLN	%		100	100	100	100	100	

Berdasarkan tabel 2.8 di atas terdapat empat sasaran Dinas ESDM Tahun 2025-2029 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik dengan indikator persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik (%). Indikator tersebut dihitung melalui rasio jumlah kapasitas pembangkit listrik energi baru terbarukan terhadap jumlah total kapasitas pembangkit listrik dikali 100 %.
2. Terlaksananya peningkatan status kegiatan usaha pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan indikator persentase penyelesaian permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator tersbut diperoleh dengan membandingkan jumlah permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang berhasil diselesaikan dibandingkan dengan total seluruh permohonan yang diterima.
3. Meningkatnya pelaksanaan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah oleh pemegang izin air tanah dengan indikator Persentase pemegang izin air tanah yang melaksanakan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.Indikator tersebut dihitung dari jumlah pemegang izin air tanah yang melaksanakan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dibandingkan jumlah keseluruhan pemegang izin air tanah.
4. Terpenuhinya kebutuhan energi listrik yang andal, aman dan ramah lingkungan bagi masyarakat dengan indikator Rasio Elektrifikasi (%). Indikator tersebut dihitung melalui rasio jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik dibandingkan jumlah keseluruhan rumah tangga dikali 100 %.



Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerjasesuai Tugas danFungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK Renstra 2019-2023 tahun ke 1	Target Indikator Lainnya	Target Renstra 2020-2024 Tahun ke 1-5					Realisasi Capain Renstra 2020-2024 Tahun ke 1-4					Rasio Capain Renstra 2020-2024 Tahun ke 1-4				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (%)	-	94,46	-	95,09	99,77	99,88	99,99	99,99	99,98	99,98	99,98	99,99	99,99	1,05	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%)	-	13,07	-	14,17	15,76	17,43	19.18	22.43	11,29	13,89	20,44	20,43	20,99	0,80	0,88	1,17	1,01	1,01
3	Persentase pemanfaatan airtanah di kab/kota Provinsi NTB yang berkelanjutan (%)	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	-
4	Persentase izin usaha pertambanganyang melaksanakan kaidah Pertambanganyang baik dan Benar (%)	-	-	-	4,00	9,00	31,67	9,00	7,18	0,87	11,9	5,03	7,18		0,25	1,32	0,16	-	-



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas ESDM Provinsi NTB, baik sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun setelahnya tetap melakukan koordinasi dengan perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota maupun dengan Kementerian ESDM termasuk dengan Cabang Dinas ESDM Wilayah Pulau Sumbawa. Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya mengatur tentang pembagian kewenangan antar pemerintah, koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas ESDM Provinsi NTB melalui Bappeda Kabupaten/Kota maupun Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan dengan Kementerian maupun instansi/lembaga vertikal terkait tetap dilakukan dan terus ditingkatkan.

Tentunya terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan Dinas ESDM Provinsi NTB. Permasalahan-permasalahan tersebut dikelompokkan dalam bidang-bidang sebagai berikut:

1. Bidang Mineral dan Batubara

a. Administrasi :

- ✓ Terkait dengan pelaksanaan evaluasi dokumen perizinan dan pengawasan usaha pertambangan MBLB
  - ❖ Pengawasan teknis dan Evaluasi dokumen perizinan yang dilaksanakan oleh Inspektur Tambang masih belum optimal karena pelaksanaanya harus menunggu Surat Tugas dari KAIT yang memerlukan waktu sehingga apabila terjadinya peristiwa yang mendesak untuk segera diselesaikan akan menemui kendala
  - ❖ Untuk pengawasan dan Evaluasi dokumen perizinan diluar aspek teknis sampai saat ini belum ada pejabat pengawas yang ditunjuk oleh Menteri. Ketentuan mengenai Gubernur dapat menugaskan personil untuk melaksanakan tugas Pejabat Pengawas dengan beban pembiayaan dari Kementerian ESDM masih belum dapat dilaksanakan.
- ✓ Beberapa izin usaha pertambangan MBLB yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat seperti SIPB banyak menimbulkan permasalahan di Daerah, diantaranya :
  - ❖ Terkait dengan luasan WIUP yang tidak mempertimbangkan kondisi kepemilikan lahan
  - ❖ Pemberian Izin yang tidak memperhatikan kondisi dan aspirasi masyarakat setempat
  - ❖ Pemenuhan dokumen perizinan seperti rencana penambangan dan dokumen UKL/UPL
- ✓ Terkait dengan peningkatan status IUP dari IUP Ekspolarasi ke IUP Operasi Produksi maupun perpanjangannya, banyak yang mengalami keterlambatan dari sisi waktu dikarenakan proses evaluasi dokumen perizinan sebagai syarat tidak terpenuhi tepat waktu.
- ✓ Provinsi NTB Belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur terkait perizinan mineral bukan logam dan batuan sebagai peraturan turuan pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, hal ini menyebabkan kegiatan perizinan masih mengacu pada aturan pusat tanpa memperhatikan kondisi yang terdapat wilayah Nusa Tenggara Barat.
- ✓ Belum semua pemegang IUP Operasi Produksi menyampaikan RKAB sesuai Kepmen ESDM Nomor 84K/MB.01/MEM.B/2024.
- ✓ MOMI, Akses untuk registrasi MODI yang masih terkendala



- ✓ MOMI, beberapa WIUP yang telah dilakukan penciutan belum diupdate luasannya pada MOMI
- ✓ Permasalahan Terkait Izin Pertambangan Rakyat
  - ❖ Dari 13 WPR yang sudah ditetapkan pada Tahun 2022 belum ada satupun yang memiliki Dokumen Pengelolaan WPR yang telah ditetapkan oleh Menteri
  - ❖ Kewajiban Provinsi untuk menyusub Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang dinilai akan memberatkan Pemerintah Provinsi dimana untuk melaksanakanya membutuhkan anggaran dan waktu.

b. Permasalahan Teknis
- ✓ Sebgaiab besar IUP belum memiliki Kepala Teknik Tambang
- ✓ Sebagian besar pemegang IUP tidak memiliki pemegang IUP tidak memiliki tenaga teknis yang mempunyai kemampuan sesuai standar peraturan perundang-undangan terutama tenaga teknis yang dapat menyusun dokumen berikut : Laporan Akhir Eksplorasi, Studi Kelayakan, Laporan Produksi, RKAB dan kewajiban penyusunan dokumen lainnya sesuaiperaturan perundangan-undangan

c. Permasalahan diluar ESDM
- ✓ Adanya ketentuan mengenai Lahan Sawah Dilindungi (LSD), Beberapa WIUP yang telah terbit mengalami tumpang tindih dengan wilayah LSD yang disebabkan informasi penetapan LSD oleh ATR/BPN terbit setelah WIUP diterbitkan
- ✓ Rekomendasi Tata Ruang, di Provinsi NTB tidak semua Kabupaten/Kota menerbitkan rekomendasi Tata Ruang untuk kegiatan pertambangan MBLB, terdapat 2 Kabupaten/Kota yang tidak menerbitkan Rekomendasi Tata Ruang yaitu Kabupaten Lombok Timur dan Kota Bima
- ✓ Adanya kewajiban UKL/UPL untuk IUP Tahap Eksplorasi yang memberatkan bagi pemohon IUP Eskplorasi terutama yang mempunyai luasan kecil karena tidak banyak kegiatan yang merubah bentang alam

2. Bidang Geologi dan Air Tanah
   a. Terdapat 9 CAT yang sampai dengan saat ini baru 7 CAT yang sudah dilakukan inventarisasi dan dibuat zona pemanfaatannya (data 2004) , idealnya reviu CAT dilakukan setiap 5 tahun, selain itu belum semua wilayah NTB memiliki zona CAT terutama untuk bagian selatan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa..
   b. Disebabkan adanya perubahan peraturan Perundang-undangan dimana berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Izin pemanfaatan air tanah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pelaksanaanya mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor : 259.K/GL.01/MEM.G/2022 tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah (SIP, SIPA, dan SPAM).
   c. Perlunya dilakukan perbaikan atau revisi terkait Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah untuk Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah perlu di revisi sesuai Perundangan yang baru.
   d. Proses Perizinan Air Tanah membutuhkan waktu yang lama dan berdampak pada perkembangan usaha kecil/mikro.

3. Bidang Ketenagalistrikan
   a. Rasio Elektrifikasi (RE) Provinsi NTB 2024 sebesar 99,99 %. (data PLN).
   b. Rasio Desa Berlistrik (RDB) 100% dari jumlah 1.143 Desa/Kel (data PLN).



c. Sejak tahun 2012 s/d 2024 telah dilaksanakan penyambungan Listrik Murah dan Hemat bagi 36.023 RTS kategori miskin baik melalui sumber APBN, APBD dan sumber lainnya.
d. Untuk TA 2024 melalui APBD telah dilaksanakan pekerjaan sambungan listrik gratis untuk 175 RTS di Kab. Bima 41 RTS ,Dompu 34 RTS dan Kab. Lombok Tengah 120 RTS.
e. Selain itu, terdapat program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang didanai oleh APBN untuk Tahun 2.415 RTS di seluruh Wilayah NTB.
f. Melalui dana shadaqoh karyawan PLN, program *Light up the Dream* juga akan menyalakan 45 RTS kategori miskin di seluruh NTB untuk Tahun 2023.
g. Program Lisdes PLN yang dibiayai oleh PMN untuk melistriki 34 desa (perluasan jaringan) dan 1.125 RTS di tahun 2023 serta 47 desa (perluasan jaringan) dan 1.840 RTS di tahun 2024.
h. Data penerima subsidi listrik di PLN-Mobile sering kali diupdate berdasarkan data terbaru dari basis data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan P3KE sehingga calon penerima bantuan listrik murah dan hemat tidak terdaftar lagi sebagai penerima subsidi listrik 450 VA.
i. Kurangnya data dan informasi terkait pelaku usaha atau badan usaha mana saja yang memiliki Pembangkit Listrik.

4. Bidang Energi
   a. Kendala Legislasi dan Peraturan
      - ✓ Proses Perizinan Penggunaan Kawasan, Hutan agak lama karena harus mendapat pengesahan dari Kementerian Kehutanan di Jakarta;
      - ✓ Tidak sinkronnya dokumen perencanaan energi dan kelistrikan pemerintah (RUEN/ RUED – P) dengan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik Milik PLN (RUPTL)
   b. Kendala Ekonomi
      - ✓ Keterbatasan Plafon Kredit Bank Lokal untuk Investasi Bidang Energi Terbatas
      - ✓ Biaya tambahan untuk menyewa konsultan teknis ternama
      - ✓ Khusus untuk pengembangan Waste To Energy, Tipping Fee (subsidi pengelolaan sampah dari pemerintah) terlampau rendah tidak menarik untuk insvestor
      - ✓ Anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan energi terabarukan terbatas
   c. Kendala Teknis
      - ✓ Isu intermittency (output listrik yang dihasilkan berubah-ubah tergantung input yang diterima) terutama untuk pengembangan PLTS dan PLT Bayu
      - ✓ Terbatasnya kontraktor yang berkualifikasi baik dari komunitas sekitar area proyek
      - ✓ Pada proses pembebasan lahan dimana harga lahan yang diajukan masyarakat meningkat 3-4 kali harga sebelumnya setelah dilakukan sosialisasi pembangunan pembangkit EBT kepada masyarakat yang ada dilingkungan tersebut.

Khusus untuk urusan pemerintahan bidang ESDM, terdapat beberapa tantangan, hambatan dan peluang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tantangan
   A. Bidang Mineral dan Batubara
      1. Diperlukan kesiapan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan teknis dan administrasi dalam mengelola pertambangan baik dari sisi Pemerintah Daerah maupun Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia pelaku usaha pertambangan MBLB.
      2. Adanya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan hidup yang menjadikan usaha pertambangan harus menerapkan standar lingkungan yang tinggi dalam



melaksanakan usaha pertambangan MBLB, dalam hal inipenerapan Good Mining Practice.

3. Sebagai daerah yang memiliki potensi mineral yang relatif tinggi, diperlukan kebijkan pemerintah yang dapat mendorong peningkatan manfaat dari adanya kegiatan usaha pertambangan baik terkait dengan pendapatan daerah maupun pengembangan dan pemberdayaa masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

B. Bidang Geologi dan Air Tahan

- Krisis air disebabkan karena terjadinya krisis perilaku masyarakat dan krisis pengelolaan lingkungan. Krisis air bukan hanya semata-matakurangnya air untuk memenuhi kebutuhan hidup. Telah terjadi kecenderungan yang menurun, baik dari sisi penyediaan jumlah maupun mutunya. Sementara di sisi kebutuhan justru terjadi peningkatan
- Cekungan Air Tanah (CAT) yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat belum semua dilakukan pemetaan, dari 9 CAT yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah Indonesia, baru 8 CAT yang sudah dipetakan. Dimana 7 CAT diantaranya merupakan hasil pemetaan tahun 2004 dan 1 (satu) CAT lainnya yaitu CAT Pekat di Kabupaten Dompu dipetakan pada tahun 2017. Belum lengkapnya pemetaan CAT akan berdampak pada terganggunya upaya pengelolaan konservasi air tanah;
- Potensi air tanah belum dipetakan secara detil, pemetaan potensi air tanah masih menggunakan peta skala 1:250.000 yang dibuat pada tahun 2001. Kondisi demikian menjadikan beberapa daerah yang mengalami kekeringan belum terpetakan dengan baik;
- Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih, belum semua masyarakat dapat menikmati air bersih terutama pada daerah sulit air, namun tidak semua daerah sulitair dapat diintervensi melalui pembangunan sumur bor karena kondisi geologi yang tidak memungkinkan adanya potensi air tanah;
- Masih banyak usaha yang menggunakan air tanah belum terdaftar dan memiliki izin pengambilan air tanah. Pengendalian pengambilan air terhadap usaha yang memanfaatkan air tanah belum optimal;
- Adanya perubahan pengelolaan perizinan pemanfaatan air tanah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian ESDM berpotensi menjadi hambatan dalam pengurusan perizinan pemanfaatan air tanah dikarenakan belum adanya lembaga/instransi pusat yang mengurusai air tanah di Provinsi NTB;
- Keterbatasan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam sub urusan geologi menjadikan alokasi anggaran untuk melaksanaan pengelolaan urusan kegeologian menjadi kurang diperhatikan terkait penyelidikan potensi kebumian mitigasi bencana geologi, pengelolaan keanekaragaman geologi, konservasi cagar geologi dan pengembangan geowisata.

C. Bidang Ketenagalistrikan

- Meningkatkan akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan listrik secara meratadan terjangkau;
- Mendorong peningkatan sistem ketenagalistrikan yang andal melalui pembangunan pembangkit listrik, perluasan jaringan transmisi/distribusi dan



gardu induk;
- Mendorong perluasan jaringan distribusi yang menjangkau hingga ke pelosok perdesaan/dusun;
- Meningkatkan keandalan pembangkit listrik khususnya energi baru terbarukan melaluipemenuhan persyaratan teknis dan non teknis lainnya.

D. Bidang Energi
- Masih kurangnya pemahaman masyarakat untuk melakukan konservasi energi melalui penggunaan energi baru terbarukan.
- Potensi pengembangan bahan bakar nabati terkendala dengan ketergantungan pengembangan sektor pertanian dan perkebunan, kecocokan lahan, harga komoditi dan biaya produksi yang tidak kompetitif;
- Bauran energi daerah masih didominasi oleh minyak bumi sedangkan kontribusi energi baru terbarukan masih rendah, target bauran energi terbarukan pada tahun 2025 sebesar22,86%;
- Belum dimanfaatkannya potensi panas bumi, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi energi baru terbarukan lainnya;
- Memperkuat kelembagaan pengelola pembangkit *listrik off grid* seperti Pembangkit Listrik Tenaga MikroHydro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal dalam pengelolaan dan pemeliharaan peralatan serta jaringan distribusi listrik dari pembangkit maupun pembiayaannya;
- Mendorong penerapan prinsip konservasi energi dalam rangka mengurangi emisi gas dan efek rumah kaca dalam kerangka mitigasi dan adaptasi terhadap isu pemanasan global malalui Grakan Rumah Kaca (GRK);
- Mendorong upaya peningkatan ketahanan energi terutama dalam memenuhi kebutuhan energi dengan memanfaatkan potensi energi baru terbarukan.

2. Hambatan
- Kesadaran masyarakat akan pentingnya perizinan dalam melakukan usaha pertambangan yang masih rendah berdampak pada masih adanya kegiatan pertambangan tanpa izin di beberapa wilayah di Provinsi NTB.
- Masih banyak pelaku usaha pertambangan MBLB yang memiliki izin beranggapan bahwa seluruh dokumen sebagai syarat perizinan tidak akan diawasi, sehingga dokumen perizinan hanya sebagai dokumen tidak dimaknai sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan.
- Masih rendahnya kemampuan teknis dan administrasi serta kesadaran pelaku usaha pertambangan di Provinsi NTB yang berdampak pada tingkat kepatuhan dalam melaksanakan Good Mining Practice.
- Keterbatasan anggaran untuk pembinaan dan pengawasan pertambangan MBLB
- Pembinaan dan Pengawasan dibidang kelistrikan belum maksimal dikarenakan belum melakukan sosialisasi terkait regulasi di sub sektor Ketenagalistrikan
- Kurangnya Informasi dan masih rendahnya keingintahuan Masyarakat atau Pelaku Usaha terhadap Perizinan yang berlaku dibidang ketenagalistrikan menyebabkan akan berdampak pada tingkat kepatuhan dalam melaksanakan perizinan

3. Peluang

a. Bidang Mineral dan Batubara
- ✓ Adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang memberikan



opsen pajak MBLB sebesar 25% untuk Provinsi dapat dijadikan sebagai kesempatan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk peningkatan pengelolaan pertambangan MBLB dan kesejahteraan masyarakat

- ✓ Adanya kesempatan bagi Pemeritah Provinsi dalam memanfaatkan usaha pertambangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk mendukung Visi dan Misi daerah

b. Bidang Geologi dan Air Tanah
- ✓ 7 CAT dari 9 CAT yang ada telah di survei dan mempunyai zona pemanfaatan
- ✓ Pertimbangan teknis penggunaan air tanah untuk dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi karena resikonya kecil tetapi jumlahnya banyak (akan lebih efisien bila didelegasikan ke Provinsi)
- ✓ Peraturan Menteri ESDM tentang NPA telah terbit

c. Bidang Ketenagalistrikan
- ✓ Adanya paket subsidi listrik yang disediakan pemerintah untuk memberikan akses listrik bagi masyarakat tidak mampu;
- ✓ Adanya program Pemerintah dalam meningkatkan kapasitas tenaga listrik secara nasional melalui pembangunan pembangkit 35.000 MW dan perluasan jaringan listrik transmisi/distribusi listrik, gardu induk yang dapat dimanfaatkan daerah dalam meningkatkan rasio elektrifikasi;
- ✓ Adanya insentif dan tarif yang menarik memungkinkan adanya pertumbuhan investasi melalui usaha Independent power Producer (IPP).
- ✓ Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam penyediaan dan pendanaan pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri;
- ✓ Mendorong meningkatnya keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pelaksanaan usaha jasa penunjang ketenagalistrikan

d. Bidang Energi
- ✓ Potensi pemanfaatan sektor ESDM yang cukup besar diantaranya potensi energi terbaru barukan;
- ✓ Komitmen dalam negeri untuk menyelenggarakan pengelolaan sektor ESDM berkelanjutan yang cukup tinggi;
- ✓ Dukungan Internasional yang besar untuk pengembangan bidang energi baru terbarukan yang berkelanjutan;
- ✓ Keberadaan potensi ESDM, stakeholder dan peran serta masyarakat yang tinggi dalam mendukung pembangunan nasional;
- ✓ Permintaan dan tingkat kebutuhan terhadap hasil sumberdaya ESDM;
- ✓ Meningkatnya kemajuan IPTEK;
- ✓ Adanya kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah yang berpihak kepada msyarakat sekitar;
- ✓ Sistem perizinan pemanfatan ESDM semakin mudah dan cukup selektif;
- ✓ Keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan pemanfaatan sektor ESDM.
- ✓ Potensi energi baru terbarukan di yang belum dimanfaatakan secara optimal diantaranya energi matahari, energi angin, energi air skala kecil, energi arus laut, energi biomasa dan energi panas laut;
- ✓ Arah pengembangan energi secara nasional semakin bergeser pada peningkatan bauran energi menjadikan peluang bagi provinsi Nusa Tenggara Barat untuk masuk dalam proyek pengembangan energi baru terbarukan;



- ✓ Semakin meingktanya teknologi di bidang pemanfaatan energi baru terbarukan menjadikan semakin efisien dan semakin murah dalam memanfaatkannya;
- ✓ Peluang bagi masuknya investasi pengembangan energi baru terbarukan.
- ✓ Perhatian dunia terhadap pentingnya pembangunan berkelanjutan menjadikan pengembangan pemanfaatan energi terbarukan sebagai prioritas bagi organisasi non pemerintah berpartisipasi dalam pengembangannya menjadi peluang kerjasama

Dinas ESDM Provinsi NTB telah melakukan pencapaian yang sangat baik melalui pencapaian Indikator Kinerja Daerah, yaitu Rasio Elektrifikasi. Namun demikian masih menyisakan berbagai permasalahan dalam bidang energi dan sumber daya mineral diantaranya terkait Sub Urusan Pemerintahan Bidang Geologi, Mineral dan Batubara, Energi Baru Terbarukan dan Ketenagalistrikan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Dari beberapa permasalahan tersebut dapat dirumuskan isu strategis atau isu penting, yaitu:

1. Masih adanya kegiatan pertambangan tanpa ijin yang lokasinya tersebar di seluruh Kabupaten.
2. Masih ada rumah tangga yang belum berlistrik PLN.
3. Belum optimalnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi.
4. Belum optimalnya usaha konservasi air tanah.

Namun demikian penanganan Isu Strategis Tahun 2024 tidak semua dapat dilakukan pasca diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dalam Rencana Kerja Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2025 serta terbitnya dua Undang-Undang diantaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Beberapa Isu Strategis yang dimungkinkan tidak dapat dilaksanakan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 adalah terkait :

1. Mitigasi bencana alam dan geologi
2. Pengembangan *Geopark*.
3. Pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan air bersih.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tersedia dalam rangka penanangan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang telah disesuaikan dengan Tugas dan Fungsi berdasarkan Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi NTB adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang ESDM

KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PELAKSANA KEGIATAN
3	29				URUSAN EERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		DINAS ESDM NTB
3	29	02			PROGRAM PENGEOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Prosentase Zona Pemanfaatan Air Tanah yang dikendalikan	Bidang Geologi Dan Air Tanah
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Zona konservasi air tanah yang dievaluasi (Zona)	Bidang Geologi Dan Air Tanah
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Data CAT (Dokumen)	Bidang Geologi Dan Air Tanah



KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PELAKSANA KEGIATAN
3	29	02	1.01	02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Penetapan CAT (Dokumen)	Bidang Geologi Dan Air Tanah
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Izin Pengambilan air tanah yang diawasi dan dikendalikan (Izin)	Bidang Geologi Dan Air Tanah
3	29	02	1.02		Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Perizinan air tanah yang dikendalikan (Izin)	Bidang Geologi Dan Air Tanah
3	29	02	1.02	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah prosedur dan persyaratan Izin (Dokumen)	Bidang Geologi Dan Air Tanah
3	29	02	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Rekomendasi Teknis yang diterbitkan (Rekomendasi)	Bidang Geologi Dan Air Tanah
3	29	02	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Izin Pengambilan Air Tanah yang diawasai dan Dikendalikan (Izin)	Bidang Geologi Dan Air Tanah
3	29	02	1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah NPA Kab/Kota yang dievaluasi (Buah)	Bidang Geologi Dan Air Tanah
3	29	02	1.03	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah data NPA (Dokumen)	Bidang Geologi Dan Air Tanah
3	29	02	1.03	02	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah penetapan NPA (Dokumen)	Bidang Geologi Dan Air Tanah
3	29	02	1.03	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah pemanfaatan NPA (Dokumen)	Bidang Geologi Dan Air Tanah
3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase IUP yang melaksanakan GMP (%)	Bidang Mineral dan Batubara
3	29	03	1.02		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Atau Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah izin Pertambangan Mineral Logam yang dikendalikan (Izin)	Bidang Mineral dan Batubara
3	29	03	1.02	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Jumlah prosedur dan persyaratatan izin (Dokumen)	Bidang Mineral dan Batubara
3	29	03	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan (Rekomendasi)	Bidang Mineral dan Batubara



KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PELAKSANA KEGIATAN
3	29	03	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi (Izin)	Bidang Mineral dan Batubara
3	29	03	1.02	04	Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Jumlah izin yang diawasi (Izin)	Bidang Mineral dan Batubara
3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah izin pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dikendalikan	Bidang Mineral dan Batubara
3	29	03	1.03	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah prosedur dan persyaratatan izin (Dokumen)	Bidang Mineral dan Batubara
3	29	03	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah usulan WUP (Dokumen)	Bidang Mineral dan Batubara
3	29	03	1.03	03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Rekomendasi Teknis yang diterbitkan (Rekomndasi)	Bidang Mineral dan Batubara
3	29	03	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi (Izin)	Bidang Mineral dan Batubara



KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PELAKSANA KEGIATAN
3	29	03	1.03	05	Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah izin yang diawasi (Izin)	Bidang Mineral dan Batubara
3	29	03	1.07		Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah izin pertambangan yang melaporkan produksinya (izin)	Bidang Mineral dan Batubara
3	29	03	1.07	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah data harga patokan mineral bukan logam dan batuan (Dokumen)	Bidang Mineral dan Batubara
3	29	03	1.07	02	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Dokumen)	Bidang Mineral dan Batubara
3	29	03	1.07	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah laporan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Dokumen)	Bidang Mineral dan Batubara
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Prosentase energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik (%)	Bidang Energi
3	29	05	1.03		Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah pengelola usaha niaga BBN yang dibina dan diawasi (Izin)	Bidang Energi
3	29	05	1.03	01	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah prosedur dan persyaratatan izin (Dokumen)	Bidang Energi
3	29	05	1.03	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan (Rekomendasi)	Bidang Energi
3	29	05	1.03	03	Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah izin yang dibina (Izin)	Bidang Energi
3	29	05	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi (Izin)	Bidang Energi
3	29	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah sarana dan prasaranan EBT yang dibangun (Unit)	Bidang Energi
3	29	05	1.04	01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Jumlah kebijakan (Dokumen)	Bidang Energi
3	29	05	1.04	02	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang ditingkatkan (Orang)	Bidang Energi



KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PELAKSANA KEGIATAN
3	29	05	1.04	03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi (Orang)	Bidang Energi
3	29	05	1.04	04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah fasilitas EBT yang dibangun (Unit)	Bidang Energi
3	29	05	1.04	06	Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta bintek (Orang)	Bidang Energi
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola EBT yang dibina dan diawasi (Unit)	Bidang Energi
3	29	05	1.0X		Pengembangan Sarana Prasarana EBT	1. Jumlah sarana dan prasaranan EBT yang dibangun (Unit)	Bidang Energi
3	29	05	1.0X	01	Pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT	Jumlah pembangkit listrik EBT yang dibangun (Unit)	Bidang Energi
3	29	05	1.0X	02	Pembangunan instalasi bio energi	Jumlah instalasi bio energi yang dibangun (Unit)	Bidang Energi
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Layanan listrik yang sesuai standar keselamatan ketenagalistrikan (jiwa)	Bidang Ketenagalistrikan
3	29	06	1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Izin ketenagalistrikan yang dikendalikan (Izin)	Bidang Ketenagalistrikan
3	29	06	1.01	01	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah prosedur dan persyaratan izin (Dokumen)	Bidang Ketenagalistrikan
3	29	06	1.01	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan (Rekomendasi)	Bidang Ketenagalistrikan
3	29	06	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi (Izin)	Bidang Ketenagalistrikan
3	29	06	1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Izin Operasi ketenagalistrikan yang diawasi	Bidang Ketenagalistrikan
3	29	06	1.02	01	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah prosedur dan persyaratan izin Operasi (Dokumen)	Bidang Ketenagalistrikan
3	29	06	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan (Rekomendasi)	Bidang Ketenagalistrikan
3	29	06	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi (Izin)	Bidang Ketenagalistrikan



KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PELAKSANA KEGIATAN
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga yang dipasang listrik murah dan hemat (RTS)	Bidang Ketenagalistrikan
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah data penerima penerima listrik murah dan hemat (Dokumen)	Bidang Ketenagalistrikan
3	29	06	1.06	02	Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah SK Penerima Listrik Murah dan Hemat (Buah)	Bidang Ketenagalistrikan
3	29	06	1.06	03	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan (Dokumen)	Bidang Ketenagalistrikan
3	29	06	1.06	04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah data dan informasi (Dokumen)	Bidang Ketenagalistrikan
3	29	06	1.06	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah laporan kordinasi dan sinkronisasi (Dokumen)	Bidang Ketenagalistrikan
3	29	06	1.06	06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah sarana penyediaan tenaga listrik yang dibangun (Unit)	Bidang Ketenagalistrikan
3	29	06	1.06	07	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah laporan pengawasan dan pengandalian (Dokumen)	Bidang Ketenagalistrikan

Penyelengaraan urusan Pemerintahan Bidang ESDM Tahun 2025 berdasarkan arahan Kemeterian Dalam Negeri yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, beberapa arahan tersebut diantaranya :

Pencapaian prioritas pembangunan nasional bidang ketahanan energi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain untuk:

1. Percepatan peningkatan Konsumsi Listrik Perkapita, melalui:
    a. Pemanfaatan potensi energi setempat, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, percepatan peningkatan Listrik Perkapita serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan;
    b. Pengawasan pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dan pengawasan penerapan tarif tenaga listrik oleh pemegang IUPTL;
    c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan subsidi listrik, penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik dan BBM satu harga bagi masyarakat terpencil;
2. Penyediaan database perijinan dan aset di bidang ESDM;
3. Pemeliharaan dan operasional aset-aset di bidang ESDM;
4. Penyusunan Raperda Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara pasca berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Perizinan berusaha dibidang Pertambangan.



2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rancangan awal RKPD Provinsi NTB Tahun 2025, terdapat 5 program, 21 kegiatan dan 78 Sub Kegiatan yang telah disiapkan untuk melaksanakan urusan pemerintahah bidang ESDM sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Namun sesuai dengan analisis kebutuhan yang sudah disusun akan digunakan 5 program 23 kegiatan dan 71 sub kegiatan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 13.828.145.990,- yang terdiri dari belanja Operasional dan Belanja Modal yang sudah memasukkan kebutuhan bagi penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Kelima program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 terdiri dari :

A. Induk Rp. 13.467.158.020,-

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar Rp. 11.082.554.005,-;
2. Program aspek kegeologian sebesar Rp. 159.991,450,-;
3. Program pengelolaan mineral dan batubara sebesar Rp. 479.497.025,-;
4. Program pengelolaan energi baru terbarukan sebesar Rp. 581.888.640,-;
5. Program pengelolaan ketenagalistrikan sebesar Rp. 1.163.226.900,-.

B. Cabang Dinas : Rp. 360.987.970,-

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar Rp. 318.491.970,-;
2. Program aspek kegeologian sebesar Rp. 8.028,000,-;
3. Program pengelolaan mineral dan batubara sebesar Rp. 12.234.000,-;
4. Program pengelolaan energi baru terbarukan sebesar Rp. 10.000.000,-;
5. Program pengelolaan ketenagalistrikan sebesar Rp. 12.234.000,-.

Penyusunan rancangan diinput melalui aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri melalui laman https://ntbprov.sipd.kemendagri.go.id. Anaisis kebutuhan program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2025 didasarkan atas usulan masing-masing bidang pada Dinas ESDM Provinsi NTB. Review Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan Rancangan Awal RKPD dan Analisis Kebutuhan dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut:



Tabel 2.11 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Provinsi NTB

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
	URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				13,,828,145,990.00		URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	13,828,145,990.00	
	Dinas Induk				13,452,349,990.00		Dinas Induk	13,467,158,020.00	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Mataram	Nilai SAKIP		10,170,760,630.00	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	11,082,554,005.00	
A	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi**	**9 Dokumen**	**276,477,176.00**	A	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	281,439,230.00	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Mataram, Selaparang, Dasan Agung Baru	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	101,412,076.00	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	103,124,130.00	
02	Koodinasi dan Penyusunan RKA - SKPD	Kota Mataram, Selaparang, Dasan Agung Baru	Jumlah dokumenbRKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000.00	02	Koodinasi dan Penyusunan RKA - SKPD	17,400,000.00	
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	12,000,000.00	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	13,800,000.00	
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	11,000,000.00	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	6,860,000.00	
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	12,000,000.00	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7,860,000.00	



NO	RANCANGAN AWAL RKPD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
			Dokumen Perubahan DPA-SKPD						
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Laporan Capian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	12,000,000.00	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23,830,000.00	
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	113,065,100.00	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	108,565,100.00	
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**8,588,578,554.00**	**B**	**Administrasi Keuangan**	**8,588,577,925.00**	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	JumlahOrang yang menerima Gaji dan Junjangan ASN	68 Orang/ Bulan	8,506,178,554.00	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,506,178,561.00	
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	52,900,000.00	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52,900,000.00	
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	4,000,000.00	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4,000,000.00	
04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan nAkuntansi SKPD	1 Dokumen	15,500,000.00	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15,499,914.00	
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	10,000,000.00	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9,999,450.00	



NO	RANCANGAN AWAL RKPD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
			Penyusunan Laporan Keuangan Tahun SKPD						
C	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**35,000,000.00**	**C**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**34,999,910.00**	
01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10,000,000.00	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	9,999,910.00	
02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5,000,000.00	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5,000,000.00	
03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah laporan Hasil Peniliaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15,000,000.00	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	15,000,000.00	
06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	5,000,000.00	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5,000,000.00	
D	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**6,500,000.00**	**D**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**5,997,840.00**	
01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	3,000,000.00	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2,999,840.00	
05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Unit	3,500,000.00	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	2,998,000.00	
E	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**237,000,000.00**	**E**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**229,616,180.00**	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	1 Paket	7,000,000.00	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5,818,000.00	



NO	RANCANGAN AWAL RKPD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
		Semua Kel/ Desa	Bangunan Kantor yang tersedia						
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	4,000,000.00	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,850,000.00	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	1 Jenis	5,000,000.00	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4,960,000.00	
05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan Penggandaan yang disediakan	1 Dokumen	5,000,000.00	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4,988,500.00	
07	Penyediaan Bahan/ Material	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Paket Bahan/ Material yang disediakan	1 Dokumen	6,000,000.00	07	Penyediaan Bahan/ Material	5,999,680.00	
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10,000,000.00	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10,000,000.00	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 Laporan	200,000,000.00	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194,000,000.00	
F	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**251,934,900.00**	**F**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1,,046,597,520.00**	
02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa				02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	799,930,000.00	
05	Pengadaan Mebel	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Paket	10,000,000.00	05	Pengadaan Mebel	21,383,520.00	
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	8 Unit	241,934,900.00	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	225,284,000.00	



NO	RANCANGAN AWAL RKPD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
G	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**524,500,000.00**	**G**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**458,900,400.00**	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1800 Laporan	6,000,000.00	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,000,000.00	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kumunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Laporan	150,000,000.00	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115,940,400.00	
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Laporan Penyediaann Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Jenis	368,500,000.00	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	336,960,000.00	
H	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**250,770,000.00**	**H**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**436,425,000.00**	
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Alat atau Lapangan yang dipelihara dan Dibyarakan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	51,670,000.00	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51,670,000.00	
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Alat atau Lapangan yang dipelihara dan Dibyarakan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	110,000,000.00	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau lapangan	146,000,000.00	
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	22 Unit	14,100,000.00	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39,170,000.00	
10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Mataram	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	75,000,000.00	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199,585,000.00	



NO	RANCANGAN AWAL RKPD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
			yang Dipelihara/ Direhabilitasi						
II	PROGRAM PENGEOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN				160,000,000.00	II	PROGRAM PENGEOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	159,991,450.00	
A	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa**	**Jumlah zona konservasi air tanah yang dievaluasi (zona)**		**60,000,000.00**	**A**	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**59,997,600.00**	
01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	60,000,000.00	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	59,997,600.00	
B	**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**				**100,000,000.00**	**B**	**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**99,993,850.00**	
01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	5 Dokumen	50,000,000.00	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	49,993,850.00	
03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	5 Laporan	50,000,000.00	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	50,000,000.00	
III	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA				487,500,000.00	III	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	479,497,025.00	



NO	RANCANGAN AWAL RKPD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
A	**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut**				**252,500,000.00**	A	**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Atau Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut**	279,499,750.00	
03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	10 Dokumen	160,000,000.00	03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	119,499,925.00	
04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 Dokumen	92,500,000.00	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	159,999,825.00	



NO	RANCANGAN AWAL RKPD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
			Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut						
B	**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Loham dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat**				**220,000,000.00**	**B**	**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Rakyat untuk KomODITAS Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Loham dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat**	**149,997,425.00**	
02	Koordinas dan Sikronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Semua Kab/ Kota , Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	1 Laporan	60,000,000.00	02	Koordinas dan Sikronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	49,997,675.00	
03	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komunitas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Semua Kab/ Kota , Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komunitas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	5 Dokumen	110,000,000.00	03	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komunitas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	50,000,000.00	
04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Semua Kab/ Kota , Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral	1 Laporan	50,000,000.00	04	Pengendalian dan Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	49,999,750.00	



NO	RANCANGAN AWAL RKPD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
			Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat						
C	**Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan**				**15,000,000.00**	**C**	**Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan**	**49,999,850.00**	
03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Semua Kab/ Kota , Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	10 Laporan	15,000,000.00	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	49,999,850.00	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN				853,269,000.00	IV	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	581,888,640.00	
A	**Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun**				**20,000,000.00**	**A**	**Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun**	**19,999,850.00**	
02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun		Jumlah Dokumen rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	1 Dokumen	10,000,000.00	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	10,000,000.00	



NO	RANCANGAN AWAL RKPD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Provinsi NTB	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	1 Dokumen	10,000,000.00	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	9,999,850.00	
B	**Pengelolaan Penyediaan Biomaasa dan/ atau Biogas dalam wilyah provinsi**				**366,410,000.00**	**B**	**Pengelolaan Penyediaan Biomaasadan/ atau Biogas dalam wilyah provinsi**	**351,890,140.00**	
01	Penyusunan dan Pemuktahiran data potensi biomassa	Semua Kab/ Kota , Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen data potensi biomassa	1 Dokumen	50,000,000.00	01	Penyusunan dan Pemuktahiran data potensi biomassa	35,499,500.00	
06	Penyusuanan dan Pemuktahiran data potensi biogas	Semua Kab/ Kota , Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen data potensi biogas	1 Dokumen	50,000,000.00	06	Penyusuanan dan Pemuktahiran data potensi biogas	49,999,640.00	
08	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Semua Kab/ Kota , Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	5 Laporan	266,410,000.00	08	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	266,391,000.00	
C	**Pengelolaan Pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi**				**196,859,000.00**	**C**	**Pengelolaan Pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi**		
03	Revitalisasi Infrastruktur biomassa dan/atau biogas		Jumlah Unit Infrastruktur biomassa dan/atau biogas	10 Unit	196,859,000.00	03	Pemeliharaan Infrastruktur biomassa dan/atau biogas		
D	**Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, Gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi**		**Jumlah Laporan pelaksanaan pembinaan dan pwngawasan aneka EBT (Kapasitas terpasang, investasi)**		**235,000,000,00**	**D**	**Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, Gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi**	**134,998,700.00**	



NO	RANCANGAN AWAL RKPD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
			di Daerah						
02	Pembinaan dan Pengawasan aneka EBT (Kapasitas terpasang, investasi) di dearah	Semua Kab/ Kota , Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan pelaksanaan pembinaan dan pwngawasan aneka EBT (Kapasitas terpasang, investasi) di Daerah	1 Laporan	200,000,000.00	02	Pembinaan dan Pengawasan aneka EBT (Kapasitas terpasang, investasi) di dearah	99,999,500.00	
10	Penyusunan dan Pemuktahiran data potensi aneka EBT di Daerah		Jumlah Dokumen data potensi aneka EBT di Daerah	1 Laporan	35,000,000.00	10	Penyusunan dan Pemuktahiran data potensi aneka EBT di Daerah	34,999,200.00	
E	**Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi**				**35,000,000.00**	**E**	**Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi**	**74,999,950.00**	
03	Sosialisasi Konservasi energi kepada masyarakat	Semua Kab/ Kota , Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	1 Laporan	35,000,000.00	03	Sosialisasi Konservasi energi kepada masyarakat	74,999,950.00	
V	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				1,780,820,360.00	V	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	1,163,226,900.00	
A	**Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**				**60,000,000.00**	**A**	**Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**	**59,926,900.00**	
02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Semua Kab/ Kota , Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga	1 Dokumen	30,000,000.00	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	29,976,000.00	



NO	RANCANGAN AWAL RKPD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
			Listrik dalam Daerah Provinsi						
03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Semua Kab/ Kota , Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	30,000,000.00	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	29,950,000.00	
B	**Pengganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan**				**1,720,820,360.00**	**B**	**Pengganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan**	1,103,300,000.00	
01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu		Jumlah Dokumen terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen	58,320,360.00	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	58,300,000.00	
06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		Jumlah Sarana yang terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan	75 Unit	1,662,500,000.00	06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1,045,000,000.00	
	Cabang Dinas ESDM Wilayah Pulau Sumbawa				375,796,000.00		Cabang Dinas ESDM Wilayah Pulau Sumbawa	360,987,970.00	



NO	RANCANGAN AWAL RKPD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				375,796,000.00	I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	360,987,970.00	
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				279,796,000.00	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	318,491,970.00	
A	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**33,000,000.00**	**A**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**32,024,820.00**	
02	Penyediaan Perlatan dan Perelengkapan Kantor	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	2,500,000.00	02	Penyediaan Perlatan dan Perelengkapan Kantor	5,727,720.00	
05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	2,500,000.00	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2,783,100.00	
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3,000,000.00	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2,400,000.00	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	25,000,000.00	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21,114,000.00	
B	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**216,376,000.00**	**B**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**249,949,150.00**	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,000,000.00	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,037,150.00	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	26,160,000.00	02	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	26,160,000.00	
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	8 Laporan	189,216,000.00	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	220,752,000.00	



NO	RANCANGAN AWAL RKPD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
C	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**30,420,000.00**	**C**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**26,370,000.00**	
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraam Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit	25,200,000.00	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraam Dinas Operasional atau Lapangan	21,810,000.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5,220,000.00	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,560,000.00	
II	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN				16,000,000.00	II	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	10,148,000.00	
A	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Provinsi**				**8,000,000.00**				
03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	8,000,000.00				
B	**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**				**8,000,000.00**	**A**	**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**8,028,000.00**	
03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	8,000,000.00	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	8,028,000.00	
III	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA				30,000,000.00	III	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	12,234,000.00	
A	**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin**				**30,000.000.00**	**A**	**Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat**	**12,234.000.00**	



NO	RANCANGAN AWAL RKPD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
	Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut								
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	1 Laporan	15,000,000.00				
04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	1 Laporan	15,000,000.00	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	12,234,000.00	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN				20,000,000.00	IV	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	10,000,000.00	
A	**Penatausahaan Izin, Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun**				**20,000,000.00**	**A**	**Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, Gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi**	**10,000,000.00**	



NO	RANCANGAN AWAL RKPD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaandan pengawasan aneka EBT (Kapasitas terpasang investasi) di Daerah	1 Laporan	10,000,000.00	02	Pembinaandan pengawasan aneka EBT (Kapasitas terpasang investasi) di Daerah	10,00,000.00	
02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaandan pengawasan aneka EBT (Kapasitas terpasang investasi) di Daerah	1 Laporan	10,000,000.00				
V	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				30,000,000.00	V	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	12,234,000.00	
A	**Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**				**30,000,000.00**	**A**	**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**	**12,234,000.00**	
02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilita Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	15,000,000.00				
03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilita Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	15,000,000.00	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas dalam Daerah	12,234,000.00	



BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas, Dinas ESDM Provinsi NTB berperan dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam rangka mewujudkan Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Kesejahteraan Masyarakat Nusa Tenggara Barat akan dijabarkaan kedalam 4 (sasaran) yang terdiri dari :

1. Meningkatnya kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik
2. Terlaksananya peningkatan status kegiatan usaha pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Meningkatnya pelaksanaan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah oleh Pemegang Izin Air Tanah
4. Terpenuhinya kebutuhan energi listrik yang andal, aman dan ramah lingkungan bagi masyarakat

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029 yang merupakan pelaksanaan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat DaerahTahun 2025-2029.

Selain itu penyusunan Rencana Strategis ini juga telah memperhatikan :

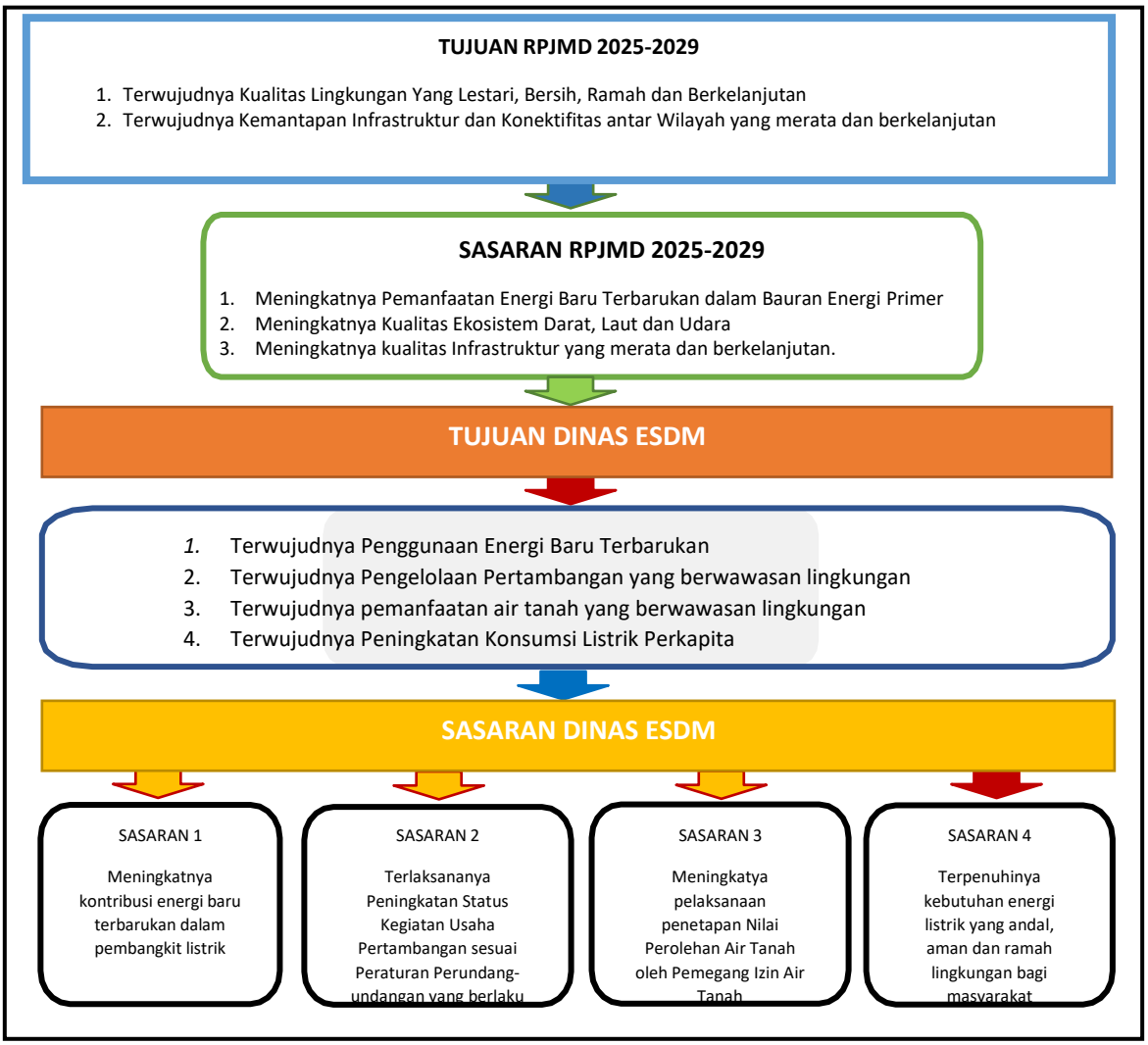
1. Penyelarasan target Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam Rancangan RPJPN Tahun 2025-2045.
2. Kesesuaian sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045.
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah dalam RPJMD Tahun 2019-2023.
4. Isu-isu strategis yang berkembang baik skala Provinsi maupun skala Nasional.
5. Kebijkan Daerah maupun Kebijakan Nasional, dan
6. Perkembangan regulasi.

Terdapat perubahan yang signifikan terkait dengan penyesuaian kewenangan akibat terbitnya beberapa peraturan dan perundang-undangan diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang.
2. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 291.K/GL.01/MEM/.G/2023 tentang Standar Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.

Penyesuaian kewenangan tersebut terdiri dari sub urusan pemerintahan bidang geologi yang menarik kewenangan pemerintah provinsi terhadap Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam Daerah provinsi. Adapun penyesuaian berikutnya adalah terkait dengan kewenangan terhadap sub urusan bidang mineral dan batubara yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang mendelegasikan sebagian pemberian perizinan berusaha bidang pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Provinsi terkait dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) serta Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).

Guna melaksanakan pendelegasian tersebut, Pemerintah Provinsi telah menyiapkan organisasi perangkat daerah serta program kegiatan untuk melaksanakannya. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.



Gambar 3.1 Tujuan dan Sasaran dalam mendukung Misi Pembangunan NTB dalam RPJMD 2025-2029



Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Dinas ESDM sebagai organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral bertanggung jawab terhadap peningkatan pelayanan diantaranya :

1. Peningkatan cakupan layanan dasar listrik dan peningkatan konsumsi listrik untuk produktifitas masyarakat.
2. Peningkatan kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi melalui pemanfaatan potensi energi setempat.
3. Pengendalian pemanfaatan air tanah sebagai bagian dari usaha Konservasi Air Tanah (GRK)
4. Peningkatan kontribusi sektor pertambangan mineral dan batubara melalui pengendalian dan pengawasan kegiatan pertambangan dan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara.

Keempat pelayanan terkait dengan urusan ESDM tersebut akan menjadi isu strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ESDM. Selanjutnya akan diselaraskan antara keempat isu strategis diatas dengan faktor eksternal berupa sasaran jangka menengah Kementerian ESDM, implikasinya terhadap RTRW dan KLHS yang akan digambarkan dalam tabel 3.1 berikut :

No	GAMBARAN PELAYANAN	SASARAN JANGKA MENENGAH K/L					SASARAN JANGKA MENENGAH PROVINSI					IMPLIKASI RTRW	IMPLIKASI KLHS
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
1	Peningkatan konsumsi listrik per kapita						580	609	639	668	698	Rencana pengembangan pembangkit dan jaringan listrik termasuk dalam jaringan energi dan kelistrikan termasuk didalamnya pengambangan bagi daerahterpencil dan kepulauan	Adanya potensi kerusakan lingkungan akibat dari pengembangan pembangkit dan jaringan listrik termasuk pemanfaatan energi terbarukan dalam pengembangan pembangkit listrik
2	Peningkatan kontribusi EBT dalam bauran energi	-	13,40	14,50	15,70	17,90	19,2	20,75	22,30	23,85	25,41	Penyediaan ruang bagi pengembangan EBT terutama bagi pengambangan pembangkit listrik	
3	Pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan	-	-	-	-	-	7.89	10.53	13.16	15.79	18.42	Konservasi daerah Cekungan Air Tanah	Degradasi daya dukung air tanah terkait dengan semakin meningkatnya pemanfaatan air tanah dan rusaknya daerah resapan air tanah



No	GAMBARAN PELAYANAN	SASARAN JANGKA MENENGAH K/L					SASARAN JANGKA MENENGAH PROVINSI					IMPLIKASI RTRW	IMPLIKASI KLHS
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
4	Pengendalian pertambangan mineral dan batubara melalui pelaksanaan kaidah usaha pertambangan yang baik dan benar	-	-	-	-	-	12,6	13,23	13,89	14,58	15,31	wilayah pertambangan yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang	Terganggunya fungsi tata ruang akibat kegiatan pertambangan akan menurunkan daya dukung lingkungan akibat pembukaan lahan dan pencemaran air

Tabel 3.1 Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

Dari gambaran tabel 3.1 diatas didapat informasi mengenai isu strategis yang akan ditangani dalam Rencana Kerja Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan konsumsi listrik per kapita;
2. Meningkatkan kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi;
3. Meningkatkan Konservasi dan pengendalian pemanfaatan air tanah;
4. Meningkatkan pengelolaan dan pengendalian kegiatan pertambangan mineral dan batubara.

Perubahan RTRW Provinsi NTB yang saat ini sedang dilakukan, dalam penyusunannya telah didasari atas KLHS sesuai dengan lingkup bidang yang akan mempengaruhi RTRW salah satunya bidang ESDM, berikut ini dijelaskan secara singkat mengenai hambatan dalam pelaksanaan pelayanan bidang ESDM kaitannya dengan KLHS dalam penyusunan RTWR

Untuk urusan pertambangan mineral dan batubara, pasca diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara pada tanggal 11 April 2022, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat baru secara efektif melaksanakan pengelolaan perizinan melalui *Online Single Submision* (OSS) bulan Oktober 2022. Pendelegasian tersebut meliputi perizian usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB) dan pertambangan rakyat. Sejak tahun 2022 sampai dengan triwulan III Tahun 20224 setidaknya telah terbit 295 izin di bidang pertambangan MBLB. Jumlah tersebut terdiri dari 145 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, 125 IUP Operasi Produksi, 3 Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB), 2 Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan 9 Izin Pengangkutan dan Penjualan MBLB dan 11 Izin Usaha Jasa Penunjang (IUJP) di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Potensi penerimaan negara dan daerah dari hasil kegiatan pertambangan di Provinsi Nusa tenggara Barat diantaranya adalah dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari *Landrent*, Iuran Produksi atau *Royalti* dari izin usaha pertambangan mineral logam, Retribusi, Pajak Daerah dan keuntungan bersih yang menjadi bagian provinsi dari IUP Khusus (sebagai kelanjutan Kontrak Karya). Kontribusi terbesar berasal dari PNBP pada tahun 2022 sebesar Rp. 2.041.856.003.629,- dengan bagian Provinsi sebesar Rp. 325.040.486.648,- selanjutnya kontribusi bagian pemerintah daerah dari keuntungan bersih IUPK pada tahun 2023 sebesar USD 1.111.650.000,- dengan bagian untuk pemerinta provinsi NTB sebesar 1,15 atau sebesar USD 16.674.750,-. Sedangkan pada tahun 2023 kontribusi terbesar berasal dari PNBP sebesar Rp. 2.041.856.003.629,- dengan bagian Provinsi sebesar Rp. 304.700.603.341,- selanjutnya kontribusi bagian pemerintah daerah dari keuntungan bersih IUPK sebesar USD 489.249.000,- dengan bagian untuk pemerinta provinsi NTB sebesar 1,15 atau sebesar



USD 7.338.735,-. Angka tersebut belum memasukkan potensi pendapatan daerah dari sektor pertambangan MBLB yang pada tahun 2025 akan diberlakukan opsen pajak MBLB sebesar 25% menjadi bagian dari provinsi. Potensi pemasukan pajak MBLB belum dapat dihitung dikarenakan belum adanya data pasti mengenai perkiraan produksi MBLB di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari gambaran diatas menunjukkan betapa pentingnya sektor ESDM terutama pertambangan didalamnya berkontribusi terhadap APBD Provinsi NTB.

Permasalahan yang dihadapi sektor pertambangan di provinsi NTB diantaranya adalah :

1. Masih adanya kegiatan pertambangan MBLB dan Mineral logam yang tidak berizin yang berpotensi terhadap kerusakan lingkungan dan hilangnya potensi pendapatan negara dan daerah dari sisi pajak dan PNBP
2. Saat ini Pemerintah pusat dan Pemeritah daerah sedang mempersiapkan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam rangka melegalisai kegiatan pertambangan rakyat tanpa izin sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Belum semua pemegang izin pertambangan baik MBLB maupun Mineral logam melaksanakan kewajiban teknis, administrasi dan keuangan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sebagian besar pemegang IUP MBLB tidak memiliki tenaga teknis yang tersertifikasi dan mempunyai kemampuan untuk menyusun dokumen laporan sebagai syarat dan kewajiban usaha pertambangan.
5. Perkembangan perubahan regulasi yang sangat cepat berpengaruh terhadap implementasi pelaksanaan perizinan pertambangan di daerah dan menjadi kendala bagi pemegang IUP untuk mengikutinya.

Pegelolaan pertambangan saat ini telah menjadi perhatian Pemerintah Pusat dimana akir-akhir ini banyak ditemukan kasus perizinan pertambangan yang telah menjadi isu nasional. Untuk itu Pemerintah Provinsi NTB telah melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan yang terkait dengan perizinan pertambangan dengan memperbaiki Standar Opersional Prosedur, meningkatkan pembinaan dan pengawasan dengan melibatkan unsur pemerintah pusat yang ada di daerah seperti inspektur Tambang.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Provinsi mempunyai peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak MBLB yang dapat digunakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama disekitar wilayah pertambangan.

Adanya kewajiban bagi usaha pertambangan untuk melaksanakan program pengembangan dan permberdayaan masyarakat (PPM) menjadikan peluang bagi daerah untuk memanfaatkan progran tersebut dalam rangka mendukung pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi daerah.

Energi kelistrikan menjadi salah satu sektor paling penting yang mendapatkan perhatian mengingat kontribusinya dalam pembentukan Gas Rumah Kaca. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sektor energi termasuk penghasil emisi GRK utama Bersama dengan sektor kehutanan dan sektor limbah.

Selain mendorong penggunaan EBT dalam penyediaan listrik, juga dilakukan upaya pengalihan bahan bakar *(fuel switching)* dan pemanfaatan gas buang semaksimal mungkin. Pengalihan sumber-sumber energi primer pembangkit dari Bahan Bakar Minyak (BBM) ke gas pada Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU), dan



Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) diikuti dengan pencampuran energi *biofuel* atau *biodiesel* pada pembangkit-pembangkit Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

Penyediaan tenaga listrik sampai dengan tahun 2029 memang masih akan didominasi oleh pembangkit berbahan bakar fosil terutama batu bara. Akan tetapi upaya untuk mengurangi pengoperasian pembangkit batu bara secara signifikan telah ditetapkan, termasuk pemanfaatan *coal based methane* (CBM) apabila keekonomiannya sudah memenuhi dan mampu bersaing dengan bahan bakar fosil konvensional. Selain itu, penggunaan teknologi hasil inovasi seperti *Integrated Gasification Combined Cycle* (IGCC) dan *Carbon Capture Utilization and Storage* (CCUS) untuk mengurangi emisi GRK secara signifikan, juga dimasukkan sebagai bagian dari komitmen dan target Pemerintah mengurangi emisi GRK selama proses transisi dari energi berbasis fosil menuju energi bersih.

Selain itu, dalam proses transisi Pemerintah juga berkomitmen memanfaatkan lebih banyak bahan bakar berbasis biomasa untuk digunakan secara bersama *(Co-Firing)* dengan batu bara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) *existing* dan yang sudah direncanakan atau terkontrak untuk dibangun untuk memenuhi kebutuhan energi listrik.

Energi Baru merupakan sumber energi yang berasal dari sumber-sumber energi hasil penemuan atau inovasi manusia yang belum pernah digunakan sebelumnya, baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batu bara *(coal bed methane),* batu bara tercairkan *(liquified coal)* dan batu bara tergaskan *(gasified coal).* Selain itu, sumber-sumber EBT yang dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik antara lain adalah biomassa, *biofuel*, biogas dan energi laut, *Ocean Thermal Energy Conversion* (OTEC), bio CNG, dan *fuel cell*/Hidrogen.

Pengembangan EBT dalam periode transisi hingga 10 tahun ke depan dilakukan secara intensif dengan tetap menjaga keseimbangan *supply and demand*. Inisiatif strategis juga diperlukan dalam rangka menjamin kecukupan pasokan dan meningkatkan bauran energi dari pembangkit Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di masa depan dengan harga energi listrik dari pembangkit EBT yang semakin optimal.

Inisiatif strategis peningkatan bauran dan pemanfaatan EBT sebagai pasokan pembangkit tenaga listrik dilakukan antara lain dengan: pengembangan pembangkit EBT dengan tetap memperhatikan :

1. Keseimbangan *supply-demand*;
2. Kesiapan sistem tenaga listrik dan keekonomian;
3. Pemanfaatan sumber energi terbarukan baik dari jenis energi aliran dan terjunan air, energi panas bumi (termasuk skala kecil/modular), biofuel, energi angin, energi sinar matahari, biomasa, sampah dan lain-lain;
4. Pengembangan *microgrid* dengan menerapkan tersebar/terpusat PV, tenaga bayu, atau pico-hydro untuk daerahdaerah terisolir/komunitas terpencil yang jauh dari jaringan PLN pada daerah tertinggal, dan pulau-pulau terluar lainnya sesuai dengan potensi energi yang tersedia;
5. Pengembangan PLTS di lahan bekas tambang yang sudah tidak beroperasi;
6. Pemanfaatan waduk-waduk untuk PLTS Terapung sehingga dapat menurunkan biaya pembebasan lahan dengan tetap mempertimbangkan kajian operasi dan pemeliharaannya;
7. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) *hybrid* dengan PLTD untuk daerah dengan jam nyala rendah (di bawah 12 jam/hari).



Inovasi Pengembangan EBT

Dibandingkan dengan pembangkit berbasis fosil pada umumnya, secara ekonomi pembangkit-pembangkit bersumber EBT belum dapat berkompetisi secara *head to head.* Meskipun demikian, pengembangan teknologi dan inovasi di bidang penyediaan sumber energi bersih sudah sangat maju, apalagi bilamana dilihat dari harga keekonomian pada 10 atau 20 tahun yang lalu.

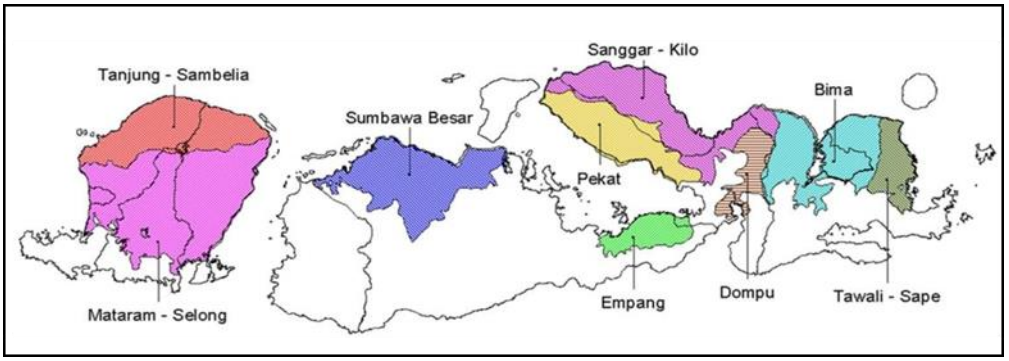
Pembangkit hidrogen juga menjadi opsi yang dapat diandalkan sekaligus aman, seiring perkembangan dan inovasi teknologi yang tersedia. Akan dibuat ekosistem bisnis yang memungkinkan *hydrogen economy* dapat bekerja, dengan *streamlining* produksi hidrogen maupun pemanfaatan hidrogen untuk *large scale power plant*.

Inovasi pengembangan EBT juga dilakukan tidak hanya berbasis sumber energinya, tetapi juga dalam pengelolaannya sampai di tingkat konsumen listrik. Elektrifikasi sektor transportasi berbasis BBM baik bus, truk, mobil penumpang pribadi maupun motor listrik untuk mewujudkan *green to green concept*. Dengan demikian, akan terbangun ekosistem di mana *"Green power plant powering green car and houses.". Milestones* (Tonggak) Penting.

Dalam rangka pengelolaan air tanah yang menjadi kewenangan Provinsi, Pemerintah Provinsi NTB telah melakukan penataan terhadap perizinan Surat Izin Pengeboran (SIP) dan Surat Izin Pemnafaatan Air tanah (SIPA). Hingga akhir Desember 2022, sebanyak 173 SIP dan 646 SIPA telah diterbitkan melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Namun demikian pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, kewenangan Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam Daerah provinsi dicabut menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sehingga kewenangan Pemerintah Provinsi sub urusan pemerintahan bidang geologi hanya pada Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah provinsi dan Penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah provinsi. Namun demikian perizinan pemanfaatan air tanah masih dilaksanakan oleh Provinsi sambil menunggu peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. Pasca terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 259.K/GL.01/MEM.G/2022 tentang Standar Penyelenggaraan izin Pengusahaan Air Tanah, seluruh pengelolaan perizinan pemanfaatan air tanah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Badan Geologi Kementerian ESDM.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalisifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, kegiatan dalam Program Aspek Kegeologian tidak lagi mendukung kegiatan geologi lingkungan melainkan terbatas pada pengelolaan air tanah yang mencakup kegiatan penetapan zona konservasi air tanah, penatausahaan izin pengeboran air tanah dan penetapan nilai perolehan air tanah. Kegiatan yang termasuk dalam Program Pengelolaan Aspek Kegeologian lebih menitikberatkan kepada pengelolaan konservasi air tanah. Sedangkan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah yang selama ini dilaksanakan melalui pembangunan sumur bor tidak terdapat lagi pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Dalam Renstra Tahun 2024-2026 Program pengelolaan aspek kegeologian lebih menekankan pada konservasi air tanah dan penetapan Nilai perolehan Air. Dalam pengelolaan konservasi air tanah dibutuhkan data potensi dan kondisi air tanah terkini. Provinsi NTB memiliki 9 cekungan air tanah (CAT), dua diantaranya belum dilakukan pemetaan potensinya. Data potensi air tanah tersebut merupakan data tahun 2004 yang perlu dilakukan reviu untuk mengatahui kondisi air tanah sebagai dasar

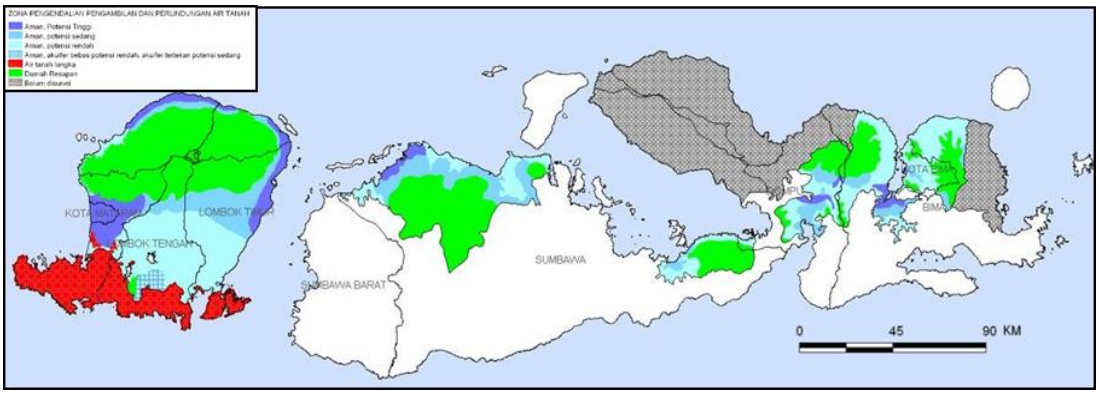
dalam pengendalian pemanfaatan air tanah dan penentuan nilai perolehan air tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.



Gambar 3.2. Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024

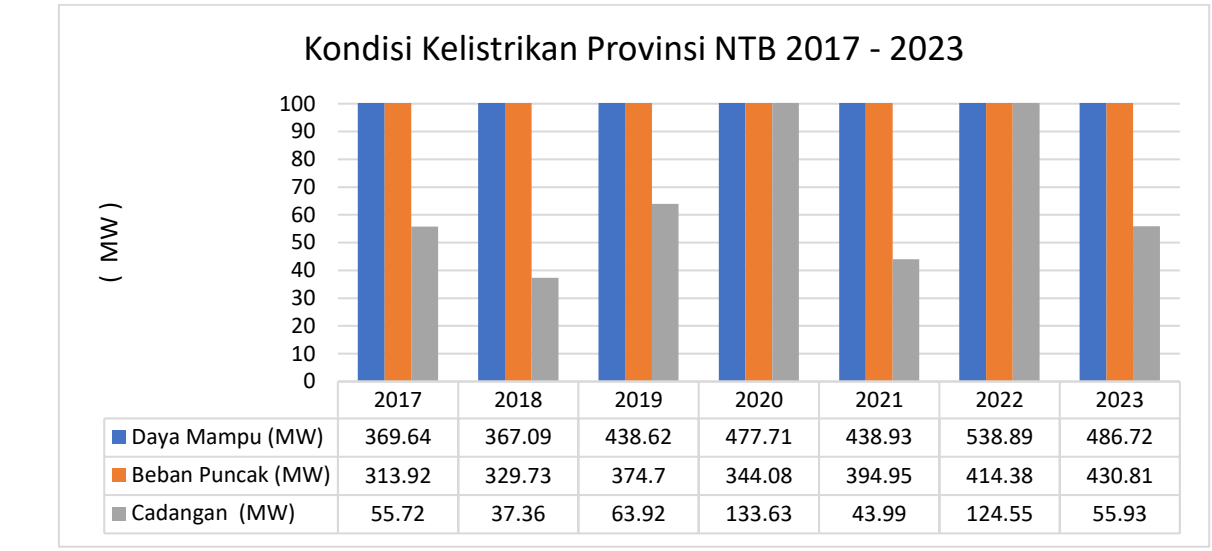
Tabel 3.2 Potensi Cekungan Air Tanah di Provinsi NTB

Cekungan Air Tanah (CAT)			Jumlah Air Tanah (Juta M^3/Tahun)		Kategori CAT			
					Pusat		Provinsi	Kab/Kota
No	Nama	Luas (KM^2)	Bebas (Q_1)	Tekanan (Q_2)	A1	A2	B	C
1	Mataram - Selong	2.366	662	8			√	
2	Tanjung - Sambelia	1.124	224	22			√	
3	Sumbawa Besar	1.404	183	25				√
4	Empang	345	35	3			√	
5	Pekat	977	220	10			√	
6	Sanggar – Kilo	1.419	320	14			√	
7	Dompu	375	63	6				√
8	Bima	1.102	165	16			√	
9	Tawali - Sape	363	36	3				√



Gambar 3.3. Peta Zona Pegendalian Pemgambilan dan Perlindungan Air Tanah

Sejak Tahun 2014 kondisi kelistrikan Provinsi NTB semakin membaik, sampai dengan akhir Tahun 2023 daya mampu sebesar 486,72 MW dengan beban puncak 430.81 MW sehinga terdapat cadangan sebesar 55.93 MW yang masuk dalam kategori Normal. Untuk melihat perkembangan kondisi kelistrikan Provinsi NTB dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini :



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Daya Mampu (MW)	369.64	367.09	438.62	477.71	438.93	538.89	486.72
Beban Puncak (MW)	313.92	329.73	374.7	344.08	394.95	414.38	430.81
Cadangan (MW)	55.72	37.36	63.92	133.63	43.99	124.55	55.93

Gambar 3.4 Perkembangan Kondisi Kelistrikan NTB Tahun 2017- 2023

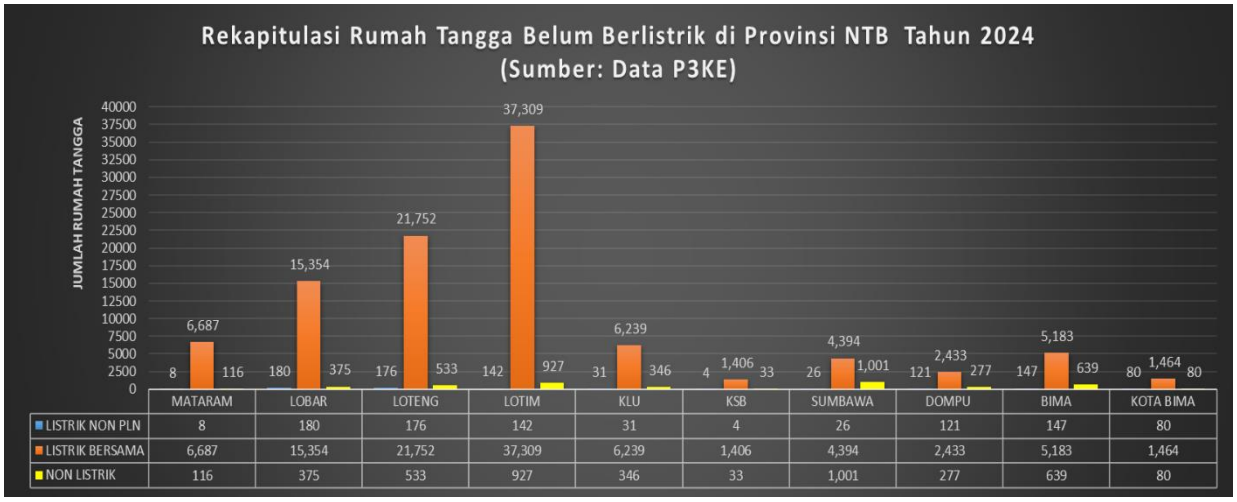
Capaian target rasio elektrifikasi ditopang adanya faktor ketersediaan daya listrik yang semakin meningkat sejak tahun 2014. Peran Dinas ESDM terhadap capaian indikator rasio elektrifikasi tersebut terkait dengan koordinasi yang baik antara Pemerintah, PemerintahProvinsi, PLN Wilayah NTB dan seluruh *stakehorder* terkait sesuai dengan fungsinya masing- masing. Peningkatan rasio elektrifikasi juga dilaksanakan melalui program . Program pemasangan listrik murah dan hemat merupakan program Kementerian ESDM sejak tahun 2012 hingga tahun 2015, kemuadian Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas ESDM melaksanakannya sejak tahun 2014 hingga saat ini, jumlah pemasangan listrik murah dan hemat hingga tahun 2024 telah dinikmati oleh 36.023 Rumah Tangga. Program tersebut berfokus terhadap masyarakat miskin yang rumahnya sudah dilalui jaringan listrik namun tidak mampu untuk memasang listrik secara mandiri.



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target RE (%)	75.00	94.46	95.05	99.77	99.88	99.99
Realisasi RE (%)	93.83	99.55	99.98	99.98	99.98	99.99

Gambar 3.5 Capaian Indikator Kinerja Utama Rasio Elektrifikasi Tahun 2018- 2023

Pada Tahun 2022 Menteri ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bantuan Pasang Baru Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak mampu yang pelaksanaannya mensarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Regsosek bertujuan untuk menyediakan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan. Termasuk basis data untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Regsosek menghasilkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dimaksudkan sebagai referensi penetapan sasaran bagi program penghapusan kemiskinan ekstrem yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana salah satu variabel data yang disajikan adalah sumber penerangan yang digunakan oleh rumah tangga miskin. Berdasarkan data sumber penerangan yang digunakan oleh rumah tangga miskin Desil 1-3 dapat digambarkan dalam Gambar 3.5. di bawah ini :



	MATARAM	LOBAR	LOTENG	LOTIM	KLU	KSB	SUMBAWA	DOMPU	BIMA	KOTA BIMA
LISTRIK NON PLN	8	180	176	142	31	4	26	121	147	80
LISTRIK BERSAMA	6,687	15,354	21,752	37,309	6,239	1,406	4,394	2,433	5,183	1,464
NON LISTRIK	116	375	533	927	346	33	1,001	277	639	80

Gambar 3.6 Jumlah Rumah Tangga Miskin yang belum mempunyai Listrik dan Menggunakan Listrik secara bersama pada Tahun 2024

Kemudian untuk lebih operasionalnya tujuan dan sasaran dinas dibuatlah *Cascading* Renstra Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan pada gambar dibawah ini :

OPD	Tujuan 1. Terwujudnya penggunaan energi baru terbarukan. 2. Terwujudnya pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan. 3. Terwujudnya pemanfaatan air tanah yang berwawasan lingkungan 4. Terwujudnya Peningkatan Konsumsi Listrik			
	Indikator Kinerja : 1. Porsi EBT dalam bauran energi primer (%) 2. Persentase IUP yang melaksanakan kaidah usaha pertambangan yang baik dan benar (Good Mining Practices). 3. Persentase pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan 4. Konsumsi Listrik per kapita			
Kepala OPD	Sasaran 1. Meningkatnya kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik	Sasaran 2. Terlaksananya peningkatan status kegiatan usaha pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sasaran 3. Meningkatnya pelaksanaan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah oleh pemegang izin air tanah.	Sasaran 4. Terpenuhinya kebutuhan energi listrik yang andal, aman dan ramah lingkungan bagi masyarakat.
	Indikator Kinerja : Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik (%)	Indikator Kinerja : Persentase penyelesaian permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku	Indikator Kinerja : Persentase pemegang izin air tanah yang melaksanakan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.	Indikator Kinerja : Rasio Elektrifikasi
Eselon III	Program : Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Program : Pengelolaan Mineral dan Batubara	Program : Pengelolaan Aspek Kegeologian	Program : Pengelolaan Ketenagalistrikan
	Sasaran Program : Meningkatnya jumlah sarana/fasilitas	Sasaran Program : Terlaksananya peningkatan status kegiatan usaha	Sasaran Program : Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah.	1. Meningkatnya jumlah pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk



	pemanfaatan energi baru terbarukan	pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku		mendukung pengembangan sub sektor ketenagalistrikan 2. Sasaran Program : Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat tidak mampu.
	Indikator Kinerja : Persentase Sarana/Fasilitas Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan yang dikendalikan	Indikator Kinerja : Persentase izin usaha pertambangan yang dikendalikan	Indikator Kinerja : Persentase izin pemanfaatan air tanah yang dikendalikan.	1. Persentase usaha bidang ketengalistrikan yang dikendalikan 2. Indikator Kinerja : Persentase masyarakat tidak mampu yang terlayani listrik PLN

Gambar 3.7 Cascading Renstra Dinas ESDM NTB Tahun 2025-2029

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas ESDM Provinsi NTB, maka kebijakan yang terkait dalam Program Prioritas Daerah yang terkait dengan :

1. Meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi primer
2. Meningkatkan kualitas ekosistem darat, laut dan udara
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Adapun Tujuan dan sasaran rencana kerja dirumuskan berdasarkan isu-isu penting yang sudah rencana kerja untuk tahun 2025 didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Tabel 3.3. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
					2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	((10)
1	Terwujudnya Penggunaan energi baru terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	Meningkatnya kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik (%)	15.00	15.50	16.00	16.50	17.00
2	Terwujudnya pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan	Persentase IUP yang melaksanakan kaidah usaha pertambangan yang baik dan benar (Good Mining Practice)	Terlaksananya peningkatan status kegiatan usaha pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase penyelesaian permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku (%)	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00
3	Terwujudnya pemanfaatan air tanah yang berwawasan lingkungan	Persentase Pengelolaan Air Tanah yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya pelaksanaan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah oleh Pemegang Izin Air Tanah	Persentase Pemegang Izin Air Tanah yang melaksanakan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah sesuai aturan Perundang-undangan yang berlaku (%)	10.53	13.16	15.79	18.42	21.05
4	Terwujudnya Peningkatan Listrik	Konsumsi Listrik Perkapita	Terpenuhinya Kebutuhan Energi Listrik yang andal, aman dan ramah lingkungan bagi masyarakat	Rasio Elektrifikasi (%)	100	100	100	100	100



Berdasarkan tabel 3.3 di atas terdapat empat sasaran Dinas ESDM Tahun 2025-2029 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik dengan indikator persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik (%). Indikator tersebut dihitung melalui rasio jumlah kapasitas pembangkit listrik energi baru terbarukan terhadap jumlah total kapasitas pembangkit listrik dikali 100 %.
2. Terlaksananya peningkatan status kegiatan usaha pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan indikator persentase penyelesaian permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator tersbut diperoleh dengan membandingkan jumlah permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang berhasil diselesaikan dibandingkan dengan total seluruh permohonan yang diterima.
3. Meningkatnya pelaksanaan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah oleh pemegang izin air tanah dengan indikator Persentase pemegang izin air tanah yang melaksanakan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.Indikator tersebut dihitung dari jumlah pemegang izin air tanah yang melaksanakan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dibandingkan jumlah keseluruhan pemegang izin air tanah.
4. Terpenuhinya kebutuhan energi listrik yang andal, aman dan ramah lingkungan bagi masyarakat dengan indikator Rasio Elektrifikasi (%). Indikator tersebut dihitung melalui rasio jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik dibandingkan jumlah keseluruhan rumah tangga dikali 100 %.

3.3 Program dan Kegiatan

Guna mendukung tujuan dan sasaran Renstra sebagai jabaran dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025-2029, maka melalui Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 yang akan datang akan melaksanakan 5 Program dengan 20 Kegiatan dan 66 Sub Kegiatan dengan berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2025 mengalami perubahan yang sangat signifikan, jika sebelumnya menggunakan dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dengan Program dan kegiatan berjumlah 11 program dan 41 kegiatan.

Untuk itu pada tahun 2025 akan dilaksanakan lima program yang terdiri dari satu program penunjang dan empat program prioritas yang teriri dari :

A. Dinas :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Program ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran, melalui peningkatan kualitas administrasi dan ketatalaksanaan serta penyedian gaji dan tunjangan ASN dengan rencana anggaran sebesar Rp. 11.071.572.528,- Kegiatan-kegiatan dari program ini adalah :

   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 7 (tujuh) sub kegiatan;
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 5 (lima) sub kegiatan;
   c. Administrasi Barang Milik Deerah pada Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah dengan 4 (empat) sub kegiatan;
   d. Administrasi Kepegawaian dengan Perangkat Daerah dengan 2 (dua) sub kegiatan;



e. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 7 (tujuh) sub kegiatan;
f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 3 (tiga) sub kegiatan;
g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 3 (tiga) sub Kegiatan;
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 4 (empat) sub kegiatan.

2. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian.
Program pengelolaan aspek kegeologian bertujuan untuk mewujudkan konservasi air tanah melalui pengendalian pemanfaatan air tanah secara berkelanjutan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 159.991.450,-. Anggaran tersebut digunakan untuk pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah, penetapan nilai perolehan air tanah melalui 2 (dua) kegiatan yaitu :
a. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi dengan 1 (satu) sub kegiatan;
b. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi dengan 2 (dua) sub kegiatan.

3. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara.
Program pengelolaam mineral dan batubara bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan pengusahaan pertambangan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar (good mining practices) dengan rencana angaran sebesar Rp. 479.497.025,- yang digunakan untuk membiayai 3 (tiga) kegiatan yaitu :
a. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Atau Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut dengan 2 (dua) sub kegiatan;
b. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat dengan 3 (tiga) sub kegiatan dan
c. Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan 1(satu) sub kegiatan.

4. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
Program pengelolaan energi terbarukan bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan energi yang berkelanjutan dengan sasaran untuk meningkatkan kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi dengan target bauran energi pada tahun 2025 sebesar 23,00%. Rencana anggaran untuk program ini sebesar Rp. 581.246.640,-. Untuk meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan sebagai sumber alternatif yang murah dan ramah lingkungan maka untuk tahun 2025 direncanakan pembangunan instalasi digester biogas sejumlah 18 unit dengan rencana lokasi pembangunan di pulau lombok. Program pengelolaan energi terbarukan dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan dengan yaitu:
a. Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun dengan 2(dua) sub kegiatan;
b. Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi dengan 3 (tiga) sub kegiatan;



c. Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi dengan 2 (dua) sub kegiatan;
d. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi dengan 1(satu) sub Kegiatan.

5. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
Program ini bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat dengan rencana anggaran sebesar Rp. 1.163.240.900,- yang akan digunakn untuk membiayai penyambungan listrik murah dan hemat bagi 600 Rumah Tangga Sasaran, pembinaan dan pengawasan usaha ketenagalistrikan serta pelayanan periziona di bidang ketenagalistrikan melalui dua kegiatan yaitu :
a. Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi dengan 2 (dua) sub kegiatan;
b. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan dengan 2 (dua) sub kegiatan.

B. Cabang Dinas :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Program ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran, melalui peningkatan kualitas administrasi dan ketatalaksanaan serta penyedian gaji dan tunjangan ASN dengan rencana anggaran sebesar Rp. 318.491.970,- Kegiatan-kegiatan dari program ini adalah :
a. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 4 (empat) sub kegiatan;
b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 3 (tiga) sub Kegiatan;
c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 2 (dua) sub kegiatan dan
d. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan 1 (satu) sub kegiatan.

2. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian.
Program pengelolaan aspek kegeologian bertujuan untuk mewujudkan konservasi air tanah melalui pengendalian pemanfaatan air tanah secara berkelanjutan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 8.028.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah, penetapan nilai perolehan air tanah melalui 2 (dua) kegiatan yaitu :
a. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi dengan 1 (satu) sub kegiatan;
b. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi dengan 1 (satu) sub kegiatan.

3. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara.
Program pengelolaam mineral dan batubara bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan pengusahaan pertambangan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar (good



mining practices) dengan rencana angaran sebesar Rp. 12.234.000,- yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) kegiatan yaitu :

a. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat dengan 1 (satu) sub kegiatan.

4. Program Pengelolaan Energi Terbarukan

   Program pengelolaan energi terbarukan bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan energi yang berkelanjutan dengan sasaran untuk meningkatkan kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi dengan target bauran energi pada tahun 2025 sebesar 23,00%. Rencana anggaran untuk program ini sebesar Rp. 581.888.640,-. Untuk meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan sebagai sumber alternatif yang murah dan ramah lingkungan maka untuk tahun 2025 direncanakan pembangunan instalasi digester biogas sejumlah 18 unit dengan rencana lokasi pembangunan di pulau lombok. Program pengelolaan energi terbarukan dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dengan yaitu:

   a. Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi dengan 1 (satu) sub kegiatan.

5. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

   Program ini bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat dengan rencana anggaran sebesar Rp. 12.234.000,- yang akan digunakn untuk membiayai penyambungan listrik murah dan hemat bagi 600 Rumah Tangga Sasaran, pengendalian dan pengawasan usaha ketenagalistrikan di bidang ketenagalistrikan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu :

   c. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi dengan 1 (satu) sub kegiatan.

Uraian lebih lengkap mengenai rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun Tahun 2026



Tabel 3.6 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						**21.372.405.144,00**							**23.476.575.607,40**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**21.372.405.144,00**							**23.476.575.607,40**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						**21.372.405.144,00**							**23.476.575.607,40**	
1.	**3.29.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Nilai SAKIP***	-			**83 SAKIP**	**11.291.109.237,96**						-	**12.387.150.110,76**	
	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	-			2 Dokumen	506.847.353,74			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	524.462.038,12	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	101.412.076,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		111.553.284,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	51.488.592,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		56.637.451,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	45.487.892,40	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		50.036.681,64	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	42.355.588,30	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		64.591.147,13	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	46.427.319,27	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	46.112.376,21	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		50.723.613,83	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	173.563.509,56	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		190.919.860,52	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	8.613.607.561,83			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-	-	9.474.968.318,01	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/ Bulan	8.506.178.554,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		9.356.796.409,40	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	47.793.183,63	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		52.572.501,99	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	5.765.182,09	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		6.341.700,30	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	22.071.761,17	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		24.278.937,29	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	19.102.905,61	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		21.013.196,17	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	1.149.427,22	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		1.264.369,94	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	5.748.837,23	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		6.323.720,95	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	5.797.710,88	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		6.377.481,97	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	45.798.582,58			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-	-	50.378.440,83	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3.263.338,81	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		3.589.672,69	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	16.576.464,59	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		18.234.111,05	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	17.241.408,23	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		18.965.549,05	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	6.664.493,94	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		7.330.943,33	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	2.052.877,01	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		2.258.164,71	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	66.661.261,26			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-	-	73.327.387,39	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	5.351.733,12	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		5.886.906,43	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	3.838.167,36	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		4.221.984,10	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	57.471.360,78	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		63.218.496,86	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	291.762.306,78			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-	-	320.938.537,46	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	11.483.122,71	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		12.631.434,98	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	28.724.416,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		31.596.857,60	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	6.675.873,27	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		7.343.460,60	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	41.590.874,37	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		45.749.961,81	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	19.116.813,68	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Penin gkatan Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-		21.028.495,05	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				20 Paket	11.198.754,42	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Penin gkatan Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-		12.318.629,86	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	22.972.452,33	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Penin gkatan Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-		25.269.697,56	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Penin gkatan Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-		165.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	871.419.962,00			-	PD-5 Penin gkatan Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-	-	958.561.958,20	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	740.046.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Penin gkatan Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-		814.051.656,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	10.139.235,40	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Penin gkatan Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-		11.153.158,94	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	121.233.766,60	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Penin gkatan Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-		133.357.143,26	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	572.184.249,74			-	PD-5 Penin gkatan Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-	-	629.402.674,72	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2000 Laporan	4.994.261,25	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Penin gkatan Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-		5.493.687,38	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	183.793.411,78	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Penin gkatan Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-		202.172.752,96	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	14.896.576,71	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Penin gkatan Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-		16.386.234,38	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	368.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Penin gkatan Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-		405.350.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	322.827.960,03			-	PD-5 Penin gkatan Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-	-	355.110.756,03	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				9 Unit	55.011.586,54	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Penin gkatan Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-		60.512.745,19	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	167.816.373,49	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Penin gkatan Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-		184.598.010,84	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Penin gkatan Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-		27.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Penin gkatan Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-		82.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.	**3.29.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	***Persentase zona konservasi air tanah pada Cekungan Air Tanah dalam daerah provinsi yang dikendalikan***	-			**22,22 %**	**2.023.328.307,41**						-	**2.225.661.138,15**	
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	*Jumlah kajian teknis penetapan zona konservasi air tanah*	-			9 Dokumened	1.913.328.307,41			-	PD-3 Pemb angunan Lingkungan	Tersedianya kajian teknis sebagai bahan kebijakan penetapan zona konservasi air tanah	-	2.104.661.138,15	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah														
			Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				9 Dokumen	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-3 Pemb angunan Lingkungan	Tersedianya kajian teknis sebagai bahan kebijakan penetapan zona konservasi air tanah		99.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah														
			Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi				0 Dokumen	1.823.328.307,41	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pemb angunan Lingkungan	Tersedianya kajian teknis sebagai bahan kebijakan penetapan zona konservasi air tanah		2.005.661.138,15	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pemb angunan Lingkungan	Tersedianya kajian teknis sebagai bahan kebijakan penetapan zona konservasi air tanah		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-			-	110.000.000,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-	-	121.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul				10 Dokumen	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		60.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah														
			Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				10 Laporan	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		60.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.	**3.29.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	***Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya***	-			**2,5-3,2 %**	**558.500.000,00**						-	**614.350.000,00**	
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	*Terlaksananya pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yangJumlah IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dan IPR yang melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku*	-			3 Dokumen	252.500.000,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku	-	277.750.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut															
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				64 Dokumen	160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku		176.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut															



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				37 Laporan	92.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku		101.750.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	-	-			-	220.000.000,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-	-	242.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat				1 Laporan	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		66.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0003	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat				20 Dokumen	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		121.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		55.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-			-	86.000.000,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-	-	94.600.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam				69 Laporan	86.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		94.600.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
4.	**3.29.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	***Jumlah sarana/fasilitas instalasi pemanfaatan EBT dalam kondisi baik***	-			**35,69 %**	**5.589.467.598,63**						-	**6.148.414.358,49**	
	3.29.05.1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	*Jumlah izin usaha bahan bakar nabati yang melaksanakan kegiatan usaha niaga sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku*	-			1 Izin	68.000.000,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Meningkatnya jumlah sarana/fasilitas pemanfaatan energi baru terbarukan	-	74.800.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.03.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun				1 Dokumen	42.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Meningkatnya jumlah sarana/fasilitas pemanfaatan energi baru terbarukan		46.200.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun														
			Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun				1 Laporan	26.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Meningkatnya jumlah sarana/fasilitas pemanfaatan energi baru terbarukan		28.600.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	-	-			-	581.467.598,63			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-	-	639.614.358,49	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0001	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa														
			jumlah dokumen data potensi biomassa				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		110.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0002	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas														
			Jumlah laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas				0 Laporan	161.467.598,63	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		177.614.358,49	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.05.1.05.0003	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biomassa														
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biomassa				0 Laporan	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan LIngkungan	-		121.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0004	Perencanaan kegiatan penyediaan biomassa														
			Jumlah rencana kegiatan penyediaan biomassa				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0005	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa														
			Jumlah laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0006	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas														
			Jumlah dokumen data potensi biogas				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-3 Pembangunan LIngkungan	-		110.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0007	Perencanaan kegiatan penyediaan biogas														
			Jumlah rencana kegiatan penyediaan biogas				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0008	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas														
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas				1 Laporan	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-3 Pembangunan LIngkungan	-		121.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.05.1.06	Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	-	-			-	125.000.000,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-	-	137.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.06.0001	Revitalisasi infrastruktur biomassa dan/atau biogas														
			Jumlah infrastruktur biomassa dan/atau biogas yang direvitalisasi				0 Unit	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		137.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.06.0003	Pemeliharaan infrastruktur biomassa dan/atau biogas														
			Jumlah unit infrastruktur biomassa dan/atau biogas yang dipelihara				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	-	-			-	4.700.000.000,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-	-	5.170.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah														
			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah				4 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		220.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0005	Revitalisasi infrastruktur aneka EBT														
			Jumlah infrastruktur aneka EBT yang direvitalisasi				0 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		440.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT														
			Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT				5 unit	2.000.000.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Mataram, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		2.200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.05.1.07.0009	Pemeliharaan Infrastruktur aneka EBT														
			Jumlah unit infrastruktur aneka EBT yang dipelihara				0 unit	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		2.200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0010	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah														
			Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		110.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	-	-			-	115.000.000,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-	-	126.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.10.0003	Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat														
			Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat				1 laporan	115.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		126.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
5.	**3.29.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	***Jumlah penambahan izin usaha ketenagalistrikan yang dilayani***	-			**20 izin**	**1.910.000.000,00**						-	**2.101.000.000,00**	
	3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	*Jumlah izin usaha yang melaksanakan kegiatan bidang ketenagalistrikan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku*	-			1 izin	90.000.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Meningkatnya jumlah pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk mendukung pengembangan ekonomi sub sektor ketenagalistrikan	-	99.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.01.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi															
			Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				1 Dokumen	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Meningkatnya jumlah pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk mendukung pengembangan ekonomi sub sektor ketenagalistrikan		49.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi															



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Meningkatnya jumlah pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk mendukung pengembangan ekonomi sub sektor ketenagalistrikan		49.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	-			-	1.820.000.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-	-	2.002.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu														
			Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1 Dokumen	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		66.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan														
			Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				600 Unit	1.760.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		1.936.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA						**444.136.000,00**							**488.149.600,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**444.136.000,00**							**488.149.600,00**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						**444.136.000,00**							**488.149.600,00**	
1.	**3.29.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-			-	**324.136.000,00**						-	**356.149.600,00**	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-	-	0,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	51.500.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-	-	56.250.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		4.400.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	4.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		4.550.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		3.300.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		44.000.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	242.216.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-	-	266.437.600,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		1.100.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		55.000.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		2.200.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	189.216.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		208.137.600,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	30.420.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-	-	33.462.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	25.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		27.720.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	5.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		5.742.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
2.	**3.29.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	-	-			-	**30.000.000,00**						-	**33.000.000,00**	
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-			-	15.000.000,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-	-	16.500.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				0 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		16.500.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-			-	15.000.000,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-	-	16.500.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				5 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		16.500.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
3.	**3.29.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	-	-			-	**30.000.000,00**						-	**33.000.000,00**	
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-	-			-	30.000.000,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-	-	33.000.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut															



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		16.500.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut															
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				0 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		16.500.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
4.	**3.29.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	-	-			-	**30.000.000,00**						-	**33.000.000,00**	
	3.29.05.1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	-	-			-	30.000.000,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-	-	33.000.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.05.1.03.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun														
			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		16.500.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.05.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun														
			Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun				0 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		16.500.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
5.	**3.29.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	-	-			-	**30.000.000,00**						-	**33.000.000,00**	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	-	-			-	30.000.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-	-	33.000.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.06.1.01.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi															
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		16.500.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	3.29.06.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi															
			Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				0 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		16.500.000,00	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA
	JUMLAH							**21.816.541.144,00**							**23.964.725.207,40**	



BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Recana Kerja Perubahan Dinas ESDM Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah tahap pertama dalam dokumen RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045. Dalam dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029 telah ditetapkan Visi Kepala Daerah terpilih yaitu "***Bangkit Bersama Menjuju NTB Provinsi Kepulauan Yang Makmur dan Mendunia***" yang dijabarkan kedalam tujuh Misi. Dari ketujuh Misi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029, terdapat dua Misi yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi dan kewenangan Dinas ESDM sebagai Perangkat Daerah yaitu ***Misi kelima yaitu "Memperkuat sistem mitigasi bencana, pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan investasi berkelanjutan" dan Misi keenam yaitu "Memantapkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah yang berwawasan lingkungan serta memastikan penegakan tata ruang yang berkelanjutan"***.

Strategi dan arah kebijakan Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Barat mengacu pada startegi dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029 dalam mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah. Dinas ESDM Provinsi NTB mengemban tugas untuk melaksanakan tujuan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029 yang terdiri dari :

1. Terwujudnya penggunaan energi baru terbarukan
2. Terwujudnya pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan
3. Terwujudnya pemanfaatan air tanah yang berwawasan lingkungan
4. Terwujudnya Konsumsi Listrik Perkapita

Adapun sasaran dalam Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029 yang sejalan dengan tujuan diatas terdiri dari :

1. Meningkatnya Kontribusi Energi Baru Terbarukan dalam pembangkit Listrik
2. Terlaksananya peningkatan status kegiatan usaha pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Meningkatkan pelaksanaan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah oleh Pemegang Izin Air Tanah
4. Terpenuhinya kebutuhan energi Listrik yang andal, aman dan ramah lingkungan bagi masyarakat

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2025-2029 diperlukan beberapa sasaran dan strategi untuk menjawab isu-isu strategis bidang Energi dan Sumber Daya Mineral melalui rumusan pernyataan sasaran dan strategi Dinas ESDM Provinsi NTB sebagai berikut :

a. Sasaran :
    1. Bidang Energi Baru Terbarukan yaitu Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi primer
    2. Bidang Mineral dan Batubara yaitu Meningkatnya Kualitas Ekosistem Darat, Laut dan Udara
    3. Bidang Geologi dan Air Tanah yaitu Meningkatnya Kualitas Ekosistem Darat, Laut dan Udara
    4. Bidang Kelistrikan yaitu Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang merata dan berkelanjutan



b. Strategi

1. Bidang Energi Baru Terabrukan
   - ✓ Meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan dengan menggunakan potensi energi setempat
2. Bidang Mineral dan Batubara
   - ✓ Meningkatkan pelaksanaan praktek pertambangan yang baik dan benar (Good Mining Practice)
3. Bidang Geologi dan Air Tanah
   - ✓ Meningkatkan konservasi pemanfaatan air tanah
4. Bidang Kelistrikan
   - ✓ Peningkatan kapasitas pembangkit dan jaringan Listrik hingga ke daerah terpencil
   - ✓ Peningkatan akses Listrik bagi Masyarakat miskin

Untuk itu pada Tahun 2025 Dinas ESDM Provinsi NTB dan Cabang Dinas ESDM Wilayah Pulau Sumbawa akan melaksanakan 10 program dan 24 kegiatan, 53 sub kegiatan , yang seluruhnya dibiayai melalui Anggaran Belanja Operasional dan Belanja Pegawai, dengan total anggaran sebesar Rp. 11.173.597.068.

A. Induk Rp. 10.855.740.078,-

1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp.	9.676.234.333,-
2.	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Rp.	77.374.110,-
3.	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Rp.	187.147.200,-
4.	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Rp.	388.616.435,-
5.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rp.	556.368.000,-

B. Cabang Dinas Rp. 287.856.990,-

1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp.	263.948.990,-
2.	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Rp.	5.294.000,-
3.	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Rp.	6.617.000,-
4.	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Rp.	5.380.000,-
5.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rp.	6.617.000,-

Lokasi pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berada di semua Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP), yang kemudian akan ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA), sebagai dasar pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan di lingkungan Dinas ESDM Provinsi NTB. Selain itu, untuk memastikan pelaksanaannya berjalan efektif, efisien, dan akuntabel, maka tiap-tiap aparatur bertanggungjawab dalam mencapai target-target yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja serta mempedomani Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan, untuk selanjutnya setiap unit Eselon II, dan Eselon III agar menyusun Rencana Aksi sesuai dengan DPA dengan mempertimbangkan waktu sesuai dengan skala prioritas dan rencana anggaran kas yang ditetapkan.



Beberapa program dan kegiatan yang menjadi prioritas Dinas ESDM Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penyambungan listrik murah dan hemat bagi 600 Rumah Tangga Sasaran yang diutamakan pada daerah-daerah arahan penanggulangan kemiskinan.
2. Pemberian rekomendasi, Pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Ketenagalistrikan serta usaha di bidang Energi.
3. Program Nusa Terang Benderang
   - ✓ Pembangunan PLTS *on grid* 2x5 MWp di Sumbawa dan Bima.
   - ✓ Beroperasinya PLTMH *on grid* Pandan Duri 580 kW hibah dari Pemerintah Inggris.
   - ✓ Konstruksi pabrik Bio CNG dengan kapasitas 10 ton per hari.
   - ✓ Pelaksanaan *Feasibility Study* PLT Biomassa hibah dari Pemerintah Denmark.
   - ✓ Pelaksanaan program listrik murah (APBD, Pokir dan BPBL).
   - ✓ Penyusunan Pergub Roadmap NTB Net Zero Emission
   - ✓ PLT Panas Bumi di di Hu'u Kab. Dompu 60 MW oleh PT. Sumbawa Timur Mining
4. Industri Pertambangan dan Smelter yang diresmikan oleh Presdien
5. Pemuktahiran Pergub Nilai Perolehan Pajak Air Tanah
6. Jasa Konsultansi Pra Study Kelayakan Aneka Energi Baru dan Terbarukan
7. Jasa Konsultansi Kajian Teknis Nilai Batuan



Tabel 4.1 Rencana Kerja Perubahan Dinas ESDM Perangkat Daerah Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas ESDM Provinsi NTB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Perubahan Tahun 2025						Catatan Penting
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**										
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**								**11.773.597.068**		
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**9.676.234.333**		
3	**29**	**01**	**1,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**218.749.385**		
3	29	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	81.33 Nlai	82.749.385	Pajak Rokok	
3	29	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	81.33 Nlai	17.400.000	Pajak Rokok	
3	29	01	1,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	81.33 Nlai	15.631.300	Pajak Roko	
3	29	01	1,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	81.33 Nlai	7.190.000	Pajak Rokok	
3	29	01	1,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	81.33 Nlai	6.145.540	Pajak Rokok	
3	29	01	1,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	81.33 Nlai	19.409.390	Pajak Rokok	
3	29	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Laporan	81.33 Nlai	70.091.100	Pajak Rokok	
3	29	01	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								8.581.979.728		
3	29	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		78 Orang		8.499.811.164	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum dan PAD	
3	29	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		59.874.700	Pajak Rokok	
3	29	01	1,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		2.703.450	Pajak Rokok	
3	29	01	1,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		12.585.364	Pajak Rokok	
3	29	01	1,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Koordinasi Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		7.004.250	Pajak Rokok	
3	29	01	1,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								16.488.025		



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Perubahan Tahun 2025						Catatan Penting
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
3	29	01	1,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi BMD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		2.596.225	Pajak Rokok	
3	29	01	1,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi BMD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		2.270.000	Pajak Rokok	
3	29	01	1,03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi BMD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		7.930.100	Pajak Rokok	
3	29	01	1,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Administrasi BMD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		3.691.700	Pajak Rokok	
3	29	01	1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								3.521.415		
3	29	01	1,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		1.737.040	Pajak Rokok	
3	29	01	1,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		1.784.375	Pajak Rokok	
3	29	01	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								112.449.680		
3	29	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Tersedianya Laporan Administrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Paket	81.38 Nlai	3.981.400	Pajak Rokok	
3	29	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Tersedianya Laporan Administrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Paket	81.38 Nlai	3.850.000	Pajak Rokok	
3	29	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Tersedianya Laporan Administrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Paket	81.38 Nlai	4.480.000	Pajak Rokok	
3	29	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Tersedianya Laporan Administrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Paket	81.38 Nlai	3.170.600	Pajak Rokok	
3	29	01	1,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Tersedianya Laporan Administrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Paket	81.38 Nlai	4.467.680	Pajak Rokok	
3	29	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Laporan Administrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Laporan	81.38 Nlai	7.000.000	Pajak Rokok	
3	29	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Laporan Administrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	25 Laporan	81.38 Nlai	85.500.000	Pajak Rokok	
3	29	01	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								34.466.700		
3	29	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya BMD penunjang yang disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Unit	81.38 Nlai	0	Pajak Rokok	
3	29	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Mebel	Tersedianya BMD penunjang yang disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Paket	81.38 Nlai	0	Pajak Rokok	
3	29	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya BMD penunjang yang disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	4 Unit	81.38 Nlai	34.466.700	Pajak Rokok	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Perubahan Tahun 2025						Catatan Penting
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
3	29	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								481.370.400		
3	29	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya BMD penunjang yang disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	2500 Surat	81.38 Nlai	4.770.000	Pajak Rokok	
3	29	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya BMD penunjang yang disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	3 Rekening	81.38 Nlai	127.940.400	Pajak Rokok	
3	29	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya BMD penunjang yang disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	9 Orang	81.38 Nlai	348.660.000	Pajak Rokok	
3	29	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								227.210.000		
3	29	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya BMD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	7 Unit	81.38 Nlai	44.050.000	Pajak Rokok	
3	29	01	1,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya BMD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	8 Unit	81.38 Nlai	128.000.000	Pajak Rokok	
3	29	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Terpeliharanya BMD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	30 Unit	81.38 Nlai	5.160.000	Pajak Rokok	
3	29	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya BMD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Unit	81.38 Nlai	50.000.000	Pajak Rokok	
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN								77.374.110		
3	29	02	1,01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi								30.671.160		
3	29	02	1,01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Persentase Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam daerah provinsi yang dikendalikan	Jumlah Dokumen terkait data zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah provinsi	Tersedianya Kajian teknis penetapan Zona Konservasi Air Tanah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		30.671.160	Pajak Rokok	
3	29	02	1,03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi								48.702.950		
3	29	02	1,03	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Persentase Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam daerah provinsi yang dikendalikan	Jumlah dokumen terkait nilai perolehan Air Tanah dalam daerah provinsi	Tersedianya Kajian Teknis Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		26.202.950	Pajak Rokok	
3	29	02	1,03	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Persentase Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam daerah provinsi yang dikendalikan	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan implementasi nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi	Tersedianya Kajian Teknis Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		20.500.000	Pajak Rokok	
3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA								287.147.200		
3	29	03	1,03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut								110.801.125		
3	29	03	1,03	03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Produktifitas Lapangan Usaha Ekonomi sub sektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya	Jumlah dokumen rekomendasi perizinan usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Terlaksananya IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan yang melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		59.854.525	Pajak Rokok	
3	29	03	1,03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut	Produktifitas Lapangan Usaha Ekonomi sub sektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Terlaksananya IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan yang melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		50.946.600	Pajak Rokok	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Perubahan Tahun 2025						Catatan Penting
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
					sampai dengan 12 Mil Laut										
3	29	03	1,04		Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat								56.685.525		
3	29	03	1,04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Produktifitas Lapangan Usaha Ekonomi sub sektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyusunan usulan WPR	Terlaksananya IPR yang melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai aturan perundang-undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		10.898.825	Pajak Rokok	
3	29	03	1,04	03	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Produktifitas Lapangan Usaha Ekonomi sub sektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya	Jumlah Dokumen Rekomendasi perizinan usaha pertambangan rakyat	Terlaksananya IPR yang melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai aturan perundang-undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		24.338.000	Pajak Rokok	
3	29	03	1,04	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Produktifitas Lapangan Usaha Ekonomi sub sektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya	Jumlah Laporan Hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambagan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Terlaksananya IPR yang melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai aturan perundang-undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		21.448.700	Pajak Rokok	
3	29	03	1,07		Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan								119.660.550		
3	29	03	1,07	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Produktifitas Lapangan Usaha Ekonomi sub sektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam dan batuan	Tersedianya Laporan Pelaksanaan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai aturan perundang-undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		119.660.550	Pajak Rokok	
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN								888.616.435		
3	29	05	1,03		Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun								15.780.950		
3	29	05	1,03	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Sarana/Fasilitasi Instalasi pemanfaatan EBT dalam Kondisi Baik	Jumlah dokumen rekomendasi perizinan bahan bakar nabati	Tersedianya Izin Usaha bahan bakar nabati yang melaksanakan kegiatan usaha niaga sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		7.966.000	Pajak Rokok	
3	29	05	1,03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Sarana/Fasilitasi Instalasi pemanfaatan EBT dalam Kondisi Baik	Jumlah Laporan hasil pengendalian dan pengawasan perizinan bahan bakar nabati	Terlaksanaya pengendalian dan pengawasan izin usaha niaga bahan bakar nabati	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		7.814.950	Pajak Rokok	
3	29	05	1,05		Pengelolaan Penyediaan Biomassa dan atau Biogas dalam Wilayah Provinsi								287.819.765		
3	29	05	1,05	01	Penyusunan dan Pemuktahiran data potensi biomassa	Jumlah Sarana/Fasilitasi Instalasi pemanfaatan EBT dalam Kondisi Baik	Jumlah Dokumen data potensi biomassa	Tersedianya Laporan Pengelolaan dan Penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam Wilayah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		15.998.750	Pajak Rokok	
3	29	05	1,05	06	Penyusunan dan Pemuktahiran data potensi biogas	Jumlah Sarana/Fasilitasi Instalasi pemanfaatan EBT dalam Kondisi Baik	Jumlah Dokumen data potensi biogas	Tersedianya Laporan Pengelolaan dan Penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam Wilayah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		22.335.015	Pajak Rokok	
3	29	05	1,05	08	Pelaksanaan kegiatan penyediaan Biogas	Jumlah Sarana/Fasilitasi Instalasi pemanfaatan EBT dalam Kondisi Baik	Jumlah Laporan pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Biogas	Tersedianya Laporan Pengelolaan dan Penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam Wilayah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		249.986.000	Pajak Rokok	
3	29	05	1,07		Pengelolaan Aneka Energi Baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, Gerakan								551.993.195		
3	29	05	1,07	02	Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Sarana/Fasilitasi	Jumlah Laporan hasil	Tersedianya Laporan	Semua Kab/Kota,		1 Laporan		36.680.695	Pajak Rokok	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Perubahan Tahun 2025						Catatan Penting
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
					aneka EBT (Kapasitas terpasang investasi) di daerah	Instalasi pemanfaatan EBT dalam Kondisi Baik	pembinaan dan pengawasan aneka energi terbarukan di daerah	Pengelolaan aneka energi terbarukan	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
3	29	05	1,07	10	Penyusunan dan Pemuktahiran Data Potensi aneka EBT di Daerah	Jumlah Sarana/Fasilitasi Instalasi pemanfaatan EBT dalam Kondisi Baik	Jumlah Dokumen data potensi anakea energi baru terbarukan	Tersedianya Laporan Pengelolaan aneka energi terbarukan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		1 Laporan		515.312.500	Pajak Rokok	
3	29	05	1,10		Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan ditingkat daerah Provinsi								33.022.525		
3	29	05	1,10	03	Sosialisasi Konversi Energi kepada Masyarakat	Jumlah Sarana/Fasilitasi Instalasi pemanfaatan EBT dalam Kondisi Baik	Jumlah Laporan Pelaksanaan sosialisasi konservasi energi	Tersedianya Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan konservasi energi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		1 Dokumen		33.022.525	Pajak Rokok	
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN								556.368.000		
3	29	06	1,01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi								21.322.000		
3	29	06	1,01	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	1. Persentase Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang dikendalikan 2. Persentase Rumah Tangga tidak mampu yang terlayani listrik PLN	Jumlah rekomendasi perizinan usaha ketenagalistrikan	Tersedianya Izin usaha yang melaksanakan kegiatan bidang ketenagalistrikan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Izin		12.948.000	Pajak Rokok	
3	29	06	1,01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	1. Persentase Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang dikendalikan 2. Persentase Rumah Tangga tidak mampu yang terlayani listrik PLN	Jumlah Laporan hasil pengendalian dan pengawasan usaha bidang ketenagalistrikan	Tersedianya Izin usaha yang melaksanakan kegiatan bidang ketenagalistrikan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		8.374.000	Pajak Rokok	
3	29	06	1,06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan								535.046.000		
3	29	06	1,06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1. Persentase Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang dikendalikan 2. Persentase Rumah Tangga tidak mampu yang terlayani listrik PLN	Jumlah Dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu	Tersedianya masyarakat yang mendapatkan laporan listrik sesuai standar keselamatan ketenagalistrikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		19.869.000	Pajak Rokok	
3	29	06	1,06	06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1. Persentase Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang dikendalikan 2. Persentase Rumah Tangga tidak mampu yang terlayani listrik PLN	Jumlah sarana pemanfaatan ketenagalistrikan yang terbangun	Tersedianya masyarakat yang mendapatkan laporan listrik sesuai standar keselamatan ketenagalistrikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		600 RTS		515.177.000	Pajak Rokok	
												TOTAL	**10.855.740.078**		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3	29				CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								287.856.990		
3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								263.948.990		
3	29	01	1,03		Administrasi Milik Daerah pada Perangkat Daerah								5.077.400		
3	29	01	1,03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Administrasi BMD	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Laporan	81.33 Nlai	5.727.720	Pajak Rokok	
3	29	01	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								14.064.840		
3	29	01	1,06	02	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Laporan Administrasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Paket	81.33 Nlai	3.137.440	Pajak Rokok	
3	29	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	Jumlahpaket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Tersedianya Laporan Administrasi Perangkat Daerah	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Paket	81.33 Nlai	1.495.400	Pajak Rokok	
3	29	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Fasilitasi	Tersedianya Laporan	Kab. Sumbawa,		1 Laporan	81.33 Nlai	1.875.000		



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Perubahan Tahun 2025						Catatan Penting
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
							Kunjungan Tamu	Administrasi Perangkat Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai				Pajak Rokok	
3	29	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Laporan Administrasi Perangkat Daerah	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Laporan	81.33 Nlai	7.557.000	Pajak Rokok	
3	29	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								226.196.700		
3	29	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat yang disediakan	Terlaksananya Jasa Penunjang	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Laporan	81.33 Nlai	1.784.750	Pajak Rokok	
3	29	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Terlaksananya Jasa Penunjang	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Laporan	81.33 Nlai	26.160.000	Pajak Rokok	
3	29	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Terlaksananya Jasa Penunjang	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	6 Orang	81.33 Nlai	198.252.000	Pajak Rokok	
3	29	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								18.610.000		
3	29	01	1,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan BMD	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Unit	81.33 Nlai	610.000	Pajak Rokok	
3	29	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Peralatan dan Mesinnya yang dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan BMD	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	3 Unit	81.33 Nlai	5.294.000	Pajak Rokok	
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN								5.294.000		
3	29	02	1,03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi								5.294.000		
3	29	02	1,03	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Persentase Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam daerah provinsi yang dikendalikan	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan implementasi nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi	Tersedianya Kajian Teknis Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		5.294.000	Pajak Rokok	
3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA								6.617.000		
3	29	03	1,04		Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat								6.617.000		
3	29	03	1,04	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Produktifitas Lapangan Usaha Ekonomi sub sektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya	Jumlah Laporan Hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambagan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Terlaksananya IPR yang melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai aturan perundang-undangan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		6.617.000	Pajak Rokok	
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN								5.380.000		
3	29	05	1,07		Peengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan berupa Sinar Matahari Angin, Aliran dan Terjunan Air, Gerakan dan Pergerakan Suhu Lapisan Laut dalam Wilayah Provinsi								5.380.000		
3	29	05	1,07	02	Pembinaan dan Pengawasan Aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di Daerah	Jumlah Sarana/Fasilitasi Instalasi pemanfaatan EBT dalam Kondisi Baik	Jumlah Laporan hasil pembinaan dan pengawasan aneka energi terbarukan di daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan aneka energi terbarukan	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		5.380.000	Pajak Rokok	
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN								6.617.000		
3	29	06	1,02		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi								6.617.000		
3	29	06	1,02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	1. Persentase Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang dikendalikan 2. Persentase Rumah Tangga tidak mampu yang terlayani listrik PLN	Jumlah Laporan hasil pengendalian dan pengawasan usaha bidang ketenagalistrikan	Tersedianya Izin usaha yang melaksanakan kegiatan bidang ketenagalistrikan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		6.617.000	Pajak Rokok	
												TOTAL	287.856.990		



BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2025 yang merupakan penjabaran Rencana Strategis Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral tahun 2025 untuk mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yaitu ***"Terwujudnya Transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas daerah menuju NTB sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi regional Bali dan Nusa Tenggara yang inklusif dan berkelanjutan dan Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan yang lestari dan asri)".*** Dalam implementasinya nanti, Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 akan dilaksanakan melalui optimalisasi terhadap seluruh sumber daya yang ada melalui peningkatan koordinasi dan kerjasama baik secara internal maupun eksternal lintas stakeholder, serta monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Beberapa program dan kegiatan yang menjadi prioritas Dinas ESDM Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penyambungan listrik murah dan hemat bagi 600 Rumah Tangga Sasaran yang diutamakan pada daerah-daerah arahan penaggulangan kemiskinan.
2. Pemberian rekomendasi, Pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Ketenagalistrikan serta usaha di bidang Energi.
3. Program Nusa Terang Benderang
   - ✓ Pembangunan PLTS *on grid* 2x5 MWp di Sumbawa dan Bima.
   - ✓ Beroperasinya PLTMH *on grid* Pandan Duri 580 kW hibah dari Pemerintah Inggris.
   - ✓ Konstruksi pabrik Bio CNG dengan kapasitas 10 ton per hari.
   - ✓ Pelaksanaan *Feasibility Study* PLT Biomassa hibah dari Pemerintah Denmark.
   - ✓ Pelaksanaan program listrik murah (APBD, Pokir dan BPBL).
   - ✓ Penyusunan Pergub Roadmap NTB Net Zero Emission .
   - ✓ Pembangunan PLT Panas Bumi di Hu'u Kabupaten Dompu 60 MW oleh PT Sumbawa Timur Mining.
4. Industri Pertambangan dan Smelter yang diresmikan oleh Presiden
5. Pemuktahiran Pergub Nilai Perolehan Pajak Air Tanah
6. Jasa Konsultansi Pra Study Kelayakan Aneka Energi Baru dan Terbarukan
7. Jasa Konsultansi Kajian Teknis Nilai Batuan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 juga diharapkan dapat menjadi bagian dalam upaya peningkatan kinerja Dinas dalam mencapai target-terget yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas. Pembangunan secara umum termasuk pembangunan di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, tentunya memerlukan berbagai masukan, saran, dan kritik yang membangun dari seluruh *stakeholder* terkait. Hal ini dimaksudkan agar dapat dilakukan penyempurnaan terhadap perencanaan pembangunan di masa yang akan datang, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan dapat diwujudkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dinas ESDM Provinsi NTB
@DESDMNTB
@desdmntb
desdm@ntbprov.go.id
www.desdm.ntbprov.go.id

RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025



DINAS SOSIAL PROVINSI NTB

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan YangMaha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Tahun 2025 ini disusun dalam rangka persiapan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan agenda rutin tahunan. Dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 memberikan gambaran tentang maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA), evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024, Indikator kinerja dan kelompok sasaran serta prakiraan anggaran tahun berikutnya berdasarkan pagu indikatif.

Demikian Rencana Kerja – Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Tahun 2025 ini disajikan dengan harapan dapat bermanfaat khususnya untuk peningkatan kinerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mataram, Maret 2024
Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB

Dr. H. AHSANUL KHALIK, S.Sos., M.H
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP.19701231199803106

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum. 2

1.3. Maksud dan Tujuan. 5

1.4. Sistematika Penulisan Renja Perangkat Daerah 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 1

2.2. Analisis Kinerja pelayanan Perangkat Daerah 5

2.2.1. Analisis Lingkungan Internal 5

2.2.2. Analisis Lingkungan Eksternal 5

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 6

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 6

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 72

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 72

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 72

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat . 73

3.3. Program Dan Kegiatan 76

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 72

BAB V PENUTUP 124

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) yang berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang tertuang dalam Renstra Perangka Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial untuk periode satu tahun, dan sebagai pendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Nusa Tenggara Barat 2024-2026

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan perangkat daerah yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan (*Permendagri No. 86 Tahun 2017).* Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja PD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja PD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
b. Rumusan program/ kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan

pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dengan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing PD;

c. Penyusunan Renja PD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan perkeluaran, total kebutuhan dana, baikuntuktahunn dan tahun n+1.

Sebagai sebuah dokumen resmi perangkat daerah, Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Perangka Daerah Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182);
7. Pemerintah Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 32);
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor Noreg Peraturan Daerah Provinsi NTB: 12/297/2017).
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2024-2044;

28. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pengarusutamaan Gender Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 39);
29. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 45 tahun 2021 tentang Nusa Tenggara Barat Satu Data (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 45);
30. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 77 tahun 2022 tentang Pedoman Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Satu Data (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 77);
31. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 8 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 8);
32. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 17);
33. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 Nomor 25);

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud disusunnya Renja DINAS SOSIAL Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah :

1) Mendeskripsikan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2) Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada Renstra dan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.4. Sistematika Penulisan Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggara Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rencana Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah penjabaran capaian Rencana Kerja tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Pelaksana Tugas Pembangunan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Sosial pada tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025. Adapun realisasi program dan kegiatan yang telah tercapai dan yang belum tercapai baik dari sudut pandang kinerja maupun keuangan pada tahun anggaran 2024, Anggaran Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2024 yang bersumber dari APBD sebesar **Rp. 88.970.079.329,00 (Delapan Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah),-** dengan capaian realisasi kinerja fisik sebesar (**96,10%)** dan capaian realisasi keuangan sebesar ***85.501.019.586,00 (Delapan Puluh Lima Milyar Lima Ratus Satu Juta Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam) atau*** (**96,10%**.).

Dalam mengukur tercapai atau tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)/ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinsos Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat selama Tahun Anggaran 2023. Capaian indikator kinerja program dan kegiatan dapat di lihat pada table di bawah ini :

Tabel 2.1

Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun Anggaran 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	2024	
			TARGET	REALISASI
Meningkatnya pendapatan pemerlu pelayanan kesejahteraan social (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Ditingkatkan Pendapatannya	%	**2%**	**2,7%**
Meningkatnya Upaya penurunan beban pengeluaran pemerlu pelayanan kesejahteraan social (PPKS)	Persentase Penurunan Beban Pengeluaran Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	**100 %**	**100 %**
Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	%	**100 %**	**100 %**

Sumber: Lap LKPJ Dinas Sosial Provinsi NTB 2024

Pencapaian Indikator Kinerja Strategis Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024 sudah melampaui target dari 2,00 % untuk *Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Ditingkatkan Pendapatannya* telah tercapai penanganannya sebesar 2,7%, kemudian *Persentase Penurunan Beban Pengeluaran Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)* dari target 100% dengan capaian penanganannya sebesar 100% dan selanjutnya *Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)* Bidang Sosial dari target 100% telah tercapai penangan sebesar 100%

Tabel 2.2

Perkembangan Data Capaian Kinerja berdasarkan RPD NTB 2024-2026

INDIKATOR	SATUAN	2024		TARGET 2025
		TARGET	REALISASI	
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Ditingkatkan Pendapatannya	%	**2%**	**2,7%**	**3%**
Persentase Penurunan Beban Pengeluaran Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	**100 %**	**100 %**	**100%**
Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	%	**100 %**	**100 %**	**100%**

Sumber: Dinas Sosial Provinsi NTB 2024

Alokasi Pagu Anggaran dan Jumlah Realisasi Anggaran pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dirinci dalam setiap Program dan Kegiatan sebagai berikut :

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI S.D DESEMBER 2024 (RP)	PERSENTASE %
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI (rincian berupa : Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan P3K, Belanja Listrik, Telepon, Air, Belanja ATK, Belanja Cetak dan penggandaan, Belanja Surat Kabar, Belanja Alat Listrik, Belanja Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah, Belanja Pemeliharaan Kendaraan dan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor, belanja honor tenaga PTT dan Tenaga Kontrak Belanja jasa lainnya).	36.019.595.194,00	34.084.140.240,00	94,63%

2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL (berupa kegiatan pemberian bantuan hibah uang dan barang bagi lembaga/yayasan berupa Kendaraan Operasional, kendaraan roda 3, kendaraan roda 2, Perlengkapan Ibadah (Kain Sarung), Kebutuhan Pokok dan Sejenisnya) (POKIR DEWAN).	20.596.094.100,00	19.990.469.250,00	97,06%
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (yakni berupa Kegiatan Rehabilitasi Sosial terhadap Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Disabilitas terlantar Gelandangan dan Pengemis terlantar dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi dalam Panti) ➢ Melalui pemberian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasramaan, bimbingan keterampilan dan mental. ➢ Melalui pemberian bantuan sarana/prasarana (toolkit) bagi kelayan panti yang telah mendapatkan pelatihan keterampilan dan praketk belajar kerja dalam Panti. ➢ Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dalam dan luar panti/LKSA.	16.164.510.695,00	15.842.490.156,00	98,01%
4	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (kegiatan berupa Penjangkaun Penanganan dan Advokasi terhadap PMB (Pekerja Migran Bermasalah), KTK (Korban Tindak Kekerasan) dan Orang Terlantar melalui Shelter Home/ RPTC untuk diberikan pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan psikososial dan pemulangan kedaerah asal).	425.133.800,00	326.491.590,00	76,80%
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL (berupa Kegiatan Pemberian Bantuan Barang berupa Peralatan Usaha atau sarana/prasarana berusaha bagi keluarga miskin/rentan melalui kelompok usaha bersama (KUBe), Bantuan Sosial Uang / Bantuan Modal Usaha bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBe) dan Usaha Ekonomis Produktif) (POKIR DEWAN).	14.505.526.640,00	13.914.587.400,00	95,93%
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA (berupa Kegiatan LDP (Layanan Dukungan Psikosial), Pengadaan Bantuan Logistik Bencana, Droping Air Bersih, Pengerahan Tagana dan Penanganan Orang Terlantar)	1.092.630.000,00	1.078.352.450,00	98,69%

7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN (berupa kegiatan Peringatan Hari Pahlawan Nasional, Rehablilitasi Tempat/ Bangunan Persemayaman dan Kebersihan serta Alat Listrik)	166.588.900,00	165.988.500,00	99,64%

2.2. Analisis Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Secara garis besar dari 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan dalam rencana strategis tahun 2024-2026 seluruhnya telah dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun Ikhtisar pencapaian kinerja pelayanan dan catatan analisa dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat

INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisa
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Ditingkatkan Pendapatannya	%	2	3	10	2,7	3	10	
Persentase Penurunan Beban Pengeluaran Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	100	100	100	100	100	100	
Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	%	100	100	100	100	100	100	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses penyusunan RKPD Dinas Sosial provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Guna menghasilkan suatu rencana kerja yang selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah, maka diperlukan suatu telaahan (*review*) terhadap rancangan awal penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Dinas Sosial Prov. NTB Tahun 2025. Rancangan awal rencana kerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 merupakan kelanjutan dari rencana kerja Tahun sebelumnya yang disusun berdasarkan rencana strategis (renstra) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat 2024-2026. Dinas Sosial Provinsi NTB bertanggungjawab atas penyelenggaraan salah satu prioritas daerah terkait Penanganan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim serta Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam Rancangan Awal (Ranawal) RKPD Tahun 2025 sudah semua Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada pada Dinas Sosial Provinsi NTB terakomodir. Namun untuk kondisi akhir (ranhir) Anggaran Tahun 2025 belum sesuai dengan kebutuhan yang ada terutama pemenuhan kebutuhan SPM dalam panti pemerintah seperti peningatan sarpras, pemenuhan kebutuhan permakanan, sandang dan pembinaan keterampilan dasar. Review Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada tabel 2.5 dibawah ini

Tabel 2.5

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Sumber Dana	Catatan Penting
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.000)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana (Rp.000)		
												Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
					Dinas Sosial					**92.024.784.175,00**					**92.024.784.175,00**		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					92.024.784.175,00					92.024.784.175,00		
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					92.024.784.175,00					92.024.784.175,00		
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					29.898.346.991,00					29.898.346.991,00		
1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					453.000.000,00					453.000.000,00		
1	06	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Dokumen	7 Dokumen	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Dokumen	7 Dokumen	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	9 Dokumen	7 Dokumen	55.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	9 Dokumen	7 Dokumen	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

1	06	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	9 Dokumen	7 Dokumen	38.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	5 Laporan	7 Dokumen	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan					24.416.226.991,00					24.416.226.991,00		
1	06	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.275.726.991,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	230 Orang/ Bulan	100 %	24.275.726.991,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	Cakupan Pengelolaan Administrasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	110.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	8 Dokumen	100 %	110.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	2 Laporan	100 %	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	1.03		Administrasi Barang Milik					30.670.000,00					30.670.000,00		
1	06	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	30.670.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	9 Laporan	100 %	30.670.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.06		Administrasi Umum					648.950.000,00					648.950.000,00		
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Paket	100 %	9.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Cakupan pelayanan administrasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Paket	100 %	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Cakupan pelayanan administrasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	25.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Paket	100 %	25.450.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Paket	100 %	220.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Dokumen	100 %	90.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Paket	100 %	10.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Laporan	100 %	38.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Laporan	100 %	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik					900.000.000,00					900.000.000,00		
1	06	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	2 Unit	15 Paket	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Unit	15 Paket	450.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel											
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	280.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	5 Paket	15 Paket	280.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan											
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan Barang Milik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	10 Unit	15 Paket	120.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang					899.500.000,00					899.500.000,00		
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat											
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan penyediaan jasa penunjang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	9.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Laporan	100 %	9.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,											
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Laporan	100 %	400.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan											
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Laporan	100 %	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan											
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	480.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Laporan	100 %	480.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik					2.550.000.000,00					2.550.000.000,00		
1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa											
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	6 Unit	60 Unit	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa											
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	380.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	20 Unit	60 Unit	380.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	10 Unit	60 Unit	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	5 Unit	60 Unit	2.000.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					8.452.640.000,00					8.452.640.000,00		
1	06	02	1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					40.000.000,00					40.000.000,00		
1	06	02	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang											
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan	Jumlah penerbitan rekomendasi/izin UGB dan PUB lintas daerah kab/kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5,50 %	3 Dokumen	3 Rekomendasi	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi					6.356.390.000,00					6.356.390.000,00		
1	06	02	1.02	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi											
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial	Persentase PSKS kelembagaan dan perorangan yang mendapatkan peningkatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5,50 %	120 Orang	100 %	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	02	1.02	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi											
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang	Persentase PSKS kelembagaan dan perorangan yang mendapatkan peningkatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5,50 %	117 Orang	100 %	80.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

1	06	02	1.02	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi												
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Persentase PSKS kelembagaan dan perorangan yang mendapatkan peningkatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5,50 %	20 Keluarga	100 %	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	02	1.02	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi												
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya	Persentase PSKS kelembagaan dan perorangan yang mendapatkan peningkatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.151.390.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5,50 %	100 Lembaga	100 %	6.151.390.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					520.000.000,00					520.000.000,00		
1	06	03	1.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal					520.000.000,00					520.000.000,00		
1	06	03	1.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal												
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk	Persentase Pekerja Migran Bermasalah (PMB), Korban Perdagangan Orang (KPO) dan Korban Tindak Kekerasan (KTK)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	520.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	300 Orang	100 %	520.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					5.850.000.000,00					5.850.000.000,00		
1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti					1.065.000.000,00					1.065.000.000,00		
1	06	04	1.01	0004	Penyediaan Alat Bantu												
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang diberikan layanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	765.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	300 Orang	400 Orang	765.000.000,00	-	

1	06	04	1.01	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar												
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang diberikan layanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	1 Dokumen	400 Orang	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti					4.750.000.000,00					4.750.000.000,00		
1	06	04	1.02	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti												
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	2 Dokumen	5000 Anak	4.750.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti					35.000.000,00					35.000.000,00		
1	06	04	1.05	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA												
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah	Persentase PPKS yang tertangani	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	12 Dokumen	100 %	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN					20.532.950.000,00					20.532.950.000,00		
1	06	05	1.01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal					25.000.000,00					25.000.000,00		
1	06	05	1.01	0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal												
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai	Jumlah pengangkatan anak oleh orang tua tunggal	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5,50 %	3 Orang	3 Jiwa	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

1	06	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah					20.507.950.000,00					20.507.950.000,00		
1	06	05	1.02	0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga												
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Produktif	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial	Pesentase DTKS tervalidasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5,50 %	100 Keluarga	100 %	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	05	1.02	0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah												
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan	Pesentase DTKS tervalidasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.554.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5,50 %	2500 Keluarga	100 %	14.554.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	05	1.02	0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi												
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi	Pesentase DTKS tervalidasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.903.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5,50 %	300 Orang	100 %	5.903.950.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA					2.100.000.000,00					2.100.000.000,00		
1	06	06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi					2.100.000.000,00					2.100.000.000,00		
1	06	06	1.01	0001	Penyediaan Permakanan												
						Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1.250 Orang	100 %	450.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	06	1.01	0002	Penyediaan Sandang												
						Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1250 Orang	100 %	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	06	1.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi												
						Cakupan Penanganan Bencana Daerah	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan	Persentase korban bencana alam dan sosial	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1250 Unit	100 %	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	06	1.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan												
						Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1500 Orang	100 %	450.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

1	06	06	1.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial											
						Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1500 Orang	100 %	700.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					680.000.000,00					680.000.000,00		
1	06	07	1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi					680.000.000,00					680.000.000,00		
1	06	07	1.01	0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi												
						Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN)/Makam	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman	Jumlah TPM yang di tingkatkan pengelolaan sarana dan prasarana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Unit	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	07	1.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi												
						Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Taman Makam Pahlawan Nasional	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam	Jumlah TPM yang di tingkatkan pengelolaan sarana dan prasarana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Makam	1 Unit	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	07	1.01	0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi												
						Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Taman Makam Pahlawan Nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan	Jumlah TPM yang di tingkatkan pengelolaan sarana dan prasarana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	230.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Unit	230.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

					Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja "Karya Mandiri"					2.796.550.000,00					2.796.550.000,00		
1					URUSAN PEMERINTAHAN					2.796.550.000,00					2.796.550.000,00		
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN					2.796.550.000,00					2.796.550.000,00		
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG					666.550.000,00					666.550.000,00		
1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4.500.000,00					4.500.000,00		
1	06	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					35.000.000,00					35.000.000,00		
1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	Cakupan Pengelolaan Administrasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Dokumen	100 %	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					7.000.000,00					7.000.000,00		
1	06	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Laporan	100 %	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					53.750.000,00					53.750.000,00		
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Paket	100 %	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Cakupan pelayanan administrasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	9.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Paket	100 %	9.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Paket	100 %	5.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Dokumen	100 %	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Paket	100 %	12.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	2 Laporan	100 %	17.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					90.000.000,00					90.000.000,00		
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	2 Paket	4 Unit	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan Barang Milik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	5 Unit	4 Unit	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					346.800.000,00					346.800.000,00		
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan penyediaan jasa penunjang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	1.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Laporan	100 %	1.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Laporan	100 %	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Laporan	100 %	275.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik					129.500.000,00					129.500.000,00		
1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	6 Unit	100 %	79.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	5 Unit	100 %	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Unit	100 %	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					2.130.000.000,00					2.130.000.000,00		
1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti					2.130.000.000,00					2.130.000.000,00		
1	06	04	1.02	0002	Penyediaan Makanan												
						Persentase PMKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam pant	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.533.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	60 Orang	60 Orang	1.533.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang												
						Persentase PMKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam pant	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	60 Orang	60 Orang	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.02	0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses												
						Persentase PMKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	60 Orang	60 Orang	34.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti												
						Persentase PMKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam pant	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	60 Orang	60 Orang	15.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

1	06	04	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial											
						Persentase PMKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	60 Orang	60 Orang	400.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari											
						Persentase PMKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	60 Orang	60 Orang	7.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.02	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga											
						Persentase PMKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	60 Orang	60 Orang	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.02	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti											
						Persentase PMKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	3 Dokumen	60 Orang	80.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
					Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita "Mirah Adi"					2.559.000.000,00					2.559.000.000,00		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.559.000.000,00					2.559.000.000,00		
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					2.559.000.000,00					2.559.000.000,00		
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					599.500.000,00					599.500.000,00		
1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4.500.000,00					4.500.000,00		
1	06	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					40.000.000,00					40.000.000,00		
1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	Cakupan Pengelolaan Administrasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Dokumen	100 %	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					7.000.000,00					7.000.000,00		
1	06	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Laporan	100 %	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					50.500.000,00					50.500.000,00		
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Paket	100 %	6.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Cakupan pelayanan administrasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	9.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Paket	100 %	9.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Paket	100 %	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Dokumen	100 %	5.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Paket	100 %	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	2 Laporan	100 %	17.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					80.000.000,00					80.000.000,00		
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	2 Paket	4 undefined	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan Barang Milik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	5 Unit	4 undefined	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					322.500.000,00					322.500.000,00		
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan penyediaan jasa penunjang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Laporan	100 %	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Laporan	100 %	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	280.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Laporan	100 %	280.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					95.000.000,00					95.000.000,00		
1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	5 Unit	100 %	55.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	5 Unit	100 %	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Unit	100 %	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.959.500.000,00					1.959.500.000,00		
1	06	04	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti					1.959.500.000,00					1.959.500.000,00		
1	06	04	1.05	0001	Penyediaan Permakanan												
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan	Jumlah PPKS (Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan korban tindak kekerasan) yang diberikan pemenuhan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.314.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	50 Orang	120 Orang	1.314.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.05	0002	Penyediaan Sandang												
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1	Jumlah PPKS (Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan korban tindak kekerasan) yang diberikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	50 Orang	120 Orang	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.05	0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses												
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah PPKS (Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan korban tindak kekerasan) yang diberikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	50 Orang	120 Orang	15.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.05	0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti												
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan	Jumlah PPKS (Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan korban tindak kekerasan) yang diberikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	50 Orang	120 Orang	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

1	06	04	1.05	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial											
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah PPKS (Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan korban tindak kekerasan) yang diberikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	50 Orang	120 Orang	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.05	0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari											
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah PPKS (Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan korban tindak kekerasan) yang diberikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	50 Orang	120 Orang	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.05	0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar											
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan	Jumlah PPKS (Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan korban tindak kekerasan) yang diberikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	360.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	50 Orang	120 Orang	360.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.05	0010	Pemulangan ke Daerah Asal											
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	Jumlah PPKS (Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan korban tindak kekerasan) yang diberikan pemenuhan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	50 Orang	120 Orang	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.05	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA											
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah	Jumlah PPKS (Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan korban tindak kekerasan) yang diberikan pemenuhan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	3 Dokumen	100 Orang	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

					Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia "Mandalika"					2.457.250.000,00					2.457.250.000,00		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.457.250.000,00					2.457.250.000,00		
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					2.457.250.000,00					2.457.250.000,00		
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					833.000.000,00					833.000.000,00		
1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4.500.000,00					4.500.000,00		
1	06	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					70.000.000,00					70.000.000,00		
1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	Cakupan Pengelolaan Administrasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Dokumen	100 %	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.03		Administrasi Barang Milik					7.500.000,00					7.500.000,00		
1	06	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	7.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Laporan	100 %	7.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					84.500.000,00					84.500.000,00		
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Paket	100 %	9.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Cakupan pelayanan administrasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	9.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Paket	100 %	9.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Paket	100 %	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan											
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Dokumen	100 %	3.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material											
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Paket	100 %	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Laporan	100 %	50.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					65.000.000,00					65.000.000,00		
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel											
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	2 Paket	4 Unit	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	0	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	2 0	4 Unit	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					490.500.000,00					490.500.000,00		
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan penyediaan jasa penunjang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Laporan	100 %	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Laporan	100 %	120.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	3 Laporan	100 %	3.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	365.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Laporan	100 %	365.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					111.000.000,00					111.000.000,00		
1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	6 Unit	100 %	71.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Unit	100 %	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.624.250.000,00					1.624.250.000,00		
1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.624.250.000,00					1.624.250.000,00		

1	06	04	1.03	0001	Penyediaan Permakanan											
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan	Jumlah lansia/jompo terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.230.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	100 Orang	100 Orang	1.230.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.03	0002	Penyediaan Sandang											
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1	Jumlah lansia/jompo terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	100 Orang	100 Orang	90.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.03	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses											
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni	Jumlah lansia/jompo terlantar yang diberikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	100 Orang	100 Orang	105.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.03	0004	Penyediaan Alat Bantu											
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu	Jumlah lansia/jompo terlantar yang diberikan pemenuhan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	5 Orang	100 Orang	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.03	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial											
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan	Jumlah lansia/jompo terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	100 Orang	100 Orang	90.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.03	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial											
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah lansia/jompo terlantar yang diberikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	100 Orang	100 Orang	36.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.03	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari											
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah lansia/jompo terlantar yang diberikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	100 Orang	100 Orang	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.03	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga											
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	Jumlah lansia/jompo terlantar yang diberikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	100 Orang	100 Orang	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.03	0012	Pemulasaraan											
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah lansia/jompo terlantar yang diberikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	15 Orang	100 Orang	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

					Panti Pelayanan Sosial Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Sosial Penyandang Disabilitas "Sasambo Matupa"					**2.068.000.000,00**					**2.043.000.000,00**		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.068.000.000,00					2.043.000.000,00		
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					2.068.000.000,00					2.043.000.000,00		
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					603.000.000,00					603.000.000,00		
1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4.500.000,00					4.500.000,00		
1	06	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					95.000.000,00					95.000.000,00		
1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	Cakupan Pengelolaan Administrasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Dokumen	100 %	95.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					7.000.000,00					7.000.000,00		
1	06	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Laporan	100 %	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					54.500.000,00					54.500.000,00		
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Paket	100 %	8.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Cakupan pelayanan administrasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Paket	100 %	9.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Paket	100 %	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan											
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Dokumen	100 %	5.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material											
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Paket	100 %	8.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	2 Laporan	100 %	18.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					55.000.000,00					55.000.000,00		
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel											
						-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Paket	-	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
						-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					292.000.000,00					292.000.000,00		

1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan penyediaan jasa penunjang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Laporan	100 %	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Laporan	100 %	73.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Laporan	100 %	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	320 Laporan	100 %	215.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					95.000.000,00					95.000.000,00		
1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	4 Unit	5 Unit	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Unit	5 Unit	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.465.000.000,00					1.440.000.000,00		
1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti					1.465.000.000,00					1.440.000.000,00		
1	06	04	1.02	0002	Penyediaan Makanan												
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	635.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	320 Orang	320 Orang	735.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang												
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	320 Orang	320 Orang	90.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti												
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	320 Orang	320 Orang	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial												
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	320 Orang	320 Orang	355.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar												
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	320 Orang	320 Orang	90.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.02	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga												
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	320 Orang	320 Orang	65.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.02	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti												
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	3 Dokumen	320 Orang	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

	Pusat Pelayanan Sosial Asuhan Anak "Generasi Harapan "					2.349.500.000,00					2.349.500.000,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.349.500.000,00					2.349.500.000,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					2.349.500.000,00					2.349.500.000,00		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					538.500.000,00					538.500.000,00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4.500.000,00					4.500.000,00		
0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
		Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					30.000.000,00					30.000.000,00		
0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
		-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					7.000.000,00					7.000.000,00		
0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD												
		-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					40.500.000,00					40.500.000,00		
0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
		-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	5.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
		-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	9.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan												
						-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material												
						-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
						-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Laporan	-	17.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					65.000.000,00					65.000.000,00		
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel												
						-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Paket	-	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
						-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					301.500.000,00					301.500.000,00		
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	110.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	190.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					90.000.000,00					90.000.000,00		
1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas												
						-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Unit	-	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
						-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Unit	-	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
						-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.811.000.000,00					1.811.000.000,00		
1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti					1.811.000.000,00					1.811.000.000,00		
1	06	04	1.02	0001	Pengasuhan												
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	80 Orang	100 Orang	95.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.02	0002	Penyediaan Makanan												
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	80 Orang	100 Orang	1.120.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang											
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	80 Orang	100 Orang	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.02	0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses											
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	80 Orang	100 Orang	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti											
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	80 Orang	100 Orang	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial											
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	80 Orang	100 Orang	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar											
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	80 Orang	100 Orang	320.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.02	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti											
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	12 Dokumen	100 Orang	76.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

					Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras "Mutmainnah"					**2.467.800.000,00**					**2.467.800.000,00**		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.467.800.000,00					2.467.800.000,00		
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					2.467.800.000,00					2.467.800.000,00		
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					797.800.000,00					797.800.000,00		
1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4.500.000,00					4.500.000,00		
1	06	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
						-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					95.000.000,00					95.000.000,00		
1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
						-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	95.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					7.000.000,00					7.000.000,00		
1	06	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD												
						-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					50.300.000,00					50.300.000,00		

1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
						-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	8.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
						-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	9.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
						-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan												
						-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	1.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material												
						-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
						-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Laporan	-	17.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					50.000.000,00					50.000.000,00		
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel												
						-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Paket	-	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					476.500.000,00					476.500.000,00		

1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	110.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	365.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	365.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					114.500.000,00					114.500.000,00		
1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas												
						-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	7 Unit	-	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
						-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Unit	-	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
						-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.670.000.000,00					1.670.000.000,00		
1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti					1.670.000.000,00					1.670.000.000,00		
1	06	04	1.01	0001	Penyediaan Permakanan												
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang diberikan layanan kesejahteraan sosial	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	100 Orang	100 Orang	1.300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.01	0002	Penyediaan Sandang												
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang diberikan layanan kesejahteraan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.01	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses												
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	100 Orang	100 Orang	80.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti												
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang diberikan layanan kesejahteraan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	100 Orang	100 Orang	110.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.01	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial												
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	100 Orang	100 Orang	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.01	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari												
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	100 Orang	100 Orang	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.01	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga												
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	100 Orang	100 Orang	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.01	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar												
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang diberikan layanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	12 Dokumen	100 Orang	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

					Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya "Madani"					**2.184.050.000,00**					**2.184.050.000,00**			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.184.050.000,00					2.184.050.000,00			
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					2.184.050.000,00					2.184.050.000,00			
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					706.800.000,00					706.800.000,00			
1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4.000.000,00					4.000.000,00			
1	06	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
						-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					35.000.000,00					35.000.000,00			
1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1	06	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat					7.000.000,00					7.000.000,00			
1	06	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
						-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					46.000.000,00					46.000.000,00			
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	6.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	6.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		

1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
						-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan												
						-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material												
						-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
						-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Laporan	-	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					50.000.000,00					50.000.000,00		
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
						-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4 Unit	-	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					446.800.000,00					446.800.000,00		
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	1.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	400.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					118.000.000,00					118.000.000,00		
1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
						-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Unit	-	78.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
						-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4 Unit	-	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
						-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.477.250.000,00					1.477.250.000,00		
1	06	04	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					1.477.250.000,00					1.477.250.000,00		
1	06	04	1.04	0001	Penyediaan Permakanan												
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan	Jumlah gepeng dan keluarga bermasalah sosial psikologis yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	821.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	50 Orang	100 Orang	821.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.04	0002	Penyediaan Sandang												
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1	Jumlah gepeng dan keluarga bermasalah sosial psikologis yang diberikan pemenuhan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	50 Orang	100 Orang	62.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

1	06	04	1.04	0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses											
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan	Jumlah gepeng dan keluarga bermasalah sosial psikologis yang diberikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	50 Orang	100 Orang	8.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.04	0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti											
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan	Jumlah gepeng dan keluarga bermasalah sosial psikologis yang diberikan pemenuhan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	50 Orang	100 Orang	10.000.000,00	-	
1	06	04	1.04	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial											
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan	Jumlah gepeng dan keluarga bermasalah sosial psikologis yang diberikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	50 Orang	100 Orang	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.04	0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari											
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan	Jumlah gepeng dan keluarga bermasalah sosial psikologis yang diberikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	50 Orang	100 Orang	5.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.04	0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar											
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah gepeng dan keluarga bermasalah sosial psikologis yang diberikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	430.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	50 Orang	100 Orang	430.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.04	0010	Pemulangan ke Daerah Asal											
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke	Jumlah gepeng dan keluarga bermasalah sosial psikologis yang diberikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	50 Orang	100 Orang	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.04	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti											
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan	Jumlah gepeng dan keluarga bermasalah sosial psikologis yang diberikan pemenuhan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	3 Dokumen	75 Orang	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

					Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia "Meci Angi "					**1.856.250.000,00**					**1.856.250.000,00**		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.856.250.000,00					1.856.250.000,00		
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					1.856.250.000,00					1.856.250.000,00		
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					947.500.000,00					947.500.000,00		
1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4.000.000,00					4.000.000,00		
1	06	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
						-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					28.500.000,00					28.500.000,00		
1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
						-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	28.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	28.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat					7.000.000,00					7.000.000,00		
1	06	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD												
						-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					122.000.000,00					122.000.000,00		
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
						-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	5.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
						-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	8.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	8.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
						-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan											
						-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	2.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material											
						-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	5.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
						-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	95.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					64.000.000,00					64.000.000,00		
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel											
						-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Paket	-	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
						-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	14.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan					598.000.000,00					598.000.000,00		
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	55.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	540.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	540.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					124.000.000,00					124.000.000,00		
1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas												
						-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	7 Unit	-	80.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
						-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Unit	-	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
						-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					908.750.000,00					908.750.000,00		
1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di					908.750.000,00					908.750.000,00		
1	06	04	1.03	0001	Penyediaan Permakanan												
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan	Jumlah lansia/jompo terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar	Kota Bima, Asakota, Jatiwangi	710.000.000,00	Kota Bima, Asakota, Jatiwangi	4,50 %	50 Orang	50 Orang	710.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.03	0002	Penyediaan Sandang												
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1	Jumlah lansia/jompo terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar	Kota Bima, Asakota, Jatiwangi	40.000.000,00	Kota Bima, Asakota, Jatiwangi	4,50 %	50 Orang	50 Orang	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.03	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses												
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni	Jumlah lansia/jompo terlantar yang diberikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	50 Orang	50 Orang	5.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.03	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial												
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan	Jumlah lansia/jompo terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	50 Orang	50 Orang	52.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.03	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial												
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah lansia/jompo terlantar yang diberikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	50 Orang	50 Orang	55.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.03	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari												
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah lansia/jompo terlantar yang diberikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	50 Orang	50 Orang	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

1	06	04	1.03	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga											
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	Jumlah lansia/jompo terlantar yang diberikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	50 Orang	50 Orang	25.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	06	04	1.03	0012	Pemulasaraan											
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah lansia/jompo terlantar yang diberikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	10 Orang	50 Orang	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
					TOTAL					**83.889.086.991,00**	**TOTAL**				**83.889.086.991,00**		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai lembaga di daerah dan membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan danpelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial dan dituntut untuk memberikanpelayanan yang berkualitas bagi masyarakat.

Adapun usulan program dan kegiatan yang diusulkan masyarakat telah diakomodir sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melalui kegiatanmusrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum Perangkat Daerah dan musrenbang kabupaten yang dikoordinasikan bersama dengan Bappeda prov. NTB. Dari tahapan-tahapan perencaaan tersebut di harapkan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakatdalam bidang sosial.

Tabel T-C.4

Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Mataram	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Mataram	Cakupan Pemberdayaan Sosial	100 %	
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Mataram	Persentase Penanganan Wargan Negara Migran dan Korban Tindak Kekerasan	2,50 %	
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Se-NTB	Persentase Penyandang Masalah kesejateraan Sosial (PMKS) yang berfungsi sosial	2,50 %	
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Se-NTB	Persentase Penyandang Masalah kesejateraan Sosial (PMKS) yang diberdayakan	100 %	

6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Se-NTB	Persentase Bencana cakupan Provinsi tertangani	100 %	
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Se-NTB	Persentase Kelayakan TPM dan MPN cakupan daerah provinsi	100 %	

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut :

a. Melindungi PMKS dari segala resiko sosial, perlakuan salah, tindak kekerasan dan eksplotasi sosial.
b. Terwujudnya aksesbilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar;
c. Terwujudnya mekanisme jaminan sosial berbasis komunitas dalam pengelolaan resiko kehilangan atau penurunan pendapatan berbasis kontribusi (iuran);
d. Terjaminnya PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi untuk mendapatkan jaminan sosial melalui pembayaran iuran jaminan sosial oleh pemerintah;
e. Terjaminnya penghargaan bagi pejuang perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan;
f. Terjaminnya penyandang disabilitas , lanjut usia non potensial, eks penderita kronis dan penyandang psikotik dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang layak;
g. Terwujudnya masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya;
h. Teresedia, terjangkau dan terjaminnya pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di semua propinsi, kabupaten dan kota.

Dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator SPM Bidang Sosial

Berdasarkan Permensos No 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah Provinsi terdiri atas:

a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial;
b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial;
c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial;

d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial; dan
e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Provinsi.

Dalam rangka mendukung program pembangunan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat diperlukan suasana yang kondusif dan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berkeadilan sosial serta ditandai dengan adanya kesejahteraan sosial masyarakat yang semakin meningkat dan pada gilirannya dapat menunjang peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan dan program pembangunan daerah.

Pada kebijakan umum pembangunan daerah dalam RPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 terdapat program pembangunan yang terkait dengan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial dengan Indikator *Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.*
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dengan Indikator *Persentase PMB (pekerja migran bermasalah) dan KPO (Korban Perdagangan Orang) dan KTK (Korban Tindak Kekerasan) tertangani*
3. Program Rehabilitasi Sosial dengan Indikator *Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani*;
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan Indikator *Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial.*
5. Program Penanganan Bencana dengan Indikator *Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi.*

Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 disusun dengan mencermati perolehan keberhasilan pembangunan Tahun 2024 dan perkiraan pencapaian hasil pembangunan serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan pada Tahun 2025.

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran,kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakanterfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.Dinas Sosial sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya sebagai lembagayang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidangSosial, dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas bagi masyarakat di bidang sosial. Oleh karena itu, disusun visi dan misi Dinas Sosial yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya.

Adapun Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pada Renja Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan
Terwujudnya Pengentasan Kemiskinan Ekstrim	Meningkatkan Pendapatan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi 1.1 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 1.2 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1.3 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
		Program Rehabilitasi Sosial	1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti 3) Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti
	Meningkatnya Upaya Penurunan Beban Pengeluaran Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Program Rehabilitasi Sosial	1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti 3) Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

			(PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti
		Program Pemberdayaan Sosial	1) Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	1) Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal 2) Penanganan dan advokasi kasus tindak kekerasan/ eksploitasi terhadap anak dan Perempuan
		Program Penanganan Bencana	1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
	Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Program Rehabilitasi Ssosial	1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti
		Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

3.3. Program Dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat telah disusun berdasarkan pada tupoksi Dinas. Adapun proses penyusunan rencana kerja ini telah melampaui berbagai macam tahapan antara lain proses usulan Perangkat Daerah yang di input melalui E-Palanning, Musrenbang sampai dengan Forum Perangkat Daerah. Usulan-usulan tersebut merupakan amanat dari kementerian untuk mendampingi program-program yang digulirkan dari pusat, maupun untuk memenuhi indikator Standart Pelayanan Minimal (SPM) urusan masing-masing bidang, dalam hal ini bidang sosial.

Usulan-usulan program dan kegiatan tersebut merupakan gabungan dari perencanaan Perangkat Daera yang termuat dalam Renstra, Usulan masyarakat melalui kegiatan Musrenbang maupun amanat dari kementrian untuk program-program yang digulirkan dari pusat, maupun untuk memenuhi indikator Standart Pelayanan Minimal (SPM) urusan masing-masing bidang yang diampu Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Adapun program dan kegiatan yang direncakanan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

1. **Program Pemberdayaan Sosial Indikator Kinerja:** Persentase PMKS yang berfungsi sosial.
   1) Jumlah lembaga sosial yang diberdayakan.
   2) Jumlah PSKS yang ditingkatkan SDM nya.
   3) Jumlah partisipasi dunia usaha dan dunia industry (CSR).
   4) Jumlah lembaga sosial yang terkreditasi.
   5) Pengusulan penganugerahan gelar pahlawan nasional, perintis kemerdekaan serta pengusulan pemberian satya lencana kebaktian sosial.
   6) Pemberian bantuan/santunan perlengkapan ibadah/sembako bagi keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan, janda/duda perintis kemerdekaan.
   7) Sosialisasi dan aktualisasi nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan social
   8) Pemberdayaan eknomi warga purna Komunitas Adat Terpencil (KAT).
   9) Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
2. **Program Rehabilitasi Sosial**

   Indikator Kinerja : Persentase PMKS yang berfungsi sosial.

a. Jumlah penanganan dan advokasi kasus tindak kekerasan/ eksploitasi terhadap anak dan perempuan.
b. Jumlah anak terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar, bimbingan mental, bimbingan sosial dan keterampilan dalam panti (balai).
c. Jumlah lanjut usia, gelandangan dan pengemis, wanita rawan sosial ekonomi (WRSE), Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar, bimbingan mental, bimbingan sosial dan keterampilan dalam panti (balai).
d. Jumlah masyarakat yang diberikan penyuluhan penanggulangan dan bahaya narkoba di sekolah.
e. Jumlah orang terlantar, korban tindak kekerasan dan Korban Perdagangan Orang (KPO) yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam shalter home.
f. Jumlah penyandang disabilitas yang diberikan alat bantu.

3. **Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**
Indikator Kinerja : Persentase PMKS yang berfungsi sosial.
1) Jumlah PMB dan Korban Tindak Kekerasan yang tertangai dan terfasilitasi dari debarkasi ke daerah asal
2) Penanganan Korban tindak kekerasan terhadap Perempuan dan anak di RPTC

3) **Program perlindungan dan Jaminan Sosial**
Indikator Kinerja : Persentase penduduk miskin yang diberikan jaminan sosial
a. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang meningkat kemampuannya melalui pertemuan peningkatan kemampuan keluarga.
b. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang mengakses layanan kesehatan dan pendidikan.
c. Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan layanan dukungan psikososial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.
d. Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang ditingkatkan SDM dan kesejahteraannya.
e. Jumlah masyarakat korban bencana yang menerima bantuan logistic.
f. Jumlah masyarakat yang menerima bantuan air bersih.
g. Jumlah SDM petugas pendamping PKH yang ditingkatkan kompetensinya.
h. Jumlah pertemuan pendamping dn operator PKH.
i. Jumlah pemberdayaan keluarga.
j. Pelatihan dan pendampingan keterampilan berusaha bagi KK keluarga miskin dan rentas.

k. Pemberian bantuan sarana dan prasarana berusaha bagi KK keluarga miskin dan rentan dalam bentuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
l. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, pemberian bimbingan dan keterampilan dasar melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
m. Penyediaan akses bimbingan sosial, modal usaha dan pemasaran hasil usaha melalui pendampingan.
n. Bimbingan pemantapan pendampingan KUBE Fakir Miskin

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat disusun sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sesuai Permendagri No.90 Tahun 2020, program Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagunya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Berdasarkan pemahaman ini, maka disusun rencana program dan kegiatan yang distrukturkan ke dalam pencapaian Visi dan Misi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan usulan Dinas Sosial terdiri dari jumlah Program 9 dan jumlah kegiatan 51 kegiatan. Program yang dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Program Utama

1. Program Pemberdayaan Sosial dengan 2 kegiatan
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dengan 1 kegiatan
3. Program Rehabilitasi Sosial dengan 5 kegiatan
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan 1 kegiatan
5. Program Penanganan Bencana dengan 1 Kegiatan
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan 1 Kegiatan

Program Penunjang

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 15 kegiatan

Anggaran Dinas Sosial beserta 8 UPTD untuk tahun 2024 dengan pagu indikatif sebesar Rp**. 83.889.086.991,00** (*Delapan Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*), di luar kegiatan pokok pikiran dewan.

Uraian Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada tabel berikut :Tabel 4.1.

TABEL 4.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					DINAS SOSIAL								**92.024.784.175,00**					77.217.100.000,00
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								**92.024.784.175,00**					77.217.100.000,00
1	06				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**								**92.024.784.175,00**					77.217.100.000,00
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								29.898.346.991,00					30.216.350.000,00
1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								453.000.000,00					569.000.000,00
1	06	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													

						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Dokumen	7 Dokumen	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	37.500.000,00
1	06	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD													
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Dokumen	7 Dokumen	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	43.000.000,00
1	06	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													

						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	9 Dokumen	7 Dokumen	55.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9 Dokumen	57.000.000,00
1	06	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	9 Dokumen	7 Dokumen	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	9 Dokumen	42.500.000,00

							n Dokumen DPA-SKPD									Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
1	06	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	9 Dokumen	7 Dokumen	38.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	9 Dokumen	39.000.000,00

1	06	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	5 Laporan	7 Dokumen	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	5 Laporan	350.000.000,00

																Kinerja SKPD			
1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								24.416.226.991,00					25.196.450.000,00	
1	06	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	230 Orang/ Bulan	100 %	24.275.726.991,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	230 Orang/ Bulan	25.000.000.000,00	
1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	8 Dokumen	100 %	110.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 Dokumen	151.450.000,00
1	06	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	2 Laporan	100 %	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lapora	2 Laporan	45.000.000,00

																	n Keuangan Akhir Tahun SKPD			
1	06	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								30.670.000,00						31.200.000,00	
1	06	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	9 Laporan	100 %	30.670.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9 Laporan		31.200.000,00
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								648.950.000,00						801.100.000,00	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															

						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Paket	100 %	9.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.200.000,00
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Paket	100 %	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.500.000,00
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													

						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Paket	100 %	25.450.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	28.400.000,00
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Paket	100 %	220.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	255.000.000,00
1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Dokumen	100 %	90.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perund	12 Dokumen	95.000.000,00

																	ang-Undangan yang Disediakan		
1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Paket	100 %	10.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	15.000.000,00
1	06	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Laporan	100 %	38.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	42.000.000,00
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Laporan	100 %	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	350.000.000,00
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								900.000.000,00					1.011.000.000,00
1	06	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	2 Unit	15 Paket	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	2 Unit	90.000.000,00

																Disediakan		
1	06	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Unit	15 Paket	450.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	500.000.000,00
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel													
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	5 Paket	15 Paket	280.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	296.000.000,00

1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	10 Unit	15 Paket	120.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	125.000.000,00
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								899.500.000,00					1.005.600.000,00
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Laporan	100 %	9.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000,00
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Laporan	100 %	400.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komun	12 Laporan	480.000.000,00

							dan Listrik yang Disediakan									ikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
1	06	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Laporan	100 %	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	15.600.000,00
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	A poin	12 Laporan	100 %	480.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan	12 Laporan	500.000.000,00

							Umum Kantor yang Disediakan	pemerintah daerah	Semua Kel/Desa							Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2.550.000.000,00					1.602.000.000,00	
1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	6 Unit	60 Unit	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	155.000.000,00	

1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	20 Unit	60 Unit	380.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	422.000.000,00
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	10 Unit	60 Unit	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	25.000.000,00

1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	5 Unit	60 Unit	2.000.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1.000.000.000,00
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								8.452.640.000,00					9.526.050.000,00	
1	06	02	1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								40.000.000,00					43.000.000,00	
1	06	02	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang														
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpul	Jumlah penerbitan rekomendasi/izin UGB dan PUB lintas daerah kab/kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5,50 %	3 Dokumen	3 Rekomendasi	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin	3 Dokumen	43.000.000,00	

							an Uang atau Barang									Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			
1	06	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi								6.356.390.000,00					7.483.050.000,00
1	06	02	1.02	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi													
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Produktif	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Persentase PSKS kelembagaan dan perorangan yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5,50 %	120 Orang	100 %	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	120 Orang	85.000.000,00
1	06	02	1.02	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi													

						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Produktif	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	Persentase PSKS kelembagaan dan perorangan yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5,50 %	117 Orang	100 %	80.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	117 Orang	85.400.000,00
1	06	02	1.02	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi													
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Produktif	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Persentase PSKS kelembagaan dan perorangan yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5,50 %	20 Keluarga	100 %	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	20 Keluarga	55.000.000,00
1	06	02	1.02	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi													

						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Produktif	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Persentase PSKS kelembagaan dan perorangan yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5,50 %	100 Lembaga	100 %	6.151.390.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	100 Lembaga	7.257.650.000,00
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN								520.000.000,00					5.550.000.000,00
1	06	03	1.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal								520.000.000,00					5.550.000.000,00
1	06	03	1.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal													

						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pekerja Migran Bermasalah (PMB), Korban Perdagangan Orang (KPO) dan Korban Tindak Kekerasan (KTK) yang tertangani	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	300 Orang	100 %	520.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/ Kota	300 Orang	5.550.000.000,00
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								5.850.000.000,00					6.401.000.000,00		
1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti								1.065.000.000,00					1.201.000.000,00		
1	06	04	1.01	0004	Penyediaan Alat Bantu															

						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang diberikan layanan kesejahteraan sosial	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	300 Orang	400 Orang	765.000.000,00	-		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	300 Orang	821.000.000,00
1	06	04	1.01	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar													
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang diberikan layanan kesejahteraan sosial	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	1 Dokumen	400 Orang	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabil	1 Dokumen	380.000.000,00

							g Disabilitas TerlAntar									itasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar		
1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti								4.750.000.000,00					5.150.000.000,00
1	06	04	1.02	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti													
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	2 Dokumen	5000 Anak	4.750.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	2 Dokumen	5.150.000.000,00

1	06	04	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti								35.000.000,00					50.000.000,00
1	06	04	1.05	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA													
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Persentase PPKS yang tertangani	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	12 Dokumen	100 %	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AI	12 Dokumen	50.000.000,00

																DS dan NAPZA			
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								20.532.950.000,00					22.277.700.000,00
1	06	05	1.01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal								25.000.000,00					30.000.000,00
1	06	05	1.01	0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal													
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Produktif	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Jumlah pengangkatan anak oleh orang tua tunggal	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5,50 %	3 Orang	3 Jiwa	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku	3 Orang	30.000.000,00

																Kewenangan Provinsi			
1	06	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi								20.507.950.000,00					22.247.700.000,00	
1	06	05	1.02	0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Produktif	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Pesentase DTKS tervalidasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5,50 %	100 Keluarga	100 %	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	100 Keluarga	60.000.000,00	

																Kewenangan Provinsi			
1	06	05	1.02	0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Produktif	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/ Kota	Pesentase DTKS tervalidasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5,50 %	2500 Keluarga	100 %	14.554.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	2500 Keluarga		15.958.200.000,00
1	06	05	1.02	0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														

						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Produktif	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Pesentase DTKS tervalidasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5,50 %	300 Orang	100 %	5.903.950.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	300 Orang		6.229.500.000,00
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA								2.100.000.000,00						2.466.000.000,00
1	06	06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi								2.100.000.000,00						2.466.000.000,00
1	06	06	1.01	0001	Penyediaan Permakanan														
						Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1.250 Orang	100 %	450.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1	1.250 Orang		550.000.000,00

							Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi									Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi		
1	06	06	1.01	0002	Penyediaan Sandang													
						Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1250 Orang	100 %	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darura	1250 Orang	250.000.000,00

							Kewenangan Provinsi									t (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi			
1	06	06	1.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														
						Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1250 Unit	100 %	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	1250 Unit		360.000.000,00
1	06	06	1.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														

						Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1500 Orang	100 %	450.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	1500 Orang	556.000.000,00
1	06	06	1.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														
						Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1500 Orang	100 %	700.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial	1500 Orang	750.000.000,00

																Kewenangan Provinsi			
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN								680.000.000,00					780.000.000,00
1	06	07	1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi								680.000.000,00					780.000.000,00
1	06	07	1.01	0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi													
						Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN)/Makam Pahlawan Nasional (MPN)	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah TPM yang di tingkatkan pengelolaan sarana dan prasarana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Unit	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasion	1 Dokumen	350.000.000,00

																	al Provinsi		
1	06	07	1.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi														
						Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN)/Makam Pahlawan Nasional (MPN)	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah TPM yang di tingkatkan pengelolaan sarana dan prasarana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Makam	1 Unit	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Makam	180.000.000,00

1	06	07	1.01	0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi													
						Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN)/Makam Pahlawan Nasional (MPN)	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah TPM yang di tingkatkan pengelolaan sarana dan prasarana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Unit	230.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Laporan	250.000.000,00
					Panti Sosial Bina Remaja "Karya Mandiri"								2.796.550.000,00					3.514.500.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								2.796.550.000,00					3.514.500.000,00
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								2.796.550.000,00					3.514.500.000,00
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								666.550.000,00					751.500.000,00
1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								4.500.000,00					5.000.000,00
1	06	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													

						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00
1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								35.000.000,00					40.000.000,00
1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaa	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Dokumen	100 %	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Admini	1 Dokumen	40.000.000,00

							n Tugas ASN									strasi Pelaksanaan Tugas ASN			
1	06	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								7.000.000,00					7.500.000,00
1	06	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Laporan	100 %	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	7.500.000,00
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								53.750.000,00					65.500.000,00
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Paket	100 %	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penera	12 Paket	6.500.000,00

							Kantor yang Disediakan									ngan Bangunan Kantor yang Disediakan			
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Paket	100 %	9.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12.000.000,00
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Paket	100 %	5.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	7.000.000,00
1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Dokumen	100 %	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.000.000,00
1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Paket	100 %	12.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	15.000.000,00
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Cakupan pelayanan administrasi umum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	A poin	2 Laporan	100 %	17.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggar	2 Laporan	20.000.000,00

							dan Konsultasi SKPD	perangkat daerah	Semua Kel/Desa							aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								90.000.000,00					125.000.000,00
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel													
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	2 Paket	4 Unit	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	50.000.000,00
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	5 Unit	4 Unit	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	75.000.000,00
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								346.800.000,00					367.500.000,00
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													

						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Laporan	100 %	1.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000,00
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Laporan	100 %	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	80.000.000,00
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Laporan	100 %	275.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	285.000.000,00
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								129.500.000,00					141.000.000,00
1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	6 Unit	100 %	79.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelih	6 Unit	85.000.000,00

																ara dan Dibayarkan Pajaknya			
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	5 Unit	100 %	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	6.000.000,00
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Unit	100 %	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelih	1 Unit	50.000.000,00

																ara/Direhabilitasi			
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								2.130.000.000,00						2.763.000.000,00
1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti								2.130.000.000,00						2.763.000.000,00
1	06	04	1.02	0002	Penyediaan Makanan														
						Persentase PMKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam pant	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	60 Orang	60 Orang	1.533.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewen	60 Orang	2.533.000.000,00

																	angan Provinsi		
1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang														
						Persentase PMKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam pant	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	60 Orang	60 Orang	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewen	60 Orang	70.000.000,00

																angan Provinsi			
1	06	04	1.02	0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														
						Persentase PMKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam pant	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	60 Orang	60 Orang	34.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	60 Orang	40.000.000,00	
1	06	04	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														

						Persentase PMKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam pant	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	60 Orang	60 Orang	15.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	60 Orang	20.000.000,00
1	06	04	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
						Persentase PMKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam pant	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	60 Orang	60 Orang	400.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan	60 Orang	450.000.000,00

																Sosial Kewenangan Provinsi		
1	06	04	1.02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari													
						Persentase PMKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam pant	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	60 Orang	60 Orang	7.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	60 Orang	10.000.000,00
1	06	04	1.02	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga													
						Persentase PMKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam pant	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	60 Orang	60 Orang	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifi	60 Orang	30.000.000,00

							Kewenangan Provinsi									kasi Keluarga Kewenangan Provinsi		
1	06	04	1.02	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti													
						Persentase PMKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam pant	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	3 Dokumen	60 Orang	80.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	3 Dokumen	90.000.000,00
					Panti Sosial Karya Wanita "Mirah Adi"								2.559.000.000,00					2.886.500.000,00

1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								2.559.000.000,00					2.886.500.000,00
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								2.559.000.000,00					2.886.500.000,00
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								599.500.000,00					681.000.000,00
1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								4.500.000,00					5.000.000,00
1	06	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00
1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								40.000.000,00					45.000.000,00
1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													

						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Dokumen	100 %	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	45.000.000,00
1	06	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								7.000.000,00					7.500.000,00
1	06	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Laporan	100 %	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	7.500.000,00
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								50.500.000,00					57.000.000,00
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Paket	100 %	6.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	7.000.000,00
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Paket	100 %	9.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.000.000,00
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	A poin	12 Paket	100 %	5.000.000,00	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetaka n dan Pengga ndaan yang Disedia kan	12 Pa ket	6.500.000,00
1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	A poin	1 Dokum en	100 %	5.500.000,00	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)		Jumlah Dokum en Bahan Bacaan dan Peratur an Perund ang-Undan gan yang Disedia kan	1 Do ku me n	6.000.000,00
1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													

						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Paket	100 %	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	12 Paket	7.500.000,00
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	2 Laporan	100 %	17.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	20.000.000,00
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								80.000.000,00					115.000.000,00
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel														
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	A poin	2 Paket	4 undefined	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	50.000.000,00

									Semua Kel/Desa									
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	5 Unit	4 undefined	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	65.000.000,00
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								322.500.000,00					348.000.000,00
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Laporan	100 %	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000,00
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Laporan	100 %	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	45.000.000,00
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Laporan	100 %	280.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	300.000.000,00

1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								95.000.000,00					103.500.000,00
1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	5 Unit	100 %	55.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	60.000.000,00
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	5 Unit	100 %	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	5 Unit	5.500.000,00

																Dipelihara		
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Unit	100 %	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	38.000.000,00
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								1.959.500.000,00					2.205.500.000,00
1	06	04	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti								1.959.500.000,00					2.205.500.000,00
1	06	04	1.05	0001	Penyediaan Permakanan													

						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah PPKS (Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan korban tindak kekerasan) yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	50 Orang	120 Orang	1.314.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	120 Orang	1.450.000.000,00
1	06	04	1.05	0002	Penyediaan Sandang														

						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah PPKS (Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan korban tindak kekerasan) yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	50 Orang	120 Orang	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	120 Orang	70.000.000,00
1	06	04	1.05	0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses													
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah PPKS (Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan korban tindak kekerasan) yang diberikan pemenuhan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	50 Orang	120 Orang	15.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak	120 Orang	18.000.000,00

								kebutuhan dasar dalam panti								Huni Kewenangan Provinsi			
1	06	04	1.05	0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah PPKS (Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan korban tindak kekerasan) yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	50 Orang	120 Orang	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	120 Orang	60.000.000,00	
1	06	04	1.05	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														

						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah PPKS (Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan korban tindak kekerasan) yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	50 Orang	120 Orang	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	120 Orang	60.000.000,00
1	06	04	1.05	0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari													
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah PPKS (Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan korban tindak kekerasan) yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	50 Orang	120 Orang	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	120 Orang	5.500.000,00
1	06	04	1.05	0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar													

						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah PPKS (Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan korban tindak kekerasan) yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	50 Orang	120 Orang	360.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	120 Orang	390.000.000,00
1	06	04	1.05	0010	Pemulangan ke Daerah Asal													
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangka	Jumlah PPKS (Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan korban tindak kekerasan) yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	50 Orang	120 Orang	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	120 Orang	65.000.000,00

							n ke Daerah Asal									Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal		
1	06	04	1.05	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA													
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar	Jumlah PPKS (Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan korban tindak kekerasan) yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	3 Dokumen	100 Orang	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masala	3 Dokumen	87.000.000,00

							HIV/AIDS dan NAPZA									h Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA			
					Panti Sosial Lanjut Usia "Mandalika"								2.457.250.000,00					2.852.500.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								2.457.250.000,00					2.852.500.000,00
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								2.457.250.000,00					2.852.500.000,00
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								833.000.000,00					901.500.000,00
1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								4.500.000,00					5.000.000,00
1	06	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													

						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00
1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								70.000.000,00					75.000.000,00
1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaa	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Dokumen	100 %	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Admini	1 Dokumen	75.000.000,00

							n Tugas ASN									strasi Pelaksanaan Tugas ASN			
1	06	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								7.500.000,00					8.000.000,00	
1	06	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Laporan	100 %	7.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	8.000.000,00	
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								84.500.000,00					97.500.000,00	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Paket	100 %	9.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penera	12 Paket	10.000.000,00	

							Kantor yang Disediakan									ngan Bangunan Kantor yang Disediakan		
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Paket	100 %	9.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.000.000,00
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Paket	100 %	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6.000.000,00
1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Dokumen	100 %	3.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.000.000,00
1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Paket	100 %	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	7.500.000,00
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Cakupan pelayanan administrasi umum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	A poin	12 Laporan	100 %	50.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggar	12 Laporan	60.000.000,00

							dan Konsultasi SKPD	perangkat daerah	Semua Kel/Desa							aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								65.000.000,00					85.000.000,00	
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel														
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	2 Paket	4 Unit	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	65.000.000,00	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	0	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	20	4 Unit	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	20	20.000.000,00	
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								490.500.000,00					506.000.000,00	
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Laporan	100 %	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.500.000,00
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Laporan	100 %	120.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	124.000.000,00
1	06	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	3 Laporan	100 %	3.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	4.500.000,00
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Laporan	100 %	365.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	375.000.000,00
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								111.000.000,00					125.000.000,00

1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	6 Unit	100 %	71.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	75.000.000,00
1	06	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Unit	100 %	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 Unit	50.000.000,00

							Dipelihara/ Direhabilitasi									atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								1.624.250.000,00					1.951.000.000,00	
1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti								1.624.250.000,00					1.951.000.000,00	
1	06	04	1.03	0001	Penyediaan Permakanan														
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah lansia/jompo terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	100 Orang	100 Orang	1.230.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	100 Orang	1.500.000.000,00	

																Kewenangan Provinsi			
1	06	04	1.03	0002	Penyediaan Sandang														
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah lansia/jompo terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	100 Orang	100 Orang	90.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewen	100 Orang	100.000.000,00

																angan Provinsi			
1	06	04	1.03	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah lansia/jompo terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	100 Orang	100 Orang	105.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang	115.000.000,00
1	06	04	1.03	0004	Penyediaan Alat Bantu														

						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah lansia/jompo terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	5 Orang	100 Orang	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	5 Orang	30.000.000,00
1	06	04	1.03	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial													
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam	Jumlah lansia/jompo terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	100 Orang	100 Orang	90.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbek	100 Orang	105.000.000,00

							Panti Kewenangan Provinsi									alan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi			
1	06	04	1.03	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah lansia/jompo terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	100 Orang	100 Orang	36.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 Orang	40.000.000,00
1	06	04	1.03	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														

						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah lansia/jompo terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	100 Orang	100 Orang	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	100 Orang	3.000.000,00
1	06	04	1.03	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga													
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah lansia/jompo terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	100 Orang	100 Orang	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	100 Orang	30.000.000,00

1	06	04	1.03	0012	Pemulasaraan															
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah lansia/jompo terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	15 Orang	100 Orang	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	15 Orang		28.000.000,00
					Panti Sosial Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak "Sasambo Matupa"								1.513.000.000,00						1.691.000.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.513.000.000,00						1.691.000.000,00
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								1.513.000.000,00						1.691.000.000,00
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								603.000.000,00						691.000.000,00
1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								4.500.000,00						5.500.000,00
1	06	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokum	1 Dokumen		5.500.000,00

																	en Perubahan RKA-SKPD			
1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								95.000.000,00						100.000.000,00
1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Dokumen	100 %	95.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	100.000.000,00
1	06	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								7.000.000,00						8.500.000,00
1	06	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Laporan	100 %	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	8.500.000,00
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								54.500.000,00					61.500.000,00
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Paket	100 %	8.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	9.000.000,00
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													

						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Paket	100 %	9.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.000.000,00
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Paket	100 %	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	7.000.000,00
1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Dokumen	100 %	5.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perund	1 Dokumen	6.500.000,00

																ang-Undangan yang Disediakan		
1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Paket	100 %	8.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	9.000.000,00
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	2 Laporan	100 %	18.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	20.000.000,00

1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								55.000.000,00							65.000.000,00
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel															
						-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Paket	-	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket		45.000.000,00
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		20.000.000,00
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								292.000.000,00							339.000.000,00
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Laporan	100 %	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	12 Laporan		3.500.000,00

																Menyurat		
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	12 Laporan	100 %	73.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	83.000.000,00
1	06	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Laporan	100 %	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlen	1 Laporan	2.500.000,00

							yang Disediakan									gkapan Kantor yang Disedia kan			
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	A poin	320 Lapora n	100 %	215.000.000,00	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)		Jumlah Lapora n Penyed iaan Jasa Pelaya nan Umum Kantor yang Disedia kan	32 0 La po ra n	250.000.000,00
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								95.000.000,00					111.500.000,00	
1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	4 Unit	5 Unit	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	55.000.000,00
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	6.500.000,00
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Unit	5 Unit	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								910.000.000,00					1.000.000.000,00
1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti								910.000.000,00					1.000.000.000,00
1	06	04	1.02	0002	Penyediaan Makanan													
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	320 Orang	320 Orang	535.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan	320 Orang	575.000.000,00

							Kewenangan Provinsi									Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi			
1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang														
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	320 Orang	320 Orang	90.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewen	320 Orang	95.000.000,00

																	angan Provinsi		
1	06	04	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	320 Orang	320 Orang	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	320 Orang	35.000.000,00

1	06	04	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial													
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	320 Orang	320 Orang	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	320 Orang	50.000.000,00
1	06	04	1.02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar													
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	320 Orang	320 Orang	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Keseha	320 Orang	85.000.000,00

																	tan Dasar Kewenangan Provinsi		
1	06	04	1.02	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	320 Orang	320 Orang	65.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	320 Orang	75.000.000,00
1	06	04	1.02	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti														

						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	3 Dokumen	320 Orang	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	3 Dokumen	85.000.000,00
					Panti Sosial Asuhan Anak “Generasi Harapan ”								2.349.500.000,00					2.610.500.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								2.349.500.000,00					2.610.500.000,00
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								2.349.500.000,00					2.610.500.000,00
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								538.500.000,00					625.500.000,00
1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								4.500.000,00					5.000.000,00
1	06	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													

						Nilai SAKIP Lingkup OPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	A poin	1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00
1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								30.000.000,00					35.000.000,00
1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaa	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Admini	1 Dokumen	35.000.000,00

							n Tugas ASN									strasi Pelaksanaan Tugas ASN			
1	06	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								7.000.000,00					7.500.000,00
1	06	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
						-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	7.500.000,00
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								40.500.000,00					45.500.000,00
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	5.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penera	12 Paket	6.000.000,00

							Kantor yang Disediakan									ngan Bangunan Kantor yang Disediakan			
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	9.500.000,00	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetaka n dan Pengga ndaan yang Disedia kan	12 Pa ket	10.000.000,00
1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
						-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	-	12 Dokum en	-	1.500.000,00	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)		Jumlah Dokum en Bahan Bacaan dan Peratur an Perund ang-	12 Do ku me n	2.000.000,00

																Undangan yang Disediakan			
1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														
						-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	7.500.000,00
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Laporan	-	17.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	20.000.000,00

1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								65.000.000,00							80.000.000,00
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel															
						-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Paket	-	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket		60.000.000,00
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		20.000.000,00
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								301.500.000,00							352.000.000,00
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	12 Laporan		2.000.000,00

																Menyurat		
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	110.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	120.000.000,00
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	190.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	230.000.000,00

																Kantor yang Disediakan			
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								90.000.000,00					100.500.000,00
1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Unit	-	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	55.000.000,00
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

						-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Unit	-	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5.500.000,00
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.000.000,00
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								1.811.000.000,00						1.985.000.000,00
1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti								1.811.000.000,00						1.985.000.000,00
1	06	04	1.02	0001	Pengasuhan														

						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	80 Orang	100 Orang	95.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	80 Orang	98.000.000,00
1	06	04	1.02	0002	Penyediaan Makanan													
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	80 Orang	100 Orang	1.120.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi	80 Orang	1.250.000.000,00

																Minimal Kewenangan Provinsi			
1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang														
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	80 Orang	100 Orang	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewen	80 Orang	60.000.000,00

																angan Provinsi			
1	06	04	1.02	0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	80 Orang	100 Orang	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	80 Orang	45.000.000,00	
1	06	04	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														

						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	80 Orang	100 Orang	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	12.000.000,00
1	06	04	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	80 Orang	100 Orang	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan	80 Orang	115.000.000,00

																	Sosial Kewenangan Provinsi			
1	06	04	1.02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar															
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	80 Orang	100 Orang	320.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 Orang	325.000.000,00	
1	06	04	1.02	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti															

						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	12 Dokumen	100 Orang	76.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	12 Dokumen	80.000.000,00
					Panti Sosial Bina Laras "Mutmainnah"								2.467.800.000,00					2.675.200.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								2.467.800.000,00					2.675.200.000,00
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								2.467.800.000,00					2.675.200.000,00
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								797.800.000,00					858.200.000,00
1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								4.500.000,00					5.000.000,00
1	06	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													

						-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00
1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								95.000.000,00					100.000.000,00
1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaa	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	95.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Admini	12 Dokumen	100.000.000,00

							n Tugas ASN									strasi Pelaksanaan Tugas ASN			
1	06	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								7.000.000,00					8.000.000,00
1	06	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
						-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	8.000.000,00
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								50.300.000,00					58.200.000,00
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	8.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penera	12 Paket	8.700.000,00

							Kantor yang Disediakan									ngan Bangunan Kantor yang Disediakan		
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	9.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.000.000,00
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6.000.000,00
1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

						-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	1.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000,00
1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														
						-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12.000.000,00
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	-	2 Laporan	-	17.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggar	2 Laporan	20.000.000,00

							dan Konsultasi SKPD		Semua Kel/Desa							aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								50.000.000,00					65.000.000,00	
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel														
						-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Paket	-	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	65.000.000,00	
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								476.500.000,00					492.000.000,00	
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	110.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	120.000.000,00
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	365.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	370.000.000,00

1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								114.500.000,00							130.000.000,00
1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
						-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	7 Unit	-	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	80.000.000,00
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Unit	-	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	5 Unit	5.000.000,00

																Dipelihara			
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	45.000.000,00
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								1.670.000.000,00					1.817.000.000,00	
1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti								1.670.000.000,00					1.817.000.000,00	
1	06	04	1.01	0001	Penyediaan Permakanan														

						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang diberikan layanan kesejahteraan sosial	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	100 Orang	100 Orang	1.300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	1.400.000.000,00
1	06	04	1.01	0002	Penyediaan Sandang														

						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang diberikan layanan kesejahteraan sosial	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang	60.000.000,00
1	06	04	1.01	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses													
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang diberikan layanan kesejahteraan sosial	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	100 Orang	100 Orang	80.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni	100 Orang	90.000.000,00

																Kewenangan Provinsi			
1	06	04	1.01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang diberikan layanan kesejahteraan sosial	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	100 Orang	100 Orang	110.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 Orang	115.000.000,00	
1	06	04	1.01	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														

						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang diberikan layanan kesejahteraan sosial	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	100 Orang	100 Orang	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 Orang	40.000.000,00
1	06	04	1.01	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari													
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang diberikan layanan kesejahteraan sosial	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	100 Orang	100 Orang	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	100 Orang	12.000.000,00
1	06	04	1.01	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga													

						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang diberikan layanan kesejahteraan sosial	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	100 Orang	100 Orang	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	100 Orang	40.000.000,00
1	06	04	1.01	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar													
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang diberikan layanan kesejahteraan sosial	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	12 Dokumen	100 Orang	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar	12 Dokumen	60.000.000,00

																Penyandang Disabilitas TerlAntar			
					Panti Sosial Bina Karya "Madani"								2.184.050.000,00						2.454.300.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								2.184.050.000,00						2.454.300.000,00
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								2.184.050.000,00						2.454.300.000,00
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								706.800.000,00						768.550.000,00
1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								4.000.000,00						5.000.000,00
1	06	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
						-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordi	1 Dokumen	5.000.000,00

							Perubahan RKA-SKPD									nasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								35.000.000,00					45.000.000,00
1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	45.000.000,00
1	06	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								7.000.000,00					7.500.000,00
1	06	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													

						-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		7.500.000,00
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								46.000.000,00						54.250.000,00
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
						-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		6.700.000,00
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															

						-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	6.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	7.550.000,00
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.000.000,00
1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
						-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perund	1 Dokumen	5.000.000,00

																ang-Undangan yang Disediakan			
1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														
						-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.000.000,00
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Laporan	-	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	25.000.000,00

1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								50.000.000,00							65.000.000,00
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4 Unit	-	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		65.000.000,00
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								446.800.000,00							461.300.000,00
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	1.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		2.300.000,00
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	-	12 Laporan	-	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan		49.000.000,00

							Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Semua Kel/Desa							Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	400.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	410.000.000,00
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								118.000.000,00					130.500.000,00	
1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

						-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Unit	-	78.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	85.000.000,00
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4 Unit	-	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	5.500.000,00
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

						-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.000.000,00
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								1.477.250.000,00					1.685.750.000,00
1	06	04	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti								1.477.250.000,00					1.685.750.000,00
1	06	04	1.04	0001	Penyediaan Permakanan													
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi	Jumlah gepeng dan keluarga bermasalah sosial psikologis yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	50 Orang	100 Orang	821.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan	100 Orang	920.500.000,00

							Minimal Kewenangan Provinsi									Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi		
1	06	04	1.04	0002	Penyediaan Sandang														
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah gepeng dan keluarga bermasalah sosial psikologis yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	50 Orang	100 Orang	62.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewen	100 Orang	67.500.000,00

																angan Provinsi			
1	06	04	1.04	0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses														
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah gepeng dan keluarga bermasalah sosial psikologis yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	50 Orang	100 Orang	8.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang	9.750.000,00	
1	06	04	1.04	0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														

						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah gepeng dan keluarga bermasalah sosial psikologis yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	50 Orang	100 Orang	10.000.000,00	-		Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 Orang	11.500.000,00
1	06	04	1.04	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial													
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah gepeng dan keluarga bermasalah sosial psikologis yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	50 Orang	100 Orang	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan	100 Orang	65.000.000,00

																Sosial Kewenangan Provinsi		
1	06	04	1.04	0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari													
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah gepeng dan keluarga bermasalah sosial psikologis yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	50 Orang	100 Orang	5.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	100 Orang	6.500.000,00
1	06	04	1.04	0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar													
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah gepeng dan keluarga bermasalah sosial psikologis yang diberikan pemenuhan kebutuhan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	50 Orang	100 Orang	430.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Ketera	100 Orang	480.000.000,00

								dasar dalam panti								mpilan Dasar Kewenangan Provinsi			
1	06	04	1.04	0010	Pemulangan ke Daerah Asal														
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Jumlah gepeng dan keluarga bermasalah sosial psikologis yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	50 Orang	100 Orang	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	100 Orang	45.000.000,00	
1	06	04	1.04	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti														

						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah gepeng dan keluarga bermasalah sosial psikologis yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	3 Dokumen	75 Orang	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	3 Dokumen	80.000.000,00
					Panti Sosial Lanjut Usia "Meci Angi "								1.856.250.000,00					2.028.750.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.856.250.000,00					2.028.750.000,00
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								1.856.250.000,00					2.028.750.000,00
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								947.500.000,00					1.015.750.000,00
1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								4.000.000,00					5.000.000,00
1	06	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													

						-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00
1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								28.500.000,00					30.000.000,00
1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaa	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	28.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Admini	1 Dokumen	30.000.000,00

							n Tugas ASN									strasi Pelaksanaan Tugas ASN			
1	06	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								7.000.000,00					7.500.000,00
1	06	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
						-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	7.500.000,00
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								122.000.000,00					129.250.000,00
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	5.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penera	12 Paket	5.500.000,00

							Kantor yang Disediakan									ngan Bangunan Kantor yang Disediakan			
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.250.000,00	
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	8.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	9.000.000,00	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

						-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	2.000.000,00	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetaka n dan Pengga ndaan yang Disedia kan	12 Pa ket	2.500.000,00
1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
						-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	-	12 Dokum en	-	2.750.000,00	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)		Jumlah Dokum en Bahan Bacaan dan Peratur an Perund ang-Undan gan yang Disedia kan	12 Do ku me n	3.000.000,00
1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														

						-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	5.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	12 Paket	6.000.000,00
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	95.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100.000.000,00
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								64.000.000,00						80.000.000,00
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel														
						-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	-	2 Paket	-	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	60.000.000,00

									Semua Kel/Desa									
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	14.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.000.000,00
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								598.000.000,00					624.500.000,00
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.500.000,00
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	55.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	67.000.000,00
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	540.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	554.000.000,00

1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								124.000.000,00					139.500.000,00
1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
						-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	7 Unit	-	80.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	85.000.000,00
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Unit	-	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	5 Unit	4.500.000,00

																Dipelihara			
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								908.750.000,00						1.013.000.000,00
1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti								908.750.000,00						1.013.000.000,00
1	06	04	1.03	0001	Penyediaan Permakanan														

						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah lansia/jompo terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar	Kota Bima, Asakota, Jatiwangi	4,50 %	50 Orang	50 Orang	710.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50 Orang	770.000.000,00
1	06	04	1.03	0002	Penyediaan Sandang														

						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah lansia/jompo terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar	Kota Bima, Asakota, Jatiwangi	4,50 %	50 Orang	50 Orang	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	50 Orang	55.000.000,00
1	06	04	1.03	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses													
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah lansia/jompo terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	50 Orang	50 Orang	5.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni	50 Orang	6.500.000,00

																Kewenangan Provinsi			
1	06	04	1.03	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial														
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah lansia/jompo terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	50 Orang	50 Orang	52.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	50 Orang	58.000.000,00
1	06	04	1.03	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														

						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah lansia/jompo terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	50 Orang	50 Orang	55.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang	62.000.000,00
1	06	04	1.03	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari													
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah lansia/jompo terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	50 Orang	50 Orang	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	50 Orang	6.500.000,00
1	06	04	1.03	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga													

						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah lansia/jompo terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	50 Orang	50 Orang	25.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	50 Orang	35.000.000,00
1	06	04	1.03	0012	Pemulasaraan													
						Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah lansia/jompo terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,50 %	10 Orang	50 Orang	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	10 Orang	20.000.000,00
												TOTAL	**83.889.086.991,00**					**94.966.850.000,00**

BAB V PENUTUP

Pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak terlepas dan selalu mengacu pada Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diimplementasikan pada Rencana Kerja (RENJA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA-SKPD) yang merupakan sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan dan pengendalian pembangunan bidang kesejahteraan sosial Provinsi Nusa tenggara Barat.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025 merupakan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mencapai sasaran dan tujuannya dengan mengerahkan seluruh sumber daya dan potensi yang ada sebagai masukan (outcome) serta menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk produk perencanaan, pengendalian dan evaluasi, sehingga hasil pencapaian dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan laporan kinerja.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat dan kinerja pegawai yang hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mewujudkan visi dan misi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mataram, Maret 2024
Kepala Dinas Sosial
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dr. H. AHSANUL KHALIK, S.Sos.,M.H.
Pembina Utama Muda (IV/d)
NIP. 19701231 199803 1 069

2025

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Majapahit No. 09 Mataram Telp. 631585,
Fax. (0370) 622502 (Pusat) M A T A R A M
KODE POS : 83125 (Pusat) 83236 (Depo)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayahNya, sehingga Rencana Kerja (RENJA) tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan RENJA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Hal itu dimaksudkan sebagai pendukung kebijakan umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

RENJA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB yang merupakan dokumen rencana Kerja yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan pada tahun 2025, dapat dilaksanakan secara konsisten dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh jajaran aparatur, yang pada gilirannya memberikan manfaat bagi peningkatan pertumbuhan sumber daya manusia yang ditandai dengan semakin tumbuh dan berkembangnya minat dan kebiasaan membaca masyarakat serta kesadaran tentang pentingnya tata kelola dan tertib arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB.

Harapan Kami semoga dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2025 ini dapat memberikan informasi, gambaran bagi semua penentu kebijakan dan para pengambil keputusan untuk menentukan langkah kebijakan yang lebih baik dan dilaksanakan secara serius dan konsisten bagi percepatan Pembangunan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB.

Mataram, 2024
Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Nusa Tenggara Barat,

H. Amir, S.Pd., MM.
NIP. 19720802 199303 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …….. ii
DAFTAR ISI ……. iii
DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI NTB

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB ……... 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB..... 30

2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat..... 38

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2025 …….. 39

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ……. 53

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat …… 53

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat ……. 54

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI NTB …… 61

BAB V PENUTUP …… 75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	**Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat ……**	6
Tabel 2.1.2	**Capaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat ……**	9
Tabel 2.4.1	**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat ……**	40
Tabel 4.1	**Rumusan Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat ……**	62

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penetapan Rencana Kerja (Renja) suatu daerah merupakan tolok ukur atas keberhasilan dalam mencapai efisiensi dan efektivitas yang mampu mendorong kearah inovasi yang terencana dengan baik, sehingga mampu menunjang pilar program strategis yang dapat diimplementasikan dengan baik. Manajemen strategis membutuhkan sinergitas antar perencanaan strategis, antara lain perencanaan yang inovatif, perencanaan sumber daya, penganggaran, pengendalian program, serta pemantauan, pelaporan dan pengukuran kinerja.

Sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat memuat kebijakan, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tujuan, sasaran, tugas dan fungsi.

Pelaksanaan pembangunan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan (*Stakeholder*) memerlukan perencanaan pembangunan daerah, baik jangka panjang, menengah maupun pendek agar dapat berjalan pada jalur yang khusus yang cepat dan tepat. Berdasarkan hal tersebut, maka Ruang lingkup Rencana Kinerja (Renja) Daerah bagi setiap SKPD adalah Dokumen Perencanaan untuk jangka waktu tahunan sebagai agenda perencanaan pembangunan, karena menjadi bagian penting dari agenda pemerintahan yang dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan demikian substansi dari Rencana Kinerja (Renja) merupakan rencana kerja tahunan yang akan dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah didalam menyelenggarakan pembangunan didaerah, sesuai dengan penjabaran tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat prioritas dari setiap SKPD dalam kurun waktu yang direncanakan pada tahun berikutnya.

Rancangan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melalui proses pembahasan pada rapat forum kerja RKPD

dengan rangkaian rancangan Rencana Kerja (Renja) melalui penyelarasan, penajaman, optimalisasi target kinerja yang terdiri dari program, kegiatan dan sub kegiatan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2025 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan. Arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan oleh Negara;
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6291);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pengalihan Arsip ke Mikrofilm;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
11. PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

12. PP Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593, Tambahan Lembahan Negara Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6667);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pedomen Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah;
25. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016, tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Pusat Pemerintahan Bidang Kearsipan;

26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2021 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2021 Nomor 7);
31. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggat 15 Februari 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan dokumen yang menjadi dasar perumusan program pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi. Sedangkan dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, maka tahapan dan jadwal pelaksanaan program yang dilengkapi jumlah pagu indikatif berdasarkan prakiraan maju dan sumber pendanaannya untuk mencapai target dan sasaran yang ditetapkan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025, yaitu:

1) Menguraikan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
2) Sebagai pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025;
3) Dokumen Renja digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi program kegiatan tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Menyajikan Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi NTB Tahun 2025

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Rencana Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI NTB

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB

Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Tabel. 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2023
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (*outcome*), Kegiatan (*output*) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Disperpusip Tahun 2022)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Disperpusip s/d Tahun 2023	
						Target Renja (Tahun 2023)		Realisasi Renja (Tahun 2023)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2.23.2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**													
2.23.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**BB**	**Nilai**		**BB**	**Nilai**	**BB**	**Nilai**	**BB**	**BB**	**Nilai**		
2.23.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi**	**10**	**Dokumen**		**10**	**Dokumen**	**10**	**Dokumen**	**1**	**10**	**Dokumen**		
2.23.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				1	Dokumen	1	Dokumen	1	1	Dokumen		
2.23.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen				1	Dokumen	1	Dokumen	1	1	Dokumen		
2.23.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen				1	Dokumen	1	Dokumen	1	1	Dokumen		
2.23.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen				1	Dokumen	1	Dokumen	1	1	Dokumen		
2.23.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen				1	Dokumen	1	Dokumen	1	1	Dokumen		
2.23.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen				5	Dokumen	5	Dokumen	1	5	Dokumen		
2.23.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan Keuangan**				**100**	**%**	**100**	**%**	**1**	**100**	**%**		
2.23.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN				107	Orang	107	Orang	1	107	Orang		
2.23.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan				4	Orang	4	Orang	1	4	Orang		
2.23.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan Keuangan				12	Bulan	12	Bulan	1	12	Bulan		
2.23.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan				2	Laporan	2	Laporan	1	2	Laporan		
2.23.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan				1	Laporan	1	Laporan	1	1	Laporan		
2.23.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan				1	Laporan	1	Laporan	1	1	Laporan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (*outcome*), Kegiatan (*output*) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Disperpusip Tahun 2022)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Disperpusip s/d Tahun 2023	
						Target Renja (Tahun 2023)		Realisasi Renja (Tahun 2023)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.23.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan				18	Laporan	18	Laporan	1	18	Laporan		
2.23.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan				2	Laporan	2	Laporan	1	2	Laporan		
2.23.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**100**	**%**		**100**	**%**	**100**	**%**	**1**	**100**	**%**		
2.23.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen				1	Dokumen	1	Dokumen	1	1	Dokumen		
2.23.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan				2	Laporan	2	Laporan	1	2	Laporan		
2.23.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan				1	Laporan	1	Laporan	1	1	Laporan		
2.23.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan				1	Laporan	1	Laporan	1	1	Laporan		
2.23.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pendapatan Perangkat Daerah**	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi	Jumlah Laporan				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (Sub kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)	Jumlah Laporan				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah (Sub kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)	Jumlah Laporan				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah (Sub kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)	Jumlah Laporan				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan				-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (*outcome*), Kegiatan (*output*) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Disperpusip Tahun 2022)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Disperpusip s/d Tahun 2023	
						Target Renja (Tahun 2023)		Realisasi Renja (Tahun 2023)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.23.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Dokumen Kepegawaian**	**100**	**%**		**100**	**%**	**100**	**%**	**1**	**100**	**%**		
2.23.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah ASN				107	Orang	107	Orang	1	107	Orang		
2.23.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen				2	Dokumen	2	Dokumen	1	2	Dokumen		
2.23.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah ASN				107	Orang	107	Orang	1	107	Orang		
2.23.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN				107	Orang	107	Orang	1	107	Orang		
2.23.01.1.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah ASN				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah ASN				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN				107	Orang	107	Orang	1	107	Orang		
2.23.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100**	**%**		**100**	**%**	**100**	**%**	**1**	**100**	**%**		
2.23.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik				11	Jenis	11	Jenis	1	11	Jenis		
2.23.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35	Jenis	35	Jenis	1	35	Jenis		
2.23.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik				30	Jenis	30	Jenis	1	30	Jenis		
2.23.01.1.06.05	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan				2	Jenis	2	Jenis	1	2	Jenis		
2.23.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan				130	Eksemplar	130	Eksemplar	1	130	Eksemplar		
2.23.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu				700	Orang	700	Orang		700	Orang		
2.23.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi				30	Laporan	30	Laporan	1	30	Laporan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (*outcome*), Kegiatan (*output*) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Disperpusip Tahun 2022)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Disperpusip s/d Tahun 2023	
						Target Renja (Tahun 2023)		Realisasi Renja (Tahun 2023)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.23.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang tersedia				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Data				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100**	**%**		**100**	**%**	**100**	**%**	**1**	**100**	**%**		
2.23.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Alat				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Kendaraan				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin				7	Jenis	7	Jenis	1	7	Jenis		
2.23.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.07.08	Pengadaan Aset yang Tak Berwujud	Jumlah Aset				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Sarana dan Prasarana				1	Jenis	1	Jenis	1	1	Jenis		
2.23.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Sarana dan Prasarana				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Umum**	**100**	**%**		**100**	**%**	**100**	**%**	**1**	**100**	**%**		
2.23.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Surat				2	Jenis	2	Jenis	1	2	Jenis		
2.23.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Internet				4	Jenis	4	Jenis	1	4	Jenis		
2.23.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi				24	Orang	24	Orang	1	24	Orang		
2.23.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100**	**%**		**100**	**%**	**100**	**%**	**1**	**100**	**%**		
2.23.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas				7	Unit	7	Unit	1	7	Unit		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (*outcome*), Kegiatan (*output*) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Disperpusip Tahun 2022)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Disperpusip s/d Tahun 2023	
						Target Renja (Tahun 2023)		Realisasi Renja (Tahun 2023)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.23.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas				41	Unit	41	Unit	1	41	Unit		
2.23.01.1.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Jasa Pemeliharaan				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat	Jumlah Jasa Pemeliharaan				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Sarana				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				6	Jenis	6	Jenis	1	6	Jenis		
2.23.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor				2	Gedung	2	Gedung	1	2	Gedung		
2.23.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Bangunan yang terpelihara				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor				1	Gedung	1	Gedung	1	1	Gedung		
2.23.01.1.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah Pemeliharaan Tanah				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.02	**Program Pembinaan Perpustakaan**	**Persentase Peningkatan Jumlah Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	**100**	**%**		**100**	**%**	**100**	**%**	**1**	**100**	**%**		
2.23.02.1.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan**				**75**	**Perpustakaan**	**75**	**Perpustakaan**	**1**	**100**	**Perpustakaan**		
2.23.02.1.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service				75,000	Orang	75,000	Orang	1	80.000	Orang		
2.23.02.1.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya				10	Perpustakaan	10	Perpustakaan	1	10	Perpustakaan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (*outcome*), Kegiatan (*output*) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Disperpusip Tahun 2022)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Disperpusip s/d Tahun 2023	
						Target Renja (Tahun 2023)		Realisasi Renja (Tahun 2023)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.23.02.1.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.02.1.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				150	Orang	150	Orang	1	150	Orang		
2.23.02.1.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan khusus yang Dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.02.1.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.02.1.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.02.1.01.08	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.02.1.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				2.000	Eksemplar	2.000	Eksemplar	1	2.000	Eksemplar		
2.23.02.1.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi				10	Dokumen	10	Dokumen	1	10	Dokumen		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (*outcome*), Kegiatan (*output*) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Disperpusip Tahun 2022)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Disperpusip s/d Tahun 2023	
						Target Renja (Tahun 2023)		Realisasi Renja (Tahun 2023)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.23.02.1.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca**	**8**	**Kegiatan**		**8**	**Kegiatan**	**8**	**Kegiatan**	**1**	**10**	**Kegiatan**		
2.23.02.1.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus				10	Lokus	10	Lokus	1	10	Lokus		
2.23.02.1.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di TempatTempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				1	Perpustakaan	1	Perpustakaan	1	-	-	-	-
2.23.02.1.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.02.1.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan				12	Perpustakaan	12	Perpustakaan	1	12	Perpustakaan		
2.23.02.1.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.03	**Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**	**Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah**	**100**	**%**		**100**	**%**	**100**	**%**	**1**	**100**	**%**		
2.23.03.1.01	**Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi**	**Jumlah Pengelolaan Karya Cetak Karya Rekam**				**500**	**Eksemplar**	**500**	**Eksemplar**	**1**	**550**	**Eksemplar**		
2.23.03.1.01.01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR				500	Eksemplar	500	Eksemplar	1	550	Eksemplar		
2.23.03.1.01.02	Pemberian Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (*outcome*), Kegiatan (*output*) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Disperpusip Tahun 2021)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022					Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Disperpusip s/d Tahun 2023	
						Target Renja (Tahun 2022)		Realisasi Renja (Tahun 2022)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.23.03.1.02	**Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah**	**Jumlah Pengelolaan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi**				**550**	**Eksemplar**	**550**	**Eksemplar**	**1**	**600**	**Eksemplar**		
2.23.03.1.02.01	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan				550	Entry	550	Entry	1	600	Entry		
2.23.03.1.02.02	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan				10	Naskah	10	Naskah	1	10	Naskah		
2.23.03.1.03	**Pelestraian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi**	**Jumlah Pengelolaan dan Pelestarian Naskah Kuno Daerah**				**10**	**Eksemplar**	**10**	**Eksemplar**	**1**	**10**	**Eksemplar**		
2.23.03.1.03.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno				10	Orang	10	Orang	1	10	Orang		
2.23.03.1.03.02	Pengembangan Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				10	Eksemplar	10	Eksemplar	1	10	Eksemplar		
2.23.03.1.04	**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Daerah Provinsi yang Tersedia**				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.23.03.1.04.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.03.1.04.02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi				-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (*outcome*), Kegiatan (*output*) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Disperpusip Tahun 2021)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022					Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Disperpusip s/d Tahun 2023	
						Target Renja (Tahun 2022)		Realisasi Renja (Tahun 2022)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.24.02	**Program Pengelolaan Arsip**	**Persentase Peningkatan Jumlah Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis**	**100**	**%**		**100**	**%**	**100**	**%**	**1**	**100**	**%**		
2.24.02.1.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	**Jumlah Pengolahan Arsip Dinamis**				**20.000**	**Berkas**	**20.000**	**Berkas**	**1**	**20.000**	**Berkas**		
2.24.02.1.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptaan dan Digunakan				10.000	Berkas	10.000	Berkas	1	10.000	Berkas		
2.24.02.1.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				10.000	Berkas	10.000	Berkas	1	10.000	Berkas		
2.24.02.1.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.24.02.1.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**	**Jumlah Arsip Statis yang Terselamatkan dan Dilestarikan**				**7.000**	**Arsip**	**7.000**	**Arsip**	**1**	**8.000**	**Arsip**		
2.24.02.1.02.01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.24.02.1.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses				5.000	Arsip	5.000	Arsip	1	6.000	Arsip		
2.24.02.1.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**	**Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional**				**150**	**Pengguna**	**150**	**Pengguna**	**1**	**150**	**Pengguna**		
2.24.02.1.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Prov Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN				150	Pengguna	150	Pengguna	1	150	Pengguna		
2.24.02.1.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi				5	Laporan	5	Laporan	1	5	Laporan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (*outcome*), Kegiatan (*output*) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Disperpusip Tahun 2021)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022					Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Disperpusip s/d Tahun 2023	
						Target Renja (Tahun 2022)		Realisasi Renja (Tahun 2022)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.24.03	**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**Persentase Peningkatan Jumlah Arsip yang Terselamatkan**	**100**	**%**		**100**	**%**	**100**	**%**	**1**	**100**	**%**		
2.24.03.1.01	**Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun**	**Jumlah Arsip yang Di Nilai**				**10,000**	**Arsip**	**10,000**	**Arsip**	**1**	**10,000**	**Arsip**		
2.24.03.1.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				10,000	Arsip	10,000	Arsip	1	10,000	Arsip		
2.24.03.1.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.24.03.1.02	**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi**	**Jumlah Arsip Daerah Provinsi yang Terselamatkan**				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.24.03.1.02.01	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.24.03.1.02.02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.24.03.1.03	**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibuburkan dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Arsip Daerah Provinsi yang Terselamatkan**				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.24.03.1.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.24.03.1.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Arsip Daerah yang di nilai				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.24.03.1.03.03	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Terselamatkan				-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (*outcome*), Kegiatan (*output*) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Disperpusip Tahun 2021)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022					Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Disperpusip s/d Tahun 2023	
						Target Renja (Tahun 2022)		Realisasi Renja (Tahun 2022)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.24.03.1.04	**Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi**	**Jumlah Arsip Digital yang dilayankan**				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.24.03.1.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Arsip yang dinilai dan ditetapkan keabsahannya				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.24.03.1.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Arsip Digital yang memiliki Keabsahan Arsip				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.24.03.1.05	**Pencarian Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan Hilang**	**Jumlah Arsip Statis yang Dilestarikan**				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.24.03.1.05.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Arsip Statis yang Dinilai				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.24.03.1.05.02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Arsip Digital yang dinilai				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.24.03.1.05.03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Arsip yang terdata				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.24.04	**Program Perizinan Penggunaan Arsip**	**Persentase Peningkatan Jumlah Arsip yang Dilayankan**	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.24.04.1.01	**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi**	**Jumlah Arsip Daerah Provinsi yang dilayankan**				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.24.04.1.01.01	Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Arsip yang Memiliki SOP				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.24.04.1.01.02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Arsip yang dilayankan				-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023

Dalam penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2023 yang berdasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB.

Tabel 2.1.1.1
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2023
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	
				Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Literasi Membaca Masyarakat	Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi NTB	Nilai	68	66,32
2.	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang Tertib	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib	%	40	40,81

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai urusan wajib non pelayanan dasar bidang perpustakaan dan kearsipan, maka setiap sasaran strategis dan indikator strategis tersebut diatas ditunjang oleh program dan kegiatan. Adapun program strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB untuk mencapai sasaran strategis tersebut diatas adalah sebagai berikut:

a. Sasaran Strategis 1 adalah Meningkatnya Literasi Membaca Masyarakat

Capaian atas target sasaran strategis tersebut berdasarkan data dari Perpustakaan Nasional R.I., hal tersebut didasarkan pada Indikator Pembentuk Indeks yang terdiri dari 7 komponen Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) yang termuat di dalam Program Pembinaan Perpustakaan dan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB. Adapun 7 komponen tersebut antara lain: Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari, Jumlah Perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosial dan Anggota Perpustakaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka target capaian sasaran strategis Meningkatnya Literasi Membaca Masyarakat di tahun 2023 adalah 68 dengan satuan Nilai, capaian atas target

tersebut bersumber dari data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Perpustakaan Nasional R.I.

Hasil IPLM per Kab/Kota provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 seperti yang tersaji pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.1.1.2 Rekapitulasi UPLM per Kab/Kota
Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023

Kab./Kota	UPLM1	UPLM2	UPLM3	UPLM4	UPLM5	UPLM6	UPLM7	SKOR IPLM
Kab. Lombok Barat	0,4207	0,1980	0,3460	0,0108	1,0000	0,2682	1,0000	46,34
Kab. Lombok Tengah	0,2390	0,0444	0,4847	0,0336	0,1339	1,0000	1,0000	41,94
Kab. Lombok Timur	0,2866	0,1398	0,4830	0,0328	1,0000	0,1661	1,0000	44,40
Kab. Sumbawa	0,4498	0,3745	0,2890	0,2257	0,3920	1,0000	1,0000	53,30
Kab. Dompu	0,2621	0,1394	0,0834	0,9231	1,0000	0,3722	1,0000	54,00
Kab. Bima	0,3365	0,2053	0,1184	0,0068	1,0000	0,2169	1,0000	41,20
Kab. Sumbawa Barat	0,5034	0,3885	1,0000	0,0501	1,0000	1,0000	1,0000	70,60
Kab. Lombok Utara	0,3349	0,1167	1,0000	0,0614	0,7712	1,0000	1,0000	61,20
Kota Mataram	0,8499	0,5105	1,0000	0,0325	0,4640	1,0000	1,0000	69,38
Kota Bima	0,5488	0,0673	1,0000	0,0740	0,8933	1,0000	1,0000	65,48
Nusa Tenggara Barat	**0,3554**	**0,1971**	**1,0000**	**0,0898**	**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	**66,32**

Berdasarkan tabel di atas pencapaian IPLM Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 66,32 dan masuk dalam kategori Sedang. Tiga Kab./Kota dengan pencapaian IPLM tertinggi Kab. Sumbawa Barat 70,60 Kota Mataram 69,38; dan Kota Bima 65,48. Sedangkan tiga Kab./Kota dengan pencapaian IPLM terendah yaitu Kab. Bima 41,20; Kab. Lombok Tengah 41,94; dan Kab. Lombok Timur 44,40.

Berikut sajian rincian data nilai IPLM Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023 beserta intepretasinya.

Tabel 2.1.1.3 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023

Jumlah Penduduk (BPS 2022)	**5.473.700**
Jumlah Civitas Sekolah (BPS 2022)	**1.290.235**
Jumlah Civitas Akademika (BPS 2022)	**151.389**
Jumlah Kelembagaan (BPS 2022)	**9.079**

NO.	INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN		NILAI	INTERPRETASI
INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT		**:**	**66,32**	**Sedang**
1.	Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)	:	0,3554	Pencapaian layanan perpustakaan sebesar 36 persen dari standar
2.	Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (UPLM2)	:	0,1971	Pencapaian koleksi perpustakaan sebesar 20 persen dari standar
3.	Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)	:	1,000	Pencapaian tenaga perpustakaan sebesar 100 persen dari standar
4.	Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari (UPLM4)	:	0,0898	Pencapaian tingkat kunjungan masyarakat sebesar 9 persen dari standar
5.	Perpustakaan yang dibina Sesuai SNP (UPLM5)	:	1,000	Pencapaian perpustakaan yang dibina sesuai SNP sebesar 100 persen dari standar
6.	Keterlibatan Masyarakat Dalam Sosialisasi Perpustakaan (UPLM6)	:	1,000	Pencapaian keterlibatan masyarakat sebesar 100 persen dari standar
7.	Anggota Perpustakaan (UPLM7)	:	1,000	Pencapaian jumlah anggota perpustakaan sebesar 100 persen dari standar
Keterangan Standar: UPLM1: Jumlah kelembagaan UPLM2: 2 x jumlah penduduk UPLM3: 1 tenaga perpustakaan melayani 2500 penduduk UPLM4: 2% dari jumlah penduduk				UPLM5: 22,39% dari jumlah perpustakaan UPLM6: 3% dari jumlah penduduk UPLM7: 2% dari jumlah penduduk

NO.	INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN		NILAI	INTERPRETASI
1.	**Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)**			
	Jumlah perpustakaan	**:**	**3.264**	
	a. Rasio ketersediaan perpustakaan umum	:	0,00004	Terdapat 5 perpustakaan per 100.000 penduduk
	b. Rasio ketersediaan perpustakaan sekolah	:	0,00225	Terdapat 226 perpustakaan per 100.000 civitas sekolah
	c. Rasio ketersediaan perpustakaan Perguruan Tinggi	:	0,00051	Terdapat 51 perpustakaan per 100.000 civitas akademika
	d. Kekurangan perpustakaan untuk memenuhi standar	:	5.852	Kekurangan perpustakaan sebanyak 5.852 unit
2.	**Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (UPLM2)**			
	Jumlah koleksi perpustakaan	**:**	**2.157.509**	
	a. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan	:	1 : 3	Setiap 1 koleksi dapat diakses oleh 3 penduduk
	b. Kekurangan koleksi perpustakaan untuk memenuhi standar	:	8.789.891	Kekurangan koleksi sebanyak 8.789.891 judul
3.	**Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)**			
	Jumlah tenaga perpustakaan	**:**	**3.341**	
	a. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan	:	1 : 1.639	Setiap 1 pustakawan harus melayani 1.639 penduduk
	b. Kekurangan tenaga perpustakaan untuk memenuhi standar	:	0	Jumlah tenaga perpustakaan sudah memenuhi standar dan perlu dipertahankan

NO.	INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN		NILAI	INTERPRETASI
4.	**Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari (UPLM4)**			
	Jumlah kunjungan masyarakat /hari	**:**	**9.829**	
	a. Persentase kunjungan masyarakat	:	0,18%	Terdapat 5 perpustakaan per 100.000 penduduk
	b. Kekurangan kunjungan masyarakat per hari untuk memenuhi standar	:	99,645	Terdapat 226 perpustakaan per 100.000 civitas sekolah
5.	**Perpustakaan yang dibina Sesuai SNP (UPLM5)**			
	Jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP	**:**	**1.404**	
	a. Persentase perpustakaan yang dibina sesuai SNP	:	43,51%	Terdapat 43, 51 persen perpustakaan yang dibina sesuai SNP
	b. Kekurangan perpustakaan yang dibina sesuai SNP untuk memenuhi standar	:	0	Jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP sudah memenuhi standar dan perlu dipertahankan
6.	**Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan (UPLM6)**			
	Jumlah keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan	**:**	**235.454**	
	a. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi dan pemanfaatan perpustakaan	:	4,30%	Terdapat 4,3 persen masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi perpustakaan
	b. Kekurangan masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi perpustakaan untuk memenuhi standar	:	0	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi perpustakaan sudah memenuhi standar dan perlu dipertahankan
7.	**Anggota Perpustakaan (UPLM7)**			
	Jumlah anggota perpustakaan	**:**	**934.188**	
	a. Persentase anggota perpustakaan	:	17,07%	Terdapat 17,07 persen masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan
	b. Kekurangan anggota perpustakaan untuk memenuhi standar	:	0	Jumlah anggota perpustakaan sudah memenuhi standar dan perlu dipertahankan

Sebagaimana dijelaskan diatas, berikut Analisa penurunan IPLM tahun 2023 untuk wilayah Provinsi NTB, sebagai berikut:

1. Standarisasi penilaian menagalami perubahan rentan tahun 2020-2021 dengan tahun 2022-2023. Penilaian IPLM sebelumnya basis dan formulasi data yang digunakan berbeda maka akan memunculkan potensi perbedaan hasil analisis, karena Komponen IPLM terdiri dari unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan Aspek Masyarakat (AM). Dalam pengumpulan data IPLM ini dibutuhkan normalisasi karena data yang dihimpun memiliki unit pengukuran yang

berbeda. “Pada data IPLM tahun ini metode normalisasi yang digunakan adalah metode min-max (minimum-maximum);

2. Dukungan pemerintah daerah lain terhadap pelaksanaan pembangunan IPLM berbanding terbalik atau jauh dari yang Pemerintah Daerah di NTB lakukan;
3. Data yang disajikan oleh Kab/kota berdasarkan pengamatan ada beberapa perbedaan persepsi dan keakuratan data yang disajikan seperti: data jumlah perpustakaan atau data perpustakaan ber SNP; dan
4. Keterbatasan koleksi di provinsi NTB cukup kurang, baik koleksi buku fisik atau koleksi Buku digital, secara nasional provinsi NTB peringkat 10 terbawah atas ketersedian koleksi diseluruh provinsi di Indonesia.

b. Sasaran Strategis 2 adalah Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang Tertib

Sasaran strategis ke-2 (dua) Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang Tertib dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib, capaian kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB tahun 2023 adalah Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara tertib. Target capaian kinerja sebesar 40% atau 18 Perangkat Daerah yang telah mengelola arsip secara tertib di Tahun 2023 dengan realisasi 40,81% atau 20 Perangkat Daerah, data atas pencapaian tersebut bersumber dari Bidang Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan dan Bidang Perlindungan, Penyelamatan dan Pelayanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2023.

2.1.2 Akuntabilitas Keuangan/Capaian Serapan Anggaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 99 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahu Anggaran 2023. Belanja anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB semula dianggarkan Rp. 15.745.879.435 menjadi Rp. 15.405.979.435 berkurang sebesar 2,16% atau (Rp. 339.900.000). Perubahan tersebut adalah penyesuaian komponen belanja operasional dan non operasional pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Berikut adalah uraian perubahan anggaran belanja APBD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023: 1. Belanja Operasional, mengalami pengurangan anggaran semula sebesar Rp. 14.979.190.885 menjadi Rp. 14.669.290.885 atau 2% (berkurang) sebesar (Rp. 309.900.000). Komponen yang mengalami

perubahan tersebut antara lain: a) Belanja Pegawai mengalami perubahan anggaran (berkurang) semula mendapatkan anggaran sebesar Rp. 11.989.860.754 menjadi sebesar Rp. 11.669.770.754 berkurang sebesar 2,67% atau (Rp. 320.090.000); b) Belanja Barang dan Jasa, mengalami perubahan anggaran (bertambah) semula Rp. 2.989.330.131 menjadi Rp. 2.999.520.131 dengan persentase penambahan sebesar 0,34% atau sebesar (Rp. 10.190.000). Selanjutnya untuk Belanja Modal mengalami perubahan anggaran (berkurang), semula pagu anggaran Rp. 766.688.550 menjadi Rp. 736.688.550 dengan persentase pengurangan sebesar 4% atau berkurang sebesar (Rp. 30.000.000).

Berikut adalah Belanja Operasional dan Belanja Modal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan rincian dan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023:

Tabel 2.1.2
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2023
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kode	OPD/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Output	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2023			Sisa Anggaran (Rp.)
				Kinerja	Anggaran (Rp.)	Kinerja	Anggaran (Rp.)	Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**100**	**15,405,979,435**	**100**	**14,017,165,752**	**96**	**1,197,012,420**
2.23.2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**			**100**	**15,208,290,235**	**100**	**13,839,052,406**	**96**	**1,197,012,420**
2.23.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**14,225,847,824**	**100**	**12,918,925,295**	**92**	**1,131,823,820**
2.23.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi**	**Dokumen**	**10**	**128,315,200**	**10**	**119,675,200**	**99,62**	**400,000**
2.23.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	44,347,500	1	35,707,500	100	0
2.23.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	19,954,500	1	19,954,500	100	0
2.23.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	20,144,000	1	20,144,000	100	0
2.23.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	10,077,500	1	10,077,500	100	0
2.23.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	5,742,000	1	5,742,000	100	0
2.23.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	5	2,611,700	5	2,611,700	99	400,000
2.23.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	-	-	25,438,000	-	25,438,000	-	-
2.23.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan Keuangan**	**%**	**100**	**11,676,070,354**	**100**	**10,434,699,806**	**91.65**	**1,018,494,782**
2.23.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	Orang	107	11,626,010,754	107	10,386,660,206	91.56	1,018,347,382
2.23.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	Orang	4	23,960,000	4	21,940,000	100	0
2.23.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaa n Keuangan	Bulan	12	9,045,000	12	9,045,000	99.48	47,000
2.23.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	2	6,001,000	2	6,001,000	100	0
2.23.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	1	11,053,600	1	11,053,500	100	0
2.23.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan	Laporan	1	886,100	1	786,100	88.71	100,000
2.23.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	18	3,731,400	18	3,731,000	99.99	400
2.23.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan	Laporan	2	683,900	2	683,900	100	0

Kode	OPD/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Output	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2023			Sisa Anggaran (Rp.)
				Kinerja	Anggaran (Rp.)	Kinerja	Anggaran (Rp.)	Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**%**	**100**	**20,975,000**	**100**	**20,975,000**	**100**	**0**
2.23.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	160,400	1	160,400	100	0
2.23.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	2	785,000	2	785,000	100	0
2.23.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	1	127,400	1	127,400	100	0
2.23.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	1	20,975,000	1	20,975,000	100	0
2.23.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pendapatan Perangkat Daerah**	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi	Jumlah Laporan	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (Sub kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)	Jumlah Laporan	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah (Sub kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)	Jumlah Laporan	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah (Sub kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)	Jumlah Laporan	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Dokumen Kepegawaian**	**%**	**100**	**10,800,000**	**100**	**9,000,000**	**100**	**0**
2.23.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah ASN	Orang	107	10,800,000	107	9,000,000	100	0
2.23.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen	Dokumen	2	6,731,000	2	6,731,000	100	0

Kode	OPD/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Output	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2023			Sisa Anggaran (Rp.)
				Kinerja	Anggaran (Rp.)	Kinerja	Anggaran (Rp.)	Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah ASN	Orang	107	583,000	107	583,000	100	0
2.23.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN	Orang	107	408,900	107	408,900	100	0
2.23.01.1.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah ASN	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah ASN	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN	Orang	107	215,600	107	215,600	100	0
2.23.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**%**	**100**	**297,208,100**	**100**	**293,995,792**	**99.70**	**510,885**
2.23.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik	Jenis	11	22,131,000	11	22,128,000	99.99	100
2.23.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	35	49,512,500	35	49,511,500	99.99	500
2.23.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik	Jenis	30	23,634,600	30	23,486,900	99.97	300
2.23.01.1.06.05	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan	Jenis	2	19,000,000	2	17,980,400	99.87	15,500
2.23.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan	Eks	130	10,460,000	130	9,210,000	95.63	315,000
2.23.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	Orang	700	18,970,000	700	18,833,250	99.45	102,500
2.23.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	30	153,500,000	30	152,845,742	99.92	76,985
2.23.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang tersedia	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Data	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**%**	**100**	**539,254,550**	**100**	**505,032,000**	**91.40**	**6,145,000**
2.23.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas	-	-	-	-	-	-	-

Kode	OPD/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Output	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2023			Sisa Anggaran (Rp.)
				Kinerja	Anggaran (Rp.)	Kinerja	Anggaran (Rp.)	Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Alat	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Kendaraan	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	-	-	129,165,400	-	120,981,000	-	-
2.23.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	Jenis	7	410,089,150	7	384,021,000	91.40	6,145,000
2.23.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.07.08	Pengadaan Aset yang Tak Berwujud	Jumlah Aset	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor	Jenis	1	0	0	0	0	0
2.23.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Sarana dan Prasarana	Jenis	1	0	0	0	0	0
2.23.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Sarana dan Prasarana	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Umum**	**%**	**100**	**1,372,289,620**	**100**	**1,355,235,245**	**90.79**	**103,104,673**
2.23.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Surat	Jenis	2	340,000	2	340.000	100	0
2.23.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Internet	Jenis	4	563,632,500	4	550,199,254	73.95	82,418,773
2.23.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi	Orang	24	808,757,120	24	805,036,000	97.42	20,685,900
2.23.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**%**	**100**	**180,835,000**	**100**	**180,312,243**	**98.45**	**3,168,480**
2.23.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas	Unit	7	133,000,000	7	132,811,393	99.93	90,056
2.23.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas	Unit	41	22,860,000	41	22,525,850	94.58	2,983,424
2.23.01.1.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Jasa Pemeliharaan	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat	Jumlah Jasa Pemeliharaan	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Sarana	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jenis	6	16,420,000	6	16,325,000	99.42	95,000

Kode	OPD/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Output	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2023			Sisa Anggaran (Rp.)
				Kinerja	Anggaran (Rp.)	Kinerja	Anggaran (Rp.)	Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	Gedung	2	0	0	0	0	0
2.23.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Bangunan yang terpelihara	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Gedung	2	24,975,000	0	24,975,000	0	0
2.23.01.1.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah Pemeliharaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-
2.23.02	**Program Pembinaan Perpustakaan**	**Persentase Peningkatan Jumlah Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	**%**	**100**	**929,324,211**	**100**	**867,858,611**	**99.62**	**61,541,300**
2.23.02.1.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan**	**Perpustakaan**	**75**	**764,194,711**	**75**	**754,930,811**	**99.47**	**1,243,800**
2.23.02.1.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah kunjungan pemustaka	Orang	75.000	135,000,011	75.000	131,174,511	99.07	701,500
2.23.02.1.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang dibina	Perpustakaan	10	50.000.000	10	49,950,000	100	0
2.23.02.1.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
2.23.02.1.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah pengelola perpustakaan yang mengikuti bimtek	Orang	150	223.000.000	150	222,608,000	100	0
2.23.02.1.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Peserta Pembinaan Perpustakaan	-	-	-	-	-	-	-
2.23.02.1.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah peserta bimtek	-	-	112,379,300	-	107,579,300	-	-
2.23.02.1.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jenis Layanan Perpustakaan	-	-	-	-	-	-	-
2.23.02.1.01.08	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Koleksi Deposit	-	-	-	-	-	-	-

Kode	OPD/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Output	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2023			Sisa Anggaran (Rp.)
				Kinerja	Anggaran (Rp.)	Kinerja	Anggaran (Rp.)	Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.02.1.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Pengadaan Bahan Pustaka	Eksemplar	2,000	243,815,400	2,000	243,619,000	99,66	542,300
2.23.02.1.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang di data	Kab/Kota	10	1,187,100	10	1,187,100	100	0
2.23.02.1.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca**	**Kegiatan**	**8**	**165,129,500**	**8**	**112,927,800**	**99.62**	**60,297,500**
2.23.02.1.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah peserta lomba dan pameran buku	Orang	1.000	205,955,700	1.000	204,955,700	99.51	1,000,000
2.23.02.1.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pembanguan gedung	Gedung	1	15,533,592,000	1	15,474,294,500	99.62	59,297,500
2.23.02.1.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Peserta Gerakan Budaya Gemar Membaca	-	-	-	-	-	-	-
2.23.02.1.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dikembangkan	Perpustakaan	12	165,129,500	12	112,927,800	100	0
2.23.02.1.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Peserta Lomba	-	-	-	-	-	-	-
2.23.03	**Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**	**Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah**	**%**	**100**	**53,118,200**	**100**	**52,268,500**	**94.95**	**3,219,500**
2.23.03.1.01	**Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi**	**Jumlah Pengelolaan Karya Cetak Karya Rekam**	**Eksemplar**	**500**	**10,163,600**	**500**	**9,922,500**	**88.63**	**507,500**
2.23.03.1.01.01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Pengelolaan Koleksi Deposit yang tersedia	Eksemplar	500	10,163,600	500	9,922,500	88.63	507,500
2.23.03.1.01.02	Pemberian Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Peserta Penerima Penghargaan	-	-	-	-	-	-	-
2.23.03.1.02	**Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah**	**Jumlah Pengelolaan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi**	**Eksemplar**	**550**	**22,763,700**	**750**	**22,156,500**	**94.79**	**272,500**
2.23.03.1.02.01	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Katalog Induk Daerah yang dilayankan	Entry	550	13,048,700	550	12,710,500	100	0
2.23.03.1.02.02	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang tersedia di deposit	Naskah	10	9.715,000	230	9,446,000	92.83	272,500

Kode	OPD/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Output	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2023			Sisa Anggaran (Rp.)
				Kinerja	Anggaran (Rp.)	Kinerja	Anggaran (Rp.)	Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.03.1.03	**Pelestraian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi**	**Jumlah Pengelolaan dan Pelestarian Naskah Kuno Daerah**	**Eksemplar**	**10**	**20,190,900**	**10**	**20,189,500**	**95.49**	**2,439,500**
2.23.03.1.03.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno	Orang	10	8,061,000	10	8,061,000	99.99	1,000
2.23.03.1.03.02	Pengembangan Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Eksemplar	10	12,129,900	10	12,128,500	94.10	2,438,500
2.23.03.1.04	**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Daerah Provinsi yang Tersedia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.23.03.1.04.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Pengadaan Buku	-	-	-	-	-	-	-
2.23.03.1.04.02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang dilayankan	-	-	-	-	-	-	-
2.24.02	**Program Pengelolaan Arsip**	**Persentase Peningkatan Jumlah Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis**	**%**	**100**	**170,051,700**	**100**	**151,224,486**	**99,66**	**427,800**
2.24.02.1.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	**Jumlah Pengolahan Arsip Dinamis**	**Berkas**	**20,000**	**123,250,400**	**20,000**	**68,665,500**	**99.51**	**341,000**
2.24.02.1.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Dinamis Aktif dan Inaktif	Berkas	10,000	4,867,500	10,000	4,867,500	100	0
2.24.02.1.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip yang Terpelihara	Berkas	10,000	81,125,000	10,000	80,925,000	99.47	341,000
2.24.02.1.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Arsip yang dilindungi	-	-	42,125,400	-	35,475,400	-	-
2.24.02.1.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**	**Jumlah Arsip Statis yang Terselamatkan dan Dilestarikan**	**Arsip**	**5.000**	**18,881,300**	**5.000**	**16,824,086**	**98.67**	**34,000**
2.24.02.1.02.01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Arsip Otentik Naskah Asli yang Terselamatkan	-	-	-	-	-	-	-
2.24.02.1.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dinilai, disimpan dan dilestarikan	Arsip	5.000	18,881,300	5.000	16,824,086	98.67	34,000
2.24.02.1.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**	**Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional**	**Pengguna**	**150**	**27,920,000**	**500**	**18,000,000**	**99.90**	**52,800**
2.24.02.1.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Prov Melalui JIKN	Jumlah Pengunjung Layanan Kearsipan	Pengguna	150	6,820,000	150	5,970,000	99.90	52,800
2.24.02.1.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) yang Terbina	Laporan	5	21,100,000	31	12,030,000	100	0

Kode	OPD/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Output	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2023			Sisa Anggaran (Rp.)
				Kinerja	Anggaran (Rp.)	Kinerja	Anggaran (Rp.)	Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.24.03	**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**Persentase Peningkatan Jumlah Arsip yang Terselamatkan**	**%**	**100**	**27,637,500**	**100**	**26,888,860**	**99,98**	**200**
2.24.03.1.01	**Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun**	**Jumlah Arsip yang Di Nilai**	**Arsip**	**10.000**	**27,637,500**	**10.000**	**26,888,860**	**100**	**0**
2.24.03.1.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip Dipermanenkan dan Dimusnahkan	Arsip	10.000	27,637,500	10.000	26,888,860	100	0
2.24.03.1.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang dimusnahkan	-	-	-	-	-	-	-
2.24.03.1.02	**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi**	**Jumlah Arsip Daerah Provinsi yang Terselamatkan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.24.03.1.02.01	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Terselamatkan	-	-	-	-	-	-	-
2.24.03.1.02.02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Terselamatkan	-	-	-	-	-	-	-
2.24.03.1.03	**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibuburkan dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Arsip Daerah Provinsi yang Terselamatkan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.24.03.1.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Arsip Daerah yang di nilai	-	-	-	-	-	-	-
2.24.03.1.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Arsip Daerah yang di nilai	-	-	-	-	-	-	-
2.24.03.1.03.03	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Terselamatkan	-	-	-	-	-	-	-
2.24.03.1.04	**Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi**	**Jumlah Arsip Digital yang dilayankan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.24.03.1.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Arsip yang dinilai dan ditetapkan keabsahannya	-	-	-	-	-	-	-
2.24.03.1.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Arsip Digital yang memiliki Keabsahan Arsip	-	-	-	-	-	-	-

Kode	OPD/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Output	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2023			Sisa Anggaran (Rp.)
				Kinerja	Anggaran (Rp.)	Kinerja	Anggaran (Rp.)	Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.24.03.1.05	**Pencarian Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan Hilang**	**Jumlah Arsip Statis yang Dilestarikan**	-	-	-	-	-	-	-
2.24.03.1.05.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Arsip Statis yang Dinilai	-	-	-	-	-	-	-
2.24.03.1.05.02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Arsip Digital yang dinilai	-	-	-	-	-	-	-
2.24.03.1.05.03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Arsip yang terdata	-	-	-	-	-	-	-
2.24.04	**Program Perizinan Penggunaan Arsip**	**Persentase Arsip yang dilayankan**	-	-	-	-	-	-	-
2.24.04.1.01	**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi**	**Jumlah Arsip Daerah Provinsi yang dilayankan**	-	-	-	-	-	-	-
2.24.04.1.01.01	Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Arsip yang Memiliki SOP	-	-	-	-	-	-	-
2.24.04.1.01.02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Arsip yang dilayankan	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya dalam pelaksanaan anggaran perangkat daerah dalam mencapai target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 telah mengalami perubahan anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023, perubahan tersebut merupakan penyesuaian atas komponen belanja operasional dan non operasional dan salah satunya adalah untuk pembangunan gedung baru pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023, capaian kinerja atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat bersumber pembiayaan dari APBD. Selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target adalah BB, dalam memenuhi target program tersebut, didukung oleh 9 kegiatan dan 40 sub kegiatan. Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan, ketersediaan pagu anggaran sebesar Rp. 14.225.847.824,00. Kemudian realisasi sebesar Rp. 12.918.925.295,00 dengan capaian kinerja sebesar 90,81%.

2. Program Pembinaan Perpustakaan dengan indikator Persentase Peningkatan Jumlah Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan (%) dan memiliki target program 100%, dalam pencapaian target tersebut di dukung oleh 2 kegiatan dan 7 sub kegiatan dengan dukungan pagu anggaran program sebesar Rp. 929.324.211,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 867.858.611,00 dengan capaian kinerja keuangan 93,39% dari target 100%. Berikut adalah kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung Program Pembinaan Perpustakaan:
   a. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi, indikator Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dengan mencakup 5 (lima) sub kegiatan. Kemudian ketersediaan pagu anggaran untuk mendukung kegiatan dan sub kegiatan sebesar Rp. 764.194.711,00 dengan target 75 perpustakaan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan perpustakaan. Berikut adalah sub kegiatan yang mendukung capaian kinerja program dan kegiatan, antara lain:
      1) Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik, dengan indikator jumlah kunjungan pemustaka.

         Pelaksanaan sub kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas dan fungsi perpustakaan sebagai penyedia layanan informasi berupa buku (manual dan digital) melalui layanan pengguna perpustakaan yang tersedia di perpustakaan dengan target kinerja 38.000 orang dan ketersediaan anggaran sebesar Rp. 135.000.011,00.

         Layanan pengguna perpustakaan adalah aktivitas perpustakaan dalam memberikan jasa layanan kepada pengguna perpustakaan, khususnya kepada anggota perpustakaan. Selanjutnya jenis-jenis layanan yang tersedia di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, antara lain: Layanan Sirkulasi, Layanan Referensi, Layanan Anak, Layanan Informasi, Layanan Perpustakaan Keliling, Layanan Gelar Baca Buku Santai, Layanan Bercerita (*storytelling*), Layanan Internet, Layanan Deposit dan Layanan Digital (iDeposit dan NTBelib).

         Berdasarkan uraian di atas, capaian kinerja sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 yang telah dievaluasi sebesar 49.704 orang yang telah menggunakan layanan perpustakaan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 131.174.511,00 atau 97,17%.
      2) Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi, dengan indikator adalah jumlah perpustakaan yang dibina melalui bantuan hibah buku.

Sasaran kinerja yang ingin dicapai adalah pembinaan perpustakaan guna meningkatkan literasi masyarakat. Pagu anggaran sebesar 50.000.000,00.

Capaian keuangan dan kinerja keuangan atas pelaksanaan pengembangan perpustakaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 49.950.000,00 (99,90%) dan realisasi fisik 100%.

3) Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan, indikator sub kegiatan adalah jumlah pengelola perpustakaan yang mengikuti bimtek dengan target 150 orang

   Pembinaan perpustakaan diartikan sebagai usaha atau tindakan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang berdaya guna yang semakin baik, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB selaku Pembina untuk wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat merencanakan pelaksanaan kegiatan melalui bimtek pengelola SDM perpustakaan sekolah tingkat pendidikan menengah dan pendidikan khusus, selanjutnya dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan melalui webinar dengan target peserta 150 orang, dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp. 223.000.000,00. Realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 222.608.000,00 dengan persentase realisasi keuangan sebesar 99,82% dan fisik 100%.

   Tujuan atas pelaksanaan bimtek tersebut adalah untuk memperbaiki efektifitas kerja dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selain itu pembinaan juga dapat meningkatkan kepuasan kerja pegawai. Bila mereka merasa terlatih dan terdidik, mereka akan merasa lebih berguna dan memiliki rasa percaya diri yang lebih besar sehingga akan berpengaruh terhadap produktifitas kerja.

4) Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi, indikator Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi

   Ketersediaan anggaran dalam mendukung sub kegiatan tersebut adalah Rp. 112.379.300,00 dengan realisasi keuangan Rp. 107.579.300,00 (95,73%) dengan target yang ingin dicapai adalah terlaksananya peningkatan kapasitas dan sertifikasi tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah provinsi melalui bimtek dan pembinaan.

5) Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka, indikator Jumlah Pengadaan Bahan Pustaka dengan capaian target adalah 5.000 Eksemplar dan ketersediaan pagu anggara sebesar Rp. 243.815.400,00.

Realisasi atas anggaran tersebut sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 243.619.000,00 dengan persentse keuangan 99.92% dan fisik 100%.

b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi, indikator Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca dengan capaian target 1 Kegiatan dan ketersediaan pagu anggaran sebesar Rp. 165.129.500,00. Berikut adalah sub kegiatan yang mendukung kegiatan tersebut, antara lain:

1) Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial, indikator Jumlah Perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dikembangkan dengan target 12 Perpustakaan dan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan sub kegiatan sebesar Rp. 165.129.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 112.927.800,00 dengan persentase realisasi keuangan 68,39%.

3. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno dengan indikator Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah, target capaian kinerja 100%, untuk pencapaian target tersebut di dukung oleh 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan dengan pagu anggaran program sebesar Rp. 53.118.200,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 52.268.500,00 atau 98,40% dan realisasi fisik sebesar 100%. Berikut adalah kegiatan dan sub kegiatan pendukung program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, antara lain:

a. Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi, indikator Jumlah Pengelolaan Karya Cetak Karya Rekam dengan capaian target kinerja 500 Eksemplar, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.163.600,00. Pelaksanaan kegiatan didukung 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1) Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah Hunting KCKR ke penerbit, swasta dan instansi di 10 Kab/Kota; Pengelolaan Deposit; dan Penerbitan Naskah KCKR NTB. Capaian target dalam pelaksanaan sub kegiatan sebesar 500 Eksemplar dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 10.163.600,00. Dalam pelaksanaannya sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 9.922.500,00 dan realisasi keuangan 97.63% dan fisik

100% dengan telah melaksanakan penghimpunan KCKR sebanyak 500 Eksemplar.

b. Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah dengan indikator Jumlah Pengelolaan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi, target kinerja 550 eksemplar dan ketersediaan pagu anggaran sebesar Rp. 22.763.700,00. Terdapat 2 (dua) sub kegiatan dalam mendukung kegiatan Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah, antara lain:
    1) Penerbitan Katalog Induk Daerah, indikator Jumlah Katalog Induk Daerah yang dilayankan dengan target kinerja 550 Entry dengan pagu anggaran Rp. 13.048.700,00. Selanjutnya bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah hunting katalog daerah ke perpustakaan jejaring, antara lain perpustakaan Kab/Kota, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan SMA/SMK di 10 Kab/Kota; dan penyusunan naskah katalog induk daerah NTB, naskah daftar tambahan buku dan naskah indeks surat kabar Nasional. Kemudian dalam pelaksanaan telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 12.710.500,00 atau realisasi keuangan 97,41% dan fisik 100%.
    2) Penerbitan Bibliografi Daerah, indikator Jumlah Bibliografi Daerah yang tersedia di deposit, capaian target 10 Naskah dan ketersediaan anggaran sebesar Rp. 9.715.000,00. Selanjutnya dalam pelaksanaannya bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah hunting bibliografi daerah NTB dan Naskah KCKR, naskah indeks surat kabar daerah NTB ke penerbit, swasta dan instansi di 10 Kab/Kota. Realisasi keuangan sebesar Rp. 9.446.000,00 dengan persentase keuangan 97,23% dan fisik 100% dalam arti telah membuat bibliografi daerah sebanyak 10 Naskah.

c. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi, indikator Jumlah Pengelolaan dan Pelestarian Naskah Kuno Daerah. Capaian target kinerja adalah 10 Eksemplar dan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 20.190.900,00. Pelaksanaan kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan, antara lain:
    1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno, indikator Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan dengan target kinerja 10 Orang. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah sosialisasi, pendataan dan pendaftaran naskah kuno milik masyarkat di 10 Kab/Kota dengan ketersediaan pagu anggaran sebesar Rp.

8.061.000,00 dan realisasi keuangan dan fisik sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 8.061.000,00 dengan persentase 100%.

2) Pengembangan Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan, indikator Jumlah Naskah Kuno yang didayagunakan dan dilayankan secara daring (*Online*). Bentuk kegiatan yang dilaksanakan, antara lain: a) Hunting naskah kuno yang di miliki masyarakat di 10 Kab/Kota; dan b) Alih media koleksi naskah kuno, penglolaan koleksi digital di aplikasi iDeposit NTB.

   Pelaksanaan kegiatan tersebut ditargetkan 10 Eksemplar dengan pagu anggaran Rp. 12.129.900,00. Selanjutnya realisasi sampai dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.128.500,00 dengan capaian target kinerja setelah dievaluasi sebanyak 10 Eksemplar.

4. Program Pengelolaan Arsip dengan indikator Persentase Peningkatan Jumlah Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis, target yang ingin dicapai atas program tersebut di dukung oleh 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan pagu anggaran program sebesar Rp. 170.051.700,00 dan target 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 151.224.486,00 atau 88,93% dan realisasi capaian kinerja sebesar 100%. Berikut adalah kegiatan dan sub kegiatan pendukung pencapaian Program Pengelolaan Arsip, antara lain:

   a. Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi, indikator Jumlah Pengolahan Arsip Dinamis dengan target kegiatan sebesar 20.000 berkas dengan ketersediaan pagu anggaran sebesar Rp. 123.250.400,00. Realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 116.400.400,00 atau 94.44% dengan realisasi capaian target kinerja 20.000 berkas. Keberhasilan atas pelaksanaan kegiatan di dukung oleh 2 (dua) sub kegiatan, antara lain:

      1) Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis, indikator Jumlah Arsip yang Terpelihara. Bentuk pelaksanaannya adalah pemeliharaan arsip yang ada di depo arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB baik dengan cara menggunakan bahan kimia dan/ atau pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dan pemusnahan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna, dengan target 10.000 berkas yang telah terealisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebanyak 10.000 berkas pada depo arsip dan pagu anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 81.125.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 80.925.000,00 atau 99.75%.

2) Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi indikator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi

Pengawan arsip dinamis kewenangan provinsi merupakan proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Pencapaian atas sub kegiatan tersebut adalah terlaksananya pengawasan arsip dinamis di 10 kab/kota dan provinsi guna meningkatkan literasi arsip dan terlaksananya digitalisasi arsip. Selanjutnya ketersediaan anggaran untuk mendukung sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 42.125.400,00 dengan pencapaian realisasi keuangan Rp. 35.475.400,00 (84,21%) dan realisasi kinerja 98%.

b. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi, indikator Jumlah Arsip Statis yang Terselamatkan dan Dilestarikan dengan target kinerja 5.000 Arsip dengan ketersediaan pagu anggaran sebesar Rp. 18.881.300,00. Berikut adalah sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut, yaitu:

1) Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis, indikator Jumlah Arsip Statis yang Dinilai, Disimpan dan Dilestarikan dengan target kinerja 5.000 Arsip dan ketersediaan pagu anggaran sebesar Rp. 18.881.300,00 dengan realisasi Rp. 16.824.086,00 atau 89,10%.

Bentuk kegiatan yang dilakukan pada sub kegiatan ini adalah melaksanakan akuisisi arsip dan pengolahan arsip statis. Akuisisi arsip statis merupakan proses penambahan khazanah arsip statis pada Bidang Urusan Kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dari OPD/swasta lain kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB khususnya Bidang Urusan Kearsipan yang kemudian dinilai kembali oleh arsiparis. Berdasarkan hal tersebut, capaian target kinerja sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 adalah 5.000 Arsip.

c. Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi, indikator Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional dengan pagu anggaran Rp. 27.920.000,00 dan target kinerja 150 Pengguna. Realisasi keuangan atas pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 18.000.000,00 atau 64,47% dan pencapaian target kinerja 150 Pengguna. Dalam pelaksanaannya terdapat 2 (dua) sub kegiatan pendukung atas realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut, antara lain:

1) Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Prov Melalui JIKN, indikator Jumlah Pengunjung Layanan Kearsipan dengan target kinerja 150 Pengguna dan ketersediaan anggaran Rp. 6.820.000,00.

   Bentuk pelaksanaan sub kegiatan tersebut adalah melaksanakan layanan arsip secara langsung kepada pengguna arsip dan layanan keliling arsip dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023, capaian target kinerja 150 Pengguna dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.970.000,00 atau 87,54%.

2) Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi, indikator Jumlah Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) yang terbina dengan capaian target kinerja 5 Laporan yang terbina dan ketersediaan anggaran Rp. 21.100.000,00 dengan realisasi Rp. 12.030.000,00 atau 57,01%.

   Bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan adalah membina perangkat daerah agar membentuk sistem kearsipan secara baku melalui record center model di masing-masing perangkat daerah di pulau Lombok sehingga dokumen arsip yang berada pada masing-masing perangkat daerah dapat di olah dan dilestarikan dan bernilai guna bagi perangkat daerah tersebut.

5. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, indikator Persentase Peningkatan Jumlah Arsip yang Terselamatkan dengan target kinerja 100% kemudian ketersediaan atas pelaksanaan program tersebut sebesar Rp. 27.637.500,00. Selanjutnya dalam pelaksanaannya telah terealisasi anggaran Rp. 26.888.860,00 dengan persentase keuangan 97,29% dan fisik 100%. Dalam mendukung pelaksanaan program tersebut terdapat 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun, indikator Jumlah Arsip yang Di Nilai dengan target kinerja 10.000 Arsip dan ketersediaan pagu anggara Rp. 27.637.500,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp. 26.888.860,00 atau 97,29%. Terlaksananya kegiatan tersebut didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut:

      1) Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun, indikator Jumlah Arsip Dipermanenkan dan Dimusnahkan dengan pagu anggaran Rp. 27.637.500,00 target kinerja 10.000 Arsip. Dalam pelaksanaannya telah terealisasi anggaran sebesar Rp. 26.888.860,00 atau 97,29%.

Bentuk pelaksanaan kegiatan adalah penilaian dan penyusutan arsip yang berdayaguna jangka panjang dan bersejarah, dan/ atau memiliki retensi arsip di bawah 10 tahun maka akan dimusnahkan. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui masa/jangka waktu dari arsip tersebut.

2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya.

Proses perumusan isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB melalui kajian isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi menuju kualitas kondusifitas daerah menuju *democratic governance*. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB melalui pengembangan minat dan budaya baca berbasis literasi digital serta pengolahan dan pelestarian arsip dituntut lebih humanis, antisipatif, responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional yang berdampak pada kondusifitas daerah. Oleh karena itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Dalam upaya menata dan mengembangkan perpustakaan dan arsip dalam waktu 5 tahun kedepan, berdasarkan isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, sebagai berikut:

a. Bidang urusan Perpustakaan
    1. Masih kurangnya Sarana Prasarana pendukung peningkatan minat dan daya baca masyarakat, terutama mobil Perpustakaan Keliling untuk menjangkau wilayah wilayah pelosok di Provinsi NTB;
    2. Masih kurangnya Koleksi bahan bacaan yang tersedia dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada;
    3. Belum terwujudnya jumlah dan kapasitas perpustakaan yang memadai, terutama perpustakaan Desa, dimana berdasarkan data dari Kemendes & PDT, dari 1005 Desa/Kelurahan yang ada di NTB, baru 688 Desa yang memiliki Perpustakaan Desa; dan
    4. Masih minimnya dukungan untuk Pengembangan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

b. Bidang urusan Kearsipan

1. Belum optimalnya sistem administrasi kearsipan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang berkualitas;
2. Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah; dan
3. Belum terwujudnya kesadaran masyarakat akan pentingnya arsip.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2025

Rancangan awal RKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 untuk selanjutnya melakukan review dengan proses membandingkan antara Rancangan Awal Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2025, sebagaimana tertuang pada table 2.4.1 sebagai berikut:

Tabel 2.4.1
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rancangan Awal RKPD 2025				Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**Kota Mataram**	**100%**	**24.172.182.496**	**DAU**		**100%**	**24.172.182.496**	**DPKP NTB**
		2.23.2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**			**Kota Mataram**	**100%**	**24.172.182.496**	**DAU**		**100%**	**24.172.182.496**	**DPKP NTB**
		2.23.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**		**Kota Mataram**	**BB**	**17.427.696.896**	**DAU**		**BB**	**17.427.696.896**	**DPKP NTB**
		2.23.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**		Kota Mataram	**10 Dokumen**	**163.000.000**	DAU		**10 Dokumen**	**163.000.000**	DPKP NTB
		2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kota Mataram	2 Dokumen	75.000.000	DAU		2 Dokumen	75.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kota Mataram	1 Dokumen	30.000.000	DAU		1 Dokumen	30.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kota Mataram	2 Dokumen	30.000.000	DAU		2 Dokumen	30.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Kota Mataram	1 Dokumen	20.000.000	DAU		1 Dokumen	20.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Kota Mataram	2 Dokumen	20.000.000	DAU		2 Dokumen	20.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kota Mataram	5 Laporan	15.000.000	DAU		5 Laporan	15.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Mataram	4 Laporan	85.686.000	DAU		4 Laporan	85.686.000	DPKP NTB

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rancangan Awal RKPD 2025				Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2.23.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Kota Mataram**	**100%**	**14.575.496.896**	DAU		10 Dokumen	**14.575.496.896**	DPKP NTB
		2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Mataram	95 Orang/ Bulan	11.965.900.454	DAU		1 Dokumen	11.965.900.454	DPKP NTB
		2.23.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kota Mataram	4 Dokumen	90.720.000	DAU		1 Dokumen	90.720.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kota Mataram	1 Dokumen	18.689.600	DAU		1 Dokumen	18.689.600	DPKP NTB
		2.23.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Kota Mataram	2 Dokumen	16.115.900	DAU		1 Dokumen	16.115.900	DPKP NTB
		2.23.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kota Mataram	1 Laporan	15.857.200	DAU		1 Dokumen	15.857.200	DPKP NTB
		2.23.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Kota Mataram	1 Dokumen	2.542.100	DAU		1 Dokumen	2.542.100	DPKP NTB
		2.23.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Kota Mataram	10 Laporan	6.075.200	DAU		10 Laporan	6.075.200	DPKP NTB
		2.23.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Kota Mataram	2 Dokumen	-	DAU		2 Dokumen	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah**		**Kota Mataram**	**100 %**	**31.000.000**	**DAU**		**100 %**	**31.000.000**	**DPKP NTB**
		2.23.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Kota Mataram	1 Dokumen	-	DAU		1 Dokumen	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Kota Mataram	1 Dokumen	-	DAU		1 Dokumen	-	DPKP NTB

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rancangan Awal RKPD 2025				Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2.23.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Kota Mataram	1 Laporan	-	DAU		1 Laporan	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Kota Mataram	2 Laporan	-	DAU		2 Laporan	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kota Mataram	2 Laporan	-	DAU		2 Laporan	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kota Mataram	2 Laporan	30.000.000	DAU		2 Laporan	30.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Kota Mataram	1 Dokumen	-	DAU		1 Dokumen	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Pendapatan Daerah yang disusun**		**Kota Mataram**	**-**	**-**	**DAU**		**-**	**-**	**DPKP NTB**
		2.23.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (Sub kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah (Sub kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah (Sub kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rancangan Awal RKPD 2025				Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2.23.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah**		**Kota Mataram**	**2 Dokumen**	**86.200.000**	**DAU**		**2 Dokumen**	**86.200.000**	**DPKP NTB**
		2.23.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Kota Mataram	5 Unit	-	DAU		5 Unit	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Kota Mataram	95 Paket	-	DAU		95 Paket	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Kota Mataram	2 Dokumen	-	DAU		2 Dokumen	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		Kota Mataram	2 Dokumen	-	DAU		2 Dokumen	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Kota Mataram	1 Dokumen	-	DAU		1 Dokumen	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.05.0008	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah**		**Kota Mataram**	**100%**	**362.000.000**	**DAU**		**100%**	**362.000.000**	**DPKP NTB**
		2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kota Mataram	11 Paket	40.000.000	DAU		11 Paket	40.000.000	DPKP NTB

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rancangan Awal RKPD 2025				Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kota Mataram	15 Paket	40.000.000	DAU		15 Paket	40.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kota Mataram	15 Paket	40.000.000	DAU		15 Paket	40.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kota Mataram	2 Paket	50.000.000	DAU		2 Paket	50.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Kota Mataram	120 Dokumen	25.000.000	DAU		120 Dokumen	25.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kota Mataram	1 Laporan	75.000.000	DAU		1 Laporan	75.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Mataram	1 Laporan	200.000.000	DAU		1 Laporan	200.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Kota Mataram	2 Dokumen	-	DAU		2 Dokumen	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**jumlah pengadaan Barang Milik Daerah**		**Kota Mataram**	**10 Unit**	**650.000.000**	**DAU**		**10 Unit**	**650.000.000**	**DPKP NTB**
		2.23.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Kota Mataram	1 Unit	500.000.000	DAU		1 Unit	500.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Kota Mataram	1 Unit	-	DAU		1 Unit	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Kota Mataram	1 Paket	-	DAU		1 Paket	-	DPKP NTB

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rancangan Awal RKPD 2025				Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2.23.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kota Mataram	12 Unit	147.000.000	DAU		12 Unit	147.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.07.0008	Pengadaan Aset yang Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**		**Kota Mataram**	**100%**	**1.175.000.000**	**DAU**		**100%**	**1.175.000.000**	**DPKP NTB**
		2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kota Mataram	2 Laporan	-	DAU		2 Laporan	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kota Mataram	4 Laporan	600.000.000	DAU		4 Laporan	600.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kota Mataram	24 Laporan	845.000.000	DAU		24 Laporan	845.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**		**Kota Mataram**	**48 Unit**	**385.000.000**	**DAU**		**48 Unit**	**385.000.000**	**DPKP NTB**
		2.23.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Kota Mataram	7 Unit	133.000.000	DAU		7 Unit	133.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kota Mataram	41 Unit	350.000.000	DAU		41 Unit	350.000.000	DPKP NTB

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rancangan Awal RKPD 2025				Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2.23.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		Kota Mataram	48 Unit	100.000.000	DAU		48 Unit	100.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitsi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Kota Mataram	2 Unit	100.000.000	DAU		2 Unit	100.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitsi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Kota Mataram	2 Unit	100.000.000	DAU		2 Unit	100.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/ Rehabilitasi		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rancangan Awal RKPD 2025				Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terwujudnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang KUAT melalui pembangunan literasi masyarakat				**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**									
	Meningkatnya Pemanfaatan Perpustakaan			**Angka Kunjungan Pemustaka**									
		2.23.02	**Program Pembinaan Perpustakaan**	**Persentase Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**		Kota Mataram	**100%**	**4.472.500.000**	DAU		**100%**	**4.472.500.000**	DPKP NTB
		2.23.02.1.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan**		Kota Mataram	**60 Perpustakaan**	**3.822.500.000**	DAU		**60 Perpustakaan**	**3.822.500.000**	DPKP NTB
		2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya		Kota Mataram	50 Perpustakaan	15.000.000	DAU		50 Perpustakaan	15.000.000	DPKP NTB
		2.23.02.1.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		Kota Mataram	20 Perpustakaan	20.000.000	DAU		20 Perpustakaan	20.000.000	DPKP NTB
		2.23.02.1.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan khusus yang Dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi		Kota Mataram	100 Orang	20.000.000	DAU		100 Orang	20.000.000	DPKP NTB
		2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.02.1.01.0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rancangan Awal RKPD 2025				Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan		Kota Mataram	100 Eksemplar	5.000.000	DAU		100 Eksemplar	5.000.000	DPKP NTB
		2.23.02.1.01.0011	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat		Kota Mataram	12 Dokumen	80.000.000	DAU		12 Dokumen	80.000.000	DPKP NTB
		2.23.02.1.01.0012	Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Provinsi	Capaian tingkat gemar membaca masyarakat tingkat Provinsi		Kota Mataram	57 Nilai	5.000.000	DAU		57 Nilai	5.000.000	DPKP NTB
		2.23.02.1.01.0013	Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	Capaian indeks pembangunan literasi masyarakat tingkat Provinsi		Kota Mataram	60 Nilai	5.000.000	DAU		60 Nilai	5.000.000	DPKP NTB
		2.23.02.1.01.0014	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	Jumlah kerjasama dan peningkatan kegemaran membaca dan literasi		Kota Mataram	1 Dokumen	-	DAU		1 Dokumen	-	DPKP NTB
		2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK		Kota Mataram	10 Perpustakaan	50.000.000	DAU		10 Perpustakaan	50.000.000	DPKP NTB
		2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan		Kota Mataram	1 Dokumen	-	DAU		1 Dokumen	-	DPKP NTB
		2.23.02.1.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca**		**Kota Mataram**	**8 Kegiatan/ Lokus**	**650.000.000**	**DAU**		**8 Kegiatan/ Lokus**	**650.000.000**	**DPKP NTB**
		2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus		Kota Mataram	10 Lokus	10.000.000	DAU		10 Lokus	10.000.000	DPKP NTB
		2.23.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di TempatTempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Kota Mataram	1 Perpustakaan	-	DAU		1 Perpustakaan	-	DPKP NTB
		2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		Kota Mataram	10 Orang	-	DAU		10 Orang	-	DPKP NTB

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rancangan Awal RKPD 2025				Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan		Kota Mataram	25 Perpustakaan	200.000.000	DAU		25 Perpustakaan	200.000.000	DPKP NTB
		2.23.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya		Kota Mataram	2 Orang	-	DAU		2 Orang	-	DPKP NTB
		2.23.03	**Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**	**Persentase Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah**		**Kota Mataram**	**100 %**	**197.000.000**	**DAU**		**100 %**	**197.000.000**	**DPKP NTB**
		2.23.03.1.01	**Pelestarian Karya Cetak dan Karya RekamKoleksi Daerah di Daerah Provinsi**	**Jumlah Pengelolaan Karya Cetak Karya Rekam**		**Kota Mataram**	**300 Eksemplar**	**95.000.000**	**DAU**		**300 Eksemplar**	**95.000.000**	**DPKP NTB**
		2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR		Kota Mataram	300 Eksemplar	12.500.000	DAU		300 Eksemplar	12.500.000	DPKP NTB
		2.23.03.1.01.0002	Pemberian Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam		Kota Mataram	10 Penerbit	-	DAU		10 Penerbit	-	DPKP NTB
		2.23.03.1.02	**Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah**	**Jumlah Pengelolaan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi**		**Kota Mataram**	**500 Eksemplar**	**35.000.000**	**DAU**		**500 Eksemplar**	**35.000.000**	**DPKP NTB**
		2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan		Kota Mataram	4.000 Entry	20.000.000	DAU		4.000 Entry	20.000.000	DPKP NTB
		2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan		Kota Mataram	300 Naskah	12.500.000	DAU		300 Naskah	12.500.000	DPKP NTB
		2.23.03.1.03	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi**	**Jumlah Pengelolaan dan Pelestarian Naskah Kuno Daerah**		**Kota Mataram**	**10 Eksemplar**	**50.000.000**	**DAU**		**10 Eksemplar**	**50.000.000**	**DPKP NTB**
		2.23.03.1.03.0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno		Kota Mataram	10 Orang	12.500.000	DAU		10 Orang	12.500.000	DPKP NTB
		2.23.03.1.03.0002	Pengembangan Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan		Kota Mataram	10 Eksemplar	12.500.000	DAU		10 Eksemplar	12.500.000	DPKP NTB

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rancangan Awal RKPD 2025				Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2.23.03.1.04	**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Daerah Provinsi yang Tersedia**		**Kota Mataram**	**400 Eksempar**	**17.000.000**	**DAU**		**400 Eksempar**	**17.000.000**	**DPKP NTB**
		2.23.03.1.04.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi		Kota Mataram	200 Eksemplar	-	DAU		200 Eksemplar	-	DPKP NTB
		2.23.03.1.04.0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi		Kota Mataram	200 Eksemplar	-	DAU		200 Eksemplar	-	DPKP NTB
Terwujudnya Tertib Arsip Dalam Penyelenggaraan Kearsipan pada Pemerintah Provinsi NTB				**Persentase Perangkat Daerah dan LKD Kab/Kota dengan Nilai Pengawasan Kearsipan B Ke Atas**									
	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang Tertib			**Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib**									
		2.24.02	**Program Pengelolaan Arsip**	**Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis**		**Kota Mataram**	**100 %**	**2.024.985.600**	**DAU**		**100 %**	**2.024.985.600**	**DPKP NTB**
		2.24.02.1.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	**Jumlah Pengolahan Arsip Dinamis**		**Kota Mataram**	**10,000 Berkas**	**980.000.000**	**DAU**		**10,000 Berkas**	**980.000.000**	**DPKP NTB**
		2.24.02.1.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi		Kota Mataram	10 Laporan	50.000.000	DAU		10 Laporan	50.000.000	DPKP NTB
		2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan		Kota Mataram	10.000 Arsip	25.000.000	DAU		10.000 Arsip	25.000.000	DPKP NTB
		2.24.02.1.01.0005	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi	Jumlah arsip yang di alih mediakan dan diautentikasi		Kota Mataram	500 Arsip	-	DAU		500 Arsip	-	DPKP NTB
		2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Jumlah daftar arsip dinamis		Kota Mataram	74.237 Arsip	50.000.000	DAU		74.237 Arsip	50.000.000	DPKP NTB
		2.24.02.1.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**	**Jumlah Arsip Statis yang Terselamatkan dan Dilestarikan**		**Kota Mataram**	**150 Arsip**	**400.000.000**	**DAU**		**150 Arsip**	**400.000.000**	**DPKP NTB**
		2.24.02.1.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.24.02.1.02.0003	Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Jumlah orang yang diwawancarai		Kota Mataram	2 Orang	-	DAU		2 Orang	-	DPKP NTB

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rancangan Awal RKPD 2025				Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2.24.02.1.02.0004	Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Penerbitan Naskah Sumber Arsip	Jumlah penerbitan naskah sumber arsip		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi		Kota Mataram	150 Arsip	25.000.000	DAU		150 Arsip	25.000.000	DPKP NTB
		2.24.02.1.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**	**Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan nasional**		**Kota Mataram**	**15 Laporan**	**644.985.600**	**DAU**		**15 Laporan**	**644.985.600**	**DPKP NTB**
		2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Prov Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN		Kota Mataram	500 Pengguna	-	DAU		500 Pengguna	-	DPKP NTB
		2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi		Kota Mataram	15 Laporan	-	DAU		15 Laporan	-	DPKP NTB
		2.24.03	**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**Persentase Arsip yang Terselamatkan**		**Kota Mataram**	**100 %**	**50.000.000**	**DAU**		**100 %**	**50.000.000**	**DPKP NTB**
		2.24.03.1.01	**Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun**	**Jumlah Arsip yang Di Nilai**		**Kota Mataram**	**10,000 Arsip**	**50.000.000**	**DAU**		**10,000 Arsip**	**50.000.000**	**DPKP NTB**
		2.24.03.1.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		Kota Mataram	10,000 Arsip	-	DAU		10,000 Arsip	-	DPKP NTB
		2.24.03.1.01.0002	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.24.03.1.02	**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi**	**Jumlah Arsip Daerah Provinsi yang Terselamatkan Akibat Bencana**		**Kota Mataram**	**-**	**-**	**DAU**		**-**	**-**	**DPKP NTB**
		2.24.03.1.02.0001	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.24.03.1.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rancangan Awal RKPD 2025				Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2.24.03.1.03	**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Arsip Daerah Provinsi yang digabung dan dibubarkan dan pemekaran daerah Kab/Kota**		**Kota Mataram**	-	-	**DAU**		-	-	**DPKP NTB**
		2.24.03.1.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.24.03.1.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Arsip Daerah yang di nilai		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.24.03.1.03.0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Terselamatkan		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.24.03.1.04	**Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi**	**Jumlah Arsip Digital yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi**		**Kota Mataram**	-	-	**DAU**		-	-	**DPKP NTB**
		2.24.03.1.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Arsip yang dinilai dan ditetapkan keabsahannya		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.24.03.1.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Arsip Digital yang memiliki Keabsahan Arsip		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.24.03.1.05	**Pencarian Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan Hilang**	**Jumlah Arsip Statis yang Dilestarikan**		**Kota Mataram**	-	-	**DAU**		-	-	**DPKP NTB**
		2.24.03.1.05.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Arsip Statis yang Dinilai		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.24.03.1.05.02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Arsip Digital yang dinilai		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.24.03.1.05.03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Arsip yang terdata		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan umum pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing;
2. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif;
3. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu;
5. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional;
6. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan Negara.

3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Berdasarkan prioritas-prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, maka pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan dasar;
2. Penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah;
3. Pelaksanaan otonomi daerah;
4. Penguatan konektivitas; dan
5. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Review Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026. Guna keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan. Tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB merupakan

bagian dari tugas dan fungsi sebagai penyedia informasi bagi masyarakat dan sebagai wujud/bentuk pelayanan wajib non pendidikan dasar.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

1. Tujuan:
    a. Terwujudnya pembangunan literasi masyarakat; dan
    b. Terwujudnya Tertib Arsip Dalam Penyelenggaraan Kearsipan pada Pemerintah Provinsi NTB
2. Sasaran:
    a. Meningkatnya Pemanfaatan Perpustakaan
    b. Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang Tertib

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam mendukung pencapaian tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB memiliki inovasi-inovasi yang tertuang di dalam Program, Kegiatan dan Subkegiatan antara lain: 1) Cafe Literasi keliling; 2) NTBelib, iDeposit dan Srikandi. Selanjutnya rancangan awal SKPD, Program/kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB mempunyai 5 (lima) rumusan program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 57 (lima puluh tujuh) sub kegiatan. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
    a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
        2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
        3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
        4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
        5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
        6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
        7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD
8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2) Pengamanan Barang Milik Daerah
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
4) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah
5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
1) Perencanaan Pengelolaan Retribusi
2) Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
4) Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (Sub kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)
5) Pengolahan Data Retribusi Daerah (Sub kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)
6) Penetapan Wajib Retribusi Daerah (Sub kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)
7) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
3) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
4) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

5) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
6) Pemulangan Pegawai yang Pensiun
7) Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
8) Pemindahan Tugas ASN
9) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
11) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5) Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan
6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7) Penyediaan Bahan/Material
8) Fasilitas Kunjungan Tamu
9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
11) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahaan Berbasis Elektronik pada SKPD

g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Pengadaan Alat Besar
4) Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
5) Pengadaan Mebel
6) Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya
7) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
8) Pengadaan Aset yang Tak Berwujud
9) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
10) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
11) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4) Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor

i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat
5) Pemeliharaan Mebel
6) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
8) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
9) Pemeliharaan/Rehabilitsi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
10) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
11) Pemeliharaan/Rehabilitsi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
12) Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

2. Program Pembinaan Perpustakaan

a. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
1) Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
2) Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi
3) Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
4) Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi
5) Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
6) Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
7) Pengembangan Perpustakaan Deposit
8) Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka

9) Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat
10) Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Provinsi
11) Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi
12) Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi
13) Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
14) Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan

b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
1) Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
2) Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
3) Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
4) Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
5) Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi

3. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
a. Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi
1) Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
2) Pemberian Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

b. Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah
1) Penerbitan Katalog Induk Daerah
2) Penerbitan Bibliografi Daerah

c. Pelestraian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi
1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno
2) Pengembangan Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan

d. Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
1) Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
2) Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara

4. Program Pengelolaan Arsip
a. Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi

1) Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi
2) Penyusutan Arsip Dinamis
3) Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi

b. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
1) Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI
2) Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan
3) Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Penerbitan Naskah Sumber Arsip
4) Akuisisi Arsip Statis

c. Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
1) Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Prov Melalui JIKN
2) Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi

5. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
a. Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun
1) Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
2) Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun

b. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi
1) Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana
2) Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana

c. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota
1) Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi
2) Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi
3) Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi pemekaran Lintas Kabupaten/Kota

d. Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi
1) Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip

2) Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip

e. Pencarian Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan Hilang

1) Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang
2) Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang
3) Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI NTB

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renja (Rencana Kerja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:

1. Mempedomani RKPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026;
2. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
3. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB;
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
5. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Berikut rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**Kota Mataram**	**100%**	**24.172.182.496**	**DAU**		**100%**	**24.935.282.340**	**DPKP NTB**
		2.23.2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**			**Kota Mataram**	**100%**	**24.172.182.496**	**DAU**		**100%**	**24.935.282.340**	**DPKP NTB**
		2.23.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**		**Kota Mataram**	**BB**	**17.427.696.896**	**DAU**		**BB**	**18.167.171.740**	**DPKP NTB**
		2.23.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**		Kota Mataram	**10 Dokumen**	**163.000.000**	DAU		**10 Dokumen**	**163.000.000**	DPKP NTB
		2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kota Mataram	1 Dokumen	75.000.000	DAU		1 Dokumen	80.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kota Mataram	1 Dokumen	30.000.000	DAU		1 Dokumen	35.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kota Mataram	1 Dokumen	30.000.000	DAU		1 Dokumen	35.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Kota Mataram	1 Dokumen	20.000.000	DAU		1 Dokumen	25.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Kota Mataram	1 Dokumen	20.000.000	DAU		1 Dokumen	25.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kota Mataram	5 Laporan	15.000.000	DAU		5 Laporan	20.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Mataram	4 Laporan	85.686.000	DAU		4 Laporan	90.000.000	DPKP NTB

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2.23.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Kota Mataram**	**100%**	**14.575.496.896**	DAU		**100%**	**15.297.871.740**	DPKP NTB
		2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Mataram	95 Orang/ Bulan	11.965.900.454	DAU		100 Orang/ Bulan	12.000.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kota Mataram	4 Dokumen	90.720.000	DAU		4 Dokumen	95.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kota Mataram	1 Dokumen	18.689.600	DAU		1 Dokumen	20.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Kota Mataram	2 Dokumen	16.115.900	DAU		2 Dokumen	18.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kota Mataram	1 Laporan	15.857.200	DAU		1 Laporan	17.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Kota Mataram	1 Dokumen	2.542.100	DAU		1 Dokumen	3.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Kota Mataram	10 Laporan	6.075.200	DAU		10 Laporan	7.500.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Kota Mataram	2 Dokumen	-	DAU		2 Dokumen	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah**		**Kota Mataram**	**100 %**	**31.000.000**	**DAU**		**100 %**	**31.000.000**	**DPKP NTB**
		2.23.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Kota Mataram	1 Dokumen	-	DAU		1 Dokumen	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Kota Mataram	1 Dokumen	-	DAU		1 Dokumen	-	DPKP NTB

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2.23.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Kota Mataram	1 Laporan	-	DAU		1 Laporan	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Kota Mataram	2 Laporan	-	DAU		2 Laporan	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kota Mataram	2 Laporan	-	DAU		2 Laporan	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kota Mataram	2 Laporan	30.000.000	DAU		2 Laporan	40.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Kota Mataram	1 Dokumen	-	DAU		1 Dokumen	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Pendapatan Daerah yang disusun**		**Kota Mataram**	**-**	**-**	**DAU**		**-**	**-**	**DPKP NTB**
		2.23.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (Sub kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah (Sub kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah (Sub kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2.23.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah**		**Kota Mataram**	**2 Dokumen**	**86.200.000**	**DAU**		**2 Dokumen**	**92.300.000**	**DPKP NTB**
		2.23.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Kota Mataram	5 Unit	-	DAU		5 Unit	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Kota Mataram	95 Paket	-	DAU		100 Paket	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Kota Mataram	2 Dokumen	-	DAU		2 Dokumen	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		Kota Mataram	2 Dokumen	-	DAU		2 Dokumen	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Kota Mataram	1 Dokumen	-	DAU		1 Dokumen	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.05.0008	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah**		**Kota Mataram**	**100%**	**362.000.000**	**DAU**		**100%**	**368.000.000**	**DPKP NTB**
		2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kota Mataram	11 Paket	40.000.000	DAU		11 Paket	50.000.000	DPKP NTB

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kota Mataram	15 Paket	40.000.000	DAU		20 Paket	45.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kota Mataram	15 Paket	40.000.000	DAU		15 Paket	45.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kota Mataram	2 Paket	50.000.000	DAU		2 Paket	55.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Kota Mataram	120 Dokumen	25.000.000	DAU		120 Dokumen	30.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kota Mataram	1 Laporan	75.000.000	DAU		1 Laporan	80.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Mataram	1 Laporan	200.000.000	DAU		1 Laporan	225.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Kota Mataram	2 Dokumen	-	DAU		2 Dokumen	20.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**jumlah pengadaan Barang Milik Daerah**		**Kota Mataram**	**10 Unit**	**650.000.000**	**DAU**		**10 Unit**	**650.000.000**	**DPKP NTB**
		2.23.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Kota Mataram	1 Unit	500.000.000	DAU		1 Unit	550.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Kota Mataram	1 Unit	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Kota Mataram	1 Paket	-	DAU		1 Paket	-	DPKP NTB

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2.23.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kota Mataram	12 Unit	147.000.000	DAU		8 Unit	150.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.07.0008	Pengadaan Aset yang Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**		**Kota Mataram**	**100%**	**1.175.000.000**	**DAU**		**100%**	**1.180.000.000**	**DPKP NTB**
		2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kota Mataram	2 Laporan	-	DAU		2 Laporan	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kota Mataram	4 Laporan	600.000.000	DAU		4 Laporan	750.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kota Mataram	24 Laporan	845.000.000	DAU		24 Laporan	875.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**		**Kota Mataram**	**48 Unit**	**385.000.000**	**DAU**		**48 Unit**	**385.000.000**	**DPKP NTB**
		2.23.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Kota Mataram	7 Unit	133.000.000	DAU		7 Unit	135.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kota Mataram	41 Unit	350.000.000	DAU		41 Unit	375.000.000	DPKP NTB

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2.23.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		Kota Mataram	48 Unit	100.000.000	DAU		48 Unit	125.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitsi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Kota Mataram	2 Unit	100.000.000	DAU		2 Unit	125.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitsi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Kota Mataram	2 Unit	100.000.000	DAU		2 Unit	125.000.000	DPKP NTB
		2.23.01.1.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/ Rehabilitasi		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terwujudnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang KUAT melalui pembangunan literasi masyarakat				**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**									
	Meningkatnya Pemanfaatan Perpustakaan			**Angka Kunjungan Pemustaka**									
		2.23.02	**Program Pembinaan Perpustakaan**	**Persentase Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**		Kota Mataram	**100%**	**4.472.500.000**	DAU		**100%**	**4.496.125.000**	DPKP NTB
		2.23.02.1.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan**		Kota Mataram	**60 Perpustakaan**	**3.822.500.000**	DAU		**63 Perpustakaan**	**3.846.125.000**	DPKP NTB
		2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya		Kota Mataram	50 Perpustakaan	15.000.000	DAU		53 Perpustakaan	15.000.000	DPKP NTB
		2.23.02.1.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		Kota Mataram	10 Perpustakaan	20.000.000	DAU		21 Perpustakaan	200.000.000	DPKP NTB
		2.23.02.1.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan khusus yang Dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi		Kota Mataram	150 Orang	20.000.000	DAU		150 Orang	200.000.000	DPKP NTB
		2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.02.1.01.0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan		Kota Mataram	100 Eksemplar	5.000.000	DAU		120 Eksemplar	5.250.000	DPKP NTB
		2.23.02.1.01.0011	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat		Kota Mataram	12 Dokumen	80.000.000	DAU		12 Dokumen	90.000.000	DPKP NTB
		2.23.02.1.01.0012	Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Provinsi	Capaian tingkat gemar membaca masyarakat tingkat Provinsi		Kota Mataram	57 Nilai	5.000.000	DAU		57 Nilai	150.000.000	DPKP NTB
		2.23.02.1.01.0013	Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	Capaian indeks pembangunan literasi masyarakat tingkat Provinsi		Kota Mataram	60 Nilai	5.000.000	DAU		60 Nilai	150.000.000	DPKP NTB
		2.23.02.1.01.0014	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	Jumlah kerjasama dan peningkatan kegemaran membaca dan literasi		Kota Mataram	1 Dokumen	-	DAU		1 Dokumen	-	DPKP NTB
		2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK		Kota Mataram	10 Perpustakaan	50.000.000	DAU		10 Perpustakaan	60.000.000	DPKP NTB
		2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan		Kota Mataram	1 Dokumen	-	DAU		1 Dokumen	-	DPKP NTB
		2.23.02.1.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca**		**Kota Mataram**	**8 Kegiatan/ Lokus**	**650.000.000**	**DAU**		**8 Kegiatan/ Lokus**	**650.000.000**	**DPKP NTB**
		2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus		Kota Mataram	10 Lokus	10.000.000	DAU		10 Lokus	150.000.000	DPKP NTB
		2.23.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di TempatTempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Kota Mataram	1 Perpustakaan	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		Kota Mataram	10 Orang	-	DAU		10 Orang	-	DPKP NTB

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan		Kota Mataram	25 Perpustakaan	200.000.000	DAU		25 Perpustakaan	250.000.000	DPKP NTB
		2.23.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya		Kota Mataram	2 Orang	-	DAU		2 Orang	-	DPKP NTB
		2.23.03	**Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**	**Persentase Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah**		**Kota Mataram**	**100 %**	**197.000.000**	**DAU**		**100 %**	**197.000.000**	**DPKP NTB**
		2.23.03.1.01	**Pelestarian Karya Cetak dan Karya RekamKoleksi Daerah di Daerah Provinsi**	**Jumlah Pengelolaan Karya Cetak Karya Rekam**		**Kota Mataram**	**300 Eksemplar**	**95.000.000**	**DAU**		**300 Eksemplar**	**95.000.000**	**DPKP NTB**
		2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR		Kota Mataram	300 Eksemplar	12.500.000	DAU		300 Eksemplar	13.150.000	DPKP NTB
		2.23.03.1.01.0002	Pemberian Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam		Kota Mataram	10 Penerbit	-	DAU		10 Penerbit	-	DPKP NTB
		2.23.03.1.02	**Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah**	**Jumlah Pengelolaan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi**		**Kota Mataram**	**500 Eksemplar**	**35.000.000**	**DAU**		**500 Eksemplar**	**35.000.000**	**DPKP NTB**
		2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan		Kota Mataram	1.500 Entry	20.000.000	DAU		1.500 Entry	21.000.000	DPKP NTB
		2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan		Kota Mataram	10 Naskah	12.500.000	DAU		10 Naskah	13.150.000	DPKP NTB
		2.23.03.1.03	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi**	**Jumlah Pengelolaan dan Pelestarian Naskah Kuno Daerah**		**Kota Mataram**	**10 Eksemplar**	**50.000.000**	**DAU**		**10 Eksemplar**	**50.000.000**	**DPKP NTB**
		2.23.03.1.03.0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno		Kota Mataram	10 Orang	12.500.000	DAU		20 Orang	13.150.000	DPKP NTB
		2.23.03.1.03.0002	Pengembangan Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan		Kota Mataram	10 Eksemplar	12.500.000	DAU		10 Eksemplar	13.150.000	DPKP NTB

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2.23.03.1.04	**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Daerah Provinsi yang Tersedia**		**Kota Mataram**	**400 Eksempar**	**17.000.000**	**DAU**		**400 Eksempar**	**17.000.000**	**DPKP NTB**
		2.23.03.1.04.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi		Kota Mataram	200 Eksemplar	-	DAU		200 Eksemplar	-	DPKP NTB
		2.23.03.1.04.0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi		Kota Mataram	200 Eksemplar	-	DAU		200 Eksemplar	-	DPKP NTB
Terwujudnya Tertib Arsip Dalam Penyelenggaraan Kearsipan pada Pemerintah Provinsi NTB				**Persentase Perangkat Daerah dan LKD Kab/Kota dengan Nilai Pengawasan Kearsipan B Ke Atas**									
	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang Tertib			**Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib**									
		2.24.02	**Program Pengelolaan Arsip**	**Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis**		**Kota Mataram**	**100 %**	**2.024.985.600**	**DAU**		**100 %**	**2.024.985.600**	**DPKP NTB**
		2.24.02.1.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	**Jumlah Pengolahan Arsip Dinamis**		**Kota Mataram**	**10,000 Berkas**	**980.000.000**	**DAU**		**10,000 Berkas**	**980.000.000**	**DPKP NTB**
		2.24.02.1.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi		Kota Mataram	17 Laporan	50.000.000	DAU		17 Laporan	52.500.000	DPKP NTB
		2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan		Kota Mataram	10.000 Arsip	25.000.000	DAU		10.000 Arsip	26.250.000	DPKP NTB
		2.24.02.1.01.0005	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi	Jumlah arsip yang di alih mediakan dan diautentikasi		Kota Mataram	500 Arsip	-	DAU		500 Arsip	-	DPKP NTB
		2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Jumlah daftar arsip dinamis		Kota Mataram	74.237 Arsip	50.000.000	DAU		74.237 Arsip	50.000.000	DPKP NTB
		2.24.02.1.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**	**Jumlah Arsip Statis yang Terselamatkan dan Dilestarikan**		**Kota Mataram**	**5,000 Arsip**	**400.000.000**	**DAU**		**5,000 Arsip**	**400.000.000**	**DPKP NTB**
		2.24.02.1.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.24.02.1.02.0003	Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Jumlah orang yang diwawancarai		Kota Mataram	2 Orang	-	DAU		2 Orang	-	DPKP NTB

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2.24.02.1.02.0004	Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Penerbitan Naskah Sumber Arsip	Jumlah penerbitan naskah sumber arsip		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi		Kota Mataram	150 Arsip	25.000.000	DAU		150 Arsip	25.000.000	DPKP NTB
		2.24.02.1.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**	**Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan nasional**		**Kota Mataram**	**15 Laporan**	**644.985.600**	**DAU**		**15 Laporan**	**644.985.600**	**DPKP NTB**
		2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Prov Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN		Kota Mataram	500 Pengguna	-	DAU		500 Pengguna	-	DPKP NTB
		2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi		Kota Mataram	15 Laporan	-	DAU		15 Laporan	-	DPKP NTB
		2.24.03	**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**Persentase Arsip yang Terselamatkan**		**Kota Mataram**	**100 %**	**50.000.000**	**DAU**		**100 %**	**50.000.000**	**DPKP NTB**
		2.24.03.1.01	**Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun**	**Jumlah Arsip yang Di Nilai**		**Kota Mataram**	**10,000 Arsip**	**50.000.000**	**DAU**		**10,000 Arsip**	**50.000.000**	**DPKP NTB**
		2.24.03.1.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		Kota Mataram	10,000 Arsip	-	DAU		10,000 Arsip	-	DPKP NTB
		2.24.03.1.01.0002	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.24.03.1.02	**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi**	**Jumlah Arsip Daerah Provinsi yang Terselamatkan Akibat Bencana**		**Kota Mataram**	**-**	**-**	**DAU**		**-**	**-**	**DPKP NTB**
		2.24.03.1.02.0001	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.24.03.1.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2.24.03.1.03	**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Arsip Daerah Provinsi yang digabung dan dibubarkan dan pemekaran daerah Kab/Kota**		**Kota Mataram**	-	-	**DAU**		-	-	**DPKP NTB**
		2.24.03.1.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.24.03.1.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Arsip Daerah yang di nilai		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.24.03.1.03.0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Terselamatkan		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.24.03.1.04	**Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi**	**Jumlah Arsip Digital yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi**		**Kota Mataram**	-	-	**DAU**		-	-	**DPKP NTB**
		2.24.03.1.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Arsip yang dinilai dan ditetapkan keabsahannya		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.24.03.1.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Arsip Digital yang memiliki Keabsahan Arsip		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.24.03.1.05	**Pencarian Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan Hilang**	**Jumlah Arsip Statis yang Dilestarikan**		**Kota Mataram**	-	-	**DAU**		-	-	**DPKP NTB**
		2.24.03.1.05.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Arsip Statis yang Dinilai		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.24.03.1.05.02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Arsip Digital yang dinilai		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB
		2.24.03.1.05.03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Arsip yang terdata		Kota Mataram	-	-	DAU		-	-	DPKP NTB

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2025 terdapat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatif. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk jangka waktu satu tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan dan perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja pada Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB diarahkan untuk mendukung rancangan RPD Provinsi NTB yang berpedoman pada hasil akhir review Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2024-2026, dimana program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada Renstra untuk Tahun 2025 telah termuat ke dalam Renja. Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2025 akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan.

Dengan disusunnya Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai tolak ukur keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB pada Tahun Anggaran 2025.

Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Nusa Tenggara Barat

H. Amir, S.Pd., MM.
NIP. 19720802 199303 1 013

RENCANA KERJA

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2025



Jl. Majapahit No.17 Telp. 0370-631502 - 631724, Fax. 0370-641151 Mataram (83117)
e-Mail: bappenda@ntbprov.go.id, www.bappenda.ntbprov.go.id

bappenda.ntb | bappenda.ntb | @bappenda.ntb | www.bappenda.ntbprov.go.id | bappenda@ntbprov.go.id

SamsatApps Nusa Tenggara Barat

CALL CENTER 1500186

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025



BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 merupakan penjabaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bappenda Provinsi NTB, khususnya dalam mendukung ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun Anggaran 2025, dengan memperhatikan situasi, kondisi, serta perkembangan keadaan yang terjadi selama periode tahun sebelumnya.

Renja Tahun 2025 memuat evaluasi terhadap capaian tujuan dan sasaran, serta perumusan kerangka kebijakan dan pendanaan, untuk mendukung optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran Bappenda Provinsi NTB Tahun 2025, yang disusun sesuai prinsip dan tata cara Perencanaan Pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Dengan mempedomani tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 – 2026 dan Rencana Strategis Bappenda Provinsi NTB Tahun 2024 – 2026. Renja Tahun 2025 yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja dalam rangka menunjang pencapaian misi Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Renja Bappenda Provinsi NTB Tahun 2026 dan semoga bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi Bappenda Provinsi NTB dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Mataram, Juli 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Hj. EVA DEWIYANI, S.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701210 199803 2 006

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN DEPAN		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	3
	1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
	2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah	5
	2.2. Analisis kinerja pelayanan Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat	19
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	22
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	23
	2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Pemerintah Daerah Provinsi NTB	36
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	37
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	37
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	37
	3.3. Program dan Kegiatan	38
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	52
	4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan	52
BAB V	PENUTUP	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat ……..…….….	6
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappenda Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023 ……..……....….	21
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat……..…	23
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 …….…….…….…….	34
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah …….……...…	38
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Bappenda Provinsi NTB……..…..	40
Tabel 4.1	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Bappenda Daerah Provinsi NTB ……	53

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan perundangan tersebut mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yaitu perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat operasional.

Sebagai salah satu dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja mempunyai posisi strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah. Tahapan penyusunan Renja meliputi persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Renja Perangkat Daerah ini disusun sebagai Rancangan Awal Renja sebagai arahan dalam merumuskan rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya serta evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-13.17 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan

Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019- 2023
13. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019- 2023;
14. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
15. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
16. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah untuk merumuskan Rencana Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Derah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Sementara tujuan disusunnya Renja ini sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan serta penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I **Pendahuluan.**

Berisi gambaran umum penyusunan Renja yang meliputi latar belakang, landasan hukum penyusunan, sistematika dokumen OPD, serta maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD.

Bab II **Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu**

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi serta Reviuw terhadap rancangan awal RKPD

Bab III **Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.**

Memuat penjelasan tentang telaah terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah dan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.

Bab IV **Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan OPD yang merupakan yang disusun berdasarkan prioritas daerah dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RKPD.

Bab V **Penutup**

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dilakukan untuk menjamin pembangunan daerah dilaksanakan sesuai rencana. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta memahami hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program dan kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Bappenda Provinsi NTB Tahun 2023 didasarkan pada Renstra Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kode	OPD Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra PD pada Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan Tahun yang dievaluasi (2023)	Realisasi s.d Triwulan IV	Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun dievaluasi 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	**Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD**	**Persen**	**38,65**	**38,65**	**48,69**	**48,34**	**48,32**	**99,24**	**48,32**	**125,02**
5.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai Sistem AKIP OPD**	**Nilai**	**90,15**	**85,00**	**85,50**	**-**	**-**	**-**	**81,14**	**90,01**
5.02.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**50,38**	**50,38**	**50,38**	**145,00**	**145,00**
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD, Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	Dokumen	6	2	2	1	2	99,14	4	63,39
5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan	Jumlah Dokumen	Dokumen	33	1	1	1	1	60,00	2	4,84

Kode	OPD Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra PD pada Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan Tahun yang dievaluasi (2023)	Realisasi s.d Triwulan IV	Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun dievaluasi 2023 (%)
	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD									
5.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP)	Dokumen	33	1	1	0	1	75,91	2	5,30
5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Dokumen	33	1	1	0	0	48,60	1	4,46
5.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)	Dokumen	33	1	1	1	1	63,76	2	4,69
5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi	Jumlah dokumen Laporan Kinerja Instansi	Dokumen	3	1	1	0	1	101,48	2	64,63

Kode	OPD Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra PD pada Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan Tahun yang dievaluasi (2023)	Realisasi s.d Triwulan IV	Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun dievaluasi 2023 (%)
	Kinerja SKPD	Pemerintah (LKjIP)									
5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Tahunan; Profil Kinerja Bappenda	Dokumen	6	2	2	1	2	88,80	4	61,05
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**93,50**	**96,78**	**92,04**	**98,43**		**-**
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan Non ASN	Orang	370	370	370	370	373	100,68	371	100,34
5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi	Dokumen	67.000	20.000	25.000	14.861	25.239	100,95	49.817	74,35
5.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dok. Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	33	11	11	-	1	8,87	12	35,30
5.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan hasil temuan yang ditindak lanjuti	Dokumen	6	2	2	2	2	94,62	4	62,58

Kode	OPD Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra PD pada Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan Tahun yang dievaluasi (2023)	Realisasi s.d Triwulan IV	Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun dievaluasi 2023 (%)
5.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Keuangan berkala	Dokumen	54	18	33	11	20	60,72	47	87,32
5.02.01.1.02.08	Penyesuaian Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	Dokumen	36	12	12	1	9	78,06	13	37,05
5.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase BMD yang tertib administrasi**	**Persen**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**9,60**	**10**	**11,30**		**-**
5.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	Dokumen	66	22	22	0	10	43,34	11	17,32
5.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen	99	33	33	5	22	66,87	32	32,69
5.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi BMD	Dokumen	3	1	1	0	1	87,76	2	57,57

Kode	OPD Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra PD pada Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan Tahun yang dievaluasi (2023)	Realisasi s.d Triwulan IV	Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun dievaluasi 2023 (%)
5.02.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Proporsi penerimaan pendapatan Bukan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah**	**Persen**	**21,26**	**2,42**	**0,84**	**25,45**	**26,87**	**3.216,49**		**-**
5.02.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah	Milyar Rp.	144	48,78	48,78	12	24	49,07	68	47,50
5.02.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Paket Pengembangan Aplikasi Pendapatan Retribusi	Paket	2	2,00	2,00	1	1	50,00	3	150,00
5.02.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Rekapitulasi dan Hasil Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	10	4,00	4,00	0,40	1	33,25	5	53,34
5.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang ditingkatkan kualitasnya**	**Persen**	**15,00**	**100,00**	**100,00**	**37,04**	**73,54**	**73,54**		**-**
5.02.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah kali pelaksanaan kegiatan imtak dan olahraga	Kali	220	220	220	83	161	73,35	221	100,44

Kode	OPD Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra PD pada Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan Tahun yang dievaluasi (2023)	Realisasi s.d Triwulan IV	Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun dievaluasi 2023 (%)
5.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Data pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	3	1	1	1	1	112,40	2	66,00
5.02.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	36	12	12	5	11	90,60	22	60,12
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan formal, diklat teknis substantif, diklat teknis struktural dan fungsional	Orang	15	5	5	-	2	47,93	3	16,83
5.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pendapatan Daerah	Paket	2	2	2	-	-	-	-	-
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyeselesaian Administrasi Umum OPD**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**23,77**	**83,34**	**83,34**		**-**

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode	OPD Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra PD pada Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan Tahun yang dievaluasi (2023)	Realisasi s.d Triwulan IV	Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun dievaluasi 2023 (%)
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Jenis	675	265	265	85	259	97,84	508	75,21
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	300	300	18	17	17	94,74	34	11,37
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	Paket	10	-	-	-	-	-	-	-
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Paket	370	125	125	20	95	76,25	169	45,59
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis	145	145	145	70	119	82,11	217	149,93
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan	Jenis	45	45	45	13	36	79,88	74	164,82
5.02.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi	Orang/Tahun	4.500	1	1	0	1	103,17	2	0,05
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Kali Penyelenggaraan	Kali	150	150	150	3	106	70,58	117	77,96

Kode	OPD Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra PD pada Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan Tahun yang dievaluasi (2023)	Realisasi s.d Triwulan IV	Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun dievaluasi 2023 (%)
	Konsultasi SKPD	Rapat									
5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bahan dan alat pendukung penataan arsip	Berkas	43.000	44	18.000	1.200	1.207	6,71	18.132	42
5.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Kunjungan website resmi Bappenda	Kunjungan	174.870	22.000	65.000	18.500	31.813	48,94	92.500	52,90
5.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan BMD Penunjang**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**13,24**	**42,95**	**42,95**		**-**
5.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional tersedia	Unit	2	-	-	-	-	-	2	96,55
5.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Buah/Set	112	-	14	14	14	97,05	27	24,42
5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Unit/Paket	62	5	82	-	4	5,10	36	57,83
5.02.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud	Paket	20	5	6	-	-	-	6	31,49
5.02.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah gedung kantor atau bangunan	Unit	3	-	1	-	-	-	-	-

Kode	OPD Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra PD pada Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan Tahun yang dievaluasi (2023)	Realisasi s.d Triwulan IV	Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun dievaluasi 2023 (%)
	Lainnya	lainnya									
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**17,19**	**59,14**	**59,14**		**-**
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang diadministrasikan	Surat	36.000	10.000	11.038	1.860	5.968	54,07	15.279	42,44
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis	12	4	4	1	3	83,55	6	54,00
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kanor	Jumlah tenaga administrasi keuangan dan layanan umum kantor lainnya	Orang	600	296	417	109	319	76,62	732	122,06
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**48,14**	**102,34**	**102,34**		**-**
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah kendaraan jabatan yang di pelihara dan dibayar PKBnya	Unit	1	1	1	0,22	1	139,93	2	232,54

Kode	OPD Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra PD pada Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan Tahun yang dievaluasi (2023)	Realisasi s.d Triwulan IV	Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun dievaluasi 2023 (%)
	Dinas atau Kendaraan Jabatan										
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang di pelihara dan dibayar PKBnya	Unit	189	200	38	6	126	330,96	163	86,28
5.02.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah meubel dan perlengkapannya yang dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	-	2	-
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin	Unit	275	220	250	119	240	95,88	447	162,37
5.02.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah paket aset tak berwujud	Paket	25	25	22	4	14	64,01	36	142,88
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan yang dipelihara atau direhab	Unit	134	45	155	95	110	70,67	273	203,47
5.02.02	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Derajat Desentralisasi Fiskal**	**Persen**	38,44	**35,2**	**48,69**	**39,36**	39,36	80,84	46,95	122,14

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode	OPD Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra PD pada Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan Tahun yang dievaluasi (2023)	Realisasi s.d Triwulan IV	Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun dievaluasi 2023 (%)
5.02.02.1.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Pertumbuhan Pendapatan Daerah**	**Persen**	**4,79**	**4,05**	**15,51**	**7,39**	**2,95**	**19,00**	**2**	**50,20**
5.02.02.1.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Target Pendapatan Daerah	Dokumen	6	2	2	1	1	61,64	3	53,76
5.02.02.1.03	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah**	**Persen**	**60,54**	**63,79**	**51,31**	**54,17**	**-**	**-**	**56**	**92,86**
5.02.02.1.03.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Penerimaan Dana Perimbangan	Milyar Rp	10.598,84	3.499,22	3.142,94	893,40	2.979	94,80	23,00	0,22
5.02.04	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)**	**Persen**	**54,03**	**50,12**	**57,72**	**57,52**	**57,52**	**114,76**	**110,84**	**205,12**
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah**	**Persen**	**9,59**	**9,91**	**8,89**	**20,40**	**96,20**	**970,74**	**117**	**1.223,46**

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode	OPD Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra PD pada Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan Tahun yang dievaluasi (2023)	Realisasi s.d Triwulan IV	Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun dievaluasi 2023 (%)
5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah target pajak daerah yang ditetapkan	Milyar Rp	4.976,41	2.032,21	1.996,21	489,69	2.719,25	133,81	5.437	109,25
5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) pelayanan pajak daerah	MoU	15	5	5	0	2	47,63	6	41,92
5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Perorangan dan badan	Persen	75,00	66,86	66,86	28	80	120,40	135	180,07
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah paket perangkat keras sistem jaringan komunikasi dan informasi	Paket	36	12	10	3	8	64,90	13	36,85
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Data Obyek Kendaraan Bermotor	Obyek	1.918.415	1.169.088	1.126.416	247.746	915.001	78,27	1.883.928	98,20
5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Record yang diolah dan disimpan dalam Database	Obyek	1.936.000	1.800.000	1.800.000	304.746	1.058.113	58,78	1.882.214	97,22

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode	OPD Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra PD pada Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan Tahun yang dievaluasi (2023)	Realisasi s.d Triwulan IV	Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun dievaluasi 2023 (%)
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak baru yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak kendaraan Bermotor	Obyek	417.504	121.924	120.055	57.000	143.112	117,38	239.908	57,46
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Angka partisipasi Wajib Pajak yang menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan bermotornya	Persen	85,00	64,20	16,07	14,39	86,65	134,98	174	204,96
5.02.04.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah WP Penunggak Pajak yang menyelesaikan kewajiban pajaknya	Obyek	682.186	178.229	178.229	44.860	131.670	73,88	276.496	40,53
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah WP penerima Surat Teguran PKB yang melunasi tunggakan PKBnya	Obyek	845.618	66.680	77.180	30.226	73.866	110,78	75.744	8,96
5.02.04.1.01.11	Penyelesaian Keberatan Pajaka Darah	Jumlah kasus keberatan pajak daerah yang ditindak lanjuti	Kasus	5	3	3	1	3	100	6	120,00
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemerikasaan dan Pengawasan Pajak	WP Terjaring Operasi Sadar PKB yang menyelesaikan	Obyek	90.937	27.409	23.298	18.916	33.103	120,77	61.204	67,30

Kode	OPD Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra PD pada Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan Tahun yang dievaluasi (2023)	Realisasi s.d Triwulan IV	Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun dievaluasi 2023 (%)
	Daearh	kewajiban/ tunggakan PKBnya									
5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah penerimaan Dana Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, Lain-lain PAD yang Sah, dan penerimaan Pendapatan Lain-lain	Milyar Rp	2.279,15	917,76	961,19	892,54	1.443	157,22	2.329	102,19

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel sebagaimana tujuan yang hendak dicapai oleh Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2023 diperlukan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dihasilkan Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menjalankan tugas fungsinya. Tujuan yang hendak dicapai oleh Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat mendukung tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai implementasi visi dan misi Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023, yang dalam hal ini mendukung misi ke-2 yakni Bersih Dan Melayani melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi.

Sesuai Renstra Bappenda Tahun 2019-2023, Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat mendukung sasaran Pemerintah Daerah yaitu meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator sasaran Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD. Selaras dengan hal tersebut, maka sasaran yang hendak dicapai oleh Bappenda Provinsi NTB adalah :

1. Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
3. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah yang semakin kuat dan responsif.

Adapun indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Bappenda Provinsi NTB beserta target dan capaian realisasinya dinyatakan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun Anggaran 2023

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM	IKK	Target RENSTRA Tahun				Realisasi Capaian Tahun			
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD (%)	-	-	34,06	35,41	36,97	38,65	35,09	35,45	43,23	48,32
2.	Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah (milyar)			5.049,03	5.739,96	5.796,56	6.073,97	5.174,59	5.326,93	5.042,21	5.765,18
3.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)			51,66	54,82	58,12	62,45	54,06	55,31	75,38	93,02
4.	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (%)					9,08	9,59			21,37	1,54
5.	Nilai Persepsi Masyarakat atas kualitas Pelayanan Pajak Daerah (%)			85,00	88,50	92,50	97,50	85,27	82,15	87,79	85,22
6.	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (%)					63,64	66,33			51,04	71,91

Sumber data: LKjIP Tahun 2022, data diolah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Adapun yang menjadi isu penting yang mempengaruhi tugas dan fungsi Bappenda Provinsi NTBbelum optimalnya penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah setyaitu implementasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang disusun sebagai upaya penyempurnaan implementasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan Hal itu dilakukan guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: **pertama** mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, **kedua** mengembangkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan Transfer Ke Daerah dan pembiayaan utang daerah, **ketiga** mendorong peningkatan kualitas belanja daerah, serta **keempat** harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Isu penting lainnya yaitu Optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang terus dilakukan dengan elektrofikasi transaksi atau transaksi digital disemua sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sementara jenis penerimaan yang sudah melakukan transaksi digital yaitu dengan memperbanyak layanan berbasis digital seperti QRIS, EDC, serta *Payment Point Online Bank* (PPOB). Melakukan validasi data kendaraan terhadap obyek pajak kendaraan bermotor yang masih menunggak pajaknya dan sudah jatuh tempo pembayarannya diatas 2 (dua) tahun.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2025 disusun mengakomodir peraturan pemerintah pusat, sehingga terjadi penyesuaian sampai pada level program kegiatan dan sub kegiatan. Secara terinci program, kegiatan dan subkegiatan sesuai rancangan awal RKPD Tahun 2025 dan Hasil Analisis Kebutuhan, sebagaimana tabel 3 di bawah.

Rancangan awal RKPD 2024 disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-13.17 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun dalam rancangan RKPD 2025 Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB mengakomodir 3 program, 12 kegiatan, dan 67 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp119.731.326.283,- terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan pagu indikatif Rp 112.721.842.891-, Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu indikatif Rp204.147.023,- serta Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan pagu indikatif Rp6.805.336.369,-.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Bappenda NTB**	**Nilai Sistem AKIP OPD**	**A**	**105.768.958.928**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Nilai Sistem AKIP OPD**	**A**	131.431.678.520
01.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappenda NTB	**Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja**	**100**	**435.745.474**	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja**	100	390.098.000
01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	101.488.503	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	106.798.000
01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	41.707.929	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	43.910.000
01.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	41.707.929	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	45.210.000
01.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	13.635.285	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	8.160.000
01.01.05	Koordinasi dan Penyusunan	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	13.635.285	Koordinasi dan Penyusunan	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	8.760.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
	Perubahan DPA-SKPD		dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			Perubahan DPA-SKPD		dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	92.832.226	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	76.700.000
01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	130.738.317	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	100.560.000
01.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bappenda NTB**	**Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD**	**3,88**	**78.696.396.324**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bappenda NTB**	**Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD**	**3,88**	94.220.969.949
01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappenda NTB	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360	77.919.691.816	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappenda NTB	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360	93.454.172.749
01.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	25.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	5.100.000
01.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	504.970.022	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	574.597.200

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
01.02.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	60.853.475	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	51.240.000
01.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	37.657.447	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	26.560.000
01.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	86.784.576	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	56.040.000
01.02.07	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	61.438.988	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	53.260.000
01.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Bappenda NTB**	**Persentase BMD yang tertib administrasi**	**85**	**374.569.289**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Bappenda NTB**	**Persentase BMD yang tertib administrasi**	**85**	**355.794.550**
01.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	22	213.456.370	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	22	76.902.750

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
01.03.02	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	22	124.843.060	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	22	66.536.800
01.03.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	36.269.859	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	212.355.000
01.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Bappenda NTB**	**Persentase Penerimaan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah**	**0,71**	**222.145.270**	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Bappenda NTB**	**Persentase Penerimaan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah**	**0,71**	**222.145.270**
01.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1	91.933.784	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1	81.933.784
01.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah. serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1	55.027.486	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah. serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1	50.027.486
01.04.03	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	1	15.000.000	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	1	15.000.000
01.04.04	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4	60.184.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4	75.184.000
01.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Bappenda NTB**	**Persentase aparatur yang ditingkatkan kualitasnya**	**0,05**	**399.852.101**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Bappenda NTB**	**Persentase aparatur yang ditingkatkan kualitasnya**	**0,05**	**399.852.101**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
01.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Bappenda NTB	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	220	108.008.880	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Bappenda NTB	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	220	108.008.880
01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bappenda NTB	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	360	36.093.400	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bappenda NTB	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	360	36.093.400
01.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11	52.134.915	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11	52.134.915
01.05.04	Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	11	60.155.670	Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	11	60.155.670
01.05.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bappenda NTB	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	30.526.900	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bappenda NTB	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	30.526.900
01.05.06	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappenda NTB	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	80.528.484	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappenda NTB	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	80.528.484
01.05.07	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappenda NTB	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	32.403.852	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappenda NTB	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	32.403.852
01.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bappenda NTB**	**Persentase penyeselesaian Administrasi Umum**	**100**	**5.474.441.762**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bappenda NTB**	**Persentase penyeselesaian Administrasi Umum**	**100**	**5.474.441.762**

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			OPD					OPD		
01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bappenda NTB	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30	180.467.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bappenda NTB	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30	180.467.000
01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappenda NTB	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	115	40.103.770	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappenda NTB	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	115	40.103.770
01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bappenda NTB	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	5.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bappenda NTB	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	5.000.000
01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bappenda NTB	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1.130.613.728	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bappenda NTB	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1.130.613.728
01.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bappenda NTB	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	120	883.037.073	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bappenda NTB	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	120	883.037.073
01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	89.832.463	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	89.832.463
01.06.07	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	694.060.070	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	694.060.070
01.06.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	1.901.801.374	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	1.901.801.374

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
01.06.09	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	39.526.284	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	39.526.284
01.06.10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	510.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	510.000.000
01.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bappenda NTB**	**Persentase pemenuhan BMD Penunjang**	**100**	**2.454.945.385**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bappenda NTB**	**Persentase pemenuhan BMD Penunjang**	**100**	10.024.459.200
01.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappenda NTB	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	350.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappenda NTB	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	622.560.000
01.07.02	Pengadaan Mebel	Bappenda NTB	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25	248.643.425	Pengadaan Mebel	Bappenda NTB	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25	694.665.200
01.07.03	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappenda NTB	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	589.525.540	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappenda NTB	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	785.320.000
01.07.04	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Bappenda NTB	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	5	88.228.312	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Bappenda NTB	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	5	140.240.000
01.07.05	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappenda NTB	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	937.925.448	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappenda NTB	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	7.540.360.000
01.07.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Bappenda NTB	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	7	240.622.660	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Bappenda NTB	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	7	241.314.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
	Lainnya		Disediakan			Lainnya		Disediakan		
01.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bappenda NTB**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD**	**100**	**14.447.315.668**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bappenda NTB**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD**	**100**	16.940.814.000
01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11	87.233.738	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11	113.565.000
01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	3.043.563.963	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	3.639.553.000
01.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	11.316.517.967	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	13.187.696.000
01.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bappenda NTB**	**Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD**	**100**	**3.263.547.655**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bappenda NTB**	**Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD**	**100**	3.761.093.000
01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bappenda NTB	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	25.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bappenda NTB	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	25.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappenda NTB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	192	1.923.904.292	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappenda NTB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	192	2.289.250.000
01.09.03	Pemeliharaan Mebel	Bappenda NTB	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25	40.103.780	Pemeliharaan Mebel	Bappenda NTB	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25	15.060.000
01.09.04	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappenda NTB	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	490	528.567.797	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappenda NTB	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	490	487.570.000
01.09.05	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Bappenda NTB	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5	88.228.312	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Bappenda NTB	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5	75.060.000
01.09.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bappenda NTB	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11	645.712.341	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bappenda NTB	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11	842.945.000
01.09.07	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappenda NTB	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11	12.031.133	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappenda NTB	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11	26.208.000
2	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Bappenda NTB**	**Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah**	**55,87**	**208.229.963**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Bappenda NTB**	**Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah**	**55,87**	187.820.000
02.01	**Koordinasi dan Penyusunan**	**Bappenda NTB**	**Pertumbuhan Pendapatan Daerah**	**-5,47**	**113.229.963**	**Koordinasi dan Penyusunan**	**Bappenda NTB**	**Pertumbuhan Pendapatan Daerah**	**-5,47**	99.360.000

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
	Rencana Anggaran Daerah					**Rencana Anggaran Daerah**				
02.01.01	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2	113.229.963	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2	89.360.000
02.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Bappenda NTB**	**Persentase Peningkatan Pendapatan Transfer**	**0,11**	**95.000.000**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Bappenda NTB**	**Persentase Peningkatan Pendapatan Transfer**	**0,11**	88.460.000
02.02.01	Koordinasi. Fasilitasi. Asistensi. Sinkronisasi. Supervisi. Monitoring. dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Fasilitasi. Asistensi. Sinkronisasi. Supervisi. Monitoring. dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2	95.000.000	Koordinasi. Fasilitasi. Asistensi. Sinkronisasi. Supervisi. Monitoring. dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Fasilitasi. Asistensi. Sinkronisasi. Supervisi. Monitoring. dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2	68.460.000
3	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Bappenda NTB**	**Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK**	**47,18**	**5.941.443.096**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Bappenda NTB**	**Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK**	**47,18**	**5.941.443.096**
03.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Bappenda NTB**	**Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah**	**-11,2**	**5.941.443.096**	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Bappenda NTB**	**Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah**	**-11,2**	**9.141.483.000**
03.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4	261.663.712	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4	417.300.000

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah. serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2	208.242.765	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah. serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2	274.170.000
03.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12	169.853.826	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12	179.560.000
03.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	100	671.028.669	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	100	1.463.080.000
03.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	518.282.113	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	810.950.000
03.01.06	Pengolahan. Pemeliharaan. dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan. Pemeliharaan. dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12	111.293.679	Pengolahan. Pemeliharaan. dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan. Pemeliharaan. dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12	216.960.000
03.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12	1.101.062.977	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12	1.885.260.000
03.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11	98.156.044	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11	36.308.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	4	22.258.728	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	4	8.010.000
03.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	484.686.273	Penagihan Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	678.105.000
03.01.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1	24.731.919	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1	14.810.000
03.01.12	Pengendalian. Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	40	2.014.620.672	Pengendalian. Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	40	2.845.620.000
03.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2	205.561.719	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2	218.460.000
03.01.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1	50.000.000	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1	92.890.000

2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Pemerintah Daerah Provinsi NTB

Dalam renja perangkat daerah tahun 2025 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB pada tahun 2025 tidak melakukan penelaahan usulan program dan kegiatan yang berasal dari usulan lembaga swadaya masyarakat, asosiasi, tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun perguruan tinggi.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Adanya UU 1 Tahun 2022 diharapkan meminimalisir ketimpangan vertikal antara jenjang pemerintah Pusat, Provinsi, kabupaten, dan kota, serta ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah pada level yang sama. Untuk itulah terdapat beberapa perbaikan dalam kebijakan khususnya terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk meminimalkan ketimpangan tersebut, yaitu dengan melakukan reformulasi DAU dengan presisi ukuran kebutuhan yang lebih tinggi di mana DAU untuk masing-masing daerah dialokasikan berdasarkan Celah Fiskal tidak lagi menambah formula Alokasi Dasar. Selain itu mengembangkan sistem pajak daerah dengan mendukung alokasi sumber daya nasional yang lebih efisien. Kebijakan yang dirumuskan dalam menguatkan sistem perpajakan daerah yaitu melalui harmonisasi pengaturan dengan tetap memberikan dukungan terhadap dunia usaha, mengurangi retribusi atas layanan wajib yang sudah seharusnya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dengan melakukan rasionalisasi retribusi dari 32 menjadi 18 layanan, menciptakan basis pajak baru melalui sinergi Pajak Pusat dengan Pajak Daerah berupa konsumsi, properti, dan sumber daya alam. Selain itu adanya opsen perpajakan daerah antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai penggantian skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan berupa Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Opsen beberapa 3 jenis Pajak Daerah tersebut tidak akan menambah beban bagi Wajib Pajak tetapi split langsung pembayaran Wajib Pajak ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai Perangkat Daerah Bappenda Provinsi NTB dalam Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Target Indikator Tahun 2024
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah	1.1 Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (*Milyar rupiah*)	2.249,47
			1.1.2 Persentase Peningkatan PAD (Persen)	-11,68
		1.2 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1.2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (point)	95,00
			1.2.2 Jumlah Pengguna Layanan Unggulan (Objek)	11.015

Sumber data: Dokumen Renstra Bappenda Provinsi NTB2024-2026

3.3 Program dan Kegiatan

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB pada tahun 2025 merumuskan dan merencanakan Program dan Kegiatan yang diakomodir dalam 3 Program 12 Kegiatan dan 66 Sub Kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan beserta kebutuhan dana/pagu indikatif untuk tahun rencana 2024 maupun prakiraan maju tahun 2025.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 356-61 Tahun 2024 tentang Penetapan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Pilot Project Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Bappenda Provinsi NTB sebagai salah satu Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk mewakili Provinsi NTB dalam kegiatan tersebut. Untuk itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait pajak kendaraan bermotor, Bappenda dari tahun ini sampai kedepannya berencana akan menyiapkan infrastruktur layanan melalui penyeragaman infrastruktur layanan karena sampai dengan saat ini kondisi infrastruktur pendukung berupa perangkat keras pendukung kesamsatan serta internet sebagai jalur komunikasi data serta sarana dan prasarana pendukung lainnya seperti gedung yang belum memenuhi standar layanan serta sarana dan sarana pendukung lainnya, dan hal ini didukung dengan biaya yang cukup.

Adapaun Program Kegiatan yang akan dilakukan Bappenda Provinsi selain terus melakukan Optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah juga meningkatkan kualitas layanan dengan menganggarkan biaya rehabilitasi sarana prasarana yang sudah tidak layak guna.

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2.1.1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Dan Operasional Perkantoran**		**90 Persen**	**104.811.948.240**		**90%**	**108.781.010.640**
5.2.1.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja**		**100 Persen**	**435.760.000**		**100%**	**435.760.000**
5.2.1.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mataram	2 Dokumen	101.490.000		2 Dokumen	101.490.000
5.2.1.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen RKA-SKPD	Mataram	1 Dokumen	41.710.000		1 Dokumen	41.710.000
5.2.1.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mataram	1 Dokumen	41.710.000		1 Dokumen	41.710.000
5.2.1.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Mataram	1 Dokumen	13.640.000		1 Dokumen	13.640.000
5.2.1.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	Mataram	1 Dokumen	13.640.000		1 Dokumen	13.640.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DPA- SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						
5.2.1.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mataram	2 Laporan	92.830.000		2 Laporan	92.830.000
5.2.1.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mataram	2 Laporan	130.740.000		2 Laporan	130.740.000
5.2.1.1.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD**		**93,5 Persen**	**78.430.033.630**		**93,5 Persen**	**80.430.033.630**
5.2.1.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Mataram	360 Orang/ Bulan	77.663.513.630	Pagu Anggaran disesuaikan dengan jumlah pegawai dan target Pajak Daerah TA berikutnya	360 Orang/ Bulan	79.663.513.630
5.2.1.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Mataram	1 Dokumen	25.000.000		1 Dokumen	25.000.000
5.2.1.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Se-NTB	12 Dokumen	494.934.600		4 Dokumen	494.934.600

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
5.2.1.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mataram	1 Laporan	60.850.000		1 Laporan	60.850.000
5.2.1.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Mataram	2 Dokumen	37.660.000		2 Dokumen	37.660.000
5.2.1.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Mataram	18 Laporan	86.780.000		18 Laporan	86.780.000
5.2.1.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Mataram	12 Dokumen	61.295.400		12 Dokumen	61.295.400
5.2.1.1.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase BMD yang tertib administrasi**		**85 Persen**	**414.327.600**		**85 Persen**	**414.327.600**
5.2.1.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Se-NTB	22 Dokumen	171.062.200		22 Dokumen	171.062.200
5.2.1.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	Se-NTB	22 Laporan	92.295.400		22 Laporan	92.295.400

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Barang Milik Daerah pada SKPD	Barang Milik Daerah pada SKPD						
5.2.1.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Se-NTB	1 Laporan	150.970.000		1 Laporan	150.970.000
5.2.1.1,04.	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penerimaan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah**		**0,71 Persen**	**207.140.000**		**0,71 Persen**	**157.140.000**
5.2.1.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Se-NTB	1 Dokumen	91.930.000		1 Dokumen	91.930.000
5.2.1.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah danKebijakan Retribusi Daerah	Mataram	1 Dokumen	55.030.000		1 Dokumen	5.030.000
5.2.1.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Se-NTB	4 Laporan	60.180.000		4 Laporan	60.180.000
5.2.1.1.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang ditingkatkan kualitasnya**		**17 Persen**	**396.247.800**		**17 Persen**	**396.247.800**
5.2.1.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Se-NTB	240 220 Unit	104.407.800		240 220 Unit	104.407.800
5.2.1.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Mataram	370 buah	36.090.000		370 buah	36.090.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2.1.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Mataram	11 Dokumen	52.130.000		11 Dokumen	52.130.000
5.2.1.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Mataram	11 Dokumen	60.160.000		11 Dokumen	60.160.000
5.2.1.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Luar Daerah/ Dalam Daerah	15 Orang	30.530.000		15 Orang	30.530.000
5.2.1.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Mataram	100 Orang	80.530.000		100 Orang	80.530.000
5.2.1.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar Daerah/ Dalam Daerah	96 Orang	32.400.000		96 Orang	32.400.000
5.2.1.1.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyeselesaian Administrasi Umum OPD**		**100 Persen**	**4.697.206.010**		**100 Persen**	**5.261.148.410**
5.2.1.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Se-NTB	25 Paket	179.193.500		25 Paket	179.193.500
5.2.1.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Mataram	2 Paket	11.200.000		2 Paket	11.200.000
5.2.1.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	Mataram	1 Paket	5.000.000		1 Paket	5.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Disediakan						
5.2.1.1.07.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Se-NTB	125 Paket	1.128.054.900		125 Paket	1.128.054.900
5.2.1.1.08.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Se-NTB	140 Paket	882.152.810		140 Paket	882.152.810
5.2.1.1.09.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Se-NTB	5 Dokumen	100.782.000		5 Dokumen	100.782.000
5.2.1.1.10.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Se-NTB	5 Laporan	786.765.200		5 Laporan	786.765.200
5.2.1.1.11.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Se-NTB	12 Laporan	1.580.000.000		12 Laporan	1.880.000.000
5.2.1.1.12.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Mataram	2 Dokumen	38.000.000		2 Dokumen	38.000.000
5.2.1.1.13.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Mataram	12 Dokumen	250.000.000		12 Dokumen	250.000.000
5.2.1.1.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan BMD Penunjang**		**100 Persen**	**1.313.513.100**		**100 Persen**	**2.313.633.100**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2.1.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Mataram	1 Unit	250.000.000		3 Unit	900.000.000
5.2.1.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mataram	23 Paket	249.200.000		23 Paket	249.200.000
5.2.1.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Se-NTB	52 Unit	473.803.100		52 Unit	473.803.100
5.2.1.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Mataram	4 Unit	88.230.000		4 Unit	88.230.000
5.2.1.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Se-NTB	1 Unit	126.200.000	Pembangun Kantor Samsat Praya jika gagal, akan dialihkan ke tahun berikutnya sesuai kemampuan keuangan daerah	1 Unit	376.200.000
5.2.1.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Se-NTB	10 Unit	126.200.000		10 Unit	226.200.000
5.2.1.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD**		**100 Persen**	**15.619.327.800**		**100 Persen**	**15.619.327.800**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2.1.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Se-NTB	12 Laporan	86.376.800		12 Laporan	86.376.800
5.2.1.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Se-NTB	12 Laporan	3.038.602.600		12 Laporan	3.038.602.600
5.2.1.1.08.0003	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Se-NTB	12 Laporan	12.494.348.400		12 Laporan	12.494.348.400
5.2.1.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja**		**100 Persen**	**3.298.392.300**		**100 Persen**	**3.753.392.300**
5.2.1.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Se-NTB	1 Unit	25.000.000		1 Unit	25.000.000
5.2.1.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Se-NTB	35 Unit	1.962.564.300		35 Unit	1.962.564.300
5.2.1.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Se-NTB	125 Unit	25.000.000		125 Unit	25.000.000
5.2.1.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Se-NTB	120 Unit	519.823.600		120 Unit	519.823.600

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2.1.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Mataram	10 Unit	80.000.000		10 Unit	80.000.000
5.2.1.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Se-NTB	12 Unit	611.004.400		12 Unit	1.061.004.400
5.2.1.1,09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Se-NTB	11 Unit	80.000.000		11 Unit	80.000.000
5.2.2..	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Proporsi Dana Transfer Terhadap Pendapatan Daerah**		**52,82 Persen**	**205.000.000**		**52,82 Persen**	**205.000.000**
5.2.2.1,01.	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Pertumbuhan Pendapatan Daerah**		**-5,47 Persen**	**110.000.000**		**-5,47 Persen**	**110.000.000**
5.2.2.1,01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Mataram	2 Dokumen	110.000.000		2 Dokumen	110.000.000
5.2.2.1,03.	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Persentase Peningkatan Pendapatan Transfer		0,11 Persen	95.000.000		0,11 Persen	95.000.000
5.2.2.1,03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana	Luar Daerah/ Dalam Daerah	4 Dokumen	95.000.000		4 Dokumen	95.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						
05.02.04	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Diluar DAK**		**47,19 Persen**	**5.971.455.200**		**47,19 Persen**	**7.369.355.200**
5.2.4.1.01.	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah**		**-11,72 Persen**	**5.971.455.200**		**-11,72 Persen**	**7.369.355.200**
5.2.4.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Mataram	12 Dokumen	305.000.000		12 Dokumen	305.000.000
5.2.4.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Mataram	12 Laporan	200.000.000		12 Laporan	200.000.000
5.2.4.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Se-NTB	52 Laporan	213.918.500		52 Laporan	213.918.500
5.2.4.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Se-NTB	40 Sarana dan Prasarana	600.000.000		40 Sarana dan Prasarana	900.000.000
5.2.4.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Se-NTB	52 Laporan	676.145.500		52 Laporan	676.145.500

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2.4.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Se-NTB	12 Laporan	100.000.000		12 Laporan	100.000.000
5.2.4.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Se-NTB	1 Dokumen Ketetapan	1.086.250.700		1 Dokumen Ketetapan	1.236.250.700
5.2.4.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindak lanjuti.	Se-NTB	12 Laporan	96.200.000		12 Laporan	96.200.000
5.2.4.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Se-NTB	4 Dokumen	22.000.000		4 Dokumen	22.000.000
5.2.4.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Se-NTB	2 Dokumen	470.840.500		2 Dokumen	470.840.500
5.2.4.1.01.0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Se-NTB	2 Dokumen	24.000.000		2 Dokumen	24.000.000
5.2.4.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Se-NTB	4 Laporan	1.922.100.000		4 Laporan	2.850.000.000
5.2.4.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Se-NTB	4 Laporan	205.000.000		4 Laporan	205.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2.4.1.01.0014	ElektroniWikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan ElektroniWikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Se-NTB	2 Laporan	50.000.000		2 Laporan	70.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana Kerja Bappenda Provinsi NTB pada Tahun 2025 lebih mengacu kepada memaksimalkan penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan fiskal daerah guna memenuhi pendanaan Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagai Perangkat Daerah selaku koordinator pengelola pendapatan daerah, Bappenda Provinsi NTB juga memiliki tugas sebagai Perangkat Daerah teknis yang melakukan pemungutan langsung berupa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Pajak Daerah yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan serta pelaksaan Perda No. 2 Tahun 2022 yaitu pemungutan atas Pajak Kendaraan Alat Berat.

Untuk mendukung upaya tersebut maka dibutuhkan sumber daya berupa pendanaan terkait dengan biaya operasional pemungutan pajak daerah serta peremajaan infrastruktur peralatan Kesamsatan, berupa peralatan teknis dan jaringan internet. Disamping itu perlu dilakukan adanya dukungan infrastruktur bangunan gedung berupa raung pelayanan wajib pajak dan ruang kerja petugas yang nyaman. Disamping itu akan direncanakan pengadaan beberapa unit mobil operasional seperti mobil samsat keliling dalam memaksimalkan pelayanan publik, kendaraan truk dalam rangka operasi sadar pajak, dan beberapa unit kendaraan operasional pengganti kendaraan operasional yang sudah tidal laik jalan,

Tabel 4.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Indikator	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
5.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran**			**90 Persen**	**104.811.948.240**	
5.02.01.1.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja**			**100 Persen**	**435.760.000**	
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappenda dan UPTB	Mataram	2 Dokumen	101.490.000	DAU
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bappenda dan UPTB	Mataram	1 Dokumen	41.710.000	DAU
5.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bappenda dan UPTB	Mataram	1 Dokumen	41.710.000	DAU
5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Bappenda dan UPTB	Mataram	1 Dokumen	13.640.000	DAU
5.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Bappenda dan UPTB	Mataram	1 Dokumen	13.640.000	DAU
5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Bappenda dan UPTB	Mataram	2 Laporan	92.830.000	DAU

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Indikator	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
		Realisasi Kinerja SKPD					
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2 Laporan	130.740.000	DAU
5.02.01.1.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD**			**93,50 Persen**	**78.430.033.630**	
5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ASN	Se-NTB	360 Orang/Bulan	77.663.513.630	DAU
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	ASN	Se-NTB	1 Dokumen	25.000.000	DAU
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bappenda & UPTB	Se-NTB	4 Dokumen	494.934.600	DAU
5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bappenda & UPTB	Se-NTB	1 Laporan	60.850.000	DAU
5.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Bappenda & UPTB	Se-NTB	2 Dokumen	37.660.000	DAU
5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bappenda & UPTB	Se-NTB	18 Laporan	86.780.000	DAU
5.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bappenda & UPTB	Se-NTB	12 Dokumen	61.295.400	DAU
5.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase BMD yang tertib administrasi**			**85 Persen**	**414.327.600**	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Indikator	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bappenda & UPTB	Se-NTB	22 Dokumen	171.062.200	DAU
5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappenda & UPTB	Se-NTB	22 Laporan	92.295.400	DAU
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappenda & UPTB	Se-NTB	1 Laporan	150.970.000	DAU
5.02.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah bukan Pajak**			**35 Persen**	**207.140.000**	
5.02.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	OPD Pendapatan	Se-NTB	1 Dokumen	91.930.000	PAD
5.02.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	OPD Pendapatan	Se-NTB	1 Dokumen	55.030.000	PAD
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	OPD Pendapatan	Se-NTB	4 Laporan	60.180.000	PAD
5.02.01.1.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang ditingkatkan kualitasnya**			**1,50 Persen**	**396.247.800**	
5.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Bappenda & UPTB	Se-NTB	220 Unit	104.407.800	DAU
5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Bappenda & UPTB	Se-NTB	370 Paket	36.090.000	DAU
5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bappenda & UPTB	Se-NTB	11 Dokumen	52.130.000	DAU
5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan	Jumlah Dokumen Monitoring,	Bappenda &	Se-NTB	11 Dokumen	60.160.000	DAU

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Indikator	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penilaian Kinerja Pegawai	Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	UPTB				
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bappenda & UPTB	Mataram	15 Orang	30.530.000	DAU
5.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappenda & UPTB	Mataram	100 Orang	80.530.000	DAU
5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappenda & UPTB	Mataram	96 Orang	32.400.000	DAU
5.02.01.1.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyeselesaian Administrasi Umum OPD**			**100 Persen**	**4.712.146.010**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bappenda & UPTB	Se-NTB	25 Paket	179.193.500	DAU
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bappenda & UPTB	Se-NTB	2 Paket	11.080.000	DAU
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bappenda & UPTB	Se-NTB	1 Paket	962.568.600	DAU
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bappenda & UPTB	Se-NTB	125 Paket	270.463.100	DAU
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bappenda & UPTB	Se-NTB	20 Paket	852.958.010	DAU
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bappenda & UPTB	Se-NTB	5 Dokumen	605.765.200	DAU
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bappenda & UPTB	Se-NTB	12 Laporan	1.191.000.000	DAU
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Bappenda & UPTB	Se-NTB	12 Laporan	351.117.600	DAU

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Indikator	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	SKPD	SKPD					
5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bappenda	Mataram	2 Dokumen	38.000.000	DAU
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bappenda	Mataram	12 Dokumen	250.000.000	DAU
5.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan BMD Penunjang**			**100 Persen**	**1.313.633.100**	
5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	UPTB	Mataram	1 Unit	250.000.000	PAD
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	UPTB	Se-NTB	20 Paket	249.200.000	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Bappenda & UPTB	Se-NTB	25 Unit	473.803.100	PAD
5.02.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Bappenda & UPTB	Se-NTB	4 Unit	88.230.000	PAD
5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Bappenda & UPTB	Se-NTB	1 Unit	126.200.000	PAD
5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Bappenda & UPTB	Se-NTB	10 Unit	126.200.000	PAD
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD**			**100 Persen**	**15.619.327.800**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bappenda & UPTB	Se-NTB	12 Laporan	86.376.800	DAU
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bappenda & UPTB	Se-NTB	12 Laporan	3.038.602.600	DAU

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Indikator	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bappenda & UPTB	Se-NTB	12 Laporan	12.494.348.400	PAD
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD**			**100 Persen**	**3.283.332.300**	
5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Bappenda & UPTB	Se-NTB	1 Unit	25.000.000	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bappenda & UPTB	Se-NTB	35 Unit	1.962.504.300	
5.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Bappenda	Mataram	20 Unit	25.000.000	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bappenda & UPTB	Se-NTB	20 Unit	519.823.600	
5.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			10 Unit	80.000.000	PAD
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bappenda & UPTB	Se-NTB	2 Unit	611.004.400	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bappenda & UPTB	Se-NTB	1 Unit	60.000.000	
5.02.02.	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah**			**55,94 Persen**	**205.000.000**	
5.02.02.1.01	**Koordinasi dan Penyusunan**	**Pertumbuhan Pendapatan Daerah**			**-5,47 Persen**	**110.000.000**	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Indikator	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rencana Anggaran Daerah						
5.02.02.1.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	OPD TAPD	Se-NTB	2 Dokumen	110.000.000	PAD
5.02.02.1.03	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**-**			**-**	**95.000.000**	
5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	K/L Pemkab BPKAD OPD	Jakarta Se-NTB	4 Dokumen	95.000.000	
5.02.04	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK**			**47,19 Persen**	**5.971.455.200**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah**			**-11,72 Persen**	**5.971.455.200**	
5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Bappenda & UPTB	Se-NTB	12 Dokumen	305.000.000	PAD
5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Bappenda & UPTB	Se-NTB	12 Laporan	200.000.000	PAD
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Masyarakat	Se-NTB	12 Laporan	213.918.500	PAD
5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bappenda & UPTB	Se-NTB	40 Sarana dan Prasarana	600.000.000	PAD
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Wajib Pajak/Subjek Pajak	Se-NTB	12 Laporan	676.145.500	PAD

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Indikator	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bappenda & UPTB	Mataram	12 Laporan	100.000.000	PAD
5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Wajib Pajak/Subjek Pajak	Se-NTB	1 Dokumen Ketetapan	1.086.250.700	PAD
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Wajib Pajak/Subjek Pajak	Se-NTB	2 Laporan	96.200.000	PAD
5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Bappenda & UPTB	Mataram	4 Dokumen	22.000.000	PAD
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Bappenda & UPTB	Se-NTB	2 Dokumen	470.840.500	PAD
5.02.04.1.01.0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Bappenda & UPTB	Mataram	2 Dokumen	24.000.000	PAD
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Bappenda & UPTB	Se-NTB	4 Laporan	1.922.100.000	PAD
5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	OPD Pendapatan	Se-NTB	4 Laporan	205.000.000	PAD
5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	OPD Pendapatan	Se-NTB	2 Laporan	50.000.000	PAD

BAB V
P E N U T U P

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai acuan penyusunan rencana kerja dan anggaran pelaksanan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan tahun 2025 sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam rangka mendukung visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Renja Tahun 2025 ini merupakan Renja tahun kedua yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2024-2026

merupakan Rencana Pembangunan Daerah Transisi yang dipimpin oleh Penjabat Gubernur NTB. serta berdasarkan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024-2026 Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dengan tersusunnya Renja ini, diharapkan dapat terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergitas yang berkelanjutan serta terciptanya komunikasi antar Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun dengan instansi/lembaga terkait yang membidangi fungsi lain.

Akhirnya dengan diselesaikannya penyusunan dokumen Renja Bappenda Provinsi NTB Tahun 2025 diharapkan bermanfaat bagi seluruh komponen beserta para pihak yang melaksanakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, serta dokumen ini juga menjadi acuan dalam proses penyusunan RKA maupun penetapan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dokumen RENJA

Rencana Kerja (RENJA)

Tahun Anggaran 2025



: @dikbudntb

DIKBUD media creative

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Repubilk Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 27 ayat (1) menyebutkan setiap SKPD harus menyusun Rencana Kerja (RENJA) SKPD sedang dalam ayat (2) Renja SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Nusa Tenggara Barat menyusun Recana Kerja (Renja) Tahun 2025.

RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam prosesnya penyusunan Renja Dikbud NTB mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Dikbud Provinsi NTB dapat dilaksanakan secara simultan / paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi terkini terutama tentang pembagian wewenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja satu tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja

terhadap pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Dikbud Provinsi NTB 2024– 2026.

Proses penyusunan Renja Dinas Dikbud Provinsi NTB Tahun 2025 dimulai dengan usulan dari setiap Bidang, Sekretariat, Cabang Dinas dan UPT, selanjutnya melakukan analisis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD satu tahun yang telah lalu serta mengacu pada Renstra SKPD serta memperhatikan rancangan awal RKPD dan tidak terlepas juga dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Renja Dinas Dikbud Provinsi NTB Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;

7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Dinas Dikbud, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Gubernur Provinsi NTB Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026;
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024 Nomor : DPA/A.1/1.01.2.22.0.00.02.0000/001/2024 tanggal 5 Januari 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Dikbud Provinsi NTB Tahun 2025 disusun dengan maksud memberikan panduan bagi SKPD dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tujuannya adalah :

a. Menetapkan prioritas pembangunan yang dilaksanakan tahun 2025;
b. Menetapkan indikator kinerja dari program dan kegiatan yang disertai indikasi pagu anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yang bersumber dari APBD;
c. Mengukur/mengevaluasi pencapaian target kinerja Dinas Dikbud Provinsi NTB;

d. Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Dikbud Provinsi NTB.

1.4. Sistimatika Penulisan

Sistimatika penulisan Renja Dinas Dikbud Provinsi NTB Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I : **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistimatika Penulisan.

Bab II : **EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2024**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024.
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Indikator Kinerja RPD dan RENSTRA SKPD Tahun 2024.
2.4. Permasalahan.
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan.

Bab III : **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

3.1. Tujuan
3.2. Sasaran
3.3. Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2025

Bab IV : **PENUTUP**

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS DIKBUD PROVINSI NTB TAHUN 2024

Total PAGU belanja pada APBD yang dikelola oleh Dinas Dikbud Provinsi NTB tahun 2024, sebesar Rp. **1.798.366.643.690**,- dengan realisasi keuangan sampai bulan September 2024 sebesar Rp. 973.409.716.534 atau 54,13% dan realiasi fisik mencapai 63,22 %.

Alokasi anggaran tersebut di atas, tersebar pada masing-masing unit/bidang sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.1.1
Realisasi Anggaran pada Dinas Dikbud Provinsi NTB
Sampai Dengan Bulan September 2024

NO.	U R A I A N	J U M L A H	Realisasi s.d. Bulan September	% keu	% fisik	SISA PAGU ANGGARAN
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	22.339.511.000	1.300.069.746	5,820	5,82	21.039.441.254
II	BELANJA	1.798.366.643.690	973.409.716.534	54,13	63,22	824.956.927.156
1	Dinas Dikbud Provinsi NTB	1.798.366.643.690	973.409.716.534	54,13	63,22	814.336.600.556
2	Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	389.498.000	79.479.000	20,41	31,78	310.019.000
3	Taman Budaya	3.060.916.600	366.513.484	11,97	12,39	2.694.403.116
4	Museum Negeri	2.984.048.000	390.016.488	13,07	13,47	2.594.031.512
5	Cabang Dinas Lombok Barat – Mataram	489.382.500	107.254.000	21,92	23,96	382.128.500
6	Cabang Dinas Lombok Tengah	675.470.800	74.617.072	11,05	11,79	600.853.728
7	Cabang Dinas Lombok Timur	652.473.700	106.848.054	16.38	16.77	545.625.646
8	Cabang Dinas Lombok Utara	436.119.000	40.000.000	9,17	10,32	396.119.000
9	Cabang Dinas Sumbawa Barat	327.925.200	20.000.000	6,10	6,10	307.925.200
10	Cabang Dinas Sumbawa	603.269.000	61.810.550	10,25	10,25	541.458.450
11	Cabang Dinas Dompu	338.224.400	22.500.000	6,65	6,65	315.724.400
12	Cabang Dinas Bima - Kota Bima	662.999.400	45.000.000	6,79	7,92	617.999.400
BELANJA SKPD		1.798.366.643.690	973.409.716.534	63,22	54,13	824.956.927.156

Dari table diatas terlihat bahwa keterserapan anggaran baru mencapai 63,22% dan fisisk 54,13% hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Untuk Anggaran yang bersumber dari DAK ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan juknis ketentuan penggunaan DAK sehingga mengalami kendala saat pelaksanaan, seperti ketidak sesuaian alahan dengan kondisi yang dipersyarakatkan, ketersediaan bahan dengan spek tertentu terbatas, dll;
2. Untuk penerapan SPM terait dengan pemberian buku tulis dan alat tulis sudah dilakukan pendistribusin ke kabupaten / kota kepada siswa yang berhak menerima namun demikian untuk semester II (dua) proses pendistribusian belum dilakukan;
3. Ada beberapa program dan kegiatan yang perlu dilakukan penyesuaian baik itu penyesuaian terkait waktu, sasaran dan penyesuaian lainnya sehingga jadwal pelaksanaannya menjadi mundur;

SOLUSI :

1. Untuk segera melakukan penyesuaian sesuai juknis namun jika terdapat kendala yang mengakibatkan kesulitan dalam pelaksanaannya sebaiknya melakukan koordinasi dengan pihak pusat atau Kemendikbud untuk mencari solusi penanganan yang tepat;
2. Pendataan penerima SPM bidang pendidikan harus dilakukan lebih awal sehingga pelaksanaan juga dapat dilakukan lebih awal sehingga pendistribusian bantaun sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
3. Segera melakukan penyesuaian melalui anggaran perubahan agar penyesuaian tersebut dapat terdokumentasi ke dalam dokumen perencanaan dalam hal ini dokumen perencanaan yaitu DPAP dan dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN INDIKATOR KINERJA RPMD DAN RENSTRA SKPD TAHUN 2024.

2.2.1 URUSAN PENDIDIKAN :

Dalam RPD NTB 2024-2026, pada dimensi Manusia (People), dengan tujuan “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT) dengan sasaran “Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan serta Derajat Kesehatan Masyarakat”, terdapat 2 (dua) indikator utama yang menjadi tanggung jawab dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada urusan pendidikan yaitu

Rata-rata Lam Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), oleh karena itu semua kebijakan strategis yang diambil haruslah mendukung ketercapaian 2 (dua) indikator tersebut. Target dan capaian Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.1.1
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Pendidikan
Tahun 2023 – 2024

No	Indikator Bidang Urusan (Satuan)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	PENDIDIKAN						
1.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,73	13,96	13,79	13,97	9,39	NA (Belum Rilis BPS)
2.	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,04	7,61	7,07	7,74	16	NA (Belum Rilis BPS)

Sumber : BPS Provinsi NTB ; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa kedua indikator Pendidikan tersebut belum dapat dilaporkan capaiannya untuk tahun 2024 karena belum rilis oleh BPS namun demikian capaian untuk indikator ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. AHLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang termasuk pada jenjang Sekolah Menengah (SM) yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Diasumsikan bahwa peluang anak-anak akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Pada tahun 2023 capaian untuk indikator HLS sebesar 13,97 tahun mengalami peningkatan sebesar 0,01 point jika dibandingkan dengan tahun

2022 yaitu 13,96 tahun artinya harapan lama sekolah penduduk NTB yaitu setara dengan Diploma Dua semester dua.

Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) adalah jumlah tahun yang digunakan dalam menjalani pendidikan formal, dihitung berdasarkan penduduk usia 25 tahun keatas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir/selesai, tanpa memperhitungan apakah tinggal kelas atau tidak. Angka ini juga bisa menggambarkan kualitas pendidikan penduduk dalam sebuah wilayah. RLS tahun 2023 sebesar 7,74 tahun meningkat 0,13 point jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 7,61 tahun artinya rata-rata lama sekolah penduduk NTB berada di kelas VII SMP semester 1.

Untuk mencapai target 2 (dua) indikator yang telah ditetapkan dalam RPD maka telah disusun tujuan dan sasaran beserta indikatornya dalam dokumen perencanaan jangka pendek Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB yaitu Rencana Strategis (RENSTRA) 2024-2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB yang memuat strategi, kebijakan serta program kegiatan yang mendukung terwujudnya pencapaian Indikator Utama Daerah yang telah ditetapkan dalam RPD 2024-2026 dan Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam RENSTRA dinas. Indikator Kinerja dalam RENSTRA 2024-2026 yang menjadi target tahunan yang harus dicapai oleh dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi NTB tahun 2024 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2.1.2
Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pendidikan Tahun sesuai Renstra 2024-2026

No	Indikator Bidang Urusan (Satuan)	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
	PENDIDIKAN				
1	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,79 Tahun	13,97 Tahun	9,39 Tahun	NA (Belum Rilis BPS)
2	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,07 Tahun	7,74 Tahun	16 Tahun	NA (Belum Rilis BPS)
3	Persentase APK SMA/MA/SMK/Paket C	100 %	115,78 %	100 %	Dalam Poses Perhitungan
4	Persentase APM SMA/MA/SMK/Paket C	98,10%	98,50 %	98,60 %	Dalam Poses Perhitungan
5	Persentase APS SMA/MA/SMK/Paket C	98,55%	98,85 %	98,88 %	Dalam Poses Perhitungan

No	Indikator Bidang Urusan (Satuan)	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
6	APS SLB	86,85%	87,74 %	87,84 %	Dalam Poses Perhitungan
7	Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Menengah Minimal B	76,25%	65,82 %	65,87 %	Dalam Poses Perhitungan
8	Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B	54,76%	55,56 %	55,60 %	Dalam Poses Perhitungan
9	Persentase lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi	67%	67,32 %	67,50 %	15,12%
10	Persentase lulusan SMK yang terserap	37%	54 %	55 %	16,61%
11	Persentase penerapan SPM Pendidikan Menengah	NA	NA	100	67,87
12	Persentase penerapan SPM Pendidikan Khusus	NA	NA	100	53,85
	KEBUDAYAAN				
13	Indeks Pembangunan Kebudayaan	55	57,37	55-60	NA (belum dirilis)
14	Persentase OPK yang dikembangkan	80%	83,33 %	83,33 %	75%

Sumber: Dinas Dikbud, Provinsi NTB, BPS NTB, 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa indikator kinerja Dinas Pendidikan yang merupakan Indikator tujuan dan sasaran pada RENSTRA dinas tahun 2024 - 2026 terdapat 14 (empat belas) indikator yang terdiri dari 12 (dua belas) indikator urusan pendidikan dan 2 (dua) indikator urusan kebudayaan. Hampir semua indikator belum mencapai target yang telah ditetapkan hal ini karena sedang dalam tahapan pendataan dan pelaksanaan kegiatan sampai akhir tahun anggaran 2024. Terdapat 3 (tiga) indikator yang belum tersedia realisasinya karena belum dirilis oleh BPS yaitu HLS dan RLS dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yaitu IPK, kemudian ada 6 (enam) indikator yang sedang dalam tahap perhitungan yaitu APK, APM, APS, APS SLB, akreditasi pendidikan menengah, akreditasi pendidikan khusus karena data ini paling cepat dapat diakses di awal November menunggu semua sekolah melakukan updating pada data pada DAPODIK mereka, sedangkan 3 (tiga) indikator yang lain yaitu persentase lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi dan Persentase Lulusan SMK yang terserap dan persentase OPK yang dikembangkan capaiannya masih dibawah target

karena pendataan tracer study yang dilakukan oleh satuan pendidikan sedang berlangsung maksimal sampai dengan bulan Desember 2024 begitu juga dengan urusan kebudayaan sedang dalam proses pelaksanaan.

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan tahun 2021 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB beserta UPTD-nya yaitu Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan (BTIDP); UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan PK Lombok Barat-Mataram; UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan PK Lombok Tengah, UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan PK Lombok Timur; UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan PK Lombok Utara; UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan PK Sumbawa Barat; UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan PK Sumbawa; UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan PK Dompu; dan UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan PK Bima-Kota Bima.

Pembangunan pendidikan merupakan kegiatan investasi pada sumberdaya manusia. Pendidikan menjadi prioritas dalam pembangunan sumberdaya manusia di Provinsi NTB. Pendidikan merupakan sarana untuk menyiapkan sumberdaya manusia bagi pembangunan. Pendidikan sangat berperan dalam pengentasan kemiskinan dan memberikan keterampilan kepada seluruh masyarakat untuk mencapai potensinya secara optimal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hakikat pendidikan adalah untuk mencerdaskan bangsa. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan penduduk dapat mempengaruhi dinamika perubahan ataupun kualitas kehidupan sosial, ekonomi penduduk suatu daerah.

Beberapa program dan kegiatan pembangunan pendidikan telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB dalam rangka meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah dan Haraparan Lama Sekolah antara lain: peningkatan akses melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan seperti penambahan ruang kelas, pembangunan laboratorium dan ruang praktikum, pembangunan perpustakaan, pengadaan alat praktik dan peraga siswa, rehab ruang guru, Pembangunan dan rehab jamban dan kegiatan fisik lainnya. Selain itu bagi sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa yang menjadi wewenang pemerintah provinsi juga mendapat perhatian dalam hal peningkatan akses dan pengadaan sarana prasarana

sekolah. Kegiatan peningkatan mutu pendidikan dilakukan juga melalui revitalisasi kurikulum, peningkatan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan, Refocusing Core Bisnis pada SMK, melakukan Mou dengan Lembaga Pemerintah maupun Industri dan Dunia Kerja terkait penyesuaian kebutuhan dunia kerja dengan lulusan SMK, kegiatan penerbitan surat edaran terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) berdasarkan zonasi untuk SMA sehingga bagi siswa yang kurang mampu dapat terserap atau melanjutkan sekolahnya di sekolah yang berada di sekitar lingkungan tempat tinggalnya dengan demikian akan menghemat biaya transportasi bagi siswa kurang mampu tersebut. Selain itu, surat edaran terkait PPDB juga memberikan kebebasan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu pemegang kartu PIP.

Salah satu bentuk penilaian tentang pemanfaatan fasilitas pendidikan dilihat dari partisipasi sekolah. Angka Partisipasi Sekolah adalah Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Angka Partisipasi sekolah mempengaruhi rata-rata lama sekolah.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa umurnya.

Tabel 2.2.1.3
Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SM (SMA, MA, SMK) Provinsi NTB Tahun 2023

NO	KAB/KOTA	PENDUDUK USIA 16-18 TH THN 23	BANYAK SISWA				TOTAL SM	APK SM
			SMA	SMK	MA	PAKET C		
1	Kota Mataram	18701	9873	6825	2575	474	19747	105,59
2	Kab. Lombok Barat	28403	12311	11302	10900	1249	35762	125,91
3	Kab. Lombok Tengah	29043	17324	12520	12180	1584	43608	150,15
4	Kab. Lombok Timur	54692	20453	14604	21243	2173	58473	106,91
5	Kab. Lombok Utara	10188	5289	2458	2387	941	11075	108,71
6	Kab. Sumbawa Barat	5864	3563	1663	907	132	6265	106,84
7	Kab. Sumbawa	18806	9985	6172	2418	1380	19955	106,11
8	Kab. Dompu	13332	7243	3900	1834	2021	14998	112,50
9	Kab. Bima	20242	12570	4334	3551	1172	21627	106,84
10	Kota Bima	7594	3637	1869	1897	591	7994	105,27
JUMLAH		**206.865,00**	**102.248,00**	**65.647,00**	**59.892,00**	**11.717,00**	**239.504,00**	**115,78**

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2021

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk usia 16-18 tahun berjumlah 206.865 orang dan jumlah peserta didik yang sedang bersekolah di jenjang pendidikan menengah (SMA, SMK, MA dan Paket C) tanpa memandang umur sebanyak 239.504 orang sehingga Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah tahun 2024 berjumlah 115,78 %. Angka ini mencapai angka seratus persen artinya ada anak dari provinsi lain yang sedang bersekolah di provinsi NTB, ada anak yang usianya masih di bawah 16 tahun namun sudah berada pada jenjang pendidikan menengah dan begitu juga sebaliknya ada anak yang sudah berusia lebih dari 18 tahun namun masih bersekolah pada jenjang pendidikan menengah.

Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak dengan umur tertentu yang bersekolah pada jenjang tertentu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.2.1.4
Angka Partisipasi Murni (APM)
Pendidikan Menengah (SMA, MA, SMK, Paket C)
Provinsi NTB Tahun Tahun 2022 / 2023

NO.	KAB/KOTA	PENDUDUK USIA 16-18 TH	BANYAK SISWA USIA 16-18TH					APM SM
			SMA	SMK	MA	PAKET C	TOTAL	
1	Kota Mataram	18.701	9.616	6.528	2.210	289	18.643	99,7%
2	Kab. Lombok Barat	28.403	10.510	9.234	7.705	813	28.262	99,5%
3	Kab. Lombok Tengah	29.043	12.169	8.416	6.550	904	28.039	96,5%
4	Kab. Lombok Timur	54.692	19.793	13.833	18.975	1120	53.721	98,2%
5	Kab. Lombok Utara	10.188	5.124	2.288	2.030	650	10.092	99,1%
6	Kab. Sumbawa Barat	5.864	3.419	1.555	772	76	5.822	99,3%
7	Kab. Sumbawa	18.806	9.759	5.924	2.130	927	18.740	99,6%
8	Kab. Dompu	13.332	6.827	3.648	1.602	830	12.907	96,8%
9	Kab. Bima	20.242	12.126	4.089	3.246	599	20.060	99,1%
10	Kota Bima	7.594	3.550	1.817	1.802	379	7.548	99,4%
JUMLAH		206.865	92.893	57.332	47.022	6587	203.834	98,5%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk usia 16 - 18 tahun di provinsi Nsua Tenggara Barat sejumlah 206.865 orang sedangkan jumlah peserta didik usia 16 - 18 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan menengah sebanyak 203.834 orang sehingga APM pendidikan menengah adalah sebesar 98,50% artinya masih ada anak usia 16 - 18 tahun yang belum bersekolah di jenjang pendidikan menengah yaitu sebesar 1,50%. hal ini disebabkan karena anak tersebut Drop Out (DO), Lulus Tidak Melanjutkan artinya pernah bersekolah sampai jenjang SMP dan tidak melanjutkan ke jenjang Menengah, Belum Pernah Bersekolah sama sekali, atau anak tersebut bersekolah namun pada pondok pesantren yang tidak menerbitkan ijazah karena hanya fokus belajar agama.

Selain APK dan APM untuk mengukur partisipasi sekolah disebuah wilayah digunakan juga Angka Partisipasi Sekolah (APS) dimana angka ini menggambarkan jumlah penduduk usia tertentu misalnya usia 16 - 18 tahun yang sedang bersekolah di jenjang manapun seperti di SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA/Paket C. Data APS di provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.1.5
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Provinsi NTB Tahun Tahun 2022 / 2023

NO.	KAB / KOTA	PENDUDUK USIA 16-18 TAHUN	BANYAK SISWA USIA 16-18TH							APS (%)
			SMA	SMK	MA	PAKET C	SMP	MTs	TOTAL	
1	Kota Mataram	18.701	9.616	6.528	2.210	289	12	14	18.669	99,83
2	Kab. Lombok Barat	28.403	10.510	9.234	7.705	813	48	78	28.388	99,95
3	Kab. Lombok Tengah	29.043	12.169	8.416	6.550	904	67	27	28.133	96,87
4	Kab. Lombok Timur	54.692	19.793	13.833	18.975	1.120	79	52	53.852	98,46
5	Kab. Lombok Utara	10.188	5.124	2.288	2.030	650	7	21	10.120	99,33
6	Kab. Sumbawa Barat	5.864	3.419	1.555	772	76	10	18	5.850	99,76
7	Kab. Sumbawa	18.806	9.759	5.924	2.130	927	21	10	18.771	99,81
8	Kab. Dompu	13.332	6.827	3.648	1.602	830	67	45	13.019	97,65
9	Kab. Bima	20.242	12.126	4.089	3.246	599	25	46	20.131	99,45
10	Kota Bima	7.594	3.550	1.817	1.802	379	5	10	7.563	99,59
TOTAL		**206.865**	**92.893**	**57.332**	**47.022**	**6.587**	**341**	**321**	**204.496**	**98,85**

Sumber Data : DAPODIK, Dinas Dikbud Provinsi NTB, 2023.

Dari tabel diatas tampak bahwa jumlah penduduk usia 16-18 tahun di provinsi NTB sebanyak 206.865 orang dan jumlah peserta didik usia 16-18 tahun yang sedang bersekolah di beberapa jenjang yaitu 204.496 sehingga total APS adalah 98,85 persen, artinya masih ada anak usia 16 - 18 tahun yang belum bersekolah sebanyak 1,15 persen yang dapat disebabkan karena putus sekolah atau Drop

Out, Lulus tidak melanjutkan, belum pernah sekolah ataupun bersekolah namun di ponpes yang tidak menerbitkan ijazah karena fokus belajar agama. Selain itu dari hasil capaian APS kita dapat melihat bahwa ada beberapa anak yang usianya sudah mencapai 16 - 18 tahun namun masih berada di jenjang dibawahnya atau jenjang diatasnya hal ini dapat sebabkan karena anak tersebut terlambat masuk sekolah, tinggal kelas, mengikuti kelas akselerasi, masuk sekolah lebih awal atau pernah berhenti sekolah dan masuk kembali. Dengan diketahuinya berberapa faktor pembentuk terjadinya APK, APM dan APS maka dapat diantisipasi dengan menerapkan kebijakan yang sesuai misalnya penentuan usia anak masuk SD.

Kewenangan Provinsi dalam bidang pendidikan adalah menangani anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dan untuk mengukur tingkat partisipasi penduduk usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas maka digunakan Angka Partisipasi Sekolah (APS) - SLB sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.1.6
Angka Partisipasi Sekolah (APS) - SLB
Provinsi NTB Tahun 2022 / 2023

NO	KAB/KOTA	PENDUDUK PENYANDANG DISABILITAS USIA 4 - 18	PESERTA DIDIK SLB				TOTAL	APS SLB (%)
			4 s.d. 5 tahun	6 s.d. 12 Tahun	13 s.d. 15 Tahun	16 s.d 18 Tahun		
1	Kota Mataram	399	10	198	108	109	425	106,52
2	Kab. Lombok Barat	428	3	153	80	105	341	79,67
3	Kab. Lombok Tengah	742	12	223	111	172	518	69,81
4	Kab. Lombok Timur	727	14	312	152	236	714	98,21
5	Kab. Lombok Utara	196	1	56	21	29	107	54,59
6	Kab. Sumbawa Barat	310	0	20	12	23	55	17,74
7	Kab. Sumbawa	347	0	119	68	92	279	80,40
8	Kab. Dompu	264	13	154	83	104	354	134,09
9	Kab. Bima	583	18	177	161	344	700	120,07
10	Kota Bima	383	1	70	54	224	349	91,12
TOTAL		**4.379**	**72**	**1.482**	**850**	**1438**	**3.842**	**87,74**

Sumber Data : DAPODIK, Dinas Dikbud Provinsi NTB, 2023.

Dari tabel diatas terlihat bahwa APS - SLB sebesar 87,74% artinya masih ada anak berkebutuhan khusus sebesar 12,26% yang belum berpartisipasi pda pendidikan khusus / SLB. Salah satu penyebab mendasar rendahnya APS-SLB karena adanya paradigma di masyarakat bahwa memiliki anak berkebutuhan khusus adalah hal yang memalukan sehingga cenderung ditutupi sehingga anak tersebut tidak mendapatkan hak-hak dasarnya termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Untuk mengukur ketersediaan akses pendidikan maka kita dapat melihatnya dari capaian APK, APM, dan APS sedangkan untuk mengukur kualitas atau mutu pendidikan itu sendiri indikator yang digunakan dan tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2024 - 2026 adalah angka melanjutkan lulusan SMA ke perguruan tinggi dan keterserapan lulusan SMK.

Angka lulusan SMA yang terserap ke perguruan tinggi ini dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan SMA, dimana salah satu tujuannya adalah lulusan SMA harus mampu melanjutkan ke perguruan tinggi. Data lulusan SMA yang melanjutkan ke perguruan tinggi tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel : 2.2.1.7
Angka Lulusan SMA yang Melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT)
Provinsi NTB Tahun 2024

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah PD Lulus	Jumlah Yang Melanjutkan ke PT	Persentase lulusan SMA yang melanjutkan ke PT
1	Kab. Bima	3.672	843	22,96
2	Kab. Dompu	2.218	585	26,38
3	Kab. Lombok Barat	1.802	809	44,89
4	Kab. Lombok Tengah	3.010	827	27,48
5	Kab. Lombok Timur	3.776	1.041	27,57
6	Kab. Lombok Utara	979	494	50,46
7	Kab. Sumbawa	2.494	877	35,16
8	Kab. Sumbawa Barat	970	647	66,70
9	Kota Bima	1.012	562	55,53
10	Kota Mataram	2.796	561	20,06
TOTAL		**22.729**	**7.246**	**31,88**

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2024

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa angka melanjutkan sekolah dari jenjang SMA ke Perguruan Tinggi sebesar 31,88 persen atau sebanyak 7.246 orang dari total lulusan 22.729 orang. Ini menunjukkan bahwa capaian sampai dengan bulan September 2024 belum mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Dikbud 2024 - 2026 yaitu 67,50% hal ini disebabkan karena beberapa hak yaitu (1) asistensi pengisian Tracer Sudy untuk tahun 2024 baru dilakukan pada sekolah negeri saja dan untuk sekolah swasta akan dilakukan pada minggu ketiga bulan Oktober 2024 (2) batas akhir pengisian aplikasi tracer study adalah bulan

Desember 2024 mengingat jadwal penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi masih berlangsung sampai bulan September terutama bagi perguruan tinggi swasta, oleh karena itu capaian ini diharapkan akan mengalami peningkatan sampi dengan akhir Desember 2024.

Untuk mengukur mutu pendidikan SMK indikator yang digunakan adalah keterserapan lulusan SMK yang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu (1) lulusan yang terserap ke dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA), (2) lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi dan (3) lulusan yang berwirausaha. Berikut data lulusan SMK yang terserap sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.1.8
Angka Lulusan SMK yang Terserap
Tahun 2024

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah PD Lulus	Jumlah Yang Melanjutkan ke PT	Jumlah Yang Bekerja	Jumlah Yang berwirausaha	Total Lulusan Terserap	Persentase lulusan SMK yang terserap
1	Kab. Bima	746	98	146	11	255	34,18
2	Kab. Dompu	1059	46	39	11	96	9,07
3	Kab. Lombok Barat	2528	55	101	0	156	6,17
4	Kab. Lombok Tengah	777	34	59	12	105	13,51
5	Kab. Lombok Timur	2678	72	30	29	131	4,89
6	Kab. Lombok Utara	474	34	95	0	129	27,22
7	Kab. Sumbawa	920	39	177	30	246	26,74
8	Kab. Sumbawa Barat	640	34	304	2	340	53,13
9	Kota Bima	746	34	31	0	65	8,71
10	Kota Mataram	897	34	153	0	187	20,85
TOTAL		**11.465**	**480**	**1.135**	**95**	**1.710**	**14,91**

Sumber data : REL Program, DIKBUD Provinsi NTB

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sampai dengan September 2024 jumlah lulusan SMK yang bekerja 480 orang, melanjutkan ke perguruan tinggi adalah sebesar 1.135 orang, dan berwirausaha sebanyak 95 orang sehingga total lulusan SMK yang terserap sebanyak 1.710 orang atau sebesar 14,91% dari total lulusan ditahun 2024 yaitu 11.465 orang. Hal ini disebabkan karena beberapa hal yaitu (1) asistensi pengisian Tracer Sudy untuk tahun 2024 baru dilakukan pada sekolah negeri saja dan untuk sekolah swasta akan dilakukan pada minggu ketiga bulan Oktober 2024 sehingga yang aktif mengisi aplikasi hanya sekolah negeri saja (2)

batas akhir pengisian aplikasi tracer study adalah bulan Desember 2024 mengingat durasi perhitungan indikator ini dilakukan sejak peserta didik lulus sekitar bulan Mei sampai dengan bulan Desember di tahun bersangkutan dan angka capain diaharapkan akan terus meningkat sampai akhir Desember 2024.

Selain 2 (dua) indikator diatas untuk mengukur mutu pendidikan digunakan akreditasi sekolah baik akreditasi pendidikan menengah maupun akreditasi pendidikan khusus. Berkut data capaian akreditasi pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

Tabel 2.2.1.9
Akreditasi Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
Tahun 2024

No.	Kab./Kota	Status Akreditasi SMA				Jumlah Akreditasi A+B	Jumlah Akreditasi A+B+C	Persentase Akreditasi Minimal B
		A	B	C	TT			
1	Kabupaten Bima	26	13	14	2	39	53	73,58
2	Kabupaten Dompu	8	8	12	1	16	28	57,14
3	Kabupaten Lombok Barat	12	12	8	1	24	32	75,00
4	Kabupaten Lombok Tengah	19	18	19		37	56	66,07
5	Kabupaten Lombok Tiimur	24	38	8		62	70	88,57
6	Kabupaten Lombok Utara	4	4	6		8	14	57,14
7	Kabupaten Sumbawa	13	13	3	1	26	29	89,66
8	Kabupaten Sumbawa Barat	4	4	2		8	10	80,00
9	Kota Bima	6	8	2		14	16	87,50
10	Kota Mataram	19	6	5		25	30	83,33
TOTAL		**135**	**124**	**79**	**5**	**259**	**338**	**76,63**
No.	**Kab./Kota**	**Status Akreditasi SMK**				**Jumlah Akreditasi A+B**	**Jumlah Akreditasi A+B+C**	**Persentase Akreditasi Minimal B**
		A	**B**	**C**	**TT**			
1	Kabupaten Bima		11	11	2	11	22	50
2	Kabupaten Dompu	3	6	14	1	9	23	39,13
3	Kabupaten Lombok Barat	3	24	17	1	27	44	61,36
4	Kabupaten Lombok Tengah	3	26	40	1	29	69	42,03
5	Kabupaten Lombok Tiimur	6	39	41	3	45	86	52,33
6	Kabupaten Lombok Utara		5	8		5	13	38,46
7	Kabupaten Sumbawa	3	13	3		16	19	84,21
8	Kabupaten Sumbawa Barat		5	1	1	5	6	83,33
9	Kota Bima	5	2	4		7	11	63,64
10	Kota Mataram	10	8	3	1	18	21	85,71

TOTAL	**33**	**139**	**142**	**10**	**172**	**314**	**54,78**
GRAND TOTAL	**168**	**263**	**221**	**15**	**431**	**652**	**66,10**

Dari tabel diatas terlihat bahwa akreditasi SMA minimal B sebesar 76,63% yang diperoleh dari jumlah SMA yang telah terakreditasi A dan B yaitu sebanyak 259 SMA dibagi dengan jumlah yang telah terakreditasi A,B dan C sebanyak 338 SMA. Sedangkan untuk SMK jumlah yang telah terakreditasi A dan B adalah sebanyak 172 SMK dan dibagi dengan jumlah SMK yang terakreditasi A, B dan C sehingga tercapai angka 54,78%. dan untuk total akrediatasi pendidikan menengah dengan formulasi seperti diatas diperoleh angka capaian yaitu 66,10 dan angka ini belum mencapai target yang ditetapkan karena akreditasi Satuan pendidikan dilakukan setiap 4 tahun sekali, jika mendapatkan persetujuan atau kuota, dan pada saat melakukan cutt off pada DAPODIK belum terdapat penambahan data akreditasi hal ini bisa disebabkan karena memang belum ada status akreditasi baru atau sekolah belum melakukan updating status akreditasinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Dikbud Provinsi NTB berkewajiban melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan. Capaian Penerapan SPM bidang pendidikan tahun anggaran 2024 sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.1.10
CAPAIAN PENERAPAN SPM BIDANG PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024
TRIWULAN III

KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	**TUNTAS MADYA**				**82.97 %**
Pendidikan Menengah					98.75 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Satuan**	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	29000	29965	**-965**	**100.00 %**
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**18.75 %**
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Satuan**	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	**93.74 %**
SMA					96.26 %

1 . Angka partisipasi kasar	%	100	115.87	**-15.87**	**100.00 %**
2 . Angka partisipasi sekolah	%	98.85	98.80	**0.049999999999997**	**99.95 %**
3 . Kemampuan literasi	Nilai	41	56.89	**-15.89**	**100.00 %**
4 . Kemampuan numerasi	Nilai	33.85	53.59	**-19.74**	**100.00 %**
5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	3.72	4.61	**-0.89**	**100.00 %**
6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	1.57	2.31	**-0.74**	**100.00 %**
7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	67.67	67.60	**0.070000000000007**	**99.90 %**
8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	66.92	71.70	**-4.78**	**100.00 %**
9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	55.72	55.46	**0.26**	**99.53 %**
10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	97	59.57	**37.43**	**61.41 %**
11 . Indeks distribusi guru	%	0.45	0.44	**0.01**	**97.78 %**
12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	50	46.43	**3.57**	**92.86 %**
13 . Proporsi PTK penggerak	%	1.43	4.48	**-3.05**	**100.00 %**
SMK					91.21 %
1 . Angka partisipasi kasar	%	100	115.87	**-15.87**	**100.00 %**
2 . Angka partisipasi sekolah	%	98.85	98.80	**0.049999999999997**	**99.95 %**
3 . Kemampuan literasi	Nilai	27.82	44.50	**-16.68**	**100.00 %**
4 . Kemampuan numerasi	Nilai	23.87	45.240	**-21.37**	**100.00 %**
5 . Tingkat penyerapan lulusan SMK	%	37.50	84.94	**-47.44**	**100.00 %**
6 . Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	100	100	**0**	**100.00 %**
7 . Perbedaan skor literasi	Nilai	2.89	3.5	**-0.61**	**100.00 %**
8 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	1.13	1.84	**-0.71**	**100.00 %**
9 . Indeks iklim keamanan	Nilai	62.53	67	**-4.47**	**100.00 %**
10 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	62.58	70.37	**-7.79**	**100.00 %**
11 . Indeks distribusi guru	%	0	0	**0**	**0.00 %**
12 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	53.80	52.03	**1.77**	**96.71 %**
13 . Kecukupan formasi guru ASN	%	0.37	30.30	**-29.93**	**100.00 %**
14 . Proporsi PTK bersertifikat	%	58.25	41.64	**16.61**	**71.48 %**
15 . Proporsi PTK penggerak	%	1.43	4.48	**-3.05**	**100.00 %**
Pendidikan Khusus					**67.19 %**
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**48.69 %**
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1400	852	**548**	**60.86 %**
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**18.50 %**
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	92.50 %

1 . Angka partisipasi kasar	%	0	0	**0**	**100.00 %**
2 . Angka partisipasi sekolah	%	87.83	87.74	**0.090000000000003**	**99.90 %**
3 . Kemampuan literasi	Nilai	43.61	64	**-20.39**	**100.00 %**
4 . Kemampuan numerasi	Nilai	30.46	37.32	**-6.86**	**100.00 %**
5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	4	4.75	**-0.75**	**100.00 %**
6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	3	3.41	**-0.41**	**100.00 %**
7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	69.83	71.12	**-1.29**	**100.00 %**
8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	62.94	60.71	**2.23**	**96.46 %**
9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	56.71	56.07	**0.64**	**98.87 %**
10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	64.50	19.66	**44.84**	**30.48 %**
11 . Indeks distribusi guru	%	0.20	0.37	**-0.17**	**100.00 %**
12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	53.36	41	**12.36**	**76.84 %**
13 . Proporsi PTK penggerak*	%	2	3.12	**-1.12**	**100.00 %**

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

a) Indeks pencapaian SPM dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat Triwulan III adalah 82,92% atau Tuntas Madya, dan jumlah total peserta didik yang harus dilayani adalah 29.000 orang dengan realisasi 20.965 orang atau melampaui target yang telah ditetapkan dimana capaian realisasi sebesar 103,34%

b) Indiaktor SPM yang ada pada jenjang SMA berjumlah 13 indikator yang terdiri dari :

1. APK dengan capaian 115.87% telah melampaui target yang ditetapkan
2. APS dengan capaian 98.85% melampaui target yang ditetapkan namun belum mencapai 100%
3. Kemampuan Literasi dengan capaian 56,89% melampaui target yang ditetapkan namun masih berada dibawah capaian nasional
4. Kemampuan numerasi dengan capaian 53,59% melampaui target yang ditetapkan namun masih berada dibawah capaian nasional
5. Perbedaan Skor Literasi dengan capaian 4,61% melampaui target yang ditetapkan namun masih berada dibawah capaian nasional
6. Perbedaan Skor Numerasi dengan capaian 2,31 melampaui target yang ditetapkan namun masih berada dibawah capaian nasional

7. Indek Iklim Keamanan dengan capaian 67,60 belum mmencapai target yang ditetapkan namun diatas capaian nasional
8. Indeks Iklim Kebhinekaan dengan capaian 71,70 melampaui target yang ditetapkan dan melampaui capaian nasional
9. Indeks Iklim Inklusivitas dengan capaian 55,46 belum mencapai target yang ditetapkan dan dibawah capaian nasional
10. Kecukupan formasi guru dengan capaian 59,57 belum mencapai target yang ditetapkan dan dibawah capaian nasional
11. Indeks distribusi guru dengan capaian 0,44 belum mencapai target yang ditetapkan dan dibawah capaian nasional
12. Proporsi PTK bersertiifikat dengan capaian 46,43 belum mencapai target yang ditetapkan dan dibawah capaian nasional
13. Proporsi PTK Penggerak dengan capaian 4,48 belum mencapai target yang ditetapkan dan dibawah capaian nasional

c) Indiaktor SPM yang ada pada jenjang SMK berjumlah 15 indikator yang terdiri dari :

1. APK dengan capaian 115.87% telah melampaui target yang ditetapkan
2. APS dengan capaian 98.85% me;ampaui target yang ditetapkan namun belum mencapai 100%
3. Kemampuan Literasi dengan capaian 44,50% melampaui target yang ditetapkan namun masih berada dibawah capaian nasional
4. Kemampuan numerasi dengan capaian 45,24% melampaui target yang ditetapkan namun masih berada dibawah capaian nasional
5. Tingkat penyerapan lulusan SMK dengan capaian 84,94 melampaui target yang ditetapkan dan melampaui capaian nasional
6. Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK dengan capaian 100% melebihi target yang ditetapkan dan melampaui target nasional
7. Perbedaan Skor Literasi dengan capaian 3,5% melampaui target yang ditetapkan namun masih berada dibawah capaian nasional

8. Perbedaan Skor Numerasi dengan capaian 1,84 melampaui target yang ditetapkan namun masih berada dibawah capaian nasional
9. Indek Iklim Keamanan dengan capaian 67 melampaui target yang ditetapkan namun diatas capaian nasional
10. Indeks Iklim Kebhinekaan dengan capaian 70,37 melampaui target yang ditetapkan dan melampaui capaian nasional
11. Indeks distribusi guru data capaian tidak tersedia di raport pendidikan
12. Indeks Iklim Inklusivitas dengan capaian 52,03 belum mencapai target yang ditetapkan dan dibawah capaian nasional
13. Kecukupan Formasi ASN guru dengan capaian 30,30 belum mencapai target yang ditetapkan dan dibawah capaian nasional
14. Proporsi PTK bersertiifikat dengan capaian 41,64 belum mencapai target yang ditetapkan dan dibawah capaian nasional
15. Proporsi PTK Penggerak dengan capaian 4,48 belum mencapai target yang ditetapkan dan dibawah capaian nasional

d) Indiaktor SPM yang ada pada jenjang SLB berjumlah 15 indikator yang terdiri dari :

1. APS dengan capaian 87.74% melampaui target yang ditetapkan namun belum mencapai 100%
2. Kemampuan Literasi dengan capaian 64% melampaui target yang ditetapkan namun masih berada dibawah capaian nasional
3. Kemampuan numerasi dengan capaian 37,32% melampaui target yang ditetapkan namun masih berada dibawah capaian nasional
4. Perbedaan Skor Literasi dengan capaian 4,75% melampaui target yang ditetapkan namun masih berada dibawah capaian nasional
5. Perbedaan Skor Numerasi dengan capaian 3,41% melampaui target yang ditetapkan namun masih berada dibawah capaian nasional
6. Indek Iklim Keamanan dengan capaian 71,12 melampaui target yang ditetapkan namun diatas capaian nasional

7. Indeks Iklim Kebhinekaan dengan capaian 60,71 melampaui target yang ditetapkan dan melampaui capaian nasional
8. Indeks distribusi guru dengan capaian 0,37 capaian melampaui target yang ditetapkan namun masih berada di bawah nasional
9. Indeks Iklim Inklusivitas dengan capaian 56,07 belum mencapai target yang ditetapkan dan dibawah capaian nasional
10. Kecukupan Formasi ASN guru dengan capaian 19,66 belum mencapai target yang ditetapkan dan dibawah capaian nasional
11. Proporsi PTK bersertiifikat dengan capaian 41, belum mencapai target yang ditetapkan dan dibawah capaian nasional
12. Proporsi PTK Penggerak dengan capaian 3,12 melampaui target yang ditetapkan namun dibawah capaian nasional

e) Pemenuhan SPM pada jenis barang berupa buku tulis dan alat tulis pada tahun 2024 sudah dilaksanakan. Jumlah penerima yang berasal dari jenjang SMA adalah 900 orang peserta didik miskin. Sedangkan penerima yang berasal dari jenjang SMK juga berjumlah 900 orang dan untuk SLB jumlah penerima sebanyak 425 orang.

f) Pemenuhan SPM pada jenis jasa, yaitu penyediaan biaya personil peserta didik kepada peserta didik penyandang disabilitas yang tinggal di Asrama sekolah. Ada 9 (sembilan) SLB yang memiliki asrama yaitu : SLBN 1 Lombok Barat, SLBN 1 Lombok Tengah, SLBN 2 Lombok Tengah, SLBN A YPTN, SLBN 1 Sumbawa, SLBN 1 Sumbawa, SLBN 1 Dompu, SLBN 1 Bima, SLBN 1 Lotim, SLBN 2 Lotim. Jumlah anak yang dilayani pada 9 (Sembilan) asrama tersebut berjumlah 113 (serratus tiga belas) Orang

2.2.2. URUSAN KEBUDAYAAN

Dalam RPD NTB 2024-2026, pada dimensi Manusia (People), dengan tujuan “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT) dengan sasaran “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal

dan Taqwa (KUAT), terdapat 1 (satu) indikator bidang kebudayaan yang menjadi tanggung jawab dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB yaitu Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), oleh karena itu semua kebijakan strategis yang diambil haruslah mendukung ketercapaian) indikator tersebut. Target dan capaian indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.1.1
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Kebudayaan
Tahun 2023 – 2024

No	Indikator Bidang Urusan (Satuan)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Indeks Pengembangan Kebudayaan (IPK)	50	56,60	55	57,37	54-60	NA (Belum Rilis)

Sumber : Kemendikbudristek RI

Dari table diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator urusan kebudayaan yaitu IPK mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, untuk tahun 2023 meningkat sebesar 0,77 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022, sedangkan capaian untuk tahun 2024 belum tersedia karena belum dirilis oleh Kemendikbudristek RI.

Urusan kebudayaan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bidang Kebudayaan bersama dengan 2 (dua) UPTD-nya yaitu Taman Budaya dan Museum Negeri. Untuk mencapai target indikator urusan kebudayaan yang telah ditetapkan dalam RPD maka telah disusun tujuan dan sasaran beserta indikatornya dalam dokumen perencanaan jangka pendek Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB yaitu Rencana Strategis (RENSTRA) 2024-2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB yang memuat strategi, kebijakan serta program kegiatan yang mendukung terwujudnya

pencapaian Indikator Utama Daerah yang telah ditetapkan dalam RPD 2024-2026 dan Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam RENSTRA dinas. Indikator Kinerja dalam RENSTRA 2024-2026 yang menjadi target tahunan yang harus dicapai oleh dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi NTB tahun 2024 untuk urusan kebudayaan adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.1.2
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Kebudayaan
Sesuai RENSTRA 2024-2026

No	Indikator Bidang Urusan (Satuan)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan	100%	83,33%	100%	83,33%	83,33%	75%

Sumber : Dinas DIKBUD Provinsi NTB, tahun 2024

Dari table diatas terlihat bahwa capaian indikator pengembangan OPK tampak stagnan atau tetap hal ini disebabkan karena adanya refocusing anggaran yang terjadi hampir setiap tahun sehingga dari 12 OPK yang ada hanya mampu diintervensi sebanyak 10 (sepuluh) OPK pada tahun 2022 dan 2023 yaitu : (1) tradisi lisan (2). cagar budaya (3) manuskrip (4) adat istiadat (5) ritus (6) pengetahuan tradisional (7) seni; (8) Bahasa (9) permainan rakyat; (10) olahraga tradisional dan yang belum dapat diintervensi yaitu 2 (dua) OPK karena membutuhkan dukungan dana yaitu) (1) teknologi tradisional dan (2) indikasi geografis. Sedangkan untuk tahun 2024 telah dilakukan pengembangan OPK sebanyak 9 (Sembilan) OPK atau sebesar 75% dari target yang ditetapkan diharapkan diakhir tahun 2024 semua OPK dapat diintervensi sehingga capaian mencapai 100%.

Dalam menjalankan tusi pada ursuan kebudayaan dinas DIKBUD Provinsi NTB dibantu oleh bidang kebudayaan, UPT Museum dan Taman Budaya, berikut capaian kinerja di tahun 2024 pada masing-masing bidang/UPT tersebut.

a. Bidang Kebudayaan

Untuk mendukung pengembangan OPK terdapat kinerja bidang kebudayaan yaitu pesersentase cagar budaya yang dilestarikan dengan capaian sebagaimana yang termuat pada table dibawah ini :

Tabel : **Tabel 2.2.1.3**
Daftar Cagar Budaya yang Dilestarikan s.d. Tahun 2024

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	JENIS CAGAR BUDAYA	TINGKAT CAGAR BUDAYA	NOMOR SK
1	Taman Narmada	Situs	Nasional	SK Menteri : 243/M/2015 (Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya)
2	Taman Lingsar	Situs	Nasional	SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata : PM.19/PW.007/MKP/2007
3	Taman Mayure	Situs	Nasional	SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata : PM.19/PW.007/MKP/2007
4	Pura Meru Cakra Negara	Situs	Nasional	SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata : PM.19/PW.007/MKP/2007
5	Masjid Rembitan	Bangunan	Nasional	SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata : PM.19/PW.007/MKP/2007
6	Masjid GunungPujut	Bangunan	Nasional	SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata : PM.19/PW.007/MKP/2007
7	Masjid Kuno Bayan Beleq	Bangunan	Nasional	SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata : PM.19/PW.007/MKP/2007
8	Masjid RaudatulMuttaqin	Bangunan	Nasional	SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata : PM.19/PW.007/MKP/2007
9	Makan Serewa	Situs	Nasional	SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata : PM.19/PW.007/MKP/2007
10	Kompleks Makan Selaparang	Situs	Nasional	SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata : PM.19/PW.007/MKP/2007
11	Istana Bima " ASI Mbojo"	Bangunan	Nasional	SK Menteri : 205/M/2016 (Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya)
12	Gua Jepang Pink - Lotim	Situs	Provinsi	SK Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 430-858 Tahun 2023
13	Kapal Bersejarah Pantai Dedalpak Pohgading	Benda	Provinsi	SK Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 430-859 Tahun 2023
14	Makam Batu Mulut	Situs	Provinsi	SK Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 430-860 Tahun 2023
15	Istana Dalam Loka	Bangunan	Provinsi	SK Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 430-861 Tahun 2023
16	Bala Datu Ranga	Bangunan	Provinsi	SK Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 430-861 Tahun 2023
17	Istana Sultan Muhammad Kaharuddin III	Bangunan	Provinsi	SK Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 430-861 Tahun 2023
18	Istana Bala Kuning	Bangunan	Provinsi	SK Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 430-861 Tahun 2023
19	Eks Kantor Kontrolir India Belanda	Bangunan	Provinsi	SK Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 430-861 Tahun 2023
20	Makam Dewa Ling Gunung Satiya (Datu Puti Geti)	Situs	Provinsi	SK Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 430-861 Tahun 2023
21	Sarkofagus Al-Renung	Benda dan Situs	Provinsi	SK Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 430-861 Tahun 2023
22	Bala Dea Imam Empang	Bangunan	Provinsi	SK Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 430-861 Tahun 2023
23	Bala Dea Busing Lape	Bangunan	Provinsi	SK Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 430-861 Tahun 2023
24	Komplek Makam Krongkeng	Situs	Provinsi	SK Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 430-861 Tahun 2023
25	Makam Faqih Ismail dan Syarif Maulana Aly	Situs	Provinsi	SK Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 430-861 Tahun 2023
26	Sarkofagus Reboran	Situs	Provinsi	SK Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 430-861 Tahun 2023

Dari table diatas ini terlihat bahwa jumlah cagar budaya yang dilestarikan sampai dengan tahun 2024 sebanyak 26 (dua puluh enam cagar budaya) yang penetapannya telah dilakukan dari tahun 2015, namun tahun 2024 belum ada penetapan baru karena terbatasnsya SDM penilai dalam hal ini tim ahli cagar budaya yang ada ditingkat provinsi hanya berjumlah 1 (satu) orang, selain itu Lokasi cagar budaya yang tersebar di kabupaten /kota perlu dilakukan monitoring namun demikian anggaran sangat terbatas, setelah dilakukan identifikasi cagar budaya melalui monitoring tersebut akan dilakukan proses poendaftaran cagar budaya, namun anggaran untuk memfasilitasi tim pendaftaran cagar budaya untuk tahun 2024 tidak tersedia mengingat pembiayaan urusan kebudayaan pada bidang kebudayaan untuk kegiatan ini, murni hanya bersumber dari PAD.

b. UPT Taman Budaya

Untuk mendukung terlaksananya pengembangan OPK di provinsi NTB, berikut beberapa kegiatan yang dilakukan oleh UPT Taman Budaya sebagaimana terlihat dalam table dibawah ini :

Tabel : 2.2.1.4
Kalender Kegiatan Taman Budaya
yang telah dilaksanalkan sampe dengan bulan Oktober Tahun 2024

No.	NAMA KEGIATAN	TANGGAL & BULAN	TEMPAT KEGIATAN	KETERANGAN
1	Pentas Seni Religi	27 s/d 29 April 2024	Panggung Terbuka	
2	Pergelaran Musik Performance	1 Juni 2024	Panggung Tertutup	
3	Pameran Seni Rupa	14 s/d 21 Juni 2024	Galeri Taman Budaya NTB	
4	Evaluasi Olah Seni I	15 Juni 2024	Panggung Terbuka	
5	Pergelaran Dance Performance	22 Juni 2024	Panggung Tertutup	
6	Pergelaran Musikalisasi Puisi	13 Juli 2024	Panggung Tertutup	
7	Gebyar Seni Tradisi	27 s/d 29 Juli 2024	Panggung Terbuka	
8	Pergelaran Teater Tradisional	04 Agustus 2024	Panggung Tertutup	
9	Gebyar Seni Sekolah Luar Biasa	11 s/d 12 Agustus 2024	Panggung Tertutup	
10	Pergelaran Teater Modern	30 s/d 31 Agustus 2024	Panggung Tertutup	
11	Eksperimentasi Teater	05 Oktober 2024	Panggung Tertutup	
12	Gebyar Seni Pelajar	09 s/d 11 Oktober 2024	Panggung Terbuka	

Dari table diatas terlihat ada 12 event yang diselanggarakan oleh taman budaya di tahun 2024 yang telah dilaksanakan sejak bulan April sampai dengan Oktober 2024. Selain itu terdapat 7 (tujuh) event lagi yang akan dilaksanakan pad abulan November sampai dengan Desemebr 2024 yaitu yaitu : (1) Pergelaran etnik music (2) Pergelaran music night (3) pergelaran wayang (4) Festival Seni NTB (5) Wayang Orkestra dan Gamelan Pesantre (6) Eksperimen tari (7) Evaluasi olah seni II.

2.3 PERMASALAHAN

Urusan Pendidikan :

Dalam pelaksanaan urusan Pendidikan tahun 2024 masih ditemukan beberapa kendala secara umum meliputi :

1. Serapan anggaran sampai dengan bulan September 2024 belum maksimal terutama yang bersumber dari dana DAK karena ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan juklak juknis pelaksanaan DAK, belum terpenuhinya syarat yang ditentukan, terdapat bahan baku yang dipersyarakat namun ketersediaan bahan sangat terbatas;
2. Kegaiatan seperti pendataan ATS penyandang disabilitas seharusnya sudah dapat dilakukan namun kerena server dari Pusdatin-RI sedang mengalami maintenance sehingga penarikan data terhambat maka data yang akan di share ke pihak desa untuk mendata keberadaan anak tidak sekolah belum bisa dilakukan.
3. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan penyesuaian sehingga diusulkan pada tahapan perubahan anggaran belum bisa dieksekusi karena menunggu dokumen penganggaran ditetapkan;
4. Beberapa indikator utama seperti APK, APM, APS belum dapat dilakukan perhitungan karena menunggu data terbaru dari kemenag;
5. Capaian untuk indikator lulusan SMA yang melanjutkan ke perguruan tinggi belum mencapai target yang ditetapkan karena belum semua sekolah melakukan penginputan data pada aplikasi tracer study
6. Data akreditasi sekolah belum dilakukan update pada aplikasi DAPODIKk sehingga capaian atahun 2024 sampai bulan September masih sam adengan capaian tahun lalu.

Urusan Kebudayaan

Permasalahan yang dijumpai terkait urusan kebudayaan pada tahun 2024 :

1. Realisasi indikator OPK dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan karena dari 12 (dua belas) OPK yang ada, hanya mampu diintervensi 10 (sepuluh) OPK dan 2 (dua) OPK lainnya tidak mampu diintervensi karena intervensinya dilakukan melalui kajian teknis yang tentunya berbiaya sedangkan anggaran pada bidang kebudayaan sangat terbatas, mengingat sumber dana untuk kegiatan ini bersumber dari PAD saja.

2. Terbatasnya SDM bidang kebudayaan seperti tenaga ahli kebudayaan mengakibatkan lambatnya pelayanan urusan kebudayaan yang akhirnya berpengaruh terhadap tinggi rendahnya capaian indikator bidang kebudayaan.

2.4 STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan pada bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan pusat terkait ketidak sesuaian kondisi di lapangan dengan ketentuan pada juklak dan juknis pelaksanaan DAK, dan untuk tahun yang akan datang hendaknya dilakukan verifikasi yang lebih ketat sehingga tidak menjadi hambatan pada tahap pelaksanaan terkait persyaratan penerima DAK;
2. Berkoordinasi dengan Pusdatin untuk mencari Solusi terkait ATS yang terpilah agar dapat didistribusikan ke pihak desa untuk segera dilakukan verval;
3. Mempersiapkan dokumen pendukung seperti kelengkapan administrasi untuk beberapa kegiatan yang anggarannya dilakukan perubahan sehingga saat anggaran perubahan telah ditetapkan dapat segera dilaksanakan agar tidak melewati batas wakatu yang telah ditetapkan.
4. Melakukan koordinasi yang intensif dengan Kemenag untuk mendapatkan data terkait jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang MA/MAK;
5. Untuk meningkatkan capaian indikator SMA yang melanjutkan dan SMK terserap hendaknya melakukan sosialisasi dan validasi data ke satuan Pendidikan dan meminta satuan Pendidikan melakukan updating pengisian aplikasi stracer study yang telah disiapkan dinas;
6. Dalam peningkatan validitas data akreditasi sekolah dinas hendaknya meminta satuan Pendidikan untuk melakukan updating data pada aplikasi DAPODIK terkait status aktreditasi sekolah tersebut.

Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan pada bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pemetaan skla prioritas untuk anggaran bidang kebudayaan sehingga kegiatan yang sifatnya prioritas dan memiliki daya ungkit yang tinggi dapat ditingkatkan anggarannya untuk pencapaian yang lebih maksimal;
2. Melakukan peningkatan kapasitas SDM kebudayaan untuk mendukung terlaksananya pelayanan bidang kebudayaan dengan lebih optimal.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TUJUAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Tahun 2025 disusun dengan tujuan memberikan panduan bagi Dinas dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan tujuan sesuai Renstra 2024 – 2026 yaitu :

1. Terwujudnya jangkauan layanan Pendidikan yang berkualitas
2. Terwujudnya pemajuan pembangunan kebudayaan;

3.2. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumberdaya organisasi ke dalam strategi organisasi.

Adapun tujuan dan sasaran dari dinas Pendidikan dan kebudayaan provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2.1
Tujuan dan Sasaran
Dinas DIKBUD Provinsi NTB Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Realisasi 2023	Target Kinerja Tujuan/sasaran
						2025
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Terwujudnya jangkauanlayanan pendidikan yang berkualitas		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,97	17
			Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,74	9,55

		Meningkatnya aksesibilitas layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus	APK SMA/MA/SMK/ Paket C	Persen	115,78	100
			APM SMA/MA/SMK/ Paket C	Persen	98,50	98,65
			APS pendidikan menengah	Persen	98,85	98,90
			APS SLB	Persen	87,74	88
		Meningkatnya Mutu Pendidikan	Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B	Persen	65,82	65,90
			Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B	Persen	55,56	55.70
			Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT)	Persen	67,32	67,55
			Persentase Lulusan SMK yang terserap	Persen	54	56
		Meningkatnya Pemenuhan SPM Pendidikan	Persentase Pemenuhan SPM Pendidikan Menengah	%	75%	100%
			Persentase Pemenuhan SPM Pendidikan Khusus	%	75%	100%
2.	Terwujudnya Pemajuan Pembangunan Kebudayaan		Indeks Pembangunan Kebudayaan	Persen	NA	54-60
		Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan	Persentase Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Persen	83,33	84

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA DINAS DIKBUD PROVINSI NTB TAHUN 2025 (terlampir)

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan jangka pendek atau tahunan yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2025 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Nusa Tenggara Barat.

Dengan ditetapkannya tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja tahun 2025 ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian program prioritas daerah tahun 2025 sebagaimana yang tertuang dalamRPD tahun 2024-2026, selain itu dokumen Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan sebagai dasar evaluasi serta laporan atas kinerja 1 (satu) tahun kedepan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian pembangunan terutama pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Harapan kami semoga Rencana Kerja pembangunan pendidikan dan Kebudayaan ini bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan di provinsi Nusa Tenggara Barat.

RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN PROVINSI NTB
TAHUN 2025



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 63

3.1 Arah Kebijakan Nasional 63

3.2 Tujuan dan Sasaran 64

3.3 Program dan Kegiatan 67

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 91

BAB V PENUTUP 115

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahunan yang bersifat indikataif dan lebih operasional dan merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan disusun setiap tahun sesuai amanat Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 disusun sebagai dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berdasarkan pada permasalahan dan isu strategis, data capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2023 serta berorientasi pada capaian target indikator kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan sesuai tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 ini merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024- 2026. Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 dilaksanakan dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2023 sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan pembangunan bidang kesehatan tahun 2025 difokuskan pada pencapaian indikator kerja utama Dinas

Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengacu pada Idokumen RPD Tahun 2024-2026.

Renja Tahun 2025 Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat disusun melalui mekanisme mulai dari forum perangkat daerah sampai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Provinsi. Pelaksanaan tersebut melibatkan peran aktif semua UPT Dinas Kesehatan yang ada dan lintas sektor terkait lainnya. Hasil dari kegiatan tersebut kemudian diformulasikan ke dalam format usulan renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2025 dan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran berupa rencana kerja dan anggaran (RKA) yang kemudian dilanjutkan pada penyusunan dokumen pelaksanaan dan anggaran (DPA).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat disusun berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal H ayat 1 yang menegaskan tentang Hak untuk Hidup Sejahtera Lahir Batin, Bertempat Tinggal dan Mendapatkan Lingkungan yang Baik, Sehat dan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan;
2. Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara nomor 125 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 3 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara nomor 4548);
5. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700);

6. Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs;
19. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Peraturan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
20. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan penurunan Stunting;
21. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelayanan Kesehatan Bidang Kesehatan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 581);
27. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1447);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Gubernur Nusa Tanggara Barat Nomor 17 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja tahun 2025 adalah merumuskan rencana kerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk periode 1(satu) tahun sebagai implementasi Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 yang berpedoman pada RPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan dalam menetapkan prioritas Pembangunan bagi penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2025 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan, adapun tujuan penyusunan dokumen Renja Dinas Kesehatan Provinsi adalah sebagai acuan untuk:

1. Menetapkan Prioritas Pembangunan bidang Kesehatan di Provinsi NTB tahun 2025;
2. Merumuskan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025;
3. Menetapkan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dijabarkan dalam program dan kegiatan.

adapun Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025 adalah:

1. Menyusun kebijakan umum anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran termasuk penyusunan Program, Kegiatan dan Tolak Ukur Kegiatan tahun 2005 dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKPJ);
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran;

4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023,

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

3.3 Progam dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan

BAB V Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sektor Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi periode tahun 2019-2023, yang berakhir pada tahun 2023, memiliki 6 indikator keberhasilan, adapun capaian kinerja Renstra periode tahun 2019-2023 dari tahun pertama sampai pada akhir periode tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Uraian Tujuan/ Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kinerja Tahun 2023			
					Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Capaian
1.	Meningkatkan kesehatan Keluarga, Gizi dan kesehatan Masyarakat		Angka Harapan Hidup	Tahun	67,48	72,02	100%	Sangat Tinggi
	1	Menguatnya upaya pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	81	102.51	85.62%	Tinggi
			Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	7	8.36	80.57%	Tinggi
	2	Meningkatnya Status gizi masyarakat	Persentase Balita Stunting	%	16	13.49	100%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatkan Jaminan kesehatan bagi penduduk miskin		Cakupan Penduduk miskin yang mendapatkan jaminan Kesehatan	%	100	100	100%	Sangat Tinggi
		Meningkatnya Jaminan kesehatan bagi penduduk miskin	Persentase Peserta JKN yang dapat mengakses pelayanan Kesehatan	%	100	100	100%	Sangat Tinggi
			Cakupan jaminan Kesehatan Nasional	%	90	97.31	100%	Sangat Tinggi
3.	Meningkatkan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi penduduk miskin		Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	80,91	81,83	100%	Sangat Tinggi
		Meningkatnya Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak	Presentase desa/ kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan	%	81,79	100	100%	Sangat Tinggi

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dokumen Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan 3 tujuan pembangunan sektor kesehatan yang mengacu pada sasaran RPJMD dan menetapkan 4 sasaran dengan 6 indikator sasaran, capaian ketiga tujuan dan sasarannya sebagaimana tabel diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Capaian Indikator Kinerja Rencana Strategis
Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023

No	Uraian Tujuan/ Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2019-2023														
				Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatkan kesehatan Keluarga, Gizi dan kesehatan Masyarakat		Angka Harapan Hidup	66,28	66,28	100	66,51	71,17	107	66,78	71,33	107	67,08	71,66	106	67,48	72,02	100
	1	Menguatnya upaya pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 KH)	93	93.92	99,01	90	119.05	67,72	87	146.69	31,39	84	101.82	91,7	81.00	102.51	85,62
			Angka Kematian Bayi (per 1,000 KH)	9	8.36	114,56	8.5	8.38	101,41	8	8.26	97,13	7.5	8.27	101,47	7.00	8,36	92,14
	2	Meningkatnya status gizi masyarakat	Persentase Balita Stunting	32.49	25.49	121,51	31.99	23,33	124,72	30.99	19.23	138,93	30.49	16.84	144,77	30.49	13,49	100
2	Meningkatkan Jaminan kesehatan bagi penduduk miskin		Cakupan Penduduk miskin yang mendapatkan jaminan Kesehatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	1	Terwujudnya Universal Health Coverage (UHC)	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional	73	84,13	115	75	83,48	111	77	83,22	108,08	80	89,13	111,41	90	97.31	100
3	Meningkatkan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi penduduk miskin		Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	72,62	75,02	103	79,36	80,27	101	72,12	81,83	113	80,91	81,83		82,46	83,12	100
		Terwujudnya peningkatan Kepala Keluarga dengan akses sanitasi layak	Proporsi Kepala Keluarga dengan akses Sanitasi Layak (Persen)	53,21	54,96	103	62,45	63,85	102	80,1	81.79	102	81,79	81.79	101,14	82,46	83,12	100

Sumber Data: Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kinerja Indikator keberhasilan tujuan pembangunan bidang kesehatan di provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2019-2023 tidak dapat tercapai 100% pada tahun akhir periode, dari 6 Indikator keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan terdapat 2 indikator yang tidak dapat mencapai target yaitu penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dengan capaian 102,51 per 100.000 dari target yang ditetapkan 81 per 100.000 KH, dan Angka Kematian Bayi (AKB) dengan target 7 per 1,000 KH tetapi capainnya 8,36 per 1,000 KH, adapun capaian kinerja indikator tujuan pembangunan kesehatan secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan Kesehatan Keluarga, Gizi dan Kesehatan Masyarakat**

   Indikator keberhasilan dari tujuan ini adalah meningkatnya Angka Harapan Hidup atau Usia Harapan Hidup. AHH merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk melakukan evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen renstra periode tahun 2019-2023.

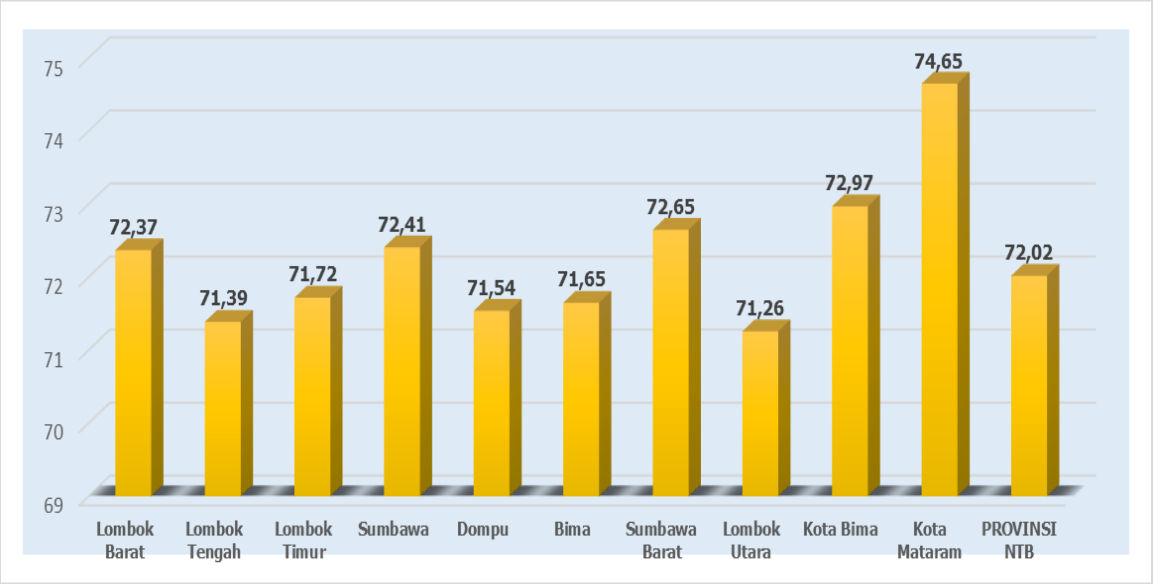
   Formulasi Perhitungan AHH (e0) dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian, tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Angka Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan program Mortpak Lite. Data capaian kinerja pada tabel diatas menggambarkan bahwa capain kinerja indikator AHH tahun 2023 memiliki kriteria sangat tinggi yaitu 100%, karena dari target 67,48 tahun dapat terealisasi 72,02 tahun. Komponen penunjang AHH adalah Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), status gizi Masyarakat dalam hal ini persentase balita stunting serta prevalensi penyakit. AKI dan AKB yang rendah menunjukan

menurunnya kematian ibu dan bayi dalam suatu wilayah, semakin rendahnya AKI dan AKB dapat dapat diartikan bahwa kualitas kesehatan masyarakat meningkat.

Indikator AHH merupakan salah satu indikator tujuan pembangunan sektor kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD. AHH Provinsi Nusa Tenggara Barat dari awal rencana pembangunan daerah periode 2019-2023 terus mengalami peningkatan, hal ini menunjukan bahwa upaya pembangunan memiliki dampak positif terhadap tujuan yang ingin dicapai. Peningkatan capaian AHH di tahun awal periode yaitu tahun 2019 adalah 66,28 tahun, bila dibandingkan dengan data tahun dasar yaitu tahun 2018 yaitu 65,75 tahun maka ada peningkatan 59,53 poin, demikian pula dengan capaian tahun 2020 dimana AHH mencapai 71,17 tahun ada peningkatan sebesar 4,89 poin dari capaian tahun 2019, peningkatan capaian dari tahun 2018-2020 sangat signifikan, perbedaan poin capaian dengan capaian AHH tahun 2021- 2023 dimana peningkatan capaian per tahun tidak mencapai 0,5 poin yaitu peningkatan AHH dari tahun 2020 ke tahun 2021 peningkatanya cuma 0,16 poin dimana AHH tahun 2021 adalah 71,33 tahun, sedangkan tahun 2020 71,17 tahun, peningkatan AHH dari tahun 2021 ke tahun 2022 adalah 0,33 poin dari 71,33 tahun menjadi 71,66 tahun di tahun 2022 dan pada tahun 2023 AHH di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah 72,02 tahun ada peningkatan sebesar 0,36 poin. Perbedaan peningkatan yang cukup signifikan pada AHH dibawah tahun 2020 hal ini disebabkan karena ada perbedaan formulasi perhitungan yang dilakukan BPS sejak tahun 2020.

Capaian AHH Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023 adalah 72,02 tahun, capaian ini melampaui target peningkatan AHH tahun 2023 yaitu 67,48. Kabupaten/Kota yang memiliki Angka Harapan Hidup diatas pencapaian target Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023 ada 5 Kabupaten/Kota yaitu Kota Mataram 74,65 tahun, Kota Bima 72,97 tahun, Kabupaten Sumbawa Barat 72,65 tahun, Kabupaten Sumbawa 72,41 tahun dan Kabupaten Lombok Barat 72,37 tahun, sedangkan AHH Kabupaten terendah adalah Kabupaten Lombok Utara dengan AHH 71,26 tahun, adapun gambaran peningkatan AHH tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Tingkat Nasional dari tahun awal periode Renstra 2019-2023 dan capaian AHH per Kabupaten/Kota pada akhir periode tahun 2023 sebagaimana tabel dan grafik dibawah ini:

Grafik 2.1
Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Sumber Data: BPS

Tabel 2. 3
Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten/Kota
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023

KABUPATEN/ KOTA	ANGKA HARAPAN HIDUP KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019-2023				
	2019	2020	2021	2022	2023
Lombok Barat	66,64	66,94	67,19	67,63	72,37
Lombok Tengah	66,92	67,17	67,36	66,75	71,39
Lombok Timur	65,99	66,21	66,38	66,55	71,72
Sumbawa	65,74	65,9	66,16	68,12	72,41
Dompu	67,8	68,07	68,31	67,36	71,54
Bima	67,31	67,54	67,73	66,87	71,65
Sumbawa Barat	66,6	66,62	66,99	68,74	72,65
Lombok Utara	66,11	66,33	66,5	67,75	71,26
Kota Bima	70,2	70,38	70,5	70,83	72,97
Kota Mataram	71,59	71,76	71,88	71,76	74,65
PROVINSI NTB	**66,28**	**71,17**	**71,33**	**71,66**	**72,02**

Sumber Data: BPS

Grafik 2.2

Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023

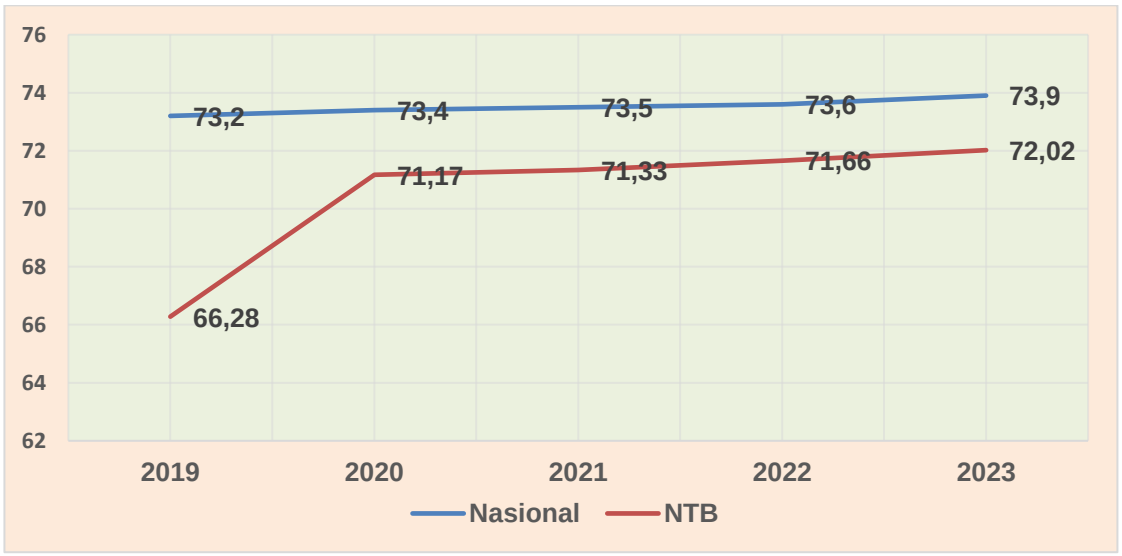


Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Usia harapan hidup penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, hal ini juga menggambarkan kualitas kesehatanpenduduk yang membaik dari tahun sebelumnya, namun demikian harapan hidup penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat masih berada dibawah harapan hidup nasional, adapun gambaran peningkatan harapan hidup secara nasional dalam 5 tahun terakhir sebagaimana grafik dibawah ini:

Grafik.2.3

Perbandingan Capaian Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap Capaian Nasional Tahun 2019-2023



Sumber Data BPS

Angka Harapan Hidup sebagai indikator tujuan pembangunan di sektor Kesehatan dipengaruhi oleh tercapainya target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, adapun sasaran pembangunan dengan tujuan dalam rangka meningkatkan Kesehatan Keluarga, Gizi dan Kesehatan Masyarakat:

1. **Menguatnya upaya pelayanan kesehatan**

   Indikator dari sasaran ini adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), adapun capaian untuk indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

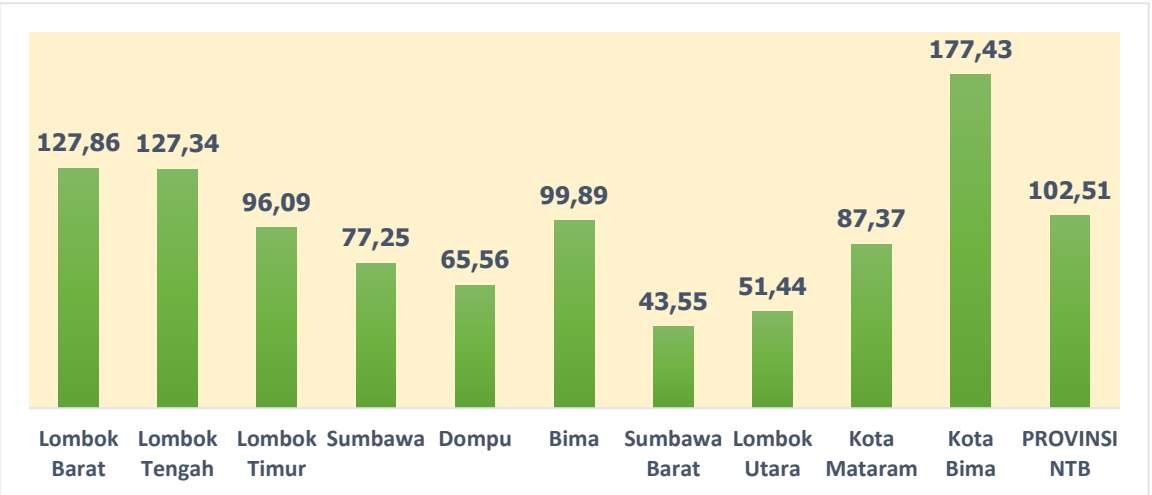
   1.1 Angka Kematian Ibu (AKI)

   Formulasi untuk perhitungan capaian AKI adalah: Jumlah kematian Ibu dalam kurun waktu 1 tahun dibagi Jumlah kelahiran hidup dalam tahun yang sama di kali 100.000. Jumlah kematian ibu yang dimaksud adalah perempuan hamil yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan.

   Perhitungan capaian AKI Provinsi Nusa Tenggara Barat dihitung berdasarkan formulasi yang tertuang dalam dokuemn Renstra Dinas Kesehatan Provinsi peride tahun 2019 dan perhitungan oleh BPS selaku lembaga yang memiliki kewenangan melakukan survey terkait AKI dan AKB. Gambaran AKI Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan kedua perhitungan tersebut adalah sebagaiman grafik dibawah ini

Grafik 2.4

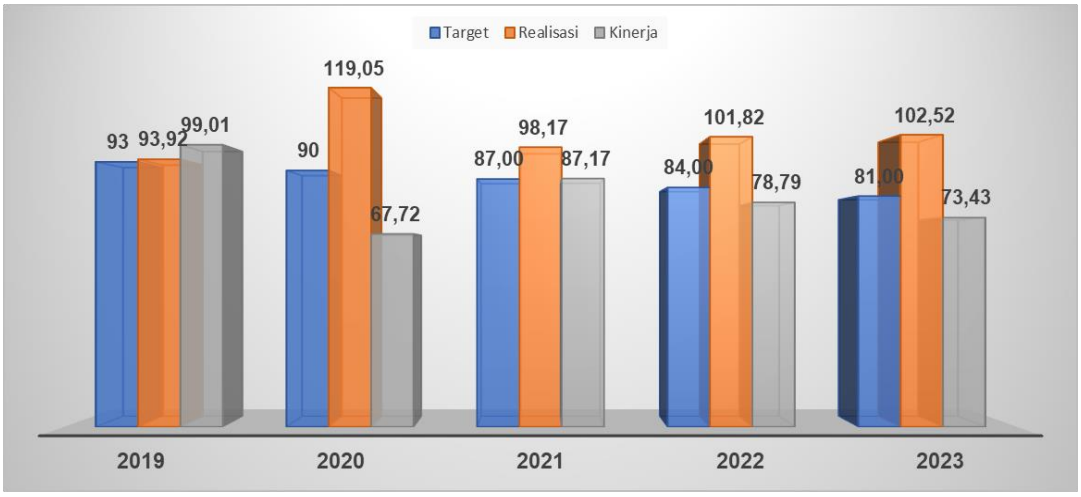
AKI Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023



Sumber Data: Perhitungan berdasarkan Laporan dan Formulasi Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTB

Grafik 2.5

AKI Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023

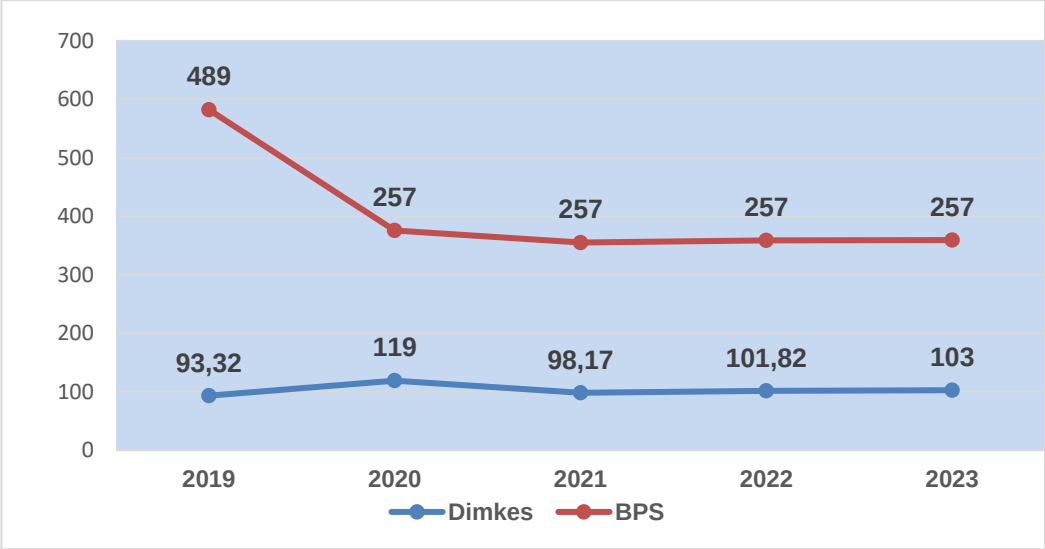


Sumber Data: Perhitungan berdasarkan Laporan dan Formulasi Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTB

Grafik 2.6

Perbandingan AKI Perhitungan Dinas Kesehatan dan BPS

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023

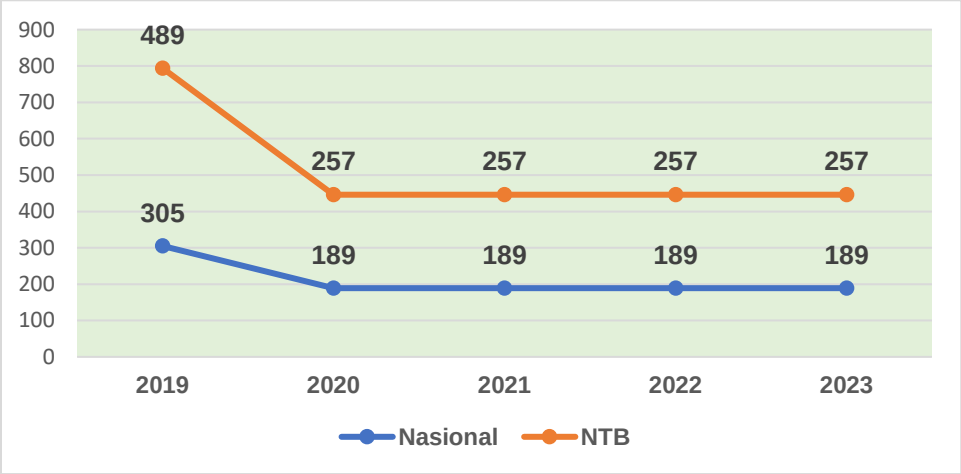


Data pada grafik 2.6 menggambarkan perbedaan capaian AKI per 100.000 KH dengan sumber data Dinas Kesehatan Provinsi dan BPS. Capaian AKI sumber data Dinas Kesehatan Provinsi lebih kecil dari sumber data BPS artinya berdasarkan perhitungan Dinas Kesehatan AKI Provinsi Nusa Tenggara Barat kinerja penurunan AKI lebih baik dari AKI BPS, namun perhitungan capain

AKI oleh Dinas Kesehatan Provinsi belum memenuhi kaidah perhitungan AKI yang digunakan secara nasional, oleh karena itu data yang digunakan dalam menggambarkan AKI adalah data yang dikeluarkan oleh BPS selaku lembaga yang memiliki kewenangan.

Gambaran AKI Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019 sebagai tahun pertama Renstra Periode 2019-2023 adalah 489 per 100.000 KH, angka ini merupakan hasil sufas BPS tahun 2015 berdasarkan gabungan pulau, dimana Provinsi NTB memiliki AKI yang sama dengan provinsi yang berada dalam wilayah pulau Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, sedangkan AKI untuk tahun 2020-2023 berdasarkan data sufas BPS Tahun 2020, dimana AKI Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah 257 per 100.000 KH, bila dibandingkan dengan AKI Nasional, AKI Provinsi Nusa Tenggara Barat masih berada jauh diatas nasional, adapun gambaran AKI nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.3
Perbandingan AKI Per 100.000 KH Tahun 2019-2023
Anatar Nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Barat



Sumber Data: BPS Sufas 2015 dan 2020

AKI merupakan gambaran capaian kinerja pelayanan kesehatan bagi ibu hamil sampai pasca persalinan atau masa nifas, yang dihitung berdasarkan jumlah kasus kematian ibu dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel. 2.2

Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Kelahiran Hidup Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023

KABUPATEN/ KOTA	Kematian Ibu Per 100.000 KH Provinsi Nusa Tenggara Barat														
	2019			2020			2021			2022			2023		
	Kasus Kematian Ibu	Jumlah Kelahiran Hidup	AKI per 100.000 KH	Kasus Kematian Ibu	Jumlah Kelahiran Hidup	AKI per 100.000 KH	Kasus Kematian Ibu	Jumlah Kelahiran Hidup	AKI per 100.000 KH	Kasus Kematian Ibu	Jumlah Kelahiran Hidup	AKI per 100.000 KH	Kasus Kematian Ibu	Jumlah Kelahiran Hidup	AKI per 100.000 KH
Lombok Barat	30	13.708	218,85	14	13.663	102,47	12	13.148	91,27	10	12,474	80.167	16	12514	127,86
Lombok Tengah	6	19.577	30,65	29	19.145	151,48	33	18.234	180,98	19	18,856	100.764	22	17277	127,34
Lombok Timur	4	27.047	14,79	43	24.651	174,44	45	23.508	191,42	34	24,6	138.211	22	22896	96,09
Sumbawa	2	8.701	22,99	11	9.052	121,52	9	8.613	104,49	8	8,112	98.619	6	7767	77,25
Dompu	4	5.570	71,81	1	5.763	17,35	7	5.571	125,65	2	5,369	37.251	3	4576	65,56
Bima	6	10.149	59,12	10	10.084	99,17	12	9.655	124,29	10	9,611	104.047	9	9010	99,89
Sumbawa Barat	5	2.821	177,24	1	3.495	28,61	2	3.393	58,94	2	4,459	44.853	1	2296	43,55
Lombok Utara	29	4.670	620,99	3	4.443	67,52	3	4.244	70,69	3	4,236	70.822	2	3888	51,44
Mataram	5	7.761	64,42	7	8.842	79,17	15	8.564	175,15	6	6,483	92.550	5	5723	87,37
Kota Bima	6	3.270	183,49	3	3.339	89,85	6	3.235	185,47	3	3,062	97.975	5	2818	177,43
Provinsi NTB	**97**	**103.274**	**93,92**	**122**	**102.477**	**119,05**	**144**	**98.165**	**98.165**	**97**	**95,262**	**101.824**	**91**	**88765**	**102,52**

Sumber Data: Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

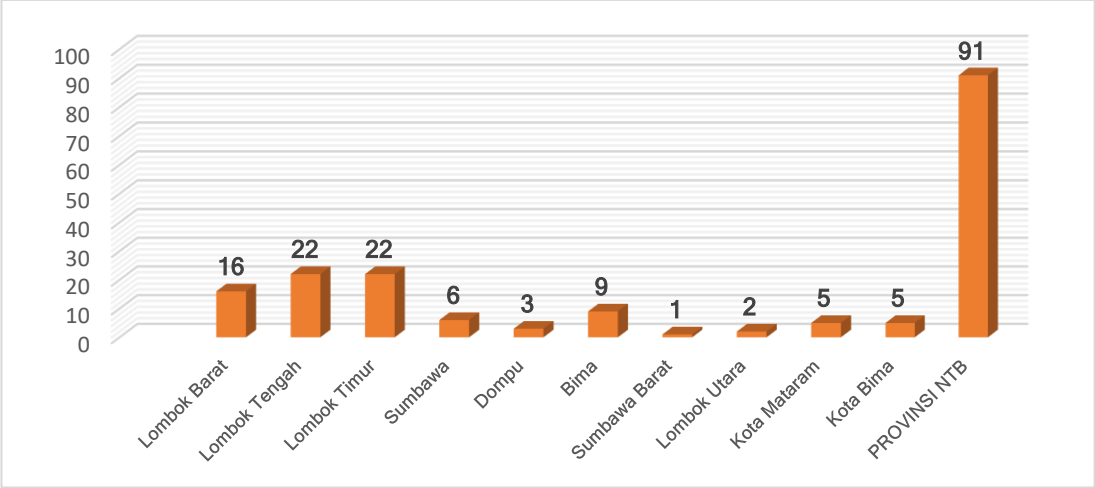
Perhitungan realisasi AKI, yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan provinsi, dihitung dengan menggunakan data jumlah kematian Ibu dan Bayi yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota.

Jumlah kasus kematian Ibu di provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023 berdasarkan laporan tersebut pada adalah 91 kasus kematian Ibu sehingga hasil perhitungan AKI Provinsi NTB tahun 2023 adalah 102,51 per 100.000 KH sedangkan target yang direncanakan yaitu 81 per 100.000 KH, dari realisasi tersebut diketahui bahwa capaian indikator kinerja AKI tahun 2023 adalah 85,62 %, walaupun capain ini tidak dapat dijadikan acuan dalam penetapan AKI, hal ini menunjukan bahwa upaya yang telah dilakukan pada tahun 2023 belum optimal dalam penurunan kasus kematian ibu.

Kabupaten/Kota dengan kematian ibu tertinggi tahun 2023 adalah kota Bima dan terendah di Kabupaten Sumbawa Barat, apabila dibandingkan dengan tahun 2022 kinerja penurunan AKI Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan, walaupun jumlah kasus lebih rendah yaitu 91 kasus dan pada tahun 2022 ditemukan 97 kasus kematian ibu,

Grafik 2. 1

Kasus Kematian Ibu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023



Sumber Data: Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Grafik diatas menunjukan bahwa jumlah kasus kematian ibu tertinggi tahun 2023 terjadi di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok tengah yang memiliki jumlah kasus kematian yang sama yaitu sejumlah 22 Kasus dari 91 kasus (23%), Jumlah kasus kematian ibu tahun 2023 di Kabupaten Lombok Timur menurun dari jumlah kasus tahun 2022 dimana ditemukan 34 kasus (35%) dari 97 kasus kematian Ibu di provinsi Nusa Tenggara Barat, kinerja penurunan kasus kematian ibu di Kabupaten Lombok Timur cukup signifikan

dimana kasus kematian ibu menurun sebanyak 12 kasus, sebaliknya Kabupaten Lombok Tengah mengalami penurunan kinerja dalam penurunan kasus kematian ibu dibanding tahun 2022, kasus kematian ibu di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022 memiliki 19 kasus dan pada tahun 2023 memiliki 22 kasus kematian ibu, berarti ada peningkatan sebanyak 3 kasus kematian ibu, jumlah kasus kematian ibu terendah berada di Kabupaten Sumbawa Barat sejumlah 1 kasus, kinerja mengalami peningkatan karena pada tahun 2022 Kabupaten Sumbawa Barat memiliki 2 kasus kematian Ibu, gambaran Kinerja dalam rangka penurunan kasus kematian ibu oleh masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat dari proporsi kematian ibu dimana jumlah kasus kematian ibu di masing-masing Kabupaten/Kota dibandingkan dengan jumlah ibu hamil di Kabupaten/Kota yang sama, adapun jumlah kematian dan ibu hamil pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel

Proporsi Kematian Ibu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Ibu Hamil	Proporsi Kematian Ibu	
		Jumlah Kematian Ibu	Kinerja (%)
Lombok Barat	14.566	16	0,11
Lombok Tengah	19.944	22	0,11
Lombok Timur	25.648	22	0,09
Sumbawa	9.417	6	0,06
Dompu	6.172	3	0,05
Bima	10.582	9	0,09
Sumbawa Barat	3.851	1	0,03
Lombok Utara	4.649	2	0,04
Kota Mataram	9.584	5	0,05
Kota Bima	3.622	5	0,14
PROVINSI NTB	**108.035**	**91**	**0,08**

Proporsi kematian ibu terhadap ibu hamil di Provinis Nusa Tenggara Barat tahun 2023 adalah 0,08%, Kabupaten/Kota yang memiliki proporsi kematian ibu diatas rata-rata Provinsi ada 5 yaitu, Kota Bima, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur dan Kabupaten Bima. Kabupaten Lombok timur memiliki kasus kematian ibu tertinggi bersama Kabupaten Lombok Barat, namun kinerja penurunan kasus kematian ibu Kabupaten Lombok Timur memiliki kinerja lebih baik dari Kota Bima yang memiliki 5 kasus kematian Ibu.

Kematian ibu yang terjadi secara nasional dan juga di provinsi Nusa Tenggara Barat, merupakan kasus kematian yang seharusnya dapat dicegah melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terus dilakukan secara berksinambungan, baik dari aspek peningkatan kompetensi dan pemerataan distribusi SDMK, pemenuhan sarana dan prasarana serta alat kesehatan maupun kerjasama dengan lintas sektor terkait.

Tabel.

Persentase Fase kasus Kematian Ibu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Kelahiran Hidup			Ibu Hamil	Ibu Bersalin	Persalinan Fasyankes	%	Kematian Ibu			Fase kematian Ibu					
	Target	Realisasi	Kinerja (%)					Target (10%)	Jumlah	Kinerja (%)	Fase Hamil		Fase Bersalin		Fase Nifas	
Lombok Barat	13.242	12.514	95	14.566	12.583	12.583	100	9	16	22	2	13%	5	31%	9	56%
Lombok Tengah	18.131	17.277	95	19.944	17.238	10.312	60	17	22	71	5	23%	4	18%	13	59%
Lombok Timur	23.316	22.896	98	25.648	22.896	16.299	71	31	22	128	4	18%	3	14%	15	68%
Sumbawa	8.561	7.767	91	9.417	7.648	7.619	100	7	6	117	2	33%		0%	4	67%
Dompu	5.611	4.576	82	6.172	4.974	4.087	82	2	3	33	0	0%		0%	3	100%
Bima	9.620	9.010	94	10.582	9.046	7.360	81	9	9	100	2	22%	1	11%	6	67%
Sumbawa Barat	3.501	2.296	66	3.851	2.307	2.283	99	2	1	144	1	100%		0%		0%
Lombok Utara	4.226	3.888	92	4.649	3.884	3.884	100	3	2	126	1	50%		0%	1	50%
Kota Mataram	8.713	5.723	66	9.584	5.711	5.364	94	5	5	107		0%	1	20%	4	80%
Kota Bima	3.293	2.818	86	3.622	2.809	2.715	97	3	5	15	2	40%	1	20%	2	40%
PROVINSI NTB	**98.214**	**88.765**	**90**	**108.035**	**89.096**	**72.506**	81	**87**	**91**	96	**19**	**21%**	**15**	**16%**	**57**	**63%**

Sumber Data: Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

target penurunan kasus kematian ibu pada tahun 2023 adalah 10% dari kasus kematian ibu tahun 2022 yaitu 97 kasus menjadi 87 kasus tahun 2023, namun target tersebut tidak tercapai karena tahun 2023 jumlah kasus kematian ibu 91 kasus. Data tabel diatas memberikan gambaran bahwa fase kematian ibu lebih besar terjadi pada masa nifas yaitu 57 kasus (63%), masa persalinan 16% dan masa kehamilan 21%,hal ini membutuhkan analisa lebih dalam untuk dapat mencari faktor-faktor yang mempengaruhi kematian ibu di masa nifas.

Tabel. 2.3

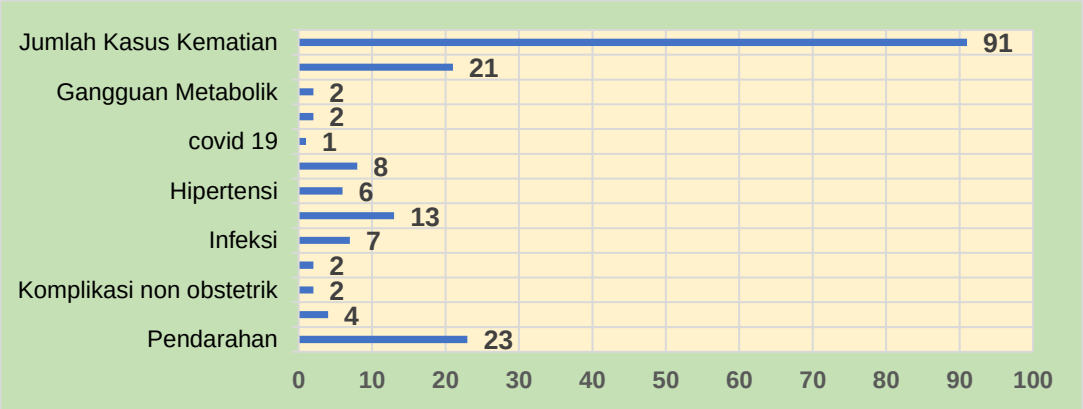
Penyebab Kematian Ibu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023

Penyebab Kematian Ibu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023												
No.	Penyebab Kematian	Lombok Barat	Lombok Tengah	Lombok Timur	Sumbawa	Dompu	Bima	Sumbawa Barat	Lombok Utara	Kota Bima	Kota Mataram	Provinsi NTB
1	Pendarahan	2	4	8	3	2	1		1		2	23
2	Komplikasi obstetri lain		1		2			1				4
3	Komplikasi non obstetrik	1								1		2
4	Obstetric embolism				1					1		2
5	Infeksi		1	3			1			2		7
6	Eklampsia	2	4	4			2			1		13
7	Hipertensi	2		2			2					6
8	Jantung	3	3	1		1						8
9	covid 19	1										1
10	Placenta praevia	2										2
11	Gangguan Metabolik		2									2
12	Tidak tahu/ Lain2	3	7	4			3		1		3	21
		16	22	22	6	3	9	1	2	5	5	91

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Grafik 2

Penyebab Kematian Ibu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023



data pada tabel dan grafik menunjukan bahwa kasus kematian Ibu tertinggi tahun 2023 disebabkan oleh pendarahan sebanyak 23 kasus (25,27%) dari 91 Kasus2, disebabkan oleh faktor lain sebanyak 21 kasus (3,07%) dan peringkat ketiga disebabkan oleh eklampsia sebanyak 13 kasus (14%), adapu pada tahun 2022 (Pre-Eklampsia, Eklampsia atau keracunan kehamilan yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah, kasus ini sebanyak 34 kasus (35,5%) dari 97 kasus kematian ibu di provinsi NTB, adapun penyebab

kematian ibu yang lain yaitu karena jantung, infeksi dan TB Paru serta disebabkan oleh penyebab lainnya termasuk komplikasi kehamilan

Komplikasi kehamilan merupakan salah satu penyebab kematian ibu di tingkat nasional. Upaya penurunan kematian ibu salah satunya adalah meminimalisir terjadinya komplikasi pada ibu hamil dengan batas maksimal 20% dari seluruh kehamilam dalam suatu wilayah. Kondisi ibu hamil dengan komplikasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023 cukup tinggi yaitu 27,65% atau 29.882 ibu hamil komplikasi, sedangkan batas maksimal adalah 21.605 (20%) dari seluruh jumlah kehamilan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu 108.035. Jumlah komplikasi ibu hamil tingkat provinsi, kasus komplikasi tertinggi ditemukan di Kabupaten Lombok Timur 34,03% atau 8.727 dari batas maksimal 29.882 Ibu hamil, Kabupaten Bima 33,25% atau 3.519, namun apabila dilihat pada masing-masing wilayah kerja Kabupaten/Kota maka Kabupaten Bima memiliki ibu hamil komplikasi tertinggi yaitu 52,15% dari seluruh kehamilan di Kabupaten Bima, sedangkan Kabupaten Lombok Timur adalah 34,02% dari seluruh kehamilan wilayah setempat. Kasus kematian Ibu di pengaruhi oleh pengetahuan ibu hamil dan kualitas pelayanan kesehatan yang diperoleh seluruh Ibu Hamil dan Ibu bersalin untuk mengetahui capaian kualitas kesehatan bagi ibu hamil dan ibu bersalin serta cakupan ibu hamil yang mengalami komplikasi dapat dianalisa dari capaian beberapa cakupan hasil pelayanan terhadap ibu hamil dan ibu bersalin dibawah ini:

Tabel. 2. 5 Hasil Pemantauan Wilayah Setempat Ibu Hamil Komplikasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023

Nama Kab / Kota	IBU HAMIL	KOMPLIKASI MATERNAL (20% Sasaran Ibu Hamil)			IBU HAMIL ANEMIA		IBU HAMIL KEK		IBU HAMIL HIV				IBU HAMIL SIFILIS				IBU HAMIL HEPATITIS			
		Target	Realisasi		Realisasi		Realisasi		Diperiksa		Positif		Diperiksa		Positif		Diperiksa		Positif	
Lombok Barat	14.566	2.913	2.701	18,54%	1.326	9,10%	1.531	10,51%	12.295	85,60%	7	0,06%	12.250	85,28%	5	0,04%	12.350	85,98%	134	1,09%
Lombok Tengah	19.944	3.989	5.123	25,69%	2.122	10,64%	2.894	14,51%	15.638	99,89%	5	0,03%	15.652	99,98%	5	0,03%	15.098	96,44%	205	1,36%
Lombok Timur	25.648	5.130	8.727	34,03%	3.730	14,54%	3.465	13,51%	25.354	109,81%	8	0,03%	25.338	109,75%	12	0,05%	25.468	110,31%	328	1,29%
Sumbawa	9.417	1.883	2.036	21,62%	1.096	11,64%	1.043	11,08%	7.843	121,65%	10	0,13%	7.814	121,20%	11	0,14%	7.788	120,80%	159	2,04%
Dompu	6.162	1.232	1.664	27,00%	548	8,89%	950	15,42%	3.051	79,52%	8	0,26%	3.045	79,36%	12	0,39%	3.230	84,18%	143	4,43%
Bima	10.582	2.116	3.519	33,25%	1.595	15,07%	1.714	16,20%	8.980	121,99%	5	0,06%	8.980	121,99%	14	0,16%	8.933	121,36%	289	3,24%
Sumbawa Barat	3.851	770	707	18,36%	402	10,44%	295	7,66%	2.420	120,82%	2	0,08%	2.423	120,97%	2	0,08%	2.423	120,97%	39	1,61%
Lombok Utara	4.649	930	1.245	26,78%	892	19,19%	1.235	26,56%	3.750	106,38%	1	0,03%	3.753	106,47%	7	0,19%	3.754	106,50%	80	2,13%
Kota Mataram	9.584	1.917	3.011	31,42%	900	9,39%	485	5,06%	5.001	71,16%	6	0,12%	4.952	70,46%	5	0,10%	4.978	70,83%	78	1,57%
Kota Bima	3.622	724	1.149	31,72%	258	7,12%	352	9,72%	2.874	129,58%	1	0,03%	2.863	129,08%	6	0,21%	2.869	129,35%	84	2,93%
Provinsi NTB	**108.035**	**21.605**	**29.882**	**27,66%**	**12.869**	**11,91%**	**13.964**	**12,93%**	**87.206**	**80,73%**	**7**	**0,01%**	**87.070**	**101,81%**	**11**	**0,01%**	**86.891**	**101,60%**	**1.539**	**1,77%**

Sumber Data: Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

.

Tabel. 2.6. Hasil Pemantauan Wilayah Setempat Ibu Bersalin Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023

Nama Kab / Kota	Ibu Hamil (Bumil)	Ibu Bersalin (Bulin)	PEMANTAUAN WILAYAH SETEMPAT (PWS) IBU													
			K1		K4		K6		4 Terlalu		Persalinan Nakes		Persalinan Fasyankes		Persalinan Non Fasyankes	
			Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja
Lombok Barat	14.566	13.904	14.364	98,61%	13.161	90,35%	11.659	80,04%	1.506	10,48	12.583	87,60%	12.583	100,00%	0	0,00%
Lombok Tengah	19.944	19.038	15.655	78,49%	17.288	86,68%	13.442	67,40%	3.275	20,92	17.238	110,11%	10.312	59,82%	6.926	40,18%
Lombok Timur	25.648	24.481	23.088	90,02%	22.619	88,19%	17.630	68,74%	5.066	21,94	22.896	99,17%	16.299	71,19%	6.597	28,81%
Sumbawa	9.417	8.989	6.447	68,46%	7.277	77,28%	5.938	63,06%	2.093	32,46	7.648	118,63%	7.619	99,62%	29	0,38%
Dompu	6.172	5.892	3.837	62,17%	4.755	77,04%	3.979	64,47%	1.170	30,49	4.974	129,63%	4.087	82,17%	887	17,83%
Bima	10.582	10.101	7.361	69,56%	8.941	84,49%	7.062	66,74%	1.659	22,54	9.046	122,89%	7.360	81,36%	1.686	18,64%
Sumbawa Barat	3.851	3.676	2.003	52,01%	2.057	53,41%	1.254	32,56%	759	37,89	2.307	115,18%	2.283	98,96%	24	1,04%
Lombok Utara	4.649	4.437	3.525	75,82%	3.545	76,25%	2.193	47,17%	1.276	36,20	3.884	110,18%	3.884	100,00%	0	0,00%
Kota Mataram	9.584	9.149	7.028	73,33%	5.910	61,67%	5.117	53,39%	1.127	16,04	5.711	81,26%	5.364	93,92%	347	6,08%
Kota Bima	3.622	3.458	2.218	61,24%	2.935	81,03%	2.691	74,30%	562	25,34	2.809	126,65%	2.715	96,65%	94	3,35%
Provinsi NTB	**108.035**	**103.125**	**85.526**	**79,17%**	**88.488**	**81,91%**	**70.965**	**65,69%**	**18.493**	**21,62**	**89.096**	**86,40%**	**72.506**	**81,38%**	**16.590**	**18,62%**

Sumber Data: Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kepatuhan ibu hamil dalam melakukan pemeriksaan dari awal kehamilan menjadi faktor sangat penting dalam penurunan kematian ibu, Pemeriksaan rutin untuk ibu hamil sangat penting karena dengan melakukan pemeriksaan rutin kesehatan ibu hamil dapat terpantau secara berkala, maka tenaga kesehatan dapat melakukan identifikasi dini terhadap kesehatan ibu hamil secara keseluruhan sehingga tenaga kesehatan maupun ibu hamil dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap segala kemungkinan risiko yang buruk bagi ibu dan bayi yang dapat mengakibatkan kematian, Kesadaran ibu hamil dalam melakukan pemeriksaan rutin dari awal kehamilan sampai pasca persalinan bukan hanya tanggungjawab tenaga kesehatan tetapi juga menjadi tanggungjawab ibu Hamil dan keluarga dengan memahami pentingnya pemeriksaan kehamilan. Berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan terhadap ibu hamil dari Kabupaten/Kota diatas maka gambaran terkait pelayanan kunjungan kehamilan dalam pemenuhan standar pemeriksaan ibu hamil Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2

Kunjungan Pelayanan Ibu Hamil dan Persalinan

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023



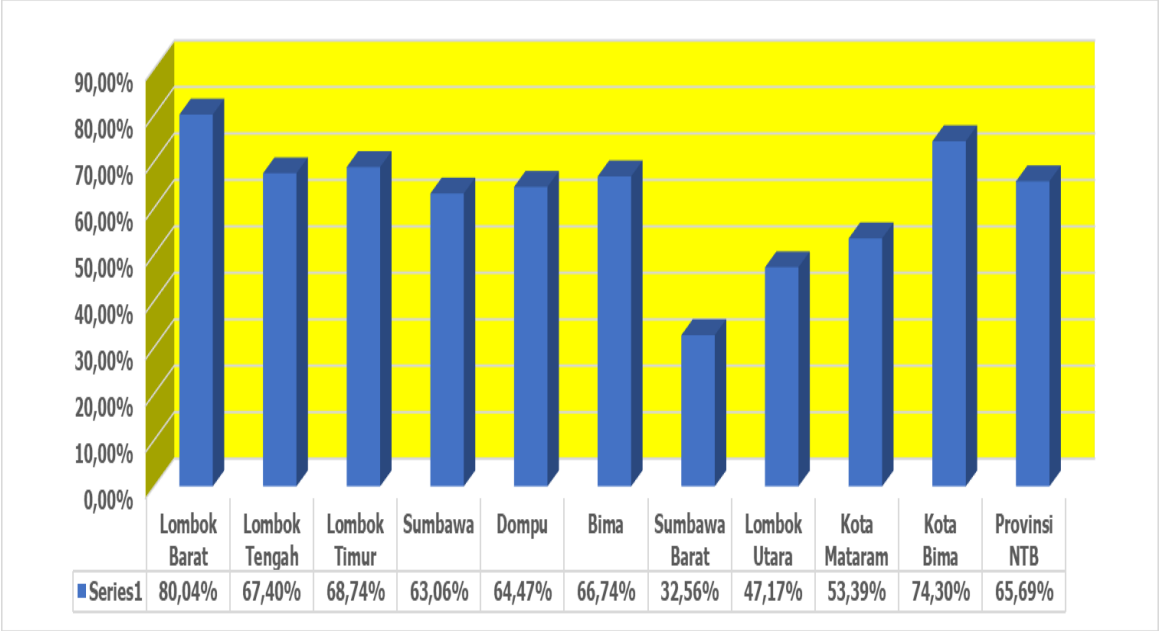
Sumber Data: Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Standar pelayanan kesehatan untuk ibu Hamil mengacu pada hasil reviu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, dimana kunjungan kehamilan harus dilakukan sebanyak 6 kali dimana 2 kali kunjungan dengan melakukan pemeriksaan USG oleh Dokter, merujuk pada standar tersebut cakupan kunjungan ibu Hamil sesuai standar adalah K6 bukan lagi K4.

Cakupan K6 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023 baru mencapai 65,69%, kabupaten dengan cakupan K6 tertinggi adalah Kabupaten Lombok Barat yaitu 80,04% dan Kabupaten terendah adalah Kabupaten Sumbawa Barat 32,56%. Cakupan K6 Kota Mataram dengan lokasi bearada di Ibu Kota Provinsi hanya mencapai 53%, lebih rendah dari cakupan K6 Kabupaten Lombok Timur, Lombok tengah dan Kabupaten Bima dengan jumlah kasus kematian ibu yang tinggi. Persalinan standar adalah persalinan yang dilayani oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, walaupun dilakukan oleh Tenaga Kesehatan (Nakes) namun tidak diyani di fasilitas pelayanan kesehatan, maka persalinan tersebut tidak termasuk dalam persalinan standar. Cakupan persalinan standar atau persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Provinsi Nusa Tenggara Barat belum mencapai 100% baru mencapai 81,38% namun persalinan oleh tenaga kesehatan mencapai 86,40%, hal ini menggambarkan kondisi bahwa masih ditemukan persalinan yang dilakukan oleh nakes namun tidak dilayani di Fasyankes. Cakupan persalinan non fasyankes Provinsi Nusa Tenggara Barat masih cukup tinggi yaitu 18,62% atau 16.590 persalinan, Persalinan non fasyankes diatas 18% terjadi di Kabupaten Lombok Tengah sebesar 40%, Kabupaten Lombok Timur 28,81%, Kabupaten Bima 18,64% dan Kabupaten Dompu 17,83% dari seluruh persalinan non fasyankes. Persalinan non fasyankes ini tidak hanya terjadi pada Kabupaten/Kota yang memiliki daerah sulit, seperti halnya terjadi Kabupaten Lombok tengah, cakupan persalinan non fasyakes mencapai 40% bahkan Kota Mataram memiliki persalinan non fasyankes sebesar 6% demikian juga Kota Bima memiliki persalinan non fasyankes sebesar 3,35%, adapun gambaran persalinansesuai standar Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

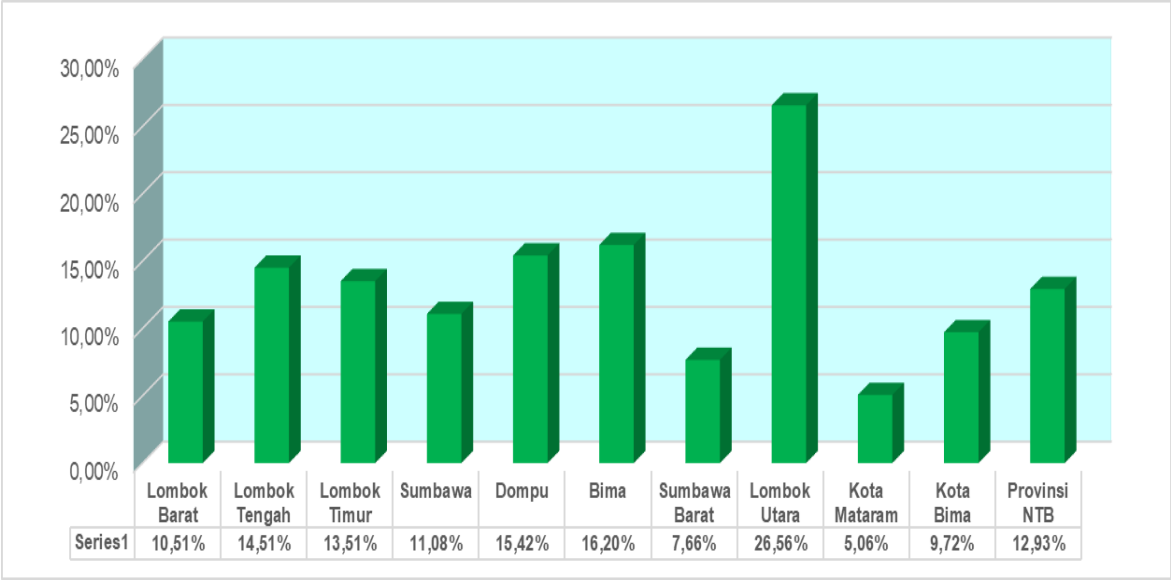
Grafik. 2.

Cakupan K6 Ibu Hamil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023



Grafik 2.

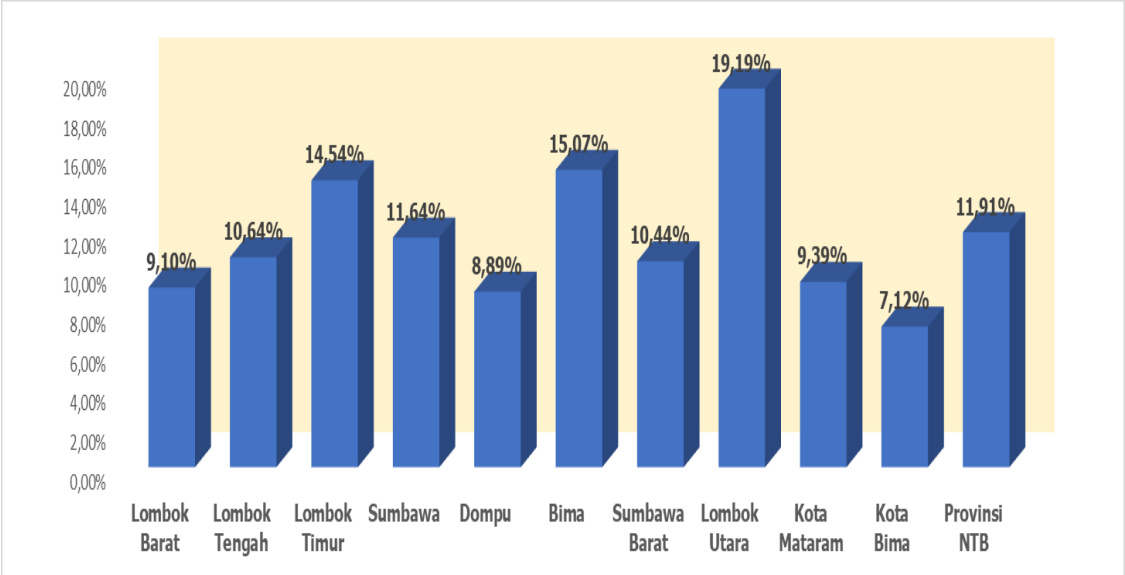
Cakupan Ibu Hamil Kek Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022



Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Grafik.2.

Cakupan Ibu Hamil Anemia Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023



Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

data grafik diatas menunjukan bahwa cakupan ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) adalah 14,59% dari seluruh Ibu Hamil, Kabupaten yang memiliki cakupan Ibu Hamil KEK tertinggi berada di Kabupaten Lombok Utara (19,53%), sedangkan cakupan untuk Ibu Hamil Anemia tertinggi berada di Kabupaten Bima (16,60). Ibu Hamil KEK dan Ibu Hamil Anemia memiliki risiko besar terhadap kematian ibu hamil, ibu bersalin, Bayi baru lahir dengan kondisi stunting, ibu hamil KEK dan Anemia memiliki risiko terhadap kematian bayi kaitannya dengan berat badan bayi yang rendah saat lahir, BBLR adalah penyebab kematian Bayi tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat

1.2 Angka Kematian Bayi (AKB)

Formulasi untuk perhitungan capaian AKB adalah: Bayi dalam kurun waktu 1 tahun dibagi Jumlah kelahiran hidup dalam tahun yang sama di kali 1.000. Kematian bayi yang dimaksud adalah kematian bayi yang terjadi pada bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal) tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri. Angka kematian Bayi (AKB) merupakan tolak ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya bidang Kesehatan.

Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) perhitungan Dinas Kesehatan Provinsi pada periode Renstra2019-2023 cukup fluktuatif, kondisi tahun 2019-2020 penurunan AKB per 1.000 KH dapat mencapai target, capaian kinerja

mencapai 114,56% dari target AKB 9 per 1.000 KH terealisasi 8,36 per 1.000 KH di tahun 2019 dan tahun 2020capaian kinerja 101,41% dimana target AKB8,5 per 1.000 KH terealisasi 8,36 per 1.000 KH, walaupun belum mencapai target penurunan AKB, jumlah kasus kematian bayi mengalami penurunan setaip tahun, sama halmya dengan AKI tahun 2021-2023 capaian kinerja realisasi target AKB tidak pernah mencapai 90%, walaupun masih masuk kriteria "**tinggi",** hal ini disebabkan karena terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) nasional yaitu Covid-19 pada tahun 2019-2022, sehingga segala bentuk layanankesehatan termasu pelayanan bagi bayi sangat terbatas karena adanya kebijakan pembatasan jarak antar individu dalam berinteraksi, namun demikian upaya layanan terhadap ibu hamil tetap diupayakan seoptimal mungkin. Bearkhirnya masa pandemi covid-19 masih belum berjalan optimal.

Pencapaian realisasi Indikator AKI dan AKB dihitung menggunakan dua formulasi yaitu berdasarkan BPS dan formulasi perhitungan yang digunakan oleh Dinas Kesehatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan tahun 2019-2023. Realisasi dengan perhitungan BPS akan diambil dari data rilis BPS, sedangkan untuk perhitungan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dihitung berdasarkan jumlah kasus kematian Bayi dalam wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat dibagi jumlah kelahiran hidup dalam waktu dan wilayah yang ama dikalikan 1.000, seperti halnya perhitungan AKI,oleh Dinas Kesehatan Provinsi belum memenuhi kaidah perhitungan AKB yang komprehensif, sehingga hasil perhitungan AKB yang menggunakan perhitungan Dinas Kesehatan Provinsi tidak dapat dijadikan AKB yang menggambarkan kondisi AKB yang valid, perhitungan AKB yang digunakan adalah perhitungan AKB yang dirilis BPS. Berdasarkan target yang telah tetapkan dalam Dokumen Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat periode tahun 2019-2023, capaian tahun 2019 dan tahun 2020 menggambarkan penurunan AKB melampaui target perhitungan yang telah ditetapkan Dinas kesehatan Provinsi, sedangkan tahun 2021 sampai tahun 2023 target tidak dapat tercapai sehingga di masa depan sangat penting untuk memiliki strategi yang lebih komprehensif dengan mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait, karena pembangunan sektor kesehatan merupakan tanggungjawab bersama.

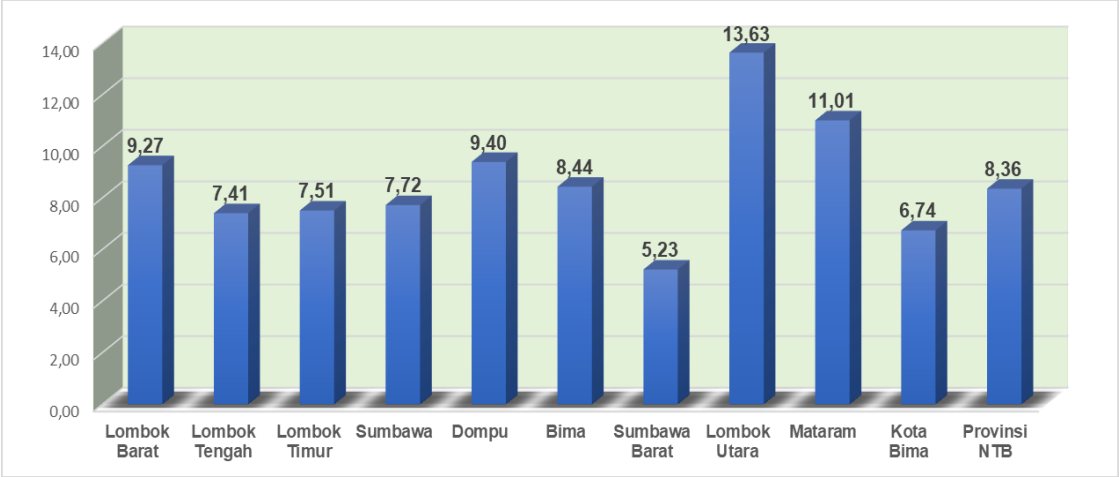
Gambaran AKB per 1.000 KH tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota dan AKB hasil rilis BPS dan perhitungan Dinas kesehatan Provinsi dapat dilihat pada Tabel dan grafik dibawah ini:

Tabel
Target dan Realisasi Angka Kematian Bayi (AKB) per 100.000 KH
Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023

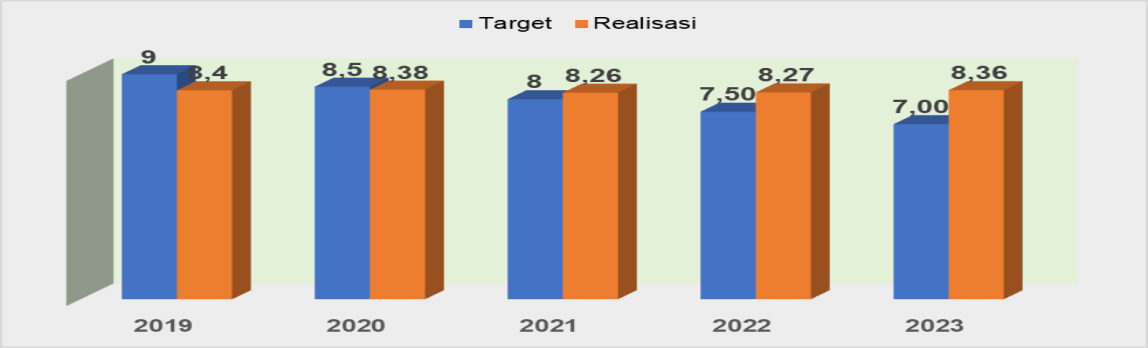
KABUPATEN/ KOTA	Kematian Bayi Per 1.000 KH Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023									
	2019		2020		2021		2022		2023	
	Kasus Kematian Bayi	AKI per 1.000 KH	Kasus Kematian Bayi	AKI per 1.000 KH	Kasus Kematian Bayi	AKI per 1.000 KH	Kasus Kematian Bayi	AKI per 1.000 KH	Kasus Kematian Bayi	AKB per 1.000 KH
Lombok Barat	54	4	42,00	3,07	46	3,50	43	3.447	116,00	9,27
Lombok Tengah	204	10	194,00	10,13	189	10,37	192	10.182	128,00	7,41
Lombok Timur	288	11	297,00	12,05	237	10,08	219	8.902	172,00	7,51
Sumbawa	59	7	76,00	8,40	64	7,43	59	7.273	60,00	7,72
Dompu	21	4	36,00	6,25	44	7,90	65	12.107	43,00	9,40
Bima	79	8	81,00	8,03	83	8,60	71	7.387	76,00	8,44
Sumbawa Barat	18	6	13,00	3,72	13	3,83	18	4.037	12,00	5,23
Lombok Utara	76	16	69,00	15,53	60	14,14	60	14.164	53,00	13,63
Mataram	28	4	14,00	1,58	19	2,22	16	2.468	63,00	11,01
Kota Bima	36	11	37,00	11,08	56	17,31	45	14.696	19,00	6,74
Provinsi NTB	**863**	**8**	**859,00**	**8,38**	**811**	**8,26**	**788**	**8.272**	**742,00**	**8,36**

Sumber Data Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Grafik
Target dan Realisasi Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH
Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun Tahun 2023

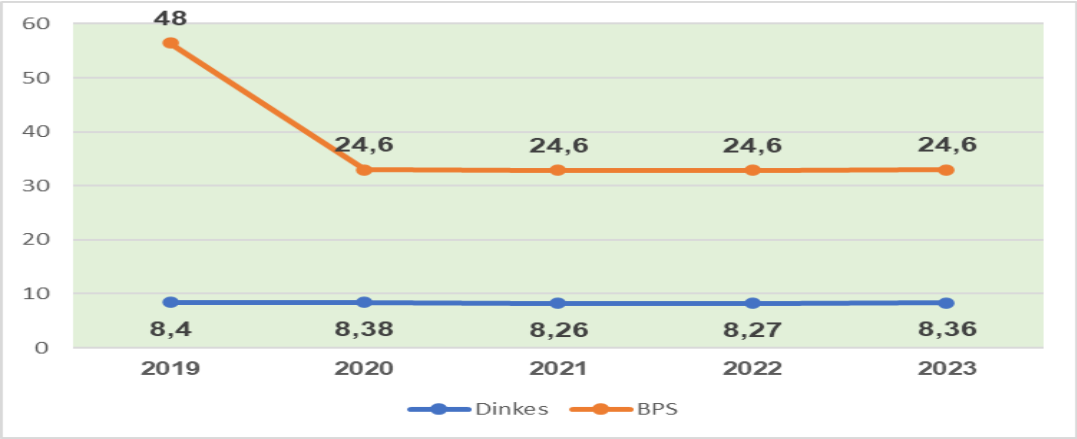


Grafik 3.
Target dan Realisasi Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH
Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023



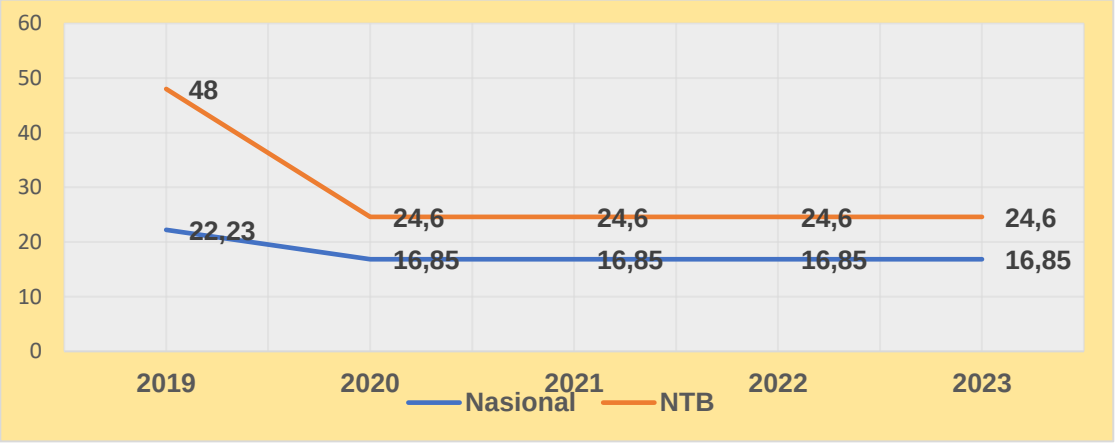
Sumber Data Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Grafik 3.
Perbandingan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH
BPS dan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat



Sumber Data Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan BPS

Grafik 3.
Perbandingan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH
Nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Barat



Sumber Data: BPS

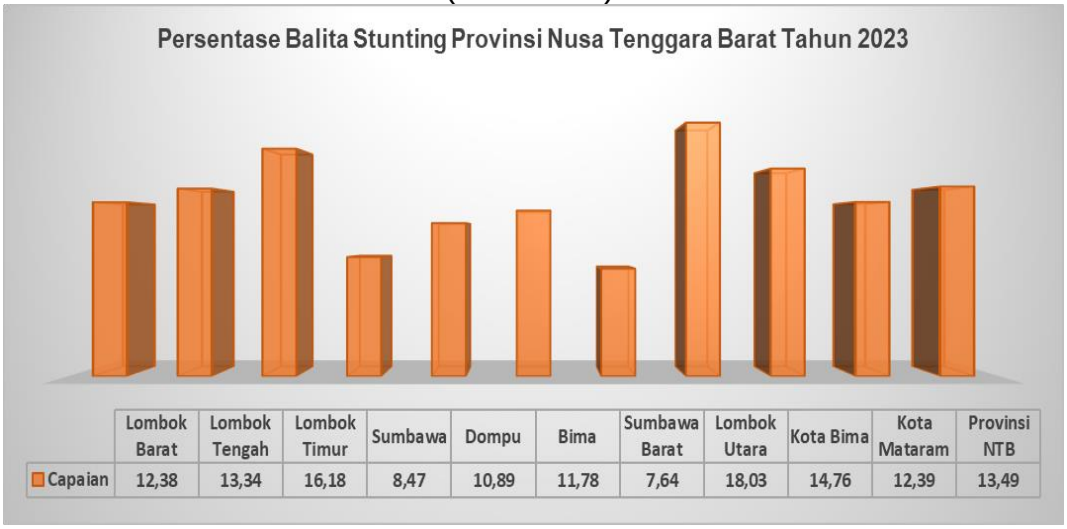
Angka Kematian Bayi Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023 masih berada diatas rata-rata nasional, dimana AKB Nasional tahun 2019 adalah 22,23 per 1.000 KH dan Provinsi Nusa Tenggara Barat 48 per 1.000 KH berdasarkan hasil sufas tahun 2010, sedangkan AKB Naional tahun 2020-2023 adalah 16,85 dan AKB Provinsi Nusa Tenggara Barat 24,6 per 1.000 KH.

2 . Meningkatnya Status gizi masyarakat

Indikator dari sasaran ini adalah Persentase Balita stunting. Indikator Persentase Balita Stunting tahun 2023 lebih rendah daripada tahun 2019-2022, hal ini menunjukan kinerja positif dalam upaya penurunan Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada indikator ini target yang digunakan sebagai dasar atau data awal perencanaan adalah hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI), sedangkan perhitungan Capaian menggunakan hasil entrian data hasil Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM), sehingga realisasi dan target perbedaanya cukup signifikan. E-PPGBM adalah indikator keberhasilan suatu kegiatan yang berisi data dan informasi tentang gizi yang berharga dan bernilai bila menggunakanmetode yang tepat dan benar agar semua hasil kegiatan Puskesmas,khususnya program gizi (di dalamdan di luargedung)dapat dicatat serta dilaporkan ke jenjang selanjutnyasesuai dengan kebutuhan secara benar, berkala, danteratur guna menunjang pengelolaan upaya kesehatanmasyarakat. Persentase Balita stunting dari tahun 2019-2013 terus menurun, dimana tahun 2019 persentase Balita Stunting adalah 25,50% menjadi 13,49 % pada Tahun 2023, adapun gambaran cakupan Balita Stunting tingkat Kabupaten/Kota tahun 2023 dan Tingkat Provinsi tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel dan Grafik dibawah ini:

Grafik 3.

Cakupan Balita Stunting Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023
(E-PPBGM)



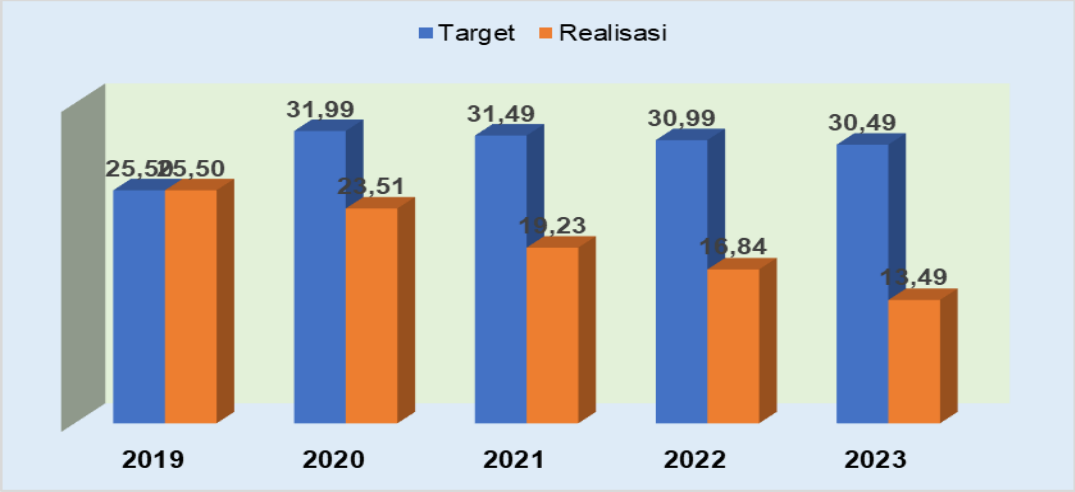
Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tabel 3.
Persentase Balita Stunting Kabupaten/Kota Tahun 2019-2023
Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Kabupaten/Kota	Persentase Balita Stunting Tahun 2019-2023				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Lombok Barat	11,45	31,11	22,71	18,98	12,38
2.	Lombok Tengah	30,11	27,90	23,03	20,81	13,34
3.	Lombok Timur	29,05	22,38	18,13	16,98	16,18
4.	Sumbawa	16,6	11,82	8,39	8,11	8,47
5.	Dompu	29,85	23,88	14,30	13,00	10,89
6.	KAB BIMA	14,9	22,79	18,20	13,88	11,78
7.	Sumbawa Barat	23,31	19,27	14,45	8,78	7,64
8.	Lombok Utara	32,78	39,98	28,31	22,94	18,03
9.	Kota Mataram	33,65	25,81	19,64	17,08	14,76
10.	Kota Bima	8,89	17,06	17,56	13,70	12,39
Provinsi NTB		**25,50**	**23,51**	**19,23**	**16,84**	**13,49**

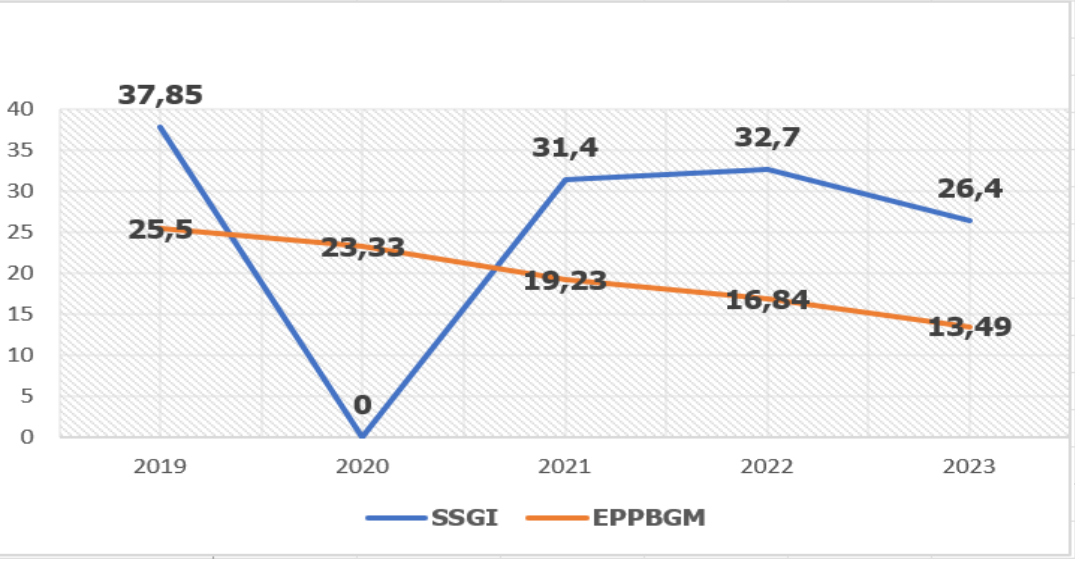
Sumber Data Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Grafik 3.
Target dan Realisasi Penurunan Persentase Balita Stunting
Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023



Sumber Data Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Grafik.
Perbandingan Hasil Perhitungan Balita Stunting
SSGI/SKI dan EPPGBM Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2019-2023



Sumber Data :Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sumber Data Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

data diatas memberikan gambaran bahwa persentase balita stunting dengan SSGI lebih tinggi dari EPPBGM, metode yang digunakan untuk melakukan identfikasi terhadap persentase balita stunting berbeda, SSGI dengan metode Survei dengan mengambil sampel di 10 Kabupaten Kota di Provinsi Nusa Tenngara Barat, sedangkan EPPBGM menggunakan data pelayanan posyandu, dimana jumlah balita yang masuk krietria stunting setelah dilakukan pengukuran dibagi jumla Balita dilakukan pengukuran.

Tabel 3. Persentase Balita Stunting per Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023

No	Kabupaten/Kota	Persentase Balita Stunting Tahun 2019-2023				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Lombok Barat	11,45	31,11	22,71	18,98	12,38
2.	Lombok Tengah	30,11	27,90	23,03	20,81	13,34
3.	Lombok Timur	29,05	22,38	18,13	16,98	16,18
4.	Sumbawa	16,6	11,82	8,39	8,11	8,47
5.	Dompu	29,85	23,88	14,30	13,00	10,89
6.	KAB BIMA	14,9	22,79	18,20	13,88	11,78
7.	Sumbawa Barat	23,31	19,27	14,45	8,78	7,64
8.	Lombok Utara	32,78	39,98	28,31	22,94	18,03
9.	Kota Mataram	33,65	25,81	19,64	17,08	14,76
10.	Kota Bima	8,89	17,06	17,56	13,70	12,39
Provinsi NTB		**25,50**	**23,51**	**19,23**	**16,84**	**13,49**

Sumber Data Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

2. Meningkatkan jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin

Indikator Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 mengalami penurunan cakupan dibandingkan dengan cakupan tahun 2019, namun pada tahun 2021 sampai tahun 2023 cakupan kepesertaan JKN terus mengalami peningkatan, sehingga tahun 2023 Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mencapai Universal Helath Coverage (UHC) dengan cakupan 97,31%, dimana kriteria UHC ketika cakupan sudah mencapai 95%. Cakupan kepesertaan JKN tingkat Nasional

tahun 2023 adalah 95,75% berdasarkan cakupan tersebut cakupan kepesertaan JKN Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melampaui cakupan JKN nasional, adapun gambaran cakupan UHC Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel
Cakupan Kepsertaan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Barat

UHC (UNIVERSAL HEALTH COVERAGE)

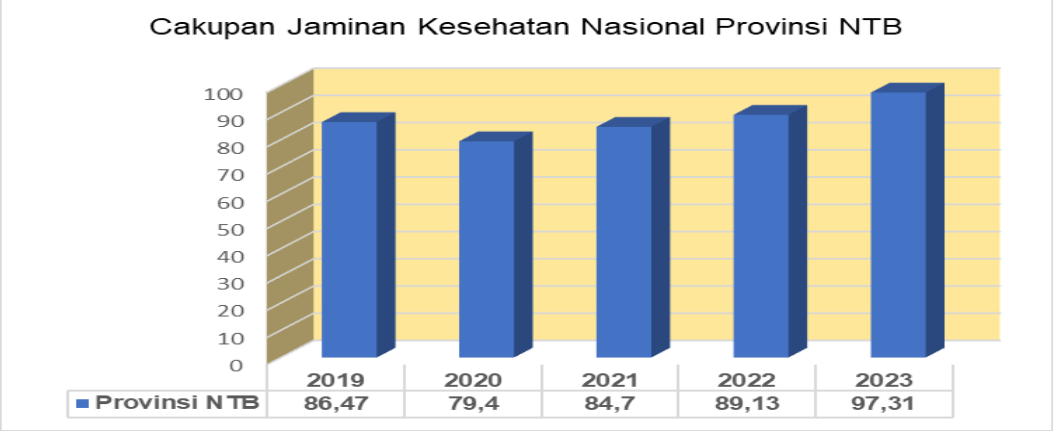
- Provinsi NTB telah mencapai (UHC) per 1 Januari 2023, dengan Capaian UHC sebesar 97,31%
- Cakupan kepesertaan program JKN KIS sampai dengan 1 Januari 2024 sebanyak 5.426.994 (97,31%) dari total penduduk NTB 5.576.992 jiwa

CAKUPAN PESERTA JKN PROV. NTB S.D 1 JANUARI 2024

NO	KAB./KOTA	Jumlah Penduduk (SMT I 20223	Segmen Peserta						Cakupan Peserta UHC	%	Keterangan
			PBI APBN	PBI APBD	PPU BU	PPU PN	PBPU	BP			
1	KAB. LOMBOK BARAT	737,647	448,558	74,643	66,032	51,238	53,680	7,153	701,304	95.07	SUDAH UHC
2	KAB. LOMBOK UTARA	262,419	190,782	33,964	14,447	16,103	3,287	1,278	259,861	99.03	SUDAH UHC
3	KOTA MATARAM	452,812	163,312	70,009	75,522	69,916	46,927	18,391	444,077	98.07	SUDAH UHC
4	KAB. LOMBOK TENGAH	1,091,564	677,737	170,633	77,340	67,826	45,236	10,832	1,049,604	96.16	SUDAH UHC
5	KAB. LOMBOK TIMUR	1,404,343	955,874	137,096	92,430	77,949	59,400	13,887	1,336,636	95.18	SUDAH UHC
6	KAB. BIMA	535,631	345,134	77,948	25,530	41,931	32,305	8,506	531,354	99.20	SUDAH UHC
7	KAB. DOMPU	262,933	150,385	51,355	12,071	24,992	13,935	6,213	258,951	98.49	SUDAH UHC
8	KAB. SUMBAWA BARAT	148,585	75,788	31,483	23,059	16,273	2,639	1,418	150,660	101.40	SUDAH UHC
9	KAB. SUMBAWA	521,861	282,608	115,292	33,943	48,195	37,458	8,413	525,909	100.78	SUDAH UHC
10	KOTA BIMA	159,197	79,699	32,924	14,304	27,567	7,132	7,012	168,638	105.93	SUDAH UHC
NTB		5,576,992	3,369,877	795,347	434,678	441,990	301,999	83,103	5,426,994	97.31	

Sumber - Jumlah Penduduk Nasional: Data Dukcapil semester I tahun 2023
- Jumlah Peserta JKN KIS: Data Peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan
- *Dashboard BPJS*

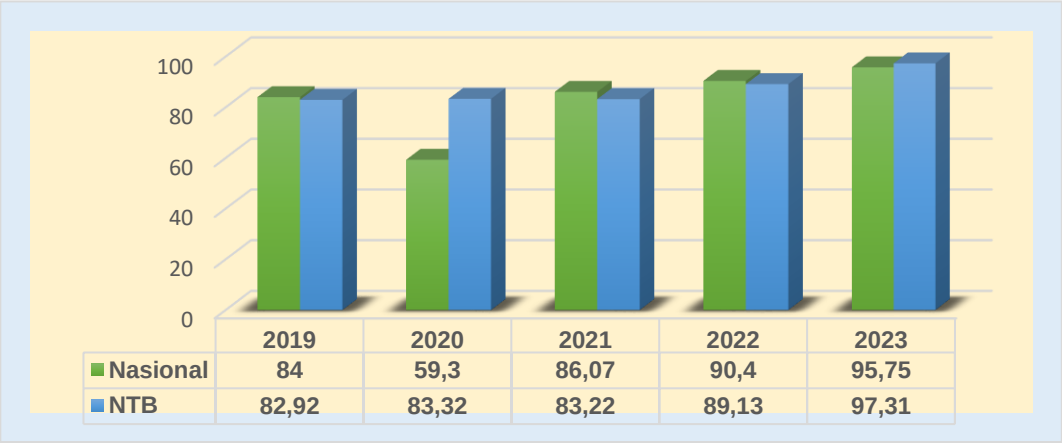
Grafik 3
Cakupan Jaminan Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2019-2023



Grafik 3

Perbandingan Cakupan Kepsertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Provinsi Nusa Tenggara Nasional Tahun 2019-2023



	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	84	59,3	86,07	90,4	95,75
NTB	82,92	83,32	83,22	89,13	97,31

Sumber : BPJS

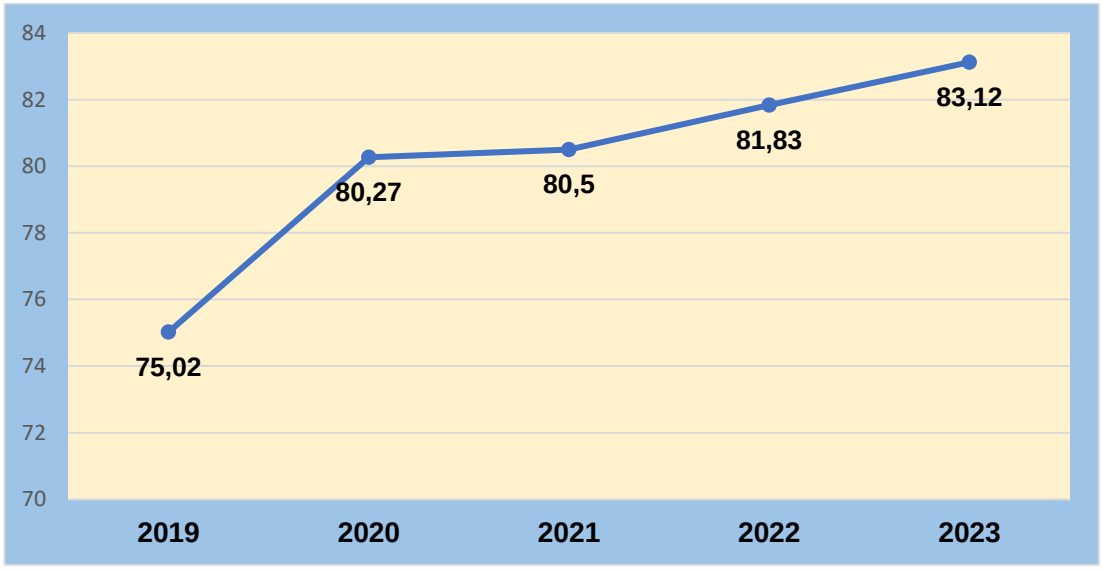
3. Meningkatkan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi penduduk miskin

Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak merupakan indikator kinerja dalam peningkatan pemenuhan pelayanan dasar bagi penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat, cakupan rumah tangga debngan akses sanitasi layak sejak tahun awal periode Renstra Tahun 2019-2023 terus mengalami peningkatan kinerja dari 75,02% di tahun 2019 telah mencapai 83,12% di tahun 2023

Grafik 3

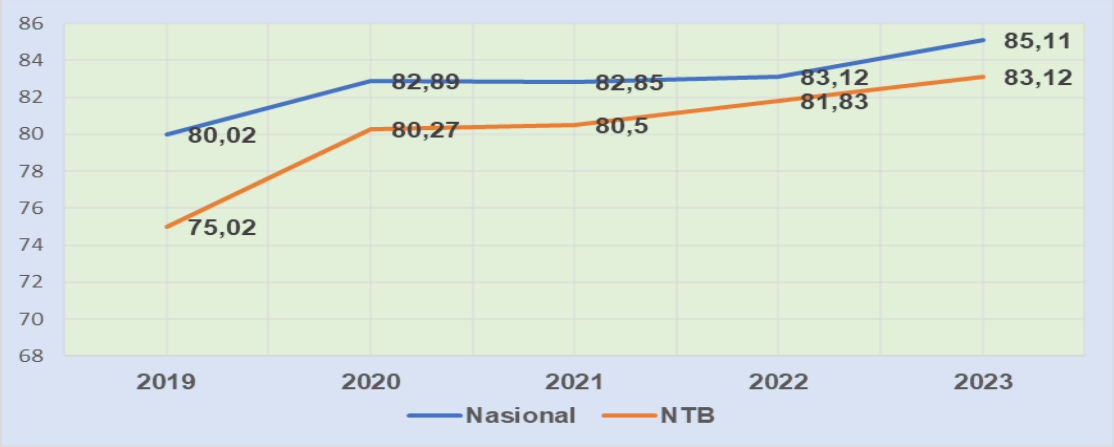
Cakupan Akses Sanitasi Layak

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023



Sumber Data Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Grafik 3
Perbandingan Cakupan Akses Sanitasi Layak
Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber Data BPS

Cakupan Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023 83,12%, capaian ini masih berada dibawah capaian sanitasi layak nasional yang telah mencapai 85,11% di tahun 2023.

1. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Periode Renstra Tahun 2019-2023

Tabel 3. Perbandingan Capaian Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Periode

No	Uraian Tujuan/ Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Akhir Periode	Capaian Kinerja Tahun 2023			
					Target	Realisasi	Kinerja (%)	Kriteria
1	Meningkatkan kesehatan Keluarga, Gizi dan kesehatan Masyarakat		Angka Harapan Hidup	67,48	67,48	72,02	106.73	Sangat Tinggi
	1	Meningkatnya kesehatan derajat masyarakat	Angka Kematian Ibu	81	81	102.51	85.62	Tinggi
			Angka Kematian Bayi	7	7	8,36	92.14	Tinggi
	2	Meningkatnya kesehatan derajat masyarakat	Persentase Balita Stunting	16	16	13,49	145.66	Sangat Tinggi
2	Meningkatkan Jaminan kesehatan bagi penduduk miskin		Persentase Peserta JKN yang dapat	100	100	100	100	Sangat Tinggi

No	Uraian Tujuan/ Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Akhir Periode	Capaian Kinerja Tahun 2023			
					Target	Realisasi	Kinerja (%)	Kriteria
			mengakses pelayanan Kesehatan					
	1	Terwujudnya Universal Health Coverage (UHC)	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional	83	83	97,31	108.12	Sangat Tinggi
3	Meningkatkan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi penduduk miskin		Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	82,46	82,46	83,12	100,80	Sangat Tinggi
		Terwujudnya peningkatan Kepala Keluarga dengan akses sanitasi layak	Proporsi kepala keluarga dengan akses sanitasi layak	82,46	82,46	83,12	100,80	Sangat Tinggi

Sumber Data: Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun 2023 merupakan tahun akhir periode Renstra 2019-2023, capaian tahun 2023 dari 8 indikator kinerja terdapat 2 indikator kinerja yang tidak mencapai target yaitu indikator AKI dan AKB yang capain kinerjanya hanya mencapai 85,62% untuk AKI dan 92,14 untuk AKB

2. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2023 Terhadap Capaian Nasional

No	Uraian Tujuan/ Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2023			Kriteria Capaian	Kinerja Nasional
				Target	Realisasi	Kinerja (%)		Realisasi
1	Meningkatkan kesehatan Keluarga, Gizi dan kesehatan Masyarakat		Angka Harapan Hidup	67,48	72,02	106.73	Sangat Tinggi	73,93
	1	Menguatnya upayan pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	81	102.51	85.62	Tinggi	207 (Th.2022)
			Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH)	7	7,55	92.14	Tinggi	16,9 (Th.2022)

No	Uraian Tujuan/ Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2023			Kriteria Capaian	Kinerja Nasional
				Target	Realisasi	Kinerja (%)		Realisasi
	2	Meningkatnya kesehatan derajat masyarakat	Persentase Balita Stunting (%)	16	13,49	145.66	Sangat Tinggi	21,6
2	Meningkatkan Jaminan kesehatan bagi penduduk miskin		Cakupan Penduduk miskin yang mendapatkan jaminan Kesehatan	100	100	100	Sangat Tinggi	-
	1	Terwujudnya Universal Health Coverage (UHC)	Cakupan kepesertaa jaminan Kesehatan Nasional	83	97,31	108.12	Sangat Tinggi	95,75
3	Meningkatkan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi penduduk miskin		Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	82.46	83.12	100,80	Sangat Tinggi	85,11
		Terwujudnya peningkatan Kepala Keluarga dengan akses sanitasi layak	Proporsi kepala keluarga dengan akses sanitasi layak	82.46	83.12	100,80	Sangat Tinggi	

Berdasarkan capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi diatas indikator yang telah melampaui capaian target Nasional hanya 2 indikator yaitu inidikator Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan realisasi 97,31% sedangkan cakupan Nasional baru mencapai 95,75% dan indikator persentase Balita Stunting dengan realisasi 13, 49% tingkat Nasional 21,6%, namun perbandingan ini belum mewakili kondisi seharusnya, capaian persentase Balita Stunting NTB menggunakan data dari hasil EPPGBM sedangkan Nasional menggunakan data hasil SSGI, sehingga capain indikator ini seharusnya tidak dapat dibandingkan karena menggunakan sumber data yang berda. Untuk indikator Angka Harapan Hidup (AHH), AKI per 100.000 KH, AKB per 1.000 KH, Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak masih berada dibawah capaian Nasional, sehingga indikator yang belum tercapai ini masih harus diperjuangkan dalam perencanaan pembangunan daerah pada periode selanjutnya., adapun gambaran perbandingan capaian indikator Provinsi Nusa Tenggara Barat

terhadap capaian nasional untuk masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel dan Grafik dibawah ini:

Tabel.2 Program Dan Anggaran Penunjang Pencapaian Indikator Kinerja Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 202

Tujuan		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan, Indikator Sasaran Strategis	Satuan Target Kinerja	KINERJA			Program Penunjang Penganggaran (SIPD)	ANGGARAN		
					Target	Realisasi	Capaian		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1. Meningkatkan Derajat kesehatan Status Gizi Masyarakat			Angka Harapan Hidup	Tahun	67,08	67,07	100%	4 Program Teknis dan 1 Program Penunjang:	**49.125.447.454**	**39.965.807.787**	**81,35%**
	1	Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat	1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi	Per 100.000 KH Per 1.000 KH	84.00 8,00	85,3 7,92	98% 89%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	20.390.954.193	14.059.200.878	68,95
								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	109.853.700	108.111.900	98,41
								Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	30.500.000	25.440.000	83,41
								Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Provinsi	28.594.139.561	25.773.055.009	90,13
	2	Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat	Persentase Balita Stunting	%	30,99	16,99	144%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.943.749.588	1.730.622.360	89,04

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan, Indikator Sasaran Strategis	Satuan Target Kinerja	KINERJA			Program Penunjang Penganggaran (SIPD)	ANGGARAN		
				Target	Realisasi	Capaian		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
							Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	350.000.000	333.954.050	95,42
2. Meningkatkan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin		Cakupan Penduduk miskin yang mendapatkan jaminan Kesehatan	%	100	100	100	1 Program Teknis:	**89.619.640.147**	**89.491.510.247**	**99,86**
	Meningkatnya Jaminan kesehatan bagi penduduk miskin	Persentase Peserta JKN yang dapat mengakses pelayanan Kesehatan	%	100	100	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89.619.640.147	89.491.510.247	99,86
3. Meningkatkan cakupan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi penduduk miskin		Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	80,91	81,83	101	1 Program Teknis:	**6.737.276.000**	**6.380.676.000**	**94,71**
	Meningkatnya Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak	Presentase Desa/Kel Stop Buang Air Besar sembarangan	%	81,79	100	122	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	6.737.276.000	6.380.676.000	94,71

Tabel 2 Kendala dan Strategi Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka pencapaian Kinerja

TUJUAN/ SASARAN/ INDIKATOR KINERJA			KENDALA DAN STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN PENUNJANG INDIKATOR KINERJA
Meningkatkan derajat Kesehatan dan Gizi Maysyarakat			
	Angka Harapan Hidup		
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat		
	1.	Angka Kematian Ibu	**Kendala Pelaksanaan:** Cakupan tenaga kesehatan dengan komptensi teknis kebidanan masih rendah seperti USG obstetri terbatas, Pelatihan ANC terstandar
			Strategi Tahun 2023: 1. Melakukan pemetaan terhadap masalah pelayanan kesehatan Ibu hamil dan ibu bersalin dan kematian ibu pada kabupaten/kota samapai ke tingkat desa 2. Menyusun draft revisi SK Gubernur tentang Tim AMPSR tahun 2022 dan melakukan optimalisasi konvergensi dan sinergisitas dalam tim serta penguatan seluruh kegiatan yang melekat pada bidang dan seksi OPD terkait yang berbaiktan dengan upaya penurunan kematian ibu. 3. Upaya peningkatan kapasitas petugas yang bertugas dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dalam mencegah kesakitan, kematian ibu hamil, melahirkan dan nifas seperti pelatihan ANC terstandar, gawat darurat maternal dan neonatal, pelatihan PONED dll. 4. Upaya pemenuhan Sarana, prasarana dan alat kesehatan terkait Kesehatan ibu seperti pangadaan USG di Puskesmas

TUJUAN/ SASARAN/ INDIKATOR KINERJA			KENDALA DAN STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN PENUNJANG INDIKATOR KINERJA
			5. Upaya peningkatan monitoring dan evaluasi terpadu bersama lintas program dan lintas sektor secara berkala terkait kematian ibu, pencatatan dan pelaporan dalam rangka identifikasi permasalahan dan memetapkan rencana tindak lanjut 6. Upaya pembentukan POKJA/jejaring sebagai upaya percepatan penurunan kematian ibu
		Angka Kematian Bayi	**Kendala Pelaksanaan:** 1. Cakupan tenaga kesehatan dengan kompetensi teknis pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir dan balita masih rendah 2. Peran Puskesmas PONED belum optimal 3. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor terkait Keshatan reproduksi bagi Calon pengantin 4. Belum optimalnya pengeuatan sistem rujukan kasus 5. Belum terbentuknya Komite AMP-SR ditingkat Kabupaten/Kota 6. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor, Monitoring dan Evaluasi bersama Kab/kota 7. Belum optimalnya verfikasi serta analisis data bulanan di Kab/Kota
			Strategi Pelaksanaan Tahun 2023 1. Peningkatan kapasitas Tenaga Kesehatan (Pelatihan ANC dan USG bagi Dokter di FKTP, Pelatihan Bidan terkait ANC, pesalinan, nifas dan SHK serta pelatihan Pelayanan kontrasepsi bagi Bidan). 2. Monitoring dan Evaluasi berkala ke Kab/kota terkait pelaksanaan ANC dengan pelayanan USG di FKTP, standarisasi ANC, pesalinan, nifas, SHK, pelayanan kontrasepsi dan penguatan peran jejaring dalam penurunan Kematian Ibu dan Bayi serta pemantauan aplikasi MPDN dan validasi Kab/Kota

TUJUAN/ SASARAN/ INDIKATOR KINERJA			KENDALA DAN STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN PENUNJANG INDIKATOR KINERJA
			3. Penguatan dan koordinasi dengan Kab/Kota untuk ketersediaan SOP semua Tindakan Maternal dan Neonatal, penguatan sistem rujukan kasus dan sosialisasi di Fasyankes untuk kewajiban melakukan pelaporan kematian dalam aplikasi MPDN 4. Pembinaan layanan dan program KIA di semua Kab/Kota terutama lokus. 5. Fasilitasi implementasi dan penguatan PONED di Kab/Kota 6. Penguatan kerjasama lintas sektoral dalam pelayanan kespro catin 7. Pemantauan dan verifikasi serta analisis data bulanan dari Kab/Kota 8. Pertemuan pakar dan evaluasi penanganan kasus kematian di tingkat Provinsi
2.	Meningkatnya Status gizi masyarakat		
		Persentase Balita Stunting	**Kendala Pelaksanaan** **Strategi Tahun 2023:** 1. Meingkatkan koordinasi ke Kabupaten/Kota secara berkala terkait hasil pematauan pertumbuhan 2. Melakukan koordinasi dengan Dinas pendidikan dan ksebudayaan serta Organisasi kewanitaan Pemerintah Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka intervensi langsung dengan memberikan protein hewani kepada sasaran. 3. Melakukan Evaluasi dan Monitoring indikator spesifik penurunan stunting 4. Memberikan edukasi kepada keluarga yang memiliki risiko stunting di pelayanan posyandu 5. Peningkatan kapasitas nakes (pelatihan konsleing ASI, Gizi Buruk dan PMBA) 6. Meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui AKSI Bergizi dan Germas pada remaja dan Ibu hamil 7. Pemberian Makanan tambahan (PMT) pabrikan dan lokal pada balita kurus dan ibu hamil KEK

TUJUAN/ SASARAN/ INDIKATOR KINERJA			KENDALA DAN STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN PENUNJANG INDIKATOR KINERJA
			8. Penyusunan Road Map penurunan stunting 9. Pemenuhan sarana dan prasarana posyandu keluarga (posyandu keluarga kit/Anthropometri) 10. Pemanfaatn data status gizi (stunting) by name by address oleh lintas program dan lintas sektor
Meningkatkan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin			
	1.	Cakupan Penduduk miskin yang mendapatkan jaminan Kesehatan	Kendala Pelaksanaan: Perubahan mekanisme pembayaran Iuran PBPU/BP yang memerlukan Koordinasi dengan pemangku kebijakan Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga memrlukan waktu yang lebih lama untuk menyusun regulasi terkair perjanjian kerjasam dengan Kabupaten/Kota **Strategi Tahun 2023:** 1. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program di tingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten/Kota 2. Melakukan Advokasi ke Pemrintah Daerah Kabupaten/Kota 3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi program JKN ke Kabupaten/Kota
		Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	**Kendala Pelaksanaan** Perubahan mekanisme pembayaran Iuran PBPU/BP yang memerlukan Koordinasi dengan pemangku kebijakan Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga memrlukan waktu yang lebih lama untuk menyusun regulasi terkair perjanjian kerjasam dengan Kabupaten/Kota **Strategi Tahun 2023:** 1. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program di tingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten/Kota 2. Melakukan Advokasi ke Pemrintah Daerah Kabupaten/Kota

TUJUAN/ SASARAN/ INDIKATOR KINERJA			KENDALA DAN STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN PENUNJANG INDIKATOR KINERJA
			3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi program JKN ke Kabupaten/Kota
Meningkatkan cakupan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi penduduk miskin			
	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak		**Strategi Tahun 2023:** 1. Pengkawalan melalui Monitoring terhadap pemahaman masyarakat akan pentingnya BABs 2. Penguatan pemahaman masyarakat, Lintas Sektor dan POKJA PPAS di Provinsi dan Kabupaten Kota 3. Peningkatan Kualitas sarana sanitasi jamban sehat menuju sanitasi Layak melalui perubahan perilaku untuk mengurangi akses sharing 4. Advokasi kepada OPD terkait sanitasi lebih kuat untuk menigkatkan kualitas sarana dan Sanitasi aman 5. Lebih mengukuhkan komitmen POKJA Sanitasi dan memperkuat peran para OPD anggota POKJA PPAS.

Tabel 2 Peran serta Lintas Sektor dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka pencapaian Kinerja

INDIKATOR	LINTAS SEKTOR/ LINTAS PROGRAM	PERAN SERTA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN
Angka Kematian Ibu	Kementerian Kesehatan	1. Mengeluarkan kebijakan terkait pemenuhan alat kesehatan (USG) terkait kebutuhan pelayanan ibu hamil melalui penganggaran DAK Fisik tahun 2022 2. Memfasilitasi pelatihan teknis sesuai standar bagi tenaga kesehatan

INDIKATOR	LINTAS SEKTOR/ LINTAS PROGRAM	PERAN SERTA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN
	Dinas PMD	Dinas Pemerintah Desa sangat membantu dalam advokasi penganggaran dana desa untuk peningkatan kesehatan ibu seperti pemberian makanan tambahan di posyandu untuk ibu hamil, pembayaran insentif tenaga kesehatan dan kader posyandu, pelaksanaan kelas ibu hamil dan pelatihan KIA menggunakan dana desa
	Dinas Sosial	Dinas Sosial juga sangat berperan dalam hal pembiayaan kesehatan ibu hamil, bantuan bagi ibu hamil miskin dengan program PKH dll.
	Bapeeda	Membantu dalam proses pendistribusian anggaran teekait prioritas daerah
Angka Kematian Bayi	BKKBN	Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan (Pelatihan ANC dan USG bagi Dokter di FKTP, Pelatihan Bidan terkait ANC, pesalinan, nifas dan SHK serta pelatihan Pelayanan kontrasepsi bagi Bidan),
	Kementerian Kesehatan	berupa peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan di Puskesmas untuk tatalaksana balita sakit melalui MTBS terpadu gizi buruk, SDIDTK terpadu atau terintegrasi dengan PMBA
	UNICEF	Memfasilitasi peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui Orientasi AMP-SR di beberapa kabupaten dengan lokus kematian ibu dan anak tertinggi
	Bappeda	Membantu dalam proses pendistribusian anggaran terkait prioritas daerah

INDIKATOR	LINTAS SEKTOR/ LINTAS PROGRAM	PERAN SERTA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN
Persentase Balita Stunting	Kementerian Kesehatan	berupa peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan di Puskesmas untuk tatalaksana balita sakit melalui MTBS terpadu gizi buruk, SDIDTK terpadu atau terintegrasi dengan PMBA
	DPMPD	Penguatan Posyandu Keluarga
	BKKBN	Pendampingan Keluarga yang memiliki Risiko Stunting
	DIKBUD	Bhakti Stunting (intervensi telur)
	Pita Putih Indonesia	Pendampingan temaja putri dalam minum Tablet Tambah Darah (TTD)
	Bappeda	Membantu dalam proses pendistribusian anggaran terkait prioritas daerah
Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan Sosial dan Kesehatan	Dinas Sosial	1. Memfasilitasi dalam mendapatkan jumlah penduduk yang masuk dalam kriteria penduduk miskin 2. Penyediaan pembiayaan kesehatan ibu hamil, bantuan bagi ibu hamil miskin dengan program PKH
	Kementerian Kesehatan	Penyediaan premi untuk pembayaran JKN untuk sebagian penduduk miskin Provinsi Nusa Tenggara Barat

INDIKATOR	LINTAS SEKTOR/ LINTAS PROGRAM	PERAN SERTA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan premi untuk pembayaran JKN untuk sebagian penduduk miskin yang berada dalam wilayah masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat
	Bappenda	Membantu dalam proses pendistribusian anggaran terkait prioritas daerah
- Proporsi Rumah Tangga Sanitasi layak dan - Indikator Cakupan Desa Open Defecation Free (ODF)	Bappeda	1. Melaksanaan Koordinasi membantu menyelesaikan fisik sanitasi dari Desa sampai Dinas terkait di Kabupaten Kota dan Provinsi melalui Pokja Sanitasi baik Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), Pokja Sanitasi Permukiman (PKP), Pokja PPAS (Perumahan Permukiman wilayah Air Minum dan sanitasi 2. Membantu dalam proses pendistribusian anggaran terkait prioritas daerah
	NGO	Melakukan pendampingan dalam pelaksanakan program WASH (water and Hiegine sanitation)
	BAZNAS	Membantu menyelesaikan fisik sanitasi sesuai dengan Mustahiq atau yang berhak menerima
	Kader	Menggerakan masyarakat untuk mau merubah perilaku buang air besar dengan memanfaatkan jamban serta melakukan pemantauan secara langsung terhadap perilaku masyarakat terhadap pemanfaatan sanitasi layak di masing-masing Desa

Berdasarkan perbandingan antara realisasi target kinerja indikator pada tujuan pertama yaitu meningkatkan derajat Kesehatan dan status Gizi Masyarakat dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH) pertama yang tercapai 100% dengan Realisasi anggaran yang hanya mencapai 86,38% dapat diketahui tingkat efisiensi anggaran 13,62%, adapun perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran tidak bisa serta merta menunjukkan tingkat efisiensi yang sesungguhnya, karena masing-masing indikator bisa jadi dibiayai oleh anggaran lain yang tidak diperhitungkan secara langsung dalam anggaran APBD Kabupaten Sumbawa, misalnya yang bersumber dari Dana Pusat maupun APBD Provinsi ataupun peran serta pihak ketiga dalam bentuk Barang dan Jasa ataupun anggaran.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Dan Realiassi Anggaran Belanja Langsung
Dinas Kesehatan Provinsi Tahun 2023

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rekening Belanja	APBD Perubahan	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	% Keuangan	% Fisik	Penanggung Jawab
	DIKES + BLKPK	153.938.244.310	134.606.265.205	19.332.979.105	87,44	87,44	
	DINAS KESEHATAN PROV NTB	133.058.260.477	123.731.207.934	9.327.052.543	92,99	91,05	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.170.602.758	23.591.735.997	2.578.866.761	90,15	90,15	
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	908.304.572	681.269.564	227.035.008	75,00	75,00	Sekretariat
1.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	307.949.542	230.980.064	76.969.478	75,01	75,01	Sekretariat
1.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	21.285.000	15.993.000	5.292.000	75,14	75,14	program
1.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.735.000	12.572.000	163.000	98,72	98,72	Program
1.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.653.800	12.436.500	217.300	98,28	98,28	Program
1.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	19.370.000	19.290.000	80.000	99,59	99,59	Program
1.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.085.000	21.861.000	1.224.000	94,70	94,70	Program
1.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	511.226.230	368.137.000	143.089.230	72,01	72,01	Program

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rekening Belanja	APBD Perubahan	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	% Keuangan	% Fisik	Penanggung Jawab
	DIKES + BLKPK	153.938.244.310	134.606.265.205	19.332.979.105	87,44	87,44	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.905.239.215	18.414.644.249	1.490.594.966	92,51	92,51	
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.499.440.156	18.022.103.109	1.477.337.047	92,42	92,42	Keuangan
1.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	398.174.259	385.080.140	13.094.119	96,71	96,71	Umum
1.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.624.800	7.461.000	163.800	97,85	97,85	Keuangan
1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	79.041.700	77.610.960	1.430.740	98,19	98,19	Keuangan
1.02.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	79.041.700	77.610.960	1.430.740	98,19	98,19	Keuangan
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.295.119.677	955.445.053	339.674.624	73,77	73,77	Umum
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	43.521.000	43.502.600	18.400	99,96	99,96	Umum
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	817.718.963	644.159.700	173.559.263	78,78	78,78	Umum
1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.393.000	44.720.000	17.673.000	71,67	71,67	Umum
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	201.863.514	68.614.500	133.249.014	33,99	33,99	Umum
1.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.879.200	6.660.000	1.219.200	84,53	84,53	Umum

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rekening Belanja	APBD Perubahan	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	% Keuangan	% Fisik	Penanggung Jawab
	DIKES + BLKPK	**153.938.244.310**	**134.606.265.205**	**19.332.979.105**	**87,44**	**87,44**	
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161.744.000	147.788.253	13.955.747	91,37	91,37	Umum
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.200.000	59.000.000	5.200.000	91,90	91,90	
1.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	64.200.000	59.000.000	5.200.000	91,90	91,90	Umum
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.927.316.594	2.841.066.933	86.249.661	97,05	97,05	Umum
1.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.149.000	1.751.000	3.398.000	34,01	34,01	Umum
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	734.620.521	700.066.934	34.553.587	95,30	95,30	Umum
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.187.547.073	2.139.248.999	48.298.074	97,79	97,79	Umum
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	991.381.000	562.699.238	428.681.762	56,76	56,76	Umum
1.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	194.422.667	192.904.238	1.518.429	99,22	99,22	Umum
1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.958.333	40.295.000	6.663.333	85,81	85,81	Umum
1.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	750.000.000	329.500.000	420.500.000	43,93	43,93	Umum

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rekening Belanja	APBD Perubahan	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	% Keuangan	% Fisik	Penanggung Jawab
	DIKES + BLKPK	**153.938.244.310**	**134.606.265.205**	**19.332.979.105**	**87,44**	**87,44**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**104.413.855.986**	**97.969.540.854**	**6.444.315.132**	**93,83**	**93,83**	
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**9.531.181.390**	**8.959.823.419**	**571.357.971**	**94,01**	**94,01**	
1.02.02.1.01.21	**Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya**	**463.294.000**	**364.706.250**	**98.587.750**	**78,72**	**78,72**	**Farmasi**
1.02.02.1.01.22	**Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya**	**9.067.887.390**	**8.595.117.169**	**472.770.221**	**94,79**	**94,79**	**Farmasi**
1.02.02.1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**94.293.703.952**	**88.457.899.005**	**5.835.804.947**	**93,81**	**93,81**	
1.02.02.1.02.01	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana**	**6.584.218.000**	**3.412.794.940**	**3.171.423.060**	**51,83**	**51,83**	**SIK**
1.02.02.1.02.02	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)**	**1.955.349.964**	**1.054.310.857**	**901.039.107**	**53,92**	**53,92**	**SIK**
1.02.02.1.02.03	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak**	**615.000.000**	**599.609.000**	**15.391.000**	**97,50**	**97,50**	**Kesga**

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rekening Belanja	APBD Perubahan	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	% Keuangan	% Fisik	Penanggung Jawab
	DIKES + BLKPK	**153.938.244.310**	**134.606.265.205**	**19.332.979.105**	**87,44**	**87,44**	
1.02.02.1.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	111.000.000	34.739.600	76.260.400	31,30	31,30	Kesga
1.02.02.1.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	189.000.000	175.929.200	13.070.800	93,08	93,08	Kesga
1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	456.052.900	427.168.000	28.884.900	93,67	93,67	Gizi
1.02.02.1.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	320.400.000	129.560.400	190.839.600	40,44	40,44	Kesjaor
1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.243.275.700	7.776.605.838	466.669.862	94,34	94,34	Kesling
1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100.000.000	100.000.000	-	100,00	100,00	Promkes
1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	522.956.600	403.423.448	119.533.152	77,14	77,14	P2PMZ
1.02.02.1.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	50.316.100	39.645.000	10.671.100	78,79	78,79	P2PMZ
1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	291.852.900	231.381.500	60.471.400	79,28	79,28	P2PTM, Keswa dan Napza
1.02.02.1.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	155.319.500	38.650.000	116.669.500	24,88	24,88	P2PTM, Keswa dan Napza
1.02.02.1.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	4.050.000.000	4.021.025.000	28.975.000	99,28	99,28	Rujukan
1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	68.960.462.236	68.948.440.436	12.021.800	99,98	99,98	JKN
1.02.02.1.02.17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	317.500.000	148.395.000	169.105.000	46,74	46,74	SIK

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rekening Belanja	APBD Perubahan	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	% Keuangan	% Fisik	Penanggung Jawab
	DIKES + BLKPK	**153.938.244.310**	**134.606.265.205**	**19.332.979.105**	**87,44**	**87,44**	
1.02.02.1.02.18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	100.000.000	71.840.000	28.160.000	71,84	71,84	Program
1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	640.512.500	556.317.786	84.194.714	86,86	86,86	Kestrad, Rujukan, Farmasi
1.02.02.1.02.20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	64.059.500	58.439.000	5.620.500	91,23	91,23	Kestrad
1.02.02.1.02.21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	80.000.000	72.420.000	7.580.000	90,53	90,53	SIK
1.02.02.1.02.23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	72.000.000	60.320.000	11.680.000	83,78	83,78	Rujukan
1.02.02.1.02.24	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	54.716.500	46.746.400	7.970.100	85,43	85,43	Rujukan
1.02.02.1.02.25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	9.712.152	4.150.000	5.562.152	42,73	42,73	Rujukan
1.02.02.1.02.26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	349.999.400	45.987.600	304.011.800	13,14	13,14	SIK
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	387.571.089	359.054.640	28.516.449	92,64	92,64	
1.02.02.1.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	370.071.089	341.554.640	28.516.449	92,29	92,29	Datin

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rekening Belanja	APBD Perubahan	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	% Keuangan	% Fisik	Penanggung Jawab
	DIKES + BLKPK	**153.938.244.310**	**134.606.265.205**	**19.332.979.105**	**87,44**	**87,44**	
1.02.02.1.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	17.500.000	17.500.000	-	100,00	100,00	Datin
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	201.399.555	192.763.790	8.635.765	95,71	95,71	
1.02.02.1.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	109.126.655	101.773.790	7.352.865	93,26	93,26	Rujukan
1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	92.272.900	90.990.000	1.282.900	98,61	98,61	JKN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.109.995.376	1.839.170.883	270.824.493	87,16	87,16	
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	89.943.700	51.505.699	38.438.001	57,26	57,26	
1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	29.983.700	26.355.699	3.628.001	87,90	87,90	PSDMK
1.02.03.1.01.02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	59.960.000	25.150.000	34.810.000	41,94	41,94	PSDMK
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	2.020.051.676	1.787.665.184	232.386.492	88,50	88,50	
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.928.071.676	1.750.745.184	177.326.492	90,80	90,80	PSDMK, Kesmas

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rekening Belanja	APBD Perubahan	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	% Keuangan	% Fisik	Penanggung Jawab
	DIKES + BLKPK	**153.938.244.310**	**134.606.265.205**	**19.332.979.105**	**87,44**	**87,44**	
1.02.03.1.02.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	91.980.000	36.920.000	55.060.000	40,14	40,14	PSDMK
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**100.229.387**	**94.902.800**	**5.326.587**	**94,69**	**94,69**	
1.02.04.1.01	**Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)**	**96.200.887**	**91.812.800**	**4.388.087**	**95,44**	**95,44**	
1.02.04.1.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	96.200.887	91.812.800	4.388.087	95,44	95,44	Farmasi
1.02.04.1.02	**Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)**	**4.028.500**	**3.090.000**	**938.500**	**76,70**	**76,70**	
1.02.04.1.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	4.028.500	3.090.000	938.500	76,70	76,70	Farmasi
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**263.576.970**	**235.857.400**	**27.719.570**	**89,48**	**89,48**	
1.02.05.1.02	**Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi**	**103.576.970**	**103.397.400**	**179.570**	**99,83**	**99,83**	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rekening Belanja	APBD Perubahan	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	% Keuangan	% Fisik	Penanggung Jawab
	DIKES + BLKPK	**153.938.244.310**	**134.606.265.205**	**19.332.979.105**	**87,44**	**87,44**	
1.02.05.1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	103.576.970	103.397.400	179.570	99,83	99,83	Promkes
1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	160.000.000	132.460.000	27.540.000	82,79	82,79	
1.02.05.1.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	160.000.000	132.460.000	27.540.000	82,79	82,79	Kesmas
	BALABKES PROV NTB	20.880.983.833	10.875.057.271	10.005.926.562	52,08		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.702.564.797	3.617.699.153	8.084.865.644	30,91		
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.900.000	2.848.000	52.000	98,21		
1.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.900.000	2.848.000	52.000	98,21		
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.418.051.717	2.187.123.130	230.928.587	90,45		
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.350.191.717	2.162.043.130	188.148.587	91,99		
1.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	63.660.000	25.080.000	38.580.000	39,40		

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rekening Belanja	APBD Perubahan	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	% Keuangan	% Fisik	Penanggung Jawab
	DIKES + BLKPK	**153.938.244.310**	**134.606.265.205**	**19.332.979.105**	**87,44**	**87,44**	
1.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.200.000	-	4.200.000	-		
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	103.102.580	86.786.605	16.315.975	84,18		
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.815.000	2.630.600	2.184.400	54,63		
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.581.000	20.874.300	2.706.700	88,52		
1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.393.580	10.344.000	3.049.580	77,23		
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.663.000	26.354.705	4.308.295	85,95		
1.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	20.150.000	16.203.000	3.947.000	80,41		
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.500.000	10.380.000	120.000	98,86		
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.557.016.500	1.245.133.962	311.882.538	79,97		
1.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000	1.710.000	1.790.000	48,86		
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	796.692.500	516.801.962	279.890.538	64,87		
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	756.824.000	726.622.000	30.202.000	96,01		
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	97.150.000	95.807.456	1.342.544	98,62		

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rekening Belanja	APBD Perubahan	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	% Keuangan	% Fisik	Penanggung Jawab
	DIKES + BLKPK	**153.938.244.310**	**134.606.265.205**	**19.332.979.105**	**87,44**	**87,44**	
1.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.000.000	71.898.956	101.044	99,86		
1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.150.000	23.908.500	1.241.500	95,06		
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	7.524.344.000	-	7.524.344.000	-		
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	7.524.344.000	-	7.524.344.000	-		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	8.681.739.736	6.898.685.534	1.783.054.202	79,46		
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	8.602.383.390	6.866.711.208	1.735.672.182	79,82		
1.02.02.1.01.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	985.227.000	981.200.000	4.027.000	99,59		
1.02.02.1.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	199.119.500	173.000.000	26.119.500	86,88		
1.02.02.1.01.13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	3.183.374.310	2.143.510.738	1.039.863.572	67,33		
1.02.02.1.01.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei,Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	2.726.883.180	2.300.867.535	426.015.645	84,38		

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rekening Belanja	APBD Perubahan	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	% Keuangan	% Fisik	Penanggung Jawab
	DIKES + BLKPK	**153.938.244.310**	**134.606.265.205**	**19.332.979.105**	**87,44**	**87,44**	
1.02.02.1.01.15	Pengadaan dan pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	1.507.779.400	1.268.132.935	239.646.465	84,11		
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	12.085.346	11.999.400	85.946	99,29		
1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	12.085.346	11.999.400	85.946	99,29		
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	67.271.000	19.974.926	47.296.074	29,69		
1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	67.271.000	19.974.926	47.296.074	29,69		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	496.679.300	358.672.584	138.006.716	72,21		
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	496.679.300	358.672.584	138.006.716	72,21		
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	496.679.300	358.672.584	138.006.716	72,21		

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Nasional

Arah dan kebijakan nasional dalam Pembangunan dibidang adalah meningkatkan pelayanan Kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Arah kebijakan nasional dalam pembangunan disektor Kesehatan akan menjadi acuan dalam Pembangunan Kesehatan di Tingkat daerah, adapun arah kebijakan Pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai institusi yang memiliki tupoksi yang bertanggungjawab dan menjadi leading sektor pembangunan Kesehatan adalah sebagai berikut:

1) Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP pemerintah dan FKTP swasta;
2) Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intrevensi secara kontinum (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif;
3) Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit;
4) Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan didukung inovasi teknologi;
5) Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas, termasuk integrasi lintas program

Arah kebijakan tersebut menjadi acuan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya sebagai tujuan yang dicapai melalui:

1) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup;
2) Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
3) Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat;
4) Peningkatan sumber daya kesehatan;
5) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.

dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional disektor kesehatan, kementerian kesehatan menetapkan beberapa strategi yaitu:

1) Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat;
2) Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan;
3) Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat;
4) Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat Kesehatan;
5) Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar;
6) Terjaminnya pembiayaan Kesehatan;
7) Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
8) Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

3.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, tujuan yang ditetapkan harus dapat diidentifikasi dengan jelas dan terukur, dapat dicapai sesuai dengan kapasitas, Kemampuan dan sumber daya yang ada dan memiliki keterkaitan dengan target serta memiliki batas waktu dalam pencapainnya, adapun sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah Penentuan tujuan merupakan langkah pertama dalam membuat perencanaan sehingga dalam pelaksaannya sesuai dengan tujuan dan hasil yang ingin dicapai.

Memperhatikan isu strategis sesuai tugas pokok dan fungsi serta dikaitkan dengan dokumen RPD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan perencanaan strategis Kementerian Kesehatan, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada periode Renstra 2024-2026, adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagaimana dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Tabel.3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelaksanaan Tugas/Fungsi/Kewenangan
Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	BASELINE	TARGET KINERJA			
				2024	2025	2026	AKHIR PERIODE
	RPJMD						
1.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Manusia Yang Kompetitif, Unggul, Andal Dan Taqwa (Kuat)	Indeks Pembangunan Manusia	69,44 Poin	70.88 Poin	71.67 Poin	72.46 Poin	72.46 Poin
	1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan serta derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)	67,07 Tahun	67,67 Tahun	67,98 Tahun	68,29 Tahun	68,29 Tahun
		Angka Kematian Ibu (AKI) per 100,000 KH	257	257-189	257-189	257-189	257-189
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	24,64	24.64-16.85	24.64-16.85	24.64-16.85	24.64-16.85
2.	Terwujudnya Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Yang Mandiri						
	1 Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniah (non fisik)	Prevalensi Stunting	32,7%	14%	12%	<10%	<10%
	2 Meningkatnya perlindungan sosial,pengembangan mata pencaharian,pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan	Persentase kepesertaan jaminan sosial kesehatan/Universal Health Coverage (UHC)	89.13%	95%	97%	100%	100%
3.	Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	67.02	BB	BB	A	A
	1 Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan Perundang undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	BB	A	A	A	A
	RENSTRA						
1.	Meningkatkan Derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)	67,07 Tahun	67,67 Tahun	67,98 Tahun	68,29 Tahun	68,29 Tahun
	1 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui Transformasi kesehatan	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH **(1)**	257-189	257-189	257-189	257-189	257-189
		Angka Kematian Bayi per 1.000 KH **(2)**	24.64 - 16.85	24.64-16.85	24.64-16.85	24.64-16.85	24.64-16.85
		Prevalensi Stunting **(3)**	32,7%	14%	12%	<10%	<10%

NO	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA	BASELINE	TARGET KINERJA			
					2024	2025	2026	AKHIR PERIODE
			Persentase Keluarga Sehat pada Posyandu Keluarga **(4)**					
			Persentase kepesertaan jaminan sosial Kesehatan /Universal Health Coverage (UHC) **(5)**	89.13%	95%	97%	100%	100%
			Sanitasi Layak **(6)**	83,12%	88,54%	91,02%	93,10%	93,10%
			Persentase pemenuhan SPM Pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpostensi bencana daerah provinsi **(7)**	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase pemenuhan SPM Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB daerah provinsi **(8)**	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Rumah Sakit yang mencapai target SPM **(9)**	100%	100%	100%	100%	100%
	2	Meningkatnya tata kelolah pemerintahan yang akuntabel di tingkat Perangkat Daerah	Nilai Sakip perangkat kat Daerah	BB	BB	BB	A	A
			Persentase Penerimaan PAD pada UPT Dinas Kesehata Provinsi Nusa Tenggaea Barat		6%	7-10%	10-15%	>15%

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah diatas maka tujuan pembangunan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi hanya memiliki tujuan yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan 1 indikator kinerja yaitu Umur Harapan hidup dan memiliki 2 Sasaran yaitu meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui Transformasi kesehatan dengan 9 Indikator Kinerja dan meningkatnya tata kelolah pemerintahan yang akuntabel di tingkat Perangkat Daerah dengan 2 indikator Kinerja

3.3. Program Dan Kegiatan

Kebijakan operasional dalam rangka perwujudan tujuan dan sasaran perangkat daerah dirumuskan dalam program dan kegiatan tahunan Dinas Kesehatan Provinsi NTB. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan melalui APBD ditujukan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan daerah terutama untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk medapatkan pelayanan kesehatan, menurunkan persentase balita stunting dan meningkatkan cakupan jaminan kesehatan nasional. Program kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2024 disusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah .

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB Tahun 2024-2026 memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1) Terwujudnya transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas daerah menuju NTB sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi regional Bali dan Nusa Tenggara yang inklusif dan berkelanjutan
2) Terwujudnya peningkatan kualitas manusia yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)
3) Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan yang lestari dan asri
4) Terwujudnya kualitas kesejahteraan masyarakat yang mandiri
5) Terwujudnya peningkatan tata kelola pemerintahan daerah
6) Terwujudnya peningkatan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)
7) Terwujudnya peningkatan daya saing daerah

Adapun 13 sasaran strategis pembangunan daerah provinsi NTB tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1) Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah;
2) Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan serta derajat kesehatan masyarakat;
3) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT);
4) Meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan menghadapi risiko bencana;
5) Meningkatnya kualitas ekosistem darat, laut dan udara;

6) Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniah (non fisik);
7) Meningkatnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan;
8) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur; ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik;
9) Meningkatnya kemandirian fiskal daerah;
10) Meningkatnya integrasi program pembangunan daerah dan peran pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs);
11) Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan strategis, kawasan transmigrasi dan perdesaan, mendorong investasi dan percepatan industrialisasi;
12) Meningkatnya konektivitas yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan Regional dan
13) Meningkatnya kapabilitas inovasi mendukung peningkatan kinerja industri dan pengembangan ekspor.

Dinas Kesehatan Provinsi berkontribusi dalam Tujuan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 pada tujuan Terwujudnya peningkatan kualitas manusia yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)**;** Terwujudnya Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Yang Mandiri dan Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

Arah kebijakan pembangunan kesehatan di NTB menekankan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui upaya peningkatan mutu dan akses pelayanan, penguatan upaya promotif dan preventi serta penguatan jaminan kesehatan untuk penduduk miskin. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar

warga negara. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM salah satunya adalah SPM Kesehatan Pemerintah Provinsi yaitu :

1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.
2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

Penerapan Standar Pelayanan minimal diselenggarakan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Teknis yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian. Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan :

a. Pengumpulan data.
b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar.
c. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar.
d. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Dinas Kesehatan Provinsi memiliki tugas untuk melaksanakan 2 SPM tingkat Provinsi dan memilik tugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanan atau penerapan SPM Bidang Kesehatan di Tingkat Kabupaten Kota

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2024 dijabarkan pada Tabel berikut.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2024

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN										Unit Kerja Penanggung Jawab
					INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA						Akhir Periode (2026)		
							2024		2025		2026				
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		
1	**Meningkatkan Derajat kesehatan masyarakat**				**Umur Harapan Hidup**	**67,07 Tahun**	**67,67 Tahun**	**185.332.204.577**	**67,98 Tahun**	**166.938.688.307**	**68,29 Tahun**	**192.277.700.617**	**68,29 Tahun**	**544.548.593.501**	
	1.	**Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui Transformasi pelayanan kesehatan**						**130.877.025.872**		**106.739.491.732**		**124.386.934.384**		**362.003.451.988**	
					Angka Kematian Ibu per 100.000 KH **(1)**	**257-189**	**257-189**		**257-189**		**257-189**		**257-189**		
					Angka Kematian Bayi per 1.000 KH **(2)**	**24.64 - 16.85**	**24.64-16.85**		**24.64-16.85**		**24.64-16.85**		**24.64-16.85**		
					Persentase Keluarga Sehat pada Posyandu Keluarga **(3)**										
					Prevalensi Stunting **(4)**	**33%**	**14%1**		**12%**		**<10%**		**<10%**		
					Persentase kepesertaan jaminan Kesehatan /Universal Health Coverage (UHC) **(5)**	**89%**	**95%**		**97%**		**100%**		**100%**		
					Sanitasi Layak **(6)**	**83,12%**	**87,06 %**		**89,03 %**		**91%**		**91%**		
					Persentase pemenuhan SPM Pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpostensi	**90%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN										Unit Kerja Penanggung Jawab
					INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA						Akhir Periode (2026)		
							2024		2025		2026				
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		
					bencana daerah provinsi **(7)**										
					Persentase pemenuhan SPM Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB daerah provinsi **(8)**	**90%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
					Persentase Rumah Sakit yang mencapai target SPM **(9)**		100%		**100%**		**100%**		**100%**		
			1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					**128.529.344.985**		**104.157.042.756**		**121.546.240.511**		**354.232.628.252**	4 Bidang
				Meningkatnya Kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang komprehensif dengan pendekatan siklus Hidup, pemenuhan SPM layanan dasar, pemantauan wilayah kerja dan peningkatan tata kelola kesehatan masyarakat dan Fasilitas Layanan kesehatan	Persentase Kabupaten/ Kota dengan penurunan kasus kematian ibu 10% **(1)**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**Bidang Kesmas**
					Persentase Kabupaten/ Kota dengan penurunan kasus kematian anak 5% per tahun **(2)**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**Bidang Kesmas**
					Persentase kabupaten kota yang telah melaksanakan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer **(3)**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**Bidang Kesmas**
					Persentase Puskesmas yang melaksanakan pemantauan		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**Bidang Kesmas**

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN										Unit Kerja Penanggung Jawab
					INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA						Akhir Periode (2026)		
							2024		2025		2026				
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		
					wilayah kerja **(4)**										
					Persentase Puskesmas dengan tata kelola kesehatan masyarakat yang baik **(5)**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**Bidang Kesmas**
					Persentase Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) yang dilakukan di daerah terpencil dan sangat terpencil sesuai standar **(6)**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**Bidang Kesmas**
					Persentase Puskesmas yang menerapkan BLUD **(7)**	**66,50%**	**90%**		**100%**		**100%**		**100%**		**Bidang Kesmas**
					Persentase Balita Wasting **(8)**	**7,77%**	**7%**		**6,80%**		**6%**		**6%**		**Bidang Kesmas**
					Persentse kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (SDG's) **(9)**	**3,50%**	**3,50%**		**3,50%**		**3,50%**		**3,50%**		**Bidang Kesmas**
					Proporsi KK dengan akses sanitasi layak (**10)**	**83,12%**	**88,54 %**		**87,90 %**		**91%**		**91%**		**Bidang Kesmas**
					Persentase kabupaten/ kota yang mencapai target		**95%**		**95%**		**95%**		**95%**		**Bidang P2P**

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN										Unit Kerja Penanggung Jawab
					INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA						Akhir Periode (2026)		
							2024		2025		2026				
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		
					imunisasi rutin **(11)**										
					persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.(SDG's) **(12)**	**90%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**Bidang P2P**
					Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ART) **(13)**	99,90%	60%		70%		90%		90%		Bidang P2P
					Persentase cakupan penemuan & pengobatan kasus TBC **(14)**	**43,25%**	**90%**		**90%**		**90%**		**90%**		**Bidang P2P**
					Persentase kabupaten/ kota yang mencapai API < 1/1000 **(15)**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**Bidang P2P**
					Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat (**16)**	**90%**	**90%**		**90%**		**90%**		**90%**		**Bidang P2P**
					Persentase pengobatan penyakit menular pada balita **(17)**	**NA**	**90%**		**90%**		**90%**		**90%**		**Bidang P2P**
					Persentase skrining penyakit menular pada	**100%**	**100%**		**100%**		**90%**		**90%**		**Bidang P2P**

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN										Unit Kerja Penanggung Jawab
					INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA						Akhir Periode (2026)		
							2024		2025		2026				
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		
					kelompok berisiko **(18)**										
					Persentase Kabupaten/ Kota yang mencapai eliminasi penyakit tropis terabaikan (**19)**	**30%**	**61%**		**70%**		**100%**		**100%**		**Bidang P2P**
					Persentase kabupaten/ kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM **(20)**	**74,50%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**Bidang P2P**
					Persentase kabupaten/kota yang melakukan pengendalian faktor risiko PTM **(21)**	**NA**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**Bidang P2P**
					Persentase kab/ kota yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/ wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/ wabah **(22)**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN										Unit Kerja Penanggung Jawab
					INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA						Akhir Periode (2026)		
							2024		2025		2026				
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		
					Persentase kab/kota yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/ wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/ wabah **(23)**	**90%**	**100%**	**6.854.218.000**	**100%**	**7.539.639.800**	**100%**	**8.293.603.780**	**100%**	**22.687.461.580**	**Bidang P2P**
					persentase pelayanan kesehatanbagi penduduk pada kondisi KLB provinsi**(24)**	**90%**	**100%**	**1.880.350.000**	**100%**	**2.068.385.000**	**100%**	**2.275.223.500**	**100%**	**6.223.958.500**	
					Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Masyarakat Miskin melalui PPI-JK oleh Pemerintah **(25)**		**100%**	**69.967.031.078**	**100%**	**76.963.734.186**	**100%**	**84.660.107.604**	**100%**	**231.590.872.868**	**Bidang Yankes**
					Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi **(26)**	49,17%	54%	2.541.354.675	56%	2.795.490.143	60,10 %	3.075.039.157	60,10 %	8.411.883.974	Bidang Yankes
					Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah dengan capaian penilaian Indiakator Mutu Nasional > 81 **(27)**		**80%**		**85%**		**90%**		**90%**		**Bidang Yankes**

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN										Unit Kerja Penanggung Jawab
					INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA						Akhir Periode (2026)		
							2024		2025		2026				
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		
					Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan **(28)**		**97%**	**34.095.669.753**	**97%**	**34.095.669.753**	**97%**	**34.095.669.753**	**97%**	**102.287.009.259**	**Bidang Yankes**
			1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM & UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					34.295.669.753		37.505.236.728		41.497.760.401		112.856.666.882	
				Terlaksananya penyediaan obat dan BMHP di provinsi NTB	Persentase permintaan obat program dan buffer stock provinsi yang dilayani	**100%**	**100%**	**34.295.669.753**	**100%**	**37.505.236.728**	**100%1**	**41.497.760.401**	**0%**	**112.856.666.882**	
			1. Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas		**1**	**200.000.000**			**1**	**242.000.000**	**2**	**242.000.000**	
			2. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			**33.795.669.753**		**37.175.236.728**		**40.892.760.401**		**111.863.666.882**	

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN										Unit Kerja Penanggung Jawab
						INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA						Akhir Periode (2026)		
								2024		2025		2026				
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		
			3.	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	**1 Dok**	**1 Dok1**	**300.000.000**	**1 Dok**	**330.000.000**	**1 Dok**	**363.000.000**	**3 Dok**	**993.000.000**	
			2.	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**					**92.446.096.577**		**102.190.706.235**		**119.383.270.338**		**314.020.073.150**	3 Bidang
					Terlaksananya pembinaan dan pengawasan tehadap pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Kasus Kematian ibu dengan penurunan kasus 10% Per tahun (1)	**97 Kasus**	**78 Kasus**		**70 Kasus**		**63 Kasus**		**63 Kasus**		Bidang Kesmas
						Jumlah Kasus Kematian bayi dengan penurunan kasus 5% Per tahun (2)	**788 Kasus**	**674 Kasus**		**607 Kasus**		**576 Kasus**		**576 Kasus**		Bidang Kesmas
						Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (3)		**93%**		**95%**		**97%**		**975%**		Bidang Kesmas
						persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar (SPM-1) (4)	**88,00%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		Bidang Kesmas
						persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar (SPM-2) (5)	**87,50%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**Bidang Kesmas**

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN										Unit Kerja Penanggung Jawab
						INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA						Akhir Periode (2026)		
								2024		2025		2026				
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		
						Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai Standar (SPM-3) (6)	**95,80%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**Bidang Kesmas**
						Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar (SPM-4) (7)	**98,00%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**Bidang Kesmas**
						Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar (SPM-5) (8)	**79,30%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**Bidang Kesmas**
						Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai Standar (SPM-6) (9)	**69,00%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**Bidang Kesmas**
						Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai Standar (SPM-7) (10)	**73,30%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**Bidang Kesmas**
						Jumlah Bayi yang mendapatkan pelayanan pengukuran dan penimbangan berat badan sesuai standar (11)	**80,00%**	**85,00 %**		**86,00 %**		**89,00 %**		**89,00 %**		**Bidang Kesmas**

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN										Unit Kerja Penanggung Jawab
						INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA						Akhir Periode (2026)		
								2024		2025		2026				
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		
						Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai Standar (SPM-8) (12)		100%		100%		100%		100%		Bidang P2-P
						Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ART) (13)	99,90%	60%		70%		90%		90%		Bidang P2P
						Persentase cakupan penemuan & pengobatan kasus TBC (14)	43,25%	90%		90%		90%		90%		Bidang P2P
						Persentase kabupaten/ kota yang mencapai API < 1/1000 (15)	100%	100%		100%		100%		100%		Bidang P2P
						Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat (16)	90%	90%		90%		90%		90%		Bidang P2P
						Persentase pengobatan penyakit menular pada balita (17)	NA	90%		90%		90%		90%		Bidang P2P
						Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat antigen baru (18)		100%		100%		100%		100%		Bidang P2P
						Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan baduta (19)		100%		100%		100%		100%		Bidang P2P

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN										Unit Kerja Penanggung Jawab
						INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA						Akhir Periode (2026)		
								2024		2025		2026				
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		
						Persentase anak yang mendapatkan imunisasi lanjutan lengkap di usia sekolah dasar (20)		100%		100%		100%		100%		Bidang P2P
						Persentase wanita usia subur yang memiliki status imunisasi T2+ (21)		100%		100%		100%		100%		Bidang P2P
						berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (22)"		100%		100%		100%		100%		Bidang P2P
						persentase penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (23)		100%		100%		100%		100%		Bidang P2P
						Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia yang mendapatkan skrining HIV (24)		90%		90%		90%		90%		Bidang P2P

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN										Unit Kerja Penanggung Jawab
						INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA						Akhir Periode (2026)		
								2024		2025		2026				
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		
						Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART (25)		**90%**		**90%**		**90%**		**90%**		**Bidang P2P**
						Persentase keberhasilan pengobatan TBC (26)		**90%**		**90%**		**90%**		**90%**		**Bidang P2P**
						Persentase kabupaten/ kota yang mencapai Positivity Rate (PR) < 5% (27)		**80%**		**80%**		**80%**		**80%**		**Bidang P2P**
						Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu (28)		**90%**		**90%**		**90%**		**90%**		**Bidang P2P**
						Persentase pengobatan kasus pneumonia sesuai standar (29)		**95%**		**95%**		**95%**		**95%**		**Bidang P2P**
						Persentase pengobatan kasus diare sesuai standar (30)		**85%**		**85%**		**85%**		**85%**		**Bidang P2P**
						Persentase kabupaten/ kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan C pada populasi berisiko (31)		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**Bidang P2P**

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN										Unit Kerja Penanggung Jawab
						INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA						Akhir Periode (2026)		
								2024		2025		2026				
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		
						Persentase pasien sifilis yang diobati (31)		90%		90%		90%		90%		Bidang P2P
						jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (SDG's) (32)		100%		100%		100%		100%		Bidang P2P
						Persentase kabupaten/ kota eliminasi rabies (33)		50%		50%		50%		50%		Bidang P2P
						Persentase kabupaten/kota dengan Insiden Rate (IR) DBD ≤ 10 per 100.000 penduduk (34)		95%		95%		95%		95%		Bidang P2P
						Persentase penduduk sesuai kelompok usia yang dilakukan skrining PTM (35)		90%		90%		90%		90%		Bidang P2P
						Jumlah kabupaten/ kota yang melakukan pelayanan terpadu (Pandu) PTM di ≥ 80% puskesmas (36)		100%		100%		100%		100%		Bidang P2P
						Persentase penyandang hipertensi yang tekanan darahnya terkendali di		90%		90%		90%		90%		Bidang P2P

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN										Unit Kerja Penanggung Jawab
						INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA						Akhir Periode (2026)		
								2024		2025		2026				
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		
						puskesmas/FKTP (37)										
						Persentase penyandang diabetes melitus yang gula darahnya terkendali di puskesmas/FKTP (38)		**90%**		**90%**		**90%**		**90%**		**Bidang P2P**
						Persentase kabupaten/ kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) (39)		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**Bidang P2P**
						Persentase kabupaten/ kota yang melakukan pelayanan Upaya Berhenti Merokok (40)		**70%**		**80%**		**90%**		**90%**		**Bidang P2P**
						Persentase penduduk usia > 15 tahun dengan risiko masalah kesehatan jiwa yang mendapatkan skrining (41)		**70%**		**80%**		**90%**		**90%**		**Bidang P2P**
						Persentase Penyandang Gangguan Jiwa yang Memperoleh layanan di fasyankes (42)		**80%**		**90%**		**90%**		**90%**		**Bidang P2P**

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN									Unit Kerja Penanggung Jawab
						INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA						Akhir Periode (2026)		
								2024		2025		2026				
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		
						Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM-11) (43)		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**Bidang P2P**
						Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabiltasi medis (44)		**360 Orang**		**370 Orang**		**380 Orang**		**380 Orang**		**Bidang P2P**
						Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Masyarakat Miskin melalui PPI-JK oleh Pemerintah (45)	100%	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**Bidang Yankes**
						Persentase RS. Puskesmas dan PSC dengan pemanfaatan Sisrute (46)	51,83%	**57,91 %**		**66%**		**74,66 %**		**74,66 %**		**Bidang Yankes**
						Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan dengan capaian Indikator Nasional Mutu (INM) >81 (47)		**63,31 %**		**67,23 %**		**70,03 %**		**70,03 %**		**Bidang Yankes**

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN										Unit Kerja Penanggung Jawab
					INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA						Akhir Periode (2026)		
							2024		2025		2026				
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		
			1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		**32.579 Pddk**	**6.854.218.000**	**33.673 Pddk**	**7.539.639.800**	**34.767 Pddk**	**8.293.603.780**	**34.767 Pddk**	**22.687.461.580**	
			2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi Sesuai Standar	Jumlah orang yang mendapat pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi		**18.205 Pddk**	**1.880.350.000**	**18.816 Pddk**	**2.068.385.000**	**19.427 Pddk**	**2.275.223.500**	**19.427 Pddk**	**6.223.958.500**	
			3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1 Dok	**1 Dok**	**1.091.000.247**	**1 Dok**	**1.200.100.272**	**1 Dok**	**8.293.603.780**		**10.584.704.299**	
			4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dok	**1 Dok**	**800.000.000**	**1 Dok**	**880.000.000**	**1 Dok**	**968.000.000**	**1 Dok**	**2.648.000.000**	
			5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Lanjut	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	1 Dok	**1 Dok**	**500.000.000**	**1 Dok**	**550.000.000**	**1 Dok**	**605.000.000**	**1 Dok**	**1.655.000.000**	

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN										Unit Kerja Penanggung Jawab
					INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA						Akhir Periode (2026)		
							2024		2025		2026				
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		
			6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Balita Stunting			**996.852.000**		**1.096.537.200**		**1.206.190.920**		**3.299.580.120**	**1 Dok**
			7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dok	**1 Dok**	**246.406.000**	**1 Dok**	**271.046.600**	**1 Dok**	**298.151.260**	**1 Dok**	**815.603.860**	**1 Dok**
			8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dok	**1 Dok**	**6.737.276.000**	**1 Dok**	**7.411.003.600**	**1 Dok**	**8.152.103.960**	**1 Dok**	**22.300.383.560**	**1 Dok**
			9 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dok	**1 Dok**	**468.833.000**	**1 Dok**	**515.716.300**	**1 Dok**	**567.287.930**	**1 Dok**	**1.551.837.230**	**1 Dok**
			10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Terlaksananya pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dok	**1 Dok**	**25.000.000**	**1 Dok**	**27.500.000**	**1 Dok**	**30.250.000**	**1 Dok**	**82.750.000**	**1 Dok**
			11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dok	**1 Dok**	**750.000.000**	**1 Dok**	**825.000.000**	**1 Dok**	**907.500.000**	**1 Dok**	**2.482.500.000**	

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN										Unit Kerja Penanggung Jawab
					INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA						Akhir Periode (2026)		
							2024		2025		2026				
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		
			12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dok	**1 Dok**	**50.316.240**	**1 Dok**	**55.347.864**	**1 Dok**	**60.882.650**	**1 Dok**	**166.546.754**	
			13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dok	**1 Dok**	**180.000.000**	**1 Dok**	**198.000.000**	**1 Dok**	**217.800.000**	**1 Dok**	**595.800.000**	
			14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dgn Kecanduan NAPZA	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis	1 Dok	**1 Dok**	**158.319.562**	**1 Dok**	**174.151.518**	**1 Dok**	**191.566.670**	**1 Dok**	**524.037.750**	
			15 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya pembinaan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dok	**1 Dok**	**69.967.031.078**	**1 Dok**	**76.963.734.186**	**1 Dok**	**84.660.107.604**	**1 Dok**	**231.590.872.868**	
			16 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen Analisis Faktor Resiko KLB yang dihasilkan	1 Dok	**1 Dok**	**449.650.000**	**1 Dok**	**494.615.000**	**1 Dok**	**544.076.500**	**1 Dok**	**1.488.341.500**	
			17 Koordinasi & Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kab/ Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Laporan SPM Kab/Kota	1 Dok	**1 Dok**	**107.068.430**	**1 Dok**	**117.775.273**	**1 Dok**	**129.552.800**	**1 Dok**	**354.396.503**	
			18 Pembinaan Pelaksanaan Upaya	Terlaksananya pembinaan Upaya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan	1 Dok	**1 Dok**	**400.000.000**	**1 Dok**	**440.000.000**	**1 Dok**	**484.000.000**	**1 Dok**	**1.324.000.000**	

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN										Unit Kerja Penanggung Jawab
					INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA						Akhir Periode (2026)		
							2024		2025		2026				
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		
				Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan	Upaya Pelayanan Kesehatan									
			19 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Terlaksananya Verfikasi Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	1 Dok	**1 Dok**	**64.059.520**	**1 Dok**	**70.465.472**	**1 Dok**	**77.512.019**	**1 Dok**	**212.037.011**	
			20 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kab/Kota	Terlaksananya Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	**1 Dok**	**1 Dok**	**80.000.000**	**1 Dok**	**88.000.000**	**1 Dok**	**96.800.000**	**1 Dok**	**264.800.000**	
			21 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Tersedianya & terlaksananya pengelolaan Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	**6 PSC**	**7 PSC**	**235.000.000**	**8 PSC**	**258.500.000**	**10 PSC**	**284.350.000**	**10 PSC**	**777.850.000**	
			22 Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Terlaksananya Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah RS yang melaksanakan SISRUTE	**32 Rumah Sakit**	**38 Rumah Sakit**	**54.716.500**	**42 Rumah Sakit**	**60.188.150**	**44 Rumah Sakit**	**66.206.965**	**44 Rumah Sakit**	**181.111.615**	

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN										Unit Kerja Penanggung Jawab
					INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA						Akhir Periode (2026)		
							2024		2025		2026				
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		
			2 3 Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Terlaksananya Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Analisa Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	**1 Dok**	**1 Dok**	**350.000.000**	**1 Dok**	**385.000.000**	**1 Dok**	**423.500.000**	**1 Dok**	**1.158.500.000**	
			2 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer	**0**	**176 Puskesmas**		**176 Puskesmas**	**500.000.000**	**176 Puskesmas**	**550.000.000**	**176 Puskesmas**	**1.050.000.000**	
			3.	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**				**576.000.000**		**633.600.000**		**696.960.000**		**1.906.560.000**	
				Terwujudnya sistem informasi kesehatan terintegrasi	Persentase Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah yang memiliki sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi			**576.000.000**		**633.600.000**		**696.960.000**		**1.906.560.000**	
			1. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dok	**1 Dok**	**576.000.000**	**1 Dok**	**633.600.000**	**1 Dok**	**696.960.000**	**1 Dok**	**1.906.560.000**	
			4	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**				**1.211.578.655**		**1.332.736.521**		**1.466.010.173**		**4.010.325.349**	
				Terlaksananya pembinaan dan pengawasan tata kelola rumah sakit dan Fasilitas	Persentase rumah sakit dan Fasilitas pelayanan kesehatan lain yang	**220**		**1.211.578.655**		**1.332.736.521**		**1.466.010.173**		**4.010.325.348**	**Bidang Yankes**

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN										Unit Kerja Penanggung Jawab
					INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA						Akhir Periode (2026)		
							2024		2025		2026				
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		
				Pelayanan kesehatan lainnya	menerapkan tata kelola sesuai standar										
			1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	**220**	**420**	**45.000.000**	**420**	**49.500.000**	**420**	**54.450.000**	**420**	**148.950.000**	**Bidang Yankes**
			2 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit Sesuai Standar	Jumlah RS yang dibina tentang tata kelola Rumah Sakit	**44**	**44**	**74.306.655**	**44**	**81.737.321**	**44**	**89.911.053**	**44**	**245.955.028**	**Bidang Yankes**
			3 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan dengan capaian Indikator Nasional Mutu (INM) sesuai target tahunan	226	226	1.092.272.000	240	1.201.499.200	250	1.321.649.120		3.615.420.320	Bidang Yankes
			2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.106.480.000		1.217.128.000		1.338.840.800		3.662.448.800	Bidang SDK
				Meningkatnya Layanan kesehatan melalui Pemenuhan dan Pengembangan Kompetensi	Persentase Fasilitas kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	75%	80%	1.106.480.000	90%	1.217.128.000	90%	1.338.840.800	90%	3.662.448.800	Bidang SDK

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN										Unit Kerja Penanggung Jawab
						INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA						Akhir Periode (2026)		
								2024		2025		2026				
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		
					Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar											
			1.	**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**				**67.000.000**		**73.700.000**		**81.070.000**		**221.770.000**	
					Tersusunnya dokumen perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan minimal 9 Tenaga Kesehatan di puskesmas dan 7 dokter Spesilias di Rumah Sakit	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar 7 dokter Spesilias di Rumah Sakit	75,43%	**80%**	**67.000.000**		**73.700.000**		**81.070.000**		**221.770.000**	**Bidang SDK**
						Persentase RSUD Kabupaten/Kota dengan 7 dokter spesialis (4 spesialis dasar dan 3 spesialis Penjenjang) di Provinsi NTB	57%	**60%**		**65%**		**70%**		**70%**		
				1 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah dokumen rencana pemenuhan minamal 9 Tenaga Kesehatan di pusk dan & Tenaga Pseialis Di Kabupaten/Kota Provinsi NTB	**1 Dok**	**1 Dok**	**32.000.000**	**1 Dok**	**35.200.000**	**1 Dok**	**38.720.000**	**1 Dok**	**105.920.000**	**Bidang SDK**

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN										Unit Kerja Penanggung Jawab
					INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA						Akhir Periode (2026)		
							2024		2025		2026				
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		
			2 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terpenuhinya pemerataan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	**1 Dok**	**1 Dok**	**35.000.000**	**1 Dok**	**38.500.000**	**1 Dok**	**42.350.000**	**1 Dok**	**115.850.000**	**Bidang SDK**
			2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					**1.039.480.000**		**1.143.428.000**		**1.257.770.800**		**3.440.678.800**	Bidang SDK
				Terpenuhinya upaya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM Kesehatan tingkat daerah provinsi	Persentase SDM Kesehatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang meningkat	2,50%	**4,50%**	**1.039.480.000**	**5%**	**1.143.428.000**	**10%**	**1.257.770.800**	**10%**	**3.440.678.800**	**Bidang SDK**
			1 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen pelaksanaan Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dok	**1 Dok**	**1.000.000.000**	**1 Dok**	**1.100.000.000**	**1 Dok**	**1.210.000.000**	**1 Dok**	**3.310.000.000**	**Bidang SDK**
			2 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	1 Dok	1 Dok	**39.480.000**	**1 Dok**	**43.428.000**	**1 Dok**	**47.770.800**	**1 Dok**	**130.678.800**	**Bidang SDK**
			3. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					**131.200.887**		**144.320.976**		**158.753.073**		**434.274.936**	**Bidang SDK**

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN										Unit Kerja Penanggung Jawab
					INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA						Akhir Periode (2026)		
							2024		2025		2026				
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		
				Meningkatnya Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas sarana prasarana, Produk Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, serta Pengawasan Keamanan Makanan dan Minuman	Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Syarat		90%	**131.200.887**	**95%**	**144.320.976**	**97%**	**158.753.073**	**97%**	**434.274.936**	**Bidang SDK**
			1. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)					**96.200.887**		**105.820.976**		**116.403.073**		**318.424.936**	Bidang SDK
				Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pada sarana PBF (Pedagang besar Farmasi) dan PAK (Penyalur Alat Kesehatan)	Persentase PBF dan PAK yang memenuhi syarat	Sarana	18 Sarana	**96.200.887**	**Sarana**	**105.820.976**	**Sarana**	**116.403.073**	**Sarana**	**318.424.936**	**Bidang SDK**
			1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan			**96.200.887**		**105.820.976**		**116.403.073**		**318.424.936**	**Bidang SDK**
			2. Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT					**35.000.000**		**38.500.000**		**42.350.000**		**115.850.000**	

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN										Unit Kerja Penanggung Jawab
					INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA						Akhir Periode (2026)		
							2024		2025		2026				
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		
				Terlaksananya pembinaan dan pengawasan usaha kecil obat tradisional (UKOT)	Persentase UKOT yang memenuhi syarat		**100%**	**35.000.000**	**100%**	**38.500.000**	**100%**	**42.350.000**	**100%**	**115.850.000**	**Bidang SDK**
			1. Pengendalian Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional		**100%**	**35.000.000**	**100%**	**38.500.000**	**100%**	**42.350.000**	**100%**	**115.850.000**	**Bidang SDK**
			4. PROGRAM PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					**1.110.000.000**		**1.221.000.000**		**1.343.100.000**		**3.674.100.000**	Bidang Kesmas
				Penguatan UKBM dan Keterlibatan Aktif Masyarakat melalui Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Kader Kesehatan, Advokasi dan Aksi Lintas Sektoral	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif	70%	75%	**1.110.000.000**	80%	**1.221.000.000**	80%	**1.343.100.000**	80%	**3.674.100.000**	Bidang Kesmas
			1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					**700.000.000**		**770.000.000**		**847.000.000**		**2.317.000.000**	Bidang Kesmas
				Meningkatnya Posyandu aktif	Persentase Kab/Kota yang memiliki Posyandu Aktif Minimal 90%		80%	700.000.000	80%	770.000.000	80%	847.000.000	80%	2.317.000.000	Bidang Kesmas

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN										Unit Kerja Penanggung Jawab
						INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA						Akhir Periode (2026)		
								2024		2025		2026				
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		
			1.	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten /Kota yang di advokasi dan disfasilitasipengembangan Posyandu aktif:		7 Kab /Kota	700.000.000	7 Kab /Kota	770.000.000	7 Kab /Kota	847.000.000	7 Kab /Kota	2.317.000.000	Bidang Kesmas
			2.	**Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih & Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Prov**					**250.000.000**		**275.000.000**		**302.500.000**		**827.500.000**	Bidang Kesmas
					Terlaksananya Perilaku Hidup bersih dan sehat masyarakat di Kab/Kota	Persentase Puskesmas yang dibina PHBS		11,40 %	250.000.000	17%	275.000.000	23%	302.500.000	23%	827.500.000	Bidang Kesmas
			1.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggarannya Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat meliputi penggerkan masy dan media edukasi.	1 Dok	1 Dok	250.000.000	1 Dok	275.000.000	1 Dok	302.500.000	1 Dok	827.500.000	Bidang Kesmas
			3.	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi**					**160.000.000**		**176.000.000**		**193.600.000**		**529.600.000**	Bidang Kesmas
					Meningkatnya peran UKBM di Kab/Kota	Jumlah UKBM Aktif	7506 UKBM	7605 UKBM	160.000.000	7645 UKBM	176.000.000	7705 UKBM	193.600.000	7705 UKBM	529.600.000	Bidang Kesmas

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN										Unit Kerja Penanggung Jawab
					INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA						Akhir Periode (2026)		
							2024		2025		2026				
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		
			1. Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Terlaksananya Bimbingan teknis UKBM	Jumlah Kabupaten yang mendapatkan Bimbingan Teknis UKBM		10 Kab/ Kota	160.000.000	10 Kab/ Kota	176.000.000	10 Kab/ Kota	193.600.000	10 Kab/ Kota	529.600.000	Bidang Kesmas
	2.	**Meningkatnya tata kelolah pemerintahan yang akuntabel di tingkat Perangkat daerah**			**1. Nilai Sakip perangkat Daerah**	BB	BB	**54.455.178.705**	BB	**60.199.196.575**	A	**67.890.766.233**		**182.545.141.513**	
					2. Persentase Penerimaan PAD pada UPT Dinas Kesehata Provinsi Nusa Tenggaea Barat	303.867.241.785	7-10%	325137948710 - 334253965964	10-15%	334253965964 - 349447328053	>15%	> 349447328053	>15%	> 349447328053	
			5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					**54.455.178.705**		**60.199.196.575**		**67.890.766.233**		**182.545.141.513**	
				Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Perencanaan dan Anggaran serta	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah		100%	**54.455.178.705**	100%	**60.199.196.575**	100%	**67.890.766.233**	100%	**182.545.141.513**	Sekretariat
				Pengelolaan Manajemen dan Administrasi Pemerintahan	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada UPT. Dinas Kesehatan Provinsi NTB	597.500.000	7-10%	639325000 - 657250000	10-15%	**657250000 - 687125000**	>15%	**> 687125000**	>15%	**> 687125000**	
					Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Balai Labratorium Kesehatan dan Kalibrasi (LLPAD	9.497.043.900	7-10%	10161836973 - 10446748290	10-15%	10446748290 - 10921600485	>15%	> 10921600485	>15%	> 10921600485	

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN										Unit Kerja Penanggung Jawab
					INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA						Akhir Periode (2026)		
							2024		2025		2026				
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		
					Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Mata (LLPAD)	22.706.400.000	7-10%	24.295 848.000 – 24'977.040000	10-15%	24977040000 - 26112360000	>15%	> 26112360000	>15%	> 26112360000	
					Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma (LLPAD)	20.012.000.000	7-10%	21412840000 - 22013200000	10-15%	22013200000 - 23013800000	>15%	> 23013800000	>15%	> 23013800000	
					Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Manambai (LLPAD)	8.692.388.500	7-10%	9300855695 - 9561627350	10-15%	9561627350 - 18688635275	>15%	> 18688635275	>15%	> 18688635275	
			1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**914.388.000**		**1.005.826.800**		**1.106.409.480**		**3.026.624.280**	Sekretariat
				Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu		**100%**	**914.388.000**	**100%**	**1.005.826.800**	**100%**	**1.106.409.480**	**100%**	**3.026.624.280**	**Sekretariat**
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	**1 Dok**	**274.919.470**	**1 Dok**	**302.411.417**	**1 Dok**	**332.652.559**	**1 Dok**	**909.983.446**	**Sekretariat**

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN										Unit Kerja Penanggung Jawab
					INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA						Akhir Periode (2026)		
							2024		2025		2026				
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		
			2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	**1 Dok**	**17.583.500**	**1 Dok**	**19.341.850**	**1 Dok**	**21.276.035**	**1 Dok**	**58.201.385**	**Sekretariat**
			3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	**1 Dok**	**30.890.400**	**1 Dok**	**33.979.440**	**1 Dok**	**37.377.384**	**1 Dok**	**102.247.224**	**Sekretariat**
			4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	**60.058.600**	**1 Dok**	**66.064.460**	**1 Dok**	**72.670.906**	**1 Dok**	**198.793.966**	**Sekretariat**
			5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	**30.951.200**	**1 Dok**	**34.046.320**	**1 Dok**	**37.450.952**	**1 Dok**	**102.448.472**	**Sekretariat**

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN										Unit Kerja Penanggung Jawab
						INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA						Akhir Periode (2026)		
								2024		2025		2026				
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		
				6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	1 Dok	**42.158.600**	**1 Dok**	**46.374.460**	**1 Dok**	**51.011.906**	**1 Dok**	**139.544.966**	**Sekretariat**
				7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	**457.826.230**	**1 Dok**	**503.608.853**	**1 Dok**	**553.969.738**	**1 Dok**	**1.515.404.821**	Sekretariat
			2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**44.578.389.910**		**49.036.228.901**		**53.939.851.791**		**147.554.470.602**	Sekretariat
					Teralaksananya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pelayanan administrasi keuangan			**44.578.389.910**		**49.036.228.901**		**53.939.851.791**		**147.554.470.602**	Sekretariat
				1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji			**44.196.950.851**		**48.616.645.936**		**53.478.310.530**		**146.291.907.317**	Sekretariat
				2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			354.814.259	1 Dok	390.295.685	1 Dok	429.325.253	3 Dok	1.174.435.197	Sekretariat

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN										Unit Kerja Penanggung Jawab
						INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA						Akhir Periode (2026)		
								2024		2025		2026				
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		
				3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan keuangan akhir tahun yang disusun			15.624.800	1 Dok	17.187.280	1 Dok	18.906.008	3 Dok	51.718.088	Sekretariat
				4 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			4.000.000	1 Dok	4.400.000	1 Dok	4.840.000	3 Dok	13.240.000	Sekretariat
				5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			5.000.000	1 Dok	5.500.000	1 Dok	6.050.000	3 Dok	16.550.000	Sekretariat
				6 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			2.000.000	1 Dok	2.200.000	1 Dok	2.420.000	4 Dok	6.620.000	Sekretariat
			3.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**					**140.000.000**		**154.000.000**		**169.400.000**		**463.400.000**	Sekretariat

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN										Unit Kerja Penanggung Jawab
						INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA						Akhir Periode (2026)		
								2024		2025		2026				
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		
					Terwujudnya ketertiban admisnistasi Barang Milik Daerah Perangkat Daearah	Jumlah Jenis pelayanan administrasi Barang Milik Daerah			140.000.000		154.000.000		169.400.000		463.400.000	Sekretariat
				1 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			125.000.000		137.500.000		151.250.000		413.750 .000	Sekretariat
				2 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			10.000.000		11.000.000		12.100.000		33.100.000	Sekretariat
				3 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			5.000.000		5.500.000		6.050.000		16.550.000	Sekretariat
			4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daera**					**425.000.000**		**467.500.000**		**514.250.000**		**1.406.750.000**	Sekretariat
					Terlaksananya ketertiban administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen adminsistrasi kepegawaian yang dilaksnakan		1 Dok	425.000.000	1 Dok	467.500.000	1 Dok	514.250.000	3 Dok	1.406.750.000	Sekretariat

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN										Unit Kerja Penanggung Jawab
						INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA						Akhir Periode (2026)		
								2024		2025		2026				
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		
				1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Dok	25.000.000	1 Dok	27.500.000	1 Dok	30.250.000	3 Dok	82.750.000	Sekretariat
				2 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		1 Dok	50.000.000	1 Dok	55.000.000	1 Dok	60.500.000	3 Dok	165.500.000	Sekretariat
				3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		1 Dok	300.000.000	1 Dok	330.000.000	1 Dok	363.000.000	3 Dok	993.000.000	Sekretariat
				4 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Dok	25.000.000	1 Dok	27.500.000	1 Dok	30.250.000	3 Dok	165.500.000	Sekretariat
				5 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			25.000.000		27.500.000		30.250.000		82.750.000	Sekretariat
			5.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**1.627.259.977**		**1.789.985.974**		**1.968.984.572**		**5.386.230.523**	Sekretariat
					Terlaksananya ketertiban administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen adminsistrasi umum yang dilaksnakan	1 Dok	1 Dok	1.627.259.977	1 Dok	1.789.985.974	1 Dok	1.968.984.572	1 Dok	5.386.230.523	Sekretariat

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN										Unit Kerja Penanggung Jawab
						INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA						Akhir Periode (2026)		
								2024		2025		2026				
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		
				1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	Jenis	43.521.000	Jenis	47.873.100	Janis	52.660.410	Jenis	144.054.510	Sekretariat
				2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jenis	Jenis	814.859.263	Jenis	896.345.189	Jenis	985.979.708	Jenis	2.697.184.161	Sekretariat
				3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis	Jenis	62.393.000	Jenis	68.632.300	Jenis	75.495.530	Jenis	206.520.830	Sekretariat
				4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Bahan Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	Jenis	46.863.514	Jenis	51.549.865	Jenis	56.704.852	Jenis	155.118.231	Sekretariat
				5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dok	1 Dok	7.879.200	1 Dok	8.667.120	1 Dok	9.533.832	4 Dok	26.080.152	Sekretariat
				6 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Dok	1 Dok	250.000.000	1 Dok	275.000.000	1 Dok	302.500.000	4 Dok	827.500.000	Sekretariat
				7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	1 Dok	401.744.000	1 Dok	441.918.400	1 Dok	486.110.240	4 Dok	1.329.772.640	Sekretariat
			6.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**300.000.000**		**628.500.000**		**2.363.000.000**		**3.291.500.000**	Sekretariat
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang dilakuka				300.000.000		628.500.000		2.363.000.000		3.291.500.000	Sekretariat

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN										Unit Kerja Penanggung Jawab
						INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA						Akhir Periode (2026)		
								2024		2025		2026				
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		
					pemeliharaan/ Rehabilitasi											
				1 Pengadaan mebelair	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan			300.000.000		330.000.000		363.000.000		993.000.000	Sekretariat
				2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan mesin	Jumlah peralatan dan Mesin yang diadakan					298.500.000		500.000.000		798.500.000	Sekretariat
				3 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Dokumen DED Gedung Kantor Dinas Kesehatan Provinsi								1.500.000.000		1.500.000.000	Sekretariat
			7.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**2.994.184.120**		**3.293.602.532**		**3.622.962.785**		**9.910.749.437**	Sekretariat
					Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Dok	2.994.184.120	3 Dok	3.293.602.532	3 Dok	3.622.962.785	3 Dok	9.910.749.437	Sekretariat
				1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Dok	5.149.000	1 Dok	5.663.900	1 Dok	6.230.290	3 Dok	17.043.190	Sekretariat
				2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Dok	800.000.000	1 Dok	880.000.000	1 Dok	968.000.000	3 Dok	2.648.000.000	Sekretariat
				3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan		1 Dok	2.189.035.120	1 Dok	2.407.938.632	1 Dok	2.648.732.495	3 Dok	7.245.706.247	Sekretariat

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN										Unit Kerja Penanggung Jawab
						INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA						Akhir Periode (2026)		
								2024		2025		2026				
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		
						Kantor yang Disediakan										
			8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**3.175.956.698**		**3.493.552.368**		**3.842.907.605**		**10.512.416.671**	Sekretariat
					Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana, Prasarana dan alat yang dilakukan pemeliharaan/ Rehabilitasi		Unit	3.175.956.698	Unit	3.493.552.368	Unit	3.842.907.605	Unit	10.512.416.671	Sekretariat
				1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Unit	645.831.481	Unit	710.414.629	Unit	781.456.092	Unit	2.137.702.202	Sekretariat
				2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan		Unit	76.026.917	Unit	83.629.609	Unit	91.992.570	Unit	251.649.095	Sekretariat
				3 Pemeliharaan /Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Unit	2.454.098.300	Unit	2.699.508.130	Unit	2.969.458.943	Unit	8.123.065.373	Sekretariat
			9	**Peningkatan Pelayanan BLUD**					**300.000.000**		**330.000.000**		**363.000.000**		**993.000.000**	Sekretariat

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN										Unit Kerja Penanggung Jawab
						INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA						Akhir Periode (2026)		
								2024		2025		2026				
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		
					Terlaksananya Pelayanan BLUD yang berkualitas di Fasilitas pelayanan kesehatan				300.000.000		330.000.000		363.000.000		993.000.000	Sekretariat
				1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			300.000.000		330.000.000		363.000.000		993.000.000	Sekretariat

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pembiayaan pembangunan kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan UPTD tahun 2024 diperoleh dari berbagai sumber yaitu APBD Provinsi NTB, APBN dalam bentuk Dana Dekonsentrasi, Dana Pajak Rokok, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBCHT), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan sumber dana lainnya. Untuk pembiayaan bersumber dari Pajak Rokok, DBCHT, DID, DAK dan pendapatan fungsional BLUD dalam pembahasan dan pengalokasiannya selanjutnya akan digabung dalam struktur APBD. Berikut rincian alokasi dana indikatif untuk Tahun 2025

Tabel. 4.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Indikatif
Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						Unit Kerja Penanggung Jawab
					INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026		
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	**Meningkatkan Derajat kesehatan masyarakat**				**Umur Harapan Hidup**	**67,07 Tahun**	**67,98 Tahun**	**166.938.688.307**	**68,29 Tahun**	**192.277.700.617**	
	1.	**Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui Transformasi pelayanan kesehatan**						**106.739.491.732**		**124.386.934.384**	Kadis
					Angka Kematian Ibu per 100.000 KH **(1)**	257-189	257-189		257-189		Kadis
					Angka Kematian Bayi per 1.000 KH **(2)**	24.64 -16.85	24.64-16.85		24.64-16.85		Kadis
					Persentase Keluarga Sehat pada Posyandu Keluarga **(3)**						Kadis
					Prevalensi Stunting **(4)**	33%	12%		<10%		Kadis
					Persentase kepesertaan jaminan Kesehatan /Universal Health Coverage (UHC) **(5)**	89%	97%		100%		Kadis
					Sanitasi Layak **(6)**	83,12%	89,03%		91%		Kadis
					Persentase pemenuhan SPM Pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpostensi bencana daerah provinsi **(7)**	90%	100%		100%		

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						Unit Kerja Penanggung Jawab
					INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026		
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
					Persentase pemenuhan SPM Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB daerah provinsi **(8)**	90%	100%		100%		Kadis
					Persentase Rumah Sakit yang mencapai target SPM **(9)**						Kadis
			1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					**104.157.042.756**		**121.546.240.511**	4 Bidang
				Meningkatnya Kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang komprehensif dengan pendekatan siklus Hidup, pemenuhan SPM layanan dasar, pemantauan wilayah kerja dan peningkatan tata kelola kesehatan masyarakat dan Fasilitas Layanan kesehatan	Persentase Kabupaten/ Kota dengan penurunan kasus kematian ibu 10% **(1)**		100%		100%		Bidang Kesmas
					Persentase Kabupaten/ Kota dengan penurunan kasus kematian anak 5% per tahun **(2)**		100%		100%		Bidang Kesmas
					Persentase kabupaten kota yang telah melaksanakan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer **(3)**		100%		100%		Bidang Kesmas
					Persentase Puskesmas yang melaksanakan pemantauan wilayah kerja **(4)**		100%		100%		Bidang Kesmas
					Persentase Puskesmas dengan tata kelola kesehatan masyarakat yang baik **(5)**		100%		100%		Bidang Kesmas

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						Unit Kerja Penanggung Jawab
					INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026		
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
					Persentase Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) yang dilakukan di daerah terpencil dan sangat terpencil sesuai standar **(6)**	100%	100%		100%		Bidang Kesmas
					Persentase Puskesmas yang menerapkan BLUD **(7)**	66,50%	100%		100%		Bidang Kesmas
					Persentase Balita Wasting **(8)**	7,77%	6,80%		6%		Bidang Kesmas
					Persentse kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (SDG's) **(9)**	3,50%	3,50%		3,50%		Bidang Kesmas
					Proporsi KK dengan akses sanitasi layak (**10)**	83,12%	87,90%		91%		Bidang Kesmas
					Persentase kabupaten/ kota yang mencapai target imunisasi rutin **(11)**		95%		95%		Bidang P2P
					persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.(SDG's) **(12)**	90%	100%		100%		Bidang P2P
					Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ART) **(13)**	99,90%	70%		90%		Bidang P2P
					Persentase cakupan penemuan & pengobatan kasus TBC **(14)**	43,25%	90%		90%		Bidang P2P
					Persentase kabupaten/ kota yang mencapai API < 1/1000 **(15)**	100%	100%		100%		Bidang P2P

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						Unit Kerja Penanggung Jawab
					INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026		
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
					Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat (**16**)	90%	90%		90%		Bidang P2P
					Persentase pengobatan penyakit menular pada balita **(17)**	NA	90%		90%		Bidang P2P
					Persentase skrining penyakit menular pada kelompok berisiko **(18)**	100%	100%		90%		Bidang P2P
					Persentase Kabupaten/ Kota yang mencapai eliminasi penyakit tropis terabaikan (**19**)	30%	70%		100%		Bidang P2P
					Persentase kabupaten/ kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM **(20)**	74,50%	100%		100%		Bidang P2P
					Persentase kabupaten/kota yang melakukan pengendalian faktor risiko PTM **(21)**	NA	100%		100%		Bidang P2P
					Persentase kab/ kota yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/ wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/ wabah **(22)**	100%	100%		100%		
					Persentase kab/kota yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/ wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/ wabah **(23)**	90%	100%	7.539.639.800	100%	8.293.603.780	Bidang P2P

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						Unit Kerja Penanggung Jawab
					INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026		
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
					persentase pelayanan kesehatanbagi penduduk pada kondisi KLB provinsi**(24)**	90%	100%	2.068.385.000	100%	2.275.223.500	
					Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Masyarakat Miskin melalui PPI-JK oleh Pemerintah **(25)**		100%	76.963.734.186	100%	84.660.107.604	Bidang Yankes
					Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi **(26)**	49,17%	56%	2.795.490.143	60,10%	3.075.039.157	Bidang Yankes
					Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah dengan capaian penilaian Indiakator Mutu Nasional > 81 **(27)**		85%		90%		Bidang Yankes
					Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan **(28)**		97%	34.095.669.753	97%	34.095.669.753	Bidang Yankes
			1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM & UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								
				Terlaksananya penyediaan obat dan BMHP di provinsi NTB	Persentase permintaan obat program dan buffer stock provinsi yang dilayani	100%	100%	37.505.236.728	100%1	41.497.760.401	

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						Unit Kerja Penanggung Jawab
					INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026		
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			1. Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas		1		1	242.000.000	
			2. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			37.175.236.728		40.892.760.401	
			3. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Dok	1 Dok	330.000.000	1 Dok	363.000.000	

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN					Unit Kerja Penanggung Jawab
						INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			2.	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**					**102.190.706.235**		**119.383.270.338**	3 Bidang
					Terlaksananya pembinaan dan pengawasan tehadap pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Kasus Kematian ibu dengan penurunan kasus 10% Per tahun (1)	97 Kasus	70 Kasus		63 Kasus		Bidang Kesmas
						Jumlah Kasus Kematian bayi dengan penurunan kasus 5% Per tahun (2)	788 Kasus	607 Kasus		576 Kasus		Bidang Kesmas
						Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (3)		95%		97%		Bidang Kesmas
						persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar (SPM-1) (4)	88,00%	100%		100%		Bidang Kesmas
						persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar (SPM-2) (5)	87,50%	100%		100%		Bidang Kesmas
						Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai Standar (SPM-3) (6)	95,80%	100%		100%		Bidang Kesmas
						Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar (SPM-4) (7)	98,00%	100%		100%		Bidang Kesmas
						Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar (SPM-5) (8)	79,30%	100%		100%		Bidang Kesmas

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						Unit Kerja Penanggung Jawab
						INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026		
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
						Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai Standar (SPM-6) (9)	69,00%	100%		100%		Bidang Kesmas
						Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai Standar (SPM-7) (10)	73,30%	100%		100%		Bidang Kesmas
						Jumlah Bayi yang mendapatkan pelayanan pengukuran dan penimbangan berat badan sesuai standar (11)	80,00%	86,00%		89,00%		Bidang Kesmas
						Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai Standar (SPM-8) (12)		100%		100%		Bidang P2-P
						Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ART) (13)	99,90%	70%		90%		Bidang P2P
						Persentase cakupan penemuan & pengobatan kasus TBC (14)	43,25%	90%		90%		Bidang P2P
						Persentase kabupaten/ kota yang mencapai API < 1/1000 (15)	100%	100%		100%		Bidang P2P
						Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat (16)	90%	90%		90%		Bidang P2P
						Persentase pengobatan penyakit menular pada balita (17)	NA	90%		90%		Bidang P2P
						Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat antigen baru (18)		100%		100%		Bidang P2P

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						Unit Kerja Penanggung Jawab
						INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026		
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
						Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan baduta (19)		100%		100%		Bidang P2P
						Persentase anak yang mendapatkan imunisasi lanjutan lengkap di usia sekolah dasar (20)		100%		100%		Bidang P2P
						Persentase wanita usia subur yang memiliki status imunisasi T2+ (21)		100%		100%		Bidang P2P
						berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (22)"		100%		100%		Bidang P2P
						persentase penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (23)		100%		100%		Bidang P2P
						Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia yang mendapatkan skrining HIV (24)		90%		90%		Bidang P2P
						Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART (25)		90%		90%		Bidang P2P

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						Unit Kerja Penanggung Jawab
						INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026		
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
						Persentase keberhasilan pengobatan TBC (26)		90%		90%		Bidang P2P
						Persentase kabupaten/ kota yang mencapai Positivity Rate (PR) < 5% (27)		80%		80%		Bidang P2P
						Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu (28)		90%		90%		Bidang P2P
						Persentase pengobatan kasus pneumonia sesuai standar (29)		95%		95%		Bidang P2P
						Persentase pengobatan kasus diare sesuai standar (30)		85%		85%		Bidang P2P
						Persentase kabupaten/ kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan C pada populasi berisiko (31)		100%		100%		Bidang P2P
						Persentase pasien sifilis yang diobati (31)		90%		90%		Bidang P2P
						jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (SDG's) (32)		100%		100%		Bidang P2P
						Persentase kabupaten/ kota eliminasi rabies (33)		50%		50%		Bidang P2P
						Persentase kabupaten/kota dengan Insiden Rate (IR) DBD ≤ 10 per 100.000 penduduk (34)		95%		95%		Bidang P2P

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						Unit Kerja Penanggung Jawab
						INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026		
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
						Persentase penduduk sesuai kelompok usia yang dilakukan skrining PTM (35)		90%		90%		Bidang P2P
						Jumlah kabupaten/ kota yang melakukan pelayanan terpadu (Pandu) PTM di ≥ 80% puskesmas (36)		100%		100%		Bidang P2P
						Persentase penyandang hipertensi yang tekanan darahnya terkendali di puskesmas/FKTP (37)		90%		90%		Bidang P2P
						Persentase penyandang diabetes melitus yang gula darahnya terkendali di puskesmas/FKTP (38)		90%		90%		Bidang P2P
						Persentase kabupaten/ kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) (39)		100%		100%		Bidang P2P
						Persentase kabupaten/ kota yang melakukan pelayanan Upaya Berhenti Merokok (40)		80%		90%		Bidang P2P
						Persentase penduduk usia > 15 tahun dengan risiko masalah kesehatan jiwa yang mendapatkan skrining (41)		80%		90%		Bidang P2P
						Persentase Penyandang Gangguan Jiwa yang Memperoleh layanan di fasyankes (42)		90%		90%		Bidang P2P

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						Unit Kerja Penanggung Jawab
						INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026		
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
						Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM-11) (43)		100%		100%		Bidang P2P
						Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabiltasi medis (44)		370 Orang		380 Orang		Bidang P2P
						Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Masyarakat Miskin melalui PPI-JK oleh Pemerintah (45)	100%	100%		100%		Bidang Yankes
						Persentase RS. Puskesmas dan PSC dengan pemanfaatan Sisrute (46)	51,83%	66%		74,66%		Bidang Yankes
						Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan dengan capaian Indikator Nasional Mutu (INM) >81 (47)		67,23%		70,03%		Bidang Yankes
				1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		33.673 Pddk	7.539.639.800	34.767 Pddk	8.293.603.780	

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						Unit Kerja Penanggung Jawab
					INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026		
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi Sesuai Standar	Jumlah orang yang mendapat pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi		18.816 Pddk	2.068.385.000	19.427 Pddk	2.275.223.500	
			3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1 Dok	1 Dok	1.200.100.272	1 Dok	8.293.603.780	
			4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dok	1 Dok	880.000.000	1 Dok	968.000.000	
			5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Lanjut	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	1 Dok	1 Dok	550.000.000	1 Dok	605.000.000	
			6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Balita Stunting			1.096.537.200		1.206.190.920	1 Dok
			7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dok	1 Dok	271.046.600	1 Dok	298.151.260	1 Dok

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						Unit Kerja Penanggung Jawab
					INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026		
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dok	1 Dok	7.411.003.600	1 Dok	8.152.103.960	1 Dok
			9 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dok	1 Dok	515.716.300	1 Dok	567.287.930	1 Dok
			10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Terlaksananya pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dok	1 Dok	27.500.000	1 Dok	30.250.000	1 Dok
			11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dok	1 Dok	825.000.000	1 Dok	907.500.000	
			12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dok	1 Dok	55.347.864	1 Dok	60.882.650	
			13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dok	1 Dok	198.000.000	1 Dok	217.800.000	

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						Unit Kerja Penanggung Jawab
					INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026		
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dgn Kecanduan NAPZA	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis	1 Dok	1 Dok	174.151.518	1 Dok	191.566.670	
			15 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya pembinaan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dok	1 Dok	76.963.734.186	1 Dok	84.660.107.604	
			16 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen Analisis Faktor Resiko KLB yang dihasilkan	1 Dok	1 Dok	494.615.000	1 Dok	544.076.500	
			17 Koordinasi & Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kab/ Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Laporan SPM Kab/Kota	1 Dok	1 Dok	117.775.273	1 Dok	129.552.800	
			18 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya pembinaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dok	1 Dok	440.000.000	1 Dok	484.000.000	
			19 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Terlaksananya Verfikasi Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	1 Dok	1 Dok	70.465.472	1 Dok	77.512.019	

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						Unit Kerja Penanggung Jawab
					INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026		
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			20 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kab/Kota	Terlaksananya Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	88.000.000	1 Dok	96.800.000	
			21 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Tersedianya & terlaksananya pengelolaan Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	6 PSC	8 PSC	258.500.000	10 PSC	284.350.000	
			22 Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Terlaksananya Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah RS yang melaksanakan SISRUTE	32 Rumah Sakit	42 Rumah Sakit	60.188.150	44 Rumah Sakit	66.206.965	
			23 Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Terlaksananya Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Analisa Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1 Dok	1 Dok	385.000.000	1 Dok	423.500.000	
			24 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer	0	176 Puskesmas	500.000.000	176 Puskesmas	550.000.000	

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN					Unit Kerja Penanggung Jawab
						INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			3.	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**					**633.600.000**		**696.960.000**	
					Terwujudnya sistem informasi kesehatan terintegrasi	Persentase Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah yang memiliki sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi			633.600.000		696.960.000	
				1. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dok	1 Dok	633.600.000	1 Dok	696.960.000	
			4	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**					**1.332.736.521**		**1.466.010.173**	
					Terlaksananya pembinaan dan pengawasan tata kelola rumah sakit dan Fasilitas Pelayanan kesehatan lainnya	Persentase rumah sakit dan Fasilitas pelayanan kesehatan lain yang menerapkan tata kelola sesuai standar	220		1.332.736.521		1.466.010.173	Bidang Yankes
				1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	220	420	49.500.000	420	54.450.000	Bidang Yankes
				2 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit Sesuai Standar	Jumlah RS yang dibina tentang tata kelola Rumah Sakit	44	44	81.737.321	44	89.911.053	Bidang Yankes

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN					Unit Kerja Penanggung Jawab
					INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			3 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan dengan capaian Indikator Nasional Mutu (INM) sesuai target tahunan	226	240	1.201.499.200	250	1.321.649.120	Bidang Yankes
			2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					**1.217.128.000**		**1.338.840.800**	Bidang SDK
				Meningkatnya Layanan kesehatan melalui Pemenuhan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	Persentase Fasilitas kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	75%	90%	**1.217.128.000**	90%	**1.338.840.800**	Bidang SDK
			1. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi					**73.700.000**		**81.070.000**	
				Tersusunnya dokumen perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan minimal 9 Tenaga Kesehatan di puskesmas dan 7 dokter Spesilias di Rumah Sakit	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar 7 dokter Spesilias di Rumah Sakit	75,43%		73.700.000		81.070.000	Bidang SDK
					Persentase RSUD Kabupaten/Kota dengan 7 dokter spesialis (4 spesialis dasar dan 3 spesialis Penjenjang) di Provinsi NTB	57%	**65%**		**70%**		

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						Unit Kerja Penanggung Jawab
					INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026		
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			1 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah dokumen rencana pemenuhan minamal 9 Tenaga Kesehatan di pusk dan & Tenaga Pseialis Di Kabupaten/Kota Provinsi NTB	1 Dok	1 Dok	35.200.000	1 Dok	38.720.000	Bidang SDK
			2 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terpenuhinya pemerataan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	1 Dok	1 Dok	38.500.000	1 Dok	42.350.000	Bidang SDK
			2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					**1.143.428.000**		**1.257.770.800**	Bidang SDK
				Terpenuhinya upaya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM Kesehatan tingkat daerah provinsi	Persentase SDM Kesehatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang meningkat	2,50%	5%	1.143.428.000	**10%**	1.257.770.800	Bidang SDK
			1 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen pelaksanaan Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dok	1 Dok	1.100.000.000	1 Dok	1.210.000.000	Bidang SDK

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						Unit Kerja Penanggung Jawab
					INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026		
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			2 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	1 Dok	1 Dok	43.428.000	1 Dok	47.770.800	Bidang SDK
			3. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					**144.320.976**		**158.753.073**	Bidang SDK
				Meningkatnya Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas sarana prasarana, Produk Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, serta Pengawasan Keamanan Makanan dan Minuman	Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Syarat		95%	**144.320.976**	97%	**158.753.073**	Bidang SDK
			1. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)					**105.820.976**		**116.403.073**	Bidang SDK
				Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pada sarana PBF (Pedagang besar Farmasi) dan PAK (Penyalur Alat Kesehatan)	Persentase PBF dan PAK yang memenuhi syarat	Sarana	Sarana	105.820.976	Sarana	116.403.073	Bidang SDK
			1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan			105.820.976		116.403.073	Bidang SDK

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						Unit Kerja Penanggung Jawab
					INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026		
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			2. Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT					**38.500.000**		**42.350.000**	
				Terlaksananya pembinaan dan pengawasan usaha kecil obat tradisional (UKOT)	Persentase UKOT yang memenuhi syarat		100%	38.500.000	100%	42.350.000	Bidang SDK
			1. Pengendalian Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional		100%	38.500.000	100%	42.350.000	Bidang SDK
			4. PROGRAM PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					**1.221.000.000**		**1.343.100.000**	Bidang Kesmas
				Penguatan UKBM dan Keterlibatan Aktif Masyarakat melalui Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Kader Kesehatan, Advokasi dan Aksi Lintas Sektoral	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif	70%	80%	**1.221.000.000**	80%	**1.343.100.000**	Bidang Kesmas
			1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					**770.000.000**		**847.000.000**	Bidang Kesmas
				Meningkatnya Posyandu aktif	Persentase Kab/Kota yang memiliki Posyandu Aktif Minimal 90%		80%	770.000.000	80%	847.000.000	Bidang Kesmas

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						Unit Kerja Penanggung Jawab
					INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026		
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			1. Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten /Kota yang di advokasi dan disfasilitasipengembangan Posyandu aktif:		7 Kab /Kota	770.000.000	7 Kab /Kota	847.000.000	Bidang Kesmas
			2. Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih & Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Prov					**275.000.000**		**302.500.000**	Bidang Kesmas
				Terlaksananya Perilaku Hidup bersih dan sehat masyarakat di Kab/Kota	Persentase Puskesmas yang dibina PHBS		17%	275.000.000	23%	302.500.000	Bidang Kesmas
			1. Penyelengga raan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat meliputi penggerkan masy dan media edukasi.	1 Dok	1 Dok	275.000.000	1 Dok	302.500.000	Bidang Kesmas
			3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi					**176.000.000**		**193.600.000**	Bidang Kesmas
				Meningkatnya peran UKBM di Kab/Kota	Jumlah UKBM Aktif	7506 UKBM	7645 UKBM	176.000.000	7705 UKBM	193.600.000	Bidang Kesmas
			1. Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Terlaksananya Bimbingan teknis UKBM	Jumlah Kabupaten yang mendapatkan Bimbingan Teknis UKBM		10 Kab/ Kota	176.000.000	10 Kab/ Kota	193.600.000	Bidang Kesmas

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						Unit Kerja Penanggung Jawab
					INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026		
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
	2.	**Meningkatnya tata kelolah pemerintahan yang akuntabel di tingkat Perangkat daerah**			**1. Nilai Sakip perangkat Daerah**	BB	BB	**60.199.196.575**	A	**67.890.766.233**	
					2. Persentase Penerimaan PAD pada UPT Dinas Kesehata Provinsi Nusa Tenggaea Barat	303.867.241.785	10-15%	334253965964 - 349447328053	>15%	> 349447328053	
			5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					**60.199.196.575**		**67.890.766.233**	
				Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Perencanaan dan Anggaran serta	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah		100%	**60.199.196.575**	100%	**67.890.766.233**	Sekretariat
				Pengelolaan Manajemen dan Administrasi Pemerintahan	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada UPT. Dinas Kesehatan Provinsi NTB	597.500.000	10-15%	**657250000 - 687125000**	>15%	**> 687125000**	
					Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Balai Labratorium Kesehatan dan Kalibrasi (LLPAD	9.497.043.900	10-15%	10446748290 - 10921600485	>15%	> 10921600485	
					Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Mata (LLPAD)	22.706.400.000	10-15%	24977040000 - 26112360000	>15%	> 26112360000	
					Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma (LLPAD)	20.012.000.000	10-15%	22013200000 - 23013800000	>15%	> 23013800000	
					Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Manambai (LLPAD)	8.692.388.500	10-15%	9561627350 - 18688635275	>15%	> 18688635275	

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						Unit Kerja Penanggung Jawab
					INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026		
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**1.005.826.800**		**1.106.409.480**	Sekretariat
				Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu		100%	1.005.826.800	100%	1.106.409.480	Sekretariat
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	302.411.417	1 Dok	332.652.559	Sekretariat
			2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	19.341.850	1 Dok	21.276.035	Sekretariat
			3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	33.979.440	1 Dok	37.377.384	Sekretariat
			4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	66.064.460	1 Dok	72.670.906	Sekretariat

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						Unit Kerja Penanggung Jawab
						INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026		
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
				5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	34.046.320	1 Dok	37.450.952	Sekretariat
				6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	1 Dok	46.374.460	1 Dok	51.011.906	Sekretariat
				7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	503.608.853	1 Dok	553.969.738	Sekretariat
			2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**49.036.228.901**		**53.939.851.791**	Sekretariat
					Teralaksananya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pelayanan administrasi keuangan			49.036.228.901		53.939.851.791	Sekretariat
				1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji			48.616.645.936		53.478.310.530	Sekretariat

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						Unit Kerja Penanggung Jawab
					INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026		
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dok	390.295.685	1 Dok	429.325.253	Sekretariat
			3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan keuangan akhir tahun yang disusun		1 Dok	17.187.280	1 Dok	18.906.008	Sekretariat
			4 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1 Dok	4.400.000	1 Dok	4.840.000	Sekretariat
			5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Dok	5.500.000	1 Dok	6.050.000	Sekretariat
			6 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dok	2.200.000	1 Dok	2.420.000	Sekretariat

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						Unit Kerja Penanggung Jawab
						INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026		
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			3.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**					**154.000.000**		**169.400.000**	Sekretariat
					Terwujudnya ketertiban admisnistasi Barang Milik Daerah Perangkat Daearah	Jumlah Jenis pelayanan administrasi Barang Milik Daerah			154.000.000		169.400.000	Sekretariat
				1 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			137.500.000		151.250.000	Sekretariat
				2 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			11.000.000		12.100.000	Sekretariat
				3 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			5.500.000		6.050.000	Sekretariat
			4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daera**					**467.500.000**		**514.250.000**	Sekretariat
					Terlaksananya ketertiban administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen adminsistrasi kepegawaian yang dilaksnakan		1 Dok	467.500.000	1 Dok	514.250.000	Sekretariat
				1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Dok	27.500.000	1 Dok	30.250.000	Sekretariat

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						Unit Kerja Penanggung Jawab
						INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026		
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
				2 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		1 Dok	55.000.000	1 Dok	60.500.000	Sekretariat
				3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		1 Dok	330.000.000	1 Dok	363.000.000	Sekretariat
				4 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Dok	27.500.000	1 Dok	30.250.000	Sekretariat
				5 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			27.500.000		30.250.000	Sekretariat
			5.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**1.789.985.974**		**1.968.984.572**	Sekretariat
					Terlaksananya ketertiban administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen adminsistrasi umum yang dilaksnakan	1 Dok	1 Dok	1.789.985.974	1 Dok	1.968.984.572	Sekretariat
				1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	Jenis	47.873.100	Janis	52.660.410	Sekretariat
				2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jenis	Jenis	896.345.189	Jenis	985.979.708	Sekretariat
				3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis	Jenis	68.632.300	Jenis	75.495.530	Sekretariat

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						Unit Kerja Penanggung Jawab
						INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026		
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
				4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Bahan Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	Jenis	51.549.865	Jenis	56.704.852	Sekretariat
				5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dok	1 Dok	8.667.120	1 Dok	9.533.832	Sekretariat
				6 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Dok	1 Dok	275.000.000	1 Dok	302.500.000	Sekretariat
				7 Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	1 Dok	441.918.400	1 Dok	486.110.240	Sekretariat
			6.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**628.500.000**		**2.363.000.000**	Sekretariat
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang dilakuka pemeliharaan/ Rehabilitasi				628.500.000		2.363.000.000	Sekretariat
				1 Pengadaan mebelair	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan			330.000.000		363.000.000	Sekretariat
				2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan mesin	Jumlah peralatan dan Mesin yang diadakan			298.500.000		500.000.000	Sekretariat
				3 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Dokumen DED Gedung Kantor Dinas Kesehatan Provinsi						1.500.000.000	Sekretariat

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						Unit Kerja Penanggung Jawab
					INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026		
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**3.293.602.532**		**3.622.962.785**	Sekretariat
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Dok	3.293.602.532	3 Dok	3.622.962.785	Sekretariat
			1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Dok	5.663.900	1 Dok	6.230.290	Sekretariat
			2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Dok	880.000.000	1 Dok	968.000.000	Sekretariat
			3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Dok	2.407.938.632	1 Dok	2.648.732.495	Sekretariat
			8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**3.493.552.368**		**3.842.907.605**	Sekretariat
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana, Prasarana dan alat yang dilakukan pemeliharaan/ Rehabilitasi		Unit	3.493.552.368	Unit	3.842.907.605	Sekretariat
			1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Unit	710.414.629	Unit	781.456.092	Sekretariat

No	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						Unit Kerja Penanggung Jawab
					INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BASELINE (2022)	TARGET KINERJA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026		
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan		Unit	83.629.609	Unit	91.992.570	Sekretariat
			3 Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Unit	2.699.508.130	Unit	2.969.458.943	Sekretariat
			9 Peningkatan Pelayanan BLUD					**330.000.000**		**363.000.000**	Sekretariat
				Terlaksananya Pelayanan BLUD yang berkualitas di Fasilitas pelayanan kesehatan				330.000.000		363.000.000	Sekretariat
			1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			330.000.000		363.000.000	Sekretariat

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 disusun agar menjadi acuan dan pedoman bagi pelaksana program kegiatan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam Renja termuat usulan program kegiatan Dinas Kesehatan beserta UPTD baik yang pembiayaannya bersumber dari APBD, APBN maupun sumber-sumber lainnya yang sah beserta tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja selama 1 (satu) tahun.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat lebih terarah dan terukur, serta dapat dijadikan sebagai media untuk melakukan evaluasi tingkat keberhasilan tolak ukur kinerja kegiatan yang dapat mencerminkan keberhasilan kinerja Dinas Kesehatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Kami menyadari, dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024 ini masih banyak terdapat kekurangan, maka kritik serta saran membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) mendatang pada kesempatan ini juga kami menyampaikan ucapan terimakasih kami kepada semua pihak yang sudah membantu dalam proses penyusunan Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB tahun 2025



BAPPEDA PROVINSI NTB

RENJA TAHUN 2025

bappeda.ntbprov.go.id

1. KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat telah selesai dengan baik. Penyusunan Renja ini merupakan wujud komitmen Bappeda Provinsi NTB dalam rangka mencapai target indikator tujuan, dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Renja Tahun 2025 Bappeda Provinsi NTB ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026 Bappeda Provinsi NTB dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 Provinsi NTB. Renja ini memuat gambaran menyeluruh tentang rencana kegiatan dan program yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi NTB selama satu tahun anggaran.

Penyusunan Renja ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, disampaikan terima kasih kepada seluruh Tim Penyusun Renja dan pihak-pihak lain yang memberikan dukungan antara lain tim Asistensi Bappeda dan Inspektorat Provinsi NTB. Renja ini tentunya masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan Renja di masa yang akan datang.

Demikian, semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Bappeda Provinsi NTB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien.

Mataram, Juli 2024
KEPALA BAPPEDA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 199403 1 153

2. DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.4 Sistematika Penulisan 7
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA 2019-2023 ..... **8**
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2022 dan Capaian Renstra Bappeda Provinsi NTB Tahun 2019-2023 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 19
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 20
2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat 20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat 33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN **34**
3.1 Telahaan Terhadap Kebiajakan Nasional 34
3.2 Tujuan dan Sasaran 35
3.3 Program Kegiatan 36
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN **55**
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan 55
4.2 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi 72
BAB V PENUTUP **73**
5.1 Kaidah Kaidah Pelaksanaan 73
5.2 Rencana Tindak Lanjut 73

3. DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2022.....9
Tabel 2. 2 Capaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi NTB Tahun 2019-2023 19
Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Provinsi Nusa Tenggara Barat.....21

Tabel 3. 1 Tabel Uraian Program dan kegiatan Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 dengan rincian keterangan sub output.....36

Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024.....56

4. BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sejak tahun 2024 telah mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 yakni Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB Tahun 2024-2026. RPD merupakan amanat dari Pemerintah pusat untuk memastikan setiap daerah memiliki acuan pembangunan yang selaras dengan pemerintah pusat. Pada tataran perangkat daerah, RPD telah dijabarkan menjadi dokumen Rencana strategis (Rentsra) tahun 2024-2026. Untuk pelaksanaan tahunannya renstra kemudian didetailkan menjadi Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah. Selain itu, renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan rencana kerja tahunan pada tingkat pemerintah daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah masih berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a) persiapan penyusunan;
b) penyusunan rancangan awal;
c) penyusunan rancangan
d) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e) perumusan rancangan akhir; dan
f) penetapan.

Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra dan pada akhirnya Renja Bappeda Provinsi NTB digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bappeda Provinsi NTB untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);

10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6841);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemeirntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6178);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);

19. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);

20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

22. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

23. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26);

32. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 32); sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 98);

33. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor Noreg Peraturan Daerah Provinsi NTB: 12/297/2017).

34. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (11/320/2016), Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114); sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 14, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat: (14-263/2021), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 184;

35. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pengarusutamaan Gender Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 39);

36. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 45 tahun 2021 tentang Nusa Tenggara Barat Satu Data (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 45);

37. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 77 tahun 2022 tentang Pedoman Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Satu Data (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 77);

38. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 9 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

39. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 17 tahun 2023 tentang Rencanan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;

40. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:

1) pelaksanaan pelayanan Perangkat;
2) pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
3) penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat:

1.1 Latar belakang;
1.2 Dasar hukum Penyusunan;
1.3 Maksud dan tujuan;
1.4 Sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Bab ini memuat:

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra;
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan;
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi;
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat:

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab Ini memuat:

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan
4.2 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi

BAB V. PENUTUP

Bab Ini memuat:

5.1 Kaidah Kaidah Pelaksanaan
5.2 Rencana Tindak Lanjut

5. BAB II EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA 2024-2026

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 didasarkan pada Perubahan Renstra Bappeda Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

1.5 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2023 dan Capaian Renstra Bappeda Provinsi NTB Tahun 2019-2023

Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 telah dilakukan secara optimal dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Renja Bappeda Tahun 2022 merencanakan 3 (tiga) program, 13 kegiatan, dan 65 sub kegiatan, selanjutnya dalam APBD Tahun 2022 dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) program, 15 kegiatan, dan 65 sub kegiatan. Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2022 dan pencapaian Renstra Bappeda sampai dengan Tahun 2022, disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2022

Berdasarkan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2022, yaitu:

1. Target program dan kegiatan Renja Tahun 2022 berisi Target program dan kegiatan yang telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Terdapat 2 program penyelenggaran urusan dan Program Penujang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
2. Secara keseluruhan realisasi kinerja program dan kegiatan telah tercapai. Namun perlu perlu dilakukan perbaikan indikator dan pengukuran hasil kinerja yang lebih akurat untuk meningkatkan outcome atau capaian sasaran sasaran.
3. Adapun detail informasi realisasi kinerja progam dan kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.1 dan tabel

1.6 Analisis Kinerja Pelayanan

Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi NTB didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Capaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi NTB Tahun 2019-2023

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian		Proyeksi	Catatan analisi
		2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Persentase Konsistensi Antar Program Perencanaan (%)	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Renstra organisasi perangkat daerah yang memenuhi kriteria berkualitas (%)	-	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase RPJMD kabupaten/kota yang memenuhi kriteria berkualitas (%)	-	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Capaian Indikator Sasaran Pembangunan Daerah (%)		100	68	70	58,25	68	70	

1.7 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah, mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku koordinator perencanaan pembangunan dalam melaksanakan amanat peraturan perudangan dimaksud agar dapat terselenggara secara optimal, maka dalam penyusunan Rencana Kerja perlu direncanakan secara matang. Untuk itu, dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan isu-isu tugas dan fungsi yang berkembang, antara lain:

1. Penguatan koordinasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah antar sektor melalui rencana aksi yang lebih komprehensif
2. Penguatan Peran tim Kerja perencanaan pembangunan daerah untuk dapat mengawal perencanaan, pengendalian dan monitoring evaluasi sesuai tahapan, tepat waktu dan substansif.
3. Penguatan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dalam monitoring evaluasi triwulanan sebagai bentuk pengendalian terhadap capaian perencanaan pembangunan daerah.
4. Penguatan kolaborasi lintas sektor untuk perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

1.8 Review terhadap rancangan Awal RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan Rancangan awal RKPD tahun 2024 serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Provinsi Nusa Tenggara Barat

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		1.) Persentase Dokumen Perencanaan daerah berkualitas yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	100	%	2,735,003,500	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		1.) Persentase Dokumen Perencanaan daerah berkualitas yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	75	%	4,849,140,120
			2.) Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan indikator makro dan kabupaten-kota yang ditindaklanjuti	75	%				2.) Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan indikator makro dan kabupaten-kota yang	75	%	

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
									ditindaklanjuti			
			3) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tercapai	**100**	**%**				**3) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tercapai**	**100**	**%**	
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Mataram	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemerintah	3	dokumen	2,278,596,880	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Mataram	Jumlah Dokumen Perencanaan	3	dokumen	3,412,290,520

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
			Daerah yang tersusun/direviu sesuai regulasi						Pemerintah Daerah yang tersusun/direviu sesuai regulasi			
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Mataram	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3	dokumen	74,847,360	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Mataram	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3	dokumen	105,114,000
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaa	Mataram	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan	2	dokumen	29,790,000	Koordinasi Penelaahan Dokumen	Mataram	Jumlah Telaahan Dokumen Perencana	2	dokumen	389,390,000

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
	n Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		Pembangunan Daerah Daerah				Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		an Pembangunan Daerah Daerah			
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Mataram	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2	Berita Acara	249,700,000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Mataram	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2	Berita Acara	249,700,000
	Koordinasi Pelaksanaaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Mataram	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas	2	Berita Acara	199,950,000	Koordinasi Pelaksanaaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Mataram	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat	2	Berita Acara	214,850,000

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
			Perangkat Daerah						Daerah/Lintas Perangkat Daerah			
	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Mataram	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2	Berita Acara	1,404,375,000	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Mataram	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2	Berita Acara	2,133,302,000
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Mataram	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3	dokumen	319,934,520	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Mataram	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3	dokumen	319,934,520
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	Mataram	Persentase hasil Analisis data dan informasi yang	100	Persen	90,011,800	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	Mataram	Persentase hasil Analisis data dan informasi	100	Persen	290,011,800

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
	Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		digunakan pada penyusunan dokumen perencanaan pembangunan				Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		yang digunakan pada penyusunan dokumen perencanaan pembangunan			
	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Mataram	Jumlah Dokume Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua PerencanaanPembangunan Daerah)	3	Masukan	90,011,800	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Mataram	Jumlah Dokume Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua PerencanaanPembangunan Daerah)	3	Masukan	290,011,800

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Mataram	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	100	Orang	-	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Mataram	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	100	Orang	-
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Mataram	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100	Orang	-	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Mataram	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/ Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaa	100	Orang	-

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
									n Pembangunan Daerah			
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Mataram	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan yang disampaikan tepat waktu	23	Dokumen	366,394,820	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Mataram	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan yang disampaikan tepat waktu	23	Dokumen	546,794,800
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Mataram	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3	Laporan	30,000,000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Mataram	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3	Laporan	62,200,000

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Mataram	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	143	Kerja Sama	61,394,800	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Mataram	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	143	Kerja Sama	61,394,800
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Mataram	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	13	Laporan	125,000,100	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Mataram	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	13	Laporan	183,200,000
	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Mataram	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang	30	dokumen	149,999,920	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Mataram	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/	30	dokumen	240,000,000

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
	Kabupaten/Kota		difasilitasi/Evaluasi				Kabupaten/ Kota		Kota yang difasilitasi/ Evaluasi			
4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Mataram	Presentase Perangkat daerah dan pemerintah daerah kabupaten kota yang telah menerapkan SIPD dengan optimal di bidang pembangunan daerah	100	Persen	-	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Mataram	Presentase Perangkat daerah dan pemerintah daerah kabupaten kota yang telah menerapkan SIPD dengan optimal di bidang pembangunan daerah	100	Persen	600,043,000
	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang	Mataram	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan	1	Dokumen		Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	Mataram	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang	1	Dokumen	236,833,000

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
	Pembangunan Daerah		Daerah yang Dikelola				di Bidang Pembangunan Daerah		Pembangunan Daerah yang Dikelola			
	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Mataram	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1	Dokumen		Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Mataram	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1	Dokumen	160,142,000
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Mataram	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan	1	Dokumen		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Mataram	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangu	1	Dokumen	203,068,000

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
			Daerah Pemerintah Provinsi						nan Daerah Pemerintah Provinsi			
2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras	100	%	8,343,676,380	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras	100	%	13,606,447,380
			2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah yang ditindaklanjuti	75	%				2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah yang ditindaklanjuti	75	%	
			3.) Persentase target tahunan	100	%				3.) Persentase target	100	%	

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
			indikator kinerja tematik bidang teknis yang tercapai						tahunan indikator kinerja tematik bidang teknis yang tercapai			
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Mataram	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah mitra bidang P2M yang selaras	100	Persen	1,916,511,360	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Mataram	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah mitra bidang P2M yang selaras	100	Persen	3,282,118,360
			2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah mitra bidang P2M	75	Persen				2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah mitra	75	Persen	

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
			yang ditindaklanjuti						bidang P2M yang ditindaklanjuti			
			3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang P2M yang tercapai	100	Persen				3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang P2M yang tercapai	100	Persen	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Mataram	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,	24	Dokumen	60,825,640	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,	Mataram	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusuna	24	Dokumen	160,825,640

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
			RPJMD dan RKPD)				RPJMD dan RKPD)		nnya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Mataram	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	24	Laporan	25,521,520	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Mataram	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	24	Laporan	25,521,520
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	Mataram	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	24	Laporan	39,866,360	Pelaksanaan Monitoring dan	Mataram	Jumlah Laporan Hasil Monitoring	24	Laporan	89,866,360

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Mataram	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	24	Laporan	150,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Mataram	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	24	Laporan	250,000,000

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
							Pemerintahan					
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Mataram	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	26	Dokumen	176,572,640	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Mataram	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	26	Dokumen	576,572,640
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangun	Mataram	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen	26	Laporan	30,499,200	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Mataram	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusuna	26	Laporan	30,499,200

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
	an Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		n Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Mataram	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	26	Laporan	113,226,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Mataram	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	26	Laporan	263,226,000

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
							Pembangunan Manusia		Bidang Pembangunan Manusia			
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Mataram	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	26	Laporan	1,320,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Mataram	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	26	Laporan	1,885,607,000
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Mataram	1) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah mitra	100	Persen	5,286,765,720	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Mataram	1) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat	100	Persen	7,434,929,720

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
	(Sumber Daya Alam)		bidang PSDA yang selaras				(Sumber Daya Alam)		Daerah mitra bidang PSDA yang selaras			
			2) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah mitra bidang PSDA yang ditindaklanjuti	75	Persen				2) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah mitra bidang PSDA yang ditindaklanjuti	75	Persen	
			3) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang PSDA yang tercapai	100	Persen				3) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang	100	Persen	

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
									PSDA yang tercapai			
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Mataram	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22	Dokumen	183,002,340	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Mataram	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22	Dokumen	483,002,340
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Mataram	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	22	Laporan	26,502,880	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangun	Mataram	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen	22	Laporan	26,502,880

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
	Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				an Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Mataram	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	22	Laporan	112,400,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Mataram	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	22	Laporan	262,400,000

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
							Perekonomian		Perekonomian			
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Mataram	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	22	Laporan	880,936,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Mataram	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	22	Laporan	1,480,000,000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,	Mataram	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir	12	Dokumen	170,115,400	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Mataram	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang	12	Dokumen	469,215,400

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
	RPJMD dan RKPD)		Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				(RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Mataram	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	12	Laporan	18,928,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Mataram	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	12	Laporan	18,928,000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Mataram	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	12	Laporan	1,475,993,500	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	Mataram	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	12	Laporan	1,975,993,500

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Mataram	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	12	Laporan	2,418,887,600	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Mataram	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	12	Laporan	2,718,887,600
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur	Mataram	1) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah mitra	100	Persen	1,140,399,300	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan	Mataram	1) Persentase Dokumen perencanaan	100	Persen	2,889,399,300

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
	dan Kewilayahan		bidang P2M yang selaras				Kewilayahan		Perangkat Daerah mitra bidang P2M yang selaras			
			2) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah mitra bidang P2M yang ditindaklanjuti	75	Persen				2) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah mitra bidang P2M yang ditindaklanjuti	75	Persen	
			3) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang P2M yang tercapai	100	Persen				3) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang	100	Persen	

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
									P2M yang tercapai			
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Mataram	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8	Dokumen	131,999,800	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Mataram	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8	Dokumen	431,999,800
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Mataram	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	8	Laporan	13,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Mataram	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaa	8	Laporan	13,000,000

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
	Daerah Bidang Infrastruktur		Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		n Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Mataram	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	8	Laporan	90,999,900	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Mataram	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	8	Laporan	190,999,900

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
									Infrastruktur			
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Mataram	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	8	Laporan	250,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Mataram	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	8	Laporan	550,000,000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Mataram	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang	6	Dokumen	60,999,800	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Mataram	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayaha	6	Dokumen	260,999,800

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
	(RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		n yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Mataram	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	6	Laporan	5,500,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Mataram	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	6	Laporan	5,500,000

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Mataram	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	6	Laporan	37,899,900	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Mataram	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	6	Laporan	87,899,900
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Mataram	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD	6	Laporan	549,999,900	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	Mataram	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan	6	Laporan	1,348,999,900

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
	Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		pada Bidang Kewilayahan				Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan			
3	**PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**1. Persentase target indikator program yang tercapai**	**98**	**%**	**27,871,582,970**	**PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**1. Persentase target indikator program yang tercapai**	**98**	**%**	**31,768,021,983**
			2. Persentase realisasi anggaran	**95**	**%**				**2. Persentase realisasi anggaran**	**95**	**%**	
			3. Indeks Kepuasan masyarakat	**Baik**	**Mutu Layanan**				**3. Indeks Kepuasan masyarakat**	**Baik**	**Mutu Layanan**	

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mataram	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	8	dokumen	233,678,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mataram	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	8	dokumen	234,078,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mataram	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	48,528,800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mataram	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	48,928,800
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Mataram	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	28,639,400	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Mataram	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna	1	Dokumen	28,639,400

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
									n Dokumen RKA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mataram	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	35,039,400	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mataram	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	35,039,400
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Mataram	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	dokumen	12,142,800	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Mataram	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	dokumen	12,142,800

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Mataram	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	dokumen	10,307,800	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Mataram	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	dokumen	10,307,800
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mataram	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	99,019,800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mataram	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	99,019,800
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Mataram**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	6	**Jenis**	19,540,654,550	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Mataram**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan**	6	**Jenis**	22,553,463,563

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
									Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Mataram	Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN	110	orang/bulan	19,469,958,870	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Mataram	Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN	110	orang/bulan	22,482,767,883
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Mataram	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	157	dokumen	32,017,400	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Mataram	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	157	dokumen	32,017,400
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Mataram	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	dokumen	5,190,300	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Mataram	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	5	dokumen	5,190,300

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Mataram	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	dokumen	6,683,160	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Mataram	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	dokumen	6,683,160
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mataram	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Laporan	20,138,260	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mataram	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Laporan	20,138,260
	Pengelolaan dan Penyiapan	Mataram	Jumlah Dokumen Bahan	4	dokumen	6,666,560	Pengelolaan dan Penyiapan	Mataram	Jumlah Dokumen Bahan	4	dokumen	6,666,560

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
	Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Mataram**	**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah**	2	**laporan**	75,340,200	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Mataram**	**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah**	2	**laporan**	75,340,200
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Mataram	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	dokumen	75,340,200	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Mataram	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	dokumen	75,340,200
4	**Administrasi Kepegawaia**	**Mataram**	**Jumlah Dokumen laporan**	2	**dokumen**	223,599,100	**Administrasi Kepegawai**	**Mataram**	**Jumlah Dokumen laporan**	2	**dokumen**	223,599,100

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
	n Perangkat Daerah		**pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah**				**an Perangkat Daerah**		**pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah**			
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Mataram	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	dokumen	44,489,100	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Mataram	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	dokumen	44,489,100
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Mataram	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai	1	dokumen	-	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Mataram	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai	1	dokumen	-
	Pendidikan dan Pelatihan	Mataram	Jumlah Pegawai Berdasarkan	25	Orang	179,110,000	Pendidikan dan Pelatihan	Mataram	Jumlah Pegawai Berdasarka	25	Orang	179,110,000

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
	Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		n Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Mataram	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Mataram	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang	-
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Mataram**	**Jumlah dokumen administrasi Umum**	1	**dokumen**	825,216,760	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Mataram**	**Jumlah dokumen administrasi Umum**	1	**dokumen**	825,216,760
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Mataram	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	2	paket	87,182,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Mataram	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	2	paket	87,182,000

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
			Kantor yang Disediakan						Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mataram	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	paket	45,598,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mataram	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	paket	45,598,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mataram	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	70	paket	307,500,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mataram	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	70	paket	307,500,000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Mataram	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	310,694,200	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Mataram	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda	2	paket	310,694,200

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
									an yang Disediakan			
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Mataram	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	dokumen	74,242,560	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Mataram	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	dokumen	74,242,560
6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Mataram**	**Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah**	6	**Jenis**	1,683,682,000	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Mataram**	**Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah**	6	**Jenis**	2,400,682,000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mataram	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	unit	1,303,682,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mataram	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	unit	1,436,682,000

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Mataram	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	6	unit		Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Mataram	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	6	unit	-
	Pengadaan Mebel	Mataram	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	paket		Pengadaan Mebel	Mataram	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	paket	226,000,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mataram	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	unit	380,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mataram	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	unit	738,000,000
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Mataram	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1	unit		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Mataram	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1	unit	-

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mataram	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	unit		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mataram	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	unit	-
7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Mataram**	**Jumlah jenis jasa pelayanan**	4	**Jenis**	3,704,872,360	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Mataram**	**Jumlah jenis jasa pelayanan**	4	**Jenis**	3,794,872,360
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mataram	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	63,362,300	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mataram	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	63,362,300
	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Mataram	Jumlah Laporan Penyediaan	1	Laporan	545,392,500	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Mataram	Jumlah Laporan Penyediaan	1	Laporan	545,392,500

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
	Sumber Daya Air dan Listrik		Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				Sumber Daya Air dan Listrik		Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mataram	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	50,955,060	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mataram	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	50,955,060
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Mataram	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	3,045,162,500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Mataram	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Laporan	3,135,162,500

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
									yang Disediakan			
8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Mataram**	**Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah**	4	**Jenis**	1,584,540,000	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Mataram**	**Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah**	4	**Jenis**	1,660,770,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mataram	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	79	unit	645,610,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mataram	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	79	unit	645,610,000

No.	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	8	9	4		5	8		9
	Pemeliharaan Mebel	Mataram	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50	unit	30,000,000	Pemeliharaan Mebel	Mataram	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50	unit	30,000,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mataram	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	unit	196,850,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mataram	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	unit	214,580,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Mataram	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	712,080,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Mataram	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	unit	770,580,000
						38,950,262,850						**50,223,609,483**

1.9 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan uraian diatas, tidak ada usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat.

6. BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional

1.1 Telahaan Terhadap Kebiajakan Nasional

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025, sebagai berikut:

TEMA PEMBANGUNAN:

"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,"

PRIORITAS NASIONAL:

PRIORITAS 1:

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.

PRIORITAS 2:

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

PRIORITAS 3:

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

PRIORITAS 4:

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

PRIORITAS 5:

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

PRIORITAS 6:

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

PRIORITAS 7:

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Memperhatikan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Tahun 2024, Renja Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 tidak mendukung secara langsung prioritas Prioritas Pembangunan Nasional maupun Provinsi, namun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, maka dukungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pencapaian arah kebijakan Nasional dan Provinsi tahun 2024 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari

RPD dan Rencana Kerja Pemerintah yang memuat rencangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Renja Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rencana Strategis Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 – 2026, adalah sebagai berikut:

TUJUAN

Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, efektif dan efisien untuk mempercepat kemajuan daerah sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi regional Bali – Nusa Tenggara.

Indikator tujuan/target:

1. Nilai SAKIP komponen Perencanaan
2. Persentase Target Prioritas / Indikator Kinerja Utama pada RPD yang tercapai

SASARAN 1

Meningkatnya Sinergitas, Sinkronisasi, dan Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator sasaran/target:

Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

SASARAN 2

Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah

Indikator sasaran/target:

Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindak lanjuti

SASARAN 3

Meningkatnya Peran Koordinatif Bappeda Dalam Pencapaian Target-Target Program Prioritas Daerah

Indikator sasaran/target:

Persentase Indikator Kinerja Utama pada RKPD yang tercapai

1.3 Program Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran rencana kerja, maka langkah selanjutnya yaitu menuangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan. Adapun uraian program dan kegiatan Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari 3 program dan 15 kegiatan dan 69 sub kegiatan, antara lain:

Tabel 3. 1 Tabel Uraian Program dan kegiatan Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 dengan rincian keterangan sub output

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024			Keterangan Sub Output
			Lokasi	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	9
	FUNGSI PENUNJANG URUSANA PERENCANAAN			-	%	-
	TUJUAN Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, efektif dan efisien untuk mempercepat kemajuan daerah sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi regional bali – nusa tenggara	Nilai SAKIP komponen Perencanaan	Mataram	25-26	%	
		Persentase target prioritas pembangunan daerah/Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam RPJMD yang tercapai	Mataram	75	%	-
	SASARAN 1 Meningkatnya Sinergitas, Sinkronisasi, dan Integrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Mataram	Baik	Kategori	-

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024			Keterangan Sub Output
			Lokasi	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	9
	Perencanaan Pembangunan Daerah					
	SASARAN 2 Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah	Presentase Rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti	Mataram	75	%	
	SASARAN 3 Meningkatnya Peran Koordinatif Bappeda dalam pencapaian target-target program prioritas daerah	Persentase Target Tahunan Indikator Kinerja utama yang tertuang dalam RKPD yang tercapai	Mataram	70	%	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.) Jumlah Dok Perencanaan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi	Mataram	3	Dokumen	-
		2.) Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan indikator makro dan kabupaten-kota yang ditindaklanjuti	Mataram	75	%	

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024			Keterangan Sub Output
			Lokasi	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	9
		3) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tercapai	Mataram	100	%	
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah yang tersusun/direviu sesuai regulasi	Mataram	3	dokumen	-
5.01.02.1.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Mataram	3	dokumen	1. Rancangan Teknokratik RPJMD 2025 - 2029 2. Ranwal RKPD 2025 3. Ranwal Perubahan RKPD 2024
5.01.02.1.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Mataram	2	dokumen	1. Telahaan RPJPD dari hasil dua FGD

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024			Keterangan Sub Output
			Lokasi	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	9
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Mataram	2	Berita Acara	1. Berita Acara Forum Konsultasi Publik RPJPD 2025-2045 2. Berita Acara Forum Konsultasi Publik RKPD 2025
5.01.02.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Mataram	2	Berita Acara	7. Berita Acara Forum Perangkat Derah RKPD 2025
5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Mataram	2	Berita Acara	1. Berita Acara Musrenbang RKPD 2025 2. Berita Acara Musrenbang RPJPD 2025-2045
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Mataram	3	dokumen	1. Dokumen RPJPD 2025-2045 2. Dokumen RKPD 2025 3. Dokumen Perubahan RKPD 2024
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil Analisis data dan informasi yang digunakan pada penyusunan dokumen	Mataram	100	Persen	-

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024			Keterangan Sub Output
			Lokasi	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	9
		perencanaan pembangunan				
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokume Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Mataram	3	Masukan	1. Dokumen Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan RPJPD 2025-20452. 2. Dokumen Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan RKPD 20253. 3. Dokumen Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perubahan RKPD 2024
5.01.02.1.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Mataram	100	Orang	Tidak dilaksanakan
5.01.02.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Mataram	100	Orang	Tidak dilaksanakan

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024			Keterangan Sub Output
			Lokasi	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	9
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan yang disampaikan tepat waktu	Mataram	23	Dokumen	-
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Mataram	3	Laporan	1. Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Dokumen RPJPD 2025-2045 2. Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Dokumen RKPD 2025 3. Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Dokumen Perubahan RKPD 2024
5.01.02.1.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Mataram	143	Kerja Sama	1. laporan pengendalian kerjasama daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (1Laporan)

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024			Keterangan Sub Output
			Lokasi	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	9
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Mataram	13	Laporan	1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Prov. NTB TW IV 2023, TW I,II dan III Tahun 2024 (4 Laporan) 2. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TW. IV Tahun 2023, TW I, II dan III Tahun 2024 (4 Laporan) 3. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus TW. IV Tahun 2023,TW I, II dan III Tahun 2024 (4 Laporan)
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang difasilitasi/Evaluasi	Mataram	30	dokumen	1. Laporan Laporan fasilitasi/evaluasi penyusunan RPJPD tahun 2025-2045 Kab/kota (10 dokumen Per Kabupaten kota) 2. Laporan Laporan fasilitasi/evaluasi penyusunan RKPD tahun 2025 Kab/kota (10 dokumen Per Kabupaten kota) 3. Laporan Laporan fasilitasi/evaluasi penyusunan

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024			Keterangan Sub Output
			Lokasi	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	9
						Perubahan RKPD tahun 2023 Kab/kota (10 dokumen Per Kabupaten kota)
5.01.02.104	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Presentase Perangkat daerah dan pemerintah daerah kabupaten kota yang telah menerapkan SIPD dengan optimal di bidang pembangunan daerah	Mataram	100	Persen	-
5.01.02.104.01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Mataram	1	Dokumen	Laporan pengelolaan data dalam sistem Informasi pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah
5.01.02.104.02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem	Mataram	1	Dokumen	Dokumen sesuai indiakor kinerja

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024			Keterangan Sub Output
			Lokasi	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	9
	Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				
5.01.02.104.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Mataram	1	Dokumen	Dokumen sesuai indiakor kinerja
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras	Mataram	100	%	-
		2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah yang ditindaklanjuti	Mataram	75	%	
		3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang teknis yang tercapai	Mataram	100	%	

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024			Keterangan Sub Output
			Lokasi	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	9
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah mitra bidang P2M yang selaras	Mataram	100	Persen	-
		2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah mitra bidang P2M yang ditindaklanjuti	Mataram	75	Persen	
		3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang P2M yang tercapai	Mataram	100	Persen	
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Mataram	24	Dokumen	1. Laporan koordinasi penyusunan Dokumen RPJPD 2025-2045 bidang masing-masing Tim Kerja 2. Laporan koordinasi penyusunan Dokumen RKPD 2025 bidang masing-masing Tim Kerja 3. Laporan koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan RKPD 2024 bidang

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024			Keterangan Sub Output
			Lokasi	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	9
						masing-masing koordinator **(3 Dokumen per Tim Kerja)**
5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Mataram	24	Laporan	1. Laporan Asistensi Penyusunan dan rekomendasi kebijakan Renja 2025 OPD Mitra masing-masing Koordinator 2. Laporan Asistensi Penyusunan dan rekomenasi kebijakan Perubahan Renja 2025 OPD Mitra masing-masing Koordinator **(2 Dokumen per Tim Kerja)**
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Mataram	24	Laporan	1. Laporan Monev tindak lanjut rekomendasi kebijakan dan capaian TW4 tahun 2023 OPD mitra masing-masing Tim Kerja 2. Laporan Monev tindak lanjut rekomendasi kebijakan dan capaian TW2 Tahun 2024 OPD

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024			Keterangan Sub Output
			Lokasi	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	9
						mitra masing-masing Tim Kerja **(2 Dokumen per Tim Kerja)**
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Mataram	24	Laporan	Laporan pelaksanakaan koordinasi Tim Percepatan pelaksanaan SPM
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Mataram	26	Dokumen	1. Laporan koordinasi penyusunan Dokumen RPJPD 2025-2045 bidang masing-masing Tim Kerja 2. Laporan koordinasi penyusunan Dokumen RKPD 2025 bidang masing-masing Tim Kerja 3. Laporan koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan RKPD 2024 bidang masing-masing koordinator **(3 Dokumen per Tim Kerja)**

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024			Keterangan Sub Output
			Lokasi	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	9
5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Mataram	26	Laporan	1. Laporan Asistensi Penyusunan dan rekomendasi kebijakan Renja 2025 OPD Mitra masing-masing Koordinator 2. Laporan Asistensi Penyusunan dan rekomenasi kebijakan Perubahan Renja 2025 OPD Mitra masing-masing Koordinator **(2 Dokumen per Tim Kerja)**
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Mataram	26	Laporan	1. 1. Laporan Monev tindak lanjut rekomendasi kebijakan dan capaian TW4 tahun 2023 OPD mitra masing-masing Tim Kerja 2. Laporan Monev tindak lanjut rekomendasi kebijakan dan capaian TW2 Tahun 2024 OPD mitra masing-masing Tim Kerja **(2 Dokumen per Tim Kerja)**
5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Mataram	26	Laporan	1. Jumlah Laporan Hasil koodinasi TPPS 2. Jumlah Laporan Hasil koodinasi Tim Pokja PPAS3. Jumlah Laporan Hasil koodinasi tim percepatan pelaksanaan Vokasi

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024			Keterangan Sub Output
			Lokasi	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	9
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah mitra bidang PSDA yang selaras	Mataram	100	Persen	-
		2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah mitra bidang PSDA yang ditindaklanjuti	Mataram	75	Persen	
		3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang PSDA yang tercapai	Mataram	100	Persen	
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Mataram	22	Dokumen	1. Laporan koordinasi penyusunan Dokumen RPJPD 2025-2045 bidang masing-masing Tim Kerja 2. Laporan koordinasi penyusunan Dokumen RKPD 2025 bidang masing-masing Tim Kerja 3. Laporan koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan RKPD 2024 bidang

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024			Keterangan Sub Output
			Lokasi	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	9
						masing-masing koordinator **(3 Dokumen per Tim Kerja)**
5.01.03.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Mataram	22	Laporan	1. Laporan Asistensi Penyusunan dan rekomendasi kebijakan Renja 2025 OPD Mitra masing-masing Koordinator 2. Laporan Asistensi Penyusunan dan rekomenasi kebijakan Perubahan Renja 2025 OPD Mitra masing-masing Koordinator **(2 Dokumen per Tim Kerja)**
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Mataram	22	Laporan	1. Laporan Monev tindak lanjut rekomendasi kebijakan dan capaian TW4 tahun 2023 OPD mitra masing-masing Tim Kerja 2. Laporan Monev tindak lanjut rekomendasi kebijakan dan

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024			Keterangan Sub Output
			Lokasi	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	9
		Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				capaian TW2 Tahun 2024 OPD mitra masing-masing Tim Kerja **(2 Dokumen per Tim Kerja)**
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Mataram	22	Laporan	1. Jumlah Laporan koordinasi Tim Sekretariat SDGS 2. Jumlah Laporan Hasil industrialisasi dan percapatan eksport 3. Jumlah Laporan Hasil koodinasi tim Sekretariat Dewan KEK
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Mataram	12	Dokumen	1. Laporan koordinasi penyusunan Dokumen RPJPD 2025-2045 bidang masing-masing Tim Kerja. 2. Laporan koordinasi penyusunan Dokumen RKPD 2025 bidang masing-masing Tim Kerja. 3. Laporan koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan RKPD 2024 bidang

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024			Keterangan Sub Output
			Lokasi	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	9
						masing-masing koordinator. **(3 Dokumen per Tim Kerja)**
5.01.03.1.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Mataram	12	Laporan	1. Laporan Asistensi Penyusunan dan rekomendasi kebijakan Renja 2025 OPD Mitra masing-masing Koordinator . 2. Laporan Asistensi Penyusunan dan rekomenasi kebijakan Perubahan Renja 2025 OPD Mitra masing-masing Koordinator **(2 Dokumen per Tim Kerja)**

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024			Keterangan Sub Output
			Lokasi	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	9
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Mataram	12	Laporan	1. Laporan Monev tindak lanjut rekomendasi kebijakan dan capaian TW4 tahun 2023 OPD mitra masing-masing Tim Kerja 2. Laporan Monev tindak lanjut rekomendasi kebijakan dan capaian TW2 Tahun 2024 OPD mitra masing-masing Tim Kerja **(2 Dokumen per Tim Kerja)**
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Mataram	12	Laporan	1. Laporan Hasil koodinasi Tim Percepatan pembangunan rendah karbon & berketahanan iklim. 2. Laporan Hasil koordinasi i tim Tata Kelola Pembangunan Kewilayahan Berdaya Saing
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah mitra bidang IK yang selaras	Mataram	100	Persen	-
		2) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah mitra bidang IK yang ditindaklanjuti	Mataram	75	Persen	

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024			Keterangan Sub Output
			Lokasi	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	9
		3) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang IK yang tercapai	Mataram	100	Persen	
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Mataram	8	Dokumen	1. Laporan koordinasi penyusunan Dokumen RPJPD 2025-2045 bidang masing-masing Tim Kerja 2. Laporan koordinasi penyusunan Dokumen RKPD 2025 bidang masing-masing Tim Kerja 3. Laporan koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan RKPD 2024 bidang masing-masing koordinator **(3 Dokumen per Tim Kerja)**
5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Mataram	8	Laporan	1. Laporan Asistensi Penyusunan dan rekomendasi kebijakan Renja 2025 OPD Mitra masing-masing Koordinator 2. Laporan Asistensi Penyusunan dan rekomenasi kebijakan Perubahan Renja 2025 OPD Mitra masing-masing

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024			Keterangan Sub Output
			Lokasi	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	9
						Koordinator **(2 Dokumen per Tim Kerja)**
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Mataram	8	Laporan	1. Laporan Monev tindak lanjut rekomendasi kebijakan dan capaian TW4 tahun 2023 OPD mitra masing-masing Tim Kerja 2. Laporan Monev tindak lanjut rekomendasi kebijakan dan capaian TW2 Tahun 2024 OPD mitra masing-masing Tim Kerja **(2 Dokumen per Tim Kerja)**
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Mataram	8	Laporan	Laporan Hasil koodinasi tim percepatan infrastruktur berkelanjutan

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024			Keterangan Sub Output
			Lokasi	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	9
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Mataram	6	Dokumen	1. Laporan koordinasi penyusunan Dokumen RPJPD 2025-2045 bidang masing-masing Tim Kerja 2. Laporan koordinasi penyusunan Dokumen RKPD 2025 bidang masing-masing Tim Kerja 3. Laporan koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan RKPD 2024 bidang masing-masing koordinator **(3 Dokumen per Tim Kerja)**
5.01.03.1.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Mataram	6	Laporan	1. Laporan Asistensi Penyusunan dan rekomendasi kebijakan Renja 2025 OPD Mitra masing-masing Koordinator 2. Laporan Asistensi Penyusunan dan rekomenasi kebijakan Perubahan Renja 2025 OPD Mitra masing-masing Koordinator **(2 Dokumen per Tim Kerja)**

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024			Keterangan Sub Output
			Lokasi	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	9
5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Mataram	6	Laporan	1. Laporan Monev tindak lanjut rekomendasi kebijakan dan capaian TW4 tahun 2023 OPD mitra masing-masing Tim Kerja 2. Laporan Monev tindak lanjut rekomendasi kebijakan dan capaian TW2 Tahun 2024 OPD mitra masing-masing Tim Kerja **(2 Dokumen per Tim Kerja)**
5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Mataram	6	Laporan	Laporan Hasil koodinasi tim Tata Kelola Pembangunan Kewilayahan Berdaya Saing
	SASARAN 4 Meningkatnya Kinerja Bappeda sebagai instansi perencanaan yagn SIIP (Smart, Integrity, Innovation, Professional)	Nilai evaluasi Implementasi SAKIP Bappeda Provinsi NTB	Mataram	A	-	-
5.1.01	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1. Persentase target indikator program yang tercapai	Mataram	98	%	-
		2. Persentase realisasi anggaran	Mataram	95	%	

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024			Keterangan Sub Output
			Lokasi	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	9
		3. Indeks Kepuasan masyarakat	Mataram	Baik	Mutu Layanan	
5.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	Mataram	8	**dokumen**	-
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mataram	2	dokumen	1. Renja Murni 2025 2. Perubahan Renja 2024
5.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Mataram	1	Dokumen	-
5.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mataram	1	Dokumen	-
5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan	Mataram	1	Dokumen	-

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024			Keterangan Sub Output
			Lokasi	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	9
		Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				
5.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Mataram	1	Dokumen	-
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mataram	2	Laporan	- LKJIP 2023 dan Laporan tahunan 2023
5.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Mataram	6	**Jenis**	-
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN	Mataram	110	orang/bulan	-
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Mataram	157	dokumen	-

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024			Keterangan Sub Output
			Lokasi	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	9
5.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Mataram	5	dokumen	-
5.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Mataram	4	dokumen	-
5.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mataram	3	Laporan	-
5.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Mataram	4	dokumen	-
5.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah**	Mataram	2	**laporan**	-

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024			Keterangan Sub Output
			Lokasi	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	9
5.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Mataram	2	dokumen	Dokuemen persemester
5.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah**	Mataram	2	**dokumen**	-
5.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Mataram	1	dokumen	-
5.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Mataram	25	Orang	-
5.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi Umum**	Mataram	1	**dokumen**	-
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Mataram	2	paket	-

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024			Keterangan Sub Output
			Lokasi	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	9
5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Mataram	10	paket	-
5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Mataram	70	paket	-
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Mataram	2	paket	-
5.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Mataram	2	dokumen	-
5.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah**	Mataram	6	**Jenis**	-
5.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Mataram	2	unit	-
5.01.01.1.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Mataram	6	unit	-

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024			Keterangan Sub Output
			Lokasi	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	9
5.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mataram	5	paket	-
5.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Mataram	15	unit	-
5.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jenis jasa pelayanan**	Mataram	4	**Jenis**	-
5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mataram	1	Laporan	-
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Mataram	1	Laporan	-
5.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Mataram	1	Laporan	-
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		1	Laporan	-

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024			Keterangan Sub Output
			Lokasi	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	9
		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Mataram			
5.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah**	Mataram	4	**Jenis**	-
5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Mataram	79	unit	-
5.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Mataram	50	unit	-
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Mataram	10	unit	-
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Mataram	1	unit	-

8. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

2.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ketercapaian tujuan pembangunan. Melalui telahaan terhadap hasil evaluasi terhadap program/kegiatan Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 serta memperhatikan isu-isu strategis bidang perencanaan maka diperoleh rumusan yang terdiri dari 3 program dan 15 kegiatan serta 69 sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2024 dengan lokasi kegiatan sebagian besar berada di Kota Mataram, seperti disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024					keterangan
			Lokasi	Target	Satuan	Kebutuhan Anggaran/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	FUNGSI PENUJANG URUSANA PERENCANAAN			-	%		APBD	-
	TUJUAN Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, efektif dan efisien untuk mempercepat kemajuan daerah sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi regional bali – nusa tenggara	Nilai SAKIP komponen Perencanaan	Mataram	25-26	%		APBD	-
		Persentase target prioritas pembangunan daerah/Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam RPJMD yang tercapai	Mataram	75	%		APBD	-
	SASARAN 1 Meningkatnya Sinergitas, Sinkronisasi, dan Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembanguan Daerah	Mataram	Baik	Kategori		APBD	-

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024					keterangan
			Lokasi	Target	Satuan	Kebutuhan Anggaran/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SASARAN 2 Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah	Presentase Rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti	Mataram	75	%		APBD	-
	SASARAN 3 Meningkatnya Peran Koordinatif Bappeda dalam pencapaian target-target program prioritas daerah	Persentase Target Tahunan Indikator Kinerja utama yang tertuang dalam RKPD yang tercapai	Mataram	70	%		APBD	-
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.) Jumlah Dok Perencanaan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi	Mataram	3	Dokumen	4,849,140,120.00	APBD	-
		2.) Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan indikator makro dan kabupaten-kota yang ditindaklanjuti	Mataram	75	%		APBD	

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024					keterangan
			Lokasi	Target	Satuan	Kebutuhan Anggaran/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tercapai	Mataram	100	%		APBD	-
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah yang tersusun/direviu sesuai regulasi	Mataram	3	dokumen	3,412,290,520.00	APBD	-
5.01.02.1.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Mataram	3	dokumen	105,114,000.00	APBD	-
5.01.02.1.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Mataram	2	dokumen	389,390,000.00	APBD	-

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024					keterangan
			Lokasi	Target	Satuan	Kebutuhan Anggaran/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Mataram	2	Berita Acara	249,700,000.00	APBD	-
5.01.02.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Mataram	2	Berita Acara	214,850,000.00	APBD	-
5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Mataram	2	Berita Acara	2,133,302,000.00	APBD	-
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Mataram	3	dokumen	319,934,520.00	APBD	-
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil Analisis data dan informasi yang digunakan pada penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Mataram	100	Persen	290,011,800.00	APBD	-

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024					keterangan
			Lokasi	Target	Satuan	Kebutuhan Anggaran/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokume Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Mataram	3	Masukan	290,011,800.00	APBD	-
5.01.02.1.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Mataram	100	Orang	-	-	-
5.01.02.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Mataram	100	Orang	-	-	-
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan yang disampaikan tepat waktu	Mataram	23	Dokumen	546,794,800.00	APBD	-

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024					keterangan
			Lokasi	Target	Satuan	Kebutuhan Anggaran/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Mataram	3	Laporan	62,200,000.00	APBD	-
5.01.02.1.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Mataram	143	Kerja Sama	61,394,800.00	APBD	-
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Mataram	13	Laporan	183,200,000.00	APBD	-
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang difasilitasi/Evaluasi	Mataram	30	dokumen	240,000,000.00	APBD	-
5.01.02.104	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Presentase Perangkat daerah dan pemerintah daerah kabupaten kota yang telah menerapkan SIPD dengan optimal di	Mataram	100	Persen	600,043,000.00	APBD	-

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024					keterangan
			Lokasi	Target	Satuan	Kebutuhan Anggaran/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		bidang pembangunan daerah						
5.01.02.10 4.01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Mataram	1	Dokumen	236,833,000.00	APBD	-
5.01.02.10 4.02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Mataram	1	Dokumen	160,142,000.00	APBD	-
5.01.02.10 4.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Mataram	1	Dokumen	203,068,000.00	APBD	-
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras	Mataram	100	%	13,606,447,380.00	APBD	-

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024					keterangan
			Lokasi	Target	Satuan	Kebutuhan Anggaran/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah yang ditindaklanjuti	Mataram	75	%		APBD	
		3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang teknis yang tercapai	Mataram	100	%			-
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah mitra bidang P2M yang selaras	Mataram	100	Persen	3,282,118,360.00	APBD	-
		2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah mitra bidang P2M yang ditindaklanjuti	Mataram	75	Persen			-
		3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang P2M yang tercapai	Mataram	100	Persen			-

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024					keterangan
			Lokasi	Target	Satuan	Kebutuhan Anggaran/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Mataram	24	Dokumen	160,825,640.00	APBD	-
5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Mataram	24	Laporan	25,521,520.00	APBD	-
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Mataram	24	Laporan	89,866,360.00	APBD	-

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024					keterangan
			Lokasi	Target	Satuan	Kebutuhan Anggaran/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Mataram	24	Laporan	250,000,000.00	APBD	-
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Mataram	26	Dokumen	576,572,640.00	APBD	-
5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Mataram	26	Laporan	30,499,200.00	APBD	-

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024					keterangan
			Lokasi	Target	Satuan	Kebutuhan Anggaran/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Mataram	26	Laporan	263,226,000.00	APBD	-
5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Mataram	26	Laporan	1,885,607,000.00	APBD	-
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah mitra bidang PSDA yang selaras	Mataram	100	Persen	7,434,929,720.00	APBD	-
		2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah mitra bidang PSDA yang ditindaklanjuti	Mataram	75	Persen			-

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024					keterangan
			Lokasi	Target	Satuan	Kebutuhan Anggaran/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang PSDA yang tercapai	Mataram	100	Persen			-
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Mataram	22	Dokumen	483,002,340.00	APBD	-
5.01.03.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Mataram	22	Laporan	26,502,880.00	APBD	-
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Mataram	22	Laporan	262,400,000.00	APBD	-

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024					keterangan
			Lokasi	Target	Satuan	Kebutuhan Anggaran/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Mataram	22	Laporan	1,480,000,000.00	APBD	-
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Mataram	12	Dokumen	469,215,400.00	APBD	-
5.01.03.1.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Mataram	12	Laporan	18,928,000.00	APBD	-

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024					keterangan
			Lokasi	Target	Satuan	Kebutuhan Anggaran/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Mataram	12	Laporan	1,975,993,500.00	APBD	-
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Mataram	12	Laporan	2,718,887,600.00	APBD	-
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah mitra bidang IK yang selaras	Mataram	100	Persen	2,889,399,300.00	APBD	-
		2) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah mitra bidang IK yang ditindaklanjuti	Mataram	75	Persen			
		3) Persentase target tahunan indikator kinerja	Mataram	100	Persen			-

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024					keterangan
			Lokasi	Target	Satuan	Kebutuhan Anggaran/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		tematik bidang IK yang tercapai						
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Mataram	8	Dokumen	431,999,800.00	APBD	-
5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Mataram	8	Laporan	13,000,000.00	APBD	-
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Mataram	8	Laporan	190,999,900.00	APBD	-

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024					keterangan
			Lokasi	Target	Satuan	Kebutuhan Anggaran/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Mataram	8	Laporan	550,000,000.00	APBD	
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Mataram	6	Dokumen	260,999,800.00	APBD	-
5.01.03.1.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Mataram	6	Laporan	5,500,000.00	APBD	-
5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Mataram	6	Laporan	87,899,900.00	APBD	-

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024					keterangan
			Lokasi	Target	Satuan	Kebutuhan Anggaran/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Daerah Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan						
5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Mataram	6	Laporan	1,348,999,900.00	APBD	-
	SASARAN 4 Meningkatnya Kinerja Bappeda sebagai instansi perencanaan yagn SIIP (Smart, Integrity, Innovation, Professional)	Nilai evaluasi Implementasi SAKIP Bappeda Provinsi NTB	Mataram	A	-	-	APBD	-
5.1.01	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1. Persentase target indikator program yang tercapai	Mataram	98	%	31,768,021,983	APBD	-
		2. Persentase realisasi anggaran	Mataram	95	%		APBD	
		3. Indeks Kepuasan masyarakat	Mataram	Baik	Mutu Layanan		APBD	

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024					keterangan
			Lokasi	Target	Satuan	Kebutuhan Anggaran/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	Mataram	8	**dokumen**	234,078,000.00	APBD	-
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mataram	2	dokumen	48,928,800.00	APBD	-
5.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Mataram	1	Dokumen	28,639,400.00	APBD	-
5.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mataram	1	Dokumen	35,039,400.00	APBD	-
5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Mataram	1	dokumen	12,142,800.00	APBD	-

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024					keterangan
			Lokasi	Target	Satuan	Kebutuhan Anggaran/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Mataram	1	dokumen	10,307,800.00	APBD	-
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mataram	2	Laporan	99,019,800.00	APBD	-
5.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Mataram	6	**Jenis**	22,553,463,563.00	APBD	-
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN	Mataram	110	orang/bulan	22,482,767,883.00	APBD	-
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Mataram	157	dokumen	32,017,400.00	APBD	-
5.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Mataram	5	dokumen	5,190,300.00	APBD	-

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024					keterangan
			Lokasi	Target	Satuan	Kebutuhan Anggaran/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Mataram	4	dokumen	6,683,160.00	APBD	-
5.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mataram	3	Laporan	20,138,260.00	APBD	-
5.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Mataram	4	dokumen	6,666,560.00	APBD	-
5.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah**	Mataram	2	**laporan**	75,340,200.00	APBD	-
5.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Mataram	2	dokumen	75,340,200.00	APBD	-
5.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan**	Mataram	2	**dokumen**	223,599,100.00	APBD	-

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024					keterangan
			Lokasi	Target	Satuan	Kebutuhan Anggaran/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kepegawaian perangkat daerah						
5.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Mataram	1	dokumen	44,489,100.00	APBD	-
5.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Mataram	1	dokumen	-	-	-
5.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Mataram	25	Orang	179,110,000.00	APBD	-
5.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Mataram	50	Orang	-	-	-
5.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi Umum**	Mataram	1	**dokumen**	825,216,760.00	APBD	-

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024					keterangan
			Lokasi	Target	Satuan	Kebutuhan Anggaran/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Mataram	2	paket	87,182,000.00	APBD	-
5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Mataram	10	paket	45,598,000.00	APBD	-
5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Mataram	70	paket	307,500,000.00	APBD	-
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Mataram	2	paket	310,694,200.00	APBD	-
5.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Mataram	2	dokumen	74,242,560.00	APBD	-
5.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah**	Mataram	6	**Jenis**	2,400,682,000.00	APBD	-

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024					keterangan
			Lokasi	Target	Satuan	Kebutuhan Anggaran/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Mataram	2	unit	1,436,682,000.00	APBD	-
'5.01.01.1.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Mataram	6	Unut	-	-	-
5.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mataram	5	paket	226,000,000.00	APBD	-
5.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Mataram	15	unit	738,000,000.00	APBD	-
5.01.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Mataram	1	unit	-	-	-
5.01.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Mataram	1	unit	-	-	-

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024					keterangan
			Lokasi	Target	Satuan	Kebutuhan Anggaran/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jenis jasa pelayanan**	Mataram	4	**Jenis**	3,794,872,360.00	APBD	-
5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mataram	1	Laporan	63,362,300.00	APBD	-
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Mataram	1	Laporan	545,392,500.00	APBD	-
5.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Mataram	1	Laporan	50,955,060.00	APBD	-
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Mataram	1	Laporan	3,135,162,500.00	APBD	-

Kode	Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024					keterangan
			Lokasi	Target	Satuan	Kebutuhan Anggaran/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah**	Mataram	4	**Jenis**	1,660,770,000.00	APBD	-
5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Mataram	79	unit	645,610,000.00	APBD	-
5.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Mataram	50	unit	30,000,000.00	APBD	-
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Mataram	10	unit	214,580,000.00	APBD	-
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Mataram	1	unit	770,580,000.00	APBD	-
TOTAL						**50,223,609,483.00**		

2.2 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi

Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2024 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, sehingga Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mendukung Prioritas Provinsi yaitu berperan dalam dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

9. BAB V PENUTUP

3.1 Kaidah Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

3.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berdoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mataram, 28 Juli 2023
KEPALA BAPPEDA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 199403 1 153



Badan perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Berkomitmen Menjadi Lembaga Perencana Andal
Jl. Flamboyan No.2, Mataram, Kodepos 83126

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat



2025

RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

JL. Udayana No. 4 Mataram
www.investasi-perizinan.ntbprov.go.id

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,
AssalamuʼalaikumWarrahmatullahiWabarakatuh

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008. Rencana Kerja ini dibuat berdasarkan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029 dan masukan dari berbagai pihak baik secara langsung mapun tidak langsung.

Untuk itu kepada pihak-pihak yang terkait, kami sampaikan ucapan terima kasih atas partisipasinya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 dapat disusun sebagaimana mestinya.

Kami berharap Rencana Kerja (RENJA) yang merupakan dokumen perencanaan dan pedoman bagi kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilaksanakan secara konsisten dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintah, Pembangunan dan Pembina Kemasyarakatan

WassalamuʼalaikumWarrahmatullahiWabarakatuh

Mataram, Desember 2025

KEPALA DPM DAN PTSP
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

H. Irnadi Kusuma,S.STP.,ME
NIP. 19771231 199703 1 004

Daftar Isi

Kata Pengantar ..... **i**

Daftar Isi ..... **ii**

Bab. I Pendahuluan **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum 1

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 4

Bab. II Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu **6**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 9

2.3. Isu – Isu Penting PenyelenggaraanTugas dan Fungsi Perangkat Daerah 11

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah .....

Bab. III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah **18**

3.1. Telaahan Terhadap Kebijaksanaan Nasional 18

3.2. Tujuan Dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah 19

3.3. Progran Dan Kegiatan 20

BAB. IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah **23**

Bab. V Penutup 24

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB yang disusun dari Tahun 2025 sampai dengan 2029 adalah merupakan langkah nyata yang harus dilaksanakan untuk pencapaiaan visi, misi, tujuan dan sasaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB untuk 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Kerja (RENJA) dituangkan dalam program dan kegiatan yang merupakan satu kesatuan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB Tahun 2025 merupakan implementasi dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB guna menunjang kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkaitan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan mendorong terwujudnya iklim investasi yang kondusif serta penciptaan lapangan kerja yang untuk selanjutnya Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 dengan pagu dana indikatif sebesar **Rp. 9.142.982.372,-** dituangkan dalam DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB.

1.2 Dasar Hukum

Rencana Kerja DPM & PTSP Provinsi NTB disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
11. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
14. Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP);
15. Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
16. Permendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
17. Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTB Tahun 2005-2025;
18. Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana strategis perangkat daerah 2025-2029;
20. Renstra DPMPTSP Provinsi NTB Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Tersedianya rumusan program dan kegiatan yang menunjukkan skala prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB;
2. Tersedianya tolok ukur evaluasi penilaian kinerja Dinas;

3. Mengarahkan semua unsur kekuatan yang ada untuk pencapaiaan sasaran yang dituangkan pada Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) terkait dengan pengaturan serta penjelasan ringkas isi dari setiap BAB adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran RENJA Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB sebagai SKPD yang melaksanakan urusan wajib di bidang penanaman modal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melalui 4 program, 9 Kegiatan dan 28 sub kegiatan yang terdiri dari 3 program prioritas dengan 3 Kegiatan dan 7 sub kegiatan serta 1 program rutin dengan 6 kegiatan serta 21 sub kegiatan. Alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas urusan penanaman modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB sebesar Rp. 1.779.839.874,- dengan realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV Tahun 2024 mencapai Rp. 1.548.360.261 (86,99%)

2.1.1 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Indikator kinerja program pengembangan iklim penanaman modal adalah persentase peningkatan investor dengan target kinerja sebanyak 10%. Program ini memiliki 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Alokasi dana Tahun 2024 untuk program tersebut sebesar Rp. 705.659.500,- Realisasi sampai dengan triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp. 591.786.557,- (83,86%). Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan target kinerja adalah jumlah Dokumen sebanyak 1 Dokumen dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 455.659.500,- yang terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :
   1. Sub kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Failitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan indikator adalah Jumlah peraturan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif penanaman modal dengan target 1 dokumen. Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini adalah Rp. Rp. 455.659.500,- realisasi keuangan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp. 387.584.557,- (85,06%).

b. Kegiatan Pembuatan peta potensi investasi provinsi dengan target 1 Dokumen dengan dukungan anggaran Rp. 250.000.000,-.yang terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

1. Sub kegiatan penyusunan peta potensi investasi provinsi dengan indikator jumlah dokumen peta potensi investasi provinsi dengan target 1 dokumen. Dukungan anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 250.000.000,-. Realisasi Tahun 2024 sebesar Rp. 204.202.000,- (81,68%).

1.1.3 Program Pelayanan Penanaman Modal

Program pelayanan penanaman modal dilaksanakan dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, dengan indikator Persentase permohonan izin yang terlayani sesuai persyaratan sebesar 93%. Dukungan dana untuk program ini sebesar Rp. 86.793.374,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 85.047.470,- (97,99%). Adapun kegiatan yang dilaksanakan :

a. Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

   Target kinerja untuk kegiatan ini adalah jumlah dokumen layanan perizinan kewenangan daerah provinsi sebanyak 3 dokumen. Dukungan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 86.793.374,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 85.047.470,- (97,99%). Sub kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 2 antara lain :

   1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan Berbasis Sistim Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

      Target kinerja untuk sub kegiatan ini adalah Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik dengan target 3.500 pelaku usaha. Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 44.573.374,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 42.958.340,- (96,38%).
   2. Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Penanaman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

      Target kinerja dari sub kegiatan ini adalah Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah

Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha sebanyak 10 pelaku usaha dengan alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 42.220.000,- dengan realisasi mencapai Rp. 42.089.130- atau (99,69%).

1.1.4 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan dengan 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan. Target kinerja untuk program ini adalah persentase perusahaan yang taat LKPM dengan target daerah sebesar 60%. Dukungan dana untuk program ini adalah sebesar Rp. 987.387.000,- sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 871.526.234,- (88,27%). Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi. Target kinerja untuk kegiatan ini adalah jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM sebanyak 500 perusahaan. Dukungan dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 987.387.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 871.526.234,- (88,27%). Kegiatan ini menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Kegiatan ini melaksanakan 3 sub kegiatan yaitu :

    1. Pengawasan Penanaman Modal

       Target kinerja untuk sub kegiatan ini adalah Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan berusaha sebanyak 18 kegiatan usaha. Dukungan dana untuk sub kegiatan ini termasuk dana DAK Non Fisik sebesar Rp. 296.215.000,- dengan realisai anggaran sebesar Rp. 296.040.234,- (99,94%).
    2. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merelasasikan Kegiatan Usahanya

       Target kinerja untuk sub kegiatan ini Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya sebanyak 10 kegiatan usaha.

Dukungan dana untuk sub kegiatan ini termasuk juga dana DAK Non Fisik sebesar Rp. 148.107.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 52.356.800,- (35,35%)

3. Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha

   Target kinerja untuk sub kegiatan ini adalah Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko targetnya sebanyak 385 pelaku usaha dan alokasi anggaran sebesar Rp. 543.065.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 523.129.200,- atau (96,33%).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Investasi merupakan salah satu faktor pendorong untuk tumbuh dan berkembangnya perputaran roda perekonomian. Tujuan strategis dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTB adalah **"Terwujudnya Peningkatan Nilai Realisasi Investasi"** yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) yang disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025–2029.

Tujuan strategis ini merupakan komitmen Pemerintah Provinsi untuk tidak hanya mengejar pertumbuhan kuantitatif nilai realisasi investasi, tetapi juga memastikan kualitas investasi yang berdampak nyata, dan selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Iklim investasi yang dikembangkan diarahkan untuk menciptakan ekosistem usaha yang sehat, kompetitif, dan adaptif terhadap berbagai tantangan, termasuk transformasi digital, krisis iklim, serta dinamika geopolitik. Dalam kerangka ini, Pemerintah Provinsi memprioritaskan kebijakan yang mendukung kemudahan berusaha, kepastian hukum, stabilitas ekonomi, pemberian insentif yang tepat sasaran, serta penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai sebagai upaya strategis untuk mendorong peningkatan realisasi investasi.

Tujuan ini menjadi landasan bagi penyelarasan seluruh program dan kegiatan DPMPTSP agar fokus pada upaya percepatan dan peningkatan realisasi investasi, sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Melalui perumusan yang responsif, tujuan ini mengonversi beragam tantangan, peluang, dan isu strategis menjadi arah kebijakan yang terukur dan afirmatif, guna mewujudkan kondisi ideal berupa peningkatan nilai realisasi investasi yang signifikan pada akhir periode perencanaan.

Sasaran strategis merupakan penjabaran operasional dari tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun, disusun secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu (prinsip SMART). Sasaran ini berfungsi sebagai acuan dalam perencanaan program, pengukuran kinerja, serta evaluasi capaian DPMPTSP selama periode Renstra.

Dalam Renstra DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025–2029, ditetapkan dua sasaran strategis utama sebagai berikut:

1. **Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA;**
2. **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha.**

Sasaran pertama, **Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA**, menunjukkan orientasi utama Pemerintah Provinsi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan realisasi investasi secara berkelanjutan, baik dari sumber Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Sasaran ini akan dicapai melalui penguatan promosi investasi yang terarah dan pembentukan iklim usaha yang kompetitif.

Sasaran kedua, **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha**, merefleksikan komitmen untuk menciptakan ekosistem investasi yang kondusif melalui penyediaan pelayanan perizinan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Peningkatan kualitas layanan ini diharapkan dapat mempercepat dimulainya usaha dan mendukung iklim usaha yang sehat.

Dengan kedua sasaran strategis ini, seluruh program, kegiatan, dan indikator kinerja DPMPTSP difokuskan secara komprehensif pada upaya untuk: (1) mendorong masuknya investasi ke berbagai sektor strategis di wilayah NTB; dan (2) memperkuat kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan yang berkualitas.

Dari sasaran strategis **Meningkatnya nilai realisasi investasi PMDN dan PMA** ada 2 Indikator kinerja utama yang ingin dicapai yaitu **1. Peningkatan nilai realisasi investasi PMDN 2. Peningkatan nilai realisasi investasi PMA.**

Sedangkan dari sasaran yang ke dua yaitu **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan berusaha** ada indikator kinerja utama yaitu **Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan berusaha**

Nilai Realisasi Investasi menggambarkan peningkatan realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) /Penanaman Modal Asing (PMA) yang diukur bukan dari rencana investasi melainkan dari realisasi investasi tahun berjalan. Data realisasi investasi bersumber dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) baik PMDN maupun PMA yang berisi data kegiatan investasi yang direalisasikan perusahaan selama kurun waktu tertentu. Berdasarkan Peraturan Kepala BKPM RI No. 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman

Modal bahwa PMDN/PMA memiliki kewajiban untuk menyampaikan LKPM baik dalam tahap konstruksi maupun tahap produksi/komersial secara periodik per triwulan dan per semester.

Nilai Realisasi Investasi diperoleh dengan menghitung data realisasi investasi yang disampaikan oleh perusahaan baik perusahaan PMDN / PMA dalam tahun berjalan. Target realisasi investasi tahun 2024 sebesar Rp. 25.400.000.000.000,- Trilyun, maka kinerja Tahun 2024 tidak termasuk investasi di sektor Minyak dan Gas Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Investasi Porto Folio (Pasar Modal) dan Investasi Rumah Tangga.

Pada Tahun 2024, Nilai Realisasi Investasi Provinsi NTB sampai dengan berakhirnya Tahun 2024 sebesar Rp.**54.553.729.977.861**,- (214,77%).

Capaian Nilai Realisasi Investasi Provinsi NTB tahun 2024, sebagaimana tabel 1 berikut.

Tabel 2.2.1

Capaian Nilai Realisasi Investasi di Provinsi NTB Tahun 2024

Triwulan		Target	Realisasi	Kinerja
1	Triwulan I	6.350.000.000.000	8,848,699,863,383	139,35 %
2	Triwulan II	6.350.000.000.000	16,700,502,344,166	263,00 %
3	Triwulan III	6.350.000.000.000	11.400.304.162.111	179,53%
4	Triwulan IV	6.350.000.000.000	17.604.223.608.201	277,23%
Jumlah		**25.400.000.000.000**	**54.553.729.977.861**	214,77%

Realisasi investasi di Provinsi NTB Tahun 2024 sebagai berikut:

- Target Investasi Triwulan I tahun 2024 sebesar Rp. 6.350.000.000.000,- .dengan realisasi sebesar Rp. 8,848,699,863,383,- Kinerja triwulan I (139,35%)**.**
- Target Investasi Triwulan II tahun 2024 sebesar Rp. 6.350.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.700.502.344.166,- Kinerja triwulan II (263,00%)
- Target Investasi Triwulan III tahun 2024 sebesar Rp. 6.350.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.400.304.162.111,- Kinerja triwulan III (179,53%)

- Target Investasi Triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp. 6.350.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.604.223.608.201,- Kinerja triwulan IV(277,23%)

Nilai Realisasi investasi tersebut diatas dihitung berdasarkan nilai realisasi yang disampaikan melalui LKPM setiap triwulanan.

Pada Tahun 2024 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang diusung oleh Pj. Gubernur Provinsi NTB Tahun 2024-2026, Dimana tujuannya adalah **"Terwujudnya Realisasi Investasi pada Kawasan Strategis",** dengan indikator tujuan **Persentase realisasi investasi pada kawasan strategis.** Dengan sasaran **strategis Realisasi investasi dengan tambang dan tanpa tambang di NTB** dan 2 indikator **yaitu 1. Realisasi Investasi dengan Tambang di NTB 2. Realisasi Investasi tanpa Tambang di NTB**

Langkah-langkah yang telah dilakukan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB dalam meningkatkan realisasi Investasi sbb:

1. Menjaga iklim investasi tetap kondusif;
2. Melakukan promosi investasi secara tematik sesuai potensi daerah serta mengintensifkan koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota dan meningkatkan pelayanan perijinan investasi melalui sistem online dan memberikan insentif dan kemudahan kepada para investor;
4. Kegiatan pemantauan dilaksanakan terhadap Penanaman Modal sejak mendapatkan Perizinan Berusaha.
5. Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota. Badan Pengusaha KPBPB, atau Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya.

Upaya untuk meningkatkan :

1. Mengintensifkan pelaksanaan pemantauan/monitoring dan evaluasi ke perusahaan baik PMDN/PMA;
2. Melengkapi semua permohonan perizinan dengan melampirkan LKPM online
3. Melakukan pembinaan ke perusahan yang bermasalah
4. Menyampaikan nota pengingat kepada perusahaan untuk segera membuat laporan LKPM

Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala kendala yang terjadi antara lain :

1. Mengkoordinasikan peningkatan kondusifitas daerah;
2. Menyusun kebijakan penanaman modal guna menjamin kepastian hukum dalam berinvestasi;
3. Melaksanakan promosi potensi investasi secara terpadu;
4. Memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan;
5. Mengintensifkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Untuk lebih jelasnya keterkaitan isu dan masalah yang mendesak dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3.1
Identifikasi Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak Pembangunan Daerah
Tahun 2024

Bidang Urusan : Penanaman Modal

KETERKAITAN ISU DAN MASALAH MENDESAK	
ISU	**PERMASALAHAN**
1. Belum optimalnya koordinasi dengan/antar kabupaten/kota terkait pelaksanaan perizinan penanaman modal	Intensitas koordinasi pelaksanaan fungsi penanaman modal dan pelayanan perizinan dengan dan kab/kota belum berjalan optimal
2. Ekspektasi pelayanan perizinan belum didukung sepenuhnya dengan ketersediaan SDM dan sarana dan prasarana yang memadai	Kualitas SDM dan dukungan sarana dan prasarana penunjang layanan belum optimal
3. Ketersediaan database penanaman modal yang terbatas berpengaruh signifikan terhadap minat dan realisasi investasi	Kelengkapan data potensi sumber daya alam sebagai media promosi belum tersedia secara memadai
4. Tim teknis perangkat daerah terkait	Pelayanan perizinan terpadu satu pintu

masih berada di dinas/instansi masing-masing dan sistim pelayanan belum berbasis aplikasi	belum berjalan optimal karena tim teknis dari perangkat daerah terkait belum bekerja sepenuhnya di DPMPTSP
5. Capaian target realisasi investasi sulit terpenuhi karena rendahnya pembinaan dan kesadaran pelaku usaha menyamikan LKPM	Rendahnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap pemenuhan penyampaikan LKPM
6. Perumbuhan investasi daerah menjadi lambat karena belum tersediannya kegiatan konstruksi oleh pemegang izin	Banyak perusahaan yang sudah memegang izin usaha tapi belum memulai kegiatan konstruksi

BAB III
TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Identifikasi kebijakan nasional tahun 2025 yang mendasari Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) difokuskan pada percepatan investasi melalui reformasi perizinan digital dan strategi hilirisasi.

Arah kebijakan dan strategi nasional bidang penanaman modal tertuang dalam beberapa pilar utama yaitu menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya saing dan meningkatkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.

Identifikasi Kebijakan Nasional

No	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
1	Target Realisasi Investasi Nasional	Kementrian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI	
2	Reformasi Regulasi Perizinan (PP 28/2025)	Kementrian Dalam Negeri	
3	Hilirisasi dan Investasi Berkelanjutan	Kementrian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI	
4	Penguatan Kelembagaan dan SDM	Kementrian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI	

Adapun kebijakan yang dirumuskan DPMPTSP Provinsi NTB dalam rangka mendukung kebijakan nasional untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah :

1. Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

   Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman serta kepastian berinvestasi bagi pelaku usaha di daerah baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri.

2. Kebijakan Promosi Penanaman Modal

   Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan data potensi sumber daya alam yang akurat dan mutakhir dan penyebaran informasinya ditujukan kepada Masyarakat Dunia Usaha melalui media elektronika dan pameran di dalam negeri maupun di

luar negeri. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut diperlukan dukungan dari Dinas/Instansi terkait.

3. Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal

   Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan prima dalam hal pelaksanaan pengurusan perizinan dan non perizinan kepada dunia usaha.

   Untuk mewujudkan pelayanan prima tersebut memerlukan dukungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dukungan dan kesiapan Dinas/Instansi terkait.

4. Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

   Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan data dan informasi perkembangan realisasi investasi yang akurat, akuntable dan mutakhir. Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal . Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan agar kinerja dan permasalahan perusahaan dapat termonitor lebih dini untuk ditindaklanjuti. Selain itu kebijakan ini juga bertujuan untuk Koordinasi antar Dinas/Instansi terkait Penanaman Modal terwujud sehingga permasalahan Penanaman Modal dapat diketahui dan segera dapat ditindak lanjuti serta Penanaman modal dapat didukung oleh Masyarakat utamanya masyarakat yang berada disekitar lokasi kegiatan Penanaman Modal.

5. Kebijakan Pengelolaan data dan Informasi Penanaman Modal

   Kebijakan ini bertujuan untuk mensosialisasikan kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dan dunia usaha dan mewujudkan data dan informasi terkait pelayanan perizinan berbasis elektronik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan strategis yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

3.2.1. Tujuan strategis yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB pada tahun 2025 adalah **Terwujudnya Peningkatan nilai realisasi investasi** dengan indikator tujuan **Nilai Realisasi Investasi.**

3.2.2. Sasaran strategis yang dirumuskan untuk mencapai tujuan-tujuan strategis adalah 1. **Meningkatnya nilai realisasi investasi PMDN dan PMA dan 2. Indeks kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan berusaha.**

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai indikator Nilai Realisasi Investasi sesuai target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2025-2029 sebesar 61,09 Triliun maka dirumuskan Program dan Kegiatan yang terdiri dari dan Program Rutin yaitu program penunjang urusan pemerintah daerah dan Program Prioritas Adapun Program dan kegiatan yang dirumuskan DPMPTSP Provinsi NTB untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang urusan pemerintah daerah provinsi,** dengan 7 kegiatan dan 21 sub kegiatan yaitu :
   a. Perencanaan, pengganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
      1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
      2) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
      3) Evaluasi kinerja perangkat daerah
   b. Administrasi keuangan perangkat daerah
      1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
      2) Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
      3) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
   c. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
      1) Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD
   d. Administrasi Kepegawaian pada perangkat daerah
      1) Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai
   e. Administrasi umum perangkat daerah
      1) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
      2) Penyediaan bahan logistik kantor
      3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
      4) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
      5) Fasilitasi kunjungan tamu
      6) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
   f. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
      1) Penyediaan jasa surat menyurat
      2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
      3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
      4) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

g. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
    1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
    2) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
    3) Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

2. **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal,** dengan 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan yaitu:
    a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi
        1) Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
        2) Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi
    b. Pembuatan peta potensi investasi provinsi
        1) Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)
        2) Penyusunan peta potensi investasi provinsi

3. **Program Pelayanan Penanaman Modal,** dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :
    a. Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi.
        1) Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

4. **Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal,** dengan 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan yaitu :
    a. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi
        1) Pengawasan Penanaman Modal
        2) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
        3) Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

5. **Program pengelolaan data dan informasi penanaman modal,** dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :
   a. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi.
      1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB mengusulkan rancangan rencana kerja program/kegiatan rutin dan prioritas untuk menunjang sasaran utama perencanaan pembangunan dalam rangka pencapaian indikator Nilai Realisasi Investasi sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RENSTRA 2025-2029.

Rencana program/kegiatan yang dana indikatifnya berasal dari APBD, untuk tahun 2025 total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 9.142.982.372,- terdiri dari program penunjang urusan daerah provinsi sebesar Rp. 7.936.978.160,- dan program prioritas sebesar Rp. 1.206.004.212,- dengan rincian pendanaan sebagai berikut:

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp.	7.936.978.160,00
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp.	824.394.012,00
3.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp.	-
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp.	38.813.000,00
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp.	285.646.000,00
6.	Program Pengelolaan Data Dan Sistim Informasi Penanaman Modal	Rp.	57.151.200,00

BAB V
P E N U T U P

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB wajib menerapkan tiga pilar dari prinsip ***Good Governance*** yang meliputi transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaiaan tujuan akhir sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) DPMPTSP Provinsi NTB Tahun 2025-2029.

Rencana Kinerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan penjabaran tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB dari Tahun 2025-2029 yang disertai dengan rencana kerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Kerja (RENJA) merupakan bahan dasar Penyusunan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta RKA DPMPTSP Provinsi NTB yang merupakan dasar penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2026

Demikian Rencana Kinerja Tahun 2025 ini disusun untuk dapat menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada DPM-PTSP Provinsi NTB Tahun 2025.

Mataram, Desember 2025

KEPALA DPM DAN PTSP
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

H. Irnadi Kusuma,S.STP, ME
NIP. 19771231 199703 1 004